

<http://www.mesias.8k.com/konspirasi.htm>

Konspirasi dan Genosida:

## **Kemunculan Orde Baru dan Pembunuhan Massal<sup>1</sup>**

OLEH BONNIE TRIYANA<sup>2</sup>

Gestapu 1965: Awal Sebuah Malapetaka

Pada hari kamis malam tanggal 30 September 1965, sekelompok pasukan yang terdiri dari berbagai kesatuan Angkatan Darat bergerak menuju kediaman 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Hanya satu tujuan mereka, membawa ketujuh orang jenderal tersebut hidup atau mati ke hadapan Presiden Soekarno. Pada kenyataannya, mereka yang diculik tak pernah dihadapkan kepada Soekarno. Dalam aksinya, gerakan itu hanya berhasil menculik 6 jenderal saja. Keenam jenderal tersebut ialah Letjen. Ahmad Yani, Mayjen. Suprpto, Mayjen. S. Parman, Mayjen. Haryono M.T., Brigjen. D.I Pandjaitan, Brigjen. Sutojo Siswomihardjo dan Lettu. Piere Tendean ajudan Jenderal Nasution. Nasution sendiri berhasil meloloskan diri dengan melompat ke rumah Duta Besar Irak yang terletak persis disebelah kediamannya.

Di pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah susunan Dewan Revolusi diumumkan melalui corong Radio Republik Indonesia (RRI). Pengumuman itu memuat pernyataan bahwa sebuah gerakan yang terdiri dari pasukan bawahan Angkatan Darat telah menyelamatkan Presiden Soekarno dari aksi coup d'état. Menurut mereka, coup d'état ini sejatinya akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal dan CIA pada tanggal 5 Oktober 1965, bertepatan dengan hari ulang tahun ABRI yang ke-20.

Empat hari kemudian, jenazah keenam jenderal dan satu orang letnan itu diketemukan di sebuah sumur yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Di sela-sela acara penggalian korban, Soeharto memberikan pernyataan bahwa pembunuhan ini dilakukan oleh aktivis PKI didukung oleh Angkatan Udara.

Sehari setelah penemuan jenazah, koran-koran afiliasi Angkatan Darat mengekspose foto-foto jenazah tersebut. Mereka mengabarkan bahwa para jenderal tersebut mengalami siksaan di luar prikemanusiaan sebelum diakhiri hidupnya.<sup>3</sup> Pemakaman korban dilakukan secara besar-besaran pada tanggal 5 Oktober 1965. Nasution memberikan pidato bernada emosional, ia sendiri kehilangan seorang putrinya, Ade Irma Nasution. Upacara pemakaman itu berlangsung tanpa dihadiri Soekarno. Ketidakhadirannya itu menimbulkan beragam penafsiran.<sup>4</sup>

Pemuatan foto-foto jenazah korban dan berita penyiksaan yang dilakukan memberikan sumbangan besar terhadap lahirnya histeria massa anti PKI. Di sana-sini orang-orang tak habis-habisnya membicarakan penyiksaan yang dilakukan oleh Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Perempuan-perempuan Gerwani itu diisukan menculik mata jenderal dan memotong kemaluannya.<sup>5</sup>

Segera setelah media massa Ibukota yang berafiliasi dengan Angkatan Darat melansir berita tersebut selama sehari-hari, dimulailah suatu pengganyangan besar-besaran pada PKI. Di Jakarta, Kantor pusat PKI yang belum selesai dibangun

diluluhlantakan. Beberapa orang pemimpin PKI ditangkap. Tak hanya sampai di situ, anggota PKI pun mengalami sasaran.

Secara de facto, sejak tanggal 1 Oktober 1965, Soeharto merupakan pemegang kekuasaan. Soekarno sendiri secara bertahap digeser dari percaturan politik, lebih dalam lagi ia layaknya seorang kapten dalam sebuah team sepak bola yang tak pernah menerima bola untuk digiring.

Strategi dan taktik Soeharto dalam melakukan kontra aksi Gestapu 1965 sangat efektif dan mematikan<sup>6</sup>. Dalam waktu satu hari ia berhasil membuat gerakan perwira-perwira „maju“ itu kocar-kacir.

Sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mengeluarkan surat perintah bernomor 1/3/1966 yang memuat tentang pembubaran serta pelarangan PKI dan organisasi onderbouwnya di Indonesia. Inilah coup d'état sesungguhnya. Bersamaan ini, dimulai drama malapetaka kemanusiaan di Indonesia.

Ganjang Komunis!: Pembunuhan Massal serta Penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Daerah.

Di daerah-daerah, kampanye pengganyangan PKI diwujudkan dengan tindakan penculikan dan pembunuhan secara massal terhadap anggota dan simpatisan PKI. Semua anggota organisasi massa yang disinyalir memiliki hubungan dengan PKI pun tak luput mengalami hal serupa.

Pembantaian dilakukan kadang-kadang oleh tentara, kadang-kadang oleh sipil, orang-orang Islam atau lainnya.<sup>7</sup> Di sini, tentara merupakan pendukung utama. Masyarakat merupakan unsur korban propagadis Angkatan Darat yang secara nyata memiliki konflik dengan PKI. Di beberapa tempat memang terjadi konflik antara PKI dan kelompok lain di kalangan masyarakat. Di Klaten misalnya, aksi pembantaian massal menjadi ajang balas dendam musuh-musuh PKI yang berkali-kali melakukan aksi sepihak penyerobotan lahan-lahan milik tuan tanah di sana. Aksi sepihak ini berakibat bagi kemunculan benih-benih konflik di masyarakat. Pasca Gestapu 1965, PKI menjadi sasaran utama kebencian yang terpendam sekian lama.<sup>8</sup>

Apa yang terjadi di Klaten tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Jombang dan Kediri. Namun kedua daerah ini memiliki sejarah konflik yang sangat kronis. Kaum komunis menuduh umat Islam telah mengobarkan „Jihad“ untuk membunuh orang komunis dan mempertahankan tanah miliknya atas nama Allah, sedangkan umat Muslim menuduh PKI dan Barisan Tani Indonesia (BTI) melakukan penghinaan terhadap agama Islam.<sup>9</sup> Saling tuduh ini merupakan manifestasi konflik kepentingan diantara dua kelompok.

Bagi PKI, tanah merupakan komoditi politik-ekonomi yang dapat dijadikan alasan untuk menyerang kaum Muslim sebagai penguasa tanah mayoritas. Sedangkan kaum Muslim menggunakan isu ideologis atheis terhadap PKI untuk menyerang balik. Dua hal ini memang berujung pada kepentingan ekonomis. Namun, dengan keyakinannya masing-masing, kedua kelompok ini berhasil membangun sebuah opini yang mengarahkan pengikutnya pada titik temu konflik berkepanjangan. Keduanya sama-sama ngotot.

Berbeda dengan di Jombang, Kediri dan Klaten, di Purwodadi, pembunuhan massal lebih tepat dikatakan sebagai bagian dari genosida yang dilakukan oleh militer terhadap massa PKI. Di daerah lain yang menjadi ladang pembantaian, tentara hanya bermain sebagai sponsor di belakang kelompok agama dan sipil. Sementara di Purwodadi, tentara memegang peranan aktif dalam pembunuhan massal.

Purwodadi ialah sebuah kota kecil yang terletak 60 Km di sebelah Tenggara Semarang. Purwodadi ialah ibukota Kabupaten Grobogan. Daerah ini merupakan salah satu basis komunis terbesar di Jawa Tengah. Amir Syarifudin, tokoh komunis yang terlibat dalam Madiun Affairs tahun 1948, pun tertangkap di daerah ini.

Kasus Purwodadi sempat mencuat ketika pada tahun 1969, H.J.C Princen, seorang aktivis kemanusiaan, berkunjung ke Purwodadi. Dengan disertai Henk Kolb dari Harian Haagsche Courant dan E. Van Caspel<sup>10</sup>, Princen meninjau secara langsung keabsahan berita pembunuhan massal yang didengarnya dari seorang pastor. Adalah Romo Wignyosumarto yang kali pertama menyampaikan adanya pembunuhan besar-besaran ini. Romo Sumarto melaporkan berita tersebut pada Princen setelah ia mendengarkan pengakuan dari seorang anggota Pertahanan Rakyat (Hanra) yang turut dalam pembunuhan massal.<sup>11</sup>

Digunakannya unsur Hanra dalam pembunuhan massal sangat dimungkinkan karena lebih mudah diorganisir dan dikendalikan secara langsung oleh tentara setempat. tak terjadinya konflik horisontal di Purwodadi menyebabkan militer harus turun tangan langsung untuk melakukan pembunuhan massal. Di Jombang, Kediri dan Klaten, tentara hanya mensuplai senjata bagi kelompok-kelompok sipil. Selanjutnya mereka hanya memberikan dukungan-dukungan baik dalam penangkapan maupun dalam hal penahanan Anggota dan Simpatisan PKI.

Pembunuhan dan penangkapan Anggota dan Simpatisan PKI di Purwodadi dibagi kedalam dua periode. Pertama, ialah penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan tahun 1965. pada peristiwa ini ukuran penangkapan ialah jelas, artinya militer hanya menangkap mereka yang memiliki indikasi anggota PKI aktif beserta anggota-anggota organisasi onderbouw PKI.

Penangkapan periode pertama lebih memperlihatkan bagaimana militer melakukan strategi penghancuran secara sistemik terhadap PKI. Organisasi yang memiliki hubungan dengan PKI atau apapun itu sepanjang berbau komunis dapat dipastikan ditangkap. Ini memang cara yang paling efektif kendati jumlah korban tentu sangat banyak.

Dengan cara ini penguasa Orde Baru dapat meminimalisir ancaman komunisme. Perang terhadap penganut Marxisme ini memang lebih rumit dari sekedar anti-komunisme.<sup>12</sup> Dari sudut pandang manapun terlihat jelas jika Orde Baru berusaha membangun sebuah konstruk kekuasaan tanpa aroma komunisme sedikitpun.

Kedua, penangkapan dan pembunuhan massal yang dilakukan pada tahun 1968. Pada periode ini, ukuran penangkapan sangat tidak jelas, serba semrawut dan serba asal-asalan. Hanya karena menjadi anggota Partai Nasional Indonesia faksi Ali Sastroamidjojo- Surachman militer sudah dapat menangkapnya. Penangkapan ini dikenal sebagai penangkapan terhadap Soekarno Sentris atau dikenal sebagai SS.<sup>13</sup>

Operasi penangkapan pada tahun 1968 ini dilakukan di bawah Komandan Komando Distrik (Kodim) 0717 Purwodadi dengan dibantu Batalyon 404 dan 409. Operasi ini diberi nama Operasi Kikis. Melalui operasi inilah seluruh anasi-anasir kekuatan komunis dan Orde Lama (SS) ditangkap.

Tak jelas apa motivasi penangkapan terhadap orang-orang SS ini. Namun ini dapat dipahami sebagai usaha untuk mengikis kekuatan Orde Lama. Di pusat kekuasaan, Soeharto sedang berusaha untuk mengukuhkan kekuasaannya. Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 1971, kekuatan anti Orde Baru tentu menjadi penghalang bagi kekuasaannya.

Pada perkembangan selanjutnya, orang-orang yang dianggap komunis ini didesain sebagai massa mengambang atau Floating Mass. Mereka tak dibiarkan memasuki sebuah organisasi politik tertentu selama kurun waktu lima tahun menjelang Pemilihan Umum (Pemilu),<sup>14</sup> namun suara mereka dapat dipastikan disalurkan melalui Golongan Karya (Golkar). Konsep massa mengambang sendiri ialah sebuah konsep yang diajukan oleh Mayjen Widodo, Panglima Kodam VII/Diponegoro Jawa Tengah. Lalu konsep ini dikembangkan oleh pemikir dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), sebuah lembaga think-tanks Orde Baru yang berdiri pada tahun 1971 atas sponsor Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardani, dua orang jenderal yang memiliki hubungan spesial dengan Soeharto.<sup>15</sup>

Tak berlebihan jika kasus di Purwodadi dapat dikategorikan ke dalam tindakan Genosida. Genocide menurut Helen Fein<sup>16</sup> adalah suatu strategi berupa pembunuhan, bukan semata-mata karena benci atau dendam, terhadap sekelompok orang yang bersifat ras, suku, dan politik untuk meniadakan ancaman dari kelompok itu terhadap Keabsahan Kekuasaan para pembunuh.

Penangkapan dan pembunuhan massal pada tahun 1968 ini banyak menimbulkan korban. Banyak mereka yang tak mengetahui apapun tentang politik ditangkap bahkan dibunuh. Contohnya seperti apa yang diungkapkan oleh Bapak Sp.:

Saya hanya pemain sandiwara Ketoprak pedesaan. Namun, saya ditangkap karena saya dianggap memiliki hubungan dengan Lekra. Oleh karena itu saya sempat mendekam di Penjara Nusa Kambangan selama 3 tahun. Di sebuah Kamp di Pati, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya anggota PKI<sup>17</sup>

Ini membuktikan ekses negatif pada sebuah operasi militer. Hal serupa pernah diungkapkan oleh Ali Murtopo, ia mengatakan jatuhnya korban pembunuhan massal di Purwodadi ialah sebuah konsekuensi dalam sebuah operasi militer.<sup>18</sup>

Operasi militer merupakan salah satu usaha yang digunakan tentara Indonesia dalam mengontrol, memperkukuh dan memberikan sebuah ukuran kesetiaan bagi pemerintah pusat. Operasi ini kerap dilakukan dalam rangka menumpas gerakan perlawanan daerah terhadap pusat. Penguasa Pusat (Baca: Jakarta) memposisikan sebagai kosmis kekuasaan Raja sementara daerah ditempatkan sebagai Kawula. Hal ini merupakan hasil dari interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional.<sup>19</sup> Jelas sebuah operasi militer memiliki arti strategis dalam menjaga kekuasaan pusat atas kekayaan daerahnya.

Kebijakan operasi militer di Purwodadi tidak terlepas dari peranan komandan Kodim 0717 sendiri sebagai penguasa militer setempat. Letkol. Tedjo Suwarno, Komandan Kodim dikenal sebagai orang yang keras dan berambisi<sup>20</sup>. Atas perintahnya ratusan orang ditangkap selama tahun 1968.

Seorang saksi bernama Bapak Wt bercerita perihal penangkapan besar-besaran pada tahun 1968. Tahanan itu ditempatkan di sebuah Kamp di Kuwu, desa kecil yang terletak 25 Km di Selatan Purwodadi: Saya ditempatkan di sebuah kamp di Kuwu. Setiap sore datang sekitar dua ratus orang tahanan. Namun, di pagi hari, dua ratus orang itu telah dibawa oleh aparat. Yang tersisa hanya saya dan dua teman saya<sup>21</sup> di kemudian hari ia mendengar kabar bahwa ratusan orang itu di bunuh di daerah Monggot atau di daerah lainnya di sekitar Kabupaten Grobongan. Bagi mereka yang kaya dan memiliki hubungan khusus dengan para perwira militer, sogok atau suap kerap kali terjadi demi menyelamatkan suami, anak atau sanak saudaranya yang ditahan militer Purwodadi.

Tak heran jika pada waktu itu banyak perwira-perwira yang menumpuk kekayaan hasil dari uang sogok kerabat tahanan tahanan. Di waktu selanjutnya sudah menjadi kebiasaan jika seorang penguasa militer merupakan pelindung yang ampuh untuk apapun. Seorang pengusaha misalnya, ia dapat bebas berdagang di sebuah daerah dengan meminta backing pada penguasa militer setempat<sup>22</sup>. bukan isapan jempol jika penguasa militer di daerah memiliki pengaruh besar.

Figur kepemimpinan militer di daerah seperti halnya di Purwodadi memang memiliki pengaruh yang cukup kuat. Di masa Orde Baru, sudah menjadi kebiasaan jika seorang Komandan Kodim (Dandim) diangkat menjadi Bupati. Ini dilakukan atas pertimbangan kemanan dan realisasi dari Dwi Fungsi ABRI.

Fenomena tersebut dikenal sebagai konsep kekaryaan ABRI. Konsep ini diperuntukan bagi perwira militer yang karirnya mentok atau tak lagi memiliki kesempatan menapaki jenjang karir yang lebih tinggi. Para perwira ini biasanya diplot menjadi kepala daerah baik di tingkat I atau II. Orde Baru menciptakan kategori daerah-daerah tertentu bagi penempatan perwira-perwira mentok ini.<sup>23</sup>

Pada masa Orde Baru, Penguasa militer di daerah, dari Tk I hingga II atau bahkan tingkat Komando Rayon Militer (Koramil) berusaha dengan keras menciptakan suasana aman dan stabil. Maka ukuran kestabilan keamanan pasca Gestapu 1965 ialah dengan mencegah timbulnya kembali kekuatan komunisme di Indonesia.<sup>24</sup>

Ada kesan dengan menahan sebanyak-banyaknya massa PKI merupakan prestasi tersendiri. Dengan cara ini kondisi sosial-politik setempat dinyatakan stabil dan terkendali. Pemerintah Orde Baru menganggap komunisme ialah musuh yang paling utama dalam pembangunan. Selama hampir 32 tahun, bahaya laten komunis di-dengung-dengungkan sebagai sebuah momok yang menakutkan. Ini ditunjukkan dengan cara memutar film Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G.30.S/PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Noor setiap tahunnya.

Kekhawatiran yang teramat sangat pada komunis (komunisto phobia) memang terlihat begitu jelas inheren pada masa Orde Baru. tak hanya itu, pemerintah Orde Baru tak segan-segan melemparkan stigma PKI pada organisasi-organisasi yang

berlawanan dengan kebijakannya. Kasus 27 Juli 1996 memperlihatkan secara jelas usaha Orde Baru dalam membangkitkan ketakutan masyarakat akan komunisme.<sup>25</sup>

Penahanan ribuan anggota dan simpatisan PKI selama kurun waktu 1965-1980-an (dalam beberapa kasus bahkan hingga masa reformasi tiba) juga bagian dari usaha Orde Baru mencegah penularan komunisme pada masyarakat. Tahanan politik ini dibuang di Pulau Buru, Nusa Kambangan dan penjara-penjara di tiap daerah. Tak ada itikad dari Orde Baru untuk melepaskannya. Segera setelah mendapatkan tekanan internasional, khususnya Amnesti Internasional, pemerintah Orde Baru melepaskan beberapa tahanan politik dengan klasifikasi A, B dan C.<sup>26</sup>

Pemerintah memiliki berbagai dalil dalam aksi penahanan besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI. Pada tahun 1975, Pangkopkamtib Laksamana Sudomo mengatakan bahwa pelepasan tahanan politik di saat itu merupakan ancaman bagi kestabilan nasional.<sup>27</sup>

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Sudomo, Letkol. Tedjo Suwarno di dalam sebuah kunjungan wartawan Ibu Kota ke Kamp-kamp di Purwodadi mengatakan bahwa bila mereka dikembalikan ke masyarakat akan menimbulkan problem tersendiri dan masyarakat akan berontak.<sup>28</sup> Di pihak lain, Bapak S mengatakan bahwa setelah penangkapan atas dirinya, keluarganya mengalami penderitaan. Ia sebagai kepala keluarga tak lagi dapat menghidupi istri dan anak-anaknya.<sup>29</sup> Istrinya terpaksa berjualan nasi di depan Stasiun Purwodadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan mengirim makanan sekedarnya pada Bapak S. yang saat itu di dalam Kamp di Purwodadi.

Penahanan atas anggota dan simpatisan PKI tidak saja menyisakan trauma mendalam<sup>30</sup> bagi mereka namun keluarganya juga harus menghadapi kenyataan hidup yang serba kekurangan. Di Purwodadi banyak keluarga yang hidup dalam kesederhanaan akibat penahanan dan pembunuhan terhadap anggota keluarganya yang dituduh anggota maupun simpatisan PKI. Bahkan di sebuah desa di Purwodadi, dikenal sebagai “kampung janda” karena suami-suami mereka dicituk oleh militer.

Hingga kini tak dapat dipastikan secara pasti berapa jumlah korban yang meninggal dalam peristiwa pembunuhan massal di Purwodadi dalam kurun waktu tahun 1965-1968. H.J.C Princen mengatakan bahwa korban tewas ada sekitar 850 s/d 1000 orang. Sementara itu menurut perhitungan Maskun Iskandar, seorang wartawan harian Indonesia Raya, korban berkisar 6.000 jiwa.

Berapapun jumlahnya, satu nyawa manusia yang hilang merupakan dosa yang tak terampuni. Maka penegakan hukum ialah jawabannya untuk menghindari perulangan peristiwa serupa. Litsus dan Label KTP: Kontrol atas Mantan Tahanan Politik

Penderitaan tidak berakhir begitu saja. Setelah para tahanan politik pulang dari pembuangan di pulau Buru, Nusa Kambangan atau penjara lainnya, aparat militer masih saja melakukan pengawasan pada diri mereka dan keluarganya. Bapak Rk, seorang tahanan politik jebolan Pulau Buru menceritakan bagaimana dirinya diintimidasi oleh aparat setelah pulang dari Pulau Buru pada tahun 1979.

Sepulanginya dari Pulau Buru, saya membuka praktek sebagai mantri. Obat-obatan yang saya bawa dari Pulau Buru saya gunakan untuk mengobati masyarakat yang membutuhkan. Namun karena hal tersebut, Koramil mendatangi saya dan memanggil saya untuk diinterogasi<sup>-31</sup>

Pengawasan yang extra ketat ini memang diberlakukan bagi mantan tahanan politik. Salah satu cara untuk memantau gerak gerik mereka pemerintah Orde Baru menetapkan untuk memberi tanda khusus Ex Tapol (ET) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) para mantan tahanan politik.

Tindakan lainnya, selama Orde Baru, keluarga mantan tahanan politik tidak diperkenankan memasuki dunia politik atau menjadi pegawai negeri. Untuk yang satu ini pemerintah menetapkan Penelitian Khusus (Litsus) kepada calon pegawai negeri.

Seorang mantan tahanan politik pernah mengatakan sebuah lelucon bahwa label ET dalam KTP-nya bukan berarti Ex-Tapol tapi tidak lain adalah “elek terus” (Indonesia: Jelek Terus).

Menyitir apa yang pernah dikatakan oleh Ben Anderson bahwa kekuasaan Orde Baru dibangun diatas tumpukan mayat. Namun sejarah membuktikan bahwa atas nama apapun, sebuah orde yang dibangun di atas penderitaan rakyatnya pasti akan tumbang dengan sendirinya.\*

- 
1. Makalah ini dibuat dalam rangka diskusi yang diselenggarakan Australian Consortium for In-Country Indonesian Studies (ACICIS) di Yogyakarta 17 Oktober 2002.
  2. Penulis adalah Koordinator Kajian dan Diskusi pada Masyarakat Indonesia Sadar Sejarah (Mesiass) dan Mahasiswa Sejarah Universitas Diponegoro, Semarang. Kini sedang menulis skripsi tentang pembantaian massal anggota dan simpatisan PKI di Purwodadi.
  3. Bandingkan dengan Hermawan Sulistyio dalam Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian yang Terlupakan 1965-1966 (Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer, 2000) Hal. 8
  4. Meskipun mungkin karena pertimbangan keamanan, ketidakhadiran itu tetap dianggap sebagai skandal. Lihat Hermawan Sulistyio dalam Ibid..hal. 8. Mengutip dari John Hughes dalam Indonesian Upheaval (New York: David McKay, 1967) hal. 137-138.
  5. Untuk lebih lengkap, periksa Saskia Eleonora Wieringa dalam Penghancuran Gerakan Wanita di Indonesia (Jakarta: Kalyanamitra dan Garba Budaya, 1999) Hal. 498.
  6. Dalam pledoinya Kolonel A. Latief menceritakan bahwa sesungguhnya Soeharto telah mengetahui bahwa akan ada sebuah gerakan yang akan menangkap Dewan Jenderal. Lihat Kolonel A. Latief dalam Pledoi Kolonel A.Latief Soeharto Terlibat G.30.S (Jakarta: ISAI, 2000), hal. 129.

- 7 John D. Legge dalam Sukarno Biografi Politik (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) Hal. 457.
- 8 Untuk diskusi lebih lanjut lihat Kata Pengantar Soegijanto Padmo pada Aminudin Kasdi dalam Kaum Merah Menjarah (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2001)
- 9 Sedari awal semangat agama masuk dalam konflik tanah. Kelompok NU menuduh PKI dan BTI telah menyerang sekolah-sekolah agama dan menghina Islam, sementara kaum Muslim dituduh telah mendorong pengikutnya untuk mengganyang “kaum atheis” dan mempertahankan milik mereka atas nama Allah. Untuk lebih lanjut lihat Hermawan Sulistyo dalam op.cit., hal. 146 mengutip dari Rex Mortimer dalam The Indonesian Communist Party and Landreform, 1959-1965 (Clayton, Victoria: Center of Southeast Studies, Monash University, 1972), hal. 48.
- 10 Harian Sinar Harapan, edisi 3 Maret 1969.
- 11 A Javanese Catholic priest, Father Sumarto, had pieced together an account of the massacre from the confession of conscience stricken Catholic members of the Civil Defense Corp, who had been forced to take for it. Untuk diskusi lebih lanjut periksa Brian May dalam The Indonesian Tragedy (Singapore: Graham Brash (Pte) Ltd, 1978), hal. 205
- 12 Memorandum Intelegen CIA, “Indonesian Army Attitudes toward Communism” Directorate of Intelligence, Office Current Intelligence, 22 November 1965, case #88-119, Doc. 119, butir 1.
- 13 Wawancara dengan Bapak S., seorang Sekretaris Sarekat Buruh Kereta Api (SBKA) Stasiun Purwodadi. SBKA, menurut versi Orde Baru, adalah onderbouw PKI. Bapak S., mengatakan bahwa penangkapan dan pembunuhan yang paling besar justru terjadi pada tahun 1968. Tentara dapat menangkap orang-orang hanya karena menjadi anggota PNI Ali Sastroamidjojo & Surachman (PNI-ASU) atau motif dendam lainnya.
- 14 General Widodo maintained that party activity in the villages disrupted the hard work and unity necessary for development. Far better to let the population “float” without party contact in the five year period during elections”.diskusi lebih lanjut lihat Hamis McDonald dalam Suharto’s Indonesia (Blackburn, Victoria: Fontana Books, 1980), hal. 109.
- 15 Lihat Dewi Fortuna Anwar, Policy Advisory Institutions: “Think & Tanks” “ dalam Richard W. Baker (ed) et.al., Indonesia The Challenge of Change (Pasar Panjang, Singapore: ISEAS and KITLV, 1999), hal. 237.
- 16 Helen Fein, Revolutionary and Antirevolutionary Genocides: A Comparison of State Murders in Democratic Kampuchea, 1975 to 1979, and In Indonesia. 1965 to 1966, dalam Contemporary Studies of Society and History, Vol. 35, No. 4, October 1993, Hlm. 813. Dikutip dari Hermawan Sulistyo dalam loc.cit..Hal. 245-246
- 17 Wawancara dengan Bapak Sp.



- 18 Harian Sinar Harapan, Selasa 11 Maret 1969.
- 19 Interdependensi antara kekayaan dan politik dalam masyarakat tradisional menimbulkan dua hal. Pertama, negara dan raja harus mengontrol harta kekayaan kawula guna menghindarkan ancaman politis dari mereka. Kedua, kawula yang secara politik dan fisik berada di bawah harus dieksploitasi sedemikian rupa. Lebih lanjut periksa Onghokham dalam Rakyat dan Negara (Jakarta: LP3ES dan Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 103.
- 20 "Pak Tedjo itu kelihatannya berambisi menjadi Bupati Grobogan. Ia dulu sering berceramah kemana-mana tentang Pancasila. Ia memang terkenal galak". Wawancara dengan Bapak A
- 21 Wawancara dengan Bapak Wt
- 22 Dalam banyak hal, sipil tampaknya lebih tergantung pada militer baik secara politik, kekuasaan maupun ekonomi, ketimbang sebaliknya. Untuk hal ini lihat Indria Samego dalam TNI di Era Perubahan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999), hal. 34. Juga lihat Harold Crouch dalam General and Business in Indonesia, Pacific Affairs, 48, 4, 1975/76.
- 23 Replika selama masa Orde Baru, dengan munculnya kriteria daerah A, B dan C, secara politik sangat menguntungkan ABRI, terutama dalam penempatan mengenai kepala daerah tingkat I dan II. Kriteria A merupakan daerah yang sangat rawan secara politik, sehingga jabatan politik (Bupati maupun Gubernur) harus dipegang oleh orang militer. Kriteria B setengah rawan, dapat diisi oleh sipil maupun militer, tapi kenyataannya banyak diisi oleh militer. Sedangkan kriteria C adalah kriteria daerah aman, secara konsep dapat diisi oleh sipil tetapi kenyataannya justru sering diisi pula oleh militer. Untuk diskusi lebih lanjut lihat M. Riefqi Muna dalam Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi: Mengukur Dua Kategori Ganda. Dimuat dalam Rizal Sukma et.al., dalam Hubungan Sipil & V Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia (Jakarta : CSIS, 1999), hal. 50.
- 24 Kebangkitan komunis tidak saja dikhawatirkan akan datang dari dalam negeri pun dari luar negeri. Pada tahun 1971, ketika kampanye Pemilu sedang dilakukan, beberapa orang diplomat Uni Soviet berkunjung ke Jawa Tengah. Panglima Kodam VII/Diponegoro di Semarang hampir-hampir melarang kunjungan mereka ke daerahnya. Hal tersebut ditanggapi oleh menteri luar negeri dengan mengeluarkan larang kunjungan ke daerah-daerah bagi diplomat negeri komunis itu. Untuk hal ini periksa Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hal. 376.
- 25 Pada waktu itu, Kasospol ABRI, Letjen. Syarwan Hamid melekatkan label komunis pada Partai Rakyat Demokratik (PRD). PRD dituduh sebagai dalam di balik kerusuhan tersebut. Hingga kini, kasus pengrusakan terhadap markas PDI (sekarang PDI-Perjuangan) itu belum tuntas.
- 26 Kategori A diberikan pada mereka yang dianggap terlibat secara langsung pada peristiwa Gestapu 1965, kategori B berarti mereka yang dianggap memberikan dukungan pada Gestapu 1965 dan kategori C dilabelkan pada mereka yang mengetahui peristiwa Gestapu secara langsung atau tidak. Pada bulan Septem-

ber 1971, Jenderal Sugiharto mengatakan pada wartawan bahwa jumlah tahanan politik kategori A ialah 5.000 orang, untuk kategori B menurut Pangkopkamtib sekitar 29. 470 dan kategori C menurut Jenderal Sudharmono ada sekitar 25.000 orang tahanan. Untuk perihal ini silahkan lihat Amnesty International dalam Indonesia an Amnesty International Report (London: Amnesty International Publication, 1977), hal. 31-44.

27 Lihat Hamish McDonald dalam Ibid., hal.219-220.

28 Harian Indonesia Raya, Rabu 12 Maret 1969.

29 Wawancara dengan Bapak S.

30 Untuk lebih lengkap periksa Liem Soei Liong, It's the Military, Stupid! Dalam Freek Colombijn dan Thomas Lindblad (ed) et.al., Roots of Violence In Indonesia (Leiden: KITLV, 2002), hal. 199.

31 Wawancara dengan Bapak Rk.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## "AKU KERNET"

### **Ucapanku yang menyelamatkanaku dari pembantaian di Sei Ular.**

Aku, Hadiwijaya, asal Cepu - Jawa Tengah merantau ke Tanah Deli di tahun 1963 dan bekerja di Perkebunan Saentis PPN Sumut I. Perkebunan ini berada di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yang lokasinya di pinggiran Kotamadya Medan.

Aku bekerja sebagai buruh cangkol di perkebunan tembakau ini yang dikemudian hari diangkat menjadi centeng. Di perkebunan ini aku bergabung dalam Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri).

Di tahun 1965 terjadilah apa yang dikenal sebagai G30S. Dan pada tanggal 15 Oktober 1965 aku ditahan di Puterpra Percut Sei Tuan. Setelah 3 bulan berlalu, pada suatu malam di bulan Ramadhan tanggal 20 Pebruari 1966, aku beserta 20 orang lainnya dan diantaranya ada seorang perempuan, dipanggil keluar. Jam waktu itu sekitar 01.00 WIB dan kami seluruhnya diperintahkan oleh pengawal yang berpakaian sipil tapi bersenjata api laras panjang, untuk naik ke mobil prah bermerek Fargo milik perkebunan khas pengangkut tembakau. Mobil ini baknya berdingding tinggi dari kayu dan punya atap dari terpal. Di atas mobil, kedua jempol tangan kami diikat kawat dan tangan berada di belakang tubuh. Mobil kemudian melaju ke arah kota Lubuk Pakam + 25 km dari Medan. Dalam mobil kami 21 orang dikawal oleh 2 orang berpakaian sipil bersenjata api laras panjang. Setelah sampai di Lubuk Pakam, sopir mobil turun dan diganti dengan sopir dengan pakaian sipil tapi punya senjata api serta tambahan pengawal seluruhnya berpakaian sipil tapi bersenjata sebanyak 5 orang. Kemudian mobil bergerak ke kota Perbaungan + 18 km dari Lubuk Pakam. Setibanya di ujung jembatan Sei Ular, mobil dihentikan dan pengawal

semua turun sedang mesin mobil tetap dihidupkan malah di gas keras-keras. Kemudian salah seorang pengawal tersebut menyuruh kami turun satu persatu berdasarkan nama-nama yang ada dalam daftar yang ada pada mereka.

Aku selama dalam perjalanan berhasil membuka ikatan kawat pada kedua jempolku, tetapi selama berada di atas jembatan Sei Ular tidak dapat melihat keluar karena tingginya dinding bak mobil, begitu juga aku tidak dapat mendengar apapun karena kerasnya bunyi mesin mobil.

Setelah turun ke 20 orang kawan-kawanku sesama tahanan, pengawal yang bertugas sebagai juru panggil menghardikku "Kau siapa !?" dan secara spontan aku menjawab "Aku kernet", "Kenapa kau tidak turun di Lubuk Pakam?", aku menjawab "Aku tidak disuruh turun".

Akhirnya semua pengawal naik kembali, mobilpun memutar arah kembali ke Lubuk Pakam dan disini seluruh pengawal serta sopir yang bersenjata turun dan sopir perkebunan naik. Mobilpun berangkat kembali ke Puterpra Percut Sei Tuan.

Di sini akupun turun dan masuk kembali ke tahanan, aku serta kawan-kawan tahanan lain tidak ada berbicara sama sekali.

Di kemudian hari aku beserta yang lain-lainnya dipindahkan ke T.P.U.C jalan Medan - Binjai km 7 Medan. Di bulan Desember 1970 aku dibebaskan dari tahanan.

Medan, 30 September 2003

Dikutip oleh

Ida Hertati Makmun Duana

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Kompas, Minggu 31 Juli 2005

Cerpen dengan latar belakang tragedi 65

### *Menunggu Telinga Tumbuh*

INDRA TRANGGONO

Depan Gedung Komnas HAM pagi hari. Tubuh laki-laki itu muntah dari bus kota bersama para penumpang lainnya. Kecemasan mengambang di bola matanya. Memasuki kompleks gedung, laki-laki itu berjalan tersaruk-saruk membawa kertas bertumpuk-tumpuk. Tampak dari atas, tubuhnya ditelan pilar-pilar kokoh. Memasuki lorong gedung, ia berjalan menuju suatu ruang. Bajunya basah. Ada perasaan setengah gemetar yang mencuat dari bawah sadar. Ia menimbang-nimbang dalam bimbang, sambil menimbang dokumen lusuh itu.

Setelah hampir 40 tahun, sejak peristiwa berdarah itu berlalu, untuk pertama kalinya perempuan itu mendatangi tempat itu. Ia datang bersama anak laki-lakinya, dengan gumpalan rindu dan rasa sedih yang menekan. Senja dirasakan-nya gemetar dengan kelelawar yang terbang menyambar-nyambar. Para kelelawar muncul dari lubang lebar, dalam, dan gelap yang lebih akrab disebut luweng.

"Her, aku masih mendengar jeritan bapakmu. Masih terngiang-ngiang. Gemanya sangat panjang. Kamu juga dengar?" bisik perempuan itu seusai menabur bunga di luweng itu.

"Di sinikah Bapak hilang?" ujar Her pelan, gemetar.

"Bukan hilang. Tapi dilenyapkan...."

Pada usianya yang hampir 75 tahun, bola mata Ibu masih tetap sama: dalam dan hitam. Organ-organ tubuh Ibu yang lain boleh menua, tapi tidak matanya. Seperti puluhan tahun lalu, tatapan mata Ibu tetap terasa menghunjam dan mencekam. Di sana kutemukan rongga yang menyerupai lorong panjang, dalam, gelap, dan sunyi.

Suatu pagi, Ibu meneleponku, "Her, kalau kamu tidak mengajar, antar Ibu nyekar bapakmu, besok pagi." Aku pun dengan penuh semangat menyambutnya. Aku bisa minta izin kepada kepala sekolah tempat aku mengajar sebagai guru sejarah.

Ketika pagi masih separuh tumbuh dan embun masih terpahat di daun-daun, kami berangkat ke makam Bapak, dengan colt station sewaan. Mobil pun terus melaju, menembus desa demi desa. Ketika mobil itu hendak menikung di sebuah jalan, buru-buru Ibu mencegah. Ia minta mobil berjalan lurus. Aku kaget. Tapi kutahan. Sepanjang perjalanan, kami terdiam. Kulihat puluhan atau ratusan pohon melintas-lintas di kaca jendela.

"Maaf Bu, bukankah makam Bapak di desa yang tadi kita lewati?"

"Bukan. Tapi di sana. Di Karang Bolong. Masih jauh."

Aku sebenarnya ingin terus terang kepada Herjuno dan anak-anakku yang lain: Darsono, Nastiti, dan Murti. Tapi aku takut mereka kaget. Sesungguhnya makam yang dulu sering kami ziarahi itu bukan makam Mas Drajat, ya bapaknya Herjuno itu. Makam itu kosong. Waktu itu, setelah Mas Drajat dikabarkan meninggal di tahanan, aku merasa bingung dan cemas. Cemas karena jasad Mas Drajat tidak pernah diserahkan kepadaku. Kata petugas, "Yang penting Ibu tahu kalau Pak Drajat sudah meninggal. Soal jasadnya, itu urusan negara."

Urusan negara? Kenapa mengubur jasad suami sendiri harus dilarang? Apa salah Mas Drajat terhadap negara hingga dia tidak mendapatkan hak untuk dikuburkan secara layak? Bagaimana jika saudara, teman, atau handai tolan menanyakan soal kematiannya? Apakah aku juga akan menjawab, "Itu urusan negara"? Apakah negara punya telinga? Bukankah ia hanya punya mulut dan tangan untuk membentak dan memerintah?

Maka, diam-diam kubangun makam tipuan agar orang-orang tahu bahwa suamiku meninggal secara wajar dan terhormat. "Makam" itulah yang kemudian membebaskan aku dari kepungan pertanyaan soal kematian suamiku. Aku terbebas? Tidak juga. Hingga kini, rasa pedih terus merajamku.

Sesungguhnya Mas Drajat meninggal bukan di tahanan. Bukan. Menurut Swangani, anggota Gerwani yang lolos dari pembantaian, suamiku meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. "Bersama tahanan lainnya, suamimu dilempar-

kan hidup-hidup ke luweng di Karang Bolong. Dari tempatku bersembunyi, aku mendengar jeritan mereka....” ujanya dengan gemetar.

Benarkah rasa kalap itu telah melampaui batas hingga mereka dengan beringas memperlakukan suamiku seperti batang pisang? Atau nasib suamiku sendiri yang terlalu naas hingga ia harus tewas dengan cara yang begitu mengenaskan? Atau hidup ini telah begitu kikir dan tidak berbelas? Termasuk terhadap aku dan anak-anakku yang puluhan tahun dihukum hanya karena kami dianggap punya noda sejarah. Apakah noda itu benar-benar ada? Siapa yang membuatnya? Atau ia hanya diciptakan dan dipelihara demi sikap patuh yang diwajibkan?

Seperti kota-kota yang lain, ketika "revolusi dan ideologi" dipuja bagai dewa, langit kota kecil itu pun selalu menyala. Seperti siang itu, bendera dan panji-panji partai berkibar-kibar, diiringi sorak-sorai. Bagai tepung terigu ditebah angin, debu mengepul di jalanan. Aroma kemarau bercampur bau keringat diisap ribuan orang. Mereka mengelu-elukan pawai para pemuda yang berderap-derap. Wajah para pemuda itu tampak mengeras, kaku seperti baja. Tangan mereka terkepal. Kata-kata "revolusi", "ganyang nekolim", "hidup Nasakom", dan yel-yel lain pun berloncatan penuh tanda seru.

Waktu itu, partai-partai saling bersaing. Ada PNI, ada Masyumi, ada NU, ada PKI, dan ada PSI.

Dalam zaman yang gemuruh itu, kami hidup menepi. Tinggal di kampung dalam suasana guyub (dalam pergaulan yang tulus, kami bisa saling minta garam atau ngutang minyak goreng). Kami menempati rumah besar, warisan mertua. Sebuah rumah bergaya limasan, dengan pendopo selalu lapangan bulu tangkis. Di bagian belakang, ada ruang keluarga yang dikelilingi deretan kamar.

Di pendopo itu, Mas Drajat menambahi kesibukannya sebagai guru SD dengan mengajar anak-anak miskin untuk membaca dan menulis atau berhitung, secara cuma-cuma..

Rupanya kegiatan itu menarik perhatian Pak Tular, seorang tokoh PKI di kota kami. Dia selalu datang mengenakan pakaian dari kantong gandum yang dijahit kasar, khas jahitan pasar. Pernah saya dengan iseng bertanya soal itu. Dia menjawab ringan, "Dik Rohani ini gimana to? Negara kita ini masih berduka dan melarat. Mosok saya tega pakai baju berkolon atau tetoron dan celana drill.... Kan nggak sopan to."

Suatu ketika, Pak Tular meminta izin untuk menggunakan pendopo kami. Katanya untuk rapat partainya. Mas Drajat terdiam. Ia mememandangku. Aku pun terdiam.

"Bagaimana? Boleh kan?" Suara Pak Tular terdengar sangat berat. Suara itu seperti punya tenaga yang menyihir kepala kami untuk mengangguk.

"Terima kasih. Terima kasih. Dik Drajat dan Dik Rohani ini sudah memberikan sumbangan yang berarti bagi revolusi...." Tawa Pak Tular berderai.

Kami hanya saling memandang.

Ternyata pendopo kami tidak hanya untuk rapat, tapi juga menjadi pusat kegiatan partai. Ada latihan ketoprak. Ada latihan menari dan menyanyi. Ada pendidikan bagi kader-kader partai. Pendopo kami selalu ramai. Bahkan kegiatan belajar anak-anak yang selama ini ditangani Mas Drajat telah diambil alih mereka. Mas Drajat pun tidak keberatan.

"Hati-hati dengan Pak Tular," pesan bapakku ketika aku mengunjunginya bersama Mas Drajat.

"Kami kan hanya meminjamkan tempat.... Apa salahnya?" kataku. Wajah bapakku tampak masam.

Beberapa bulan kemudian, lewat RRI, kami mendengar ada pergolakan di Jakarta. Beberapa jenderal diculik. Beberapa tokoh PKI diciduk dan ditahan. Tidak sampai seminggu, suasana yang mencekam pun merembet ke kota kami, ke kampung kami yang menjelma menjadi kampung hantu. Mayat Pak Tular dan kawan-kawannya ditemukan di pinggir Kali Mambu, dengan rajaman senjata di seluruh tubuh mereka. Setiap saat itu, bau mayat tercium di mana-mana.

Sehabis isya, mendadak rumah kami digedor-gedor banyak orang.

"Ganyang Drajat!!!"

"Perkosa saja istrinya!!!"

"Gantung PKI itu!!!"

"Habisi keluarganya!!! Pokoknya tumpes kelor!!!"

Dengan jiwa yang kutegarkan, aku menemui mereka. Kukatakan bahwa Mas Drajat bukan anggota PKI.

"Bohong! Dasar Gerwani, kamu!!!"

"Jangan ngawur kamu!" Amarahku meledak. Aku sendiri tidak paham, kenapa mendadak aku jadi begitu berani? Padahal sesungguhnya, aku gemeteran melihat parang, kelewang, bambu runcing, atau lonjoran besi yang mereka acung-acungkan. Dan ajaib, bentakanku menundukkan wajah mereka. Pak RT mampu menyabarkan mereka. Akhirnya, kerumunan pun bubar.

Esoknya, pada dini hari, kudengar suara derap sepatu lars menghajar ubin pendopo. Pintu rumah kami digedor-gedor. Keras. Sangat keras. Dengan gemetar, aku membuka pintu. Beberapa laki-laki berseragam memandang kami dengan tatapan menghunjam. Tatapan mata mereka sedingin moncong senapan.

Mas Drajat keluar dari kamar. Dia sangat tenang. Aku memeluknya. Dia mencoba memberikan penjelasan, "Saya tidak tahu apa-apa.... Sungguh." Namun orang-orang itu langsung menggelandangnya. Tubuh Mas Drajat menghilang dilingkupi kegelapan. Itulah terakhir kali aku mencium bau tubuhnya, terakhir kali mende-ngarkan degup jantungnya. Aku hanya ingat kata-kata terakhir Mas Drajat, "Jaga kandunganmu."

Aku pun bergegas membawa Darsono, Nastiti, dan Murti lari keluar. Menembus malam. Menuju rumah Bapak. Dua tangan ibuku menjelma sayap induk ayam yang melindungi anaknya dari terkaman elang. Di rumah itu, aku melahirkan Herjuno. Sebulan kemudian, seorang petugas memberi kabar: suamiku meninggal di tahanan.

Aku tak bisa lagi menangis. Dadaku sesak.

"Bangun Her, kita sudah sampai."

Herjuno tergeragap bangun. Kami keluar dari mobil.

"Mana makam Bapak?"

"Di sana."

"Itu bukan makam Bu, tapi luweng."

Herjuno sangat kaget. Bahkan mungkin terguncang. Namun, ia cukup pintar menyembunyikan perasaannya. Kami pun berdoa, sambil menggigit kuat-kuat kenangan pahit akan Mas Drajat.

Kantor Komnas HAM, pagi hari.

Herjuno berjalan menuju ke sebuah ruang, membawa dokumen setebal kece- masan ibunya, sedalam luweng abadi yang menyimpan jeritan bapaknya. Ia berharap negara berani untuk punya telinga, hingga sedikit ramah terhadap nasib orang semacam ibunya dan keluarganya, yang sepanjang hidup harus men- anggung 'dosa sejarah'.

Sampai di depan pintu sebuah ruangan, langkahnya tertahan. Ia hendak berbalik, namun dokumen itu seperti meronta-ronta dan memaksanya masuk. Dengan tenang, ia menemui seseorang. Ia hanya punya impian sederhana yang kelak akan dikabarkan kepada ibunya, "Bu..., kini telinga negara telah tumbuh...."

Yogyakarta, 2005

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## *Ngebon Kambing Di Ladang Tebu*

**( Kisah Edi Sartimin, Korban stigma PKI)**

"Ibu saya, Siti Hamidah, dari keturunan Tiawchu bermarga Lie. Itu petani. Orang tua laki laki bapak dari keturunan Konghu, Tan Tiang Seng. Itu tukang. Dulu kalau teman tanya margamu apa. Saya bilang setan. Se itu artinya marga dan Tan itu marga saya. Jadi saya bilang setan," kata pak Edi, sapaan akrab Edi Sartimin, nama yang dipakainya selain nama asli, Tan Hoek Tjum.

Hampir tidak ada aktivis mahasiswa era 98 yang tidak kenal Edi Sartimin, atau setidaknya jika tak kenal namanya, familiar dengan seorang kakek yang setiap hari naik sepeda dengan sebuah kamera dibahu, dan hampir selalu memakai topi ala Che Guevara. Jika rindu pak Edi, datang saja ke kantor DPRDSU. Jika

melihat sebuah sepeda tua berwarna biru, diparkir lengkap dengan kunci roda, carilah, Edi pasti ada di sekitar gedung besar itu. Disana Edi bisa melakukan beberapa hal. Ada kalanya melakukan orasi, ikut hanyut masuk dalam aksi unjuk rasa, namun terkadang keluar dari barisan dan menjepretkan kamera Ricoh 500GX-nya. Hasil jepretan yang biasanya dibeli oleh teman teman seperjuangan itu menjadi cara unik pak Edi untuk bertahan hidup hingga saat ini.

Pertamkali menghirup udara bebas- dari penjara- tahun 1972, Edi mengawali hidupnya sebagai buruh bangunan, namun beberapa bulan kemudian berhenti. Atas inspirasi dari seorang kawan bernama Rahmat, seorang juru photo dan juga eks Tapol, Edi membeli sebuah kamera merk Seagul. Sembari belajar dari Rahmat, Edi berharap dapat bertahan hidup dengan menjadi tukang photo jalanan. Edi biasa mangkal di sekolah MAN I dan II Medan. Edi memperoleh pencarian yang cukup untuk menghidupi dirinya selama bertahun-tahun.

Namun jalan hidup yang normal (atau diatas normal?) ini rupanya tidak lama menjadi milik Edi. Tahun 1988, salah seorang tukang photo saingan Edi, melaporkan kepada kepala sekolah bahwa Edi adalah eks Tapol. Hal itu membuat kepala sekolah melaporkan Edi kepada aparat dan melarang Edi untuk masuk ke lingkungan sekolah. Berita itu cepat menyebar dan membuat Edi dibenci banyak orang termasuk di lingkungan tempat tinggalnya. Tidak mampu lagi memenuhi kebutuhannya oleh karena tidak diterima oleh lingkungannya, dengan berat hati Edi menjual kameranya, mengganti identitas dan pergi merantau ke Pekan Baru.

Ditempat baru mengawali hidupnya sebagai centeng rumah remang-remang milik seorang mantan Tentara yang masih kenal dengan Edi. Sang teman berjanji tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada orang lain. Untuk pertama kalinya sejak keluar penjara, Edi dapat mengurus KTP tanpa tanda ET ditempat sang mantan tentara penolong itu. Karena sudah merasa 'bersih', dan dengan harapan dapat mengadu nasib dengan mencari pekerjaan yang lebih baik, secara halus Edi meminta keluar dari kafe maksiat itu.

Setelah mendapat ijin keluar dari sahabatnya itu, Edi memulai pekerjaan barunya, bergabung dengan penggarap hutan. Berteman dengan binatang-binatang hutan, sinso, dan tiga hingga lima orang teman setiap hari berada ditengah hutan melakukan penebangan-penebangan liar. Sesekali ketemu dengan orang Sakai atau orang Kubu yang masih telanjang. "Pak Edi pernah dikeroyok orang Sakai, terus melarikan diri menembus hutan sendirian. Pak Edi juga pernah tertimpa pohon lapuk karena getaran sinso hingga pingsan ditengah hutan itu.

Tidak betah dengan kehidupan liar itu, tahun 1994, Edi memilih kembali ke Medan. Maksud hati ingin bertemu keluarga, anak dan cucu di Tanjung Morawa, lagi-lagi Edi tidak diterima. "Dasar tidak tau berterimakasih, syukur syukur kau tidak digorok dulu," demikian kata kata keluarga kepada Edi. Dengan berbagai pertimbangan, Edi kembali melakoni hidup sebagai penebang kayu di Pekan Baru. "Pekerjaan saya layaknya kerbau beban, menggerek gelondongan itu dengan memakai tali yang dililitkan didada, makanya fisik saya sehat" kata Edi.

Tidak diakui oleh istri, anak dan seluruh keluarganya tidak menyurutkan semangat hidup Edi. « Saya tidak hidup sebatang kara ».Walau keluarga mencampakkan



pak Edi, pak Edi punya banyak anak « yang mengakui saya sebagai bapaknya ». Mereka pintar-pintar, banyak juga mahasiswa. Mereka semua keluarga saya. Walau demikian, Edi tetap memantau dari jauh keluarga biologis-nya. Mantan istrinya, almarhum Misnem, kawin dengan seorang Tionghoa. Pak Edi sudah punya cucu bernama Rrn yang sudah duduk di kelas tiga SLTA di Tanjung Morawa, dari putri kandung-nya Ssn.

Dengan mencoba bertempur dengan ingatan, Edi menuturkan awal penderitaan yang kelak mengubah totalitas hidupnya ini. Edi Sartimin adalah anggota TNI Angkatan Darat dari pasukan khusus atau Batalyon Raiders dengan pangkat terakhir Kopral Satu. Sebelum masuk tentara, Edi akrab dengan kehidupan jalanan di Medan, sembari bersekolah di Herstel RK, Jl Sindoro Medan, sebuah sekolah milik Belanda. Orang tua Edi sesuai dengan marganya adalah seorang mekanik. Kerap Edi membantu perbengkelan orang tuanya itu. Suatu kali, tahun 1957, tanpa sepengetahuan orang tuanya, Edi melamar sebagai anggota tentara. Walaupun mendapat tentangan utamanya dari ayahnya setelah mengetahui Edi lulus masuk tentara, Edi tetap mengikuti masa latihan yang dipusatkan di SKI Siantar (sekarang Rindam), hingga akhirnya sepuluh tahun kemudian, Edi dihadapkan dengan tuduhan yang sama sekali diluar bayangannya.

Tiga hari sebelum ditangkap, pistol Edi telah lebih dulu diambil dengan alasan akan ditukar yang baru. Pukul 19.30, tanggal 19 September 1967, pulang nonton dari Deli bioskop, Edi ditangkap oleh tiga orang tentara dari Asrama Yon Para, jauh hari setelah peristiwa G 30 S PKI. Tentara yang masih teman dekat Edi itu mengaku disuruh oleh komandan batalyon Para, Mayor Besar Rino K, dengan alasan terlibat G 30 S PKI.

“Tiga hari pertama adalah neraka penyiksaan bagi saya. Sejak sampai di kamp, saya sudah melihat teman teman saya juga ditangkap, disiksa dan ditelanjangi. Kami semua dibuat telanjang bulat, ditunjang, dan tidak dikasih makan. Pada hari ketiga kami semua disuruh buat surat wasiat kepada keluarga, karena akan dibunuh. Semua. Banyak orang menangis sambil menulis surat surat itu. Ternyata itu mop saja, supaya mereka tahu apa yang kami tulis disitu, namun demikian, satu persatu kami juga diambil dan tidak pernah kembali. Hari hari di tahanan adalah masa yang mendebarakan, karena ada saja yang diambil pada malam hari untuk dibunuh. Orang orang yang tergabung didalam Komando Aksi, yakni preman-preman yang diorganisir oleh tentara selalu datang pada malam hari. Dengan persetujuan tentara yang menjaga tahanan, tahanan bisa diambil dan dibunuh oleh Komando Aksi itu. “Pak, ngebon kambing pak,” Begitu orang orang komando aksi meminta kepada tentara penjaga, supaya orang orang yang dituduh PKI itu bisa mereka ambil untuk dibunuh,” tutur Edi. Mereka dibawa ke berbagai tempat untuk dibunuh dan dipersaksikan kepada khalayak ramai sebagai bentuk agitasi. Mayat mayat itu sengaja diletakkan di jalanan kota, di sungai seperti sungai Wampu, sungai Deli dan Sungai Ular, serta di perkebunan terdekat seperti kebun tebu dan tembakau di pinggiran kota. Mayat mayat itu tidak dikuburkan, dibiarkan dimakan oleh binatang seperti anjing di pinggir jalan.

Edi menjalani hukuman tanpa proses hukum formal yang jelas, pun mengakhiri-nya dengan tidak jelas pula tahun 1972, setelah menjalani hukuman di berbagai

lokasi tahanan di Sumatera Utara seperti Rutan Suka Mulia, Tanjung Kasau dan Jalan Gandhi. Keluar dari tahanan, Edi masih harus menjalani wajib lapor dengan KTP bercap OT/ET. Pilihan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan jalan selanjutnya yang ditempuh Edi setelah berkali-kali ditolak oleh keluarganya.

Tahun 97, untuk kedua kalinya Edi memulai pekerjaan sebagai tukang photo, dengan memilih lokasi mangkal di Taman Muara Indah Varia Tanjung Morawa, Tamora, tempat wisata kecil bagi warga Medan. Seiring dengan perkembangan kamera kini, Edi mengaku sudah kesulitan mendapatkan order. "Karena kamera pocket dan kamera digital itu, saya sulit mencari pelanggan. Sejak awal tahun 2000 lalu, aku sudah jarang ke Tamora, saya lebih sering meliput dan mengikuti aksi-aksi sekarang", kata Edi. Belakangan, Edi banyak membangun komunikasi dengan orang-orang muda dan aktivis mahasiswa. Tercatat Edi pernah menjadi anggota PRD, kemudian mengundurkan diri dan bergabung dengan PDS, dan sejak tahun 2004 bergabung dengan Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM 65 Sumut (KKP HAM Sumut).

"Sekarang saya punya harta yang sangat mahal, satu sepeda, dan sebuah kamera. Inilah harta sekaligus alat saya untuk bertahan hidup. Yang masih pak Edi bingung, kedua benda mahal ini mau diwariskan sama siapa kelak kalau aku mati". Kamera dan sepeda Edi, terlihat setua umurnya yang sudah 68 tahun. Jaman bisa sudah abad millenium, namun kesederhanaan Edi dengan kedua benda keramatnya, mengingatkan setiap orang atas aroma jaman 60-an. "Setiap hari, saya naik sepeda sejauh tiga puluh kilometer".

, dunia masih terbalik-balik. Yang satu ini "tersangka" yang diloloskan karena "tidak cukup" bukti, sedang yang jutaan korban '65 harus meringkuk dalam tahanan belasan tahun sebagai "tersangka" tanpa bukti, bahkan tetap harus hidup sebagai pe-sakitan sampai sekarang setelah 40 tahun bersama sanak keluarganya.

Inilah kenyataan pahit, sangat tidak adil yang kita hadapi sebagai kenyataan!

Salam,

ChanCT

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## **Kisah Para Perempuan Korban 1965 (1-2)**

### **"Genjer-genjer" Menyeret Sumilah ke Plantungan**

*Oleh* : Fransisca Ria Susanti

Pengantar Redaksi:

Penjara Plantungan di Kendal, Jawa Tengah, menjadi saksi bisu dari kisah tragis para perempuan Indonesia yang diisolasi di bekas Rumah Sakit Lepre tersebut. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah menjadikan mereka sebagai "tumbal" hanya karena tuduhan terlibat atau dianggap dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Minggu (24/7), para eks tahanan politik (tapol) Plantungan menggelar "reuni" di pendopo Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI) di Bugisan, Yogyakarta. SH menurunkan kisah mereka dalam dua tulisan yang dimuat Jumat dan Sabtu (30/7).

Yogyakarta – Genjer-genjer mlebu kendil wedange gemulak/Setengah mateng dientas yong dienggo iwak/ Segu nong piring sambel jeruk ring ngaben/Genjer-genjer dipangan musuhe sego. (Genjer-genjer dimasukkan dalam kuai panas/Setelah setengah matang diangkat untuk lauk/Nasi di piring dan sambel jeruk di atas cobek/Genjer-genjer dimakan bersama nasi) Bait di atas adalah penggalan lagu Genjer-genjer karya seniman Banyuwangi, Muhammad Arif dan dipopulerkan oleh Bing Slamet. Anda pernah mendengarnya atau barangkali menyenandungkannya pelan-pelan?

Generasi yang hidup di era 1960-an akrab dengan lagu ini. Di film "Gie" yang kini diputar di bioskop-bioskop Jakarta, dendang Genjer-genjer juga terdengar, dilantunkan para simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) menjelang peristiwa Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965.

Jika Anda melantunkan lagu yang bercerita soal kemelaratan warga Banyuwangi di masa pendudukan Jepang itu sekarang, tak akan ada dampak apa-apa, kecuali mungkin tatapan aneh lingkungan sekitar yang menduga Anda sebagai anak yang dilahirkan dari rahim ibu pengikut Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) atau setidaknya simpatisan dari PKI. Namun jika lagu itu dinyanyikan menjelang peristiwa G30S, maka petaka menjadi takdir yang menghampiri.

Sumilah, perempuan asal Prambanan, Yogyakarta adalah salah satu contoh dari takdir itu. Gadis Sumilah yang waktu itu masih berumur 14 tahun sama sekali tak tahu asal muasal kenapa pagi tanggal 19 November 1965 itu, ia bersama 47 orang (tujuh perempuan) lainnya diharuskan berkumpul oleh lurah desanya di sebuah lapangan. Kemudian mereka diangkut oleh truk ke penjara Wirogunan. Sepanjang jalan, Sumilah mencoba mengingat apa kesalahannya, tapi tak juga ketemu. Satu-satunya yang melintas di ingatannya adalah kesukaannya menari bersama teman-teman sepermainannya dengan iringan Genjer-genjer. "Saya suka. Nada lagu itu enak sekali," ujarnya mengenang, Minggu (24/7) siang di pendopo Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI) di Bugisan, Yogyakarta. Namun justru kesukaan inilah yang menjadi malapetaka baginya. Ia tinggal di hotel prodeo selama 14 tahun, tanpa ada tuduhan maupun pengadilan. Mula-mula, ia tinggal di penjara Wirogunan, Yogyakarta. Setiap hari, ia hanya diberi makan jagung beberapa butir dan kadang-kadang sayur lembayung.

Ia menjalani pemeriksaan di bawah sejumlah tekanan. Saat ditanyakan jenis tekanan atau siksaan yang ia alami selama pemeriksaan, Sumilah melengos. Pandangannya menerawang. Kenangan itu terlalu menyakitkan. Enam bulan lamanya, Sumilah berada di Wirogunan, sebelum kemudian dipindahkan ke penjara Bulu di Semarang dan terakhir di Plantungan pada tahun 1971.

Di Plantungan inilah, Sumilah yang menjadi tahanan termuda, mengetahui bahwa ia adalah korban salah tangkap. Sumilah yang seharusnya menjadi target penangkapan adalah seorang guru SD asal Kulon Progo, Yogyakarta yang menjadi anggota PGRI Non-Vaksentral. Kedua Sumilah ini sempat berada bersama di penjara

Wirogunan. Meski begitu, Sumilah yang hanya jebolan kelas 4 SD tidak dilepaskan oleh petugas. Dan saat Sumilah bocah ini harus berada di bui selama 14 tahun, Sumilah lainnya yang menjadi target hanya menempati penjara Wirogunan selama tiga tahun. Empat puluh tahun setelah penangkapan yang ironis itu, keduanya terlihat duduk bersila, berdampingan di pendopo SMKI, Minggu (24/7) siang itu. Entah apa yang mereka bicarakan dalam acara reuni eks tapol Plantungan itu.

Seandainya masa lalu begitu menyakitkan untuk diceritakan, barangkali keduanya tengah berbincang tentang hidup yang harus mereka jalani di usia senja sekarang.

Sumilah asal Prambanan kini menjalani hidup dengan laki-laki bekas kader Pemuda Rakyat (PR) yang menikahinya setelah ia keluar dari penjara tahun 1978. Dikarunia dua putra, laki-laki dan perempuan, Sumilah kini menghabiskan hidupnya dengan berjualan sate di areal depan Prambanan. “Saya bertemu dengan suami saya di Muntilan. Saya waktu itu berjualan sate di tempat bulik saya dan ia merupakan salah satu pembeli,” tutur Sumilah mengenang.

Satu-satunya syarat yang diajukan Sumilah saat laki-laki itu melamarnya hanyalah supaya laki-laki itu bersedia menikahinya secara Katolik. Sementara kisah pahit masa lalu mencoba mereka lupakan. Di depan kedua anaknya, cerita tersebut juga tak dikatakan. Sampai kemudian, saat Syarikat (organisasi nonpemerintah di Yogyakarta yang memiliki kepedulian terhadap para korban peristiwa 1965) berniat mendokumentasikan kisah Sumilah dalam film dokumenter “Kado Untuk Ibu”, anak perempuannya yang duduk di bangku SMA, baru mengetahui tragedi yang menimpa ibunya.

Gadis yang besar di era reformasi itu pasti tak menyangka bahwa hanya gara-gara sebuah lagu, ibunya harus menghabiskan 14 tahun masa hidupnya di balik jeruji penjara. Sayangnya, 40 tahun setelah kesewenang-wenangan itu berlalu, negara ini tak juga menemukan aktor yang bertanggung jawab terhadap peristiwa tersebut. Jalan rehabilitasi terhadap para korban pun tak juga mulus. Nn

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0507/29/sh03.html>

## **Kisah Para Perempuan Korban 1965 ( 2 - 2 )**

### **Sumpah Iman di Tengah Siksaan**

*Oleh : Fransisca Ria Susanti*

YOGYAKARTA - Adegan Getsemani saat Yesus begitu ketakutan dan menginginkan agar proses penyaliban yang akan menimpanya tak terjadi, seperti diputar ulang di Plantungan, Kendal sekitar awal 1970-an. Bedanya, doa ini disampaikan di tengah berlangsungnya siksaan dan diucapkan oleh Sumarmiyati, perempuan asal Yogyakarta yang dipenjarakan oleh pemerintahan Soeharto hanya gara-gara ia menjadi

anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), sebuah organisasi yang dicap *underbouw* Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sumarmiyati bahkan menyatakan sumpah, jika ia diberi kekuatan untuk bisa mengatasi siksaan dan diberi kesempatan untuk menikah dan punya anak, maka satu anaknya akan ia persembahkan untuk Tuhan. Sebagai penganut Katolik, sumpah “persembahan” ini adalah izin untuk membiarkan anaknya menjadi biaran.

Bersama perempuan lainnya, Sumarmiyati dimasukkan dalam penjara Orde Baru tanpa pernah diadili pasca Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965. Desember 1965, perempuan tersebut dimasukkan ke penjara karena keterlibatannya di IPPI. Tapi kemudian dilepaskan pada April 1966. Saat ia dikeluarkan, seorang pastor menampungnya dan menyekolahkan hingga ia memperoleh ijazah untuk mengajar di Sekolah Dasar di Janti, Yogyakarta. Namun pada April 1968, Sumarmiyati kembali ditangkap atas tuduhan melakukan gerilya politik (*gerpol*). Bantahan terhadap tuduhan ini sama sekali tak diperhatikan. Tak ada satu pun pengadilan yang digelar untuk membuktikan tuduhan ini. Sumarmiyati dijebloskan ke penjara, untuk kedua kalinya, hingga tahun 1978. Ia berpindah-pindah dari penjara Wirogunan, lalu ke Bulu dan terakhir di Plantungan.

Dalam film dokumenter “Kado untuk Ibu” yang digarap oleh Syarikat (organisasi nonpemerintah yang memperjuangkan nasib para korban peristiwa 1965), Sumarmiyati bertutur bagaimana ia dan tapol perempuan lainnya ditelanjangi dan dipaksa untuk menciumi penis para pemeriksanya. “Kami disuruh melakukan itu karena menurut mereka kami layak diperlakukan seperti itu,” tuturnya getir.

Saskia Eleonora Wierenga dalam studinya tentang “Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia” menyebutkan bagaimana Orde Baru sengaja menciptakan stigma bagi perempuan yang terlibat atau diduga simpatisan PKI. Penciptaan stigma tersebut diperkuat melalui media massa yang ada saat itu, di antaranya harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha.. Dalam koran-koran tersebut, aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) – organisasi yang dicap *underbouw* PKI - digambarkan turut terlibat dalam pembunuhan para jenderal di Lubang Buaya dengan melakukan tari-tarian saat pembantaian dilakukan. Mereka bahkan dilukiskan sebagai perempuan jalang yang menyetubuhi para jenderal tersebut sebelum dibunuh.

### **Drama Kecengengan**

Guna menguatkan image tersebut, rezim Soeharto bahkan meminta para seniman menggambarkan adegan tarian para aktivis Gerwani ini di relief Monumen Pancasila Sakti. Pencitraan ini melahirkan stigmatisasi yang menyakitkan bagi para aktivis politik perempuan yang dekat dengan PKI, juga para perempuan yang ditangkap hanya karena diduga simpatisan organisasi tersebut..

Namun bagi Sumarmiyati, stigma ini tak berarti banyak bagi dirinya ketika pada November 1978, dua bulan setelah ia keluar dari Plantungan, sang pacar yang juga baru keluar dari penjara datang melamar. Setidaknya, hidup serumah dengan laki-laki yang memahami pilihan politiknya, membuat Sumarmiyati lebih kuat dalam

menjalani hidup. Selain itu, lingkungannya pun bisa menerima. Bahkan ia mendapatkan dispensasi dari kawan-kawan di organisasi gerejanya untuk meminjam uang kas. Padahal salah satu syarat peminjaman saat itu adalah melampirkan “surat bersih diri” (surat keterangan tidak terlibat G30S) dari kelurahan.

Dan sesuai dengan sumpah yang ia ucapkan saat berada dalam siksaan, satu dari dua orang anak Sumarmiyati kini sedang melanjutkan studi di seminari tinggi. Jika ia berhasil menyelesaikan studi tersebut, maka ia akan ditahbiskan menjadi pastor.

Sumarmiyati dan juga ratusan perempuan yang hadir di forum reuni eks tapol Plantungan di pendopo Sekolah Menengah Kesenian Indonesia (SMKI), Bugisan, Yogyakarta, Minggu (24/7) siang itu, masih merekam kesewenangan rezim Orde Baru dengan jelas di ingatan. Namun hidup terus berjalan. Persoalan keseharian membuat bayang-bayang kenangan yang menyiksa itu sedikit kabur.

Sumini Martono, aktivis Gerwani Wonosobo yang jadi tapol selama 10 tahun, adalah contoh lain dari ketegaran itu. “Saya ditangkap dengan janji akan dilepaskan setelah suami saya ditangkap. Tapi setelah suami saya ditangkap, saya tak juga dilepas. Dan saat saya sudah dikeluarkan, suami saya ternyata sudah hilang,” ungkapnya. Hilang, dalam bahasa para tapol, adalah dibunuh. Suami Sumini memang terbukti dibunuh oleh para aparat Orde Baru dan mayatnya dihanyutkan di sebuah luweng di Wonosari. Tempat ini dikenal sebagai tempat pembantaian para aktivis yang diduga sebagai anggota atau simpatisan PKI pasca peristiwa G30S.

Saat menceritakan kisah tersebut, Sumini menyampaikannya dengan enteng. Tapi bukan berarti ia tak merasa kehilangan. Hanya saja, ketika sebuah penderitaan sudah tak tertahankan dan tak ada jawaban yang bisa diberikan atasnya, maka satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menjalani hidup dengan kekuatan yang tersisa.

Ketegaran yang ditunjukkan Sumarmiyati dan Sumini serta ribuan eks tapol Plantungan membuat keluhan anggota DPR dan pejabat negara saat ini tentang gaji yang minim tampak seperti drama kecengengan.

Sinar Harapan 29 Juli 2005

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

"joseph" <harjo@wanadoo.nl>

Fri, 14 Oct 2005 23:07:20 +0200

DUSTA TARI PORNO DI BUKIT DURI.

GAMMANomor : 33-3-09-10-2001

Sulami, Wakil Sekjen DPP Gerwani, narapidana politik 20 tahun penjara, bertutur kepada GAMMA. Ia percaya Soeharto terlibat G-30-S. Lihatlah, rambutku sudah memutih. Sorot mataku pun redup. Padahal, tengok foto ini, saat bersalaman dengan Presiden Soekarno pada 1962, ketika beliau berulang tahun di Istana, aku masih oke, ya? Kini, usiaku 75 tahun. Saya sedang sibuk dengan Yayasan Penelitian Korban 1965-1966, baik yang sudah mati, masih hidup, dan keluarga mereka. Duh, banyak yang nganggur karena dituduh tak bersih diri. Mencari jodoh saja sulit. Yang

sempat tunangan enggak jadi nikah. Matilah hak asasi dan hak perdata mereka. Traumatis.

Kami mendata kuburan para korban dan keluarganya. Kami berhasil membongkar kuburan- kuburan di Blora, Jawa Tengah, pada Juni 1998. Di hutan. Setelah digali sampai dua meter dalamnya ternyata ada 51 kerangka.

Waktu yayasan itu dideklarasikan di LBH Jalan Diponegoro Jakarta pada 1999 lalu, BBC London menginterview malam dan paginya disiarkan. Setelah itu kami didatangi 30 wartawan. Klippingnya kami kumpulkan. Lalu, kami diinterview sebanyak 68 kali oleh media dalam dan luar negeri. Akibatnya, teman-teman yang merasa kehilangan keluarganya ramai-ramai menjadi sukarelawan di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi.

Saya ingin bisa menggelar satu perkara. Soal pembunuhan, umpamanya di Boyolali, di situ kehilangan rakyatnya kira-kira 8.000. Itu bisa kami tunjukkan kepada keluarga yang mati itu. Terus kami minta kepada Komnas HAM untuk membentuk KPP HAM khusus korban 1965-1966. Katanya, masih belum bisa dilaksanakan karena ada Tap. MPRS Nomor 25 itu. Padahal, ketetapan itu dibentuk secara tidak sah. Yang membentuk itu bukan presiden dan orang-orang Bung Karno yang di DPR/MPR GR waktu itu. Ada 126 orang atau lebih yang sudah dikeluarkan dari sana dan diganti oleh orang-orangnya Soeharto.

Memang, kalau kita dengar keterangan Kol. Latief dan Pak Soebandrio yang menyimpulkan bahwa Soeharto memang tahu peristiwa G-30-S, kami kaget. Dulu, Pak Latief, kan, salah satu pelaku pembunuhan para jenderal itu. Saya, kan, tidak mengerti dulu-dulunya bagaimana dia. Ngerti-nya setelah dia keluar dari penjara dalam keadaan fisik yang begitu rusak. Saya mengerti sebab musababnya. Kalau umpamanya laporan Latief kepada Soeharto pada waktu itu ditanggapi dengan baik dan dia melaporkannya ke Pak Yani sebagai atasannya dan kepada Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi, tidak akan terjadi peristiwa itu. Itu kalau diikuti berapa lama imperialis Amerika ini ingin membunuh Bung Karno. Sementara itu, soal keterlibatan Soeharto yang bekerja sama dengan Amerika, kami rasa itu sangat mungkin. Kami bahkan mengumpulkan kliping-kliping yang ada hubungannya dengan CIA.

Pengakuan Heru Atmodjo juga begitu. Dan jeleknya, Pak Harto itu dalam usaha perjuangannya menjatuhkan Bung Karno --dalam hal ini kerja sama dengan kekuatan asing-- tega menghalalkan segala cara yang luar biasa kejam. Saya yakin bahwa Soeharto memang terlibat dalam G-30-S. Lalu, saya cocokkan dengan tulisan bekas orang kedutaan Amerika, *The Impossible Dream*. Di situ alurnya sudah jelas sekali.

Dulu saya sering bertemu Bung Karno. Saya mendengar dari keluarga istana bahwa Pak Harto waktu itu dimarahi Pak Yani. Dia lalu menghadap Bung Karno dan minta keluar dari tentara. Dan ketika ditanya Bung Karno, dia jawab karena Pak Yani tidak senang kepada Pak Harto. Terus Bung Karno ngecek (menurut seorang jenderal yang ada di istana) dan Yani kemudian mengatakan, "Ya, Pak, saya enggak suka kerja sama dengan Mayor (ketika itu Soeharto berpangkat mayjen) itu."

Ketika Soeharto bertugas di Diponegoro, di situ, kan, Pak Yani juga sudah kelihatan tidak menyukai Soeharto seperti yang disampaikan Pak Bandrio dalam bukunya. Saya memang mendengar soal barter yang dilakukannya saat di Diponegoro. Nah, setelah peristiwa itu, Soeharto diperiksa di kodim. Yang memeriksa itu seorang kapten CPM dan saya kenal. Belakangan, sang kapten itu ditangkap. Ngegebukinya itu bukan main. Istri dan anaknya disuruh nunggu. Itu setelah 1965. Kapten itu dibalas oleh orang-orangnya Soeharto.

Dalang G-30-S, menurut Bung Karno, kan, ada tiga macam. Tapi, yang santer hanya dari Soeharto. Cuma, kalau membaca, banyak liku-likunya. Kalau sekali dua kali enggak mengerti apa betul Pak Harto, PKI, atau Bung Karno. Kalau Bung Karno terang tidak. Sebab, pagi-pagi kami bertemu di depan Kementerian Penerangan. Bung Karno saat itu dari rumahnya Dewi. Nah, itu saya anggap beliau sedang menuju istana. Sejak itu kami enggak ketemu lagi dengan Bung Karno. Jadi enggak mungkin ia berada di belakang peristiwa itu.

Lantas, kalau PKI sendiri, yang mengherankan adalah PKI itu tempatnya orang pintar-pintar dan orang perjuangan sejak zaman Belanda. Dia, kan, tahu perhitungannya bahwa pemilihan umum mendatang yang sebentar lagi akan dimenangi PKI. Dan menang itu akan membawa perubahan macam-macam. Jadi, kalau umpamanya buatan PKI, kok, ya geblek temen. Buat apa? Apa PKI itu terpancing? Ya, enggak ngerti, Tapi, sekarang kami kumpulkan data mengenai ini. Soal kemungkinan didalangi PKI itu kecil sekali.

Kalau Soeharto, itu dimungkinkan karena dia musuh PKI sejak dia jadi Pangdam Diponegoro. Sementara itu, hubungan PKI dengan Bung Karno sedang baik, dan sama Soeharto mungkin jelek. Di situlah yang kami sangsikan.

Sudahlah. Yang saya harapkan adalah pelurusan sejarah dan menuntut Pak Harto, karena itu semua atas perintahnya. Misalnya, perintah kepada rakyat Jawa Tengah untuk membantu Sarwo Edhie dalam operasinya. Saya masih punya klipng koran-korannya.

O, ya, saya pernah bertemu dengan wakil keluarga korban Tanjung Priok, Pak Benny Biki. Beliau berkata, "Kita ini memiliki perbedaan yang fundamental. Saya lain dengan Bu Lami. Tapi, kita mengalami penindasan sama-sama. Jadi, mari kita kerja sama mendapatkan solusi yang baik. Saya juga tidak setuju tempat Bu Lami diabrak-abrik, diancam, dan didatangi Komando Anti-Komunis. Coba, rumah saya di Tangerang dibakar. Pak Benny Biki bilang dia enggak setuju dengan cara-cara begitu. Terus terang, saat 30 September 1965, saya enggak mengerti karena pada waktu itu Gerwani ada kesibukan, mau kongres pada Desember 1965. Saya sangat sibuk dan enggak ada hubungan dengan G-30-S. Tapi, bukti itu tidak dipakai oleh pengadilan. Apa yang saya ceritakan pada malam 30 September dan 1 Oktober itu enggak dipakai semua. Padahal, itu ada alibinya, yaitu teman saya yang namanya Sujinah, yang bertempat tinggal di Kantor Gerwani di Jalan Matraman 51 Jakarta. Sebagai wakil sekjen, saya memang bertempat tinggal di situ, siang-malam menunggu sekretariat. Kami tidak sempat memikirkan keadaan waktu itu karena kami juga sedang ujian. Saya mengambil D-3 di Akademi Bakhtaruddin. Itu pun tidak dipercaya. Jadi, saya simpulkan bahwa pengadilan itu memang pengadilan target. Putusan itu sudah ada di kantong hakim. Tinggal ketok aja.



Tapi, koran-koran memberitakan lain waktu itu. Saat itu wartawan diharuskan bikin berita begitu. Apalagi memang ada semacam larangan buat koran yang lain untuk memberitakan peristiwa itu berbeda. Dan, beberapa koran lainnya yang dibawah militer turut dilindungi, seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Kliping koran yang saya punya juga begitu.

Saya tahu peristiwa G-30-S itu dari teman-teman pengurus setelah kejadian. Saat pencarian mayat itu (para jenderal, Red.) pada 4 Oktober 1965 dan saya menonton orang ramai di jalan itu pada 4 Oktober. Sesudah itu Gerwani diburu dan kami tidak berani lagi di kantor. Apalagi, kantor kami dikepung. Setelah 6 Oktober saya betul-betul tidak berani berada di kantor. Lalu, saya pergi. Sebenarnya saya mutar-mutar saja di Jakarta hingga 11 Agustus 1967 ketika saya ditangkap.

Anehnya, saya baru diadili pada 1974. Lalu, dihukum 20 tahun penjara tanpa kesalahan yang jelas. Syukurlah, akhirnya saya dibebaskan bersyarat pada 1984 dan wajib lapor hingga 1986.

Saya ingat berita koran waktu itu mendiskreditkan kami. Karena itu, sakit hati sekali. Misalnya, soal tarian para anggota Gerwani di Lubang Buaya itu. Padahal, itu nari-nya di aula penjara Bukit Duri. Ya, tari genjer-genjer di tengah kehidupan porno. Jadi, disuruh nari-nari, lalu dipotrete dan difilmkan untuk pengadilannya Pak Band (Soebandrio, Red.). Itu yang dibawa dalam pengadilan Pak Ban. Betul-betul fitnah.

Yang keterlaluan, ada seorang pelacur dari Senen Jakarta yang buta huruf ditangkap patroli karena tanpa KTP. Dia dipaksa mengaku anggota Gerwani dan dalam BAP mengaku berada di Lubang Buaya dengan tugas memberi konsumsi seks kepada 200 tentara. Ia bubuhkan cap jempol karena takut bedil. Ada pula Inah, seorang istri oknum yang dicurigai ikut menjadi pelatih di Lubang Buaya. Lalu, dicomotlah seorang gelandangan di bawah jembatan Kebon Sirih Jakarta hanya karena dia bernama Sainah dan digebuki agar mengaku sebagai Inah, istri si pelatih itu. Dan orang seperti merekalah yang dijadikan saksi. Pokoknya, banyak kebohongan.

BLU dan Budi Kurniawan

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Surat Terbuka Pramodya Ananta Toer

kepada Keith Foulcher

Jakarta, 5 Maret 1985

Salam,

Surat 26 Februari 1985 saya terima kemarin, juga surat terbuka Achdiat K. Mihardja untuk teman-teman (sarjana) Australia yang dilampirkan. Terimakasih. Lampiran itu memang mengagetkan, apalagi menyangkut-nyangkut diri saya, dan tetap dalam kesatuan semangat kaum manikebuis pada taraf sekarang: membela diri dan membela diri tanpa ada serangan sambil merintihkannya masa lalu, yang sebenarnya lecet pun mereka tidak menderita sedikit pun. Total jendral dari semua yang dialami oleh kaum manikebuis dalam periode terganggu kesenangannya, belum lagi mengimbangi penganiayaan, penindasan, penghinaan, perampasan dan

perampokan yang dialami oleh satu orang Pram. Setelah mereka berhasil ikut mendirikan rezim militer, dengan meminjam kata-kata dalam surat terbuka tsb.: "All forgotten and forgiven" dan revisiannya: "We've forgiven but not forgotten." Saya hanya bisa mengelus dada. Kemunafikan dan keangkuhan dalam paduan yang tepat, seimbang dengan kekecilan nyalinya dalam masa ketakutan. Dan Bung sendiri tahu, perkembangan sosial- budaya-politik--di sini Indonesia--bukan semata-mata ulah perorangan, lebih banyak satu prosedur nasional dalam mendapatkan identitas nasional dan mengisi kemerdekaan. Tak seorang pun di antara para manikebuis pernah menyatakan simpati -- jangan bayangkan protes -- pada lawannya yang dibunuh, kias atau pun harfiah. Sampai sekarang. Misalnya terhadap seniman nasional Trubus. Japo[?] Lampong. Apalagi seniman daerah yang tak masuk hitungan mereka. Di mana mereka sekarang. Di mana itu pengarang lagu Genjer-genjer? Soekarno mengatakan: Yo sanak, yo kadang, yen mati m[?]a[?]lu kelangan. Yang terjadi adalah -- masih menggunakan suasana Jawa: tego larane, tego patine.

Masalah pokok pada waktu itu sederhana saja: perbenturan antara dua pendapat; revolusi sudah atau belum selesai. Yang lain-lain adalah masalah ikutan daripadanya. Saya sendiri berpendapat, memang belum selesai. Buktinya belum pernah muncul sejarah revolusi Indonesia. Karena memang belum ada distansi dengannya. Belum merupakan kebulatan yang selesai. Maka para sejarawan takut. Malah kata revolusi nasional cenderung dinamai dan dibatasi sebagai perang kemerdekaan.

Pertentangan manikebu dan pihak kami dulu tidak lain cuma soal polemik. Memang keras, tapi tak sampai membunuh, kan? Kan itu memang satu jalan untuk mendapatkan kebenaran umum, yang bisa diterima oleh umum? Bahwa pada waktu itu terjadi teror yang dilakukan oleh orang-orang Lekra sebagaimana dituduhkan sekarang, betul- betul saya belum bisa diyakinkan. Beb Vuyk dalam koran Belanda menuduh: teror telah dilakukan orang-orang Lekra terhadap beberapa orang, antaranya Bernard IJzerdraad. Waktu ia datang ke Indonesia dan menemuinya sendiri, IJzerdraad menjawab tidak pernah diteror. Dan Beb Vuyk tidak pernah mengkoreksi tulisannya. Beb Vuyk sendiri meninggalkan Indonesia setelah kegagalan pemberontakan PRRI-Permesta, kemudian minta kewarganegaraan Belanda. Mungkin ia merasa begitu pentingnya bagi Indonesia sehingga dalam usianya yang sudah lanjut merasa berkepentingan untuk mendirikan kebohongan terutama untuk menyudutkan saya. pada hal dalam polemik-polemik tsb. saya hanya menggunakan hak saya sebagai warganegara merdeka untuk menyatakan pendapat. Dan saya sadari hak saya. Seperti sering kali saya katakan: kewarga-negaraan saya peroleh dengan pergulatan bukan hadiah gratis.

Dan apa sesungguhnya kudeta gagal G-30S/PKI itu? Saya sendiri tidak tahu. Sekitar tanggal 24 bulan lalu saya menerima fotokopi dari seorang wartawan politik Eropa dari Journal of Contemporary Asia, tanpa nomor dan tanpa tahun, berjudul: "Who's Plot--New Light on the 1965 Events," karangan W.F. Wertheim. Itulah untuk pertama kali saya baca uraian dari orang yang tak berpihak. Juga itu informasi pertama setelah 20 tahun belakangan ini. Rupa-rupanya karena ketidaktahuan saya itu saya harus dirampas dari segala-galanya selama 14 tahun 2 bulan + hampir 6 tahun tahanan kota (tanpa pernyataan legal), tanpa pernah melihat dewan hakim yang mendengarkan pembelaan saya. Memang sangat mahal harga kewarganegaraan yang harus saya bayar. Maka juga kewarganegaraan saya saya pergunakan semak-

simal mungkin. Itu pun masih ada saja orang yang tidak rela. Juga surat pada Bung ini saya tulis dengan menjunjung tinggi harga kewarganegaraan saya.

Sekarang akan sayaanggapi tulisan A.K.M. Ia tidak ada di Indonesia waktu meletus peristiwa 1965 itu. Tetapi saya sendiri mengalami. Saya akan ceritakan sejauh saya alami sendiri, untuk tidak membuat terlalu banyak kesalahan.

Pada 1 Oktober 1965 pagihari saya dengar dari radio adanya gerakan Untung. Kemudian berita tentang susunan nama Dewan Revolusi. Sebelum itu pengumuman naik pangkat para prajurit yang ikut dalam gerakan Untung dan penurunan pangkat bagi mereka yang jadi perwira di atas letkol. Sudah pada waktu itu saya terheran-heran, kok belum-belum sudah mengurus pangkat? Ini gerakan apa, oleh siapa? Saya lebih banyak di rumah daripada tidak. Kerja rutine ke luar rumah adalah dalam rangka menyiapkan Lentera dan mengajar pada Res Publika. Dan sangat kadang-kadang ke pabrik pensil di mana saya "diangkat" jadi "penasihat." Jadi di rumah itu saja saya "ketahui" beberapa hal yang terjadi dari suara-suara luar yang datang. Mula-mula datang Abdullah S.P., itu penantang Hamka, waktu itu baru saja bekerja di sebuah surat kabar Islam yang baru diterbitkan, dan yang sekarang saya lupa namanya. Ia mengatakan merasa tidak aman dan hendak mengungsi ke tempatku. Saya keberatan, karena memang tidak tahu situasi yang sesungguhnya. Seorang pegawai tatausaha Universitas Res Publika datang ke rumah menyerahkan honor, dan mengatakan Universitas ditutup karena keadaan tidak aman. Ia menyerahkan honor lipat dari biasanya. Beberapa hari kemudian datang pegawai dari pabrik pensil, juga menyerahkan honor, juga lipat dari biasanya, karena pabrik terpaksa ditutup, keadaan gawat. Kemudian datang seorang teman yang memberitakan, rumah Aidit dibakar, demikian juga beberapa rumah lain. Ia juga memberitakan tentang cara massa bergerak. Mereka menyerang rumahtangga orang, kemudian datang para petugas berseragam yang tidak melindungi malah menangkap yang diserang. "Saya yakin Bung akan diperlakukan begitu juga," katanya. Soalnya apa dengan saya? tanyaku. "Kesalahan bung, karena bung tokoh." Itu saja? Tempatku di sini, kataku akhirnya.

Seorang penjahit, yang pernah dibisiki larangan menjahitkan pakaian saya oleh tetangga anggota PNI-- penjahit itu juga tetangga--menawarkan tempat aman pada saya nun di Brebes (kalau saya tidak salah ingat). Saya ucapkan terimakasih. Mengherankan betapa orang lain dapat melihat, keamananku dalam ancaman. Seorang teman lain datang dan menganjurkan agar saya lari. Mengapa lari? tanya saya. Apa yang saya harus larikan? Diri saya? dan mengapa?

Kemudian datang seorang pengarang termuda yang saya kenal. Biasanya ia langsung masuk ke belakang dan membuka sendiri lemari makan. Ia tidak mengulangi kebiasaannya. Tingkahnya menimbulkan kecurigaan. Saya masih ingat kata-kata yang saya ucapkan kepadanya: saya seorang diri dari dulu, kalau pengeroyok memang hendak datangi saya akan saya hadapi seorang diri; tempat saya di sini.

Keadaan makin lama makin gawat. Isteri saya baru dua bulan melahirkan. adalah tepat bila ia dan anak-anak untuk sementara menginap di rumah mertua. Papan nama saya, dari batu marmer, bertahun-tahun hanya tergeletak, sengaja saya pasang di tembok depan dengan lebih dahulu memahat tembok. Sebagai pernyataan: saya di sini, jangan nyasar ke alamat yang salah.

Di tempat lain isteri kedua mertua saya mengadakan selamatannya untuk keselamatan saya. Sementara itu saya tetap tinggal di rumah menyiapkan ensiklopedi sastra Indonesia. Dalam keadaan lelah saya beralih mempelajari Hadits Bukori. di malam hari semua lampu saya padamkan dan saya duduk seorang diri di beranda. Teman saya hanya seorang, adik saya yang pulang ke Indonesia untuk menyiapkan disertasinya, Koesalah Soebagyo Toer.

Kemudian datang tanggal 13 Oktober 1965 jam 23.00. Tahu-tahu rumah saya sudah dikepung. Lampu pagar dari 200 watt--waktu tegangan hanya 110, namun dapat dianggap terlalu mewah untuk kehidupan kampung--saya nyalakan. Di depan pintu saya lihat orang lari menghindari cahaya. Mukanya bertopeng. Tangannya membawa pikar. Malam-malam, dengan topeng pula, langsung terpikir oleh saya, barang itu tentu habis dirampoknya dari rumah yang habis diserbu. Saya tahu itu pikiran jahat. apa boleh buat karena saya suara- gencar memberitakan ke rumah, pihak militer mengangkuti anak-anak sekolah ke atas truk dan disuruh berteriak-teriak menentang Soekarno. Saya tidak pernah melihat sendiri. Saya percaya, karena pelda (atau peltu?) yang tinggal di depan rumah saya, sudah dua malam berturut-turut bicara keras di gang depan rumah, bahwa militer punya politik sendiri, Soekarno sudah tidak ada artinya. Konon ia bekas KNIL. Malah pada malam kedua ia buka mulut keras-keras sambil mondar-mandir, dan saya merasa itu ditujukan pada saya, rokok kretek saya cabut dari bibir dan saya lemparkan padanya. Terdengar ia melompat sambil memekik. Jadi kalau saya punya pikiran jahat seperti itu bukan tidak pada tempatnya. Nah, setiap lampu pagar saya matikan, muncul gerombolan di depan pintu. Bila saya nyalakan lagi mereka lari. Jelas mereka muka-muka yang saya telah kenal. Tak lama kemudian batu-batu kali tetangga samping, yang dipersiapkan untuk membangun rumah, berlayangan ke rumah saya. Itu tidak mungkin dilemparkan oleh tenaga satu orang. Paling tidak dua orang dengan jalan membandulnya dengan sarung atau dengan lainnya. Kalau anak-anak saya masih di rumah, terutama bayi 2 bulan itu, saya tak dapat bayangkan apa yang bakal terjadi. Batu besar berjatuhan di dalam rumah menerobosi genteng dan langit-langit. Jadi benar-benar orang menghendaki kematian saya. Saya ambil tongkat pengepel dari kayu keras, juga mempersenjatai diri dengan samurai kecil (pemberian Joebaar Ajoeb sekembalinya dari Jepang). Ini hari terakhir saya, di sini, di tempat saya. Saya tahu, takkan mungkin dapat melawan satu gerombolan, tapi saya toh harus membela diri? Jalan kedua untuk bertahan adalah memberi gerombolan itu sesuatu yang mereka ingat seumur hidup: kata-kata yang lebih ampuh dari senjata.

Dengan suara cukup keras saya memekik: Ini yang kalian namai berjuang? Kalau hanya berjuang aku pun berjuang sejak muda. Tapi bukan begini caranya. Datang ke sini pemimpin kalian! Berjuang macam apa begini ini?

Ingar-bingar terhenti. Juga lemparan batu. Tiba-tiba sebangkah besar batu kali menyambar paha saya dan melesat mengenai pintu depan yang sekaligus hancur. Lemparan batu menjadi hebat kembali. Lampu pagar sengaja dihancurkan dengan lemparan juga.

Saya dengar suara: Mana minyaknya. Sini, bakar saja. Tetapi saya dengar juga suara orang tua tetangga sebelah kiri saya, seorang dukun cinta: jangan, jangan dibakar, nanti rumah saya ikut terbakar. Tak lama kemudian terdengar suara lagi:

jangan lewat di tanah saya. Waktu saya lihat ke dalam rumah adik saya sudah tidak ada. Rupanya ia meloloskan diri dari pintu pagar belakang dan langsung memasuki tanah sang dukun cinta.

Dan betul saja kata teman itu: kemudian datang orang-orang berseragam. Metode kerja yang kelak akan terus-menerus dapat dilihat. Mereka terdiri dari polisi dan militer. Saya belum lagi sempat menggunakan tongkat dan samurai saya, mereka belum lagi memasuki pekarangan rumah saya.

Komandan militer operasi dan gerombolannya saya bukakan pintu. Mereka masuk dan langsung menyalahkan saya: sia-sia melawan rakyat. Kontan saya jawab: Gerombolan, bukan rakyat.

Setelah mereka memeriksa seluruh rumah ia bilang lagi: Siapkan, pak mari kami amankan, segera pergi dari sini. Saya berteriak memanggil adik saya. Dia muncul, entah dari mana. Dijanjikan akan diamankan, saya siapkan naskah saya Gadis Pantai untuk diselesaikan dan mesin tulis. Pada seorang polisi dalam team itu saya bertanya: kenal saya? Kenal, pak. Tolong selamatkan semua kertas dan perpustakaan saya. di situ adalah pekerjaan Bung Karno (waktu itu saya belum sampai selesai menghimpun cerpen-cerpen Bung Karno, dan korespondensi Soekarno-Sartono-Thamrin masih belum memadai untuk diterbitkan). Dia berjanji untuk menyelamatkan.

Mereka giring kami berdua melalui gang. Gerombolan itu berjalan mengepung di samping dan belakang. Ada yang membawa tombak, keris, golok, belati. Benar, alat negara itu tidak menangkap gerombolan penyerbu, malah menangkap yang diserbu. Dan sebanyak itu dikerahkan untuk menumpas satu-dua orang. Hebat benar membikin momentum qua perjuangan. Sampai di sebuah lapangan gang jurusan belakang rumah, sebelum dinaikkan ke atas Nissan mereka ikat tanganku ke belakang dan menyangkutkan ke leher, sehingga rontaan pada tangan akan menjerat leher. Tali mati. Bukan simpul mati yang diajarkan di kepanduan. Tali mati. Macam ikatan yang dipergunakan untuk tangkapan yang akan dibunuh semasa revolusi dulu. Tentu saja saya menyesal akan mati dalam keadaan seperti ini. Lebih indah bila dengan bertarung di atas tanah tempat saya tinggal. Melewati jembatan depan rumah sakit umum pusat Koptu Sulaiman menghantamkan gagang besi stennya pada matakuku. Cepat saya palingkan kepala dan besi segitiga itu tak berhasil mencopot bola mata tetapi meretakkan tulang pipi. Saya memahami kemarahannya, bukan padaku sebenarnya, tapi pada atasannya, karena tak boleh ikut memasuki rumah saya. Mereka bawa kami ke Kostrad, kalau saya tidak keliru. Yang sedang piket adalah seorang Letkol. Kami diturunkan di situ, dan pada perwira itu saya minta agar kertas dokumentasi dan perpustakaan diselamatkan. Kalau Pemerintah memang menghendaki agar diambil, tapi jangan dirusak. Ia menyanggupi. Dari situ kami dibawa memasuki sebuah kompleks perumahan yang saya tak tahu kompleks apa. Dari jendela nampak puncak emas Monas. Kemudian saya dapat mengenali rumah itu; hanya masuknya tidak berkelok-kelok melalui kompleks, tetapi langsung dari jalan raya, karena pada 1955 di ruang yang sama saya pernah menemui Erwin Baharuddin, bekas sesama tahanan Belanda di penjara Bukitduri.

Piket mengambil semua yang saya bawa di tangan, naskah dan mesin tulis, juga samurai yang tersisipkan dalam kaos kaki. Waktu ia tinggal seorang diri rolex saya

dikembalikan, berpesan supaya jangan kelihatan, sembunyikan baik-baik. kami dipersilakan ke sebuah ruangan tempat di mana sudah menggelayor di lantai beberapa orang. Seorang adalah Daryono dari suatu SB (entah SB apa) dan seorang perjaka jangkung tetangga sendiri. Piket yang mengembalikan jamtangan itu memasuki ruangan tempat kami tergolek di lantai. Di sebuah papantulis besar tertulis dengan kapur: Ganyang PKI. Ia pergi ke situ dan menghapus tulisan itu sambil berguman: apa saja ini!

Seorang bocah berpangkat kopral, bermuka manis, menghampiri dan menanyai ini-itu. Saya tanyakan apa pangkatnya. Ia menjawab dengan pukulan dan tempeleng, kemudian pergi. Kurang lebih dua jam kemudian saya lihat Nissan patrol datang dan menurunkan-nurunkan barang. Beberapa contoh ditaruh di atas meja di ruangan tempat kami menggeletak di lantai. Saya kenal benda-benda itu: kartotik file saya sendiri, dokumentasi potret sejarah, malah juga klise timah yang saya siapkan untuk saya pergunakan dalam jangka panjang. Saya jadi mengerti perpustakaan dan dokumentasi saya, jerih-payah selama lima belas tahun telah dibongkar, 5.000 jilid buku dan beberapa ton koleksi surat kabar. Angka-angka itu saya dapatkan dari sarjana perpustakaan yang sekitar dua tahun membantu saya.

Tangkapan-tangkapan baru terus berdatangan. Ada yang sudah tak bisa jalan dan dilemparkan ke lantai. Kemudian datang tangkapan yang langsung mengenali saya. Ia bertanya mengapa saya berlumuran darah. Baru waktu itu saya sadar kemejaku belang-bonteng kena darah sendiri, demikian juga celana, yang rupanya teriris batu kali yang dilemparkan. Dialah yang bercerita, semua kertas saya diangkut militer. Massa menyerbu dan merampok apa saja yang ada, sampai-sampai mangga yang sedang sarat berbuah digoncang buahnya. Tak ada satu cangkir atau piring tersisa. Rumah bung tinggal jadi bolongan kosong blong.

Jangan dikira ada perasaan dendam pada saya; tidak. Justru yang teringat adalah satu kalimat dari Njoto, yang A.K.M. juga kenal: Tingkat budaya dan peradaban angkatan perang kita cukup rendah, memprihatinkan, kita perlu meningkatkannya. Saya juga teringat pada kata-kata lain lagi: Kalau kau mendapatkan kebiadaban, jangan beri kebiadaban balik, kalau mampu, beri dia keadilan sebagai belasan. Dalam tahanan di RTM tahun 1960 saya mendapatkan kata baru dari dunia kriminal: brengsek. Sekarang saya dapat kata baru pula: di-aman-kan, yang berarti: dianiaya, sama sekali tidak punya sangkut-paut dengan aman dan keamanan. Sebelum itu saya punya patokan cadangan bila orang bicara denganku: ambil paling banyak 50% dari omongannya sebagai benar. Sekarang saya mendapatkan tambahan patokan: Kalau yang berkuasa bilang A, itu berarti minus A. Apa boleh buat, pengalaman yang mengajarkan.

Di antara orang kesakitan di kiri dan kanan saya, di mana orang tidak bisa dan tidak boleh ditolong, terbayang kembali wartawan Afrika--saya sudah tidak ingat dari Mali, Ghana atau Pantai Gading--yang waktu naik mobil pertanyakan: Apa Nasakom itu mungkin? Apa itu bukan utopi? Saya jawab: di Indonesia diperlukan suatu jalan. Setiap waktu bom waktu kolonial bisa meletus. Itu kami tidak kehendaki. Nampaknya Nasakom sebagai kenyataan masih dalam pembinaan. Dia bilang: Kalau Nasakom gagal? Bukankah itu berarti punahnya pemerintah sipil, karena Nasakom tersapu? Jawabku: Kami hanya bisa berusaha. Dia bilang lagi: Kalau Nasakom disapu, tidak

akan lagi ada kekuatan nasionalis, agama maupun komunis! Dialog selanjutnya saya sudah tak ingat.

Pagi itu-itu diawali kedatangan serombongan wartawan Antara, tanpa sepatu, semua lututnya berdarah. Di antaranya paman saya sendiri, R. Moedigdo, yang saya tumpangi hampir 3,5 tahun semasa pendudukan Jepang. Dia pun tak terkecuali. Kemudian saya dengar, mereka baru datang dari tangsi CPM Guntur dan habis dipaksa merangkak di atas kerikil jalanan. Menyusul datang power. Orang-orang militer melempar-lemparkan tangkapan baru itu dari atas geladak dan terbanting ke tanah. Ruangan telah penuh-sesak dengan tangkapan baru, sampai di gang-gang. Itu berarti semakin banyak erangan dan rintihan. Di antaranya terdapat sejumlah wanita. Sedang gaung dari pers yang menyokong militer sudah sejak belum ditangkap, tak henti-hentinya menalu gendang untuk membangkitkan emosi rakyat terhadap PKI dan organisasi massanya: Gerwani di Lubangbuaya memotongi kemaluan para jendral dan melakukan tarian cabul dan semacamnya, tipikal buah pikiran orang yang tak pernah mempunyai cita-cita. Bulu kuduk berdiri bukan karena tak pernah menduga orang Indonesia bisa membuat kreasi begitu kejinjya.

Kemudian datang waktu pemeriksaan. Saya dibawa ke ruang pemeriksaan, yang sepanjang jam, siang dan malam diisi oleh raungan dan pekikan. Juga dari mulut wanita. Memang ruang yang saya masuki waktu itu tidak seriuhi biasanya. Alat-alat penyetrus tidak dikerahkan. Di pojokan seorang KKO bertampang Arab, hitam, tinggi dan langsing, dengan kaki bersepatu bot menginjak kaki telanjang yang diperiksanya. Dan di antara jari-jemari pemuda malang itu disisipi batang pensil dan tangan itu kemudian diremas si pemeriksa sambil tersenyum dan bertanya: Ada apa? Ada apa kok memekik? Di samping pemuda itu adalah saya, diperiksa oleh seorang letnan (atau kapten?) bernama Nusrwan Adil.

Di luar dugaan pemeriksaan terhadap saya tidak disertai penganiayaan seperti dideritakan pemuda malang di samping kiri saya. Pemeriksa itu tenang dan sopan, dan mungkin cukup terpelajar dan beradab. Ia memulai dengan pertanyaan *mengapa saya berdarah-darah.*

Jawab: *terjatuh.*

Tapi itu bukan termasuk dalam acara pemeriksaan. Pertanyaan: Bagaimana pendapat tentang gerakan Untung?

Jawab: *tidak tahu sesuatu tentangnya.*

Pertanyaan: *Apa membenarkan gerakan itu?*

Jawab: *Kalau mendapat kesempatan mempelajari kenyataan-kenyataannya yang autentik mungkin dalam lima tahun sesudahnya saya akan bisa menjawab pertanyaan itu.*

Sebelum meneruskan tentang pemeriksaan ini saya sisipkan dulu beberapa hal sebelum penangkapan saya. Pertama: sejak semula saya sependapat bahwa gerakan Untung, yang kemudian dinamai G-30S/PKI, adalah gerakan dalam tubuh angkatan darat sendiri. Pendapat itu tetap bertahan sampai sekarang, juga sebelum membaca tulisan Wertheim dalam Journal of Contemporary Asia. Berita-berita

pengejaran dan pembunuhan semakin hari semakin banyak dan menekan. Kedua: seorang perwira intel pernah datang berkunjung khusus untuk menyampaikan, bahwa militer akan memainkan peranan kucing terhadap PKI sebagai tikus. Tiga: dua mahasiswa UI telah dilynch di jalanan raya yang baru dibangun, masih lengang, di sekitar kampus. Keempat: pemeriksaan terhadap para tangkapan berkisar pada dua hal, pertama keterlibatan dalam peristiwa Lubangbuaya, kedua keanggotaan Pemuda Rakyat dan PKI. Kelima: beberapa hari sebelum penangkapan seorang pegawai Balai Pustaka mengumumkan dalam harian Api Pancasila di Jakarta, bahwa saya adalah tokoh Pemuda Rakyat. Karena sebagai pelapor ia menyebutkan diri pegawai Balai Pustaka, jadi saya datang menemui direktur BP -- waktu itu Hutusuhut, kalau saya tidak salah ingat -- dan mengajukan protes karena BP dipergunakan sebagai benteng untuk menyebarkan informasi yang salah tentang saya. Direktur BP menolak protes saya. Pegawai yang menulis itu tinggal beberapa puluh langkah dari rumah saya. Dalam peristiwa plagiat Hamka ia pernah mengirimkan surat pembelaan untuk Hamka dan hanya sebagian daripadanya saya umumkan.

Dan memang ruangan rumah saya pernah dipinjam untuk pendirian ranting Pemuda Rakyat. Tetapi itu bukan satu- satunya. Kalau sore ruangan belakang juga menjadi tempat taman kanak-kanak (reportase tentangnya pernah ditulis oleh Valentin Ostrovsky, kalau saya tidak meleset mengingat). Setiap Kamis malam ruangan depan dipergunakan untuk tempat diskusi Grup diskusi Simpat Sembilan. Setiap pertemuan didahului dengan pemberitahuan pada kelurahan. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat dituduhkan illegal.

Keenam: seseorang menyampaikan pada saya, mungkin juga pada sejumlah orang lagi, kalau diperiksa adakan anggota PKI atau ormasnya, akui saja ya--tidak peduli benar atau tidak; soalnya mereka tidak segan-segan membikin orang jadi invalid seumur hidup untuk menjadi tidak berguna bagi dirinya sendiri pun untuk sisa umurnya selanjutnya. Dan, tidak semua orang tsb., dapat saya sebut namanya, karena memang tidak mampu mengingat--hampir 20 tahun telah liwat.

Jadi waktu pemeriksa menanyakan apakah saya anggota PKI, saya jawab ya.

Pertanyaan: *Apakah percaya negara ini akan jadi negara komunis?*

Jawab: *Tidak dalam 40 tahun ini.*

Sebabnya?

*Faktor geografi dan konservativitas Indonesia.*

Cuma itu sesungguhnya isi pemeriksaan pokok. Tetapi karena selama dalam penahanan itu harian Duta Masyarakat memberitakan reportase tentang penyerbuan gerombolan itu ke rumah saya dan rumah S. Rukiah Kertapati, di mana disebutkan di rumah saya ditemukan buku-buku curian dari museum pusat dan di rumah Rukiah setumpuk permata, jadi pemeriksaan berpusat pada soal pencurian tsb. Memang saya pernah meminjam satu beca majalah, harian dan buku dari museum pusat. Yang belum saya kembalikan adalah Door Duisternis to Licht Kartini dan harian Medan Prijaji tahun 1911 dan 1912. Kalau arsip itu tersusun baik, akan bisa ditemu-



kan, bahwa sumbangan saya ada 10 kali lebih banyak dari pada yang masih saya pinjam.

Dengan demikian pemeriksaan selesai. Benar-tidaknya omongan saya ini dapat dicek pada proses verbal, sekiranya masih tersimpan baik pada instansi yang berwenang.

Bila ada selisih, soalnya karena waktunya sudah terlalu lama.

Mungkin Bung bertanya dari mana saya tahu ada berita dalam Duta Masyarakat yang menuduh saya mencuri. Ya, pada suatu pagi muncul seorang kapten di ruang tempat serombongan tahanan. Ia langsung mengenali saya, sebaliknya saya mengenal dia sebagai sersan di RTM tahun 1960. Ia bertubuh tinggi, berkulit langsung dan bibir atasnya suwung. Saya tak dapat mengingat namanya. Suatu malam ia kunjungi aku di kamar kapalselam (sel isolasi) di RTM itu. Banyak mengobrol, antara lain ia bercerita pernah ikut pasukan merah dalam Peristiwa Madiun. Pagi itu ternyata ia berpangkat kapten. Langsung ia bertanya di mana Sjam. Itu untuk pertama kali saya dengar nama itu. Tapi ia segera membatalkan pertanyaannya dengan kata-kata: Ah, Pak Pram sastrawan, tentu tidak tahu siapa dia. Ramahnya luarbiasa, bawahannya diperintahkannya untuk mengambilkan kopi dan menyediakan veldbed untuk saya. Dan hanya perintah pertama yang dilaksanakan. Setelah ia pergi seorang sersan gemuk yang terkenal galak, dari Sulawesi, kalau tak salah ingat, juga seorang haji, memanggil saya dengan ramahnya dan menyuruh saya membaca Duta Masyarakat itu.

Nah Bung, setelah pemeriksaan satu rombongan dikirim ke CPM Guntur. Sebelum pergi saya minta pada Nusrirwan Adil untuk membebaskan adik saya, karena baru saja datang ke Indonesia untuk menyiapkan disertasinya. Ia luluskan permintaan saya, diketikkan surat pembebasan. Sebelum pergi ia saya titipi jam tangan saya, untuk dipergunakan belanja istri saya.

Di Guntur hanya untuk didaftar dan dirampas apa yang ada dalam kantong para tangkapan. Sepatu sampai sikatgigi dan ikatpinggang. Waktu itu baru saya sadari di dalam kantong saya masih tersimpan honorarium dari Res Publik dan pabrik pensil. Semua dirampas dengan alasan: nanti dalam tahanan agar tidak dicuri temannya. Dari guntur kami dibawa ke Salemba. Tangan tetap di atas tengkuk dan tubuh harus tertekuk, tidak boleh berdiri tegak, setinggi para penangkap. Dalam pelataran-pelataran penjara itu nama dibaca satu-persatu oleh seorang militer. Waktu sampai pada giliran saya ia berhenti dan berseru: Lho, Pak Pram, di sini ketemu lagi? Peltu (atau pelda) itu adalah pengawal bersepedamotor yang mengawal sebuah sedan biru-tua dalam bulan November 1960 dari Peperti Pegangsaan ke RTM Jl. Budi Utomo. Dalam sedan itu saya, setelah diminta "diwawancara" oleh Sudharmono, mayor BC Hk. Dan peltu atau pelda di depanku Oktober 1965 itu adalah Rompis.

Sejak itu berkelanjutan perampasan hak-hak kewarganegaraan dan hak-hak sipil saya selama hampir 20 tahun ini. Dan Bung Keith, tidak satu orang pun dari kaum manikebuis itu terkena lecet, tidak kehilangan satu lembar kertas pun. Sampai sekarang pun mereka masih tetap hidup dalam andaian, sekiranya kaum kiri menang. Dari menara andaian itu mereka menghalalkan segala: perampasan, penganiayaan, penghinaan, pembunuhan. Tetap hidup dalam kulit telur keamanan

dan kebersihan, suci, anak baik-baik para orangtua, dan anak emas dewa kemenangan. Paling tidak sepuluh tahun lamanya saya melakukan kerjapaksa, mereka satu jam pun tidak pernah. Nampaknya mereka masih tidak rela melihat saya hidup keluar dari kesuraman. Waktu saya baru pulang dari Buru, banyak di antaranya yang memperlihatkan sikap manis. Bukan main. Tetapi setelah saya menerbitkan BM, wah, kembali muncul keberingasan.

Tentang A.K.M. sendiri pertama kali saya mengenalnya pada tahun 1946, di sebuah hotel di Garut. Ia tidak mengenal saya. Waktu itu saya sedang dalam sebuah missi militer. Ia datang ke hotel itu dan ngomong-ngomong dengan pemiliknya. Namanya tetap teringat, karena waktu itu ia redaktur majalah Gelombang Zaman yang terbit di Garut.

Pertemuan kedua ialah di Balai Pustaka, waktu ia masih jadi pegawai Balai Pustaka yang dikuasai oleh kekuasaan pendudukan Belanda. Setelah penyerahan kedaulatan ia jadi sep saya dalam kantor yang sama--ya saya sebagai pegawai negeri dengan pengalaman semasa revolusi sama sekali tidak diakui, karena semua pegawainya bekas pegawai kekuasaan Belanda. Sewaktu ia hidup aman di Australia, ternyata ia masih dalam hidup dalam andaian, dan sebagaimana yang lain-lain tetap membiakkan pengalaman kecil-mengecil semasa Soekarno untuk jadi gabus apung dalam menyudutkan orang-orang semacam saya. Titik tolaknya tetap andaian. Semua tidak ada yang mencoba menghadapi saya secara berdepan, dari dulu sampai detik saya menulis ini.

Dalam pada itu yang dirampas dari saya sampai detik ini belum dikembalikan. Rumah saya diduduki oleh militer, dari sejak berpangkat kapten sampai mayor atau letkol, bahkan bagian belakang disewakan pada orang lain. Itu pun hanya rumah kampung, namun punya nilai spiritual bagi keluarga dan saya sendiri. Barangkali ada gunanya saya ceritakan.

Saya mendirikannya pada tahun 1958 bulan-bulan tua. pajak Honoraria seorang pengarang adalah 15 persen, langsung dipotong oleh penerbit. Waktu saya menyiarkan protes tentang tingginya pajak yang 15 persen, tidak lebih dari seminggu kemudian perdana menteri Djuanda menaikkannya jadi 20 persen, sama dengan pajak lotre. Maka juga pendirian rumah itu melalui ancang-ancang panjang. Kumpul-kumpul dulu kayu dari meter kubik pertama hingga sampai sepuluh dst. Saya merencanakan rumah berdinding bambu sesuai dengan kekuatan. Sepeda motor saya, BSA 500cc.--sepeda motor militer sebenarnya--juga dikurbankan. Tiba-tiba mertua lelaki datang dan mengecam: mengapa mesti bambu? Itu terlalu mahal biayanya. Menyusul perintah: tembok! Ternyata bukan asal perintah. Ia tinggalkan pada saya dua puluh ribu rupiah. Kalau sudah ada, kembalikan, katanya lagi. Maka jadilah rumah tembok yang terbagus di seluruh gang. Ternyata tidak sampai di situ ceritanya. Rekan-rekan yang tidak bisa mengerti, seorang pengarang bisa mendirikan rumah, mulai dengan desas-desusnyanya. Satu pihak mengatakan, saya telah kena sogok Rusia. ada yang mengatakan RRT. Teman-teman yang dekat mengatakan saya telah kena sogok Amerika. Orang tetap tidak percaya seorang pengarang bisa membangun rumah sendiri. Mereka lupa, dalam Bukan Pasar Malam telah saya janjikan pada ayah saya untuk memperbaiki rumah, dalam tahun pertama saya keluar dari penjara Belanda. yang saya lakukan lebih daripada apa yang saya

janjikan, saya bangun baru, dan pada masanya adalah rumah terbagus di seluruh kompleks, sekali pun hanya berdinding kayu jati. (Sekarang memang jati lebih mahal dari tembok).

Kami sempat meninggalkan rumah kampung itu hanya sampai tahun 1965 atau 7 tahun. Orang yang tidak berhak justru selama hampir 20 tahun. Iseng-iseng pernah saya tanyakan; jawabnya sekenanya: apa bisa membuktikan rumah itu bukan pemberian partai? Habis sampai di situ. Pada yang lain mendapat jawaban: jual saja rumah itu, separohnya berikan pada penghuninya. Dan saya bilang: saya tidak ada prasangka orang yang menghuni rumah saya itu dari golongan pelacur. Walhasil sampai sekarang tetap begitu saja.

Baik, kaum manikebuis masih belum puas dengan segala yang saya alami. Saya sama sekali tidak punya sedikitpun perasaan dendam. Setiap dan semua pengalaman indrawi mau pun jiwai, bukan hanya sekedar modal, malah menjadi fondasi bagi seorang pengarang.

Apa yang dialami A.K.M. semasa Soekarno masih belum apa-apa dibandingkan yang saya alami. Peristiwa Kemayoran? Pada 1958 sepulang dari Konferensi Pengarang A - A di Tasykent lewat Tiongkok saya tidak diperkenankan lewat Hongkong dan terpaksa lewat Mandalay, Burma. Artinya, dengan kesulitan tak terduga. Sampai di Rangoon pihak Kedutaan RI tidak mau membantu memecahkan kesulitan saya. Apa boleh buat, tidak ada jalan bagi saya daripada mengancam akan memanggil para wartawan Rangoon dan Jawatan Imigrasi Burma, memberikan pernyataan, bahwa ada kedutaan yang tak mau mengurus warganegara yang terdampar. Mereka terpaksa mengurus saya sampai tiba di Jakarta. Dari Rangoon kemudian datang surat yang menuntut macam-macam. Saya hanya menjawab dengan caci-maki dengan tembusan pada menteri luar negeri, waktu itu Dr. Subandrio. Saya harap surat itu masih tersimpan dalam arsip. Peristiwa itu terjadi berdekatan dengan hari saya menghadap Bung Karno untuk menyerahkan dokumen keputusan Konferensi di samping juga bingkisan dari Ketua Dewan Menteri Uzbekistan, Syaraf Rasyidov, kepadanya, disaksikan oleh beberapa orang, diantaranya Menteri Hanafi. Tak terduga dalam pertemuan itu terjadi sedikit pertikaian dengan Bung Karno. Ia memberi saya suatu instruksi dan saya menolak, karena sebagai pengarang saya punya porsi kerja sendiri. Pertikaian ini kemudian melarut, yang saya anggap wajar, sampai akhirnya atas perintah Nasution saya ditahan di RTM, kemudian ke tempat lebih keras di Cipinang, karena menentang PP 10. Hampir satu tahun dalam penjara, kemudian dilepaskan dalam satu rombongan dan dengan satu nafas dengan para pemberontak PRRI-Permesta sebagai hadiah terbebasnya Irian Barat. Pada hal tidak lebih dari 3 tahun sebelumnya Nasution itu-itu juga memberi saya surat penghargaan no. 0002 untuk bantuan pada angkatan perang dalam melawan PRRI di SumBar.

Penahanan 1960-61 itu merupakan pukulan pahit bagi saya. Bukan saya yang melakukan adalah kekuasaan Pemerintah saya sendiri. Juga sama sekali tidak ada setitik pun keadilan di dalamnya. Saya merasa hanya menuliskan apa yang saya anggap saya ketahui, dan berdasarkan padanya pendapat saya sendiri. Dengan nama jelas, lengkap. Alamat saya pun jelas, bukan seekor keong yang setiap waktu dapat memindahkan rumahnya. Saya membutuhkan pengadilan. Dan itu tidak

diberikan kepada saya. Dalam isolasi ketat di Cipinang saya kirimkan surat pada Bung Karno melalui Ngadino, kemudian mengganti nama jadi Armunanto, kepala redaksi Bintang Timur dan anggota DPA. Surat itu bertujuan untuk mendapat hukuman yang justified, entah sebagai pengacau, entahlah sebagai penipu. Setidaknya-tidaknya bukan yang seperti sekarang. Ia tidak meneruskannya, dengan alasan ada orang lain menyimpan tembusannya. Orang itu adalah H.B. Jassin. Saya yakin surat itu masih tersimpan.

Dapat Bung bandingkan, bahwa andaian kesulitan semasa Soekarno masih tidak berarti dengan kenyataan kesulitan yang saya sendiri alami.

Saya heran, bahwa di dalam halaman 2 A.K.M. menyatakan keheranannya mengapa namanya dicoret dari daftar pencalonan Front Nasional. Terasa lucu dan naif, selama ia sendiri tidak punya kekuasaan untuk menentukannya. Katanya Lekra membakari bukunya? Saya baru tahu dari halaman itu. Mungkin Boen S. Oemarjati yang berhak memberi penjelasan.

Di halaman 3 alinea pertama terdapat kisah yang mengagumkan tentang Taslim Ali. Saya sering datang ke tempatnya di gedung perusahaan Intrabu. Jadi dalam gambaran saya orang yang "selalu menterornya dengan meletakkan pistol di atas meja" -nya itu adalah saya. Pramodya Ananta Toer. Soalnya surat Goenawan Muhammad tertanggal 28 November 1980 pada Sumartana mengatakan (hlm.3): "Achdiat pernah bercerita, bahwa Pram pernah datang ke Balai Pustaka dengan meletakkan pistol di meja." Kapan itu terjadi? Pistol siapa? Siapa yang saya temui dan saya teror? Kiranya, kalau Goenawan tak berandai- andai, A.K.M. sendiri yang berhak menjawab. Dalam alam kemerdekaan nasional memang pernah saya bersenjata api. Suatu hari dalam 1958. Bukan pistol, tapi parabellum. Tempat: dalam sebuah jeep dalam perjalanan antara Bayah dengan Cikotok. Saksi: seorang letnan angkatan darat. Ia membutuhkan bantuan saya untuk menyelidiki benartidaknya ada boulyon-boulyon emas disembunyikan oleh Belanda sebelum meninggalkan Jawa pada 1942 di dasar tambang mas Cikotok, dengan kesimpulan, bahwa semua itu omong kosong belaka. Mengapa bersenjata? Karena sebelumnya sebuah kendaraan umum telah dicegat DI, dibakar. Dan bangkainya masih nongkrong di pinggir jalan. Sebagai pengarang saya masih lebih percaya kepada kekuatan kata daripada kekuatan peluru yang gaungnya hanya akan berlangsung sekian bagian dari menit, bahkan detik. Dan saya pun tidak pernah bisa diyakinkan ada orang datang untuk menteror Taslim Ali. Apa yang bisa didapatkan dari dia? Sebaiknya A.K.M. menyebut jelas siapa nama penteror itu.

Di halaman 5 tulisan A.K.M. alinea terbawah ditulis bahwa: "di depan rumahnya saya sempat menyusukan selebar 10 ribu rupiah ke dalam kepalannya. Dia agaknya begitu terharu, sehingga nampak matanya basah tergenang," dan "saya tahu Pram tentu butuh duit ketika itu." Memang agak janggal menampilkan saya saya semacam itu. Pada waktu itu saya tidak dapat dikatakan dalam kesulitan keuangan. Segera setelah pulang dari Buru sejumlah bekas tahanan Buru datang pada saya minta dibantu memecahkan kesulitan mereka mencari penghidupan. Memang pihak gereja telah banyak membantu, dan saya menghormati dan menghargai jasanya pada mereka dengan tulus. Tetapi selama status dan namanya bantuan barang tentu tidak mencukupi kebutuhan apalagi untuk keluarganya. Jadi saya dirikan sebuah PT

pemborong bangunan, sebuah usaha yang bisa menampung banyak tenaga. Pada waktu A.K.M. datang ke rumah telah 36 orang ditampung, sebagian berkeluarga. Tidak kurang dari 5 rumah dikerjakan, di antara 2 rumah mewah. Ada di antara mereka menumpang ada saya. Usaha ini telah dapat memberi hidup (terakhir) 60 orang dengan keluarganya. Tapi kesulitan itu?

Beberapa kali datang intel, yang dengan lisan mengatakan, rumah saya jadi tempat berkumpul tapol. Beberapa orang dari kantor kotapraja memberi ultimatum untuk menyediakan uang sekian ratus ribu dalam sekian hari. Seseorang datang dan mengibarkan-ngibarkan kartu identitasnya sebagai intel Hankam. Seorang datang mengaku sebagai pegawai sospol Depdag dengan tambahan keterangan, teman-temannya orang Batak banyak, dan orang tidak selamanya waspada. Tak akan saya katakan apa maksud kedatangan mereka. Itu yang datang dari luar. Kesulitan dari dalam pun tak kalah banyaknya. Teman-teman bekas tapol rata-rata sudah surut tenaganya karena tua. Mereka belum terbiasa dengan teknik baru pembangunan rumah sekarang. Mereka tidak terbiasa dengan material baru dan pengerjaannya. Di samping itu kerjapaksa berbelas tahun tanpa imbalan tanpa penghargaan, setiap hari terancam hukuman, telah berhasil merusakkan mental sebagian dari mereka. Dalam pekerjaan yang mereka hadapi mereka tidak berbekal ketrampilan vak. Sedang impian berbelas tahun dalam posisinya sebagai budak-budak Firaun adalah terlalu indah. Seorang yang di Buru mempunyai setiakawan begitu tinggi dan diangkat jadi kepala kerja, kemudian lari membawa uang, dan bukan sedikit. Seorang yang relatif masih muda, suatu malam datang dengan membawa truk dan mengangkut material bangunan yang telah tersedia dan menjualnya di tempat lain dengan harga rendah untuk dirinya sendiri. Seorang lagi yang juga tergolong muda, sama sekali tanpa ketrampilan tukang, mendadak mengorganisasi pemogokan dengan tuntutan berlipat dari hasil kerjanya. Pick-up Luv Chevrolet, sumbangan teman-teman Savitri, dalam 3 bulan sudah berban gundul dan penyok-penyok.

Pukulan lain yang tak kurang menyulitkan datang. Memang sudah diselesaikan sekitar 8 rumah dengan keadaan seperti itu. Kemudian dua di antara yang dibangunkan rumahnya tidak mau melunasi kewajibannya, mengetahui kedudukan hukum kami lemah. Berkali-kali Savitri minta pertanggungjawaban atas bantuan teman-temannya yang diberikan. Saya tak mampu lakukan itu. Tidak lain dari saya sendiri yang akan merasa malu, dan semua harus saya telan sendiri. Akhirnya saya perintahkan pembubaran PT itu tanpa pernah memberikan pertanggungjawaban pada teman-teman Savitri.

Nah Bung, seperti itu situasi waktu terima selebar sepuluh ribu itu, yang sama sekali tidak pernah saya kira akan dipergunakan oleh A.K.M. untuk memperindah gambaran tentang dirinya. Semua kebaikan tidak akan sia-sia memang bila tidak berpamrih. Dengan pamrih pun tentu saja tidak mengapa, sejauh setiap tindak manusia yang sadar pasti mempunyai motif. Tetapi bila pemberian dipergunakan sebagai investasi, yang setiap waktu dikutip ribanya, sekalipun hanya riba moril, itu memang betul-betul investasi, bukan pemberian. Dan siapa di dunia ini tidak pernah menerima? Waktu saya baru datang dari Buru dan sejumlah orang yang datang hanya untuk bersumbang. Jumlahnya dari 60 sampai 100 ribu, di antaranya 3 mesin tulis, yang tiga-tiganya langsung diteruskan untuk tapol yang lebih memerlukan. Demikian juga halnya dengan uang pemberian. Saya pribadi praktis tidak ada uang

dalam kantong. Itu akan kelihatan bila berada di luar rumah. Di Buru pun ada sejumlah pemberi, dari lingkungan dalam dan luar tapol, dari satu sampai sepuluh ribu. Dalam keadaan sulit di Buru pun orang normal tidak bisa tinggal jadi penerima saja. Terutama pihak gereja Katholik pernah memberi keperluan tulis-menulis saya setiap bulan. Bahkan pernah saya terima 2 kali berturut satu kardus besar berisi kacamata, dan pakaian untuk saya pribadi. (Sampai sekarang saya simpan.) Maksud saya hanya untuk menerangkan, pada bangsa-bangsa terkebelakang, atau menurut redaksi baru bangsa-bangsa yang berkembang, memberi adalah keluarbiasaan dan menerima adalah kebiasaan yang perlu dinyatakan.

Jangan dikira saya menulis demikian dengan emosi. Tidak. Suatu dialog bagi saya tetap lebih menyenangkan daripada monolog. Setidak-tidaknya dialog adalah pencerminan jiwa demokratis. Tetapi ucapan all forgiven and forgotten atau we've forgiven but not forgotten, benar - benar produk megalomaniak yang disebabkan mendadak bisa melesat dari kompleks inferiornya, bukan karena kekuatan dalam, tapi luar dirinya.

Tentang Pancasila di hlm. 6, saya takkan banyak bicara kecuali menyarankan untuk membuka-buka kembali pers Indonesia semasa Soekarno, khususnya sekitar sebab mengapa presiden RI membubarkan konstituante itu. Golongan mana yang menolak dan mana yang menerima Pancasila sebelum dapat interpretasi atau pun revisi, formal ataupun non- formal.

Dalam hubungan ini saya teringat pada ucapan Nyoto, kalau tidak salah di alun-alun Klaten pada tahun 1964, bahwa nampak ada kecenderungan pada suatu golongan masyarakat (saya takkan mungkin mampu mereproduksi redaksinya) yang membaca kalimat-kalimat Pancasila menjadi: Satu, Ketuhanan yang Maha Esa; Dua, Ketuhanan yang Maha Esa; Tiga, Ketuhanan yang Maha Esa; Empat, Ketuhanan yang Maha Esa; dan Lima, Ketuhanan yang Maha Esa. Dia tidak dalam keadaan bergurau.

Selama 14 tahun dalam tahanan ucapan Nyoto bukan saja menjadi kebenaran, lebih dari itu. Dakwah-dakwah yang diberikan, atau lebih tepatnya dengan istilah orde baru santiaji, orang tidak menyinggung sila-sila lain sesudah sila pertama, kalau menyinggung pun hanya sekedar penyumbat botol kosong: beragama dan tidak beragama berarti sembahyang. Tidak bersembahyang berarti tidak pancasilais, bisa juga anti-pancasila. Ya, buntut panjang itu rupanya diperlukan untuk menterjemahkan alam pikiran formalis Pribumi Indonesia, tidak mampu membebaskan diri dari lambang-lambang, upacara, hari peringatan, pangkat dan tanda-tandanya--dan bagi suku Jawa cukup lengkap di dideretkan dalam sastra wayang.

Berdasarkan pengalaman sendiri saya dapat katakan: Revolusi Indonesia tidak digerakkan oleh Pancasila; ia digerakkan oleh patriotisme dan nasionalisme. Baru pada 1946 saya pernah mendapat tugas untuk memberi penerangan tentang Pancasila dan PBB kepada pasukan. Selanjutnya tetap tidak ada pertautan antara Pancasila dengan Revolusi.

Saya menghormati pandangan A.K.M. tentang Pancasila yang ia yakini, sekali pun dengan Pancasila itu juga orang-orang sejenis kami di-buru-kan sampai 10 tahun, dan A.K.M. tidak pernah melakukan sesuatu protes. Dan pertanyaan kemudian,

apakah ia tetap berpandangan demikian--artinya tak perlu melaksanakannya dalam praktek--pada waktu kepentingan dan keselamatan jiwanya terancam? Bicara di lingkungan aman memang lebih mudah untuk siapapun, dan: tanpa pembuktian. Dalam hubungan Pancasila dengan demokrasi barat di hlm. 7 sebagai pesan A.K.M. pada rekan-rekannya sarjana Australia saya mempunyai kisah.

Pada 1984, Mr. Moh. Roem terkena serangan jantung dan dirawat di RSCM. Seorang dokter menjemput saya, mengatakan, Pak Roem menginginkan kedatangan saya. Saya tak pernah mengkaji apakah itu keinginan Pak Roem atau ambisi si dokter itu saja. Langsung saya berangkat bersama dengannya. Di ruang itu Pak Roem tidur dalam keadaan masih dihubungkan pada alat pengontrol jantung. Penjemput saya langsung menemani perawat sehingga hanya kami berdua di situ tanpa saksi. Menghadapi orang dalam keadaan gawat tentu saja saya tidak bicara apa-apa. Hanya beliau yang bicara sampai lelah, sebagai pertanda saya harus mengundurkan diri untuk menghemat tenaga yang beliau perlukan sendiri. Terlalu banyak yang disampaikan pada saya untuk orang dalam keadaan gawat seperti itu. Satu hal yang berhubungan dengan Pancasila dan demokrasi Barat, dan beliau sebagai ahli hukum, adalah: 50 + 1? Ya, biar begitu perlu dipertimbangkan dengan adil, tidak seperti selama ini dinilai. Dalam sejarah kita telah dibuktikan, bahwa kesatuan Indonesia terwujud hanya karena demokrasi parlementer Barat.

Nah, Bung Keith, inti persoalan dengan kaum manikebu cukup jelas: saya menggunakan hak saya sebagai warganegara Indonesia, hak yang juga ada pada kaum manikebu. Omong kosong bila dikatakan pada waktu itu mereka tak punya media untuk menerbitkan sanggahan. Waktu sekarang, waktu secara formal hak sanggah melalui mass media tidak ada, saya tetap menyanggah dengan berbagai cara yang mungkin, kalau memang ada yang perlu disanggah. Sedang ucapan Pak Roem tsb., ternyata adalah pesan politik terakhir. Beberapa minggu kemudian beliau meninggal dunia.

Saya belum selesai. Masih ada satu hal yang perlu disampaikan, hanya di luar hubungan dengan surat terbuka Achdiat K. Mihadja.

Tak lama setelah pertemuan kita terakhir saya menerima surat dari M.L., yang intinya tepat suatu jawaban terhadap saya. Tentu saja saya mendapat kesan kuat, pembicaraan kita Bung teruskan padanya. Terima kasih, bahwa hal-hal yang tidak jelas sudah dibikin terang olehnya.

Untuk tidak keliru membikin estimate tentang saya dalam persoalan khusus ataupun umum ada manfaatnya saya sampaikan bahwa saya menyetujui kehidupan bipoler. Saya membenarkan adanya dua superpower, bukan saja sebagai kenyataan, juga sebagai pernyataan makro nurani politik ummat manusia. Kalau hanya ada satu superpower akibatnya seluruh dunia akan jadi bebeknya. Dua superpower mewakili kekuatan ya dan kekuatan tidak, kekuasaan dan oposisi. Dalam tingkat nasional saya menyetujui kehidupan bipoler. Ada kekuasaan ada oposisi. Kalau tidak, rakyat akan jadi bebek pengambang, dengan kepribadian tidak berkembang. Demokrasi dengan oposisi adalah juga pernyataan makro nurani politik nasional. Dia adalah juga pencerminan mikro nurani pribadi manusia, yang tindakannya ditentukan oleh ya atau tidak. Hewan dengan serba naluri tak memerlukan nurani. Ia tak mengenal ya ataupun tidak.

Semoga surat kelewat panjang ini--lebih tepat usaha pendokumentasian diri sendiri--ada manfaatnya. Saya tidak ada keberatan bila diperbanyak.

Salam pada semua yang saya kenal, juga pada M.L. dan Savitri yang pernah saya kecewakan.

Belakangan ini kesehatan saya agak membaik. Soalnya saya menggunakan ramuan tradisional yang ternyata mengagumkan. Dengan pengamatan melalui tes urine dengan benedict kadar gula yang positif dalam 24 jam dapat menjadi negatif, yang tidak dapat saya peroleh melalui sport dan kerja badan selama 2 minggu.

Salam hangat untuk Bung sendiri dan keluarga.

Tetap

(tanda tangan).

*Pramoedya Ananta Toer*

Sumber: Demi Demokrasi 2 (1985)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Membangkit Batang Terendam

Menebus Kembali Sejarah Puisi Indonesia

Oleh: Alex Supartono

Judul: Di Negeri Orang: Puisi Penyair Indonesia Eksil .

Tim Penyunting: Asahan Alham, Mawie Ananta Jonie, A. Kohar Ibrahim, Carra Ella Ouwman, Sobron Aidit, dan Hersri Setiawan

Penerbit: Amanah Lontar (Jakarta) bekerja sama dengan Yayasan Sejarah dan Budaya Indonesia (Amsterdam), tahun 2002

Jumlah halaman: xiv + 253 halaman

ASAHAN Alham (dulu Asahan Aidit), adik bungsu Ketua CC PKI terakhir Dipa Nusantara Aidit, dikirim belajar ke Moskwa tahun 1961. Ia lulus tahun 1966. Nama Aidit yang dia sandang menghentikan langkahnya pulang. Ia memilih tinggal melanjutkan studi di Moskwa. Perpecahan dalam Gerakan Komunis Internasional antara garis Moskwa dan garis Peking memuncak, dan orang-orang Indonesia di negara-negara ini terseret ke dalamnya.

Asahan mengambil jalannya sendiri: pindah ke Vietnam untuk melanjutkan sekolah. Perang menuntun Asahan bergabung dengan pejuang pembebasan Vietkong sambil kuliah dari satu goa ke goa lain dan bermain biola dalam ensamble pasukan seksi penghibur. Tahun 1978 ia mempertahankan disertasinya dalam bahasa Vietnam. Ia menikah dengan seorang perempuan Vietnam dan memiliki seorang putra. Enam tahun kemudian, mereka berpindah mukim ke Belanda, sampai sekarang.

Kisah Asahan cuma satu di antara cerita perjalanan para eksil Indonesia yang berusaha direkam dalam kumpulan puisi ini. Babak demi babak hidup mereka



mengalir searus perubahan politik internasional sampai sekarang. Sebagian besar kini melabuhkan diri di Swedia, Jerman, Belgia, Perancis, bahkan Belanda, walau dengan dada yang sesak tersumbat (A. Kembara, Kehadiran, hlm 5).

Ketidakpastian arah perjalanan mereka setelah Tragedi 1965 di Indonesia, melahirkan persahabatan, juga perselisihan. Perpecahan antara garis Moskwa dan garis Peking mempengaruhi hubungan eksil Indonesia di kedua tempat ini. Banyak perselisihan yang tak lekang dimakan zaman, beberapa malah membawanya ke liang lahat. Ada juga yang sebaliknya, seperti kata Satyadharma dalam Salaman (hlm 207), “menertawakan pertengkaran sebagai kebodohan masa lalu”. Bait-bait yang terkumpul dalam kusajak (begitulah mereka menyebut “kumpulan sajak”) ini adalah catatan sebuah persahabatan yang tumbuh mengatasi permusuhan yang berkembang di komunitas mereka. Asahan yang dari Moskwa, bersama Mawie yang dari Peking dan Hersri yang sempat mengecap pembuangan tahanan politik Pulau Buru bersama penyair lainnya ketemu dan membangun Kreasi dan Arena-dua jurnal sastra-yang mereka terbitkan dengan kerja keras dan dedikasi punra

Bersama-sama para penyair ini berusaha saling mendukung usaha mencipta. Bila kondisi kantung dan kesehatan mengizinkan dan urusan kerja bisa ditinggalkan, mereka berkumpul di salah satu rumah untuk saling mendengarkan karya dan berdiskusi. Seperti cerita Mawie dalam Baca Sajak Tutup Tahun (hlm 139) “Agam baca sajak tentang mati, Asahan baca puisi tentang kenangan pada dara, Hersri bicara tentang Jitske dan aku baca sebuah surat musim bunga”. Sesekali kesempatan ini mereka pakai sebagai tempat berkumpul dengan kawan-kawan lama yang kebetulan sedang melawat ke Eropa seperti saat mereka menjamu Pramodya Ananta Toer dan rombongannya.

Walau hampir semua dari mereka menguasai beberapa bahasa, mereka tetap menulis semua karyanya dalam bahasa Indonesia. Lebih dari itu, kebanyakan karya mereka sepertinya ditulis hanya untuk orang Indonesia dan tentang Indonesia, baik dalam kenangan, perjuangan, ideal, juga impian. Dengan “bahan baku” seadanya dari pemberitaan media massa yang keberpihakan pemberitaannya sering jadi hambatan untuk merasakan apa yang tumbuh di tengah semua gejala yang terjadi di Tanah Air, mereka tidak peduli. Mereka seolah abai dengan tahunan hidup di Rusia, Cina, Vietnam, Jerman, Ceko, Hongaria, Perancis, Belanda, Swedia, Albania, dan Kuba. Bumi yang mereka injak, tak lebih dari seka-dar sampiran. Karakteristik menonjol eksil Indonesia, dan penulis-penulisnya, adalah keterpakuan mereka pada Tanah Air, yang pada gilirannya menjadi semacam pagar kreativitas.

\*\*\*

SOAL ini mungkin bisa sedikit menjelaskan kalau ditoleh latar sejarah mereka menjadi eksil. Saat peristiwa tahun 1965 terjadi, mereka sedang berada di luar negeri dengan berbagai tujuan, mulai dari tugas belajar, anggota sekretariat organisasi internasional, sampai menjadi delegasi suatu perayaan. Informasi yang simpang siur, identifikasi diri dengan ide-ide kiri yang sedang ditumpas kelor di Tanah Air, membuat mereka harus menunda kepulangan. Penundaan terus berlanjut seturut makin digdayanya penguasa baru. Pokok penting di sini adalah perkara “penundaan kepulangan”, karena di atas kesadaran inilah semuanya mereka bangun. Sampai akhir tahun 1980-an, kewarganegaraan Indonesia enggan mereka lepaskan. Mereka

memilih berstatus pengungsian politik daripada harus berganti kewarganegaraan, dengan keyakinan suatu saat akan pulang. Anjak usia senja jualah kemudian yang berhasil memaksa mereka berganti kewarganegaraan, sebagai syarat mendapat pensiun. Sekarang ketika kesempatan pulang datang, usia pula yang menghambat untuk mulai membiasakan lagi jongkok di toilet dan uang pensiun yang tidak bisa dikirim ke Tanah Air.

Dalam dunia tulis-menulis, latar di atas tentu saja berbicara banyak. Tidak ada dorongan bagi mereka belajar bahasa setempat untuk kebutuhan menulis, karena “toh akan pulang”. Tak mengherankan kalau dalam pengantar singkat buku ini, Asahan Alham memaparkan kesulitan mengumpulkan puisi dengan tema kehidupan di pengasingan. Akhirnya yang terkumpul adalah tema-tema yang menunjukkan bahwa mereka adalah penulis eksil: kampung halaman, kegelisahan melihat situasi politik Tanah Air, perjalanan tanpa tujuan dan akhir, atau kabar kepada sahabat di Tanah Air. Mereka berkarya dengan kesadaran sebagai orang yang sedang berada di luar negeri, bukan tinggal. Memori dan kabar dari Tanah Air lebih dominan sebagai sumber inspirasi dari pada keseharian nyata di negeri orang. Ingatan adalah satu-satunya tempat identitas bisa mereka jangkarkan karena secara legal mereka kini bukan orang Indonesia lagi dan komunitas Indonesia yang “resmi” berada di luar negeri pun menolak mengakui mereka. Harta mereka adalah “cermin sekeping” (Soepriadi Tomodihardjo, *Cermin di Dinding*, hlm 187) yang sekali waktu memantulkan bayang nenek moyang yang tak lagi bisa mereka akui tanpa rasa getir.

\*\*\*

PARA penulis eksil adalah generasi yang tumbuh ketika “Indonesia” adalah suatu tanda kemenangan dan identitas baru. Semua penulis memiliki idealnya sendiri tentang Indonesia dan itu yang mereka tunjukkan dalam karya-karyanya, entah dalam wujud nasihat atau rasa bangga akan generasi muda, ataupun kesedihan mendapati kondisi Indonesia yang betul-betul lain ketika mereka berhasil pulang untuk menengoknya kembali. Indonesia yang ada di pikiran adalah kampung halaman dengan sanak saudara yang ramah, bukan parade kaya-miskin dengan jurang sedalam perut bumi.

Kekhususan penulis eksil ada pada bagaimana kesadaran mereka yang khusus itu terepresentasikan dalam karya. Apakah itu menjadi propagandis yang verbal atau haru-biru yang cengeng, Apakah itu sastra tinggi atau sastra maki-maki, Apakah itu mengkhianati kaul dua tinggi (tinggi mutu ideologis dan tinggi mutu estetis) yang pernah mereka sumpahkan sebagai garis demarkasi kualitas karya seni, itulah sastra eksil Indonesia, yang adalah bagian sejarah sastra Indonesia. Bukan untuk berkilah soal pertanggungjawaban kualitas, seperti yang dimintakan Asahan dalam pengantar: “Tanpa menyadari kekhususan seniman eksil, karya-karya mereka akan mudah diremehkan orang” (hlm xi).

Pembicaraan tentang isi dan mutu mengandaikan adanya pencatatan dan dokumentasi, bukan saja tentang karya, tapi juga mengenai riwayat kehidupan mereka. Sayang sekali tujuan perekaman ini belum bisa terpenuhi oleh buku ini. Selain banyaknya kesalahan penulisan nama yang cukup mengganggu, kefatalan lain adalah sajak-sajak yang ditampilkan tidak dicantumi tahun dan tempat mereka ditulis. Padahal karya-karya ini adalah pantulan keadaan politik internasional dan

nasional yang mengubah hidup mereka orang seorang. Sebenarnya pokok tersebut bisa dikejar di kata pengantar, di mana paling tidak konteks ruang dan waktu lebih kurang bisa dipaparkan. Namun, pendahuluan yang ditulis Asahan Alham masih sibuk menjelaskan akibat tanpa menerangkan sebab, sehingga terkesan apologetis. Di luar cacat-cacat itu, selebihnya buku ini benar-benar prima, mulai dari fisik material (kualitas cetak, jenis kertas, penjiilidan) sampai sistematika (ada indeks judul dan indeks baris pertama).

Selama tinggal di Uni Soviet atau RRC, para penulis ini sangat miskin informasi tentang dunia luar. Akses mereka terhadap komunikasi dan informasi hanya mungkin tersedia dengan seizin pemerintah setempat. Keadaan ini berubah total ketika mereka pindah ke Eropa Barat pada paruh pertama tahun 1970-an. Apa yang ditulis A Kohar Ibrahim tentang perjalanannya naik kereta api membelah benua Eropa dalam Transit dan Pemeriksaan (hlm 24-25) mustahil dipahami tanpa mengingat konteks tempat dan waktu sajak-sajak itu diciptakan. Juga catatannya tentang pesan Utuy Tatang Sontani yang sering mengamati Kohar dan kawan-kawannya mengelola koran dinding di Nanchang, RRC. Pencantuman tahun juga memungkinkan sajak-sajak yang dikumpulkan diatur dalam urutan yang memungkinkan pembaca melihat naik turunnya hidup si penyair dan menjelaskan mengapa, misalnya, sajak Asahan Alham berjudul Kenangan Kelabu, 1970 diletakkan lebih dahulu daripada Desa Can Huu Ha Tay, 1968. Karya-karya periode awal eksil Indonesia hingga akhir tahun 1960-an biasanya disiarkan dalam berbagai berkala yang dibiayai (dan diawasi) pemerintah setempat (Suara Rakyat Indonesia di Tiongkok, Tekad Rakyat di Uni Soviet, API di Albania), sehingga tidak mengherankan kalau isinya pun selalu seragam: kesetiaan pada ideologi komunis atau makian pada imperialis. Tapi, ada juga berkala sempalan yang berusaha independen, yang sayangnya berumur pendek dan ruang kebudayaannya sangat sedikit. Ketika mereka mulai eksodus ke Eropa Barat, kondisi keuangannya yang jadi pembatas. Kebanyakan karya mereka kumpulkan sendiri, diperbanyak dengan fotokopi, sebatas kemampuan kocek penulis dan kawan-kawannya.

Kadang ada karya yang bisa sampai ke Tanah Air melalui berbagai jalur klandestin, dan beredar di kalangan terbatas dari tangan ke tangan. Si empu dan khalayaknya ditalikan oleh solidaritas yang bisa jadi adalah romantisme, sedikit urusannya dengan estetika. Penulis eksil waktu itu adalah paria, bagian sebuah perjalanan sejarah yang disimpulkan. Sekarang si paria menjadi si anak hilang, sedikit demi sedikit diangkat ke permukaan, pertanda songkok yang menutupi periode yang menyakitkan itu mulai dibuka dan luka itu mulai diakui, kalau mungkin coba disembuhkan. Seperti “membangkit batang terendam”, penerbitan buku ini seperti menebus pusaka yang pernah digadaikan sejarah.

\*\*\*

PENERBITAN buku ini adalah bagian dari kerja penyembuhan itu, seperti juga penerbitan karya penulis eksil yang dilakukan dalam setahun terakhir ini. Lantas diteruskan dengan pencatatan-pencatatan lain yang sudah lama menunggu, agar kita bisa tahu tentang apa yang terjadi dengan nama-nama mentereng di era tahun 1950-an dan 1960-an yang tak akan pernah kembali seperti: Utuy Tatang Sontani (meninggal di Moskwa, 17 September 1979), Suparna Sastra Diredja (meninggal di

Amsterdam 1996), Basuki Resobowo (Amsterdam 1998), wartawan senior Suryono (Amsterdam 2000), Noor Djaman, Edi Supusepa, Emha, dan masih banyak yang lain.

Pencatatan tentang fenomena eksil Indonesia juga bisa jadi seperti mengumpulkan mutiara yang hilang. Kebanyakan eksil Indonesia adalah orang-orang pilihan pada jamannya, yang dikirim untuk tugas belajar oleh pemerintahan Soekarno. Mereka sekarang adalah peneliti, dokter spesialis transplantasi alat reproduksi laki-laki, ahli metalurgi, ahli kimia pertanian, atau pencipta kurikulum pendidikan untuk anak yang menderita kelainan yang diakui keahliannya di tempatnya berada. Buku ini seharusnya juga menjadi sebuah mula untuk terus mencatat banyak yang tersisa. Sehingga kita paling tidak tahu, bahwa ahli atom nomor satu Hongaria sekarang, yang mewakili Hongaria di Komisi Bom Hidrogen Eropa dan yang membangun banyak reaktor atom di negara-negara di Afrika Utara, bernama IGA Asrama Manuaba, putra Bali yang dikirim Soekarno belajar ke sana 40 tahun lalu.

Alex Supartono dan Lisabona Rahman, Anggota Tim Penelitian Komunitas, Pers, dan Sastra Eksil Indonesia

Sumber: KREASI No6/2002

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Orde Baru, Candu bagi Penguasa

Oleh . Haryo Sasongko

Karl Marx, bapak komunisme, filsuf politik Jerman itu mengatakan, agama adalah candu bagi rakyat (religion is the opium of the people). Raymond Aron, wartawan dan ahli filsafat politik Prancis mengatakan, marxisme adalah candu dari kaum intelektual (Marxism is the opium of the intellectuals). Dia juga mengatakan, kalau candu Kristen membuat orang bersikap pasif, candu komunis mendorong orang berevolusi (the Christian opium, makes the people passive. Communist opium, incites them to revolt).

Edgar Snow, penulis Amerika mengatakan, di Rusia agama adalah candu bagi rakyat. Di Cina, candu adalah agama bagi rakyat.. Untuk rakyat Indonesia, Orde Baru adalah candu bagi penguasa. Penguasa yang mana? Tentu saja penguasa yang resminya bukan Orde Baru, tetapi tidak resminya meneruskan politik Orde Baru. Mereka yang berkuasa setelah Bapak Orde Baru tumbang selalu menyebut dirinya "bukan Orde Baru" tetapi di dalam otaknya, juga penalarannya, tetaplah Orde Baru. Karena otak dan nalar mereka memang sudah dipenuhi candu warisan Bapak Pembangunan .

Sebagai akibatnya, era Reformasi sesungguhnya merupakan era Orde Baru yang dibarukan kembali. Suatu proses daur ulang politik dari serpihak-serpihan sampah yang bukan hanya tak berguna tetapi juga mengandung banyak virus yang kemudian disajikan kembali ke tengah rakyat berupa politik lama kemasan baru yang tak sesuai dengan cita-cita Reformasi. Tidaklah aneh bila di masa Reformasi

stigmatisasi terhadap sesama anak bangsa masih melestarikan stigmatisasi yang telah dicanangkan oleh penguasa Orde Baru. Ini terlihat bukan saja pers mulai kembali kehilangan kebebasannya, suara kalangan mahasiswa kembali dibungkam, tetapi sejarah yang berlumuran darah di masa Orde Baru juga tetap menjadi sejarah berlumuran dendam di masa Reformasi.

Contoh konkrit adalah para korban stigma "pemberontakan PKI" yang selama era Reformasi selalu menemui jalan buntu untuk mendapatkan kembali hak perdatanya, serta dipulihkan martabat dan hak sosialnya sebagai warganegara Indonesia. Mereka yang telah kehilangan segala-galanya selama berada di bawah pemerintahan otoriter rezim Orde Baru, tak dapat memperoleh kembali sebagian kecil, apalagi semua yang hilang itu. Mereka juga masih tetap dihalangi untuk mempergunakan hak politiknya, apalagi yang berkait dengan wilayah legislatif. Karena itu tetap terjadi penolakan terhadap mereka (dan keluarganya) untuk menjadi caleg dengan berbagai alasan, antara lain mengkhawatirkan akan terjadinya "pemberontakan PKI" lagi. Kenapa ada kata "lagi", sementara bukti-bukti sejarah justru semakin kuat membuktikan tidak pernah terjadi "pemberontakan PKI". Siapa yang sebenarnya menyiapkan pemberontakan untuk kemudian merebut kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno pada tahun 1965 dan terlaksana sejak keluarnya Supersemar?

Komunisme, dipandang sebagai candu yang dikawatirkan akan meracuni otak dan nalar rakyat. Padahal yang terjadi, para penguasalah yang otak dan nalarnya telah kecanduan politik stigmatisasi takut pada hantu komunis. Ideologi yang sebagai dasar sistem pemerintahan di berbagai belahan bumi ini telah tumbang secara mondial. Orang yang dihantui ketakutan terhadap sesuatu yang sudah tidak ada, itulah orang yang otak dan nalarnya telah dipasung oleh candu. Usulan pencabutan TAP MPRS XXX/66 diinterpretasikan sebagai "kebangkitan kembali PKI". Class Action untuk mendapatkan kembali hak perdatanya, diterjemahkan sebagai "Mau menghidupkan kembali komunisme". Ya, semua hidup ketakutan pada hantu yang tak pernah dilihatnya.

Karena itu, di sepanjang jalan yang melintasi beberapa kota (antara lain di Jawa Tengah bagian selatan), masih bertebaran spanduk bertuliskan "Waspada! Bahaya Laten Komunis". Kenapa tidak ada spanduk "Waspada! Bahaya Laten Orde Baru"? Padahal justru inilah candu yang benar-benar berbahaya, yang akan memasung kembali hak-hak rakyat yang telah terjadi selama Orde Baru berkuasa.

Atau, inilah mungkin bukti nyata bahwa para penguasa di era Reformasi tak lebih dari kepanjangan tangan kepentingan politik Orde Baru? Pemimpin Orde Baru boleh lengser, tetapi penerus mereka hanya langsir untuk kembali. Dan di era Reformasi ini, semua sudah menjadi nyata. Di masa Orde Baru, kebenaran telah dimanipulasi oleh kekuasaan. Di masa Reformasi, kekuasaan telah memanipulasi kebenaran. Lain kalimatnya, sama hakekatnya. Mengutip judul sinetron yang ditayangkan di layar televisi: "Awat di Sini ada Setan!" Banyak yang menonton, tetapi tak ada yang menemukan di mana gerangan si setan berada, kecuali hanya dalam khayalan.

ASAHAN ALHAM AIDIT:

Roman Memoar

"ALHAMDULILLAH"

III (15)

tanah Pemukiman

Moskow - 1965 – Peking

Dari R, saya menerima secarik kertas yang pengirimnya adalah tante Annie. Kata awalnya terasa agak lucu: "Beste Sulaiman Divendal". Saya telah diberi marga oleh tante Annie, orang yang saya tumpangi. Apakah ini satu sinyal dari tante bahwa saya sudah harus memikirkan sebuah nama famili buatan karena tante Annie dan teman-temannya telah mulai memikirkan soal naturalisasi saya, setelah mendapat izin tinggal resmi, yang mereka bilang itu sangat perlu agar saya bisa merambat secara kuat dan dilindungi hukum di pemukiman yang akan saya jadikan tanah air ke dua ini. Tapi isi surat, cumalah meminta agar saya datang ke Haarlem, ke rumah beliau untuk mengambil sepeda yang telah beliau beli untuk saya pakai. Tante Annie memang selalu memikirkan semua keperluan saya yang saya sendiri bahkan tak terpikirkan.

Di satu permulaan musim gugur yang berangin dan kelabu saya berangkat dengan sebuah bus menuju kota Haarlem. Ketika akan memasuki kota Haarlem, ada sebuah hutan atau taman hutan yang saya lalui. Dedaunan mulai berguguran dan bertukar warna. Saya lalu teringat akan sajak-sajak Pushkin. Dia seorang penyair Rusia pemuja musim gugur yang digambarkannya sebagai pesta warna dedaunan yang berjatuhan ke bumi diiringi symphonie alam bersuasana puitis dan melankolik. Di kantong saya ada sebuah Walkman I, anak R yang sedang memutar konsert 4 musimnya Antonio Vivaldi. Musim gugur Belanda memang tidak seindah musim gugur Rusia dan bahkan tidak seindah musim gugurnya Rusia, memang. Tapi saya lebih merasakan suasana puitis alam Belanda di musim gugur. Mungkin oleh Vivaldi yang telah bercampur dengan anak bini saya di dalamnya yang masih di luar keberadaan mereka di tengah saya. Saya lalu mematikan walkman saya ,karena sudah terasa gejala serangan melankolik yang bagaikan seorang diabetik dalam situasi hypoglucose yang memerlukan gula, lemah lunglai yang akhirnya lumpuh.

Setibanya di rumah tante Annie, di tangga masuk ke atas, sudah saya lihat sebuah sepeda yang akan saya terima nanti itu. Tidak baru, tapi dan saya menyenangkannya. Kami ngobrol bertiga, dengan Oom, yang tampak lebih tua dari tante Annie, bertubuh tinggi dan masih aktif mengitari kota Haarlem dengan Brommer-nya. Tapi kehadiran Oom tidak lama dan segera dia permisi naik ke atas meninggalkan kami berdua, seolah dia tahu, tante Annie hanya untuk saya, setiap saya datang ke rumah mereka.

- "Hei, Sulai, apa yang kau ketahui tentang "Biro Khusus " dalam tubuh PKI dan apakah kau juga pernah kenal dengan itu Syam Kamaruzzaman"?. Pertanyaan Tante Annie memang bisa muncul mendadak di tengah pembicaran yang bagaimanapun. Bahkan kadang-kadang di dalam tram atau bus yang sedang ramai

penumpangnya. Dan sekarang ketika sedang menikmati sepotong taart yang beliau sajikan.

- "Saya tidak tahu apa dan siapa itu, Tante. Yang saya tahu, itu cuma omong kosong yang dibikin Suharto yang harus diperankan oleh Syam. Seperti Nero memfitnah orang Kristen yang membakar kota Roma".

- "Kapan pertemuanmu yang terakhir dengan Aidit?"

Pikiran saya lalu terbang ke Cina, ke Peking pada bulan Agustus 1965. Ketika sebagian besar teman-teman saya pada berlibur ke Eropa Barat, Berlin Barat dan Belanda terutamanya, tapi saya menukar dollar yang kami terima dari Kedutaan menjadi rubel untuk beli karcis kereta ke Peking. Ada sebagian teman yang menganggap saya orang sinting.

Dan memang sayapun merasa sinting, mengapa tidak, ke Barat adalah selera remaja, kebebasan, barang kelontong: baju dan kaos kaki nylon, sepatu milyuner, bumbu-bumbu pedes Indonesia, dasi-dasi Trevira, Ray-ban, Parker, perca-perca lingerie buat pacar-pacar Rusia dan selebihnya dijual dengan harga super mahal di sekitar pintu masuk asrama Universitas. Sedangkan kalau ke Peking, yang akan saya temui adalah cuma abang saya yang sudah bertahun-tahun menjadi spesialis di sana, cuma memburu kerinduan, dan saya hanya menjadi orang asing dua kali lipat, bahasanya, budayanya dan hanya satu yang seperti di rumah sendiri: makan! Saya punya bakat besar memakan semua makanan Cina dan bakat itu sudah saya miliki sejak saya berusia 12 tahun yang dimulai dari Pasar Senen, lalu Glodok dan terus merembet ke berbagai restoran Cina yang terenak. Saya tumbuh dan membesar oleh makanan Cina dan saya telah menjadi fanatik melebihi abang sulung saya sendiri. Tapi cuma di bidang makanan ini saja. Dan saya memutuskan ke Cina karena selera saya bukan selera remaja seperti selera teman-teman saya mahasiswa lainnya. Selera saya adalah selera perut dan pilihan saya adalah Cina sebagai kiblat dan Peking sebagai Mekkah kerajaan makan saya. Mengapa harus menolak dibilang sinting, bukankah saya sendiri yang telah membuktikannya.

Baru beberapa hari saya bertemu keluarga abang saya yang menjadi spesialis di sana, saya lalu mendapat panggilan mendadak dan harus meninggalkan hotel di mana diinapkan (gratis, dibayar Negara) yang kalau tak salah hotel itu "Min Chu Fan Tien" yang hidangan makanannya melebihi dari yang pernah saya impikan ketika masih di Moskow. Dari hotel, saya harus pindah ke sebuah Guest House atau rumah tamu Partai karena di sana abang sulung saya yang ketua Partai sedang menjadi tamu Partai sebuah negara raksasa yang ketika itu sedang cekcok besar dengan sebuah Partai yang juga raksasa yang bernama Uni Sovyet di mana saya sedang belajar. Pertemuan itu sama sekali di luar dugaan saya, karena ketika saya masih di Moskow, memang abang sulung saya sedang mengadakan kunjungan di Rusia dengan delegasinya yang cukup besar untuk barangkali cekcok di sana dengan Suslov, teoretikusnya PKUS. Dugaan saya itu berdasarkan penglihatan saya dari dekat: muka abang saya masih tampak merah, matanya juga merah, persis ketika ia baru cekcok dengan istrinya di rumah ketika saya masih tinggal bersama mereka dulu itu. Orang adik beradik tentu mengenal urat nadi hingga suara hati masing-masing.

- "Tengkar?", tanya saya ketika baru saja melepaskan tangan dari salaman rindu dan tak di sangka-sangka itu.

- "Ya, tengkar. Bukan cuma tengkar. Tengkar besar. Bagus, kau ke mari, Sulai. Cina juga perlu dilihat".

- "Tadi sebelum kemari, saya diperingatkan agar siap-siap dimarain".

- "Siapa yang bilang begitu!",

- "Antara lain, Sobron".

- "Dia yang patut dimarain"

- "Ya, dia bilang juga sudah".

Hari pertama bersama abang sulung saya, saya masih setempat tidur dengannya dan barulah kemudian di kamar tidurnya yang luas dan besar itu ditambah lagi satu tempat tidur untuk saya. Semua kegiatan delegasi, saya diajak ikut serta. Dari sinilah saya mengetahui betapa mesra dan antusiasnya Partai Cina menerima delegasi Partai Komunis Indonesia. Sebuah persahabatan yang tak mungkin habis diceritakan, betapa erat dan kentalnya persahabatan dua Partai seolah dua saudara kembar yang tak akan pernah bercerai lagi. Saya turut menikmati kemaanjan yang oleh tuan rumah meskipun saya bukan anggota delegasi Partai dan hanya sebagai adik bungsu dari sang Ketua. Sobron bukan main irinya, tapi perasaan itu sudah sangat biasa dirasakannya sejak di Indonesia dulu. Abang sulung saya sering mengucapkan sikapnya di depan kami adik-adiknya bahwa ia tidak membedakan yang satu dengan yang lain. Sama, tidak ada peng-istimewaan. Tapi dalam praktek, tetap saja ada diskriminasi yang itu saya sendiri yang menikmatinya. Mungkin karena saya memang lebih banyak mendampingi dalam kerja-kerjanya sehari-hari ketika di Jakarta dulu atau mungkin juga saya punya sifat yang lain dengan abang-abang saya yang lainnya sebagai manusia non politik sehingga berbicarapun sangat terdengar lain di tengah-tengah 24 jam atmosfer politik dalam dunia yang tak saya kenal itu. Dan saya selalu leluasa.

Suatu hari, abang saya mengatakan kepada saya bahwa saya harus tinggal di rumah (saya sudah tidak boleh keluar sendiri) karena hari itu delegasi Partai akan menemui Ketua Mao. Untuk itu katanya saya belum punya hak. Sebetulnya saya cukup kecewa karena sebuah pemikiran yang sederhana saja: kalau sudah sama-sama menjadi tamu Partai begini, kenapa tidak sekalian saja, menemui Ketua Mao-pun diikuti sertakan. Tapi sekali ini abang saya benar-benar mendiskriminasi saya dan itu saya kira juga baik, paling tidak untuk tidak menumpuk ke-irian Sobron. Tapi saya tidak dibiarkan sendiri di rumah yang bagaikan istana itu. Seorang nona dengan sebuah pelampung telah mengatur semuanya untuk kami berdayung di danau yang luas dalam wilayah rumah tamu itu. Tentu ini nona bukan datang begitu saja dari langit untuk menghibur saya yang sedang sendirian tidak kebagian jatah ketemu dengan Ketua Mao. Ini juga sebuah pengaturan dari kebijakan tuan rumah yang sangat menyenangkan saya. Sayangnya ini nona manis tidak bisa bicara Inggris, atau mungkin tidak diperbolehkan. Tanpa bahasa tapi banyak senyum, banyak menuntun tangan saya dan imbalan dari saya satu-satunya cumalah: sie, sie, sie, sie dan sie-sie hingga membuat dia tertawa terpingkal-pingkal. Saya duga mungkin ia



telah menawarkan sesuatu secara bergurau yang merugikan saya dan jawaban saya tetap saja sie-sie. Saya bayangkan mungkin dia menanyakan saya apakah setuju kalau saya dia pukul dengan pendayung yang sedang dipegangya dan saya menjawab: sie-sie. Tapi sungguh dia sangat manis. Dan kalau saya bandingkan kecantikannya dengan gadis manis peranakan Indonesia Cina, yang saya temui di bus-bus atau di tengah kota Peking ,yang masih bicara Indonesia dengan lancanya, maka kecantikan mereka yang peranakan itu, tidaklah berlebih lebihan kalau saya katakan ,setara dengan seorang Miss Universe yang tidak resmi. Percampuran ras sering melahirkan kualitas ekstra: atau yang terpintar di dalam klas, tercantik di seluruh sekolah atau yang tersehat dan terganteng di antara teman-temannya. Di bidang pertanian umpamanya, buah atau ubi hasil cangkakan selalu lebih manis, lebih besar dan lebih bagus kualitasnya. Bahkan Mie Peking yang mie asli itu rasanya jauh lebih kurang dari Mie di Pasar Senen yang bumbu-bumbunya sudah campuran dengan bumbu-bumbu pribumi. Yang kita perangi bukan perbedaan ras tapi kesombongan ras kalau itu memang ada.Tapi setidaknya, kecantikan nona Cina yang totok sekarang ini, yang sedang berkayuh dengan saya dalam perahu kecil hanya untuk berdua, bisa melupakan sejenak atau mungkin sangat banyak jenak, pacar saya yang ada di Jakarta. Betapa bahagia yang saya rasakan hari itu. Kami tertawa tanpa mengerti satu sama lain dan hanya dengan bahasa badan. Dan ketika kami akan berpisah, dia lalu menanyakan saya dan cepat saya jawab: sie-sie. lalu ia memukuli belakang saya dengan geramnya sambil tertawa. Mungkinkah yang dia tanyakan pada saya itu kira-kira begini: "Sukakah kamu saya cemplungkan ke dalam air danau ini?" Dan dengan senang hati saya jawab: "SIE-SIE".

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

ASAHAN ALHAM AIDIT:

Roman Memoar

"ALHAMDULILLAH"

Bagian III (16)

Merambat Tanah Pemukiman

Moskow - 1965 - Peking (II)

Di antara anggota Delegasi Partai yang paling saya kenal adalah bung Ajis. Dia seorang supir abang saya. Bung Ajis orangnya sederhana tapi punya kewibawaan, berdisiplin tinggi, ramah tapi juga serius. Bung Eko Darminto, bekas pengawal pribadi abang saya kemudian disekolahkan di Moskow bersama saya, adalah seorang yang berbadan besar tinggi, berkulit gelap, tampak perkasa dan memang dia pernah jadi anggota CPM, juga sangat segan pada bung Ajis. Bung Ajis tidak semata hanya seorang supir tapi juga seorang kawan yang mengemban tanggung jawab tinggi atas keselamatan abang saya yang juga bekerja sama dengan bung Eko Darminto. Pertemuan kami yang tidak di sangka-sangka itu dimulai dengan pergurauan lama kami: "korek sambel" yang entah bagaimana secara spontaan terucapkan bersama ketika kami bersalaman pada waktu ketemu di Guest House. Soalnya ketika Bung Ajis disekolahkan di Uiversitas Rakyat yang mengambil Jurusan bahasa Inggris, suatu hari ia bertanya pada saya: "Bung Sulai, saya kok selalu

mendengar dosen Inggris saya sering mengucapkan "korek sambel" setiap dia akan memberikan contoh, apa sih artinya". Saya cepat menduga pertanyaannya yang lucu itu. "Itukan maksudnya "For example" kata saya sambil tertawa. Bung Ajis memang sering melucu, tapi bila sedang melakukan tugasnya, ia sangat serius dan kadang-kadang bisa galak juga bila sedang dalam tugas terjadi hal-hal yang kurang beres dan memerlukan reaksi cepat yang biasanya karena kelengahan atau kelambanan pengawal pribadi abang saya. Di saat-saat demikian bung Ajis lalu mengambil komando dan mengambil semua kebijaksanaan. Dia sangat cepat berpikir dan juga cerdas meskipun pendidikan formalnya sederhana saja, tapi ia selalu aktif mengambil bermacam kursus yang diadakan oleh Partai maupun di luar. Abang saya sangat menghormati bung Ajis dan memperlakukan bung Ajis tidak pernah sebagai supir, tapi sebagai kawan yang sederajat, sebagai orang terdekat ketika sedang bertugas bersama meskipun berlainan tanggung jawab dan sifat pekerjaan. Untuk saya bung Ajis, seorang manusia yang sangat menarik untuk dijadikan teman maupun kawan.

"Sayang bung Sulai tidak diajak ketemu Ketua Mao, tadi siang". Itu kalimat pertama bung Ajis ketika kami bertemu kembali sejak ketidak ikutsertaan saya bersama delegasi menemui Ketua Mao.

"Nah, bagaimana bung Ajis, ceritanya. Cerita dong, nanti saya juga ganti cerita bagaimana saya berduaan dengan si Amoi totok si cantik jelita berdayung dayung di danau".

"Ketua Mao, orangnya sangat halus dan santun budinya. Bicaranya pelan dan sangat ramah".

"Apa saja isi pembicaraan yang penting-penting, bung Ajis?".Tanya saya tidak sabar.

"Mula-mula bung Aidit menceritakan situasi situasi revolusioner yang sudah mulai terasa di Indonesia. Rakyat sudah di belakang Partai dan PKI sudah menjadi Partai yang sangat besar. Ketua Mao mendengarkan dengan penuh perhatian. Lalu ia menanggapi dengan tenang dan sopan, katanya, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan Partai di desa-desa, karena di sanalah kekuatan riil Partai harus berakar dan dari sanalah revolusi akan dimulai". Masih banyak yang diceritakan bung Ajis tentang pertemuan antara delegasi PKI dengan ketua Mao. Itu sedekar pertemuan ramah tamah yang penuh persahabatan dan tidak membuat pernyataan bersama ataupun persetujuan-persetujuan tertentu. Bung Ajis merasa bahagia bisa ikut serta dalam pertemuan itu meskipun pekerjaan atau tugas kongkret dia cuma sebagai seorang supir abang saya tapi telah menjadi anggota delegasi Partai resmi yang sederajat dengan semua anggota delegasi Partai lainnya yang adalah petinggi-petinggi Partai. Saya merasa bung Ajis pantas mendapatkan penghargaan dan juga kehormatan demikian sebagai kawan separtai yang langsung mendampingi dan menyertai abang saya selama tugas-tugas penting yang sering-sering berbahaya itu. Cerita Bung Ajis sangat berkesan pada saya dan pula menambah pengetahuan saya betapa eratnya Persahabatan antara dua Partai, Cina dan Indonesia pada waktu itu.

Saya masih diberi kesempatan untuk ikut serta bersama delegasi untuk meninjau ke beberapa tempat obyek ekskursi di sekitar kota Peking, terutama ke pabrik-pabrik dan museum-museum yang sangat menarik dengan penjelasan yang terperinci dari petugas-petugas dari pihak tuan rumah. Ada hal yang sangat menonjol selama

ekskursi peninjauan itu. Pengawal pribadi abang saya yang baru (pengganti bung Eko Darminto yang ketika itu sedang sekolah di Moskow) punya kelakuan yang sangat aneh. Dia mengontrol semua anggota delegasi, setiap ada penjelasan tentang segala sesuatu kepada kami para pengunjung. Pengawal ini mengharuskan orang mencatat semua yang dibilang petugas atau pembicara dari pihak tuan rumah. Saya yang punya kebiasaan hampir-hampir tidak pernah mencatat dalam setiap kuliah, sekarantg diharuskan oleh pengawal pribadi abang saya yang juga bertubuh besar tinggi yang tidak kalah perkasanya dengan bung Eko Darminto, untuk mencatat semua dengan serius. Katanya, untuk menghormati tuan rumah dan menunjukkan rasa rendah hati terhadap mereka. Diapun tidak pandang tingkat kekaderan seorang anggota delegasi. Semuanya, tidak terkecuali harus mencatat apa saja yang sedang dibicarakan dan dijelaskan oleh tuan rumah. Saya merasa abang saya tidak pernah bahagia dengan pilihan para pengawal pribadinya selama ini. Juga sejak bung Eko Darminto bertugas dulu itu, ia selalu menderita bila bepergian jauh. Ia tidak bolen ngantuk apalagi sampai tertidur bila sedang ada dalam kendaraan, demi kewaspadaan, kata bung Eko, dan abang saya selalu dibangunkan dari ngantuknya. Padahal ia hanya tidur beberapa jam saja dalam sehari. Sekarang dalam perjalanan delegasi ini, sang pengawal itu selalu tampak dalam keadaan super aktif mengatur segala-galanya, seakan-akan tanpa pengaturannya, delegasi ini akan menjadi serombongan anak nakal yang sudah tidak bisa ditertibkan. Dan celaknya, abang saya punya kebiasaan mengharuskan saya patuh pada pengawal pribadinya sudah sejak ketika di Jakarta dulu. Bila ada sesuatu yang agak kontradiktif antara saya dengan pengawal, saya selalu berada di pihak yang salah dan abang saya selalu membenarkan pengawal pribadinya. Tapi saya masih bahagia, karena di antara adik-adiknya sayalah yang paling disayanginya. Buktinya, Sobron tinggal di rumah, saya turut delegasi.

Ah, kasihan Sobron, baru kena marah pula.

Rencana delegasi untuk merlanjutkan peninjauan ke Vietnam, tiba-tiba dibatalkan. Saya belum sempat melamar pada abang saya untuk ikut serta. Semangat saya sudah seperti kata peribahasa: "Seperti Belanda minta tanah, diberi sejengkal minta sehasa". Tapi sebelum lamaran diajukan, yang saya sangat optimis akan dikabulkan abang saya, rencananya sudah digagalkan gara-gara ada tilgram dari Jakarta, abang saya harus pulang karena bung sakit keras. Besoknya abang saya dengan delegasi harus terbang ke Jakarta.

Malamnya kami masih sempat ngobrol panjang.

"Sulai, kapan kau tamat sekolah".

"Masih satu tahun"

"Apa tidak bisa dipersingkat"

"Mengapa harus dipersingkat?"

"Terlalu lama bersekolah, juga tidak baik. Kau harus juga dalam revolusi itu sendiri".

"Saya harus tamat dulu"

"Revolusi tidak akan menunggumu"

"Bang Murad tamat tahun ini dan dia sudah pulang sebulan lalu".

"Murad sudah pernah ikut revolusi, kau sama sekali belum"

"Apa saya sudah harus angkat senjata sekarang juga?"

"Revolusi tidak mesti harus angkat senjata. Partai tidak punya senjata"

"Jadi saya harus kembali ke pekerjaan saya yang lama. Bukankah bibliotik sudah ada yang mengurus".

"Banyak pekerjaan lain yang bisa kau kerjakan dan semua itu menantimu"

"Pekerjaan revolusi?"

"Bertanyalah dengan nada serius".

"Ya, maksud saya, bila tidak mengangkat senjata, apakah setiap pekerjaan bisa digolongkan pekerjaan revolusi".

"Itulah, seperti aku bilang. Terlalu lama bersekolah, itu tidak menguntungkan. Apa yang kau pelajari di Rusia selama ini".

"Sastra Rusia".

"Baik. Belajar sastra tidak akan pernah habis"

"Tapi saya memerlukan diploma"

"Dulu kau pernah bilang, diploma-diplomaku yang kau temukan di rumah ayah di Belitung, setelah kau timbang, beratnya mencapai 2 kg. Adakah satu di antranya yang pernah aku gunakan untuk melamar pekerjaan?"

"Apakah telah begitu mendesak, hingga saya harus mempersingkat masa belajar saya".

"Kau yang harus mendesak dirimu. Revolusi mungkin tidak memerlukanmu. Tapi kau ... paling tidak, telah sangat memerlukan revolusi".

"Baiklah, sementara saya memerlukan diploma untuk sebagai bukti, saya telah belajar menurut tugas yang diberikan kepada saya".

Saya anggap abang saya telah kalah. Tapi saya lihat mukanya sangat cerah. Bahkan malam itu saya lihat tidak ada yang dia siapkan untuk pulang ke Jakarta besok pagi. Kami meneruskan percakapan dengan tema lain, soal pertemuannya dengan Ketua Mao, soal keluarga dan macam-macam lagi. Bekas-bekas ketegangannya oleh percekcockannya dengan Suslov telah lama sirna dari wajahnya. Ia tampak relax seperti biasanya meskipun dikepung oleh tumpukan kesibukan.

Saya turut mengantarkannya ke lapangan terbang. Di antaranya tentu saja para kader tinggi dari pihak Partai Komunis Cina. Saya tidak begitu memperhatikan dan lebih asik melihat-lihat barang-barang yang dipamerkan dalam lemari-lemari kaca di ruang tunggu dalam wilayah bangunan lapangan terbang itu. Ketika para delegasi akan menaiki pesawat dan meninggalkan kamar tunggu, seseorang menarik tangan saya dan menuntun saya ke barisan delegasi yang sedang menuju pesawat. Saya

perkiraan dia seorang penterjemah yang mungkin berasal dari Cina peranakan dari Indonesia yang berwajah agak ke-desa-desaan dan sangat sederhana penampilannya. Ketika rombongan pengantar akan pulang meninggalkan ruangan, orang yang saya kira penterjemah tadi datang menemui saya dan menyalami saya dengan hangatnya sambil mengucapkan sesuatu dalam bahasa Cina yang tentu saja tidak saya mengerti. Saya lalu bertanya pada Sobron, apa yang yang dibilang orang yang saya sangka penterjemah itu. Sobron bilang: "Itulah PM Chou En Lai, orang kedua sesudah Ketua Mao di negeri Cina ini". Saya terheran-heran, merasa tidak masuk akal, seorang Perdana Menteri sebuah negeri raksasa berpenampilan begitu sederhana. Lain dan sangat lain dengan yang biasa saya lihat di dalam gambar. Memang, gambar sering-sering di ritus, diperindah, diperhalus agar tampak lebih cantik atau bagus. Ternyata kesederhana-an dalam apa adanya, itu jauh lebih bagus, lebih mengagumkan. Hari itu, di bulan Agustus 1965, di Peking, adalah hari terakhir saya bertemu dengan abang sulung saya. Beberapa bulan kemudian dia telah ditiadakan oleh kaum barbaris pemakan manusia dengan senjata. Saya kehilangan seorang abang, tapi bangsa saya telah kehilangan peri kemanusiaan.

Asahan Aidit:

Makna apa dibalik kata "KEBLINGER" PKI dalam peristiwa G30S-65?

satu dari tiga alasan terjadinya peristiwa 30S-65 yang dikatakan oleh Presiden Soekarno adalah "Keblinger"-nya pemimpin PKI. Ini bisa menimbulkanan bermacam penafsiran, dugaan dan bahkan mungkin memancing kesimpulan, siapa yang sesungguhnya biang keladi terpenting dalam mencetuskan peristiwa mandi darah itu.

Sebagai logika umum dari makna kata "keblingernya" pemimpin PKI dalam hubungan keterlibatannya dengan peristiwa September itu bisa diartikan sbb (sementara):

1. PKI memang terlibat (meskipun bukan satu-satunya): keblinger!
2. Pemimpin PKI-lah yang terutamanya yang terlibat: keblinger!
3. PKI melakukan tindakan avonturis politik secara spontan: keblinger!
4. Pemimpin PKI telah bertindak sendiri di luar garis umum politik Partai (merebut dengan jalan coup): keblinger!

Dan bahkan sesudah nomor 4 itu masih mungkin ditambah hingga beberapa nomor lagi karena memang kata "keblinger" membuka kemungkinan yang sangat luas, tapi untuk memudahkan penganalisaan baiklah dengan 4 faktor itu saja. Tapi sebagai kesan umum, dari empat faktor isi dari makna kata "keblinger" itu adalah tuduhan Presiden Sukarno, bahwa PKI dan pemimpinnya memang terlibat dan terlibat secara bodoh bahkan bisa disebut secara gila-gilaan, diluar perhitungan, di luar akal sehat dan tidak bertanggung jawab.

Teoritis, PKI sebagai partai Marxis, mengetahui bahwa dalam merebut kekuasaan negara dan memenangkan revolusi tidak bisa dengan jalan coup tapi di atas dasar kematangan situasi revolusioner yang sudah matang dan kesiapan massa rakyat yang luas serta kesiapan Partai revolusioner itu sendiri dalam memimpin revolusi di

garis terdepan. Jadi dalam situasi yang tidak keblinger, PKI tidak mungkin tiba-tiba menjadi keblinger dan lalu secara spontan bertindak melakukan avonturisme besar dan maha berbahaya itu yang juga di luar garis Partai yang mengarah pada cara-cara demikian. Dalam pendidikan intern Partai-pun PKI selalu mengharamkan jalan coup atau avonturisme dalam merebut kekuasaan dan melaksanakan revolusi. Bahkan dalam diskusi-diskusi periodik Partai hingga ke bawah, jalan terorisme dan avonturisme, sangat diharamkan. Lagipula bila dikatakan PKI telah sangat terpengaruh dengan jalan Revolusi Cina yang menempuh jalan dari desa mengepung kota, maka cara-cara keblinger yang spontan, di luar garis umum dan tanpa persiapan yang panjang, tuduhan keblinger itu sangat diragukan. Karena bila demikian, yaitu ,memang kekeblingeran PKI telah melakukan kesalahan-kesalahan besar dan prinsip sbb:

1. Menyalahi dan melanggar garis umum Partai yang telah ditetapkan sendiri
2. Menyalahi prinsip Marksis dalam menjalankan revolusi
3. Menyalahi jalan Revolusi Cina (Dari desa mengepung kota) yang telah sangat mempengaruhinya.
4. Meninggalkan massa anggota yang tidak dipersiapkan dan tidak siap sama sekali untuk menempuh jalan coup.
5. Melakukan politik avonturisme secara total dan itulah yang namanya KEBLINGER dalam arti yang sesungguhnya.

Tapi lalu masalaahnya, apakah memang demikian. Untuk sampai pada kesimpulan atau tuduhan demikian, harus ada bukti-bukti dan analisa mendalam yang harus bisa dikontrol dan diklopkan apa memang demikian adanya di dalam praktek atau dalam kenyataan. Banyak hal-hal yang hanya orang PKI sendirilah yang bisa menilai sampai dimana mereka bisa dikatakan keblinger atau mungkin hanya tertuduh, terfitnah dan lalu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin membela diri, tidak sempat menerangkan situasi dan yang terpenting mereka telah begitu cepat dihabisi dengan terror. D.N. Aidit cepat dibunuh agar tidak mungkin diajukan dan membela diri di depan pengadilan. Puluhan ribu orang-orang yang dituduh PKI dan anggota PKI di buang ke Pulau Buru dan penjara-penjara lainnya di seluruh Indonesia tanpa pernah diadili hingga Suharto terguling. Hak-hak dasar kemanusiaan puluhan juta korban 65 hingga sekarang belum dipulihkan. Semua kenyataan ini membuktikan kebenaran yang sesungguhnya di balik peristiwa S-65 akan selalu ditutup-tutupi yang mula-mula dengan teror, lalu dengan kebohongan, pembodohan massa rakyat dan sekarang ini dengan pemutar balikan sejarah melalui tulisan-tulisan, buku-buku (termasuk yang dibuat oleh penulis asing) yang membikin roman politik atau sastra jurnalis politik yang lebih menyerupai film-film Jackie Chan, yang memang enak ditonton tapi tidak bisa diperlakukan sebagai film-film `yang mengangkat kebenaran sejarah.

Tapi dalam ketakutan dan ancaman jiwa yang serius, orang memang bisa keblinger, bisa mengatakan sesuatu yang lain dari apa yang sesungguhnya yang ada di hatinya, bisa menipu musuh dan menipu dirinya sendiri untuk menyelamatkan diri, bisa berkhianat, bisa memfitnah teman sendiri bahkan saudara kandung sendiri di

depan musuh yang sedang juga super blinger tapi kuat dan kejam. Penyelidikan sejarah memang belum selesai dan memang tak akan pernah selesai bila yang mendominasi sejarah adalah pihak yang kuat dan sedang berkuasa. Sedangkan kebenaran tidak jatuh dari langit, tidak otomatis di pihak yang benar, tapi harus diperjuangkan secara gigih dan pula dengan kekuatan tertentu yang sanggup beradu dan tidak cuma meratap, meminta atau cuma dengan keyakinan pasif dan tidak berani tatap menatap dengan musuh kebenaran.

Tuduhan Presiden Soekarno terhadap pemimpin PKI sebagai "keblinger" patut dijadikan studi analisa untuk dikontrol kembali kebenarannya demi untuk mendapatkan bahan-bahan obyektif dan terpercaya, apa sebetulnya dibalik kata "Pemimpin PKI yang keblinger" sebagai salah satu faktor yang dianggap besar teretusnya peristiwa G30S-65. Diperlukan kekritisan dan keberanian menganalisa yang tidak berat sebelah hingga hasil penyelidikan sejarah, terutama sejarah pemberontakan G30S-65 tidak seperti sekarang ini:

- Seluruh ORBA merasaa benar kecuali ORLA dan PKI
- Seluruh bangsa merasa benar kecuali PKI
- Seluruh Partai-Partai merasa benar kecuali PKI
- Seluruh anggota PKI merasa benar kecuali para pemimpinnya
- Seluruh Pemimpin PKI merasa benar kecuali D.N.Audit
- Seluruh teroris merasa benar kecuali yang diteror.

Dan merasa benar di sini berarti pandai membela diri sendiri dan pandai menyalahkan orang lain. Sedangkan yang disalahkan adalah yang sudah mati, seperti PKI yang mati, D.N. Audit yang sudah mati, para pemimpin PKI lainnya yang juga sudah mati, ORLA yang sudah mati. Presiden Soekarno yang masih sempat membela diri karena masih sempat hidup untuk beberapa waktu dan masih sempat menuduh pemimpin PKI sebagai "keblinger" tanpa menjelaskan lebih lanjut meskipun dengan sepetah kata, mengapa "keblinger", apa lagi, apa itu kongkretnya "keblinger" yang dilakukan oleh Pemimpin PKI. Menyalahkan orang yang sudah mati memang mudah dan membela diri ketika masih hidup juga tidak sulit. Yang sulit adalah menyingkap kebenaran, bersikap jujur dan tidak memikirkan keuntungan dan keselamatan diri sendiri semata-mata. Presiden Soekarno mungkin saja dalam keadaan keblinger juga, di tengah kepungan musuh-musuhnya dan kehilangan kawan terpercayanya yaitu PKI sehingga mungkin dalam keadaan yang tidak disengaja telah menohok teman seiring dengan menuduh Pemimpin PKI sebagai "keblinger". Dan tuduhan itu akan sangat menguntungkan Orba dan Suharto dan juga akan punya pengaruh negatif terhadap pendapat umum Indonesia pada waktu itu maupun sekarang ini bahkan mungkin juga di masa datang. Tapi dengan menggunakan metode analisa obyektif, menggunakan semua bahan dari semua pihak dan tidak terpancing dengan tulisan yang dari dalam negeri maupun yang dari pihak Barat yang punya kebiasaan bikin buku tulisan sensasionil, bombastis, dengan menggunakan roman horror, bukti-bukti palsu yang tak pernah terbukti di depan umum, dengan menempelkan label gelar kesarjanaaan yang dijadikan reklame untuk jaminan mutu tulisannya yang tidak bermutu, pemikiran kritis, berani jujur dan berani

mengatakan dan membela kebenaran, tentu setiap penipuan, kebohongan, manipulasi serta pemutar balikan sejarah akan terungkap juga cepat atau lambat. Para sarjana seperti yang antara lain Dr. Benedict Anderson dan Prof. Dr. Wertheim yang secara jujur dan berani mengungkap kebohongan dan pemalsuan rezim Orba dan Suharto, patut dijadikan pedoman dan patokan untuk mengungkap lebih lanjut dalam penelitian sejarah G30S-65. Secara sengaja atau tidak sengaja, kita tidak perlu membikin reklame gratis bagi para penulis buku yang cuma merekayasa kebohongan, kepalsuan dengan cara sensasionil bahkan dianggap "spektakuler" pula. Biarkanlah buku-buku picisan itu bergulir menurut jalan yang dibuatnya sendiri dan tak perlu dicomot lalu tanpa sadar telah mempromosikannya ke berbagai media termasuk internet. Pikiran yang sehat dan otak yang segar harus juga pandai memilih makanan otak yang baik, konsumsi yang sehat dan orientasi ke rakyat. Kita hidup di tengah sampah dan dekat sungai-sungai yang kotor serta udara pengap tercemar bermacam racun kimia politik. Pilihlah tempat-tempat yang masih relatif bersih dari pencemaran dan jangan suka mencomot barang-barang aneh di jalan yang tampak terbungkus baik yang mungkin dari seseorang mules perut yang takut atau segan ke luar rumah atau dari kamar di malam.

asahan aidit.

\*\*\*\*\*

Makna apa dibalik kata "KEBLINGER"pemimpin PKI dalam G30S65

Bapak Asahan Aidit yth,

Keblinger adalah sok pinter, tetapi sebetulnya goblok. Sukarno menyimpulkan PKI itu keblinger, saya berkesimpulan sebagai berikut:

PKI sok pinter, tidak punya kesabaran revolusioner, tanpa menunggu dipukul oleh Dewan Jenderal, kemudian melakukan serangan balas, melainkan memukul duluan, kemudian tidak konskewen melanjutkan serangan ber-tubi2 untuk menghancurkan sisa2 Dewan Jenderal yang masih hidup. Di sinilah letak kegoblokannya yang mendatangkan malapetaka buat jutaan manusia yang dianggap pengikut PKI. Sebab PKI sebelumnya pernah gembor gembor punya pengikut sebanyak 20 juta.

Saya lahir pada 1976, jadi 11 tahun setelah G30S. Ayah saya adalah anggota pimpinan Dewan Nasional Pemuda Rakyat, ketika 30 September 1965 berada di Jakarta. Setelah itu beliau ber-pindah2 rumah tinggal, untuk menghindari penangkapan. Ini sebelum meninggal dunia, beliau pernah menceritakan pengalaman kepahit-getirannya sebagai buronan politik yg lolos dari lobang jarum angkara murka. Menurut bung Ol, jenderal PKI yg menjadi kepala depda (departemen pemuda), 1965, situasi revolusioner sudah sampai ke puncaknya, dalam hari2 mendatang akan terjadi penentuan siapa yang akan menang dalam pertempuran penghabisan antara PKI lawan DD (Dewan Djenderal). PKI telah memutuskan, tidak akan menghantam lebih dahulu, sebab akan membikin PKI menjadi terisolasi dari massa rakyat yang luas. tak mungkin DD sekali hantam terus hancur lebur. Mereka akan melakukan serangan balas yang akan membikin Partai kita terhapus dari muka bumi Indonesia.



Tiba2 terjadilah G30S yang dipimpin oleh letkol Untung yang dibina oleh PKI dalam jangka panjang melalui biro khususnya.

Perbuatan Untung ini jelas melanggar disiplin Partai, dan sangat berbahaya sekali. itu, termasuk ayah saya sudah mengusulkan agar PKI bangkit mengutuk letkol Untung sebagai kontrarevolusi yang berkedok revolusioner dan mengarahkan seluruh partai untuk menghancurkan G30S. tapi sayang seribu sayang, pimpinan PKI malahan mengeluarkan statement yang mendukung G30S sebagai masalah intern AD, sebagai gerakan yang revolusioner. Betul2 goblok sekali PKI ini. saya menjadi kecewa, tidak mau ikut dikubur bersama PKI, maka ia kabur ke Jawa Timur, kemudian ke Menado, kemudian ke Ambon, dan terakhir balik lagi ke Jakarta menjadi pedagang sate Madura di kaki lima. Pendek kata sejak itu ayah saya memutuskan tali temali dengan Pemuda Rakyat dan PKI.

Ini yang membikin ayah saya selamat sampai beliau meninggal dunia pada awal Maret 2005 ybl. Ketika awal Oktober 1965, banyak yang pintar yg melarikan diri dan mengganti identitasnya, bahkan yang ada kesempatan keluar negeri pada kabur ke negeri sosialis untuk minta suaka politik, masing2 secara pintar menyelamatkan nyawanya dahulu, tidak mau ikut dikubur bersama pimpinan Partai yang keblinger itu.

Di dalam tubuh PKI terdapat beberapa faksi, yang ekstrim kiri yang diwakili oleh Aidit, yang Marxis Leninis yang diwakili oleh Grup Bandung (Ismail Bakri) dan yang berada di tengah2nya yang diwakili oleh Sudisman/Lukman/Njoto/Sakirman dll. Ini cerita ayah, yang membutuhkan pembuktian oleh bekas pucuk pimpinan PKI yang masih hidup.

G30S dicetuskan oleh grup Aidit. Yang melanggar keputusan Partai untuk tidak menghantam duluan. Ini yang membikin Sudisman dan anggota dewan Harian Politbiro menjadi serba salah, akhirnya mengeluarkan statement 2 Oktober 1965 melalui Harian Rakyat.

Sedangkan Grup Bandung mengeluarkan statement yg mengutuk G30S, mengeluarkan majalah intern Suara Demokrasi yang melakukan perdebatan sengit melawan Mimbar Rakyat yang dikeluarkan oleh CC PKI (baca Sudisman). Ayah masih sempat baca dokumen2 ini di Surabaya. Sampai lahirnya Otokritik Politbiro PKI, yang merupakan perdamaian antara grup Sudisman dan Grup Ismail Bakri. Setelah itu ayah sama sekali memutuskan tali temali hubungan dengan bekas kawan2nya, karena tidak mau ikut PKI melancarkan perjuangan bersenjata menggulingkan apa yang dinamakan rezim fasis Suharto-Nasution. Sebab ayah tidak mati konyol, ibarat telur melawan batu.

Demikianlah cerita tempo dulu yang saya dengar, sebelum ayah pulang ke alam baka.

Mohon pak Asahan melempangkan cerita ayah, jika ada yang tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya, sekalian kepingin numpang tanyak, dimana gerangan pak Asahan ketika G30S meletus? Dan bagaimana sikap pak Asahan ketika itu?

Maria Harsono, 7 Okt 2005.

Sdr. Maria Harsono Yb,

Dalam satu hal saya sangat setuju dengan anda bahwa memang PKI punya kelemahan di bidang teori, politik dan ideologi dan lalu melakukan kesalahan-kesalahan besar sebagai akibat kelemahan yang lama tak terkoreksi secara serius itu. Tapi kita harus membedakan secara tegas antara kelemahan atau kesalahan intern Partai dengan apa yang difitnahkan oleh Suharto kepada PKI sebagai dalang pemberontakan G30S-65. Itu adalah dua hal yang sangat belainan yang tidak bisa disimpulkan bahwa PKI telah melakukan pembontakan dan menjadi dalang G30S-65. Dalam diskusi-diskusi Partai yang saya ikuti selama saya belajar di luar negeri sejak tahun 1961, tidak pernah ada diskusi yang membicarakan persiapan PKI akan meng-coup atau merebut kekuasaan seperti cara-cara yang dipakai pada peristiwa 30S itu. Yang selalu menjadi tema diskusi adalah bahwa di Indonesia sudah ada situasi revolusioner yang semakin masak. Ilusi Partai waktu itu adalah menunggu tanggal main para Perwira Tinggi yang lama berkontradiksi dan akan saling menggulingkan. Sedangkan pengaruh Partai dalam tentara dikatakan semakin meluas dan menguat. Dan dari pemikiran beginilah ilusi memenangkan revolusi dengan jalan damai itu terus berkembang. Dengan kata lain, bila pihak perwira tinggi yang revolusioner itu nantinya menang (istilah politik ketika itu adalah "aspek pro rakyat" dalam "teori dua aspek") maka PKI berilusi revolusi akan menang tanpa ikut perang (PKI tidak punya senjata, tidak punya tentara, tidak punya pasukan bela diri) dan semuanya bersandar pada "aspek pro rakyat" yang dalam tentara itu. Dan di sinilah salah satu kesalahan besar PKI yang punya ilusi besar: ingin memenangkan revolusi dengan menyandarkan diri pada "aspek pro rakyat" dalam kekuatan bersenjata yang dinilai sudah merupakan kekuatan revolusi yang terpercaya ditambah lagi dengan persekutuannya dengan Presiden Soekarno, plus massa rakyat yang mendukung PKI, plus massa anggota PKI yang puluhan juta, simpatisan dan juga sokongan dari Partai-Partai sekawan seperti dari Cina dan dari negeri-negeri sosialis lainnya yang cuma berupa sokongan kata dan semangat saja. Tapi golongan reaksioner Indonesia ternyata lebih pintar, mereka tahu taktik PKI dan kelemahan PKI sekaligus. PKI yang hanya bermodal daging ingin memenangkan revolusi dengan tangan kosong, dan cuma bermodal sokongan dan sorak sorai yang itulah yang kita sebut sebagai "jalan damai"-nya PKI untuk menuju kemenangan revolusi. Dengan kata lain PKI tidak pernah punya niat, tidak pernah ada persiapan, dan juga tidak ada kemampuan untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan senjata, kecuali dengan jalan damai seperti yang sudah digariskan dalam garis umum Partai yang tertuang dalam "Teori dua aspek". Golongan reaksioner Indonesia sudah lama mengetahui kelemahan PKI, mengetahui ilusi PKI, dan mereka (terutama yang memegang senjata) mengetahui titik lemah PKI yang paling dasar: Tidak punya kekuatan riil yang bisa memberikan perlawanan terhadap mereka (tidak punya tentara, umpamanya seperti yang pernah dipunya DI-TII, Dewan Banteng, Permesta, yang meskipun akhirnya bisa ditumpas tapi mereka pernah punya kekuatan riil). Karena itulah jalan yang paling ampuh untuk menumpas PKI adalah jalan fitnah, provokasi (ingat provokasi Madiun), intimidasi, dan penyusupan mata-mata ke dalam tubuh PKI. Ditambah lagi dengan pemborjuasian dalam tubuh PKI waktu itu yang telah sangat membudaya yang sudah sangat disadari sendiri oleh PKI. Masih adakah di kalangan orang PKI yang berani memikirkan untuk merebut kekuasaan dengan senjata atau kekerasan dalam keadaan ideologi yang keropos demikian?.

Tapi berilusi masih berani karena itulah mentalitas orang yang baru diborjuasikan. Dan seperti kita ketahui, Suharto telah menggunakan situasi yang dinilainya akan sangat menguntungkan meskipun harus dilakukannya dengan jalan hianat yang paling besar sekalipun. Dia bikin Untung adalah suruhan PKI, Syam Kamaruzzaman punya biro Khusus dengan D.N.Aidit macam-macam lagi ciptaannya yang lain untuk menghancurkan PKI dengan jalan yang paling hina dan nista sekalipun. Tapi mari kita lihat kenyataan yang paling besar yang disaksikan oleh setiap orang di Indonesia dan diketahui oleh dunia luar dengan amat jelasnya:

- Yang membunuh puluhan ribu, ratusan ribu bahkan hingga jutaan nyawa manusia Indonesia yang tidak bersalah adalah Suharto beserta serdadu-serdadu, para algojo sewaan, massa rakyat yang dia paksa dan Orba-nya dan BUKAN , bukan Komunis.

- Yang membunuh 7 jendral bukan PKI, bukan Komunis tapi adalah tentara (PKI tidak punya sebuah pistolpun)
- Yang memenjarakan puluhan ribu orang yang dituduh Komunis dan semua orang yang tidak tahu menahu tentang G30S-65 ke seluruh penjara-penjara seluruh Indonesia dan juga Nusa Kambangan serta Pulau Buru adalah Suharto dan PKI.
- Yang menjadi diktator dan melindas demokrasi serta HAM di Indonesia adalah Suharto dan bukan PKI.
- Yang melakukan politik diskriminasi rasial (terutama terhadap etnis Cina) adalah Suharto dan bukan PKI.
- Yang meng-coup Presiden Soekarno dan menahannya adalah Suharto dan bukan PKI.
- Yang merebut kekuasaan dan menjatuhkan Pemerintahan Presiden Soekarno adalah Suharto dan bukan PKI.

Bisakah kenyataan besar itu dibantah?.

Bahkan Suharto sendiripun hingga detik ini tidak berani buka mulut untuk membantahnya.

Bisakah kita katakan semua yang dilakukan Suharto tsb diatas itu adalah kesalahan PKI?

Melihat kesalahan dan kelemahan PKI adalah di dalam intern PKI itu sendiri dan itu memang jelas ada dan akibatnya telah menghancurkan dirinya sendiri, para anggota dan simpatisannya tapi PKI absolut tidak melakukan dosa atau pembunuhan terhadap rakyat Indonesia, hal itu dilakukan langsung oleh Suharto. Lalu pertanyaan yang saya ajukan, apakah tuduhan Presiden Soekarno bahwa pimpinan PKI yang "keblinger" bisa menutupi semua perbuatan Suharto seperti yang tersebut di atas, meringankan dosa Suharto dan lalu akan ditimpakan pada PKI? atau bahkan sudah ditimpakan.

Menurut saya tuduhan "keblinger" adalah tuduhan yang tidak serius, kurang mencerminkan kebenaran dan bahkan terasa gampang-gampang saja.

## Mengapa?

- Tindakan Suharto yang cepat, mendadak, yang dalam waktu sangat singkat berhasil menangkap hampir semua pimpinan PKI yang masih dalam keadaan terlena dan menyandarkan bantuan Presiden Soekarno yang sudah tidak berwibawa, menyebabkan kebingungan besar, panik dan kehilangan orientasi pada pimpinan PKI. Bisakah dalam keadaan begini, seseorang, bahkan bila dia seorang pemimpinpun, masih sanggup untuk merasa diri sok tahu, sok pintar? atau seperti yang dibilang Presiden Soekarno itu sebagai "keblinger"? Yang paling mungkin terjadi, menurut saya, dalam keadaan kritis dan bahaya besar itu, seseorang lebih cenderung menjadi gagap, bingung, dan bisa kehilangan orientasi. Dosakah bila keadaan demikian terjadi pada seorang pemimpin?. Pemimpin yang manapun pada ahir-ahirnya adalah seorang manusia juga, bukan nabi, bukan superman. Dan apakah ketika peristiwa sudah terjadi, para perwira dalam angkatan bersenjata yang dulu bersimpati pada PKI, berjiwa revolusiner, lalu serta merta dihianati dan dikutuk oleh pimpinan PKI? Demi untuk menyelamatkan PKI sendiri?. Langkah salah pertama bukan dilakukan oleh PKI tapi oleh intern angkatan bersenjata itu sendiri. Lalu sebagai akibatnya, apakah Pimpinan PKI cepat-cepat cuci tangan sambil mengorbankan teman sendiri yang pun ternyata adalah korban perbuatan Suharto sendiri.
- Ketidak siapan PKI atau lebih tepatnya scenario para perwira yang punya rencana membunuh 7 jendral itu membuat pimpinan PKI harus memilih hanya dua pilihan:
  - . menyokong gerakan( setia kawan, pada perwira yang "pro rakyat")
  - . mengutuk gerakan (menghianati kawan, perwira-perwira yang "pro rakyat")

Silahkanlah pilih PKI yang a atau yang b. Yang jelas PKI tidak bisa tidak memilih keduanya. Bisakah kita katakan pimpinan PKI telah keblinger dalam pilihan yang mematikan itu. Tapi jelas di sini ada dua macam kematian: Yang menghianati teman atau yang setia kawan. Tapi akibat selanjutnya adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Suharto karena dialah yang berlaku sebagai algojo pembunuh ratusan ribu hingga jutaan manusia Indonesia yang tidak bersalah. Saya merasa bahwa Presiden Soekarno telah memilih kata yang tidak beruntung itu untuk PKI dalam keadaan PKI sendiri tetap setia hingga ahir hayatnya kepada Bung Karno. Saya sebagai pribadi dan adik D.N. Aidit (cuma bahan pertimbangan):

Saya tidak yakin kalau D.N.Aidit itu bisa jadi orang kekiri-kirian. Saya mengenalnya dari dekat, tinggal bersamanya dalam banyak tahun, serumah, dan juga bekerja untuknya. Secara politik dia tidak punya sifat kekiri-kirian. Saya sebagai bekas anggota Partai, selalu sebagai oposisi dalam grup Patai yang manapun, saya juga tidak suka dengan sifat kekiri-kirian. D.N.Aidit tidak punya sifat diktator, terhadap keluarga maupun terhadap kawan-kawan sendiri.

Kalau saya membaca tulisan orang lain rentangnya yang menuduh dia seorang diktator, saya cuma ketawa. Reputasi pribadinya begitu drastis direndahkan

sesudah peristiwa G30S-65. Tapi saya bisa memaklumi karena itulah sisa-sisa pemborjuisan di dalam Partai sebagai akibat jalan damai yang bersuka ria dengan kaum borjuis besar dan sedikit sebagian harta borjuis. Iri dengki satu sama lain di antara pimpinan Partai sendiri, sudah menjadi budaya intern Partai dan lalu digunakan musuh untuk mengadu domba seperti umpamanya antara Aidit dan Nyoto, katanya ada kontradiksi yang mendalam. Saya tahu persis hubungan Aidit dan Nyoto. Aidit sangat mengagumi kebrilyanan otak Nyoto terutama dibidang seni dan hususnya. Aidit tidak punya sifat iri terhadap kawan yang lebih dari dirinya. Apa yang ditiup-tiup sebagai kontradiksi adalah omong kosong. Memang akibat pemborjuisan di dalam PKI, mentalitas pimpinan, terjadi degradasi, terutama oleh pengaruh materi dan ingin hidup senang. Itu sebuah cerita yang akan berjilid jilid. Tapi akan saya ahiri hingga di sini karena ini sudah teramat panjang dan memang cuma beginilah kemampuan saya, semoga dengan penjelasan atau pemikiran saya ini, Sdri. Maria Harsono tidak kecewa. Saya turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Ayah anda beberapa bulan lalu. Semoga kita selalu jelas dalam membedakan siapa lawan siapa kawan.

Salam.

asahan aidit

\*\*\*\*\*

Pimpinan PKI Keblinger?

(Diskusi Asahan Alham – Maria Harsono)

Oleh: Harsutejo

tentang keblingernya sejumlah pimpinan PKI antara Bung Asahan Aidit dengan Mbak Maria Harsono amat menarik bagi saya sebagai peminat sejarah tragedi 1965. Kita sudah mengenal akan berbagai pernyataan dan pertanyaan Bung Asahan seputar peristiwa 1965 yang sering amat tajam dan kritis, barangkali membuat merah telinga sementara pihak yang tidak setuju. Bagi saya sendiri berbagai pernyataan dan pertanyaannya wajar dan sah untuk mencari tahu lebih lanjut akan kebenarannya. Sebagai peminat yang ikut mengalami masa itu saya juga kagum akan tanggapan yang amat kritis dari Mbak Maria, saya pun berpikir untuk mencari jawabannya berdasarkan sedikit pengalaman langsung maupun pengalaman orang lain serta kepustakaan yang dapat saya akses. Untuk menanggapi saya sendiri memerlukan waktu untuk menelaahnya lebih lanjut dengan lebih teliti.

tulisan Mbak Maria yang bisa langsung saya tanggapi, “Ketika awal Oktober 1965, banyak yang pinter yg telah melarikan diri dan mengganti identitasnya, bahkan yang ada kesempatan keluar negeri pada kabur ke negeri Sosialis untuk minta suaka politik, masing2 secara pinter menyelamatkan nyawanya dahulu, tidak mau ikut dikubur bersama pimpinan Partai yang keblinger itu.” Saya sendiri termasuk salah seorang yang ditangkap dan dipenjarakan, ketika dibebaskan segera kabur mengganti identitas. Dari pengalaman 6 bulan di penjara saya menyaksikan sendiri ribuan orang dibon tengah malam dan lenyap untuk selamanya, pemerintah diktator itu jelas akan membasmi semua saja yang dipandang lawannya. Mereka yang dibebaskan dan tetap tinggal di rumah kemudian diciduk kembali dan pada

umumnya dibunuh atau dibuang ke Pulau Buru. Setahu saya sejumlah orang Indonesia (ratusan?) yang berada di negeri-negeri sosialis dan negeri lain, sudah berada di negeri itu ketika peristiwa 1965 meletus, sebagai mahasiswa yang sedang tugas belajar, berbagai macam utusan, sedang bekerja di berbagai institusi termasuk kedutaan besar Indonesia dsb. Hanya beberapa orang saja yang berhasil melarikan diri dari Indonesia dan menetap di luar negeri, dengan demikian lolos dari kejaran rezim Orba.

kita ketahui "keblingernya pimpinan PKI" merupakan satu dari tiga bagian analisis Bung Karno tak lama setelah terjadinya peristiwa 1 Oktober 1965. Adakah anda tertarik menanggapi diskusi tersebut di atas? Atau bagi mereka yang cukup banyak mengetahui, enggan ikut serta karena merasa terikat akan segala sesuatu yang mereka anggap sebagai etika organisasi? <harsonos@cbn.net.id>

Catatan:

Mohon Mbak Maria Harsono sudi memberikan alamat email anda.

\*\*\*\*\*

"Asvi Warman Adam" asvi@cbn.net.id on Sat, 8 Oct 2005 07:40:30 +0700 wrote

Diskusi tentang keblingernya sejumlah pimpinan PKI antara Bung Asahan Aidit dengan Mbak Maria Harsono amat menarik bagi saya. Apakah Maria Harsono itu putrinya Pak Harsono Sutejo yang menulis komentar ini ?

asvi@cbn.net.id

\*\*\*\*\*

From: djoko sri moeljono

To: harsutejo

Sent: Saturday, October 08, 2005 8:39 AM

Subject: Re: Pimpinan PKI Keblingernya?

Pimpinan PKI keblingernya?

Menurut pendapat saya pribadi, adalah benar bahwa pimpinan PKI ke blinger. Pimpinan disini bisa merujuk pada seorang Aidit, bisa juga merujuk pada "beberapa" (2 @orang?). Dalam naskah buku saya ada bagian yang membahas ini, dimana menurut pendapat "pribadi" saya pimpinan PKI terlalu terpengaruh a.l oleh bukti "aspal" asli alias palsu - yaitu jebakan berupa dokumen Gilchrist. Kertasnya asli Kedutaan Besar Inggris, tetapi isinya "gombal"- "nonsens" - yang ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah. tetapi karena ada "bukti" berupa selembarkertas yang bisa dipegang, bisa dilihat dan diketemukan dirumah seorang Amerika Bill Palmer, maka bukti ini jauh lebih kuat dan lebih meyakinkan dari rumor, isu atau desas-desus (yang di Buru disebut Radio Dengkul) - hal ini membuat "risi" pimpinan PKI. Salah satu bentukrisi tsb, lagi-lagi menuetur "pendapat saya" adalah desakan agar dibentuk Angkatan ke-V (diluar Angkatan Darat, Laut, Udara dan kepolisian) yang dipersenjatai. Tuntutan ini apakah hanya dari PKI atau didukung partai lain, saya sudah tidak ingat, tetapi yang jelas: dibelakang hari tuntutan ini jadi boomerang bagi PKI. Orang bilang: PKI jelas berniat berontak dan mereka menuntut Angkatan ke V dipersenjatai! Itu adalah

tanda-tanda bahwa mereka mempersiapkan diri! mengenai keblingernya pimpinan, saya tulis dalam buku bahwa dalam hal-hal penting ,krusial dan rahasia, "bisa dibenarkan" bahwa pimpinan membatasi "orang yang boleh tahu" tetapi celakanya di antara orang yang boleh tahu ternyata adalah intel AD yng disusup kan ketengah PKI! Menjadi kewajiban bagi kita semua untuk membuat yang gelap jadi terang dan jelas bagi generasi muda, betapapun pahitnya.

\*\*\*\*\*

Pak Asahan yth,

banyak cerita tempo doeloe ayah saya, harap bapak bisa bersabar mengikutinya, jika semuanya ditulis, barangkali bisa membikin novel setebal 500 halaman.....

1 Oktober 1965, begitu mendengar siaran RRI, mendengar pengumuman terbentuknya Dewan Revolusi, ayah segera pergi ke kantor Dewan Nasional Pemuda Rakyat di Jalan Tanah Abang. sana sudah ramai pucuk pimpinan Pemuda Rakyat yang ramai mendiskusikan peristiwa besar itu.

masih ingat betul, ia dan beberapa kawan (sayang minoritas jumlahnya), mengusulkan agar Partai melakukan tindakan tegas menarik garis pemisah dgn letkol Untung, menyatakan bukan saja itu adalah masalah intern AD, tetapi juga letkol Untung adalah provokator dan kontra rervolusi yang harus dikutuk dan dibas-mi. Harus blejeti kedok asli letkol untung yang kontra revolusioner.

ayah berpendapat demikian? Masalahnya sebetulnya sangat sederhana sekali. Bahwasanya Partai sudah mengambil keputusan, TIDAK AKAN MUKUL DULUAN. Siapa yg mukul duluan, apa itu PKI apa TNI, semuanya akan berada dalam posisi yang dibawah angin dan kekalahan sudah pasti. Yang mukul duluan pasti bukan PKI melainkan agen musuh yang menyelundup kedalam tubuh PKI.

usul baik dari ayah tidak mendapat tanggap serius bahkan dikatakan harus percaya kepada Politbiro yang akan mengambil langkah2 yang tepat.

berapa kemungkinan mengenai siapa sebetulnya yang mencetuskan G30S:

(1) Agen CIA yang menyusup kedalam PKI, yang diwakili oleh Syam yang berhasil mendapat kepercayaan tinggi dari DNAidit, atas perintah CIA, Syam menawan Aidit, kemudian atas nama Aidit memerintahkan letkol Untung untuk mencetuskan G30S dan menghabisi nyawa perwira2 tinggi AD, dengan demikian memberi alasan kepada sisa2 AD yang anti Komunis untuk mengambil langkah2 yang diperlukan untuk membasmi PKI.

Hal ini demikian, maka Polit biro CC PKI harus lebih cepat ketimbang Suharto, pertama2 mengutuk (bukannya mendukung) G30S, mengatakan bahwa apapun alasannya G30S adalah perbuatan provokatif yang licin yang bermaksud menghancurkan PKI. Menyeruhkan seluruh partai untuk ber-sama ABRI membasmi dewean Revolusi di pusat maupun di daerah2.

(2) Politbiro CC PKI berhasil diyakinkan oleh golongan ekstrim dalam tubuh PKI, untuk mukul duluan, membatalkan keputusan sebelumnya, dengan demikian AD tidak menyangka sedikitpun serangan mendadak ini, sebab sebelumnya sudah

digembargemborkan, jika 5 Oktober PKI dipukul, PKI baru mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan.

kedua ini sangat besar, sebab nyatanya PKI tidak mengutuk G30S, sebab G30S itu sendiri didalangi oleh seluruh PB CC PKI.

menyatakan G30S adalah masalah intern AD, PKI bermaksud mencucitangan, seolah2 letkol Untung bukannya disuruh oleh PKI, melainkan ber-tindak semau dewek. PKI berilusi Pranoto bisa menjadi pengganti letjen Jani, ada desas desus bahwa Pranoto adalah perwira maju yg pro PKI (atau mungkin anggota rahasia PKI?), dengan demikian masalah ini bisa dilokalisir dalam tubuh AD, bisa diselesaikan secara politik dibawah komando Sukarno.

ayah, kemungkinan kedua ini adalah kemungkinan yang terbesar. Pak Asahan boleh berbeda pendapat, kita semua sama2 main duga saja bukan?

kemungkinan pertama, maupun kemungkinan kedua, PKI telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, yang mengakibatkan jatuhnya korban sampai jutaan jiwa. Yaitu dengan statement PB CC PKI 2 Oktober, yang menyeruhkan agar seluruh Partai jangan terprovokasi, ini adalah bahasa yang umum, yang berarti jangan melakukan tindakan apa2, jika ditangkap menyerah saja, toh akan dibebaskan melalui penyelesaian politik Sukarno. Ini berarti menyerahkan nyawa para anggota PKI di bawah tangan Sukarno. Setelah Pranoto gagal jadi pimpinan AD, Suharto merebut dengan kekerasan jabatan pimpinan AD, yang berarti Sukarno sudah menyerah kalah dan tidak pegang komando dalam ABRI, PKI masih berilusi Sukarno bisa menggunakan pengaruhnya untuk melakukan penyelesaian politik, ini sudah sangat keterlaluan batas kesalahan fatalnya. Maka tak heran Otokritik PB mengatakan, dari kesalahan oportunist kiri lari ke oportunist kanan, dari secara gegabah mendukung kup istana G30S yang tak ada bau2nya revolusi, terus lari ke kapitulasionisme, menyerahkan nasib 20 juta simpatisan PKI kepada Sukarno, dan terjadilah pembunuhan biadab terbesar dalam sejarah Indonesia, sebab manusia dibantai tanpa perlawanan kaya ratusan ribu ayam disembelih oleh para algojo.

Ayah tidak menyalahkan Suharto, tidak menyalahkan para algojo Banser Anshor, tidak menyalahkan Sarwo Eddie dll. mereka berbuat demikian karena mau balas dendam, mereka berbuat demikian takut dirinya dibantai seperti 7 perwira di Lubang Buaya, jadi daripada mati konyol, lebih baik menghabisi seluruh PKI, apalagi mereka takut akan jumlah 20 juta yang sebetulnya merupakan angka fiktif, angka untuk menakut2i lawan. Merekapun takut, pasukan2 yang setia kepada PKI, yang dibina melalui MKTBPnya PKI, oleh biro khusus akan melakukan serangan balas.

Jadi pak Asahan.,

sungguh menyesal pak Asahan masih membela abangnya, masih membela PKI. Buat ayah saya, siapa algojo sebenarnya yang membantai 7 juta? Bukannya Suharto, juga bukan NU, bukan Sarwo Eddie. Melainkan PKI sendiri yang menggali liang kuburnya sendiri dengan mengorbankan nyawa para anggota dan simpatisannya.

jika periksa kesalahan2 garis politik PKI itu sendiri, yang sejak lahirnya sudah menjadi agen Moskow, PKI dilahirkan bukan untuk membela Indonesia, melainkan



untuk membela Uni Sovyet dari kepungan negeri imperialis. sesuai dengan garis Moskow yang menjadikan AS sebagai musuh utamanya. Indonesia tidak diagresi secara militer kaya Vietnam, mengapa PKI harus ikut tongkat komando Moskow menjadikan AS sebagai musuh utamanya?

jaman Aidit, PKI main2 dengan api revolusi, menjadikan imperialis AS sebagai musuh utama, menjadikan Setan kota dan setan desa sebagai musuh utama yang harus diganyang, ini namanya politik orang goblok, politik mencarimusuh, padahal dirinya tidak mempunyai kekuatan jika semua musuh2nya bersatupadu untuk menghancurkan PKI.

utama yang membikin tragedi nasional adalah karena PKI adalah Partai marxis leninis yang menempuh jalan kekerasan bersenjata, bukannya partai remo seperti Italia yang menempuh jalan parlementer dan jalan damai. Tapi lahiriahnya PKI menempuh jalan parlementer dan jalan damai, kalau betul2 jalan parlementer, mengapa harus gembar gembor revolusi belum selesai? mengapa dengan lantang menyanyikan lagu: Singkirkan kaum kepala batu? Dengan apa singkirkannya? Kalau bukan dengan senjata? Emangnya setan kota tidak punya bedil, emangnya mereka mau dengan sukarela mundur dari panggung sejarah dengan demo2 dan aksi2 revolusioner dalam surat kabar?

, G30S, terlepas siapa yang menjadi dalangnya, adalah suatu kejadian yang pasti akan terjadi, karena PKI menempuh jalan revolusi, bukan menempuh jalan reformasi, jalan damai kaya PK Itali, PK Perancis dll yang dimaki sebagai Partai remo. Betul nggak pak Asahan?

dulu, lain kali sambung lagi cerita ayah dan pendapat saya sendiri.

Harsono. Oktober 2005

(tapi sok pinter) PKI, membikin saya harus se-lama2nya menyembunyikan identitas saya, sebab malu pernah jadi jantungghatnya PKI, menjadi penerus PKI.

bukan Tjiptaning yang bangga mejadianak PKI, saya dengan lantang mengatakan di sini:

MARIA HARSONO MALU JADI ANAK PKI.

\*\*\*\*\*

Sdri. Maria Harsono Yb,

Sebelumnya ada yang perlu saya tegaskan:

- Sebagai adik dari D.N.Aidit, tentu saya membela dia dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar, berlebih-lebihan, kekurangan bukti atau tanpa bukti, berbau sentimen, provokativ atau menjurus kepada fitnah. Dalam keadaan demikian saya tidak menuntut orang lain berbuat seperti saya, bahkan juga tidak kepada saudara-saudara sedarah saya yang lainnya. Saya lakukan itu atas dorongan rasa keadilan dalam kewajiban menilai atau membedakan apa yang benar apa yang tidak, mana yang bohong mana yang jujur. Saya berusaha obyektif dan tidak mau membabi buta atau menutup mata asal abang sendiri lalu dibela mati-matian. Akan tetapi saya juga

tidak mau menjadi budak belian pendapat umum yang disesatkan, dimanipulasi yang bermaksud mengkorupsi sejarah, menggelapkan dan menjuruskannya ke satu arah hanya demi menyulap fitnah menjadi kebenaran umum.

Saya juga tidak bermaksud membela kesalahan-kesalahan PKI yang sudah semua kita ketahui, kita kritik dan oleh sebagian banyak orang telah dikutuk habis-habisan. Tapi ada satu yang harus saya sedari dan tidak bisa saya bantah: Kita adalah anak dari seorang ibu politik yang bernama PKI itu (anda mungkin adalah cucu dari ibu politik yang bernama PKI itu). Seorang ibu bisa melakukan kesalahan besar bahkan hingga membunuh anaknya sendiri (itu sebuah cerita kehidupan yang sama sekali bukan fiksi meskipun bukan setiap hari terjadi). Tapi seorang ibu tetap saja seorang ibu, dia telah melahirkan kita, termasuk ibu politik, atau nenek politik. Bahwa kita ingin menolaknya sebagai ibu karena dosa-dosanya, kesalahannya, atau "kekeblingerannya" itu adalah hak setiap anak atau orang. Penolakan tidak akan menyelesaikan soal, karena yang menentukan masa depan seorang anak adalah jalan yang akan ditempuhnya sendiri, nasibnya sendiri di masa yang akan datang atau masa depannya. Lalu masih ada yang menyisa, yaitu masalah keadilan yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja: sampai dimana besarnya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dibuat ibu politik kita itu. Sebelum mengadilinya dan mengambil keputusan meninggalkannya atau menolaknya, kita harus tahu persis takaran berat ringannya semua kesalahan dan dosa-dosa itu: faktor dalam dan faktor luarnya, sarat-sarat sejarah di waktu itu, langsung dan penyebab tidak langsung. Kebenaran tunggal itu tidak ada. Yang ada, adalah berjuta kebenaran dan berjuta kesalahan dan kita berada di tengah-tengahnya. Hanya dengan pertolongan otak kita, kita mungkin membedakan yang satu dengan yang lain. Sangat sederhana : satu tambah satu adalah dua. Tapi tiga kurang satu adalah juga dua dan masih berjuta variasi lainnya yang membenarkan angka dua adalah angka dari hasil kebenaran. Lalu apakah yang kita maksudkan dengan tunggal atau "kebenaran tunggal". Itu tidak lain dari pada keinginan subyektif seseorang untuk memonopoli hasil kebenarannya sendiri sebagai kebenaran satu-satunya. Kebiasaan ini selalu dipunya oleh seorang diktator.

Saya setuju dengan anda bahwa apa yang kita nilai sekitar peristiwa 30S-65, masih banyak yang bersifat dugaan. Anda menduga, saya menduga, orang-orang lain juga menduga. Tapi Suharto dan bahkan juga Presiden Soekarno adalah menuduh. Dan tuduhan itu yang terberat adalah pada PKI. Dan inilah juga yang mereka anggap atau ingin mereka paksakan sebagai kebenaran tunggal: PKI dalang pemberontakan G30S-65 dan bahkan menurut anda sendiri, PKI-lah yang membunuh berjuta yang tidak bersalah itu dan bukan Suharto, tidak menyalahkan algojo besar Ansor, tidak menyalahkan Sarwo Eddie, semuanya salah PKI. Sayapun tidak menyalahkan anda kalau anda punya pikiran demikian dan juga tuduhan yang demikian. Saya sangat memaklumi pikiran anda telah didominasi oleh pikiran "kebenaran tunggal" kepunyaan sang diktator, yaitu: "PKI dalang dan pencetus G30S-65". Tentu saya tidak sepikiran dengan anda dalam hal ini. Sebelumnya telah saya tulis bahwa kesalahan dan kelemahan PKI harus dilihat di dalam intern PKI itu sendiri, dalam rumah tangga mereka sendiri. Dan sama sekali salah kalau menyimpulkan PKI-lah yang membunuh hi jutaan manusia Indonesia yang tidak bersalah. Amerika dan CIA saja tidak pernah bilang begitu, juga Sovyet Unie yang saat-saat terakhir menjadi musuh PKI, pernah bilang begitu. Bahkan ada tokoh-tokoh Partai Islam yang terlibat langsung dalam

pembunuhan massal itu tidak pernah bilang begitu, dan lebih dari itu, Gus Dur sendiri langsung minta maaf atas turut sertanya massa mereka membunuh orang-orang PKI dan simpatisan serta jutaan manusia yang tidak bersalah dan bukan PKI, bukan komunis, bukan dari aliran politik yang manapun. Apakah kebenaran yang diluar kebenaran tunggal itu akan dibantah dan ditiadakan? Lalu kita akan beramai-ramai mengikuti arus dan turut menyuarakan propaganda mereka bahwa PKI adalah agen semua negeri Adidaya seperti Sovyet Uni(ketika itu), Cina, yang seharusnya mengikuti jalan Patai Komunis Italia, atau Perancis dan tidak mengang-gap Imperialis Amerika sebagai musuh (lalu sebagai teman?)?. Mungkin dalam beberapa hal ada benarnya, tapi juga jelas pemikiran pokok seperti itu lebih banyak bersifat tuduhan, bahkan tuduhan sentimentil daripada tuduhan politik kongkritnya .Di sini pemikiran politik telah banyak kehilangan keseimbangannya dan lebih mengarah kepada sentimentil terutama jika sudah sampai pada tuduh menuduh.Saya mengakui tuduh menuduh itu adalah wajar bila dalam sarat dua pihak mendapatkan hak yang sama, kesempatan yang sama dan sama-sama tidak diancam kekuasaan diktator seperti semasa jaman Suharto .Dan sekarang, inilah yang sedang ingin kita bereskan, cerahkan dan nilai se-obyektif mungkin. Prosesnya masih lama dan masih sangat berliku. Dan siapa yang lelah duluan, dialah yang akan kalah dan "kebenaran tunggal", kebenaran si diktator akan kembali menjadi pendapat umum meskipun untuk sementara . Kita tidak mau hal itu terjadi lagi dan untuk itu jangan kita berhenti di tengah jalan sambil meyakini apa yang tidak persis kita ketahui. Anda tidak mau punya sikap seperti Dr. Tjiptaning, itu adalah hak anda seperti juga hak Dr. Tjiptaning untuk merasa bangga jadi anak PKI. Saya umpamanya, tidak mempunyai dua macam perasaan itu: tidak merasa malu menjadi anak politik PKI dan juga tidak bangga. Yang saya inginkan adalah kebenaran, keadilan dan membersihkan semua dari fitnah, kebohongan, penipuan dan manipulasi politik. Terhadap semua kesalahan dan kelemahan PKI sikap saya adalah jelas: tidak kompromi dan tidak akan menutup-nutupinya dan juga tidak akan meneruskan dan membenarkan kesalahan itu. Tapi saya juga adalah anak politik dari PKI yang dia adalah ibu politik saya. Itu adalah identitas yang tidak bisa dan juga tidak mau saya hilangkan karena ini menyangkut soal moral politik dan juga moral kemanusiaan saya meskipun langkah ke depan saya sudah lain dan tidak lagi mengikuti jejak ibu politik saya itu.

Salam ikhlas dari saya

asahan aidi.

\*\*\*\*\*

: "samiaji" <samiaji@noos.fr>

: Re: [wahana-news] Pimpinan PKI Keblinger?

Harsutejo, dan para sahabat!

Mengikuti diskusi "Pimpinan PKI Keblinger?", juga tertarik, dan ikut nimbrung mencari jawab pertanyaan: "Siapa Keblinger ?" dari sudut pandang yang lain, -- Apakah Bung Karno tidak juga "keblinger"? Saya menyadari membuat artikel ini akan memancing sanggahan. Tapi, betapapun, diskusi akan selalu bermanfaat untuk memperluas wawasan. akan dengan senang hati kalau tulisanku ini bengkok-bengkok "diluruskan", dan memang saya mohon pencerahan.

Artikel itu saya lampirkan dengan tema "Siapa Keblinger?"

Dengan salam hangat,

\*\*\*\*\*

"sadewa48" <sadewa48@centrin.net.id> wrote :

Diskusi tentang keblingernya sejumlah pimpinan PKI antara Bung Asahan Aidit dengan Mbak Maria Harsono amat menarik bagi saya. Menanggapi tanda tanya tentang "Siapa keblinger" oleh Bung Samiaji, uraian itu saya kira sudah tepat menunjukkan bahwa Bung Karno juga keblinger. Antara BK dengan PKI memang seperti kuku dengan daging. Mungkin PKI kukunya dan BK dagingnya. Dalam konteks untuk tampil menjadi tokoh dunia ketiga (NEFO), si daging terus membiarkan (dan mendorong) agar kukunya terus memanjang dan mampu menca-kar ke mana-mana. NEFO, artinya bukan dua blok yang sudah ada. Ini blok baru dan negara sosialis termasuk ke dalamnya. Tanpa dukungan kuku (PKI), maka BK tak mungkin bisa muncul sebagai tokoh dunia ketiga. Persoalannya, ketika kuku sudah kuat dan panjang, lalu kurang kritis dalam membaca situasi di dalam negeri, terutama dalam rivalitasnya dengan TNI/AD. Ternyata dua-duanya sama-sama takut. TNI/AD takut PKI muncul dominan dan PKI juga takut TNI/AD merebut kekuasaan. Di sini PKI keblinger karena terpancing untuk "memukul dulu sebelum dipukul". Dan ini kemudian menjadi peluang TNI/D untuk memukul PKI dengan alasan "terlibat". Ada bukti DNA di Halim (karena "dijemput" tentara malam-malam. Lihat buku Ilham). DNA "dipasang" di Halim untuk mencari legitimasi bagi TNI/AD, PKI terlibat. Satu-satunya tokoh PKI yang "menyimpang" pendapatnya adalah Ismail Bakri, CDB Jabar, tapi tak didengar. Dan ternyata dia benar. Kalau memukul dulu, akan ada alasan untuk balik dipukul. Ketika dipukul, BK muncul agar "tunggu komando". BK keblinger, komando apa bisa dicetuskan dan dapat menggerakkan semua kekuatan pendukungnya (termasuk militer) bila PKI sudah diremuk duluan? "Memukul dulu" (keblingernya PKI) dan "tunggu komando" (keblingernya BK) minta tumbal jutaan nyawa.

\*\*\*\*\*

ChanCT" <SADAR@netvigator.com wrote :

Saya termasuk seorang yang berusaha mengikuti secara teliti tulisan-tulisan sekitar G30S yang tetap penuh dengan tanda tanya itu, dan selalu tetap gelap bagaimana kenyataan sesungguhnya yang terjadi.

Tidak pernah menyangkal adanya sementara tokoh PKI yang terlibat langsung dalam G30S, yang tetap menjadi pertanyaan saya adalah sampai dimana sesungguhnya peranan mereka itu, bisakah DN. Aidit yang ketua PKI itu dikatakan dalang G30S? Sungguh masih harus dipertanyakan, karena kenyataan Aidit justru menampakan diri dalam posisi yang pasif, yang tidak layak disebut dalang. Bagaimana mungkin yang namanya dalang, justru yang diperintah Syam Kamaruzzaman pada saat di Halim subuh pagi 1 Oktober 65 itu, untuk tetap meneruskan penerbangan ke Jawa-tengah. Padahal ada berita yang menyatakan, pada saat Mantan Presiden Soekarno menolak rencana ke Jawa-tengah, DN Aidit juga ingin membatalkan kepergiannya. Dan, ... seandainya DN Aidit, PKI adalah dalang G30S, kenapa tidak bertahan di

Jkr. untuk memberi komando selanjutnya, tapi tunduk pada perintah Syam untuk bersembunyi? Bisakah tindakan DN Aidit yang demikian ini (tunduk perintah Syam dan bersembunyi di Jawa-tengah) sebagai bukti PKI adalah dalang G30S?

Kedua, Seandainya benar berita DN Aidit tunduk pada perintah Syam, tentu harus dipertanyakan siapa sesungguhnya Syam, yang ketua Biro Khusus bisa berperan memerintah DN Aidit yang justru Ketua PKI itu? Sementara orang menyatakan Syam double intelinjen, dia bekerja untuk PKI tapi juga bekerja untuk AD, bahkan juga CIA. Dan kalau, kita perhatikan lagi bagaimana kedekatan Syam pribadi dengan jenderal Soeharto yang sudah tergalang sejak jaman Jogja tahun 46-48 itu, kemudian melihat kedekatan/keakraban jenderal Soeharto dengan tokoh-tokoh teras G30S, dari Letkol. Untung Samsoeri, Kol. Latief, Brigjen Soepardjo tentu orang akan cenderung menyatakan jenderal Soeharto-lah dalang G30S sesungguhnya; Begitulah kekuatan-kekuatan pasukan yang digunakan G30S, Yon-434 Diponegoro dan Yon-530 Brawijaya, adalah pasukan siap tempur yang langsung didatangkan ke Jakarta oleh jenderal Soeharto sendiri, tapi anehnya, pasukan ini pula yang digunakan untuk menindas G30S di Halim. Oleh karena itu, tidak aneh Soebandrio menyatakan G30S hanyalah rekayasa jenderal Soeharto dalam rangka kupdetat-merangkak, dan berhasil dengan baik.

, mengingat ketika itu, situasi perang-dingin yang sedang panas-panasnya, bukan mustahil Amerika dengan CIA-nya pasti berperan untuk membasmi komunis dan menjungkelkan presiden Soekarno yang terlalu "kiri" itu. Yang perlu diselidiki lebih lanjut, tentu adalah sampai dimana jenderal Soeharto digunakan oleh CIA sebagai kuda tunggang pengganti jenderal Nasution. Jadi, sementara analisa ada benarnya, G30S hanyalah satu gerakan buatan CIA sebagai jebakan yang dirancang untuk gagal, sebagai alasan untuk menggebuk dan menumpas PKI saja. Dan itulah yang telah terjadi dan bisa kita lihat jelas, semua inisiatif dilakukan secara cekatan oleh jenderal Soeharto.

demikian, saya setuju dalam langkah perjuangan selanjutnya, janganlah main basmi-membasmi, bunuh membunuh lagi. Korban rakyat tak berdosa sudah terlalu banyak bergelimpangan karena kesalahan itu. Perlakukanlah setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati dan disayangi. Jangan lagi kita menganggap diri-sendiri yang manusia, yang paling benar dan orang lain yang beda-pendapat, beda agama, dan beda politik-ideologi sebagai setan, sebagai musuh yang harus dibasmi, dibunuh. Jangan lagi! Bersatulah bangsa ini dengan lebih baik lagi mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan nyata bermasyarakat.

juga setuju dendam orang-tua tidak seharusnya kita warisi, orang tua dimasa lalu saling baku-hantam, kita dan anak-cucunya harus bisa menempuh kehidupan barunya sendiri, sebagai anak-bangsa yang bersatu-padu untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Tetapi ingat, generasi muda harus terus berusaha menegakkan HUKUM sebaik-baiknya, pelanggaran HUKUM, kesalahan-kesalahan pelanggaran HAM-berat sekalipun sudah lewat 40 tahun lebih, tetap harus tergugat HUKUM, tidak ada masalah kedaluwarsa. Sekarang belum ada kemampuan untuk itu, tapi harus diperjuangkan adanya kejernihan dan keadilan sebaik-baiknya secara HUKUM. Tidak membiarkan lewat begitu saja, setelah terjadi pembunuhan, penganiaya, penangkapan begitu banyak orang tidak berdosa, yang bertanggung jawab

harus diadili dan ada kejelasan HUKUM. Dan tuntutan keadilan, penegakkan HUKUM demikian ini sekali-kali bukan balas-dendam.

Salam,

ChanCT

\*\*\*\*\*

From: Asahan Aidit:

Sent: Thursday, October 13, 2005 5:26 AM

:: Seluruh bangsa adalah keblinger

Dalam peristiwa G30S-65 seluruh bangsa adalah keblinger

yang terutamanya adalah Suharto sendiri. Dimulai dengan membunuh 7 Jendral dan diahiri dengan pembunuhan berjuta-juta orang yang tidak bersalah termasuk anggota-anggota PKI beserta simpatisannya. Seluruh kekuatan reaksioner dalam negeri yang bekerja sama dengan CIA telah nyata-nyata keblinger. Tidak ada satu pihakpun yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam peristiwa G30S-65, bisa merasa dirinya tidak keblinger. Itu semua adalah kesesatan pikiran dan tindakan gila-gilaan yang tak terperikan kejam dan biadabnya terhadap kemanusiaan dan terhadap bangsa Indonesia khususnya. Karenanya kalau hanya dituduhkan pada pimpinan PKI saja yang keblinger, adalah sangat idak adil, tidak obyektif dan juga tidak benar. Yang benar, semuanya dalam keadaan keblinger, mabuk kuasa, mabuk darah dan mabuk kejayaan oleh kesesatan dan kepanikan ideologi dan kemerosotan moral politik maupun moral kemanusiaan.

aidit.

\*\*\*\*\*

From: ChanCT

Sent: Thursday, October 13, 2005 5:04 AM

Subject: [wahana-news] Re: Seluruh bangsa adalah keblinger?

Bung Asahan yth,

, pernyataan seluruh bangsa keblinger sih agak keterlaluan juga, ya. Apalagi dinyatakan seluruh bangsa mabuk kuasa. Siapa yang mabuk kuasa? Itukan cuman segelintir elite saja, kenapa mesti dibawa-bawa rakyat tidak berdosa, ya. Mereka-mereka itu betul-betul tidak tahu apa-apa, kok. Tahu-tahu ditangkap, dipenjara, atau, ... dibantai dengan tidak tahu-menahu apa salahnya, apa dosanya! Bagaimana bisa dikatakan keblinger?

lagi, menjadi lebih salah kalau dikatakan jenderal Soeharto juga keblinger. Jenderal Soeharto adalah satu-satunya orang yang tidak keblinger, tapi yang betul-betul cerdas-pandai (baca sangat licik) dan berhasil mencapai tujuannya.

itu berarti orang yang sok pinter tapi melakukan kesalahan yang sangat bodoh?

Salam,

\*\*\*\*\*

Bung Chan Yb.

Keblinger yang diinterpretasikan sebagai sok pinter tapi sebenarnya goblok adalah sebuah penafsiran emosional yang bisa saja -bawa meng-embeli arti pokoknya yaitu sesat. Ada sebuah pepatah rakyat Vietnam yang sangat populer yang berbunyi: "Khon qua thanh dai" yang terjemahannya adalah: Kebangetan cerdiknya, jadinya goblok. Soalnya apakah tepat demikian diterapkan pada kasus para pimpinan PKI:

Sok pinter tapi sebenarnya goblok. Saya tidak sedikitpun punya hasrat untuk membela kelemahan dan kesalahan pimpinan PKI. Bahkan saya sudah hampir mabuk ketika mengkritik para pimpinan PKI selama dalam diskusi bertahun-tahun dalam kolektif Partai ketika sama-sama mempelajari "kritik otokritik PB CC PKI". Tapi penilaian bahwa para pimpinan PKI itu sok pinter tapi sebenarnya goblok, baru saya dengar sekarang. Terdengar sangat kekanak-kanakan, seperti dua suami istri yang sedang bertengkar dan saling merendahkan. Sebuah tuduhan yang sangat ringan tanpa sedikitpun punya bobot politik dan hanya untuk melampiaskan kekesalan pribadi. Saya yakin ketika Presiden Soekarno melepaskan kata "keblinger", beliau tidak memberi arti tambahan seperti itu. Saya kira pilihan kata beliau itu sangat beliau pikirkan masak-masak sebelumnya, bukannya spontan penuh kehati-hatian. Namun punya kesan dualisme, yaitu terdengar tidak serius, tapi punya efek melunakkan hati Suharto dan memberatkan dosa PKI. Jadi kata yang kedengarannya tidak garang itu sudah sangat memenuhi keinginan Suharto, yang diartikannya memang PKI setidaknya dalang yang sangat penting. Orang yang sedang sesat pikirannya, memang bisa berbuat apa saja, gelap mata, sampai kepada mengamuk sekalipun.

Saya sungguh tidak mengerti, bahkan tidak habis ipikir, mengapa justru banyak orang-orang PKI yang menuduh dirinya (PKI/ Pimpinannya) adalah dalang atau terlibat bulat-bulat dalam peristiwa G30S-PKI. Apakah ini dimaksudkan untuk menunjukkan sifat ksatria, berani ngaku salah, berani mengutuk diri sendiri di depan musuh bagi menunjukkan budi yang luhur di dibawah telapak Suharto. Dan bahkan berusaha membuktikan sendiri "fakta-fakta" keterlibatan dan peranan dalang PKI dalam peristiwa G30S-65. Sungguh menakjubkan! Tapi semakin hari semakin terasa gejala demikian cumalah ledakan emosi dari kenaifan berpolitik: sikap sportif dalam berpolitik yang dalam dunia yang begini cumalah bunuh diri tanpa meninggalkan keharuan. Dalam politik tidak ada sportifitas. Sedarilah itu sejak sekarang. Politik adalah argumentasi yang bisa diterima akal sehat berdasar logika serta analisa historis dan kontemporer dan hasrat untuk menang. Suharto yang tidak sanggup berargumentasi untuk membela perbuatan biadabnya, lalu menggunakan senjata dan kekerasan, kebohongan dan fitnah, militeris dan fasisme, diktatorial dan otokrasi dan semua metode untuk menyumbat semua mulut yang menentang dirinya karena dia tidak punya argumentasi yang bisa diterima akal manusia normal. Barangkali Suharto lebih mengerti politik daripada PKI, dia tahu apa yang ingin dia capai dan dengan cara bagaimana, kesempatan yang bagaimana dengan alat apa. Tapi lalu dia sendiri jadi benar-benar keblinger, paranoia, mata gelap lalu menjadi biadab dan berjuta manusia yang tidak bersalah mati tangannya.

Dengan kekuatan dan ancaman serta paksaannya dia memperbodoh rakyat hingga rakyat jadi turut keblinger seperti dia. Jangan terlalu ideal memandang kata "rakyat". Meskipun rakyat adalah elemen terbesar dari bagian sebuah bangsa, tapi juga dalam rakyat masih terbagi-bagi menjadi golongan-golongan, wilayah pengaruh dari Partai Partai politik, agama, kepercayaan, profesi dan bahkan sebagian dari bangunan atas adalah juga salah satu elemen dari rakyat. Bukanlah berlebihan kalau seseorang mengatakan, bahwa rakyat ini adalah bangsa korupsi, bangsa maling, bangsa biadab dsb,dsb, dsb. Tentu itu tidak berarti mutlak hingga seratus persen murni bahwa setiap manusia Indonesia adalah demikian. Tapi penggeneralisasian yang demikian dalam syarat-syarat tertentu dari suatu bangsa dalam perjalanan sejarahnya, adalah bisa adanya. Kita katakan sekarang ini jaman edan. Mengapa edan? Karena bangsanya sedang edan yang rakyatnya juga turut dibikin edan. Kalau tidak mau jadi edan, ya jangan turut-turut edan. Salah satu keedanan itu, umpamanya, sok ngaku salah karena sudah dibunuhin, dibuang, , dilucuti hak-hak azasinya, diperlakukan sebagai kaum Paria dan segala kehinaan dan nista yang diberikan musuh, tapi tetap saja menyalahkan diri sendiri dan membenarkan musuh. Apakah ini tidak edan dan bahkan masih dianggap sportif. Otokritik di depan musuh tapi memaki maki saudara sendiri. Rekonsiliasi bukan cuma ilusi tapi sudah benar-benar dongeng fantasi 1001 malam. Musuh hanya bisa dimaafkan bila dia sudah benar-benar menyerah kalah. Dan hanya orang yang punya salah atau punya dosa yang mestinya minta maaf. Dan bukan sebaliknya. Dan di sinilah politik:dia sebuah logika, analisa historis dan kontemporer dan argumentasi yang bisa diterima akal sehat dan bukan "sportivitas"di depan musuh politik yang tak akan pernah melakukan hal itu.

asahan aidit.

\*\*\*\*\*

From: Waji Waki

Sent: Friday, October 14, 2005 1:33 AM

Subject: Makna keblingernya pimpinan PKI

Salam,

telah mengikuti diskusi yang diawali oleh Mbak Maria Harsono dengan Bung Asahan Aidit tentang "Makna apa dibalik kata "KEBLINGER" pemimpin PKI dalam peristiwa G30S-65", kemudian menjadi berkembang setelah mendapat beberapa respon, seperti respon dari Bung Hesri, Bung Samiaji, Bung Sri Moeliono, dan mungkin yang lain. Saya ingin ikut berdiskusi dengan pendapat seperti berikut:

.. Persoalan pertama adalah apakah dalam peristiwa G30S-1965, Pimpinan PKI "benar" atau "tidak benar" telah keblinger seperti yang dimaksud Bung Karno ?. Apabila Pimpinan PKI (bukan PKI ?) benar, telah keblinger dalam peristiwa G30S seperti yang dikemukakan oleh Mbak Maria Harsono, maka diskusi tentang makna dari keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-65 dapat , dan saya kira diskusi inilah yang dikehendaki oleh Mbak Maria. Diskusi tentang makna keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 adalah penting, baik bagi kita yang hanya untuk menghadapi masa kini (sekarang ini) saja, maupun kita yang berkepentingan untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Paling



tidak diskusi ini dapat membuka sebagian dari sisi-sisi penting dari peristiwa G30S-1965 yang masih dianggap gelap.

.. Sebaliknya, apabila menganggap analisa Bung Karno dalam peristiwa G30S salah, artinya pimpinan PKI dianggap tidak keblinger atau menganggap yang keblinger adalah seluruh bangsa, seperti yang dikemukakan oleh Bung Asahan, atau Bung Karno yang keblinger (Bung Samiaji) maka dengan sendirinya tidak ada manfaatnya untuk mendiskusikan â€œmaka keblingernya pimpinan PKIâ€ lebih lanjut. Diskusi ini dengan sendirinya berakhir setelah (Bung Asahan). pihak yang tidak sependapat, telah melakukan tuduhan yang tidak benar, berlebihan, kurang atau tanpa bukti, berbau sentimen, provokatif atau menjurus kepada fitnah. Artinya Bung Asahan sudah menutup pintu untuk apapun yang namanya kritik.

.. Saya melihat ada dua fakta yang dijadikan dasar analisa Mbak Maria dalam mendukung analisa Bung Karno tentang keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965, yakni pertama, fakta tentang adanya konflik intern di dalam partai, yakni konflik antara kelompok Ismail Bakri (disebut sebagai kelompok ML), kelompok (kekiri-kirian), dan kelompok moderat (Sudisman cs), dimana kelompok Aidit sebagai kelompok dominan, dan yang kedua, fakta tentang adanya keputusan PB PKI untuk tidak mendahului.

.. Saya setuju dengan Mbak Maria bahwa pimpinan PKI, (menurut Bung Djoko Sri Moeliono bisa seorang Aidit, bisa "beberapa", 2 atau 3 orang), â€œmemang benarâ€ telah keblinger. Keblingernya pimpinan PKI disebabkan telah melanggar keputusan (strategis) PB PKI untuk â€œtidak mendahuluiâ€, dan lebih lagi dengan adanya pernyataan di Harian Rakyat tgl 2 Oktober 1965. Dengan adanya pernyataan tgl 2 Oktober ini, menurut Bung Bambang Hutagalung, pimpinan PKI telah melarang semua anggota dan simpatisan PKI melakukan perlawanan

.. Lebih dari itu, saya berpendapat bahwa keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 adalah merupakan puncak dari akumulasi kesalahan politik dan organisasi PKI bersumber pada kesalahan ideologi. PKI tidak pernah mau belajar pada kesalahan-kesalahan yang telah dibuat pada masa lampau, seperti kesalahan yang dibuat pada tahun 1926, 1945, dan tahun 1948. dalam peristiwa Madiun tahun 1948 pimpinan PKI menuding Hatta sebagai , karena provokasinya, maka dalam peristiwa G30S-1965 menuding Soeharto sebagai penyebab dibantainya ratusan ribu anggota maupun simpatisan PKI. Sehingga sampai saat sekarang ini yang selalu kita persoalkan hanya bagaimana mengadili Soeharto, bagaimana meminta kompensasi ataupun rehabilitasi. Siapa yang kita suruh mengadili Soeharto ? Siapa yang kita tuntutan untuk memberi kompensasi atau rehabilitasi ? Apakah ini bukan suatu ilusi ?

.. Makna dari keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 adalah bagaimana kita bisa melakukan koreksi dengan benar atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat pada masa yang lalu. Makna pengakuan akan keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 tidak lain adalah pengakuan atas kesalahan PKI dalam peristiwa tahun 1965.

Jakarta, 13 Oktober 2005

Waki Waji

From: Waji Waki  
Sent: Friday, October 14, 2005 1:33 AM  
Subject: Makna keblingernya pimpinan PKI

Salam,

Saya telah mengikuti diskusi yang diawali oleh Mbak Maria Harsono dengan Bung Asahan Aidit tentang "Makna apa dibalik kata "KEBLINGER" pemimpin PKI dalam peristiwa G30S-65?", kemudian menjadi berkembang setelah mendapat beberapa respon, seperti respon dari Bung Hesri, Bung Samiaji, Bung Sri Moeljono, dan mungkin yang lain. Saya ingin ikut berdiskusi dengan pendapat seperti berikut:

Persoalan pertama adalah apakah dalam peristiwa G30S-1965, Pimpinan PKI "benar" atau "tidak benar" telah keblinger seperti yang dimaksud Bung Karno ?. Apabila Pimpinan PKI (bukan PKI ?) benar, telah keblinger dalam peristiwa G30S seperti yang dikemukakan oleh Mbak Maria Harsono, maka diskusi tentang makna dari keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-65 dapat , dan saya kira diskusi inilah yang dikehendaki oleh Mbak Maria. Diskusi tentang makna keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 adalah penting, baik bagi kita yang hanya untuk menghadapi masa kini (sekarang ini) saja, maupun kita yang berkepentingan untuk menghadapi masa kini dan masa yang akan datang. Paling tidak diskusi ini dapat membuka sebagian dari sisi-sisi penting dari peristiwa G30S-1965 yang masih dianggap gelap. Sebaliknya, apabila menganggap analisa Bung Karno dalam peristiwa G30S salah, artinya pimpinan PKI dianggap tidak keblinger atau menganggap yang keblinger adalah seluruh bangsa, seperti yang dikemukakan oleh Bung Asahan, atau Bung Karno yang keblinger (Bung Samiaji) maka dengan sendirinya tidak ada manfaatnya untuk mendiskusikan "makna keblingernya pimpinan PKI" lebih lanjut. Diskusi ini dengan sendirinya berakhir setelah (Bung Asahan), pihak yang tidak sependapat, telah melakukan tuduhan yang tidak benar, berlebihan, kurang atau tanpa bukti, berbau sentimen, provokatif atau menjurus kepada fitnah. Artinya Bung Asahan sudah menutup pintu untuk apapun yang namanya kritik.

Saya melihat ada dua fakta yang dijadikan dasar analisa Mbak Maria dalam mendukung analisa Bung Karno tentang keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965, yakni pertama, fakta tentang adanya konflik intern di dalam partai, yakni konflik antara kelompok Ismail Bakri (disebut sebagai kelompok ML), kelompok (kekiri-kirian), dan kelompok moderat (Sudisman cs), dimana kelompok Aidit sebagai kelompok dominan, dan yang kedua, fakta tentang adanya keputusan PB PKI untuk tidak mendahului.

Saya setuju dengan Mbak Maria bahwa pimpinan PKI, (menurut Bung Djoko Sri Moeljono bisa seorang Aidit, bisa "beberapa", 2 atau 3 orang), "memang benar" telah keblinger. Keblingernya pimpinan PKI disebabkan telah melanggar keputusan (strategis) PB PKI untuk "tidak mendahului", dan lebih lagi dengan adanya pernyataan di Harian Rakyat tgl 2 Oktober 1965. Dengan adanya pernyataan tgl 2 Oktober ini, menurut Bung Bambang Hutagalung, pimpinan PKI telah melarang semua anggota dan simpatisan PKI melakukan perlawanan

Lebih dari itu, saya berpendapat bahwa keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 adalah merupakan puncak dari akumulasi kesalahan politik dan organisasi PKI bersumber pada kesalahan ideologi. PKI tidak pernah mau belajar pada kesalahan-kesalahan yang telah dibuat pada masa lampau, seperti kesalahan yang dibuat pada tahun 1926, 1945, dan tahun 1948. dalam peristiwa Madiun tahun 1948 pimpinan PKI menuding Hatta sebagai , karena provokasinya, maka dalam peristiwa G30S-1965 menuding Soeharto sebagai penyebab dibantainya ratusan ribu anggota maupun simpatisan PKI. Sehingga sampai saat sekarang ini yang selalu kita persoalkan hanya bagaimana mengadili Soeharto, bagaimana meminta kompensasi ataupun rehabilitasi. Siapa yang kita suruh mengadili Soeharto ? Siapa yang kita tuntutan untuk memberi kompensasi atau rehabilitasi ? Apakah ini bukan suatu ilusi ?

Makna dari keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 adalah bagaimana kita bisa melakukan koreksi dengan benar atas kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat pada masa yang lalu. Makna pengakuan akan keblingernya pimpinan PKI dalam peristiwa G30S-1965 tidak lain adalah pengakuan atas kesalahan PKI dalam peristiwa tahun 1965.

Jakarta, 13 Oktober 2005

Waki Waji

\*\*\*\*\*

From: maria harsono  
Sent: Saturday, October 15, 2005 6:15 AM  
Subject: Makna keblingernya pimpinan PKI

tambahan keterangan sedikit:

kekuatan revolusioner adalah kekuatan yg setia kepada revolusi agustus 45, PKI yg mamu membikin Indonesia menjadi negara satelit Moskow kaya Cuba cuma kulitnya revolusioner, isinya adalah reaksioner, adalah pengkhianatan thd revolusi agustus 45 dan Pancasila.

maria harsono emhar76@yahoo.com.hk

=====

Bapak Waki Waji yth,

Saya tertarik sekali dengan uraian point (4) bapak, yaitu mengenai Mengapa PKI bisa keblinger, hal ini disebabkan PKI tidak bisa secara baik menyimpulkan kesalahan2 1926, 1945, dan 1948. PKI lebih banyak mencari kesalahan lawan2nya, kesalahan Kolonial Belanda, kesalahan Hatta, kesalahan Suharto dan kesalahan nekolim dlsb.

Dewasa ini saya memperhatikan masih ada secuil (karena jumlahnya paling banter cuma ratusan orang tua yg sudah jompo dan ubanan) sisa2 PKI yg berkepala batu tidak mau memeriksa kesalahan2 PKI, cuma maki2 Suharto biadab, menuntut agar Suharto diseret ke pengadilan. . . . .

Tapi orang2 ini rajin menyebarkan racun2 berbisa ke tengah2 generasi muda Indonesia yang masih hijau pengalaman perjuangan politiknya, selalu me-nutup2i kesalahan2 serius dari PKI, selalu mem-besar2kan kesalahan Suharto dengan orbanya. Mengapa saya tampil ke media internet ini, justeru karena tidak tega melihat anak muda dicekoki propaganda palsu sisa2 Komunis semacam itu. Takut mereka kelak jadi umpan peluru kayak pembantaian 1966 lagi, sedangkan yang menghasut ngumpet di luarnegeri.

Mengapa kekuatan revolusioner dalam AD begitu benci kepada kekuatan reaksioner PKI, mengapa CIA terlibat dalam gerakan pembasmian PKI di Indonesia?

Satu hal yang sering dilupakan atau sengaja dilupakan, fakta hidup bahwa PKI adalah sekutu bahkan kakitangan Gerakan Komunis Internasional yang berpusat di Moskow dan Beijing, dengan Stalin dan Mao Tjetung sebagai gembongnya, yang berkhayal membikin seluruh dunia menjadi merah, membikin Indonesia menjadi negara satelit mereka.

Tanpa kita menyadari fakta ini, kita tidak bisa memahami mengapa kekuatan revolusioner Indonesia begitu benci kepada PKI dan sejak lama mau membasminya. Kitapun tidak bisa memahami mengapa CIA ikut campur tangan dalam menyingkirkan Sukarno dan membasmi PKI.

ABRI yang dilahirkan dalam kanca revolusi Agustus 1945, adalah kekuatan utama kaum revolusioner Indonesia. PKI sangat menonjol sifat reaksionernya dalam peristiwa Madiun, yang mau membikin Indonesia menjadi jajahan Moskow.

CIA sebagai invisible government dari USA selalu waspada terhadap kaki tangan Moskow yang mengacau di berbagai negeri terbelakang, terutama bekas jajahan negeri kapitalis Barat.

Campur tangan CIA adalah kewajaran dalam konteks Perang Dingin. Jika Indonesia betul2 mempertahankan garis politik non Blok, bersikap netral dalam menghadapi bentrokan 2 superwower. Menjalankan politik bersahabat dengan seluruh bangsa2 di dunia dan semua negara di dunia. Maka Indonesia akan seperti Thailand, Singapura, Malaysia, India dll, tidak mengenal apa yang dinamakan tragedi nasional 65 yang menyeret korban jiwa yang begitu besar.

Mengapa PKI dengan terang2an menyebut dirinya sebagai Partai tipe Lenin? Mengapa pimpinan PKI getol berkunjung ke Moskow dan Beijing?

Ciri2 utama Partai tipe Lenin adalah merebut kekuasaan politik dengan kekerasan bersenjata, mendirikan diktatur burjuis kecil (diktatur proletariat cuma mereknya saja, tetapi isinya adalah diktatur burjuis kecil yang mengaku dirinya sebagai elemen termaju proletar). yang membikin kaum revolusioner dalam ABRI selalu waspada, selalu siap menghancurkan PKI jika mau coba2 meniru Lenin merebut kekuasaan dengan kekerasan bersenjata. G30S adalah petualangan avonturisme dari PKI. Adalah contoh tipikal PKI mau merebut kekuasaan dgn kekerasan bersenjata. Mengapa berakhir dengan kegagalan?

Sisa2 PKI ber-teriak2, bahwa PKI tidak ada niat secuilpun untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan bersenjata. Ini adalah penipuan yang paling tidak tahu malu dan

paling kurang ajar. G30S menemui kegagalan disebabkan oleh sigapnya kekuatan revolusioner AD yang dipimpin oleh Suharto, yang menolak perintah Sukarno untuk mengangkat Pranoto (minimal simpatisan PKI) sebagai pengganti A. Yani. , dalam tubuh PKI sendiri terjadi cacar2an antara berbagai faksi, antara faksi Aidit, faksi Sudisman, faksi Ismail Bakri dan faksi revisionis Nyoto. sebabnya mengapa PKI tidak mampu menyatukan pendapat, menyatukan langkah serempak dan kilat untuk melakukan perlawanan terhadap offensif revolusioner dari Suharto. Belakangan terjadi kompromi antara faksi Sudisman dan faksi Ismail Bakri, sebab faksi Aidit dan faksi Nyoto menjadi berantakan setelah gembongnya mati terbunuh. Kompromi ini menelurkan apa yang dinamakan Otokritik Politbiro CC PKI 1966. pokok dari Otokritik ini adalah TIDAK mau mengakui kesalahan utama PKI, bahkan secara membabi buta meneruskan petualangan politiknya dengan menunjukan jalan keluar PKI adalah KIBARKAN TINGGI2 PANJI MERAH MARXISME-LENINISME FIKIRAN MAO TJETUNG, melakukan pemberontakan bersenjata di Blitar Selatan dan Kalbar, berkhayal dari desa kepung kota kaya di Cina.

Mengapa rekonsiliasi nasional sangat sulit terlaksana?

Hal ini per-tama2 disebabkan oleh secuil sisa2 PKI masih terus ber-kaok2 menyatakan dirinya sebagai orang suci yang tak berdosa, masih ber-kaok2 menuntut pahlawan nasional Suharto supaya diseret ke pengadilan. Selama kalian tidak mengakui kesalahannya, bagaimana mungkin rekonsiliasi nasional bisa terwujud?

Hari ini, tgl 15 Oktober 2005, secuil sisa2 PKI bikin pertemuan di Holland, pertemuan semacam ini pasti digunakan oleh sisa2 PKI buat mohon belas kasihan kepada rakyat Indonesia, bahwasanya mereka samasekali tak berdosa, bahwa PKI adalah kelompok orang suci yang tangannya tidak berlumuran darah. Saya ingin peringat-kan mereka, bahwa semakin sering kegiatan itu diadakan, semakin kepalabatu menyatakan PKI tak berdosa, semakin jauh REKONSILIASI NASIONAL terwujud. PKI dan sisa2nya memang betul2 keblinger, mereka berkhayal lawan2 politiknya ikut keblinger, sama dengan berkhayal matahari terbit di ufuk barat.

ttd.

Maria Harsono.

\*\*\*\*\*

*Asahan Aidit wrote:>*

Ya, memang pada hari ini, 15 Oktober 2005, di Amsterdam, tepatnya tadi pagi jam 11.00, gedung tempat pertemuan bagi peringatan 40 tahun tragedi berdarah G30S-65 telah dipenuhi oleh para undangan yang selain yang berdomisili di Belanda, tapi juga berdatangan banyak teman dari Swedia, Jerman, Perancis dan bahkan yang dari Indonesia. Semangat mengutuk perbuatan keji anti kemanusiaan dari Suharto, tidak berubah bermutasi satu milimikronpun. Ratusan pengunjung yang memenuhi undangan bukan saja yang dari korban tragedi 65, tapi juga yang bukan korban, orang-orang Indonesia yang hidup di Belanda dan bahkan dari orang-orang Belanda sendiri yang bersimpati kepada rakyat Indonesia korban penyembelihan Suharto. Setiap selesai seseorang yang memberikan ceramah, lalu diberikan kesempatan pada setiap hadirin untuk mengajukan pendapat secara bebas. Banyak pendapat

yang diajukan maupun pertanyaan yang sangat berbeda beda dari berbagai sudut pandang. Tapi tidak ada satu pendapat serongpun yang diajukan yang bersifat membela ataupun menutupi dosa-dosa Suharto dalam membunuh jutaan manusia Indonesia yang tidak bersalah sesudah terjadi peristiwa G30S-65 , apalagi yang menganjurkan agar minta ampun pada Suharto dan tentu saja tidak sorangpun yang mengusulkan agar Suharto diangkat jadi pahlawan Nasional. Jadi saya harus sangat mengecewakan harapan orang yang mendambakan Suharto dianggap sebagai pahlawan nasional. Jauh panggang dari api kata pepatah. Dari kaum muda yang masih berusia 4 tahun ketika peristiwa terjadi,atau malah yang belum lahir itu, ketika memberikan pendapat, juga tidak punya pikiran aneh dan serong dan memang di antara para hadirin yang terdiri dari bermacam latar belakang sosial, asal usul serta pandangan politik serta agama, ternyata tidak ada seorangpun yang keblinger dan mengagumi Suharto sebagai pahlawan nasional atau bapak pembangunan. Di mata setiap orang, Suharto adalah seorang diktator fasis yang punya dosa yang tak terbilangkan besarnya terhadap bangsa Indonesia yang telah dia bikin mati, bikin bodoh, bikin sengsara, bikin keblinger seperti dia sendiri. Kalau ada orang mengira bahwa pertemuan tadi pertemuan yang hanya untuk membenarkan kesalahan PKI, pertemuan para manusia tua bangsa yang berkepala batu menganggap diri suci dan tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan dalam intern Partai, maka perkiraan yang demikian, dengan sangat sayang ,saya harus sekali lagi orang uang punya persangkaan demikian. Dan pula manusia-manusia korban G30S-65 yang dianggap sebagai "bersembunyi" di luar negeri, juga adalah anggapan yang sama sekali meleset. Ini orang-orang yang dituduh bersembunyi, malahan menuntut janji-janji Yusril yang kosong melompong itu yang pernah menjanjikan akan mengurus kepulngaan para korban G30S-65 dengan cara yang mudah dan terhormat. Tidak ada seorangpun yang bersembunyi dan semuanya legal dan ingin pulang ke tanah air mereka ,sebagai hak suci warga negara Indonesia yang telah dilanggar secara kasar oleh Suharto semasa Orba.

Semua dugaan meleset dan pikiran-pikiran serong berpihak ke Suharto dan mengutuk (pada hakekatnya) semua korban G30S-65, ternyata pikiran yang terpicil, tersisihkan dan bahkan juga adalah yang sesungguhnya keblinger, sesat jalan, putus asa secara tragis yang mungkin sudah tak mungkin diselamatkan lagi Betapapun besarnya perbedaan pendapat, bahkan di dalam keluarga sendiripun, adalah wajar, normal, di alam demokrasi atau ingin menuju masyarakat yang demokratis. Tapi bila telah menyebrang ke pihak Suharto, ke pihak musuh secara terang-terangan, blak-blakan dan sambil mencaci maki pula maka itu adalah sudah menjadi dua front yang antagonis. Di sini bukan lagi perjuangan saling meyakinkan di antara sesama kawan, tapi sudah menjadi dua front yang antagonis yang tidak mungkin didamaikan. Diskusi akan menjadi sia-sia: Keyakinanmu, keyakinanmulah! Keyakinanku keyakinankulah.

asahan audit.

\*\*\*\*\*

ali mohamad <rssidr@yahoo.com.au> wrote:  
To: sastra-pembebasan@yahoogroups.com  
CC: Kang Becak <kbecak@yahoo.com>

Date: Sun, 23 Oct 2005 10:11:07 +1000 (EST)

Subject: Re: #sastra-pembebasan# G30S/PKI (mengapa bukan gestok ?) Tragedi Nasional 1965!

Yth semua.

Engga usah..... pakai saja G30S tapi tanpa embel-embel PKI. Peristiwa itu kan bukan hanya menyangkut PKI tapi pelaku gerakannya banyak. Dan kalau dilihat awalnya bukankah itu punya kaitan dengan dewan jenderal. Diluar saling tuduh marilah sekarang kita berpikir jernih. Situasi politik 65 memang diwarnai dengan semangat anti kolonialisme, imperialisme termasuk boneka Inggris yang namanya Malaysia. Subandrio kan memunculkan dokumen Gilcrist yang didapat ketika menyerbu kedutaan Inggris beberapa waktu sebelumnya. Jangan lupa Umardani itu muncul karena peristiwa gagalnya AURI membantu peristiwa Aru. (Saat itu atas tuduhan Soedomo dan Mursid, AURI tidak berbuat sesuatu makanya Suryadarma berhenti sebagai menpangau). Padahal kelebihan Umar Dani karena soal senioritas saja. Ketika Soekarno mulai curiga pada Yani (Yani kan makin dekat pada Amerika ?). Ingat penyerbuah Riau zaman PRRI, Amerika bantu TNI AD), otomatis Umar Dani dekat dengan Soekarno, maka diangkat dia sebagai panglima mandala dalam Dwikora. Cilakanya Soeharto jadi wakilnya. Tapi Umar Dani kurang tegas ketika peristiwa G30S meletus (istilah G30S benar juga, memang gerakannya sudah mulai tanggal 30 September 1965 malam hari) seolah dia baru menyadari apa yang terjadi. Dan seolah tidak punya hubungan dengan Supardjo. Apa benar ? (baca bukunya Heru Atmodjo). Apakah Soekarno juga pura-pura tidak tahu ?. Artinya sebenarnya semuanya sudah curiga atau setengah tahu awal gerakan peristiwa G30S. Dan saatnya ya ketika munculnya isu dewan jenderal itu. Cilakanya lagi PKI terbawa kelibat. Padahal memang sudah dikonsep mau dihancurkan. (baca tulisan saya the unseen structure). Coba pikirkan kalau pakai teori counterfactual, andaikata penugasan penculikan para jenderal TNI tidak disambung dengan eksekusi, apa jadinya. Belum tentu PKI dihabisi. Bisa-bisa pemerintahan Soekarno jalan terus. Atau katakanlah kalau Soekarno nurut Soeharto mau disuruh bubarkan PKI, maka Soekarno tetap presiden. Dan tentara tidak jadi pemain

tunggal. Sebenarnya ada dua tokoh penting yang bisa ngedep agar Soeharto tidak naik. Pertama adalah Ibrahim Adjie (dia kuat) dan Umar Dani. Keduanya mestinya bisa kontak satu sama lain. Dibawah Pangti (Soekarno) dalam 24 jam kemelut Jakarta mestinya bisa beres. Bukankah Pak Martadinata juga nurut Soekarno. Kenapa jadi Soeharto yang naik ?. Dia kan pemain rangking kedua. Ini mungkin juga kurang tegasnya Soekarno, padahal gerakan Untung itu amburadul (baca bukunya Heru Atmodjo). Tap sudahlah nasi kan sudah jadi bubur. Yang penting bagaimana PKI jangan terus menerus jadi kambing hitam sampai ahir zaman. Akibatnya parah karena urusan partai sangat melekat dengan tokoh. Dan tokoh punya anak cucu. Dalam PKI setelah G30S kan juga terjadi kemelut internal (baca pembelaan Soedisman). Kita juga perlu bertanya kenapa PKI diam saja ketika G30S meletus. Apa engga bisa mengadakan pembersihan internal partai ?. Mungkin yang paling baik pakai strateginya PSI dan Masyumi, yaitu bubarkan partai sendiri.

Ini sih cuman ngomongan jalanan. Jangan diambil hati yah.....

\*\*\*\*\*

heri latief <herilatief@yahoo.com> wrote:

saya suka memperhatikan gaya penulis yg nulis puisi dari kejadian yang tela terjadi.

misalnya kang becak yg ngakunya tinggal di jepang ini punya gaya nulis puisi yg sederhana aja, gak njelimet, lumrah dan langsung nyodok ke inti masalah.

GESTOK...

tokoh besar politik indonesia di jaman 65

masuk daftar nama yang tercemar akibat bermain api terbakar tangan sendiri?

riwayat politik kita memang licik bin munafik semua orang tau, semua orang tau...siapa yang berani membunuh demokrasi musti bertanggung jawab pada kebenaran sejarah!

\*\*\*\*\*

Kang becak <kbecak@yahoo.com> wrote:

PKI,

Lembaran sejarah hitam,

Kini mulai berlubang.

Jangan bertanya siapa yang salah, Dalam Politik,

Karena tidak mungkin ada presiden yang meng kudeta dirinya sendiri.

Tabir hitam mulai terkuak, Ketika Presiden Sukarnopun di "PKI-kan".

Suharto,

Memobilisasi PKI,

Untuk menghabisi orang-orang pro Sukarno seperti Jend. A Yani dan Nasution.

Untuk kemudian ia hianati pula PKI demi kekuasaan.

Untuk kekuasaan, Ia habisi pula orang-orang yang telah membantunya menumpas

PKI Bagaimana Suharto menghabisi karier Sumitro dan Sarwo Edhi, Bahkan Ali

Murtopo, mati dalam kondisi yang tidak jelas.

Tapi mengapa orang masih saja menyebutkan sebagai G30S/PKI, Bukan Gestok,

Seperti yang telah diteriakkan Bung Karno ?

Sejarah perebutan kekuasaan, Memang sengaja diburamkan.

Seburam fungsi kekuasaan dalam kehidupan.

\*\*\*\*\*

Yth Bapak PK, eh, Buk Maria Harsono,

Apakah Ibu mau mengutuk Bapak anda sebagai pimpinan Pemuda Rakyat, yang lari terburit-burit dari satu tempat ke tempat lain untuk menyelamatkan dirinya dan meninggalkan tanggung jawab sebagai pimpinan pemuda yang merupakan onderbow PKI. Saya kira baik juga anda mengutuknya melalui milis ini. Dengan demikian, walaupun anda sembunyi di Hongkong, rakyat Indonesia mungkin mau memaafkan kejahatan anda dan anda yang meninggalkan anggota Pemuda Rakyat dicincang oleh rezim Orba fasis Soeharto. Dengan teriak-teriak, anda mau membersihkan diri dan dan bapak anda. Ah, jangan gitu dong. Jangan ekstrem kiri



lari ke ekstrem kanan, memuja pembunuh Soeharto dan mengangkatnya jadi pahlawan. Kalau demikian, nanti anda akan terus menjadi badut politik dan bunglon.

Kesawan.

=====

----- Original Message -----

From: maria harsono

To:

Sent: Saturday, October 22, 2005 5:02 PM

Subject: [HKSIS] Akankah PKI hidup kembali

Asahan yth,

terharu saya membaca surat bapak ini, sungguh keterlaluan mereka yang selalu meng-hubung2kan bapak dengan DNA. Tampaknya bapak cuman anggota biasa, bukan pimpinan, lebih2 bukan pimpinan pusat (Polit Biro).

nasional 65-66 memberi pelajaran yang sangat berharga buat rakyat Indonesia, yaitu jangan main2 dengan api revolusi, sebab akan membakar diri sendiri, dan membakar para simpatisan diri sendiri. Pada 1950, setelah berdiri RIS, ter-lebih2 setelah berdiri RI, sebetulnya revolusi Agustus 45 sudah selesai, yang belum selesai adalah pembangunan ekonomi. Tapi PKI terus menerus mengobarkan api revolusi, selalu mengatakan revolusi agustus 45 telah gagal, karena kekuasaan belum jatuh ditangan PKI. berjuang untuk merebut kekuasaan politik, artinya harus menyingkirkan oknum2 anti Komunis yg berada dalam kabinet RI. terakhir oknum2 anti Komunis ini dilukiskan sebagai 3 setan kota dan 7 setan desa, harus disingkirkan kaum kepala batu ini.

pimpinan PKI tidak sadar, bahwa tidak ada penguasa yang mau dengan sukarela turun dari panggung sejarah, turun dari panggung kekuasaan politik?

pimpinan PKI sudah lupa akan peristiwa Madiun yang dilukiskan sebagai teror putih ke-2? (keterangan: teror putih pertama adalah 1926, teror putih ke-3 adalah 1965)

1948, anggota masih sedikit, maka korbannya juga tidak banyak. Ketika 1965 anggota dan simpatisan PKI sudah meliputi jumlah 20 juta, maka tidak heran yang mati terbunuh mencapai 600 ribu bahkan ada yg bilang 3 juta.

bapak tidak mau di-hubung2kan dgn abangnya DNA, maka per-tama2, bapak harus mengutuk DNA, karena DNA main2 dgn api revolusi, akhirnya bukan saja dirinya terbakar, juga menyeret korban adik2nya Murad, Sobron dan Asahan, menyeret korban rakyat yang tidak berdosa.

me-nyalah2kan orang antiKomunis, mereka pasti akan membasmi PKI dan pengikutnya jika dianggap PKI dan pengikutnya sangat berbahaya dan mau membasmi mereka.

pasti ikut campur tangan dlaam usaha membasmi PKI, karena PKI menganggap imperialis AS adalah musuh nomersatu rakyat Indonesia.

memperhatikan, banyak sisa2 PKI di Eropa maupun di Indonesia belum sadar akan kesalahan fatal PKI, kebiasaannya cuma mengutuk Suharto dan Orba, tapi tidak berani mengutuk pimpinan Partainya sendiri, terutama Politburo CC PKI yang menjadi biangkerok G30S.

melihat bapak masih memupuri PKI, se-olah2 PKI mau menempuh jalan damai, se-olah2 PKI tidak ada persiapan untuk perjuangan bersenjata. Mengapa bapak masih terus menerus menipu generasi muda Indonesia?

SANGAT MUSTAHIL jika PKI mau menempuh jalan parlementer dan jalan damai, orang antiKomunis begitu kejamnya membantai ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI.

adalah logika yang sangat sederhana sekali, dimana ada aksi pasti ada reaksi, aksinya tambah keras, reaksinya juga tambah keras. Aksinya tambah kejam, maka reaksinya juga bertambah kejam.

ragu2 bapak bisa sadar dari kekeliruan serius ini, rupanya bapak2 ini seperti yang dilukiskan oleh Mao Tjetung, gagal, mengacau lagi, gagal lagi terus sampai musnah.

Harsono

\*\*\*\*\*

<annakarenina@quicknet.nl>

sendiri bukan mahluk politik dan saya sangat benci dengan politik. Tapi saya menyadari, sekali lahir ke dunia, maka tak terhindarkan akan terlibat dalam politik dan karenanya harus mempelajari dan ngerti politik. Partai politik adalah sarangnya para demagog dan orang-orang munafik yang korban mereka, pertama-tama adalah orang-orang yang tidak ngerti politik. Seandainya berjuta massa yang dibunuh Suharto itu, ngerti sedikit politik, tentu pembantaian tak akan sedemikian hebatnya dan pasti akan menemui perlawanan. Tapi karena buta politik oleh tidak terdidik baik akan soal-soal politik elementer, mereka jadi korban terbesar, tidak tahu apa-apa meskipun juga tidak berdosa. Karenanya rakyat Indonesia harus mendapatkan pendidikan politik, kesadaran politik agar tidak menjadi kuda tunggangan para penguasa dan budak-budak Partai politik dan ngerti politik bukan berarti harus masuk partai tertentu atau menjadi politikus (kalau memang tidak suka). Buta politik, lebih berbahaya daripada buta huruf. Pendekatan saya pada politik bukanlah sebagai hobby atau ingi njadi politikus, tapi didorong oleh kewaspadaan agar tidak terjerumus ke jurang penipuan politik dan jadi budak buta tuli dari politik. Jadi semakin saya benci terhadap politik, semakin terdorong untuk mempelajarinya. Untuk turut-turut jadi pendiri Partai politik?. Saya bukan organisator dan tidak punya bakat secuilpun untuk jadi organisator. Organisator yang baik adalah orang-orang yang selalu datang terlambat menghadiri rapat, memilih pekerjaan yang paling ringan dan paling sedikit untuk dirinya sendiri dan paling ahli membagi -bagi pekerjaan untuk orang lain hingga dia sendiri tidak kebagian pekerjaan.

kadang-kadang, politik, juga bisa memberikan inspirasi untuk dunia kepenulisan, termasuk penulisan sastra. Sastrawan yang tidak ngerti politik, tidak mungkin akan menghasilkan karya sastra yang berarti apalagi bermutu tinggi karena politik adalah bagian dari kehidupan, bagian dari pemikiran sosial dan juga bagian dari pemikiran

budaya manusia. Mungkin yang saya benci itu adalah bagian-bagian politik yang kejam dan biadab, munafik dan penuh tipu daya.

saja mau mendirikan PKI yang bagaimana tapi kalau soal nama, apakah arti sebuah nama. Partai Komunis tidak sama dengan Partai yang bukan Komunis dan ini adalah masalah hakekat, inti dari isi sebuah partai politik. Hanya rakyat yang ahir-ahirnya yang akan menentukan apakah Partai Komunis masih diperlukan atau tidak dan bukan larangan atau anjuran sekelompok orang. Kalau dia harus lahir, dia akan lahir dengan berbagai cara, tidak tergantung apakah TAP MPRS XXV 1966 dicabut atau tidak. Atau dia tidak lahir-lahir meskipun sudah dibolehkan atau dibiarkan lahir. Semua itu akan ditentukan oleh kesadaran politik bangsa Indonesia. Tapi yang jelas generasi muda sekarang ini belum sepenuhnya bebas dari trauma politik dan dari peristiwa mandi darah 65 akibat efek langsung maupun tidak langsung politik pembodohan dan pemberangusan daya kritis generasi muda. Bahkan yang dari generasi orang-orang PKI sendiripun tidak sedikit orang-orang tua yang tidak bisa jadi dewasa, sedangkan generasi yang lebih mudanya terlalu cepat menua tapi dengan sifat kekanak-kanakan dalam berpolitik. Mereka lebih banyak menggunakan perasaan sentimen pribadi daripada sikap politik yang kritis dan menggunakan metode analisis dalam menanggapi masalah-masalah politik praktis maupun teoritis. Umpamanya karena saya adalah adik dari DN.Aidit, setiap ada perbedaan pendapat, saya lalu dikutuk karena adik DN Aidit, seolah apa saja yang saya katakan sudah tak ada harganya, tidak bernilai dan diremehkan serendah rendahnya, seolah hak-hak pribadi saya sebagai manusia, pemikiran serta pendapat saya hanya cocok sebagai penghuni keranjang sampah. Semua yang bernama aidit maupun berbau aidit diasosiasikan sebagai setan sebagaimana yang telah terprogram dalam komputer Suharto dan Orba-nya. Namun saya yakin, sentimen pribadi dalam politik tidak akan menyelesaikan soal dan kita akan terus hidup dalam lautan soal-soal yang tidak bisa diselesaikan.

asahan aidit.

----- Original Message -----

: Hutagalung Bambang  
: Friday, October 21, 2005 11:22 AM  
: Re: [HKSIS] Akankah PKI hidup kembali

Maria yg budiman,

tidak akan hidup kembali. Ini dimaksudkan PKI model lama yg dilahirkan pada 1920 dan tamat riwayatnya pada 1966.

PKI yg didirikan oleh Moskow melalui agennya yg bernama Sneevleet (Partai Komunis Belanda).

yang dik Maria bilang itu, sedikitpun tak ada bau2nya PKI, mengapa sih mesti make nama PKI? kenapa nggak pake nama baru misalnya POM (Partai Orang Miskin) atau PAR (Partai Akar Rumput).

kita tidak berbeda pendapat, cuma pengemukaannya saja yg beda.

Hutagalung.

maria harsono <emhar76@yahoo.com.hk> wrote:

Pak Bambang yth,

berbeda pendapat dengan bapak dalam pasal ini.

berpendapat PKI masih ada kemungkinan hidup kembali, sebab masih ada 40-60 juta penganggur dan lapisan akar rumput yang merupakan lahan subur buat kelahiran kembali PKI.

PKI yang akan dilahirkan kembali itu, cuma namanya saja sama dgn PKI dulu, tapi segala-galanya serba baru, yg dimaksud dgn serba baru?

Partai yang akan dibangun dibimbing oleh Pancasila, yang anti perjuangan klas, anti diktatur proletariat, anti Leninisme, anti Stalinisme dan anti Maoisme.

Menggalang front persatuan se-luas2nya dengan seluruh bangsa Indonesia yang setuju dengan Pancasila, tanpa peduli asal klas, asal Ras, keyakinan agamanya dan kesukuannya. Yang terpenting adalah kekuatan yang anti revolusi dan anti revolusioner.

Memperjuangkan hak2 azasi manusia dan azas2 demokrasi dengan jalan parlementer, merebut kekuasaan politik melalui pemilu.

Yang disebut sebagai TRI PANJI PKI gaya baru, yang akan membentuk pimpinan pusat baru, yang bersih dari unsur2 pengikut Lenin, Stalin Tjetung, dan DN Aidit, kira, PKI yang semacam ini pasti disambut dengan gembira kelahirannya oleh seluruh bangsa Indonesia yang cinta damai. Golkar ABRI dan Orba pasti mau bekerja sama dengan PKI seperti ini, yang menutup kemungkinan timbulnya tragedi nasional a la 1965, sebab tak ada lagi politik revolusioner main ganyang imperialisme, ganyang feodalisme, ganyang 10 setan dan siluman. Tak ada lagi cita2 membangun masyarakat yang tidak ada sistim penghisapan manusia atas manusia lagi, cita2 utopi yang menimbulkan ketegangan sosial saling ganyang antara klas penghisap dengan klas terhisap. Kontradiksi antara majikan dengan buruh diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Bagaimana pak Asahan? Apakah ada minat untuk ikut menjadi salah seorang pendirinya?

Harsono.

\*\*\*\*\*

Bambang <bambanghutagalung1942@yahoo.co.uk>

tak mungkin hidup kembali. Tapi perlawanan rakyat melawan ketidak adilan, membasmi kemiskinan pasti akan berjalan terus, ini adalah sejarah.. Yang sudah masuk museum (PKI), cuma dijadikan bahan studi, diskusi dan perdebatan, seperti perdebatan antara Emhar versus Asahan.

Hutagalung

\*\*\*\*\*

<annakarenina@quicknet.nl> wrote:

Audit:

### AKANKAH PKI HIDUP KEMBALI

periode 1951-1965 adalah dilahirkan untuk menempuh jalan damai. Tapi ternyata kemudian ditindas dengan kekerasan oleh kekuatan-kekuatan anti Komunis dalam negeri dengan kerja sama kekuatan-kekuatan anti Komunis Internasional. PKI periode ini tidak dilahirkan untuk berontak, tidak membangun kekuatan bela diri, tidak membangun tentara sendiri dan tidak punya daeran basis bersenjata seperti umpamanya di Vietnam atau di Malaya atau Philipina. Karena itu PKI selama periode itu adalah juga musuh bebuyutan kaum Trotsky yang menuduh PKI dan bahkan seluruh Partai-Partai Komunis yang di negeri-negeri sosialis seperti Unie Sovyet, Cina, dan di negeri-negeri Sosialis di Eropah Timur sebagai Partai-Partai Komunis Stalinis yang mereka anggap telah menjadi Partai-Partai Penghianat dan agen Stalin, agen Mao dan lebih belakangan lagi sebagai agen Pablois. Menurut kaum Totsky , semua Partai Komunis dalam merebut kekuasaan haruslah berontak dalam rangka r! evolusi permanen sebagai dasar teori mereka. Revolusi tidak boleh istirahat, atau dibikin bertahap-tahap tapi harus terus-terusan berevolui dan menyalakan pemberontakan di seluruh dunia bagi mencapai kemenangan ahir secara bersama-sama. Tapi rupanya yang tidak mengikuti teori revolusi permanen ini, mereka lebih suka istirahat dan jangan terus terusan berevolusi dan berontak karena, itu bikin capek, tidak bisa relax dan juga jadinya hasil revolusi tidak bisa dinikmati di tengah jalan dan harus menunggu lama. Alasan mereka bukan sama sekali konyol dan buktinya kaum Totsky yang berteori revolusi permanen itu, tidak didengarkan orang banyak dan bahkan banyak menerima tentangan hingga teori mereka tidak laku dan tidak hanya itu, bila seorang kader dicap sebagai "Trotskys" ketika itu, kira-kira sama kerasnya sepeti di jaman Suharto, seseorang kena maki: "Dasar lu PKI"

ketika PKI dihancurkan Suharto karena dituduh memberotak untuk merebut kekuasaan negara, kaum Trotsky seperti bangun kembali dari kuburannya untuk mengutuk PKI sambil membenarkan teori mereka: Nah, itulah kalau tidak berani berontak dan mengharamkan pemberontakan, kalian dibantai sampai lumat. Sesungguhnya kaum Trotsky tidak hanya menuduh PKI adalah penghianat ,anti berontak, tapi juga membela PKI hadapan Suharto dengan bukti yang paling meyakinkan, memang PKI tidak ada pikiran untuk berontak dan lebih tahan dibantai daripada harus berontak .PKI 51-65 memang dilahirkan tidak untuk berontak dan tidak pernah ada bukti-bukti untuk itu kecuali tuduhan dan fitnah yang tidak pernah dibuktikan dan hanya dibuatkan bukti palsu dengan perencanaan panjang, teliti dengan kerja sama Internasional anti Komunis Sedunia untuk menghancurkan PKI.

PKI memilih jalan damai dan tidak mendengar nasihat kaum Trotsky agar memberontak saja. Provokasi Madiun 1948, sedikit banyak telah memperingatkan PKI, setiap pergesekan senjata dengan kaum reaksioner dalam negeri adalah cuma menghidupkan teror dan kematian untuk diri sendiri. Mengapa?. Karena PKI sudah sangat terlambat untuk mempersenjatai diri dan massa rakyat yang akan diajak memberontak.Tidak bisa meniru revolusi Cina yang dari desa-desa mengepung kota dan merebut kota-kota. Juga tidak bisa meniru revolusi Rusia dan lalu PKI

mengambil jalan tengah. Jalan damai dan lalu membikin teori-teori sendiri seperti umpamanya "Teori 2 Aspek": Pro rakyat dan anti rakyat, pada hakekatnya adalah jalan revolusi damai tanpa memegang senjata, tanpa perang, tapi mengharapkan agar "Aspek Pro Rakyat"dalam bangunan atas di kalangan musuh bisa direvolusionerkan secara damai yang akan diharapkan melancarkan revolusi damai yang berpihak! kepada PKI. Ilusi yang indah itu, bukannya sama sekali terdengar konyol atau goblok. Ada saatnya ketika PKI membesar secara spektakuler dengan jutaan anggota dan puluhan juta simpatisan dan pengaruh PKI menjalar kemana-mana bahkan hingga ke dalam intern angkatan bersenjata sekalipun. Prestasi menonjol demikian sudah pasti tidak bisa dibilang adalah hasil pemikiran orang-orang konyol dan goblok kalau tidak mau menganggap bahwa rakyat Indonesia itu sudah super goblok. Tapi kepintaran manusia, sering-sering adalah juga kebodohnya sendiri. PKI sempat menjadi Partai yang sombong dan arogan. Di saat-saat beginilah faktor subyektif yang sudah tak bisa dikekang itu, bisa membuat mala petaka, apalagi hal itu dipertontonkan dengan kurang ajarnya di depan musuh. Sedangkan musuh itu kejam dan biadab serta licik. PKI hancur binasa bersama massa pengikut atau simpatisannya dan bahkan dengan puluhan juta massa yang tidak bersalah dan tidak tahu menahu tentang PKI maupun politik. Akibat semua i! ni adalah sifat kejam dan lalim dari musuh yang bukan dilakukan oleh PKI. Besar hingga sekarang adalah, mengapa orang-orang PKI beserta massa-nya, dan juga berjuta rakyat yang dikorbankan musuh, tidak melawan, tidak memberontak untuk bela diri demi menghentikan kekejaman dan pejalagan musuh. PKI adalah partai yang tidak siap untuk dikejami atau melawan kekejaman. Salah satu sebab pokoknya adalah ilusi yang telah begitu mendalam yang menganggap jalan damai yang ditempuh PKI tidak memerlukan aksi bela diri yang dipersiapkan sebelumnya dan hanya semata menggantungkan diri pada "aspek pro rakyat" yang di kalangan musuh maupun yang sedang diajak bersahabat. Dan ketika perangkap telah mengena, penghianatan di kiri kanan, muka belakang, hanya turut mencambuk PKI yang sudah terjepit seperti tikus yang terperangkap. Ada pepatah Melayu: "Tikus melupakan perangkap, tapi perangkap tidak pernah melupakan tikus". Begitulah nasib PKI, di depan kaum reaksioner yang diajaknya berdamai dan bersahabat, ia melupakan bahwa musuh tetap saja musuh yang 24 jam menganga seperti mulut perangkap. Sang tikus masih saja terlena oleh teori "aspek pro rakyat".Dan ketika mulut perangkap mengatup, yang dianggap "aspek pro rakyat" tiba-tiba menjelma jadi aspek anti rakyat, dan hancurlah PKI.

pertanyaan yang tanpa tanda tanya sebagai judul tulisan ini: "Akankah PKI hidup kembali " yang dari satu pertanyaan menimbulkan berbagai pertanyaan lainnya seperti:

"Bisakah PKI bangun kembali"

"Perlukaah PKI dihidupkan kembali"

"Siapa yang akan menghidupkan kembali PKI"

"Bagaimana cara menghidupkan kembali PKI"

"Apa mungkin PKI kembali dihidupkan"

masih bisa dibikin pertanyaan yang bagus-bagus dan jelek-jelek lainnya.

hal, teori berevolusi memang telah ada masaalah dan bukan hanya itu, bahkan telah timbul pertanyaan apakah revolusi masih diperlukan, mengingat korban dan kegagalan yang sangat besar. "Berusaha, gagal, berusaha, gagal, berusaha lagi gagal lagi dan terus berusaha hingga mencapai kemenangan".

terlalu banyak dilakukan dan tetap gagal atau pada ahir-ahirnya toh, gagal. Tapi memang ada sesuatu yang tetap saja tak hilang-hilang di kepala manusia: melawan ketidak adilan, melawan anti kemanusiaan oleh manusia. Apakah ide demokrasi semata akan mampu memimpin perjuangan yang demikian. Kita sering mendengar: "Untuk berevolusi, harus ada teori revolusi". Dalam kenyataan, teori revolusi itu lahir oleh telah terjadinya sebuah revolusi. Tapi teori revolusi yang baru itu tidak pernah melahirkan revolusi yang baru. Tapi dengan begini bukan berarti telah terjadi satu kebuntuan, bahkan lebih terasa terlalu banyak teori yang ditawarkan tapi saling berlawanan. Apakah rakyat itu sendiri yang akan berevolusi tanpa menggunakan teori yang manapun. Mereka cuma bilang: "aku sudah tidak tahan lagi!". Dan ini jauh lebih berbahaya dari peringatan "Bahaya laten PKI" karena PKI sudah laten tidak berbahaya. Dia sudah mati.

aidit.

\*\*\*\*\*

From: Waji Waki

To: annakarenina@quicknet.nl

Cc:

Sent: Tuesday, October 25, 2005 12:13 AM

Subject: respon terhadap Akankah pki hidup kembali

Ini sebuah analisa serius yang menggugah pemikiran setiap orang dan bukan menjawab tulisan seseorang dengan celaan, makian, merendahkan orang lain dan menganggap diri sendiri yang paling hebat. Saya menghargai dan menghormati seseorang bukan dari setuju atau tidak setuju dengan pendapat orang lain, tapi menilai pemikiran dan analisisnya serta argumentasinya. Namun yang punya kebiasaan merendahkan orang lain dengan makian dan sinisme, saya juga telah terbiasa, bahkan sudah sangat terbiasa, seperti makan nasi sehari-hari. Saya sudah biasa direndahkan yang itu juga berarti saya telah turut menonjolkan dan meninggikan orang yang merendahkan saya.

hormat untuk Sdr. Wajiwaki

asahan aidit

\*\*\*\*\*

Wajiwaki:

Asahan mengajukan pertanyaan: „Akankah PKI hidup kembali“, dan dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya seperti: "Bisakah PKI bangun kembali", "Perluakah PKI dihidupkan kembali", "Siapa yang akan menghidupkan kembali PKI", "Bagaimana cara menghidupkan kembali PKI", dan Apa mungkin PKI kembali

dihidupkan" ? jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, sangat tergantung kepada siapa yang akan menjawab.

yang menganggap revolusi sosialis dapat dicapai melalui perjuangan parlementer, yang selanjutnya saya sebut sebagai kelompok pertama, seperti kelompok PKI (1951-1965) tentu akan menjawab dengan keyakinan: „ya“, PKI (1951-1965) akan hidup kembali, (1951-1965) bisa dan perlu dihidupkan kembali. Kelompok-kelompok ini akan selalu berusaha untuk menghidupkan kembali PKI (1951-1965), tentu dengan prinsip cara-cara revolusi-parlementer. Hanya saja cara revolusi-parlementer yang ditempuh bisa berbeda antara kelompok yang satu dengan yang lainnya, cara yang ditempuh kelompok-kelompok ini bisa berbeda dengan cara parlementer yang ditempuh pada masa 1951-1965 (dimana pada masa itu PKI diberi hak oleh rezim Soekarno untuk exist secara legal, sedangkan pada masa rezim orde baru dan orde reformasi sekarang ini, keberadaan PKI dilarang oleh undang-undang, yakni TAP MPRS No XXV). Walaupun diantara kelompok ini ada yang berusaha untuk mengulang cara yang lama (1951-1965), yakni dengan cara melakukan perjuangan untuk menghidupkan kembali PKI secara legal, seperti yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aktivitasnya, seperti: menuntut dicabutnya TAP MPRS No XXV, usaha-usaha melakukan rekonsiliasi dengan rezim yang berkuasa. masa orde reformasi sekarang ini, kelompok yang masih mempertahankan teori revolusi-parlementer ini, baik dalam satunya kata dengan perbuatan maupun yang berbeda antara kata dengan perbuatannya, menggunakan berbagai cara, seperti ada yang menggunakan partai (tidak menggunakan kata komunis) yang untuk mencapai tujuannya bergerak secara legal, ada juga yang menggunakan organisasi massa! sebagai alat untuk menciptakan situasi revolusioner, setelah situasi revolusioner yang dimaksud tercapai, kemudian PKI (illegal) akan mengambil alih kekuasaan.

lain, yang selanjutnya saya sebut sebagai kelompok kedua, yang berbeda dan berseberangan dengan kelompok pertama yang telah saya sebut tadi, adalah kelompok yang masih percaya kepada kebenaran teori Marx dan Lenin tentang kemutlakan revolusi bersenjata. Uni Sovyet dan semua negara komunis di Eropa Timur, begitu juga pengaruh gemerlapannya kehidupan kapitalais tidak menggoyahkan kepercayaan kelompok ini terhadap kebenarannya teori Marx dan Lenin tentang revolusi bersdenjata tersebut. Kelompok ini akan menjawab pertanyaan Bung Asahan dengan tegas: „tidak“.. PKI (1951-1965) atau PKI dengan garis parlementer ini tidak boleh hidup kembali, PKI (1951-1965) tidak perlu dihidupkan kembali. Karena PKI (1951-1965) atau PKI garis parlementer ini bukan hanya telah mengorbankan dengan sia-sia anggotanya dan rakyat Indonesia, tetapi juga telah menghambat dan menghalang-halangi proses perjalanan revolusi sosialis di Idonesia.

Dengan kelompok pertama, kelompok kedua menganggap tidak ada arti menuntut penghapusan TAP MPRS no XXV kepada penguasa, karena yang bisa menghapus TAP XXV hanya revolusi bersenjata. Berbeda dengan kelompok pertama, kelompok kedua akan menuntut pemulihan hak-hak korban 1965, apalagi meminta-minta kompensasi kepada penguasa, karena hanya melalui revolusi hak-hak dan kompensasi tersebut dapat dipulihkan. dengan kelompok pertama, kelompok kedua tidak akan meminta-minta rekonsiliasi dengan kelompok feodalis dan kapitalis birokrat kakitangan kapitalisme global, atau muka baru nekolonialis dan imperialis,



karena di dalam sejarah memang tidak pernah terjadi rekonsiliasi antara dua kekuatan yang saling bertentangan dan saling meniadakan! ini.

Kedua berbeda dengan kaum Trotskys, karena teori revolusi permanennya Trotskys bukan hanya berbeda tetapi juga bertentangan dengan teori revolusi bersenjata Marx dan Lenin. Walaupun kaum Trotskys bersebaran dengan PKI (1951-1965), bukan berarti kaum Trotskys sejajar dengan kelompok kedua, seperti halnya perbedaan kaum Trotskys dengan kelompok pertama (PKI 1951-1965) tidak dengan sendirinya dapat mensejajarkan PKI 1951-1965 dengan PK Uni Sovyet (dibawah Lenin dan Stalin) atau PKT (dibawah Mao).

Komunis yang akan dan yang perlu dibangun kembali adalah Partai Komunis yang mendasarkan kepada garis revolusi bersenjata, Partai Komunis illegal. Partai Komunis yang demikian hanya dapat dibentuk melalui praktek aksi-aksi untuk membentuk daerah-daerah basis.

25 Oktober 2005

Waki

\*\*\*\*\*

Asahan Aduit:

#### "SUHARTO'S" DALAM SEBAGIAN KELUARGA PKI DAN BEKAS-BEKAS LINGKUNGANNYA

Menjelang ahir perang Vietnam, Amerika memberlakukan secara penuh politik "Vietnamisasi Perang" dan lalu secara berangsur-angsur menarik tentaranya dari Vietnam Selatan yang diharapkan orang Vietnam membasmi orang Vietnam atau negara boneka AS yang anti Komunis membasmi negara Vietnam Utara yang Komunis. Suharto agaknya menggunakan taktik demikian. Menggunakan orang-orang Komunis (PKI) untuk ambil bagian aktif dalam menghancurkan PKI atau Komunisme di Indonesia. Bagaimana caranya? Pertama, menteror secara fisik semua anggota-anggota PKI beserta pimpimannya, simpatisannya, dan semua orang yang dicurigai atau bersangkutan paut langsung atau tidak langsung dengan PKI dan bahkan rakyat luas yang tidak punya sangkut paut dengan politik PKI. Teror raksasa itu dikenal sebagai peristiwa yang diawali G30S-65.

Bersamaan dengan teror fisik yang tak terbayangkan kejam dan berdarahnya di segi kualitas dan kuantitas, Suharto melancarkan teror mental terhadap rakyat yang di luar penjara, orang-orang PKI dalam pembuangan seperti di Pulau Buru, penjara-penjara yang tersebar di seluruh Indonesia, dan juga dengan bermacam politik pemencilan seperti politik "bersih lingkungan" yang melahirkan jutaan penganggur ekstra, politik paksaan beragama, politik reklame dengan membuat film-film horor yang menggambarkan keganasan PKI, politik memberikan cap "ET" pada kartu penduduk bagi orang-orang yang disebut ex tapol, dan bermacam-macam politik pemencilan dan peng-isolasian lainnya yang membuat semua orang yang tertuduh, tersangka, maupun yang terang-terangan anggota PKI dan keluarganya menjadi bukan main sengsaranya, bukan main menderitanya dan bukan main hinanya. Semua politik teror mental dan teror fisik itu, dimaksudkan sebagai agar orang PKI

dan semua pengikut dan simpatisannya, balik mengutuk PKI, mengutuk Komunisme, mengutuk Partainya sendiri, mengutuk keluarganya sendiri, mengutuk ayah, ibu, adik, kakak, dan semua sahabat serta handai tolannya yang pernah jadi PKI yang telah menyebabkan si PKI pengikut pernah sengsara, pernah dihukum, dibuang, atau yang sekedar selamat dan berlari dari kepungan kekuasaan Suharto dan Orde barunya.

Akibat dari politik teror besar dan pengucilan serta diskriminasi Suharto itu, semua kemarahan dan kebencian serta dendam kesumat lalu bermutasi kepada sang korban dan bukan kepada sang algojo. Dan bahkan terhadap algojo diberikan kultus individu, diangkat jadi pahlawan dan kekejamannya dianggap sebagai perbuatan suci. Kepada sang algojo yang sudah jompo, bukan saja diharapkan masih akan ada susulannya, tapi diharapkan cetak ulang, bahkan jilid-jilid selanjutnya.

Tapi sesungguhnya nasib Suharto sama saja dengan nasib PKI. Hanya sampai di situ saja. Tidak akan ada susulannya, tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Mengapa?

Karena kekejamannya sudah tercatat dan tersimpan dalam museum dunia: pelanggaran HAM yang tak terbilang kasar dan keji, koruptor milenium yang sudah jadi anekdot Internasional, diktator rekord dunia. Yang dia tinggalkan cumalah roh anti komunis, anti kemanusiaan, anti demokrasi anti HAM dan keterpurukan ekonomi negeri dan bangsanya. Politik besar Suharto yang anti PKI bukan hanya merugikan dan menyengsarakan orang-orang PKI saja tapi telah menyengsarakan seluruh bangsa, seluruh rakyat kecuali para pengikut setianya yang masih dibiarkan rakyat menikmati kekuasaan dalam waktu yang belum bisa diketahui. Sudah begitu, toh ada segelintir orang-orang dalam keluarga PKI sendiri dan sebagian kecil lingkungannya yang secara tidak tahu malu dan hina dina bersedia menyembah Suharto, sang algojanya sendiri. Inilah yang saya maksudkan dengan pasien Sindrom Suharto. Semua dendam kesumat, kemarahan serta kebencian mereka ditumpahkan kepada Partai mereka, keluarga mereka, kawan-kawan mereka bukan kepada penyebab langsung kesengsaraan mereka. Dendam sesat ini tidak lain dan tidak bukan cumalah semacam sakit jiwa akibat perburuan kejam Suharto terhadap semua kaum komunis beserta keluarganya. Gejala demikian bukanlah sama sekali asing. Bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana sejumlah anak-anak kader PKI telah memusuhi ayah mereka dan tidak mau mengakui lagi sebagai ayah atau ibunya sendiri. Karena pikiran atau jiwa yang sakit, sudah tentu tidak bisa lagi berpikir normal, nuchter apalagi kritis. Sedangkan bagi PKI sendiri, percobaannya untuk mencapai cita-cita politiknya, telah gagal total akibat kelemahan di bidang teori, kesalahan di bidang politik, kemerosotan di bidang ideologi akibat pemborjuisan jalan damai di dalam Partai. Juga PKI hanya sampai sebegitu saja. Tidak akan ada cetak ulang, tidak akan ada jilid selanjutnya. Rakyat Indonesia cuma harus menunggu lahirnya putra-putri terbaik mereka untuk bisa dijadikan teman setia dan terpercaya dalam memperjuangkan nasib mereka.

yang masih normal masih bisa diajak bertukar pikiran, berbeda pendapat bahkan bertengkar hingga tajam dan sengit. Ini keuntungan demokrasi yang bisa kita nikmati sekarang meskipun masih dalam bingkai yang masih terbatas. Seseorang menyikapi sejarah bangsanya bukanlah dengan sikap permusuhan, sikap fanatisme, sikap

kultus individu, tapi dengan sikap berani kenyataan sejarah yang telah terjadi, tapi juga bila perlu mengoreksinya kembali sampai di mana sejarah itu telah ditulis sebagai ingatan kolektif, ingatan nasion maupun ingatan Internasional. Dan juga mengenal situasi kontemporer jamannya. Abad anti komunis yang mencapai puncaknya di tahun enam puluhan, sekarang ini sudah tidak bisa dijadikan mata pencaharian seperti pada jaman itu. Dunia sudah sibuk dengan urusan lain. Amerika dan CIA sudah tidak membuang-buang waktu dan uang besar untuk keperluan ini. Mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kalau Komunisme runtuh di sebuah negara, bukan karena duit Amerika dan CIA. Mereka dapatkan semua itu dengan gratis. Jadi jangan punya banyak ilusi akan dapat upah dengan mata pencaharian semacam itu, dan akan hanya mempermalu diri sendiri, menghina diri sendiri, merendahkan diri sendiri di hadapan bangsa dan keluarga. Tapi itu tidak berarti kita tidak waspada pada sisa-sisa kekuatan anti Komunis, anti demokrasi dan anti HAM di dalam negeri. Gudang penguasa masih belum terkunci mati dan bisa dibuka setiap saat bila mereka anggap perlu. Tapi juga mereka harus memperhitungkan bahwa rakyat yang mereka tinds, juga punya pengalaman-pengalamannya sendiri di masa lalu. Pepatah mengatakan: " Seorang kakek tidak akan kehilangan tongkat untuk kedua kali". Dan juga perlu, tongkat itu bisa dijadikan macam-macam untuk melawan.

asahan audit.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

*Komentar :*

Yap Hong Gie <ouwehoer@centrin.net.id> wrote:

**Fakta-fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI)**

Pembelaan Nyono dimuka Mahmilub pada tanggal 19 Februari 1966.

Di publikasikan pada situs Indo-Marxis, situs kaum Marxis Indonesia, 16 Februari 2002.

Dalam amanat Presiden Sukarno dihadapan wakil-wakil partai politik di Guesthouse Istana, Jakarta, tanggal 27 Okt 1965, ditegaskan bahwa kejadian September bukan sekedar kejadian 30 September, tetapi adalah suatu kejadian didalam Revolusi kita.

Saya sudah kemukakan bahwa prolog daripada G30S adalah adanya rencana kudeta dewan jenderal. Dalam bahasa sehari-hari, gara-gara ada Dewan Jenderal maka ada Dewan Revolusi. Saya telah kemukakan bahwa prakteknya Dewan Jenderal merupakan golongan politik tersendiri. Disini perlu saya tegaskan, karena tidak semua Jenderal masuk dalam Dewan Jenderal, maka Dewan Jenderal adalah golongan politik tersendiri dari Jenderal-Jenderal tertentu yang menjalankan politik Nasakom-phobi, khususnya Komunisto-phobi, hal mana adalah bertentangan dengan politik Presiden Sukarno.

Kegiatan anti komunis tersebut adalah langsung bertentangan dengan politik Presiden yang justeru kurang lebih dua minggu sebelumnya, berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali

lagi menandakan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan".

Jelaslah bahwa menentang Dwan Jenderal pada hakekatnya adalah menentang Jenderal tertentu yang menjadi kapitalis birokras, yang dalam prakteknya bersifat memusuhi Nasakom dan sokoguru-sokoguru Revolusi.

Saya lebih yakin lagi akan adanya Dewan Jenderal setelah saya mendapatkan bahan-bahan masa epilog dari G30S masa epilog merupakan masa "openbaring" atau masa terbukanya wajah politik yang sesungguhnya daripada Dewan Jenderal. Dari koran-koran dapat diketahui bahwa Jenderal AH. Nasution muncul terang-terangan dengan kampanye anti komunisnya. Sesungguhnya Presiden Sukarno tiada jemu-jemunya memberikan indoktrinasi tentang mutlaknya Nasakom bagi penyelesaian Indonesia. Saya mengakui bahwa saya telah melakukan serentetan kegiatan membantu G30S, jelaslah bahwa G30S bukanlah suatu pemberontakan, tetapi suatu gerakan pembersihan. Bagaimana keterangan yuridisnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya.

Kesimpulan:

PKI berada dibalik G30S, dengan dalih membela presiden Soekarno, secara pribadi maupun untuk mengamankan "REVOLUSI" yang sedang dijalankan Presiden Soekarno. Peristiwa G30S merupakan puncak dari aksi revolusi atau kudeta PKI di Indonesia, yang sebelumnya sudah didahului dengan berbagai aksi kekerasan (pembunuhan) terhadap warga masyarakat diberbagai wilayah Indonesia, yang keberadaan komunis (PKI).

Cuplikan Pengakuan Dr. Soebandrio Tentang Tragedi Nasional 30 September.

Saat G30S meletus saya tidak berada di Jakarta, saya melaksanakan tugas keliling daerah yang disebut turba (turun kebawah). Pada tanggal 28 sept 1965 saya berangkat ke Medan, Sumatera Utara. Beberapa waktu sebelumnya saya keliling ke Jawa Timur dan Indonesia Timur.

Pada tanggal 29 Oktober 1965 pagi hari, Panglima AU Omar Dhani melaporkan kepada Presiden Soekarno tentang banyaknya pasukan yang datang dari daerah ke Jakarta. Beberapa waktu sebelumnya saya melaporkan kepada Bung Karno adanya sekelompok Dewan Jenderal -termasuk bocoran dewan Jenderal membentuk kabinet.

Menurut Serma Bungoes (Komandan Peleton Kompi C Bataliyon Kawal Kehormatan) yang memimpin prajurit penjemputan Mayjen MT Haryono, di militer tidak ada perintah culik, yang ada adalah tangkap dan hancurkan. Perintah yang saya terima dari Komandan Resimen Cakrabirawa Tawur dan Komandan Bataliyon Untung tangkap para jenderal itu, kata Bungoes setelah ia bebas dari hukuman. Namun MT Haryono terpaksa dibunuh sebab rombongan pasukan tidak diperkenankan masuk rumah oleh isteri MT Haryono, sang istri curiga suami dipanggil Presiden kok dinihari. Karena itu pintu rumah itu didobrak dan MT Haryono tertembak tidak jelas apakah Haryono Pondok Gede (lubang buaya).

Ada masa dimana Indonesia lowong kepemimpinan sejak awal oktober 1965 sampai Maret 1966 atau sekitar enam bulan. Bung Karno masih sebagai Presiden, tapi sudah tidak punya kuasa lagi Bung Karno pada tenggang waktu itu belum benar-benar sampai ajal politik. Beliau masih punya pengaruh, baik di Angkatan Bersenjata maupun dikalangan parpol-parpol besar dan kecil. Para pemimpin parpol umumnya mendukung Angkatan Darat untuk membasmi PKI, namun mereka juga mendukung Bung Karno yang mencoba memulihkan wibawa. Walaupun Bung Karno akrab dengan PKI.

Lantas..mahasiswa melanjutkan demo turun kejalan..satu-satunya tuntutan mahasiswa yang murni menurut saya adalah bubarkan PKI Setelah ditangkap saya langsung ditahan, saya diadili di Mahkamah Militer Luar Biasa dengan tuduhan subversi dan dijatuhi hukuman mati. Jelas saya sangat terpukul saat itu. dari posisi orang nomor dua di Republik ini saya mendadak sontak diadili sebagai penjahat dan dihukum mati. Saya menjalani awal dipenjara Cimahi Bandung. Disana berkumpul orang-orang yang senasib dengan saya (dituduh sebagai penjahat yang terlibat G30S) diantaranya adalah Kolonel Untung yang memang Komandan G30S. kalau Aidit mendukung pembunuhan anggota Dewan Jenderal, memang ya dalam suatu saya dengar Aidit mendukung gerakan pembunuhan anggota jenderal yang dikabarkan akan melakukan kudeta terhadap Presiden, sebab kalau sampai Presiden terguling oleh kelompok militer, maka selanjutnya bakal sulit.

Kesimpulan:

PKI berada dibalik peristiwa G30S, buktinya kesaksian Menlu Subandrio yang sekaligus kepala BPI (Badan Pusat Intelijen) mengatakan bahwa Aidit dan Untung terlibat dalam aksi G30S, dimana kedua orang tersebut adalah tokoh-tokoh PKI. Tetap dengan dalih yang sama, seperti pengakuan Nyono, bahwa ada Dewan Jenderal yang berniat menggulingkan kepemimpinan presiden Soekarno.Namun kalau Nyono jelas mengatakan bahwa PKI yang membasmi Dewan Jenderal demi alasannya.

Mewaspadai Kuda Troya Komunisme Di Era Reformasi. (Drs. Markonina Hatisekar dan Drs. Akrin Ijani Abadi, Pustaka sarana kajian Jakarta Brat, cetakan ke 3 maret 2001, hal 116-118) Kegagalan G30S/PKI merupakan pukulan yang paling telak bagi sejarah perjuangan kaum komunis di Indonesia. Kehancuran kekuatan militer G30S/ PKI Kabur. DN Aidit lari ke Jawa Tengah, Sjam, Pono dan Brigjen Suparjo mundur kebasis camp didaerah perkebunan Pondok Gede. Pada tanggal 3 Oktober 1965, Sjam dan Pono menghadap Sudisman untuk memberikan keterangan tentang gagalnya PKI di Kayu Awet, Rawamangun, Jakarta. Setelah mendengar laporan tersebut, Sudisman memerintahkan Pono untuk pergi ke Jawa Tengah untuk melaporkan situasi terakhir di Jakarta kepada DN Aidit.

Pada hari yang sama, DN Aidit di Jawa Tengah telah memerintahkan Pono kembali ke Jakarta membawa instruksi lisan kepada Sudisman dan sepucuk surat kepada Presiden Soekarno. Instruksi kepada Sudisman adalah agar anggota-anggota CC PKI yang masih ada di Jakarta melakukan upaya penyelamatan partai dan Nyono dapat mewakili DN. Aidit menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada tanggal 8 Oktober 1965. Aidit beralasan, dirinya tidak dapat menghadiri sidang itu karena tidak adanya transportasi ke Bogor dari Jawa Tengah.

Dalam Sidang Paripurna di Bogor tanggal 8 Oktober 1965, Nyono membacakan teks yang intinya menyebutkan bahwa bahwa PKI sama sekali tidak terlibat dalam apa yang disebut gerakan 30 September 1965. Secara rahasia, beberapa pentolan PKI juga mengadakan rapat yang membahas serangkaian peristiwa terakhir setelah serangkaian G30S PKI dan melakukan konsolidasi partai. Pada tanggal 12 Oktober 1965, di rumah Dargo, tokoh PKI Solo, dilakukan rapat gelap antara DN Aidit, Pono dan Munir (anggota PKI yang baru tiba dari Jawa Timur). Dalam rapat itu dikatakan bahwa kegagalan gerakan 30 Sept akan membuka kedok keterlibatan PKI. Keberadaan PKI untuk melakukan perjuangan secara parlementer sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Munir melakukan usulan untuk dilakukan gerakan bersenjata, usulan Munir pada prinsipnya disetujui oleh peserta rapat. Aidit menugaskan Ponjo untuk meneliti daerah mana saja yang memungkinkan untuk dijadikan basis PKI guna melaksanakan perjuangan bersenjata, daerah yang diusulkan untuk ditinjau adalah: Merapi, Merbabu serta Kabupaten Boyolali, Semarang dan Klaten.

Belum lagi kegiatan itu direalisasikan, gerakan pasukan RPKAD telah memasuki kota Solo. Walau PKI berusaha melawan, namun pada operasi pembersihan yang dilakukan RPKAD di Boyolali, DN Aidit terbunuh. Kejadian demi kejadian berlangsung dengan amat cepat. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada PKI. Rakyat bersama-sama dengan mahasiswa dan militer yang masih setia pada konstitusi negara merapatkan barisan dan bergabung dalam satu front melawan PKI. Pada akhirnya legalisasi PKI sudah tidak mampu dipertahankan oleh pengikutnya. Lewat ketetapan MPRS-RI. NO.XXV/MPRS/1966, PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Bukan itu saja, lewat ketetapan yang sama, paham Komunis dan Marxis-Leninisme dinyatakan haram berada di negara Indonesia.

Aksi G30S/PKI Awal Dari Pelanggaran HAM.

Peristiwa penyiksaan dan pembunuhan sembilan Jenderal pada 1 Oktober 1965 oleh pasukan Cakrabirawa yang menjadi bagian dari pasukan komunis Indonesia (PKI) dan dikenal sebagai Gerakan 30 September adalah tanggal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. "Orang sekarang bicara pelanggaran HAM, sesungguhnya titik awal dari pelanggaran HAM adalah penyiksaan para jenderal. Itu apa yang kami rasakan, kata putra pahlawan revolusi Mayjen Anumerta Sutjiyo, Agus Wijoyo, di Jakarta, Senin (23/9). Pernyataan Wakil Ketua MPR itu disampaikan saat penjelasan pers rencana peluncuran buku bertajuk kunang-kunang kebenaran dilangit malam setebal 250 halaman pada tanggal 30 September nanti.

Buku tersebut berisi penuturan anak-anak dan keluarga Pahlawan Revolusi tentang kejadian yang disaksikan dan dialami 1 Oktober ini hari. Penuturan itu terdiri dari keluarga Jenderal Ahmad Yani, Letjen Purnawirawan Soeprapto, Letjen Anumerta S. Parman, Mayjen Anumerta D.I. Penjaitan, Mayjen Anumerta Soetojo Siswomiharjo, Lettu CZI Anumerta Piere Tendean dan Keluarga AH. Nasution.

Mengeluh

Katerin Penjaitan mengeluh, dirinya orang tua yang bisa dihargai pengorbanannya, belakangan mereka seolah-olah dikaburkan, "saya tidak terima. Saya tahu peristiwa itu, karena bukan anak kecil lagi, waktu itu usia saya 17 tahun" katanya. Menurutny

orang tuanya mati secara sadis. "Kita sakit mengingat peristiwa itu, komunis memang sadis," katanya dengan terbata-bata.

Sedangkan Amelia Yani menyayangkan, para tahanan politik yang keluar dari penjara, enak sekali bicara bagaimana membunuh para jenderal. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya putra-putri yang ditinggalkan.

Ia membantah para pasukan Cakrabirawa yang tergabung dalam PKI tidak melakukan penyiksaan, orang tua kita diseret, ditembak, mereka bilang seenaknya, itu bukan penyiksaan tandasnya.

Amelia menyatakan siapa lagi yang mau membela para Pahlawan Revolusi kalau bukan anak-anaknya "Kita tidak pakai bedil, hanya pakai pena, kita menyatakan kudeta, penyiksaan itu terjadi jangan terulang kembali.

Putra D.I. Penjaitan mengatakan hal senada, bahwa pasukan PKI sadis, sebagai gambaran, selongsong peluru mencapai 360 biji yang ditemukan diarea pekarangan rumah seluas 800 meter pada peristiwa penculikan dan penembakan ayahandanya, 1 Oktober 1965, sekitar pukul 03.00-04.00 WIB, selain orang tuanya keponakan ayahnya, Albert Naibab ikut meninggal ditembak dan Viktor Naibab cacat seumur hidup.

### Kunang-kunang

Putri Suprpto, Nani Indah Sutojo menyatakan peristiwa yang diangkat tidak berkonotasi politik. Harapannya dengan mengemukakan pengalaman, mata rantai kekerasan sejarah harus diputus, dibangun mata rantai baru dengan situasi yang damai dan harmonis. Ia menyadari, rekonstruksi peristiwa G30S/PKI berdasarkan pengalaman keluarga Pahlawan Revolusi bukan kesimpulan sejarah, sebab sejarah punya pendekatan, metode aliran tersendiri yang tidak mati, bisa mengungkap hal baru. "Itu milik akademisi. Tapi kebenaran yang kami sampaikan adalah realitas bersama. Kunang-kunang sebagai judul buku bisa jadi dalam kegelapan ada cahaya baru yang mungkin redup, diganti dengan sejarah lain," tuturnya. "Kami tidak bermaksud tetap pada tataran penderitaan, iba, belas kasihan, kami inginkan munculnya harapan baru pada tingkat kearifan sesuai kemampuan yang bisa kami sampaikan, tambahnnya"

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

### Pelajaran dari G30S

40 tahun yl., kecuali dalang dan beberapa pelaku utama G30S, bisa dikatakan seluruh rakyat di dunia tak terkecuali juga rakyat Indonesia sendiri tetap dirundung tanda-tanya besar, apa sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada subuh-pagi 1 Oktober 1965, itu? Ya, sampai hari ini, setelah lewat 40 tahun, tetap saja banyak masalah belum terungkap jelas, siapa dalang G30S sesungguhnya? Mengapa Dewan Revolusi yang bertujuan melindungi Presiden Soekarno, justru dituduh makar merebut kekuasaan Presiden Soekarno? Dimana peranan jenderal Soeharto dalam G30S sesungguhnya? Mengapa jenderal Soeharto tidak dimasukkan dalam daftar jenderal-kanan yang harus diculik, bahkan sebaliknya adalah jenderal yang dilaporkan rencana G30S? Dan, mengapa jenderal Soeharto setelah mengetahui rencana

penangkapan beberapa jenderal atasannya, tidak segera melaporkan pada jenderal Yani, tapi membiarkan atau merestui penangkapan itu berlangsung? Mengapa penangkapan atas ke-7 jenderal-jenderal itu yang semula untuk dihadapkan pada Presiden Soekarno, berubah menjadi dibunuh di-Lubang-buaya? Siapa yang memberi komando membunuh dan apa maksudnya? Mengapa bisa terjadi pasukan-pasukan yang digunakan melancarkan G30S pada subuh pagi itu, justru adalah pasukan yang resmi didatangkan ke Jakarta oleh jenderal Soeharto sendiri dan kemudian pasukan itulah yang digunakan untuk menumpas apa yang dinamakan G30S di Halim? Mengapa jenderal Soeharto untuk naik takhta kepresidenan, dengan menyerukan pemurnian Pancasila, yang ber-Tuhan dan ber-Prikemanusiaan itu justru adalah jenderal yang melancarkan pembunuhan atas tokoh-tokoh-utama PKI dan pembantaian atas jutaan rakyat tak-berdosa? Dan, ... mengapa tangan besi kekerasan yang boleh membunuh umat manusia tanpa melalui proses HUKUM tidak juga berhenti setelah membasmi habis komunis di Indonesia, tapi tetap saja berlangsung dengan peristiwa MALARI, peristiwa Tanjung-periok, Petrus, penghilangan tokoh-tokoh gerakan pemuda, sampai pada pembunuhan Munir akhir-akhir ini? Inilah serentetan pertanyaan-pertanyaan dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang belum terjawab dengan baik.

yang kita hadapi, masih begitu banyak masalah G30S belum terungkap bagaimana kenyataan sesungguhnya, kedua belah pihak yang bertarung, masing-masing mengajukan argumentasi dengan "fakta-fakta" yang mungkin memperkuat pendirian dan pendapatnya. Jadi, dalam waktu dekat ini mengharapakan satu kesimpulan yang bisa diterima semua pihak tentu sulit, bahkan masih sangat sulit. Kita hanya bisa mengharapakan pemuda-pemudi pekerja sejarah bangsa kita bisa bekerja lebih keras lagi, menggali fakta-fakta kejadian 40 tahun yang lalu, berusaha membuat satu kesimpulan yang lebih mendekati kenyataan sesungguhnya yang terjadi. Bersungguh-sungguh menghilangkan segala manipulasi fakta, pemelintiran dan pemalsuan sejarah selama penguasa Orba lebih 32 tahun yang dipatok sebagai "kebenaran" tunggal. Inilah tantangan berat yang jatuh dipundak pemuda-pemudi bangsa yang besar ini. Dan, ... sebelum mencapai kesimpulan yang bisa diterima semua pihak itu, hendaknya dari pihak-pihak kekuatan yang bertarung selama ini, bisa menyatukan kesepakatan pelajaran dari peristiwa-peristiwa kekerasan yang terjadi itu, terutama G30S, agar tidak lagi terulang kesalahan-kesalahan yang lalu, agar tidak lagi berjatuh korban pada rakyat yang tidak berdosa. Mudah-mudahan bisa dan berhasil.

banyaknya korban telah berjatuh di kedua belah pihak yang bertarung, baik korban dari kekuatan-kekuatan yang sadar untuk bertarung dan harus diakui, korban terbesar justru jutaan rakyat tak berdosa yang tidak tahu apa-apa. Bagi seorang yang bertanggungjawab atas tindakannya, tentu korban yang tak perlu terjadi demikian ini harus dielakkan. Baik kita perhatikan sejak peristiwa Madiun '48, PRRI/PERMESTA, DI-TII, G30S, MALARI, Tanjung-Periok, serentetan kerusuhan berbau SARA, dari kerusuhan Mei '63, Situbondo, Ujung Pandang, sampai Tragedi Mei'98, dari perselisihan agama di Ambon, Poso dampai pertarungan suku di Kalimantan, peledakan bom-bom terrorist, dari Bom Bali beberapa tahun yl, bom mariot sampai bom Kuta-Bali kemarin ini, dst., ... Hendaknya bangsa Indonesia sudah bisa merenungkan pelajaran-pelajaran yang harus ditarik, bisa disimpulkan baik-baik,



agar tidak lagi terjadi kekerasan, perbuatan-perbuatan brutal yang membuat korban-korban berjatuhan terutama orang-orang yang tak berdosa, dan jelas terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan demikian ini hanyalah merusak marta-bat bangsa dimata dunia, merupakan gores-hitam dalam sejarah Indonesia!

HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Disatu pihak, aparat HUKUM harus berkemampuan menindak pelanggar HUKUM, dengan tidak mempedulikan betapa tinggi posisi seseorang dipeemerintahan, karena setiap warga sama derajat didepan HUKUM; dipihak lain, setiap warga, setiap kelompok, setiap parpol yang ada juga bersikap menjunjung tinggi dan mentaati HUKUM yang berlaku. Tidak memaksakan kehendak sendiri, apalagi melakukan kekerasan untuk menuntut orang lain menerima keyakinan yang dianggap paling benar, baik berupa penyiksaan, maupun pembunuhan diluar HUKUM. Inilah pelajaran yang sangat penting harus kita tarik dari peristiwa-peristiwa kekerasan berdarah yang telah menggores-hitam sejarah Indonesia itu, agar tidak terulang kembali!

Adalah satu kenyataan yang tak dapat disangkal, bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi selama ini, pihak aparat HUKUM tidak menunjukkan kemampuannya untuk menjerat dalang & pelaku-utama dan berhasil menjatuhkan hukuman secara tepat dan adil. Pembunuhan atas jenderal-jenderal tanpa proses pengadilan 40 tahun yl. adalah salah, kesalahan serius yang harus dikutuk! Dalang dan pelaku-utama harus dijerat HUKUM. Tapi langkah berikut yang lebih parah dan kejam adalah kesalahan yang lebih serius lagi yang lebih-lebih harus dikutuk! Tidak saja melakukan pembunuhan atas tokoh-tokoh utama PKI saja yang juga dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, tapi dilanjutkan dengan pembantaian atas jutaan rakyat tak berdosa yang juga dilakukan diluar HUKUM! Dan kenyataan orang yang paling bertanggungjawab, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM! Penguasa yang melancarkan penangkapan ratusan ribu orang tak berdosa selama belasan tahun, yang dilakukan tanpa proses HUKUM dan memperlakukan dosa-warisan, dimana jutaan keluarga-anak-anak tapol harus menanggung "dosa", adalah juga bentuk penyiksaan keji yang menginjak-injak HAM. Dan penanggung jawab kejauidian-kejadian kejam demikian ini, sampai sekarang tidak tergugat HUKUM.

-pelanggaran HUKUM, main menghakimi sendiri, bunuh-membunuh tanpa proses pengadilan dilakukan kekuatan-kekuatan yang bertarung telah terjadi dan, ... menjadi sesuatu yang wajar saja di Indonesia. Bahkan dalam masalah-masalah kerusuhan yang berbau SARA yang mengorbankan sekelompok warga etnis Tionghoa, yang nampak hanya saling tuding-menuding tanpa ada ujungnya. "Dalam kasus kerusuhan di Tasikmalaya dan Situbondo, pada Desember 1996, misalnya, Pangab Jenderal Feisal Tanjung, pagi-pagi sudah menuding otak pemicu kerusuhan itu kelompok ekstrem kanan. Tudingan itu segera mengisyaratkan pada ormas Nahdlatul Ulama (NU), yang kebetulan di Tasikmalaya dan Situbondo sangat kuat. Lucunya, pihak NU sendiri justru menuding pihak di luar NU yang mendalangi kerusuhan tersebut, yakni para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Bahkan, tokoh HMI, Eggy Sudjana, dikabarkan ikut mengompori suasana. Namun, bekas Ketua Umum HMI periode 1986-1988 itu segera membantah tudingan tersebut. Dan, Eggy menyesealkan kecenderungan tuding-menuding adanya "pihak ketiga" dalam kerusuhan Tasikmalaya itu." (Lihat, Forum Keadilan 19 August 1998)

yakin, tanpa adanya ketegasan dan kemampuan aparat HUKUM untuk menjerat siapa saja yang melanggar HUKUM dinegeri ini, maka negeri ini akan tetap saja amburadul, dan, ... rakyat jelata selalu menjadi korban, berkorban tanpa berkesudahan. Bagi pejabat-pejabat tinggi pelanggar hukum, yang menginjak-injak HAM, yang korupsi tetap saja bergentayangan hidup bermewah-mewah diluar HUKUM. Lalu, pihak oposisi melihat kenyataan demikian ini, juga akan melakukan perlawanan diluar hukum, bertindak memaksakan politik dan pemikirannya yang dianggap paling benar itu dengan kekerasan. Oleh karena itu, masalah utama dan lebih dahulu diupayakan pemerintah adalah penegakkan HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Berlakukan dan konsekwenlah melaksanakan HUKUM, tak seorangpun, betapapun tinggi jabatannya boleh kebal HUKUM, dikecualikan. Didepan HUKUM, setiap orang sama derajat.

Kedua, seiring dengan meningkatnya kesadaran budaya, martabat manusia, baik dengan ber-Tuhan maupun ber-Prikemanusiaan, hendaknya bisa memperlakukan setiap umat manusia yang perlu dihormati, disayangi dan tidak boleh menganiaya bahkan membunuh semanya sendiri. Jadi, siapapun harus mencapai kesadaran bisa memperlakukan setiap manusia sebagai umat manusia yang harus dihormati, disayangi, apapun ras, etnis, agama, politik dan ideologi yang ada. Inilah kiranya arah perkembangan budaya dan martabat manusia yang lebih tinggi, baik yang ber-Tuhan maupun kaum komunis yang dikatakan kafir atau atheis dan orang-orang tidak ber-Tuhan umumnya.

setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, adalah satu sikap tidak bisa menghormati pendapat beda, terutama beda politik dan ideologi. Melupakan budaya manusia yang agung, Prikemanusiaan. Dianggapnya orang yang beda politik dan ideologi, sebagai musuh yang harus dimusnahkan dari bumi ini. Menjadi kontradiksi antagonis yang tak terdamaikan, menjadi "Kita yang membunuh mereka atau mereka yang membunuh kami.". Terjadilah bunuh membunuh tanpa berkesudahan. Benarkah keadaan demikian diteruskan berlanjut?

perkembangan masyarakat ribuan tahun itu, nampak begitulah yang terjadi. Dari masyarakat perbudakan, masyarakat feodal dan masyarakat kapitalis sekarang ini, kontradiksi tak terdamaikan antara budak dengan tuan-budak, tani dengan tuan-tanah, buruh dan kapitalis terjadi kontraddiksi antagonis yang tak terdamaikan, tidak mereka yang mati, kami yang mati. Tidak lagi ada syarat hidup berdampingan secara damai. Tapi, seiring dengan peningkatan budaya dan martabat manusia yang bisa saling menghormati dan menyayangi sesama umat manusia, dan dengan satu sistim-masyarakat yang baik, kontrgradiksi yang antagonis itu seharusnya bisa didamaikan, seharusnya bisa diselesaikan secara damai-damai. Dengan kesadaran ini, kita semua harus berjuang kearah itu, DAMAI dan PERDAMAIAN! Apapun masalahnya, pertentangan yang terjadi harus diselesaikan secara HUKUM, menggunakan HUKUM yang berlaku adil! Dan sesuai dengan gerak perkembangan masyarakat, seandainya HUKUM yang berlaku itu dirasakan ada kekurangan atau tidak adil, tentu perlu dan bisa direvisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Suatu kehidupan bermasyarakat harmonis didalam jalur HUKUM yang berlaku.

komunis, sekalipun mereka tidak ber-Tuhan, tapi yang mengaku bertujuan membebaskan seluruh umat manusia dari penindasan dan penghisapan, seharusnya juga

adalah kelompok yang menjunjung tinggi Prikemanusiaan, yang bisa menghormati dan menyanyangi setiap umat-manusia sebagai manusia. Saya yakin, seandainya ada peristiwa kekejaman dilakukan oleh pihak yang menamakan dirinya komunis, ini hanyalah satu kesalahan yang juga harus dikutuk oleh kaum komunis! Begitulah kalau kita perhatikan betul bagaimana sikap Mao Tse-tung, ketua Partai Komunis Tiongkok itu terhadap musuh-musuh politiknya, terhadap tawanan perang, dimana beliau menuntut mereka diperlakukan sebagai manusia dan dihormati sebagai manusia. Pada saat susah kekurangan bahan makanan, harus tetap menjamin tawanan bisa diberi cukup makan! Inilah sikap yang benar dari kaum komunis. Mao Tse-tung bersikap tetap menghormati dan menyanyangi sesama manusia terhadap lawan politik dan tawanan perang, agar tidak terjadi balas-berbalas dendam, usaha menghentikan berbalas dendam yang tidak berkesudahan itu.

, dalam praktek kehidupan bermasyarakat, kita tetap saja bisa melihat kesalahan-kesalahan, kekejaman yang terjadi dilakukan pihak komunis. Misalnya, penindasan terhadap gerakan mahasiswa yang kemudian dikenal dengan peristiwa Tiananmen '89 itu. Betapapun sengit perjuangan terjadi di Tiongkok ketika itu, saya yakin seharusnya masih ada cara yang lebih baik untuk mendapatkan penyelesaian. Menggusur para demonstiran dari Tiananmen yang sudah berkepanjangan sampai lebih sebulan itu harus dilaksanakan, tapi seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih bijaksana. Pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan Polpot di Kamboja, adalah juga merupakan kekejaman dan kesalahan dari pihak komunis yang harus dikutuk.

Seharusnya jujur melihat kenyataan yang terjadi dan berkembang di Tiongkok daratan 20 tahun terakhir ini, dimana sikap partai Komunis Tiongkok dalam memperlakukan kapitalis dan bisa memberikan demokrasi lebih besar pada warganya. Bahkan, kapitalis yang dinyatakan sebagai elemen maju tenaga-produksi, yang aktif ikut meningkatkan kemajuan dan kemakmuran masyarakat, bisa diterima sebagai anggota Partai Komunis Tiongkok. Perubahan sikap yang cukup positif dari komunis, yang menunjukkan bahwa kontradiksi antara buruh dan kapitalis, tidak selalu harus antagonis yang tak terdamaikan. Dinegara industri maju, dimana kapitalis telah tumbuh besar menjadi kapitalis monopoli negara, kontradiksi antara kapitalis dan buruh juga tidak antagonis, segalanya masih bisa diselesaikan secara damai sesuai dengan hukum perburuhan yang berlaku dinegeri itu. Dinegeri-negeri terbelakang, sebagaimana di Tiongkok dimana kapitalis masih lemah, sangat membutuhkan kapitalis untuk berkembang lebih maju, kontradiksi antara buruh dan kapitalis justru harus diselesaikan secara damai, memnyelsaikan dengan HUKUM, peraturan perburuhan yang berlaku.

Seandainya Gestapu/PKI yang menang apakah akan terjadi pembunuhan dan korban yang lebih dahsyat lagi terhadap yang anti-komunis? Merupakan pertanyaan yang tidak pada tempatnya, pertama pertanyaan demkian ini berarti sudah secara pasti menetapkan PKI sebagai dalang G30S, dan kedua, pertanyaan demikian ini diatas dasar "kalau tidak kami yang membunuh mereka, mereka yang membunuh kami", dan ketiga, pertanyaan ini berprasangka komunis yang tidak ber-Tuhan itu kejam, jadi kalau menang juga akan main babat dan membantai semua yang anti-komunis. Tapi, saya masih yakin, seandainya tokoh PKI ketika itu yang berkuasa benar seorang komunis yang bertujuan membebaskan umat manusia dari segala

penindasan dan penghisapan, maka PKI akan menjunjung tinggi PRIKEMANUSIA-AN yang akan menghormati dan menyanyangi sesama umat manusia sebagai manusia. Dan dengan demikian korban yang berjatuh pasti jauh lebih sedikit, cukup mengadili dan menangkap tokoh-tokoh utama, sebagaimana yang bisa kita lihat sikap mantan Presiden Soekarno ketika membubarkan PSI-Masyumi dan menumpas PRRI-PERMESTA dan DI-TII.

Yang dinamakan "perang dingin" yang berlangsung hangat ditahun-tahun 50-an sampai 80-an, antara blok Sovyet-Uni dan blok Amerika Serikat, sekarang bisa dikatakan telah berakhir dengan bubarinya Uni-Sovyet dan negara-negara Eropah-timur. Tidak ada lagi pertarungan sengit antara blok kiri dan blok kanan, keadaan telah berubah dan beralih menjadi kontradiksi antara Amerika Serikat sebagai polisi dunia dengan Islam radikal-ekstrimis terutama di beberapa negeri Timur-tengah. Dari pengalaman "perang-dingin" dimana Indonesia akhirnya secara sepihak ngeblok-kiri, nampaknya tidak menguntungkan bagi Indonesia, akan lebih bijaksana kalau Indonesia yang lemah itu justru mengambil keuntungan dari pertarungan 2 raksasa negara super-power. Yang pasti tidak ngeblok ke satu pihak. Begitu juga dengan peralihan pertarungan menjadi blok Amerika dan blok Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok kesatu pihak. Disatupihak, sekalipun mayoritas rakyat beragama Islam, hendaknya Indonesia tidak ngeblok pada Islam radikal-ekstrimis, sebaliknya juga harus dengan tegas melawan teroris, dipihak lain juga tidak ngeblok pada AS dalam melawan Islam-radikal. Begitu Indonesia ngeblok pada pihak AS, Islam radikal akan lebih merajalela menggunakan sementara kekuatan Islam di Indonesia untuk menjalankan terror.

Sementara G30S masih begitu banyak masalah yang misterius, belum terjawab bagaimana sesungguhnya yang terjadi, hendaknya kekuatan-kekuatan yang bertarung bisa membuat kesepakatan pelajaran yang ditarik, agar tidak terjadi korban-korban tidak berdosa bergelimpangan lagi. Semua pihak hidup berdampingan secara damai, berkompetisi membangun masyarakat adil dan makmur. Mudah-mudahan impian indah ini bisa terwujud dalam kenyataan.

Salam,

ChanCT

\*\*\*\*\*

"ChanCT" <SADAR@netvigator.com> wrote :

Hallo Richard,

Tentunya bapak bisa senang dan lebih cepat sembuh bisa didampingi putra yang satu ini. Lalu kalau kembali ke Medan, apa sudah dapet kerja? Belajarnya jurusan apa, dibidang musik juga? Yah, mudah-mudahan segalanya bisa berjalan lancar dan bisa mendapatkan kesempatan mengembangkan kreatifitas dan kemampuan sebesar-besarnya demi perkembangan masyarakat dimana anda tinggal. Menjadi seorang pemuda yang sukses berkarier!

Juga setuju kita tidak tenggelam dalam pertengkaran menilai sejarah yang telah lalu, siapa dalang G30S tidak seorang bisa memastikannya, masih terlalu banyak tanda-

tanya besar yang belum terjawab jelas bagaimana sesungguhnya itu terjadi. Dan inilah tugas pemuda-pemudi anak bangsa yang bekerja sebagai peneliti sejarah untuk menggali fakta-fakta sesungguhnya, mengungkap segala manipulasi, pemelintiran dan pemutarbalikan sejarah yang selama 32 tahun lebih dilakukan penguasa Orba-Soeharto itu.

Lebih penting bagi kita, anak-cucunya tidak meneruskan dendam orang-tua, tidak mewarisi konflik yang lalu. Demikian motto FSAB yang kiranya sangat tepat. Kita bersama-sama membangun hidup baru dengan melepas rasa dendam itu, kalau kita mau bilang itu sebagai kesalahan, juga adalah kesalahan yang telah dilakukan generasi orang-tua yang tidak seharusnya ditanggung oleh anak-cucunya, bukan?! Lalu, ... kita sebagai anak-cucu tidak lagi meneruskan baku-hantam, bunuh-membunuh untuk meneruskan yang namanya balas dendam. Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kesadaran budaya dan martabad umat manusia, saya kira cara-cara balas-berbalas dendam yang tidak tepat demikian itu harus diusahakan sedapat mungkin untuk dihentikan. Jutaan rakyat tak berdosa telah jadi korban, jutaan rakyat dengan keluarganya, anak-cucu masih hidup tidak sebagai warga yang normal selama 40 tahun lebih ini. Oleh karenanya, STOP saling bunuh membunuh kita cari jalan keluar untuk hidup bersama didalam suasana baru.

Untuk itu yang terutama pemerintah harus menegakkan HUKUM sebaik-baiknya dinegeri ini. Bisa secara konsekwen menjerat siapa saja pelanggar HUKUM, pelanggaran HAM-berat, yang korupsi, dsb. dst., ... Seandainya masih saja terjadi sebagaimana selama 60 tahun lebih ini, dimana hukum-rimba yang berlaku, amburadullah tatanan masyarakat ini. Kekuatan-kekuatan yang bertarung saling adu-jotos, disini menculik, disana membunuh, disini membunuh 7 orang tanpa proses hukum, disana membalas dengan jutaan rakyat tak berdosa dibunuh juga tanpa proses hukum, ratusan ribu orang boleh dipenjara selama belasan tahun juga tanpa proses hukum, kerusuhan-kerusuhan berbau SARA anti-Tionghoa, peristiwa Malari, Tanjung-periok, Pembunuhan-Misterius, Tragedi Mei'98, Semanggi-I-II, kerusuhan Ambon, Poso, Kalimantan sampai pada peledan Bom Bali, Mariot, Kuningan dan Bali-II baru ini, dan, ... semua pihak menghakimi sendiri. Tanpa kesungguhan dan kemampuan pemerintah menjalankan HUKUM secara baik, pihak-pihak "oposisi" tentu juga akan terus menjalankan aksi dan tindakannya diluar hukum untuk merealisasi apa yang dikehendaki. Penanggung-jawab atas peristiwa-peristiwa pelanggaran HUKUM, pelanggaran HAM jangan biarkan bisa tetap lolos dari jerat HUKUM, tunjukkan kemampuan dan kekonsewkenan aparat HUKUM untuk mentuntas segala kasus pelanggaran HUKUM yang terjadi. Penegakkan HUKUM sebaik-baiknya inilah tantangan terberat setiap pemerintah yang berkuasa.

Bagi pemuda-pemudi anak bangsa ini, hendaknya bisa ber-Prikemanusiaan, bisa memperlakukan setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati, disayangi, dengan tidak mempedulikan segala perbedaan yang ada, ya beda ras, beda suku, beda etnis, beda agama juga beda pandangan politik-idologi sekalipun. Tidak memaksakan paham yang diyakini benar untuk diterima juga pada orang lain, jadi jangan fanatik dalam menerima satu paham ideologi atau agama apa saja. Sekali fanatik, mudah menjerus pada kekerasan untuk menindas, menumpas sekelompok orang yang berbeda paham, begitulah yang terjadi akhir-akhir ini, yang

kabarnya dilakukan sekelompok pemuda dalam penutupan-perusakan gereja, perusakan masjid Achmadiyah dsb. itu.

Seandainya pemerintah yang berkuasa benar-benar menegakkan HUKUM dan menunjukkan fungsi HUKUM betul efektif, lalu semua pihak pemuda-pemudi anak bangsa sudah berkesadaran tinggi untuk menjunjung Pri-Kemanusiaan, humanis dan bisa benar-benar memperlakukan setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati dan disayangi, maka tragedi saling bunuh-membunuh, saling merusak, saling bakar, merampok dan memperkosa tidak akan terjadi lagi di bumi Indonesia ini. Satu kehidupan bermasyarakat yang harmonis, satu kehidupan ber-Bhineka Tunggal Ika terwujud dalam kehidupan nyata dengan segalanya berjalan sesuai dengan HUKUM yang berlaku.

Demikian bukanlah satu kemutlakan yang harus dicapai lebih dahulu kesepakatan untuk menyimpulkan dimana kesalahan-kesalahan garis politik Soekarno dan PKI dahulu itu, yang merupakan latar-belakang terjadinya G30S. Tanpa adanya kesimpulan yang satu, artinya masing-masing orang boleh mempertahankan pendapat dan pendiriannya, selama dia tidak memaksakan pendapatnya pada orang lain, selama dia tetap ber-Prikemanusiaan yang bisa memperlakukan setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati, disayangi, tentu saling bunuh-membunuh tidak akan terjadi lagi.

Mudah-mudahan pendapat saya ini benar, dan pertumpahan darah yang tidak perlu terjadi dengan demikian bisa dihindari. Balas berbalas dendam bisa diakhiri. Dan yang harus bertanggungjawab atas segala pelanggaran HUKUM bisa terjerat hukum sebagaimana HUKUM yang berlaku adil.

Salam,

\*\*\*\*\*

Hutagalung Bambang wrote:

Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S.

Oom Chan yg budiman,

Saya akan mendampingi ayah di Singapura, kemudian kembali ke Medan. Untuk sementara saya tidak akan kembali ke London, melainkan mendampingi ayah dan ibu di Indonesia.

Siapa dalang G30S? Saya kira tidak seorangpun yang dapat memastikan, dari bahan2 yang saya pernah baca, ternyata masih banyak perbedaan pendapat mengenai soal ini, masing2 mempunyai alasan sendiri2.

Golongan yg pro PKI menuding Suharto dan CIA yg menjadi dalangnya.

.Golongan yg dirugikan oleh PKI menuding PKI lah yang menjadi dalang G30S.

.Golongan yg bermusuhan dengan PKI juga menuding PKI lah yg menjadi dalangnya.

.Golongan generasi muda terus melakukan studi lebih mendalam.

Oom Chan tampaknya termasuk golongan pertama, ayah saya Bambang Hutagalung termasuk golongan kedua. termasuk golongan ke-4.

Menurut hemat saya, penting, bukannya mencari siapa dalangnya, melainkan bagaimana kita ber-sama2 mencegah terulangnya tragedi nasional yg mengerikan itu.

itu, kita perlu mendalami latar belakang sejarah, latar belakang politik, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi yang pada puncaknya meletus menjadi G30S. apa saja yang dilakukan oleh generasi tua angkatan 45, angkatan 55 dan angkatan 66 yang perlu kita simpulkan bersama, berdaya upaya agar jangan mengulangi kesalahan2 semacam itu.

demikian kita baru bisa mencegah terulangnya tragedi nasional seperti G30S.

Hutagalung,

Singapura, 5 Oktober 2005.

\*\*\*\*\*

ChanCT <SADAR@netvigator.com> wrote:

Hallo Richard,

Tetap mengambil liburan menemani bapak di RS? Lalu, kembali ke London atau ikut ke Medan? Mudah-mudahan bapak cepat sembuh dan sehat betul, ya. Permintaan anda agar saya mempelajari dengan baik fakta keterlibatan PKI dalam G30S, tentu sudah saya lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Dan senantiasa akan saya ikuti terus sesuai dengan kemampuan yang ada. Saya termasuk seorang yang berusaha mengikuti secara teliti tulisan-tulisan sekitar G30S yang tetap penuh dengan tanda tanya itu, dan selalu tetap gelap bagaimana kenyataan sesungguhnya yang terjadi.

Tidak pernah menyangkal adanya sementara tokoh PKI yang terlibat langsung dalam G30S, yang tetap menjadi pertanyaan saya adalah sampai dimana sesungguhnya peranan mereka itu, bisakah DN. Aidit yang ketua PKI itu dikatakan dalang G30S? Sungguh masih harus dipertanyakan, karena kenyataan Aidit justru menampilkan diri dalam posisi yang pasif, yang tidak layak disebut dalang. Bagaimana mungkin yang namanya dalang, justru yang diperintah Syam Kamaruzzaman pada saat di Halim subuh pagi 1 Oktober 65 itu, untuk tetap meneruskan penerbangan ke Jawa-tengah. Padahal ada berita yang menyatakan, pada saat Mantan Presiden Soekarno menolak rencana ke Jawa-tengah, DN Aidit juga ingin membatalkan kepergiannya. Dan, ... seandainya DN Aidit, PKI adalah dalang G30S, kenapa tidak bertahan di Jkrt. untuk memberi komando selanjutnya, tapi tunduk pada perintah Syam untuk bersembunyi? Bisakah tindakan DN Aidit yang demikian ini (tunduk perintah Syam dan bersembunyi di Jawa-tengah) sebagai bukti PKI adalah dalang G30S?

Seandainya benar berita DN Aidit tunduk pada perintah Syam, tentu harus dipertanyakan siapa sesungguhnya Syam, yang ketua Biro Khusus bisa berperan memerintah DN Aidit yang justru Ketua PKI itu? Sementara orang menyatakan Syam double intelijen, dia bekerja untuk PKI tapi juga bekerja untuk AD, bahkan juga CIA. Dan kalau, kita perhatikan lagi bagaimana kedekatan Syam pribadi dengan jenderal

Soeharto yang sudah tergalang sejak jaman Jogja tahun 46-48 itu, kemudian melihat kedekatan/keakraban jenderal Soeharto dengan tokoh-tokoh teras G30S, dari Letkol. Untung Samsoeri, Kol. Latief, Brigjen Soepardjo tentu orang akan cenderung menyatakan jenderal Soeharto-lah dalang G30S sesungguhnya; Begitu-lah kekuatan-kekuatan pasukan yang digunakan G30S, Yon-434 Diponegoro dan Yon-530 Brawijaya, adalah pasukan siap tempur yang langsung didatangkan ke Jakarta oleh jenderal Soeharto sendiri, tapi anehnya, pasukan ini pula yang digunakan untuk menindas G30S di Halim. Oleh karena itu, tidak aneh Soebandrio menyatakan G30S hanyalah rekayasa jenderal Soeharto dalam rangka kupdetat-meranggak, dan berhasil dengan baik.

Mengingat ketika itu, situasi perang-dingin yang sedang panas-panasnya, bukan mustahil Amerika dengan CIA-nya pasti berperanan untuk membasmi komunis dan menjungkelkan presiden Soekarno yang terlalu "kiri" itu. Yang perlu diselidiki lebih lanjut, tentu adalah sampai dimana jenderal Soeharto digunakan oleh CIA sebagai kuda tunggang pengganti jenderal Nasution. Jadi, sementara analisa ada benarnya, G30S hanyalah satu gerakan buatan CIA sebagai jebakan yang dirancang untuk gagal, sebagai alasan untuk menggebuk dan menumpas PKI saja. Dan itulah yang telah terjadi dan bisa kita lihat jelas, semua inisiatif dilakukan secara cekatan oleh jenderal Soeharto.

Demikian, saya setuju dalam langkah perjuangan selanjutnya, janganlah main basmi-membasmi, bunuh membunuh lagi. Korban rakyat tak berdosa sudah terlalu banyak bergelimpangan karena kesalahan itu. Perlakukanlah setiap umat-manusia sebagai manusia yang harus dihormati dan disayangi. Jangan lagi kita menganggap diri-sendiri yang manusia, yang paling benar dan orang lain yang beda-pendapat, beda agama, dan beda politik-ideologi sebagai setan, sebagai musuh yang harus dibasmi, dibunuh. Jangan lagi! Bersatulah bangsa ini dengan lebih baik lagi mewujudkan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan nyata bermasyarakat.

Juga setuju dendam orang-tua tidak seharusnya kita warisi, orang tua dimasa lalu saling baku-hantam, kita dan anak-cucunya harus bisa menempuh kehidupan barunya sendiri, sebagai anak-bangsa yang bersatu-padu untuk membangun masyarakat adil dan makmur. Tetapi ingat, generasi muda harus terus berusaha menegakkan HUKUM sebaik-baiknya, pelanggaran HUKUM, kesalahan-kesalahan pelanggaran HAM-berat sekalipun sudah lewat 40 tahun lebih, tetap harus tergugat HUKUM, tidak ada masalah kedaluwarsa. Sekarang belum ada kemampuan untuk itu, tapi harus diperjuangkan adanya kejernihan dan keadilan sebaik-baiknya secara HUKUM. Tidak membiarkan lewat begitu saja, setelah terjadi pembunuhan, penganiaya, penangkapan begitu banyak orang tidak berdosa, yang bertanggung jawab harus diadili dan ada kejelasan HUKUM. Dan tuntutan keadilan, penegakkan HUKUM demikian ini sekali-kali bukan balas-dendam.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Hutagalung Bambang wrote :

Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S.

Hong Gie yg budiman,



Terima kasih atas kiriman fakta2 mengenai keterlibatan PKI tokoh2nya dalam G30S, dengan demikian saya mendapat gambaran yang lebih luas mengenai tragedi nasional yang paling banyak menelan korban jiwa manusia. dalam sejarah nasional kita.

Generasi muda sekarang dan seterusnya bisa menarik pelajaran yang berharga, jangan mengulangi kesalahan para pendahulunya, jangan sedikit2 main ganyang, main basmi, main bantai satu sama lain. Dendam orang tua kita jangan dibawa ke generasi baru, hapuskan semua fikiran untuk balas dendam, hapuskan semua fikiran untuk menghukum lawan politiknya. Bangsa Indonesia membutuhkan persatuan, sekali lagi persatuan dari seluruh bangsa tanpa mem-beda2kan suku, agama, ras dan golongan.

Ada semboyan ekstrim yang berbunyi : mempersatukan seluruh kekuatan yang revolusioner. semacam ini harus dimasukkan ke dalam museum sejarah. Sebab akan membikin dua golongan saling bantai lagi. Golongan yang merasa dirinya golongan revolusioner berniat membasmi yang dikategorikan kontra revolusioner, dan sebaliknya golongan yang merasa dirinya mau dibasmi, lalu buru2 dengan seribu satu macam alasan membasmi golongan yang menepuk dadanya sebagai golongan yang revolusioner. Inilah yang kita saksikan dalam tragedi nasional 1965!

Juga semboyan : basmi setan kota, basmi setan desa harus dijadikan pelajaran sejarah, apapun bentuknya, apapun alasannya jangan menepuk dirinya sebagai sedangkan golongan lain sebagai setan

Revolusi kebudayaan yg dipimpin oleh Mao, ada semboyan BASMI SEMUA SETAN DAN SILUMAN, belakangan terbukti yang disebut setan dan siluman ternyata adalah kader2 yang salah cuma sepele saja. Tapi sudah dihabisi nyawanya, mati konyol.

Bangsa Indonesia adalah manusia, semua harus bersatu. Dalam menghadapi perbedaan golongan, harus menempuh jalan damai. jalan konstitusional, jalan musyawarah. mau demo (unjuk rasa) boleh2 saja, tapi harus secara tertib, selalu waspada terhadap provokator yang mau memancing ikan di air keruh. yang sering mengubah demo damai menjadi demo berdarah dan merusak (main bakar, main jahar, main bunuh dll yg anarkis).

Dulu, harap Oom Chan juga pelajari fakta2 yang dikirim oleh Oom Hong Gie ini. Jangan a priori terhadap fakta2 yang berbeda dengan pendapat sendiri.

Hutagalung,

Singapura 4 Oktober 2005.

\*\*\*\*\*

"ChanCT" SADAR@netvigator.com wrote :

Sahabat-sahabat sekalian,

yakin bahwa masalah G30S benar-benar adalah masalah sejarah yang penuh dengan tanda-tanya besar, yang sampai sekarang masih sangat sulit mendapatkan jawaban yang benar. Satu peristiwa berdarah terberat dalam sejarah Indonesia, dan

akibat hanya memperkenankan "kebenaran" tunggal mengkaitkan PKI dan menuduh PKI sebagai dalang G30S selama 32 tahun kekuasaan Orba Soeharto, dengan dimusnahkannya banyak fakta data-data yang ada, juga dibunuh lebih dahulu tokoh-tokoh yang berperan, maka untuk mengungkap bagaimana kejadian 40 tahun itu sesungguhnya menjadi lebih sulit lagi. Pemuda-pemudi ahli sejarah-pekerja sejarah harus kerja lebih keras lagi untuk menggali dan menemukan fakta-fakta baru untuk pelurusan sejarah.

diskusi kali ini yang dimulai dengan "Siapa Keblinger" menjadi lebih rumit untuk dilanjutkan, karena yang muncul mengajukan pendapat, baik Pak Bambang Hutagalung maupun Maria Harsono, merupakan orang yang menyembunyikan identitas sesungguhnya dan berada didalam milist HKSIS, sedang pendapat sahabat-sahabat lain, Pak Asahan Aidit, Pak Samiaji, Pak Harsutedjo dan Pak Haryo berada diluar milist HKSIS. Sekalipun saya tetap menyanggapi untuk selalu meneruskan, menjadi penghubung milist dimana sahabat-sahabat tergabung

Saya merasa aneh, di-era reformasi telah bergulir 7 tahun, dimana orang lebih banyak mulai bicara dengan menemukan fakta-fakta baru yang mengungkap kemunafikan, pemelintiran dan pemalsuan sejarah G30S, pada saat orang lebih banyak mulai curiga atas tuduhan PKI dalang G30S, pada saat orang lebih banyak justru mulai mencurigai CIA dengan jenderal Suharto sebagai kuda-tunggang adalah dalang G30S sesungguhnya, sebaliknya pak Bambang yang berhasil kabur keluar-negeri, juga Maria Harsono yang sekarang menetap di HK, malah menjadi berpendapat PKI-lah dalang G30S. Dan bahkan menuduh tuntutan penegakkan HUKUM hanyalah pelampiasan nafsu dendam pada jenderal Suharto.

Juga negeri ini benar-benar harus berusaha menegakkan HUKUM sebaik-baiknya, tidak membiarkan terus hukum-rimba yang berlaku. Hanya dengan demikian kehidupan tata negara bisa berlangsung normal, tentram dan sejahtera, semua berlangsung didalam jalur HUKUM yang berlaku. Pembunuhan atas 7 jenderal dilakukan tanpa proses HUKUM, penanggung-jawabnya harus dituntut HUKUM. Harus diusut secara baik siapa yang harus bertanggungjawab atas peristiwa itu, dari rencana penculikan sampai perubahan komando dari menghadapkan jenderal-jenderal itu pada Presiden Soekarno berubah menjadi dibunuh. Kenapa berubah dan siapa yang memerintah bunuh saja. Kemudian peristiwa-peristiwa selanjutnya, siapa sesungguhnya yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan tokoh-tokoh utama PKI, dari DN Aidit, Lukman, Nyoto, yang juga dilakukan tanpa proses HUKUM. Dan, yang lebih parah lagi penanggung-jawab pembunuhan jutaan rakyat tak berdosa dilancarkan juga diluar HUKUM, penangkapan atas ratusan ribu rakyat yang tidak tahu apa-apa sampai belasan-puluhan tahun juga tanpa proses HUKUM telah dilakukan, kemudian memberlakukan dosa - warisan pada jutaan keluarga, anak-cucu Tapol yang berlangsung sampai sekarang, siapa yang harus bertanggung-jawab? Semua kebiadaban, pelanggaran HAM-berat demikian ini, tapi penanggung-jawabnya selama lebih 40 tahun ini tidak juga terjerat HUKUM, lalu yang menuntut keadilan dan ditegakkan HUKUM malah dituduh bernafsu balas dendam.

Bangsa ini sedang sakit, negeri ini sudah berubah menjadi negeri-maling bahkan penyamun. Inilah tantangan berat pemerintah yang berkuasa untuk membenahinya. Mentalitet pejabat-pejabat sudah begitu bobroknya, tidak hanya Menteri Agama

sebagai wilayah suci bisa terlibat korupsi, bahkan penjaga gawang penegakkan keadilan, Mahkamah Agung juga terlibat penyuapan. Lalu, bagaimana HUKUM bisa tegak dan terlaksana baik, kalau MA saja sudah bisa di-"beli" untuk memenangkan satu kasus perkara, ya?! Dan akan menjadi lebih celaka, seandainya rakyat menuntut penegakkan HUKUM dituduhnya bernaflu balas dendam? Sungguh jaman-edan! Jadi, memang masalahnya masih terlalu berat dan cukup rumit. Tapi tidaklah karena itu, lalu kita boleh dan bisa membiarkan hukum-rimba yang terus berlaku. Sesuai dengan era reformasi, tuntutan lebih keras harus dilakukan untuk mempercepat reformasi bergulir, reshuffle kabinet harus dipercepat, SBY-JK harus lebih tegas menindak pejabat-pejabat tidak becus, yang nyeleweng.

Salam,

ChanCT

\*\*\*\*\*

From: maria harsono

Bambang yth,

belum pernah jumpa muka, tapi saya sudah sering membaca email Oom di rumah teman saya. Oom dan ayah saya, sama2 mantan anggota Pemuda Rakyat, sama2 termasuk golongan yang kecewa terhadap ketololan PKI yang mendatangkan musibah nasional 1965.

setuju usul Oom, agar generasi tua (yang masih hidup), apalagi generasi muda semuanya jangan menaruh dendam2an lagi, apalagi bernaflu mau menegakkan HUKUM segala macam untuk menyeret lawannya masuk penjara. Taro kata Suharto masuk penjara, apakah 3 juta manusia yang mati akan hidup lagi, atau yang dulunya mati dengan mata mendelik sekarang bisa memejamkan matanya? Toh fantastis sekali bukan?

kita wujudkan REKONSILIASI NASIONAL tanpa syarat,

padu untuk memberi amal kepada nusa dan bangsa, untuk mengakhiri kemiskinan dan keterbelakangan tanahair kita.

Indonesia sudah terlalu banyak pengorbanannya, yang mereka butuhkan adalah kemakmuran, bukannya saling gontok2an antara golongan politik yang berbeda.

masalah siapa dalang G30S dlsb diurus oleh para pakar sejarah, daripada kita berdebat tak habis2nya, tetap tidak ada kesatuan pendapat, sebab kita semua kekurangan bahan2, kekurangan saksi2, cuma berdasarkan buku yg ditulis secara subjektif oleh pengarangnya, berdasarkan pengalaman pribadi yang sepotong2. ayah saya juga sangat subjektif, banyak yang beliau tak ketahui, meskipun ketika kejadian itu beliau berada di Jakarta. Apalagi mereka2 yang ketika kejadian itu terjadi berada di luar Indonesia. Betul nggak Oom Chan dan pendapat pak Asahan?

Harsono, Hongkong, 10 Okt. 05

\*\*\*\*\*

Hutagalung Bambang <bambanghutagalung1942@yahoo.co.uk> wrote:

dulu sudah fatal kesalahannya, merupakan avonturisme dalam bidang politik dan militer, ini sudah disimpulkan oleh PB CC PKI dalam Otokritiknya pada tahun 1966, yang tidak sempat membaca Otokritik PB CC PKI ini bisa membuka google.com, carilah dokumen : PLEDOI SUDISMAN DI DEPAN MAHMILUB.

membakar rumah sendiri, bukannya aktif memadamkan kebakaran, melainkan membiarkan orang lain merampoki hartabendanya, membunuh anggota keluarganya. Itulah yang dilakukan oleh PKI yang mengeluarkan Statement 2 Oktober 1965 yang dimuat dalam Harian Rakyat yg dikepalai oleh Nyoto (orang ketiga dalam jajaran pimpinan PKI). Statement ini hakekatnya melarang anggota dan simpatisan PKI yg berjumlah 20 juta itu melakukan perlawanan (agar jangan terprovokasi) jika diserang oleh lawan2 politiknya yang dikategorikan sebagai 3 setan kota dan 7 setan desa. Inilah DOSA BESAR PKI YANG TAK DAPAT DIMAAFKAN. yang telah mengorbankan para pengikutnya sampai 3 juta mati dibunuh secara kejam oleh 3 setan kota dan 7 setan desa. dan jutaan lagi yang masih hidup menderita peniksaan lahir batin sebagai warganegara kelas kambing. Jika saya tidak kabur ke luar negeri dan mengganti semua identitas saya, nasib saya pasti akan konyol karena ketololan pimpinan PKI. dapat memahami mengapa ayahanda dik Maria Harsono, segera kabur dari Jakarta, kemudian menyatakan talak tiga kepada Pemuda Rakyat dan PKI, setelah membaca apa yang dinamakan Otokritik PB CCPKI yang mengibarkan tinggi2 Panji Merah Fikiran Mao Tjetung, yg dilukiskan sebagai puncak tertinggi Marxisme-Leninisme zaman sekarang, kemudian berdasarkan Fikiran Mao itu, sisa2 PKI melakukan pemberontakan bersenjata di Blitar Selatan dan Kalimantan Barat, yang kesemuanya merupakan rontaan sekarat yang membikin tamatnya riwayat PKI di Indonesia untuk se-lama2nya.

mendesak dewasa ini adalah masalah menuntut pemerintah Indonesia supaya memberi amnesti nasional kepada seluruh bekas pengikut dan simpatisan PKI, sebab merekapun merupakan korban ketololan atasannya. semuanya matanya buta, tertipu oleh propaganda muluk2 dari PKI pada jaman Aidit (1951-1965).

sisa2 PKI yang masih dendam kesumat kepada Suharto dengan orbanya, saya serukan agar menghapuskan dendam ini untuk se-lama2nya, hentikan semua propaganda menghujat pak Harto, barulah rekonsiliasi nasional bisa terwujud. barulah yang nyangkut di Eropa bisa kembali ke Indonesia dan dipulihkan kewarganegaraannya. usul saya ini dipertimbangkan oleh pak Asahan Aidit dan semua kawan2 sehaluannya di Eropa.

semua dendam kesumat! Bersatulah seluruh bangsa Indonesia untuk membangun masyarakat yang kuat dan makmur!

Hutagalung, Singapura 10 Oktober 2005.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## SEJARAH TAHUN 1965 YANG TERSEMBUNYI

Oleh Prof. Dr. W.F. Wertheim

Para hadirin yang terhormat!

Saya minta ijin untuk, sebelum mencoba memberi analisa tentang peristiwa 1965, lebih dahulu menceritakan bagaimana terjadinya bahwa saya, walaupun mata pelajaran saya sosiologi, lama kelamaan mulai merasa diri sebagai pembaca suatu detective story yang cari pemecahan suatu teka-teki.

Dalam tahun 1957 saya bersama isteri saya mengajar sebagai guru besar tamu di Bogor. Saya pernah bertemu dengan ketua PKI Aidit dan beberapa tokoh lain dalam pimpinan partai. Aidit menceritakan tentang kunjungannya ke RRC, baru itu; dari orang lain saya dengar bahwa Mao Zedong bertanya pada Aidit: "Kapan kamu akan mundur ke daerah pedesaan?"

Ucapan itu saya masih ingat waktu dalam tahun 1964 saya terima kunjungan di Amsterdam dari tokoh terkemuka lain dari PKI, Nyoto, yang pada waktu itu ada di Eropa untuk menghadiri suatu konperensi di Helsinki. Saya mengingatkannya bahwa keadaan di Indonesia pada saat itu mirip sekadarnya kepada keadaan di Tiongkok dalam tahun 1927, sebelum kup Ciang Kaisyek. Pendapat saya ialah bahwa ada bahaya besar bahwa militer di Indonesia juga akan merebut kekuasaan. Saya anjurkan dengan keras supaya golongan kiri di Indonesia mempersiapkan diri untuk perlawanan dibawah tanah, dan mundur ke udik. Jawaban Nyoto ialah bahwa saat bagi militer untuk dapat rebut kekuasaan sudah terlambat. PKI telah terlalu kuat baik dalam badan perwira maupun dalam badan bawahan tentara dan angkatan militer yang lain. Saya tidak berhasil meyakinkan Njoto.

Pagi 1 Oktober '65 kami dengar siaran melalui radio tentang formasi Dewan revolusi di Jakarta. Sahabat saya, Prof. De Haas menelpon saya dan menyatakan: "Itu tentu revolusi kiri!" Saya menjawab: "Awat, menurut saya lebih masuk akal: provokasi!". Pada tanggal 12 Oktober kami dengar bahwa Jendral Suharto, yang belum kenal kami namanya, telah berhasil tangkap kekuasaan. De Haas telepon saya lagi, dan mengatakan: "Saya takut mungkin kemarin Anda benar!"

Seminggu sesudahnya saya terima kunjungan dari kepala sementara kedutaan RRC di Den Haag. Ia rupanya memandang saya sebagai ahli politik tentang Indonesia, dan ia hendak mengetahui: "Apa yang sebenarnya situasi politik di Indonesia sekarang?" Jawaban saya ialah: "Tentu Anda sebagai orang Tionghoa dapat mengerti keadaan! Sangat mirip kepada yang terjadi di Tiongkok dalam tahun 1927 waktu Ciang Kaisyek mulai kup kanan dengan tentaranya, dan komunis kalah, di Syanghai, dan lantar di Hankau (Wuhan) dan di Canton (Guangzhou)". Ia tidak mau setuju.

Di bulan Januari tahun 1966 saya terima dari beberapa rekan yang saya kenal, yang mengajar di Cornell Univesity di A.S., suatu 'Laporan Sementara' tentang peristiwa September-Oktober di Indonesia. Mereka sangat menyangsikan apakah peristiwa itu benar suatu kup komunis, seperti dikatakan oleh penguasa di Indoensia dan oleh dunia Barat. Yang terima laporan itu, boleh memakai bahannya (begitu mereka tulis

kepada saya), tetapi untuk sementara tanpa menyebut sumbernya, oleh karena mereka masih mencari bahan tambahan, dan meminta reaksi dan informasi lagi.

Dengan mempergunakan bahan dari laporan Cornell itu, saya menulis suatu karangan yang dimuat dalam mingguan Belanda "De Groene Amsterdammer" pada tanggal 19 Februari 1966, dengan judul "Indonesia berhaluan kanan" Dalam karangan itu saya tanya: mengapa di dunia Barat sedikit saja perhatian terhadap pembunuhan massal di Indonesia, kalau dibanding dengan tragedi lain di dunia, yang kadang-kadang jauh lebih enteng daripada yang terjadi di Indonesia baru-baru ini? Barangkali alasannya bahwa pandangan umum seolah-olah golongan kiri sendirilah yang bersalah - apakah bukan mereka sendiri yang mengorganisir kup 30 September dan yang bersalah dalam pembunuhan 6 jendral itu? Maka dalam karangan itu saya mencoba memberi rekonstruksi peristiwa-peristiwa dan menarik kesimpulan bahwa sedikit sekali bukti tentang golongan PKI bersalah dalam peristiwa itu. Saya juga tambah bahwa cara perbuatan dengan menculik dan membunuh jenderal tidak mungkin berguna untuk PKI - jadi salah mereka tidak masuk akal. Lagi hampir tidak ada persiapan dari golongan kiri untuk menghadapi situasi yang akan muncul sesudah kup. Dalam karangan itu saya juga menyebut kemiripan kepada peristiwa di Shanghai dalam tahun 1927, yang juga sebenarnya ada kup dari golongan reaksioner.

Kesimpulan saya dalam karangan di "Groene Amsterdammer" itu: "Terminologi resmi di Indonesia masih adalah kiri, akan tetapi jurusannya adalah kanan".

Kemudian, dalam bulan Februari tahun '67, Mingguan Perancis "Le Monde" mengumumkan wawancara dengan saya. Dalam wawancara saya bertanya: "Mengapa Pono dan Sjam, yang rupanya tokoh penting dalam peristiwa 65 itu, tidak diadili? Dikatakan dalam proses yang telah diadakan, misalnya proses terhadap Obrus Untung, bahwa mereka itu orang komunis yang terkemuka. Apa yang terjadi dengan mereka itu, khususnya dengan Sjam, yang agaknya seorang provokatif, yang pakai nama palsu?"

Mencolok mata bahwa beberapa minggu sesudah wawancaranya itu ada berita dari Indonesia bahwa Sjam, yang namanya sebenarnya Kamaruzzaman, ditangkap. Saya dengar kabar itu di radio Belanda, pagi jam 7. Dikatakan bahwa Sjam itu sebagai seorang Double agent! Saya ingin dengar lagi siaran jam 8 diulangi bahwa Sjam ditangkap, tetapi kali ini TIDAK ditambah bahwa ia double agent! Rupanya dari kedutaan Indonesia ada pesan supaya istilah itu jangan dipakai! Tetapi saya dapat Sinar Harapan dari 13 Maret '67, dan di sana ada cerita tentang cara Sjam itu ditangkap. Dan judul berita itu: "Apakah Sjam double agent?" Tetapi sesudahnya di pers Indonesia istilah double agent itu tidak pernah diulangi lagi.

Dalam semua proses di mana Sjam muncul sebagai saksi atau terdakwa, Sjam selamanya dilukiskan sebagai seorang komunis yang sejati, yang dekat sekali dengan ketua Aidit. Ia selalu MENGAKU bahwa dia yang memberi semua perintah dalam peristiwa 1 Oktober, tetapi ia selalu tambah bahwa yang sebenarnya memberi perintah itu Aidit yang juga ada pada hari itu di Halim, dan yang sebenarnya menurut Sjam dalang dibelakang segala yang terjadi.

Tentu Aidit tidak dapat membela diri dan membantah segala bohong dari Sjam, oleh karena ia dibunuh dalam bulan November 1965 tanpa suatu proses, ditembak mati oleh Kolonel Jasir Hadibroto. Begitu juga pemimpin PKI lain, seperti Njoto dan Lukman, tidak dapat membela diri di pengadilan. Tentulah segala eksekusi tanpa proses itu membantu Orde Baru dalam menyembunyikan kebenaran. Sudisman diadili, tetapi pembelaannya tidak mendapat kemungkinan untuk mengajukan hal-hal yang melepaskan PKI dari sejumlah tuduhan: ia dipaksa untuk mencoret bagian tentang hal itu dari pleidoinya!

Waktu Sjam kedatangan sebagai double agent yang sebagai militer masuk kedalam PKI untuk mengintai, saya mulai menduga pula bahwa Suharto sendiri mungkin terlibat dalam permainan-munafik. Pada tanggal 8 April 1967 di mingguan "De Nieuwe Linie" dimuat lagi wawancara dengan saya. Dalam wawancara ini saya telah menyebut kemungkinan bahwa "kup" dari 1 Oktober 1965 adalah satu provokasi dari kalangan perwira; dan waktu itu saya telah TAMBAH bahwa Suhartolah yang paling memanfaatkan kejadian-kejadian. Saya mengatakan begitu:

"Aneh sekali: kalau semua itu akan terjadi di suatu cerita detektive, segala tanda akan menuju kepada dia, Suharto, paling sedikit sebagai orang yang sebelumnya telah punya informasi. Misalnya setahun sebelum peristiwa 65, Suharto turut menghadiri pernikahan Obrus Untung yang diadakan di Kebumen. Untung dahulu menjadi orang bawahan Suharto di tentara. Lagi, dalam bulan Agustus tahun 65, Suharto juga bertemu dengan Jenderal Supardjo, di Kalimantan. Dan mereka, Untung dan Supardjo, telah main peranan yang utama dalam komplotan. Aneh lagi, bahwa Suharto tidak ditangkap dalam kup, dan malahan KOSTRAD tidak diduduki dan dijaga pasukan yang memberontak, walaupun letaknya di Medan Merdeka dimana banyak gedung diduduki atau dijaga. Semua militer mengetahui bahwa kalau Yani tidak di Jakarta atau sakit, Suhartolah sebagai Jenderal senior yang menggantikannya. Aneh juga bahwa Suharto bertindak secara sangat efisien untuk menginjak pemberontakan, sedangkan grup Untung dan kawannya semua bingung." Wawancara itu saya akhiri dengan mengatakan: "Tetapi sejarahnya lebih ruwet dan sukar daripada detective-story".

Begitulah pendapat saya di tahun 1967.

Tetapi dalam tahun 1970 terbit buku Arnold Brackman, jurnalis A.S. yang sangat reaksioner; judulnya "The Communist Collapse in Indonesia". Di halaman 100 Brackman menceritakan isi suatu wawancara dengan Soeharto, agaknya dalam tahun 1968 atau 1969, tentang suatu pertemuan Suharto dengan Kolonel Latief, tokoh yang ketiga dari pimpinan kup tahun 65. Isinya:

*"Dua hari sebelum 30 September anak lelaki kami, yang umurnya 3 tahun, dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan kami dengan buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit. Banyak teman menjenguk anak saya di sana pada malam 30 September, dan saya juga berada di rumah sakit. Lucu juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu atas keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang terkemuka dalam kejadian yang sesudahnya. Kini menjadi jelas bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit bukan untuk menjenguk anak saya, melainkan sebenarnya UNTUK MENCEK SAYA. Ia hendak tahu betapa*

*genting celaka anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya tetap di rumah sakit sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah".*

Begitulah kutipan dari buku Brackman tentang wawancaranya dengan Suharto.

Untuk saya pengakuan ini dari Suharto, bahwa ia bertemu dengan Kolonel Latief kira-kira empat jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal mulai, sungguh merupakan 'rantai yang hilang' - the missing link dalam detective story. Hal ini dengan jelas membuktikan hubungan Suharto dengan tokoh utama dalam peristiwa tahun 1965.

Tentu Latief, yang pergi ke R.S. Gatot Subroto, yaitu Rumah Sakit Militer, 3 atau 4 jam sebelum serangan terhadap rumah-rumah 7 jenderal mulai, maksudnya untuk menceritakan pada Suharto tentang rencana mereka - tetapi sukar membuktikan itu selama Suharto berkuasa, dan Latief dalam situasi orang tahanan. Hanya satu hal yang kurang terang. Mengapa Suharto menceritakan pada Brackman tentang pertemuan ini? Agaknya ada orang yang memperhatikan kedatangan Latief ke rumah sakit. Oleh karena itu Suharto merasa perlu memberi alasan kunjungan itu yang dalam dipahami: Latief mau periksa apakah Suharto begitu susah oleh karena keadaan sehingga ia tak mungkin bertindak pada esok harinya!

Pengakuan Suharto itu menjadi untuk saya kesempatan untuk mengumumkan karangan di mingguan "Vrij Nederland" pada tanggal 29 Agustus 1970, dengan judul "De schakel die ontbrak: Wat deed Suharto in de nacht van de staatsgreep?" (Rantai yang hilang: apa yang diperbuat Suharto pada malam kup?). Dalam karangan itu saya menguraikan segala petunjuk bahwa Suharto benar terlibat di dalam peristiwa tahun 65. Karangan ini dimuat satu hari sebelum Suharto datang ke Belanda untuk kunjungan resmi - kunjungan yang gagal samasekali. Karangan yang serupa itu juga saya umumkan dalam bahasa Inggris di dalam majalah ilmiah "Journal of Contemporary Asia" tahun 1979, dengan judul: "Suharto and the Untung Coup: The Missing Link".

Waktu saya mengumumkan dua karangan itu, saya belum mengetahui bahwa dalam wawancara lain, sebelum bulan Agustus 1970 itu, Suharto sekali lagi menyebut pertemuannya dengan Kolonel Latief itu - tetapi kali ini dengan nada yang sangat berlainan. Wawancara itu dimuat dalam mingguan Jerman Barat, "Der Spiegel", tanggal 27 Juni, halaman 98. Wartawan Jerman itu bertanya: "Mengapa tuan Suharto tidak termasuk daftar jenderal-jenderal yang harus dibunuh?" Jawaban Suharto yaitu: "Pada jam 11 malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit untuk membunuh saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya karena tidak berani melakukannya di tempat umum." Masa, heran - seolah-olah Kolonel Latief ada rencana untuk membunuh Suharto, 4 jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal yang lain akan dimulai, yang tentu berakibat seluruh komplotan akan gagal! Kebohongan Suharto itu suatu bukti lagi bahwa Suharto mau menyembunyikan apa-apa, dan cari akal untuk luput dari persangkaan ia terlibat dalam kup!

Sedangkan tokoh lain dari komplotan, sebagai Obrus Untung, Jenderal Supardjo dan Mayor Sudjono sudah lama terkena hukuman mati dan dieksekusi, Kolonel Latief selama lebih dari 10 tahun tidak diadili. Alasan yang disebut oleh pemerintah, yaitu



bahwa ia 'sakit-sakitan' dan tidak dapat menghadiri sidang pengadilan. Benar bahwa ia kena luka berat di kaki waktu tertangkap; tetapi kawannya di penjara mengatakan bahwa ia sudah lama dapat menghadap di sidang sebagai saksi atau terdakwa.

Akhirnya, dalam tahun 1978 sidang dalam perkara Latief mulai. Dalam eksepsinya dari tanggal 5 Mei, Latief telah memberi keterangan, bahwa ia beserta keluarganya berkunjung di rumah Suharto dengan dihadiri Ibu Tien, dua hari sebelum tanggal 30 September; ia juga menceritakan bahwa ia mengunjungi Suharto pada malam 30 September di Rumah Sakit Militer. Ia menerangkan bahwa ia, Obrus Untung dan Jenderal Supardjo, yang baru pulang dari Kalimantan, bertiga pimpinan militer dari aksi keesokan harinya, berkumpul di rumahnya pada jam 8 untuk berunding. Mereka memutuskan untuk malam itu juga menemui Suharto, untuk memperoleh dukungannya dalam rencana. Latief mengusulkan supaya mereka akan bertiga menghadap Suharto, tetapi Untung tidak berani, dan mereka akhirnya mengutus Latief oleh karena ia yang paling dekat dengan Suharto. Untung dan Supardjo masih punya urusan lain yang penting.

Latief telah menjadi bawahan dari Suharto waktu Jogya diduduki Belanda, tahun 1949. Malahan, menurut keterangan Latief dalam eksepsinya, waktu serangan ke Jogya pada tanggal 1 Maret 1949, dengan Jogya diduduki pasukan Republik selama 6 jam, bukan Suharto yang sebenarnya masuk Jogya melainkan Latief sendiri! Waktu Latief pulang ke komandonya di pegunungan bersama grupnya, Suharto bersama ajudannya sedang makan soto! Pada waktu komando Mandala yang dibawah komando Suharto, Latief menjadi kepala intellijen dari Komando di Makasar.

Dalam eksepsinya Latief dengan terang menjelaskan bahwa waktu ia bertemu dengan Suharto di rumah sakit, ia menceritakan padanya seluruh rencana untuk malam itu. Ia minta pengadilan supaya Suharto dan istrinya akan dipanggil sebagai saksi. Putusan pengadilan: tidak, karena kesaksiannya tak akan 'relevan'.

Dalam pledoinya yang tertulis Latief mengulangi lebih jelas lagi tentang pembicaraannya di rumah sakit. Dia menerangkan: "Setelah saya lapor kepada Jenderal Suharto mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai Gerakan, Jenderal Suharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan perintah melarang" (hal. 128). Pledoi dan Eksepsi Latief kami punya seluruhnya dalam bahasa Indonesia. Dalam pers Indonesia segala keterangannya tentang pertemuan dengan Suharto itu sama sekali tidak diumumkan dan tidak diperhatikan.

Yang paling mencolok mata, yaitu bahwa Latief tidak dapat hukuman mati, walaupun ia tokoh no. 2 dalam komplotan menculik jenderal. Ia hanya dapat hukuman penjara selama hidup. Mengapa begitu? Untuk saya dari mulanya jelas bahwa keterangan yang lebih sempurna lagi disimpan di suatu tempat DILUAR Indonesia, dengan pesan supaya lantas diumumkan kalau Laatief akan dibunuh! Suharto agaknya takut kalau kebenaran tentang pertemuan dengan Latief akan diumumkan! Dalam otobiografinya ia bohong sekali lagi: ia menceritakan bahwa ia bukan BERTEMU dengan Latief di rumah sakit, melainkan hanya lihat dari ruangan di mana anaknya dirawat dan di mana ia berjaga bersama Ibu Tien, bahwa Latief jalan di koridor melalui kamar itu! Siapa sudi percaya?

Juga aneh sekali bahwa Suharto, menurut keterangannya sendiri, jam 12 malam waktu keluar dari rumah sakit, bukan terus mencoba memberikan tanda berwaspada kepada jenderal-jenderal kawannya yang dalam tempo tiga atau empat jam kemudian akan ditimpa nasib malang, melainkan terus pulang ke rumah untuk tidur!

Hal yang menarik yaitu bahwa Kolonel Latief beberapa waktu silam telah meminta pada Suharto supaya hukumannya dikurangi. Dalam Far Eastern Economic Review dari 2 Agustus tahun ini (1990) diberitahukan bahwa memoirenya disimpan di satu bank - entah di mana.

Jadi, telah agak tentu bahwa Suharto terlibat dalam peristiwa 65 dengan berat. Menurut pasal 4 dari Keputusan Kepala Kopkamtib bertanggal 18 Oktober tahun 1968, dalam Golongan A yang paling berat termasuk semua orang yang terlibat dengan langsung, di antaranya dalam grup itu juga segala orang yang mempunyai pengetahuan lebih dahulu terhadap rencana kup dan yang lalui dalam melapor kepada yang berwajib. Jadi, Suharto pada malam itu seharusnya mesti melapor paling sedikit kepada Jenderal Yani! Dan tentu juga kepada Jenderal Nasution.

Artinya bahwa Suharto jauh lebih jelas 'terlibat' dalam peristiwa 1 Oktober '65 daripada semua korbannya yang selama 10 tahun atau 14 tahun ditahan di penjara atau di kamp konsentrasi seperti di pulau Buru, dengan alasan bahwa mereka terlibat 'tidak langsung' dalam peristiwa 30 S!

Artinya bahwa Suharto jauh lebih jelas 'terlibat' dalam peristiwa 1 Oktober '65 daripada semua korbannya yang selama 10 tahun atau 14 tahun ditahan di penjara atau di kamp konsentrasi seperti di pulau Buru, dengan alasan bahwa mereka terlibat 'tidak langsung' dalam peristiwa 30 S!

Jadi, sekarang telah jelas bahwa Suharto terlibat oleh karena mempunyai pengetahuan lebih dahulu. Lebih sukar membuktikan, bahwa ia juga aktif dalam suatu PROVOKASI.

Suharto tentu bukan satu-satunya orang yang punya pengetahuan lebih dahulu. Terang bahwa Kamaruzzaman (Sjam) memainkan peran penting sekali dalam provokasi. Ia militer, agaknya dalam Kodam V Jakarta. Tetapi siapa atasannya yang mendorongnya untuk mempersiapkan kup bersama tiga perwira tinggi itu, dengan maksud untuk memkompromitir baik PKI maupun Sukarno? Sekarang saya akan coba memberi analisa yang sedikit mendalam.

Memang ada orang lain yang punya pengetahuan lebih dahulu. Barangkali Sukarno sendiri punya sedikit pengetahuan lebih dahulu. Tetapi tentu ia tidak ingin PEMBUNUHAN jenderal yang dituduhi membangun Dewan Jenderal. Barangkali maksudnya hanya untuk menuntut pertanggungjawaban mereka. Sesudah ia dengar bahwa ada beberapa jenderal yang mati, ia memberi perintah supaya seluruh aksi itu berhenti. Mungkin juga bahwa tiga perwira tinggi itu, Untung, Latief dan Supardjo, bukan menghendaki pembunuhan, melainkan hanya menuntut pertanggungjawaban mereka.

Juga tidak jelas mengapa Aidit, ketua PKI, dijemput dari rumahnya pada malam itu dan diantarkan ke Halim. Rupanya pada saat itu ia punya kepercayaan kepada Sjam. Tetapi kami sama sekali tidak tahu peranan Aidit sesudah ia disembunyikan di

rumah seorang bintang di Halim; menurut segala kesaksian ia tidak muncul dalam perundingan-perundingan dan pertemuan-pertemuan, lagi pula tidak bertemu dengan Presiden Sukarno yang juga dibawa ke Halim. Oleh karena ia dibunuh tanpa proses, kami tidak punya keterangan dari dia sendiri - kami hanya punya keterangan dari Sjam yang membohong seolah-olah semua ia, Sjam, berbuat, terjadi atas perintah Aidit. Misalnya dalam proses Latief di tahun 1978 Sjam 'mengaku' bahwa bukan Latief, melainkan DIA yang memberi perintah untuk membunuh jenderal-jenderal yang masih hidup waktu dibawa ke Lubang Buaya - tetapi ia tambah seolah-olah pembunuhan itu juga atas perintah Aidit. Jadi seluruh perbuatan Sjam dimaksud untuk memburukkan nama PKI. Dan suatu alasan mengapa Latief TIDAK dapat hukuman mati, ialah oleh karena ia mungkir bahwa dia yang perintahkan membunuh jenderal, dan Sjam dalam proses itu mengakui bahwa ia sendiri yang memerintahkannya.

Tetapi segala 'jasanya' kepada grup Suharto tidak berguna untuk dia pribadi: beberapa tahun silam ia dieksekusi bersama pembantunya Pono dan Bono.

Agak jelas bahwa pada malam 30 September dua-dua, Sukarno dan Aidit yakin bahwa Dewan Jenderal sebenarnya ada dan bahwa Dewan itu berencana untuk merebut kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965. Begitu juga grup Untung, Latief dan Supardjo memang yakin bahwa Dewan Jenderal itu memang ada. Dalam prosesnya dalam tahun 1967 Sudisman turut menjelaskan bahwa ia masih yakin tentang eksistensi Dewan Jenderal itu dan rencana mereka.

Dalam tahun 1970 saya juga masih berpendapat bahwa Dewan Jenderal itu benar ADA. Begitu juga pendapat PKI, misalnya dalam otokritik mereka. Tetapi lama kelamaan saya mulai sangsikan apakah dewan itu benar ada dan aktif dalam tahun 1965. Sudah tentu, kalau peristiwa 65 memang suatu provokasi, bagaimana mungkin apa yang dimanakan Dewan Jenderal itu menjadi dalangnya: terlalu aneh kalau orang mengorbankan diri sendiri dengan tujuan politik! Apalagi telah ada cukup tanda bahwa Jenderal Yani agak taat kepada Sukarno.

Pikiran saya berubah sewaktu saya baca sekali lagi keterangan bekas Mayor Rudhito dalam proses Untung. Ia memberi suatu keterangan tentang suatu pita yang ia dengar, dan catatan tentang isinya yang ia terima pada tanggal 26 September 1965 dimuka gedung Front Nasional tentang Dewan Jenderal. Ia terima bukti itu dari empat orang, yaitu: Muchlis Bratanata, dan Nawawi Nasution, dua-dua dari N.U. dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang, dua-dua dari IPKI. Mereka itu mengajak Rudhito akan membantu pelaksanaan rencana Dewan Jenderal.

Di tape itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu pertemuan yang diadakan pada tanggal 21 September di gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rudhito ingat bahwa ia dengar suara dari Jenderal Mayor S. Parman, satu dari 6 jenderal yang lantas dibunuh pada tanggal 1 Oktober pagi. Parman menyebut, menurut pita dan catatan yang Rudhito dengar dan baca, suatu daftar orang yang harus diangkat sebagai menteri: di antara mereka juga sejumlah jenderal yang lantas diserang dan diculik pada 1 Oktober. Nasution disebut sebagai calon perdana menteri; Suprpto akan menjadi menteri dalam negeri, Yani diusulkan sebagai menteri HANKAM, Harjono menteri luar negeri, Sutojo menteri kehakiman dan Parman sendiri akan

menjadi jaksa agung. Ada juga nama lain yang disebut, diantaranya Jenderal Sukendro.

Rupanya tape itu tidak ditunjukkan sebagai bahan bukti pada sidang Obrus Untung; juga di sidang lain tidak muncul. Menurut Rudhito dan terdakwa Untung tape itu juga diserahkan kepada Jenderal Supardjo, yang pada tanggal 29 September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan. Supardjo rupanya terus memberikan dokumen itu pada Presiden Sukarno; dan menurut Rudhito dokumen itu juga ada di tangan kejaksaan Agung dan KOTRAR.

Kesimpulan saya: kemungkinan besar bahwa tape (yang tidak pernah muncul!) dan teks itu yang diberikan pada Rudhito, suatu pelancungan, pemalsuan. Maksudnya dan akibatnya: ialah sehingga grup Untung, pimpinan PKI dan Presiden Sukarno **DIYAKINKAN DAN PERCAYA**, bahwa komplotan Dewan Jenderal yang telah seringkali disebut sebagai kabar angin, sebenarnya **ADA** dengan rencana untuk merebut kekuasaan dari Sukarno dan kabinetnya. Dengan tipu muslihat ini, yang sebenarnya suatu provokasi, baik Sukarno maupun pimpinan PKI, termasuk Aidit, didorongi supaya meneruskan usahanya agar aksi Dewan Jenderal itu pada tanggal 5 Oktober 1965 dapat dihalangi!

Jadi sekarang timbul pertanyaan, golongan mana yang sebagai dalang merencanakan seluruh provokasi itu, dengan mengorbankan jiwa enam atau tujuh jenderal. Untuk saya, pada saat ini, sulit memberi jawaban. Saya sudah lanjut usia. Saya harap dalam ruangan ini barangkali orang Indonesia dapat meneruskan penyelidikan itu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang masih ada. Tentu gampang menyangka bahwa rencana itu tercipta dikalangan militer dan bahwa Kamaruzzaman-Sjam telah memainkan suatu peranan yang berarti dalam hal ini. Sangat mungkin juga, bahwa beberapa perwira agak tinggi dari angkatan udara, seperti **BARANGKALI** Obrus Heru Atmodjo, dan sudah tentu Mayor Sujono - yang sebagai saksi dan sebagai terdakwa seringkali memberi keterangan yang tidak masuk akal dan saling bertentangan - pastilah sangat aktif dalam merencanakan seluruh aksi. Sujonolah yang memperkenalkan Untung dan Latief dengan Sjam dan dua pembantuannya, Pono dan Bono. Juga ada kesaksian bahwa yang sebenarnya memberi perintah pada Gathut Sukrisno untuk membunuh jenderal-jenderal dan kapten Tendean yang masih hidup di Lubang Buaya, bukan Sjam melainkan Sujono.

Begitu juga pendapat Dr. Holtzappel yang telah menulis suatu analisa penting tentang peristiwa 1965 dalam "Journal of Contemporary Asia" pada tahun 1979. Pembunuhan yang sengaja itu juga tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi terhadap PKI.

Menurut Holtzappel, sebagai **DALANG** dalam Angkatan Bersenjata barangkali harus dianggap Jenderal Sukendro, pernah kepala military intelligence, dan kolonel Supardjo, Sekretaris KOTRAR yang pernah menjadi pembantu dari Sukendro.

Presiden Sukarno agaknya sangat benar dalam analisa pendeknya, waktu ia membela diri dimuka MPRS dengan keterangan tertulis 'Nawaksara' pada tanggal 10 Januari 1967 terhadap tuduhan-tuduhan. Kesimpulannya ialah: "1) kebinglirnya pimpinan PKI, 2) kelihatan subversi Nekolim, dan 3) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar".

Arti istilah Nekolim pada masa itu ialah: Neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme. Tentu maksudnya Sukarno bahwa ada dalang sebenarnya yang dari luar negeri. Bagaimana dengan Amerika Serikat, dan CIA? Sudah dari awal tahun 50an A.S. campur tangan dengan politik Indonesia. Telah mulai dengan Mutual Security Act dari tahun 1952, yang dahulu ditandatangani oleh menteri luar negeri Subardjo dari kabinet-Sukiman, dan yang lantas dibatalkan. Juga ada campurtangan AS sewaktu pemberontakan Dewan Banteng dan Permesta, dan sesudahnya waktu didirikan PRRI, dalam tahun 57-58. Peter Dale Scott, yang dulu menjadi diplomat dan sekarang guru besar di Universitas California, menulis beberapa karangan penting tentang campurtangan A.S. dalam tahun 60an: dahulu karangannya diumumkan dalam tahun 1975, dan lantas di "Pacific Affairs" tahun 1985: "The U.S. and the Overthrow of Sukarno". (Ada terjemahan dalam bahasa Belanda yang diterbitkan oleh Indonesia Media).

Dalam tahun 1990 ini seorang ahli sejarah yang saya tidak kenal namanya Brands, menulis seolah-olah sejak permulaan tahun 65 U.S.A. sama sekali tidak campur tangan lagi dalam politik Indonesia; beliau dengar ini dari tokoh CIA - masa dapat dipercaya? Sekarang kita sudah tahu dengan pasti bahwa dari awal Oktober 65 baik kedutaan A.S. maupun CIA sangat campur tangan, misalnya dengan memberi daftar berisi nama 5000 tokoh PKI dan organisasi kiri lain pada KOSTRAD - supaya mereka ditangkap; diplomat dan staf CIA tidak perduli kalau korbannya juga akan dibunuh! Tetapi bagaimana SEBELUM 1 Oktober?

Ada suatu keterangan dari ahli sejarah Amerika yang termasyur: Gabriel Kolko. Ia menulis dalam buku yang diumumkan dalam tahun 1988 (yang judulnya "Confronting the Third: U.S. Foreign Policy 1945-1980"), bahwa semua bahan dari kedutaan A.S. di Jakarta dan dari State Department (yaitu kementerian Luar Negeri) untuk tiga bulan SEBELUM 1 Oktober tahun 1965 sama sekali ditutup, dan tidak boleh diselidiki oleh siapapun juga. Dalam suatu keterangan yang ia tambah dari tanggal 13 Agustus 1990 ia mengatakan bahwa ia tidak kenal suatu masa manapun juga di kurun 1945 sampai 1968 yang ditutup dengan rahasia yang demikian untuk menyembunyikan informasi yang sungguh penting. Hal itu sangat aneh, dan menimbulkan persangkaan bahwa ada kejadian yang sangat rahasia yang harus ditutupi. Moga-moga penyelidikan yang sekarang akan dijalankan oleh Congress di Washington tentang daftar yang dibuat sesudah 1 Oktober 1965 oleh suatu tokoh dari kedutaan A.S. di Jakarta, tuan Martens, akan memberi kesempatan untuk anggota Congress supaya menuntut informasi tentang periode tiga bulan itu, dan supaya arsip itu akan 'de-classified', jadi akan dibuka untuk diselidiki oleh ahli sejarah dan dunia keilmuan umumnya. Kolko juga memberitahu bahwa Jenderal Sukendro pada tanggal 5 November 1965 minta pertolongan yang tersembunyi dari A.S. untuk menerima persenjataan kecil dan alat komunikasi yang akan dipakai oleh pemuda Islam (ANSOR) dan nasionalis bagi menghantem PKI. Kedutaan A.S. setuju akan mengirim barang-barang itu yang disembunyikan sebagai obat-obatan (Kolko, hal. 181), dan teks kawat-kawat dari Kedutaan A.S. ke Washington dari 5/11, 7/11, ... dan 11/11-65.

Tetapi kita harus insyaf bahwa selain dari CIA badan A.S. masih ada badan intelijens negara lain yang 25 tahun yang silam mungkin berkepentingan dalam menjatuhkan rezim Sukarno: misalnya Pemerintah Inggris, yang pada masa itu masih terlibat

dalam pertentangan antara Indonesia dan negeri baru yang didirikan oleh Inggris: Malaysia. Dan lagi negara Jepang mungkin juga harus diperhatikan sebagai calon dalam kejadian itu. Heran bahwa pada tanggal 2 Oktober 1965 hanya ada SATU surat kabar diluar negeri yang tahu siapa Jenderal Suharto dan dapat mengumumkan biografinya: Asahi Shimbun. Jepang lagi banyak mendapat manfaat dalam kerjasama dengan Orde Baru.

Tetapi kita harus insyaf bahwa selain dari CIA badan A.S. masih ada badan intelijens negara lain yang 25 tahun yang silam mungkin berkepentingan dalam menjatuhkan rezim Sukarno: misalnya Pemerintah Inggris, yang pada masa itu masih terlibat dalam pertentangan antara Indonesia dan negeri baru yang didirikan oleh Inggris: Malaysia.

Dan lagi negara Jepang mungkin juga harus diperhatikan sebagai calon dalam kejadian itu. Heran bahwa pada tanggal 2 Oktober 1965 hanya ada SATU surat kabar diluar negeri yang tahu siapa Jenderal Suharto dan dapat mengumumkan biografinya: Asahi Shimbun. Jepang lagi banyak mendapat manfaat dalam kerjasama dengan Orde Baru.

Mengapa masih penting untuk menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965? Saya akan baca pendapat saya yang baru ini saya umumkan dalam pendahuluan saya untuk buku kecil yang berisi sajak dari Magusig O. Bungai. Judul kumpulan sajak itu ialah "Sansana Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan". Dalam sajaknya Hutan pun bukan lagi di mana rahasia bisa berlindung, Magusig O. Bungai menulis tentang pembunuhan massal atas perintah Stalin:

50 tahun berlalu 50 tahun hutan Katyn menutup rahasia 15.000 prajurit polan dimasakre di tengah rimba 50 tahun kemudian waktu memaksa kekuasaan terkuat membuka suara menurut kebenaran

Menurut saya penting sekali bahwa Magusig mendorong anak-anak negerinya agar mencari kebenaran. Ahli sejarah Abdurahcman Suriomihardjo dalam "Editor" 2 Juni 1990 menulis, bahwa "pembukaan dokumen yang semula rahasia itu sangat membantu rekonstruksi sejarah".

Akan tetapi duduknya perkara masakre di Indonesia 25 tahun yang lalu agak berlainan dari pembunuhan Katyn yang menimpa 15.000 orang perwira Polandia. Kelainannya ialah oleh karena masakre di Indonesia itu pada hakikatnya tidak ada rahasianya sama sekali. Pembunuhan massal di Indonesia atas tanggung jawab Jenderal Suharto bukanlah suatu rahasia. Si penanggungjawab ini justru terus-menerus bangga akan perbuatannya. Terhadap masakre benar-besaran dalam tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965, Suharto tidak pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang luar biasa itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga tindakannya yang durjana itu. Tentang ini telah terbukti sekali lagi baru-baru ini. Dengan adanya pengakuan pers Amerika Serikat, bahwa staf kedubes Amerika Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan ormas yang dekat dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap dan dibunuh, tidak seorangpun juru bicara pemerintah Orde Baru yang memungkirkan telah terjadinya pembantaian massal, ataupun mengucapkan penyesalan mereka terhadap peristiwa yang terjadi 25 tahun

yang lalu itu. Mereka ini cukup berpuas diri dengan penegasan pengakuan: bahwa militer Indonesia sama sekali tidak perlu menerima daftar tersebut dari pihak asing, oleh karena mereka sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader PKI!

Juga di dalam otobiografinya, Suharto sama sekali tidak menunjukkan tanda, bahwa ia menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta. Justru sebaliknya, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela perbuatan mereka. Misalnya dalam hal kolonel Jasir Hadibroto, dalam "Kompas Minggu", 5 Oktober 1980 ia menceritakan pengakuannya kepada Suharto, yaitu bahwa ia telah membunuh ketua PKI DN Aidit tanpa keputusan pengadilan. Dengan jalan demikian Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang pengadilan, dan karenanya pula penguasa dengan leluasa dapat menyiarkan 'pengakuan' Aidit yang palsu. Kolonel ini justru dihadiahi Suharto dengan kedudukan sebagai gubernur Lampung. Dalam hal ini tentu saja Suharto sendirilah yang bertanggungjawab. Karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Jasir Hadibroto menerima perintah dari Suharto yang, menurut Jasir, mengatakan: "Bereskan itu semua!".

Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh rakyat Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera didalam tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI (Barisan Tani Indonesia) yang selalu dibenarkan dengan dalih, seakan-akan mereka dibunuh karena "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Barangkali benar, ada beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta 1 Oktober 1965 saat itu di Jakarta? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei 1990 menjadi jelas, bahwa sejak semula Suharto telah berketetapan hati untuk menghancurkan-leburkan PKI. Dalih umum yang dikemukakan oleh Mahmilub atau pengadilan semacamnya adalah bahwa semua anggota atau simpatisan PKI 'terlibat dalam peristiwa G30S-PKI'. Dalih demikian pulalah yang dipakai pemerintah untuk membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10.000 orang yang dipandang sebagai simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru, yang pada umumnya selama 10 tahun lebih. Mereka itu dianggap sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam Gestapu/PKI'. Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat LANGSUNG adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu, tak lain tak bukan ialah Jenderal Suharto sendiri.

Semua bahan-bahan itu tentu sangat penting untuk meninjau kembali sejarah peristiwa 1 Oktober 1965.

Ada beberapa hal lagi yang perlu diterangkan. Di tengah-tengah terjadinya pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejumlah kader PKI yang berhasil terluput dari malapetaka berhasil mendapatkan tempat berlindung di daerah pegunungan di Kabupaten Blitar Selatan. Di sini mereka hidup bersatu dengan kaum tani miskin setempat, sehingga untuk sementara mereka berhasil membangun lubang perlindungan untuk menyelamatkan jiwa mereka. Akan tetapi pada 1968 tentara dengan operasi Trisula menghancurkan



tempat perlindungan ini, dan menangkap serta membunuh sebagian besar mereka itu.

Dalam tahun 70an 'tokoh-tokoh Blitar Selatan' ini dihadapkan ke muka pengadilan. Di pengadilan umumnya mereka tidak dituduh 'terlibat persitiwa G30S/PKI'. Jelas, bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan 'keterlibatan' demikian. Maka merekapun lalu dituduh sebagai 'subversi', yang sejak 1963 juga bisa mengakibatkan jatuhnya hukuman mati bagi siterdakwa. Ini berarti, bahwa pada hakikatnya mereka dituduh subversi untuk kebanyakan dijatuhi hukuman mati, semata-mata karena mereka berusaha menyelamatkan diri dari pembunuhan massal yang sama sekali haram itu. Rencana pembunuhan massal ini ternyata akhirnya terbukti jelas oleh siaran pengakuan-pengakuan di dalam pers Amerika Serikat tersebut di atas.

Tokoh-tokoh seperti Munir, Gatot Lestaryo, Rustomo dan Djoko Untung tewas dieksekusi dalam tahun 1985. Tapi pada saat inipun masih ada empat tokoh lagi, yang semuanya berasal dari peristiwa Blitar Selatan itu, yang diancam oleh pelaksanaan eksekusi. Penting sekali bagi dunia luar agar berusaha dengan segala daya untuk menyelamatkan jiwa Ruslan Wijayasastra, Asep Suryaman, Iskandar Subekti dan Sukatno - dan lebih dari itu untuk menyelamatkan jalannya kebenaran sejarah. Untuk ini penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya.

Ada sebuah kewajiban lagi yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara Gerwani di dalam peristiwa 1 Oktober 1965. Dari semula penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di Lubang Buaya berbuat paling keji dan tak tahu malu. Melalui media pers bertahun-tahun disiarkan, seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara 'harum bunga' sambil menari-nari lenso untuk mengantar jiwa jenderal-jenderal itu, melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, dibagi-bagikan pisau silet, dan lantas ikut ambil bagian dalam perbuatan jahat serta menyiksa jenderal-jenderal itu sebelum mereka tewas. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian terbentuklah bayangan, seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur, jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan.

Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada suatu proses, di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi dalam sidang yang, menurut Sudisman 'terbuka tapi tertutup' dan 'serba umum tapi tidak umum', bernama Jamilah dan yang mereka gunakan sebagai dasar bangunan dongengan itu, adalah seorang perempuan bayaran belaka. Beberapa tahun yang lalu Profeosr Benedict Anderson, di dalam majalan ilmiah "Indonesia", memuat keterangan resmi dari lima dokter yang memeriksa mayat-mayat para jenderal itu sesudah diangkat dari Lubang Buaya. Jauh sebelum itu, keterangan resmi para dokter ini pun telah diumumkan oleh Sukarno di depan sidang kabinet, sengaja untuk membantah dongengan yang beredar saat itu, yang antara lain mengatakan bahwa mata para jenderal itu telah dicungkil dan bahwa kemaluan mereka dipotong-potong sebelum ditembak mati. Keterangan dokter-dokter resmi itu ringkasnya mengatakan, bahwa tidak ada tanda penyiksaan pada korban, dan tidak sebiagi matapun dicungkil sebelum mereka dibunuh.

Penting sekali membersihkan Gerwani dari tuduhan yang tidak adil itu. Terutama sangat perlu, oleh karena sebelum 1965 Gerwani sangat aktif dalam membela dan



memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti diketahui, sejak Orde Baru berkuasa semua perjuangan untuk kepentingan perempuan melalui pergerakan yang bebas dan mandiri, dianggap oleh penguasa sebagai kegiatan yang harus diharamkan dengan mengingat kepada 'perbuatan Gerwani' dalam akhir taun 1965 itu.

Ada satu tuduhan lagi yang harus dibantah. Dari sejak awal telah disiarkan cerita, bahwa seolah-olah di rumah-rumah orang PKI terdapat (kecuali cungkil mata dan kursi listrik) daftar nama-nama orang yang memusuhi komunisme, dan yang harus dibinasakan sesudah PKI beroleh kemenangan dengan gerakannya di akhir 1965 itu. Tidak selembaar daftar seperti itu bisa dipertunjukkan di pengadilan manapun. Sekaranglah, sesudah adanya pengakuan pers Amerika Serikat itu, kita ketahui bahwa sesungguhnya daftar orang-orang yuang harus dibinasakan itu memang ada. Tetapi, inilah bedanya, daftar yang ada justru bukan daftar bikinan komunis, melainkan daftar yang diberikan oleh Kedubes Amerika Serikat kepada Suharto yang memuat ribuan nama komunis Indonesia yang harus dibunuh!

Dongeng ini seperti dongeng tentang maling yang teriak "Tangkap Maling!"

Penting sekali kesadaran dibangun kembali: Bahwa sebelum 1965 PKI merupakan kekuatan yang patut dibanggakan, oleh karena banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh partai dan gerakannya itu. Di dunia Barat sekarang timbul kecenderungan anggapan, bahwa komunisme, dan bahkan sosialisme, telah gagal sebagai ideologi. Kesimpulan seperti ini salah sama sekali! Yang gagal adalah SEJUMLAH PEMERINTAH yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Yang terbukti gagal adalah, bahwa sistem diktatorial tanpa cukup peranan dari rakyat bawah tidak bisa bertahan dalam jangka panjang.

Jadi, untuk Indonesia, kegagalan seperti itu hanya bisa berlaku bagi rezim Suharto. Rezim Suharto pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem diktatorial, dengan berbedak demokrasi yang semu belaka. Tetapi sebaliknya, baik ideologi maupun praktek, komunis di Indonesia sama sekali tidak mengalami kegagalan. Ia hanya ditimpa oleh malapetaka dan penindasan secara perkosa, yang ditolong oleh kekuatan anti komunis luar negeri.

Tentu saja ada sementara tokoh komunis yang, dalam menghadapi keadaan xbaru dan sangat sulit pada tahun-tahun 60an, melakukan kesalahan penting. Dalam hal ini tentu saja sangat perlu adanya otokritik yang mendalam. Tetapi cukup alasan bagi setiap penganut ideologi kiri untuk mencamkan kata-kata penulis kumpulan puisi itu, yaitu agar 'mulai menghargai harkat diri' dan memulihkan perasaan bangga diri.

Terima kasih!

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://www.media-indonesia.com/>

## FOKUS MINGGU

Minggu, 25 September 2005

### Komunisme di Mata Kalangan Muda

BANYAK orang beranggapan ideologi komunis telah runtuh bersamaan dengan robohnya tembok Berlin. Namun, ajaran komunis sendiri tetap hidup. Berkaitan dengan hal itu, Media merangkum beberapa pandangan dan pendapat kaum muda terhadap paham komunisme.

Di mata Humas Forkot Mixil Minamunir, negara tidak berhak melarang tumbuhnya sebuah ideologi. Apalagi, Indonesia mengaku sebagai negara demokrasi. Maka, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menghargai perbedaan pendapat dan pemikiran, termasuk komunisme.

"Sebarkan saja, lalu biarkan nanti masyarakat yang menilai. Dalam hal ini, pemerintah hanya bertugas mengawasi perilaku dan cara menyebarkan paham itu," ujar mahasiswa angkatan 1997 Universitas Islam Negeri Sjarif Hidayatullah Jakarta, jurusan hukum itu.

Diwawancara terpisah, Gridwelly anggota senat dan aktivis mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Jakarta mengatakan paham komunisme bukan masalah bagi sebuah bangsa. Yang perlu dikhawatirkan justru adanya oknum yang menyalahgunakan paham untuk kepentingan tidak baik. Menurut Grid, demikian ia akrab disapa, mungkin saja orang yang berpahaman komunis justru bertingkah laku lebih baik dibanding orang yang mengaku bukan komunis. "Jadi jangan terlalu dangkal dan memolitisasi semua persoalan," tandasnya.

Berbeda dengan Mixil dan Grid, Ketua Umum KAMMI Yuli Widy Astono mengatakan paham komunis sekarang dikemas sedemikian rupa, seolah-olah memang melakukan keberpihakan pada rakyat. Tapi kenyataannya, negara yang menganut paham komunis tetap miskin, dan akhirnya dalam berinteraksi menerima pasar bebas dan berkompromi dengan kapitalis. Di Indonesia, orang tidak mau mengaku menganut ideologi komunis. Jadi sulit. Hanya mengira-ngira tidak bisa membuktikan. Apalagi, komunisme dekat dengan sosialisme," tuturnya.

Berbicara tentang paham komunis, aktivis perburuan Dita Indah Sari menegaskan, di mata anak muda komunis sudah tidak laku dijual, namun sebagai kajian masih tetap relevan. "Sejak 1980-an sudah dianggap tidak layak lagi. Tapi sebagai gagasan tetap hidup karena Karl Marx sendiri seorang filsuf," kata Dita sambil menambahkan aliran komunis sebagai gerakan hampir tidak ada lagi. Terlebih lagi pusat komunis di Eropa, yakni Uni Soviet, sudah runtuh tatkala Presiden Rusia Mikhail Gorbachev memaklumkan keterbukaan (glasnost).

Meski demikian, paham sosialis yang sering dianggap dekat dengan komunis masih terus berkembang di kalangan anak muda. Dia mencontohkan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tidak pernah menyangkal beraliran kiri.

"Tapi saya ingin kemukakan, paham sosialis sulit berkembang di Indonesia lantaran sikap politik pemerintah. Padahal, paham sosialis sudah ada sejak zaman kemerdekaan. Founding father negeri ini, Soekarno-Hatta pun berpandangan sosialis dengan ekonomi kerakyatan. Jadi, penolakan pemerintah terhadap ide maupun gagasan sosialis merupakan pengingkaran terhadap para pendahulu bangsa," katanya.

Sampai sekarang, pemerintah Indonesia masih menganggap sosialis sebagai penyakit yang harus dibasmi alias tidak boleh berkembang.

Sosialis kerap diidentikkan dengan komunis. Rezim yang berkuasa memberi stigma negatif untuk mempertahankan kekuasaan dan menyingkirkan lawan-lawan politik. Stigmatisasi itu dijadikan senjata penguasa pada era Orde Baru (Orba).

"Selama 32 tahun berkuasa pemerintah Orde Baru berhasil menjejali masyarakat dengan menumbuhkan fobia terhadap komunisme. Mereka benar-benar berhasil," tukasnya. Untuk mendobrak stigma tersebut, setahun silam Dita mendeklarasikan berdirinya Partai Oposisi Rakyat (Popor), tetapi partai itu ditolak rakyat Banten.

Saat itu, Pemuda Banten melakukan berbagai cara untuk menunjukkan penolakan. Di antaranya dengan memasang spanduk. 'Pemuda Banten menolak adanya partai berpaham komunis'. Demikian menurut Dita tulisan spanduk yang dibentangkan kala mereka merangsek kantor DPW Popor di Banten. Akibatnya, banyak dokumen dan kartu anggota yang hilang sehingga Popor tidak lolos verifikasi. (Lng/\*/\*/\*M-2).

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Ringkasan

## FAKTA KORBAN TRAGEDI PERISTIWA 65

### 1. JAMRUD KHATULISTIWA

yang demikian luas dengan kekayaan alam yang melimpah merupakan sasaran yang sangat menarik bagi negara-negara maju untuk bisa memanfaatkan kekayaan Indonesia, di samping juga memiliki jumlah penduduk yang demikian banyak sehingga sangat potensial sebagai tenaga kerja yang murah baik dalam proses produksi maupun sebagai tenaga cadangan diwaktu perang, di samping sebagai pasar yang potensial bagi hasil-hasil industri negara-negara maju. Karena kelemahan bangsa Indonesia sendirilah akhirnya menjadi jajahan bangsa lain (Belanda, Jepang dan lainnya).

### 2. INDONESIA DI TENGAH PERANG DINGIN

Perang Dunia II berakhir dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, terjadilah era perang dingin antara blok Barat (kapitalis) dan blok Timur (sosialis) yang sebenarnya berlanjut sampai era saat ini (tahun 2005) dengan kadar yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan situasinya. Era perang dingin ini sangat mempengaruhi rakyat Indonesia, sehingga secara garis besar rakyat Indonesia juga terbelah dua, yaitu yang setuju dengan paham kapitalis (golongan kanan) dan yang setuju dengan paham sosialis (golongan kiri).

ini diketahui benar oleh negara-negara maju sehingga mereka berlomba-lomba menanamkan pengaruhnya di Indonesia, terutama negara-negara kapitalis sesuai dengan kepentingan negaranya masing-masing.

### 3. PERISTIWA MADIUN 1948 (KONSPIRASI POLITIK KAUM KOLONIALIS/ IMPERIALIS MELIKUIDASI RI)

tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta dibentuk dengan programnya: Melaksanakan hasil persetujuan Renville. Mempercepat terbentuknya Negara Indonesia Serikat (berserikat juga dengan Belanda)Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang RI (RERA)Pembangunan.

Hatta inilah yang dinilai oleh kaum kiri sebagai pemerintahan yang paling tunduk dan akan menyerahkan kedaulatan RI kepada Belanda, sehingga timbul ketidakpuasan yang luas terutama karena ada rencana dari Hatta untuk merasionalisasi TNI kemudian membentuk tentara federal bekerjasama dengan Belanda.

- Mulai bulan Februari 1948 Kolonel A.H. Nasution bersama Divisi Siliwangi hijrah dari Jawa Barat menuju Yogyakarta sebagai pelaksanaan dari perjanjian Renville kemudian ditempatkan tersebar di wilayah Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur khususnya di daerah yang kekuatan kaum kirinya cukup kuat seperti di Solo dan Madiun yang dimaksudkan untuk persiapan membersihkan kaum kiri tersebut. Pasukan Siliwangi tersebut segera menjadi pasukan elite pemerintah Hatta dengan kelengkapan tempur yang lebih baik sehingga timbul iri hati pada pasukan di luar Divisi Siliwangi.

- Pada bulan April 1948 terjadi demonstrasi terutama dari pelajar di Jawa Timur menentang Rasionalisasi dan Rekonstruksi.

- Pada bulan Mei 1948 di Solo tentara Divisi Panembahan Senopati melakukan demonstrasi menentang RERA.

- Pada tanggal 2 Juli 1948 komandan Divisi Panembahan Senopati Kolonel Sutarto dibunuh oleh tembakan senjata api orang tak dikenal, kemudian diikuti dengan penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa orang kiri antara lain Slamet Widjaya dan Pardio serta beberapa perwira dari Divisi Panembahan Senopati a.l. Mayor Esmara Sugeng, Kapten Sutarto, Kapten Suradi, Kapten Supardi dan Kapten Mudjono diduga kuat dilakukan oleh Divisi Siliwangi sebagai kepanjangan tangan pemerintahan Hatta, walaupun kemudian pembunuh Kolonel Sutarto ditangkap tetapi pemerintah tidak mengadilinya bahkan oleh Jaksa Agung ketika itu malahan dibebaskan dengan alasan tidak dapat dituntut secara hukum (yuridisch staats-rechtelijk).

- Penculikan dan pembunuhan ini terus berlanjut terhadap orang-orang kiri maupun anggota Divisi Panembahan Senopati sehingga menimbulkan keresahan dan suasana saling curiga-mencurigai dan ketegangan tinggi.

- Pada tanggal 21 Juli 1948 diadakan pertemuan rahasia di Sarangan Jawa Timur antara Amerika Serikat yang diwakili oleh Gerard Hopkins (penasihat urusan politik luar negeri) dan Merle Cochran (Wakil AS di Komisi Jasa-Jasa Baik PBB) dengan 5 orang Indonesia yaitu: Wakil Presiden Moh. Hatta, Natsir, Sukiman, R.S. Sukanto

(Kapolri) dan Mohammad Rum yang menghasilkan rencana kompromi berupa likuidasi bidang ekonomi, politik luar negeri, UUD 45 dan juga Rekonstruksi dan Rasionalisasi (RERA) di bidang Angkatan Perang dengan menyingkirkan orang-orang (pasukan) yang dicap sebagai golongan kiri/merah, dan ini terkenal dengan Red Drive Proposal atau usulan pembasmian kaum kiri.

- Pada tanggal 13 September 1948 terjadilah pertempuran antara Divisi Panembahan Senopati dibantu ALRI melawan Divisi Siliwangi yang diperkuat pasukan-pasukan lain yang didatangkan ke Solo oleh pemerintah Hatta.

- Pada tanggal 15 September 1948 dilakukan gencatan senjata yang disaksikan juga oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman, petinggi-petinggi militer RI dan juga Residen Sudiro. Divisi Panembahan Senopati mentaati gencatan senjata namun lawan terus melakukan aksi-aksi yang agresif dan destruktif.

- Sementara itu sebagian anggota Politbiro CC PKI yang tinggal di Yogyakarta memutuskan untuk berusaha keras agar pertempuran di Solo dilokalisasi dan mengutus Suripno untuk menyampaikan hal tersebut kepada Muso, Amir Syarifudin dan lain-lain yang sedang keliling Jawa. Rombongan Muso menyetujui putusan tersebut. Jadi dalam hal ini kebijaksanaan PKI sesuai atau sejalan dan menunjang kebijakan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

- Sementara itu penculikan-penculikan dan pembunuhan terhadap orang-orang dan personil militer golongan kiri semakin mengganas dengan puncaknya pada tanggal 16 September 1948 markas Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) di Jalan Singosaren Solo diserbu dan diduduki oleh kaki tangan Hatta (Siliwangi) sehingga pertempuran Solo semakin menghebat.

- Aksi pembersihan orang-orang kiri ini tidak hanya terjadi di Solo tetapi meluas ke Madiun dan daerah lainnya dan hasil RERA ini TNI yang tadinya berkekuatan 400.000 hanya tinggal 57.000. Sementara itu ancaman Belanda masih di depan mata terbukti kemudian dengan Agresi Militer Belanda ke II.

- Oleh pemerintah Hatta didatangkanlah ke Madiun pasukan-pasukan Siliwangi yang langsung menduduki beberapa pabrik gula, mengadakan latihan-latihan militer serta menindas para buruh pabrik gula dengan membunuh seorang anggota Serikat Buruh Gula bernama Wiro Sudarmo serta melakukan pemukulan-pemukulan dan intimidasi terhadap para buruh. Penempatan pasukan ini tidak dilaporkan kepada komandan Teritorial Militer setempat sehingga menimbulkan ketegangan dan kemudian kesatuan militer setempat yaitu Brigade 29 atas persetujuan Komandan Teritorial Militer setempat bergerak melucuti pasukan Siliwangi.

- Dalam keadaan panas, kacau dan tak terkendali itu, karena Residen Madiun tidak ada di tempat dan Walikota sakit, maka pada tanggal 19 September 1948 Front Demokrasi Rakyat (FDR) mengambil prakarsa untuk mengangkat Wakil Walikota Madiun Supardi sebagai pejabat residen sementara dan pengangkatan ini telah disetujui baik oleh pembesar-pembesar sipil maupun militer dan dilaporkan ke pemerintah pusat di Yogyakarta serta dimintakan petunjuk lebih lanjut. Peristiwa inilah yang mengawali apa yang disebut sebagai "Peristiwa Madiun".

- Pada tanggal 19 September 1948 malam hari pemerintah Hatta menuduh telah terjadi “Pemberontakan PKI” sehingga dikerahkanlah kekuatan bersenjata oleh Hatta untuk menumpas dan menimbulkan konflik horisontal dengan korban ribuan orang terbunuh, baik golongan kiri, tentara maupun rakyat golongan lain.

- Pada tanggal 14 Desember 1948 sebelas orang pemimpin dan anggota PKI dibunuh di Dukuh Ngaliyan Kelurahan Halung Kabupaten Karanganyar Karesidenan Surakarta pada jam 23.30 yaitu: 1. Amir Syarifudin, 2. Suripno, 3. Maruto Darusman, 4. Sarjono, 5. Dokosuyono, 6. Oei Gee Hwat, 7. Haryono, 8. Katamhadi, 9. Sukarno, 10. Ronomarsono, 11. D. Mangku. Sementara itu lebih kurang 36.000 aktivis revolusioner lainnya ditangkap dimasukkan dalam penjara dan sebagian dibunuh tanpa proses hukum a.l. di penjara Magelang 31 anggota dan simpatisan PKI, di Kediri berpuluh-puluh orang termasuk Dr. Rustam, anggota Fraksi PKI dan BP KNIP, di Pati antara lain Dr. Wiroreno dan banyak lagi yang lainnya.

- Berdasarkan fakta pada saat Amir Syarifudin menjadi Perdana Menteri dan memimpin pemerintahan, karena dikhianati dalam Perjanjian Renville maka secara kesatria dan demokratis menyerahkan kembali mandat pemerintahan kepada Presiden Soekarno, sehingga sangat naif menuduhnya bersama golongan kiri melakukan pemberontakan dan membentuk pemerintahan Soviet-Madiun.

- Amir Syarifudin bekas Perdana Menteri Republik Indonesia yang juga berada di kota itu (Madiun) telah membantah segala sesuatu yang disiarkan dari Yogyakarta pada masa itu. Penjelasaannya melalui radio, “Undang-Undang Dasar kami adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, bendera kami adalah Merah Putih dan lagu kebangsaan tidak lain dari Indonesia Raya”, seperti disiarkan pada tanggal 20 September 1948 oleh Aneta, kantor berita Belanda di Indonesia.

- Bahwa kolaborasi antara pemerintah Hatta dengan pihak kolonialis Belanda maupun imperialis Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya telah berhasil memecah belah persatuan dan kesatuan serta membelokkan jalannya revolusi Indonesia.

- Pada tanggal 19 Desember 1948 itu pula Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta dengan perlengkapan perang bantuan Amerika, hal itu terjadi setelah politik Red Drive Proposal sukses dilaksanakan oleh pemerintah Hatta demi tercapainya persetujuan Roem-Royen yang merugikan RI yang dilanjutkan dengan terselenggaranya Konferensi Meja Bunda (KMB) yang dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949, dan kemudian lahirlah Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi RIS-nya dan hasil yang sangat merugikan Indonesia a.l. Irian Barat masih di tangan Belanda dan hutang Hindia Belanda sebesar US\$ 1,13 miliar menjadi tanggungan RI (hutang ini antara lain adalah biaya untuk memerangi RI), juga terjadi penurunan pangkat dalam APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia) bila menjadi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat).

- Pada tahun 1954, meskipun sudah kadaluwarsa, Aidit dihadapkan pada pengadilan di Jakarta mengenai Peristiwa Madiun. Dalam hal ini PKI dituduh mengadakan kudeta. Dasarnya adalah pidato Hatta yang menyatakan entah benar entah tidak bahwa PKI mendirikan negara Soviet di Madiun dengan mengangkat wakil walikota Supardi jadi Residen sementara untuk mengisi kekosongan. Ini dianggap melanggar

KUHP pasal 310 dan pasal 311. Dalam persidangan Aidit, diminta agar Moh. Hatta tampil sebagai saksi. Jaksa menyatakan keberatan atas pembuktian yang akan diajukan oleh Aidit, maka jaksa harus mencabut tuduhan pasal-pasal tersebut di atas. Pada akhirnya keberatan jaksa dan tuduhan terhadap Aidit melanggar pasal 310 dan pasal 311 KUHP dicabut. Karenanya Aidit tak dapat dituntut dan bebas tanpa syarat.

Kesimpulan dari peristiwa Madiun

imperialis kolonialis pimpinan Amerika Serikat dalam menerapkan politik pembersihan kaum kiri (Red Drive Proposal) di Indonesia sebagai bagian makro politiknya untuk membendung komunisme, telah mempengaruhi pemerintah Hatta agar mau membersihkan orang-orang kiri (komunisme) dari pemerintahan, terutama dari Angkatan Perang sebagai salah satu syarat mutlak pengakuan negara Republik Indonesia oleh dunia internasional (pihak barat).

Pemerintah Hatta menerima dan melaksanakan tawaran tersebut antara lain dengan membuat program Reorganisasi dan Rasionalisasi (RERA) di lingkungan angkatan perang yang kemudian menimbulkan gelombang penolakan yang luas.

Untuk meredam penolakan tersebut dilakukan upaya-upaya yang sistematis, antara lain dengan melakukan teror berupa pembunuhan, penculikan, penahanan, dan intimidasi lainnya terutama kepada kaum kiri, yang kemudian dikenal dengan Peristiwa Solo.

Peristiwa Madiun sama sekali bukanlah pemberontakan PKI apalagi fitnah bahwa PKI telah mendirikan Negara Soviet Madiun, tetapi merupakan rekayasa jahat pemerintah Hatta guna mendapatkan momen (kondisi dan situasi) yang tepat untuk dapat digunakan sebagai dalih (dasar) untuk menyingkirkan (membasmi) golongan kiri dari pemerintahan maupun angkatan perang, yang kemudian mendapat perlakuan dari rakyat yang konsekuen anti kolonialis/imperialis.

#### 4. GEJOLAK DALAM PENOLAKAN RERA DAN KMB.

Gejolak sebagai akibat penolakan RERA dan KMB ini terjadi dimana-mana antara lain:

Peristiwa Batalion 426 di Kudus tahun 1950 karena menolak dilucuti dan diberlakukan RERA, batalion ini diserbu dan melarikan diri ke barat, sebagian bergabung dengan DI/TII di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Peristiwa Merbabu Merapi Complex (MMC) terjadi di daerah Semarang, Solo, Magelang dan Yogyakarta yaitu pejuang-pejuang revolusi yang menolak RERA dan KMB. Peristiwa Barisan Sakit Hati di Cirebon (BSH), yaitu para pejuang yang menolak RERA dan KMB. Peristiwa APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dipimpin Westerling, yaitu bekas KNIL yang tidak puas kepada pemerintah RIS. Pergolakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.

Gejolak-gejolak yang terjadi ini membuktikan keberhasilan politik pecah belah (*divide et empera*) kaum kolonialis Belanda dengan sekutunya kaum imperialis Amerika dan antek-anteknya.

## 5. MEMPERTAHANKAN NKRI, PANCASILA DAN UUD 1945

### Republik Indonesia Serikat (RIS)

RIS hanya mampu bertahan beberapa bulan dan akhirnya bubar kembali menjadi NKRI, ini karena pemimpin dan rakyat Indonesia telah sadar akan politik pecah belah dari pihak nekolim dan antek-anteknya yang akan tetap mempertahankan pengaruhnya di Indonesia terbukti antara lain dengan adanya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) dan pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pimpinan Westerling.

### Pemberontakan-Pemberontakan

Di samping itu pihak kolonialis dan antek-anteknya tak henti-hentinya menggoyang Indonesia dengan adanya pemberontakan PRRI dan PERMESTA yang secara aktif dibantu oleh Amerika Serikat, bahkan seorang pilot CIA yang menyerang Indonesia berhasil ditembak jatuh di Ambon dan ditangkap yaitu Allan Pope. Kecuali itu pihak Amerika Serikat juga membantu DI/TII di Aceh serta mendalangi percobaan-percobaan pembunuhan Presiden Soekarno (a.l. peristiwa Cikini, peristiwa Cimanggis, peristiwa Makasar, penembakan Idul Adha, peristiwa Raja Madala, dll).

### Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada sidang-sidang di Konstituante telah terbukti bahwa kaum Nasionalis sejati yaitu PKI dan PNI adalah yang mati-matian mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai satu-satunya pilihan, sehingga Konstituante menemui jalan buntu sampai keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana didekritkan kembali ke UUD 1945 dengan PKI dan PNI menjadi pendukung setiannya. Karena golongan lain menghendaki dasar negara yang bukan Pancasila

### Pendukung Setia Bung Karno

PKI dan PNI merupakan pendukung setia politik Bung Karno. Dukungan ini terwujud antara lain dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Manipol-USDEK, perebutan Irian Barat, pengganyangan Malaysia. Kecuali itu keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) tahun 1960 didukung sepenuhnya oleh PKI dan PNI, namun di lain pihak banyak yang tidak senang Bung Karno intim dengan PKI terutama golongan kanan dan neokolonialis termasuk Amerika Serikat yang ingin meluaskan pengaruhnya di Indonesia dengan menjanjikan bantuan namun ditolak Bung Karno. Dengan kata-katanya yang terkenal GO TO HELL WITH YOUR AID.

### Bung Karno Dijadikan Presiden Seumur Hidup

Melihat besarnya kekuatan PKI yang tumbuh pesat menjadi partai terkuat, maka pihak nekolim khawatir bila pemilu digelar PKI akan menang mutlak dan otomatis presidennya juga dari orang PKI. Oleh karena itu pihak Angkatan Darat melalui Jenderal A.H. Nasution dengan mengajak Suwiryono (ketua PNI waktu itu) mengusulkan agar Bung Karno dijadikan Presiden seumur hidup, agar tidak perlu dilakukan pemilu, sehingga dengan demikian tertutuplah kesempatan bagi orang PKI menjadi Presiden, dan ini adalah sebuah akal licik dari Angkatan Darat (hal ini juga diakui sendiri oleh Brigjen Suhardiman).



## Pembubaran Partai Masyumi dan PSI

Presiden Soekarno membubarkan partai Masyumi dan PSI karena antara lain banyak pimpinannya terlibat dalam pemberontakan DI/TII maupun PRRI, PERMESTA. Banyak kalangan partai tersebut menuduh bahwa ini adalah karena politik PKI, sehingga menambah ketegangan dan rasa permusuhan secara horisontal antara lain dengan timbulnya peristiwa Kanigoro di Kediri, di Jawa Tengah dan di tempat-tempat lainnya.

## 6. PERISTIWA 65

### A. PROLOG

#### 1. Pihak Nekolim

Dari awal memang pihak Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah menyiapkan dan melaksanakan beberapa skenario untuk menguasai Indonesia antara lain dengan:

- a. perjuangan kemerdekaan Indonesia tetapi Indonesia harus membasmi komunis lebih dulu dan akan menyadarkan aliansi dengan Barat (Peristiwa Madiun-KMB dan RIS)
- b. Menghasut beberapa daerah untuk berontak agar RI lemah (PRRI, PERMESTA, RMS, dan DI/TII) dan menjadi boneka AS.
- c. Mendukung perjuangan memasukan Irian Barat ke Indonesia dengan imbalan agar AS bisa menguasai bahan baku di Indonesia tetapi gagal karena ditolak Bung Karno.
- d. Usaha menggulingkan Pemerintahan Soekarno.
  - Pemerintahan Soekarno yang semakin ke “kiri” dinilai banyak merugikan kepentingan blok Barat (Nekolim) sehingga diambil langkah untuk menggulingkannya dengan berbagai cara antara lain:
  - Tetap memberikan bantuan bagi Angkatan Darat Indonesia untuk mendukung peranan anti komunis dan membentuk jaringan kerja intelijen guna usaha untuk menggulingkan Soekarno.
  - Penyiaran desas-desus dan penyesatan informasi, antara lain dari koran Malaysia seolah-olah PKI akan menggulingkan Jenderal Nasution (KSAD) dengan cara menyusupkan orang ke Angkatan Darat dan lain-lain yang menambah panas dan ganasnya perpolitikan di Indonesia.
- e. Isu Dewan Jenderal.

Pada awalnya isu Dewan Jenderal yang akan mengambil alih kekuasaan itu dianggap isu fitnah dari PKI, tetapi dalam kenyataan yang terjadi Jenderal Soeharto telah merekayasa dan mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, mengganti semua pejabat dari tingkat Menteri, Gubernur, Bupati sampai lurah dengan orang-orang Angkatan Darat yang setia kepadanya sedangkan pejabat-pejabat yang tidak loyal kepada Soeharto dicopot bahkan

ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, disiksa dan dibunuh untuk dapat menegakan dan melanggengkan kekuasaannya.

Sebenarnya ada hasil rekaman rapat Dewan Jenderal oleh bekas Mayor Rudhito dan pengakuan Brigjen Sukendro, namun isu kesaksian tersebut tidak pernah dipersoalkan lagi.

f. Isu Dokumen Gilchrist.

Bersamaan dengan adanya isu Dewan Jenderal maka muncul dokumen Gilchrist yang menyebutkan adanya “Our Local Army Friends” yang seolah-olah memperkuat isu Dewan Jenderal. Tetapi ternyata kemudian bahwa isu Dewan Jenderal dan dokumen Gilchrist merupakan jebakan bagi kekuatan revolusioner agar memuluskan Jenderal Soeharto ke jenjang kepala negara (Presiden).

2. Kondisi Politik Dalam Negeri.

Situasi panas di bidang politik menjalar ke seluruh roda kehidupan bangsa Indonesia, termasuk suasana saling curiga-mencurigai, rivalitas yang berlebihan, saling tuduh dan lain-lain, namun yang paling menonjol adanya:

a. Isu Angkatan ke V dan senjata dari RRC.

Pada kunjungan Menlu Subandrio ke RRC, PM Chou En Lai menjanjikan untuk mempersenjatai 40 batalion tentara secara lengkap, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G30S. Pada awal tahun 1965 Bung Karno mempunyai ide tentang angkatan ke V yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi kalangan militer (AD) tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai karena pihak militer menuduh itu ulahnya PKI. Hal ini memang direkayasa oleh CIA melalui pemberitaan di koran Bangkok yang mengutip berita dari koran Hongkong.

b. Isu sakitnya Bung Karno.

Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi tidak ada alasan sakitnya Bung Karno digunakan PKI untuk mengambil alih kekuasaan.

c. Isu masalah tanah dan bagi hasil (aksi sepihak)

Pada tahun 1960 keluarlah Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Panitia Agraria yang menghasilkan UUPA terdiri dari wakil pemerintah dan wakil berbagai ormas tani yang mencerminkan 10 kekuatan partai politik pada masa itu. Walaupun UU-nya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan.

Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai 'aksi sepihak' dan kemudian digunakan dalih oleh militer untuk membersihkannya.

### 3. Pihak Jenderal Soeharto

- a. Dengan latar belakang kurang terpuji karena telah melakukan berbagai pelanggaran, antara lain:
  - Terlibat sebagai pelaku dalam Peristiwa Kudeta tahun 1946, tetapi begitu pelaku kudeta ditindak dengan cepat dan lihaihnya segera turut serta menangkapi para pelaku lainnya, sehingga tampaknya seolah-olah dia sebagai pahlawan penyelamat.
  - Terlibat sebagai dalam berbagai penjualan inventaris AD dan penyelundupan ekspor gula sewaktu menjabat Panglima Diponegoro berpangkat kolonel, dibantu oleh Letkol Munadi, Mayor Yoga Sugama dan Mayor Sudjono Humardani. Untuk menindaknya Mabes AD membentuk Tim dipimpin Mayjen Suprpto, dengan anggota S. Parman, M.T. Haryono dan Sutoyo. Sebenarnya Nasution menghendaki agar Soeharto cs di seret ke pengadilan militer, tetapi karena dibela oleh Gatot Subroto maka Presiden Soekarno memeti-es-kan perkara ini, namun Nasution tetap mencopot Soeharto sebagai Panglima Diponegoro dan mengirimnya belajar ke Seskoad, di sanalah Soeharto bertemu dan bergaul dengan Brigadir Jenderal Suwanto yang merupakan agen CIA dan telah berhasil menciptakan Seskoad menjadi pemikir dan produsen perwira-perwira calon pucuk pimpinan AD maupun pemimpin-pemimpin pemerintahan di kemudian hari.
  - Dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia pada bulan Mei 1964 dibentuk Komando Mandala Siaga (Kolaga) yang dipimpin oleh Men. Pangau Laksdya Omar Dani sebagai Wakilnya Brigjen Achmad Wiranata Kusuma, Achmad kemudian digantikan oleh Mayjen Soeharto yang juga merangkap sebagai Pangkostrad. Terjadi friksi antara Omar Dani dengan Soeharto, bahkan Soeharto menyatakan kepada Presiden Soekarno bahwa Omar Dani tidak cocok sebagai Panglima Kolaga. Soeharto sebagai Wakil Pangkolaga juga melakukan sabotase berupa penyelundupan dan menghambat pengiriman pasukan ke Malaysia terutama dilakukan melalui Kemal Idris. Di samping itu juga melakukan pengkhianatan dengan cara mengirim pasukan yang tidak siap (Diponegoro) dan memberitahukan kepada Inggris pasukan-pasukan yang diselundupkan ke Malaysia sehingga pasukan-pasukan itu dengan mudah ditangkap atau dihancurkan. Hal ini semua tentu sepengetahuan pimpinan AD, tetapi pimpinan AD tidak berbuat apa-apa karena memang mengikuti skenario nekolim. Dari tentara yang ditahan Malaysia hanya 21 dari AD.
- b. Menggalang Letkol Untung, Kolonel Latief dan Brigjen Suparjo untuk membahas rencana Dewan Jenderal yang akan menggulingkan Bung

Karno. Dan Soeharto menjanjikan tambahan pasukan, yang kemudian ternyata adalah Yon 454 dan Yon 530.

- c. memberi perintah dengan telegram No. T.220/9 pada tanggal 15 September 1965 dan mengulanginya lagi dengan radiogram No. T.239/9 tanggal 21 September 1965 kepada Yon 530 Brawijaya Jawa Timur dan Yon 454 Banteng Raider Diponegoro Jawa Tengah untuk datang ke Jakarta dengan kelengkapan tempur penuh. Ketika datang ke Kostrad diterima oleh Soeharto dan juga dilakukan inspeksi pasukan pada tanggal 29 September 1965. Sedangkan Yon 328 Siliwangi datang dengan tanpa peluru. Tanggal 30 September 1965 jam 17.00 Yon 454 diperintahkan ke Lubang Buaya untuk bergabung dengan pasukan lainnya guna melakukan gerakan pada malam harinya.
- d. Merekrut Yoga Sugama tanpa prosedur yang benar untuk ditarik ke Kostrad dari posnya di luar negeri (Yugoslavia). Begitu pengumuman RRI tentang adanya G30S, maka segera Yoga Sugama menyatakan bahwa PKI telah berontak dan memerintahkan agar gudang-gudang senjata dibuka untuk melawan PKI. Dari mana ia tahu bahwa itu PKI yang memberontak, kalau bukan mereka sendiri yang merencanakan dan merekayasanya, karena Yoga Sugama adalah anak buah setia Soeharto di Diponegoro (Jawa Tengah).
- e. Melakukan kontak rahasia dengan Malaysia dan CIA. Disamping melakukan penyelundupan dan melakukan sabotase berupa menghambat gerakan militer ke Malaysia, Soeharto juga melakukan kontak-kontak dengan Malaysia, Inggris maupun AS (CIA), tugas ini sebagian besar pelaku lapangannya adalah Ali Murtopo dengan tujuan untuk mematangkan pelaksanaan rencana gerakannya. Ini juga terbukti dengan cepatnya pihak Soeharto melakukan perdamaian dengan Malaysia setelah mendapat Surat Perintah 11 Maret 1966.
- f. Pengendalian dan pemanfaatan Syam Kamaruzaman.

Soeharto telah lama mengenal Syam di kelompok Pathuk Yogyakarta awal revolusi 45. Pada tanggal 31 Desember 1947 Syam Kamaruzaman bersama lima orang dari kelompok Pathuk masuk ke Jakarta. Aktivitas mereka di Jakarta termasuk Syam mendirikan Serikat Buruh terutama Serikat Buruh Transport. Syam Kamaruzaman ikut serta mendirikan Serikat Buruh Pelayaran dan Pelabuhan serta menjadi salah seorang pengurus. Pada tahun 1951 ikut serta membantu DN. Aidit keluar dari kapal dan pelabuhan sewaktu Aidit datang kembali dari luar Jakarta. Sejak itu dia mempunyai hubungan dengan DN. Aidit.

Pada tahun 1964 Syam diangkat sebagai ketua Biro Khusus yaitu jaringan PKI tetapi diluar struktur resmi PKI dengan tugas menyampaikan informasi ke Aidit selaku ketua CC PKI, membina anggota ABRI dan melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak diketahui oleh pimpinan formal PKI. Kedekatan Syam dengan pimpinan PKI ini dimanfaatkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Soeharto dan CIA.

Informasi menyesatkan telah dimasukan ke PKI. Kondisi ini yang mungkin oleh Bung Karno dikatakan sebagai “Keblingernya Pimpinan PKI”.

#### 4. Kondisi Pertentangan Internal Angkatan Darat.

telah lama terjadi pertentangan antara faksi-faksi di kalangan internal AD yaitu sejak rasionalisasi dan rekonstruksi Angkatan Perang dalam pemerintahan Hatta. Pertentangan itu terutama antara profesionalisme model Barat yang dibumbui oleh pembelajaran politik sebagai bagian dari keikutsertaannya dalam kekuasaan negara, dengan semangat revolusioner warisan revolusi 1945 yang masih kental di kalangan perwira menengah AD.

Pada tahun 1965 AD telah terpecah dalam dua kubu yaitu kubunya Jenderal Achmad Yani yang loyal kepada Presiden Soekarno dan kubunya Jenderal A.H. Nasution-Soeharto yang tidak mendukung kebijakan Presiden Soekarno tentang persatuan nasional terutama tentang Nasakom dan Pengganyangan Malaysia.

Dengan lihaihnya Soeharto bertindak seolah-olah loyal terhadap kepemimpinan Nasution maupun Yani dan sekaligus pendukung Soekarno, namun dilain pihak Soeharto merangkul kelompok perwira yang ingin menyelamatkan Bung Karno, dan kemudian kelompok tersebut diorganisasi dan dimanfaatkan untuk menghancurkan kelompok Yani maupun Nasution, menghancurkan PKI yang kemudian merebut kekuasaan.

#### 5. Kondisi Pihak PKI.

Sebenarnya pihak PKI tidak melakukan persiapan apa-apa, persiapan PKI hanyalah memenuhi himbauan Presiden Soekarno guna mengirim tenaga dengan komposisi yang mencerminkan Nasakom untuk dididik sebagai sukarelawan mengganyang Malaysia, tetapi pada saat G30S meletus, latihan sedang dicutikan oleh Komodor Udara Dewanto sebagai penanggung jawab akhir latihan sukarelawan, jadi memang tidak untuk melakukan gerakan.

Aidit hanya menyuruh beberapa orang ke daerah untuk memonitor situasi dan menunggu perintah lebih lanjut yang ternyata tidak pernah diberikannya. Dalam surat Aidit kepada Bung Karno, Aidit menyatakan bahwa PKI tidak terlibat dalam G30S. G30S adalah murni gerakan militer (AD) karena adanya salah urus di antara militer sendiri.

Adapun keterlibatan Syam dalam G30S tidak bisa dipandang mewakili PKI, karena disamping dia seorang intel AD agen CIA, juga tidak mendapat mandat dari CC PKI, justru keterlibatan Syam dalam G30S bertujuan untuk memberi kesempatan legalitas bagi Jenderal Soeharto guna menghancurkan gerakan, juga menghancurkan PKI serta Bung Karno.

#### B. PELAKSANAAN G 30 S.

##### 1. Fakta-Fakta Sebelum Terjadinya G30S.

- a. Pada bulan April 1962 ketika Presiden Kenedy bertemu dengan PM Inggris Harold McMillan keduanya sepakat tentang kehendak untuk melikuidasi

Soekarno pada saatnya yang tepat, untuk itu dinas intelejen (CIA dan MI6) bekerja sama saling isi-mengisi untuk merealisasikannya.

- b. Dalam bulan Desember 1964 seorang Duta Besar Pakistan di Eropa melaporkan kepada Menlu Zulfikar Ali Bhuto tentang hasil percakapannya dengan seorang perwira intelijen Belanda yang bertugas di NATO yang menginformasikan sejumlah dinas intelijen Barat sedang menyusun suatu skenario akan terjadinya kudeta militer yang terlalu dini yang dirancang untuk gagal, dengan begitu terbukalah secara legal bagi AD Indonesia untuk menghancurkan kaum komunis dan menjadikan Bung Karno sebagai tawanan Angkatan Darat. Indonesia akan jatuh ke pangkuan Barat laksanakan sebuah apel busuk.
- c. Hal senada pun telah dilaporkan oleh wartawan Der Spiegel bernama Godian Troeller bahwa akan terjadi perebutan kekuasaan oleh militer dalam waktu dekat.
- d. Dalam bulan April 1965 Elswort Bunker utusan khusus Presiden AS Johnson menghabiskan waktu 15 hari di Indonesia guna melakukan evaluasi AS paling tidak menghadapi 6 pilihan untuk membuat perhitungan terhadap Indonesia dan Presiden Soekarno seperti ditulis oleh David Johnson:
  - Tidak campur tangan dengan kemungkinan Indonesia jatuh ke tangan komunis.
  - Mencoba berbuat sesuatu agar Soekarno mengubah politiknya yang kian ke kiri tetapi tidak ada hasilnya.
  - Singkirkan Soekarno dengan akibat yang tidak dapat diduga.
  - Dukung AD untuk mengambil alih kekuasaan yang telah bertahun-tahun dilaksanakan tetapi belum berhasil.
  - Usahakan memprovokasi PKI untuk melakukan aksi yang akan membuah legitimasi untuk pembasmiannya selanjutnya bergerak untuk menghadapi Soekarno.
  - Sebagai varian no.5 jika PKI tidak melakukannya sendiri maka alternatif ini perlu dilengkapi dengan segala macam rekayasa untuk mendiskreditkan PKI hingga terjadi situasi untuk membasmi PKI dan Soekarno sekaligus. Pilihan terakhir inilah yang kemudian diambil.
- e. Kira-kira seminggu sebelum meletus G30S seluruh tenaga ahli perusahaan Westinghouse (AS) ditarik dari proyek PLTU Tanjung Perak Surabaya tanpa alasan yang jelas dan digantikan dengan tenaga dari Jepang, karena pemerintah AS telah mengetahui akan terjadinya G30S.
- f. Pada tanggal 23 April 1965 Dubes AS di Jakarta Jones membuat laporan rahasia kepada Wakil Menlu AS Urusan Timur Jauh William Burdy yang juga tokoh CIA tentang rancangan kudeta di Indonesia yang disampaikan secara pribadi dan langsung kepadanya. Kemudian dalam telegram

No.1879 tanggal 24 Mei 1965 dari Bangkok Jones melaporkan bahwa rencana tersebut tertunda karena para penggerak tidak dapat bekerja lebih cepat lagi. Jadi rencana kudeta terhadap Bung Karno itu memang ada dan dikendalikan oleh pihak nekolim.

- g. Pada tanggal 30 September 1965 malam Aidit diculik oleh militer yang berseragam Cakrabirawa dan tidak dikenalnya dengan dalih dipanggil ke istana, namun ternyata dibawa ke Halim dan diisolasi di rumah Serda Suwardi, hanya bisa berhubungan dengan Central Komando I di Penas melalui kurir yaitu Syam Kamaruzaman sendiri, sehingga praktis dia tidak bisa apa-apa semuanya tergantung Syam intel AD dan CIA yang berhasil menyusup ke tubuh PKI untuk menghancurkan PKI.
- h. Tidak ada anggota PKI yang berada dalam pasukan G30S, melainkan hanya Syam Kamaruzaman sendiri.
- i. Tanggal 30 September 1965 malam kira-kira jam 22.00 Kolonel Latief telah melaporkan tentang rencana G30S kepada Jenderal Soeharto di Rumah Sakit Gatot Subroto.

## 2. Fakta-Fakta Dalam Pelaksanaan Gerakan:

- a. Pasukan yang digunakan dalam G30S didatangkan ke Jakarta dan bergerak ke Lubang Buaya atas perintah Kostrad.
- b. Naskah pengumuman tentang G30S disiapkan oleh Syam dan ditandatangani oleh Untung dan Brigjen Suparjo yang menyatakan penyelamatan Presiden Soekarno dari kudeta Dewan Jenderal.
- c. Naskah pengumuman II dan naskah-naskah lain dibuat Syam namun tidak diteken oleh Untung meski namanya disebutkan jadi tidak sah dan nama Letkol Untung telah dicatut oleh Syam. Justru pengumuman ke-2 ini yang isinya bertentangan 180 derajat dengan pengumuman I yaitu mendemisionerkan kabinet Dwikora, kekuasaan berpindah kepada Dewan Revolusi, kenaikan pangkat bagi pelaksana gerakan. Isi pengumuman ini sungguh telah memojokkan G30S dan kemudian digunakan alasan untuk menghancurkannya.
- d. Pembunuhan para jenderal tahanan G30S baik di Jakarta maupun Yogyakarta dilakukan sendiri oleh pasukan yang terlibat G30S.
- e. Tidak ada penyiksaan, pencungkilan mata, maupun penyiletan kemaluan jenderal oleh Gerwani maupun anggota Pemuda Rakyat, ini sesuai dengan visum et repertum dari tim dokter yang mengautopsi (bedah mayat) para jenderal yaitu tim dokter yang diketuai oleh Brigjen TNI Dr. Rubiono Kertapati dengan visum et repertum nomor 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (untuk tujuh korban) yang menyatakan tidak ada bekas penyiksaan dalam tubuh korban seperti penyiksaan, pencungkilan mata, dan sebagainya. Hal itu juga dinyatakan oleh Presiden Soekarno dalam pidato pada HUT LKBN Antara tanggal 12 Desember 1965 dan pembukaan Konferensi Gubernur Seluruh Indonesia tanggal 13 Desember 1965.

- f. Pada saat gerakan yaitu tanggal 30 September 1965 maupun 1 Oktober 1965, Lubang Buaya menjadi tempat latihan sukarelawan pengganyangan Malaysia ini sedang kosong karena Sukwan dicutikan oleh Komodor Udara Dewanto.
- g. D.N. Aidit diambil dari tempat isolasinya di rumah Sersan Suwardi di Halim selanjutnya dipaksa oleh Syam untuk terbang ke Yogyakarta untuk akhirnya jatuh dalam kekuasaan agen intel AD tamatan sekolah intel AD di Bogor bernama Sriharto Harjomiguno yang telah menyusup dalam Biro Khusus PKI. Awal November 1965 Aidit ditangkap dan dieksekusi oleh Kolonel Yassir Hadibroto atas perintah Soeharto.
- h. Baik pada saat gerakan tanggal 1 Oktober 1965 maupun sesudahnya tidak ada satupun dari pemerintahan, baik pemerintah Pusat, pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II maupun sampai Tingkat Kelurahan yang dipaksa turun oleh orang PKI untuk diganti dengan orang-orangnya.
- i. Tidak ada gerakan massa PKI dimana pun yang dikerahkan guna mendukung atau membantu G30S.
- j. Pada tanggal 1 Oktober 1965 malam hari RRI diambil alih oleh pasukan RPKAD (Kostrad) tanpa terjadi tembak menembak (damai) dan pasukan yang tadinya menguasai RRI (Yon 530) bergabung ke Kostrad kembali kepada induk kesatuan yang memerintahkannya.
- k. Jadi memang G30S ini dirancang oleh arsiteknya yaitu Mayjen TNI Soeharto untuk membunuh saingan-saingannya, untuk kemudian gagal, sehingga momen tersebut dapat dipakai dalih untuk menghancurkan PKI dan menggusur Bung Karno.
- j. Pada tanggal 2 Oktober 1965 Soeharto didampingi oleh Yuga Sogama dan anggota kelompok bayangannya mendatangi Bung Karno di Istana Bogor meminta agar Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa pertama yang mengawali kemenangan Soeharto dan cikal bakal terbentuknya Kopkamtib (kemudian berubah menjadi Bakorstanas), yang merupakan alat palu godam rezim Soeharto untuk melibas siapa saja yang menentang kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto.

## C. EPILOG.

### Fakta-Fakta Setelah Terjadinya Gerakan.

- 1. Fakta-Fakta Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Jenderal Soeharto
  - a. Jenderal Soeharto mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Darat.
  - b. Jenderal Soeharto membangkang perintah dengan cara pada waktu pada waktu Jenderal Amir Mahmud dan Jenderal Pranoto Rekso-samudro telah dihalangi ketika dipanggil menghadap Presiden Soekarno ke Bogor dalam situasi genting dan sangat menentukan.



- c. Melakukan pembredelan mass media sehingga yang bisa terbit hanyalah harian Berita Yhuda dan Angkatan Bersenjata yang merupakan corong mereka guna menciptakan opini luas dan memonopoli kebenaran versi Soeharto.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, melakukan pembunuhan terhadap Aidit, Lukman, Nyoto yang berstatus menteri sehingga perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai makar terhadap pemerintahan yang sah guna melaksanakan ambisinya menggusur Bung Karno sebagai Presiden RI. Dengan cara yang disebut sebagai KUDETA MERANGKAK.
- e. Menyalahgunakan Surat Perintah 11 Maret 1966 justru untuk menggulingkan Bung Karno, dengan menangkapi para menteri pembantu Bung Karno, memenjarakan dan bahkan ada yang dibunuh.
- f. Membubarkan PKI, yang mana Bung Karno sendiri walaupun ditahan sampai mati tidak pernah mau membubarkan PKI.
- g. Mengganti secara paksa para anggota DPR dan MPR yang tidak sejalan dengan politiknya untuk diganti dengan orang-orangnya guna melicinkan jalan menuju penggantian Presiden dari Bung Karno kepadanya dan membuat produk-produk hukum guna mendukung kekuasaannya, diantaranya TAP MPRS No.25 tahun 1966 tentang PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara RI dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/ Marxisme-Leninisme dan TAP MPRS No.33 tahun 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah Soekarno.
- h. Melakukan pembantaian massal terhadap para tahanan yang telah ditahan dengan dalih pembersihan G30S dan anggota PKI, di mana lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang dibunuh tanpa proses pengadilan dan ini merupakan pembantaian manusia terbesar di dunia di luar perang dan sepanjang sejarah manusia berada di muka bumi.
- i. Menerbitkan aturan tidak bersih lingkungan untuk merampas hak azasi manusia keturunan anggota PKI untuk menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan misalnya menjadi TNI, POLRI dan Pegawai Negeri maupun pegawai BUMN.
- j. Menghasut dan merekrut massa untuk dijadikan atau dipengaruhi sebagai pelaku pembantaian massal terhadap orang-orang PKI.
- k. Memalsukan sejarah seolah-olah dalam G30S adalah PKI jadi keduanya adalah satu dalam melakukan gerakan, padahal keduanya adalah berbeda sama sekali.
- l. Melakukan penangkapan dan penahanan secara semena-mena tanpa proses hukum serta membuangnya ke Pulau Buru, Nusakambangan, Plantungan dan lain-lain tanpa fasilitas kemanusiaan yang cukup sehingga banyak yang meninggal dunia.

## 2. Fakta-Fakta Kejadian Lainnya.

PKI dalam hal ini:

- a. Tidak ada gerakan massa PKI untuk mendukung G30S.
- b. Tidak ada penggantian satu pun dari kepala pemerintahan mulai Kepala Des (Lurah), Camat, Bupati/Walikota, Gubernur maupun Presiden oleh orang PKI.
- c. PKI tidak menguasai gedung-gedung pemerintah maupun proyek-proyek vital.
- d. PKI tidak mengangkat senjata untuk melawan atau pun melakukan perlawanan bawah tanah sebagai persiapan untuk memberontak.

Jadi tidak ada suatu indikasi maupun bukti bahwa PKI melakukan pemberontakan dan makar terhadap pemerintah yang sah baik di tingkat pusat maupun daerah.

## 7. KESIMPULAN.

- a. Dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:
  - Peristiwa 65 adalah merupakan kudeta (makar) yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto dengan disponsori secara aktif oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia (Blok Barat) untuk menyingkirkan Presiden Soekarno dan pengikut-pengikutnya dengan diikuti peristiwa pelanggaran HAM berat berupa penangkapan, penahanan, penyiksaan, pembunuhan (penghilangan paksa), dan mendiskriminasi mereka termasuk keturunannya.
  - Bahwa Jenderal A. Yani cs dibunuh atas rekayasa dan skenario Jenderal Soeharto, guna melancarkan jalan upaya kudetanya.
  - Bahwa untuk menguasai dan membentuk pendapat umum, Jenderal Soeharto mulai pada tanggal 2 Oktober sampai tanggal 10 Oktober 1965 melakukan pembredelan (larangan terbit) tanpa hak kepada semua surat kabar kecuali harian Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang digunakan sebagai corong propaganda mereka dan telah melansir dan membesar-besarkan berita bohong serta fitnah yang keji seolah-olah telah terjadi penyiksaan, penyiletan kemaluan jenderal-jenderal yang diculik ke Lubang Buaya, dicungkil matanya sambil melakukan pesta seks yang disebut “Pesta Harum Bangsa” oleh Pemuda Rakyat dan Gerwani.
  - Akibat fitnah dan berita bohong ini telah menyulut rasa antipati dan histeria massa untuk menghukum orang yang dicurigai sebagai PKI, dan dipakai landasan menfitnah bahwa orang PKI itu amoral, atheis, kafir dan lain-lainnya yang jelek, sehingga perlakuan apa saja dianggap halal dan boleh diterapkan semauanya.

- ahwa Bung Karno telah ditahan dan mengalami penyiksaan fisik dan psikisnya sampai beliau meninggal dunia.
- Bahwa PKI sebagai kekuatan politik besar yang menang secara demokratis telah secara sistematis dihancurkan oleh kekuatan militer Angkatan Darat atas perintah Soeharto.
- mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang cacat hukum antara lain: Tap MPRS No.25 tahun 1966, Tap MPRS No.33 tahun 1967 tentang Aturan Bersih Diri, Bersih Lingkungan serta aturan-aturan lain yang diskriminatif dan nyata-nyata tidak sejalan dengan norma agama, norma UUD 1945 maupun norma-norma dalam Pancasila serta bertentangan dengan norma-norma yang berlaku universal di seluruh dunia.
- Secara singkat dan tegas dapat dikatakan bahwa Jenderal Soeharto telah melakukan kejahatan sebagai berikut:
  - 1) makar (kudeta) terhadap pemerintahan yang sah
  - 2) Melakukan pelanggaran HAM berat.
  - 3) Melakukan kebohongan publik.
  - 4) Melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  - 5) Melakukan penyimpangan atas makna Surat Perintah 11 Maret 1966.

Semua kejahatan harus diadili dan dihukum setimpal dan korbannya harus direhabilitasi, diberikan kompensasi maupun restitusi, baik menyangkut harkat dan martabat maupun harta milik dan haknya.

- b. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR), maka fakta-fakta dan kebenaran seperti yang terungkap di atas harus dapat dijadikan bahan pelurusan sejarah nasional sehingga kebenaran bisa ditegakkan dan kehormatan dapat dipulihkan.
- c. Cuna lebih dapat melengkapi data yang ada maka tiap-tiap daerah harus berusaha untuk memiliki data yang akurat baik tentang peristiwa, korban maupun pelaku untuk dijadikan bahan sebagaimana tercantum di dalam UU KKR.

\*\*\*\*\*

ps: Informasi tentang KUDETA 65/Coup d'etat '65, Klik: <http://www.progind.net/>

[http://geocities.com/lembaga\\_sastrapembebasan/](http://geocities.com/lembaga_sastrapembebasan/)

*Catatan Laluta:*

... "Di depan mata batin saya, saya melihat kawan-kawan itu berdiri tegak di tepi lobang menganga yang mereka gali sendiri... Di antara mereka terdapat Sukarno,

Ketua Badan Penerangan DPP PESINDO, berumur 28 tahun, suamiku dan ayah anakku, Nilakandi Sri Luntowati, yang kini sudah almarhumah"...(PENILAIAN TERHADAP MASAKINI ATAS DASAR PENGALAMANKU MASALAMPAU, Oleh Francisca Fanggidaj; synopsis buku antologi 40 thn Tragedi 65)

... "Aku tak setuju kau berangkat ke Halim! Apalagi malam-malam begini! Aneh! Dan apa hak mereka memaksa kau ke sana!? ... "Aku sendiri tak mengerti..."... "Darurat?! Darurat apa?? Apanya yang darurat??"! Ucap Tanti mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya. Heran campur marah...(BENING KACA di BOLA MATA, Oleh: Ilham Aidit; synopsis buku antologi 40thn Tragedi '65)

Kisah nyata pengalaman Anak Bangsa dalam Misteri Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke II - 1948 dan Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke III - 1965 telah terukir dalam catatan ingatan sejarah perjuangan Anak Semua Bangsa demi menjunjung tinggi pengharapan masadepan kemerdekaan R.I. untuk mencapai hak penegakkan keadilan sosial dan kebenaran sejarah. Namun kenyataan pengalaman ketegaran jiwa anak bangsa dari generasi ke generasi pun telah pula dilaluinya dengan mengalami rasa pahit, getir dan manisnya hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu kusajikan Ekspresi dan refleksi diri Pak S. Utomo dalam uraiannya berjudul "Fakta Kebenaran Korban Tragedi Peristiwa 65"

*La Luta Continua!*

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0\*\*\*\*\*

40 Tahun Tragedi 1965 (1)

**Dituduh Sebagai Dokter Lubang Buaya**

(Catatan Dokter Sumiyarsi)

Oleh: Harsutejo

**Rumahku Dijarah**

itu jam 5.00 sore 13 Oktober 1965, kami bertiga dengan anak pertamaku dan sopir pulang. Dari kejauhan nampak adanya hal tidak beres yang menimpa rumah dinas kami di Jalan Kesehatan. Benar juga, rumah kami sedang diobrak-abrik oleh gerombolan. Mereka mengeluarkan perabotan, buku-buku, pakaian dan yang lain, menumpuknya di halaman serta membakarnya, sebagian barang lain dijarah. Api berkobar dan asap menjulang. Penghuni rumah telah kami ungsikan sebelumnya. Kami menyingkir dengan pakaian yang melekat di badan dengan bersyukur karena kami masih selamat, kudengar sudah banyak korban jatuh. Aku menuju ke rumah Prof Suprpto SH, tetangga selisih beberapa rumah, sedang sopir bersama anakku yang mulai kuliah di kedokteran pergi ke asrama Cakrabirawa untuk menitipkan mobil tak jauh dari kompleks. Mereka berdua bagaikan masuk ke sarang macan, tempat itu telah diduduki penguasa militer, mereka berdua ditahan bersama tahanan lain. Atas saran dua orang teman baikku, mereka diminta melarikan diri yang dilakukannya pada pagi buta keesokan harinya tanpa memikirkan tentang mobil. Pengawasan terhadap tapol di situ belum terlalu ketat.

Pak Prapto pun menjadi incaran, tidak cukup aman juga bagiku. Hal ini kami ketahui dari pembicaraan gerombolan pembakar dan penjarah yang lewat tanpa mengetahui bahwa mereka sedang berada di dekat rumah Pak Prapto, tidak aneh karena mereka berasal dari daerah lain sebagai tenaga sewaan, di antaranya para preman Senen. Ketika itu aku masih menjadi anggota panitia bagian medis dari Konferensi Internasional Anti Pangkalan Militer Asing (KIAPMA) yang sedang berlangsung di Hotel Indonesia, pembukaannya dilakukan oleh Presiden Sukarno. Aku segera meninggalkan rumah Pak Prapto menuju HI. Panitia memberikan kesempatan padaku menginap di HI selama dua minggu dengan mendapat honor dan perlengkan sehari-hari. Ketika itu aku juga menjabat Bendahara DPP Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). Selama konferensi aku sempat bertatap muka dengan raja Muang Thai Bhumibol Adulyadej dan Pangeran Akihito dalam hubungan jabatanku sebagai dokter perempuan satu-satunya dalam panitia. Kami tetap bekerja dengan semangat seolah di luar arena tidak terjadi apa-apa yang dapat mengancam. Kami dapat merasakan banyaknya intel yang berseliweran di seputar hotel.

### **Buron, Rumah Tahanan dan Penjara**

konferensi berakhir maka mulailah petualanganku sebagai buron politik selama satu setengah tahun, kadang-kadang bersama suami menjelajah Jakarta, Semarang, Salatiga, Surabaya, Bandung dan Sukabumi. Ujungnya aku terdampar di rumah tahanan dan penjara Sukabumi, kemudian Bandung, Kebayoran Baru, Pesing, Kalong Gunungsahari, Banteng Selatan, Bukitduri, Plantungan dan penjara Bulu, Semarang. Hampir semua tempat tahanan itu begitu sempitnya, maka ketika kami tidur kami harus miring ke kiri atau kanan berbarengan. Jadi waktu tidur kami seperti mengikuti suatu irama komando kiri, kanan, kami tak lagi dianggap sebagai manusia, tetapi tak lebih dari ikan asin atau balok kayu yang bisa ditumpuk-tumpuk.

dirindukan seorang tahanan adalah pembebasan segera. Tetapi hati kecil dan logika politisku mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Aku menetapkan diri untuk menghadapi masa ini dalam batas yang tidak kutahu berapa lama. Teman-teman ada yang membayangkan masa penahanan itu sampai dua tahun, ada yang lima tahun. Wah itu terlalu lama, begitu kami memberikan komentar. Tidak seorang pun yang mengatakan bahwa kami akan ditahan lebih dari sepuluh tahun, barangkali itu terasa seperti kiamat kalau kami bayangkan keadaan sehari-hari dalam tahanan yang begitu sempit, pengap, kurang makan, hampir tidak ada fasilitas pengobatan. Aku pasrah kepada-Nya, berdoa dan memohon kekuatan.

kamar tahanan di Pesing, Jakarta itu buruk dan kotor, telah kosong selama enam bulan. Di sampingnya terdapat kamar tahanan kriminal, penghuninya dua orang. Yang seorang bernama Andi Azis, masih muda dan berpenampilan intelek. Yang lain bernama Acong, seperti petinju, keduanya nampak sopan dan ramah. Mereka telah mengenalku dari koran, bahwa seorang tapol wanita, dokter, akan segera menghuni tempat kosong itu. Kami langsung akrab. Pada suatu kali mereka bercerita bahwa Mayor Johan itu tukang todong para tahanan. Sebulan sebelum kedatanganku, tempat tersebut dihuni oleh Prof Can Cu Sim dan Prof Can Cu Som, keduanya anggota HSI. Sang mayor mengira kedua orang besar itu banyak duitnya, di samping guru besar yang satu penasihat kepolisian, yang lain sesepuh DPA. Keduanya hidup sederhana. Maka sang mayor pun tidak mendapatkan apa pun dari mereka

berdua, sampai mereka dibebaskan atas perintah Panglima. Sebelum bebas mereka “mengajari” enam tapol baru yang juga anggota HSI agar memberikan uang sogokan untuk memperingan keadaan. Mereka berenam akhirnya dibebaskan. Tidak lama kemudian datang kelompok tahanan baru, sebagian anggota HSI dan yang lain dari kalangan VIP. Tak seorang pun dari mereka mampu membayar uang yang dimintanya, maka mereka segera dipindahkan ke ruang tahanan di belakang bercampur dengan tahanan kriminal.

Kedua penghuni tahanan sebelahku itu kian akrab meski kami ditahan dari jurusan yang berbeda. Setiap pagi Acong menimbakan air untuk mandiku, sedang Andi membuat kopi atau susu, ia pun kumintai tolong untuk membelikan makanan. Dalam hal makanan dan minuman kami saling tolong-menolong. Mereka memberitahuku bahwa biasanya interogasi dilakukan setelah tengah malam. Mudah ditebak agar dalam keadaan mengantuk itu orang akan memberikan jawaban sebagai yang dikehendaki para interogator. Mereka memberikan nasehat agar tetap tenang, berdoa meminta perlindungan-Nya, aku terharu. Ada lagi nasehat mereka yang unik, “Jika si pemeriksa mulai bicara, Ibu harus menekankan ujung jari kedua kaki dengan niat dan pikiran seolah menginjak mulut pemeriksa. Jika Ibu menjawab, Ibu tekankan kedua tumit Ibu, hingga tumit itu membuat ruang terbuka, Ibu akan dapat berbicara bebas dan benar, sedang ia akan setuju dan percaya apa yang Ibu katakan”. Begitulah dua anak muda itu mencoba memberikan kiat unik ketika menghadapi sang interogator. Benar, suatu hari jam dua dini hari aku dipanggil. Dari ruang sebelah si Andi berbisik agar saya berdoa, membaca Al-Fatihah, lalu mengingatkan ABC nya gerakan kaki. “Semoga Ibu sukses!”

Johan telah menunggu beserta dua orang pembantunya. Ia menyalami dan mempersilahkan aku duduk dengan ramah. Aku berdoa sambil menekankan jari-jari kedua kaki seolah aku menginjak mulut sang mayor, tanpa bertanya lagi di mana logika kiat itu. Dalam keadaan terjepit orang akan melakukan apa pun yang mampu dilakukan tanpa mengorbankan harga diri. Mulailah dengan hal standar nama lengkap, keberadaan suamiku dst. Suaranya masih ramah meskipun kadang dengan kata-kata kasar. Ketika menjawab pertanyaan maka posisi kakiku berubah sebagai yang diajarkan anak muda itu. Aneh bahwa aku menjadi begitu berani, menyatakan bahwa aku sama sekali tidak berbuat kesalahan. “Bagaimana Anda bisa berkata begitu?” Dengan cepat dan posisi kaki yang pas segera kujawab, “Buktikan dulu bahwa saya bersalah Pak!” Waktu berjalan terus dan tiba jam empat subuh. Ia berkata kepada pengawalnya, “Kembalikan pemberontak ini ke selnya. Dua hari lagi bawa dia kemari jam dua belas malam!” Walaupun pemeriksaan kadang berlangsung keras tetapi tidak terjadi penyiksaan. Rupanya Acong telah menyiapkan segelas kopi buatku. Persahabatan yang unik, aku berterima kasih dan memberitahukan bahwa harus kembali dua hari lagi jam dua belas malam. Mereka mengatakan biasanya baru lima atau enam hari lagi. Mayor Johan ini rupanya memang sejenis makhluk langka, kasar, dengan temperamen tinggi. Dengan anak buahnya pun sering bertengkar. Pada suatu hari Mayor Johan marah besar kepada seorang polisi yang berani menentangnya. Polisi bawahan itu kemudian dipukulinya sambil berteriak-teriak seperti kesetanan. Tak lama kemudian ia terjatuh pingsan tergeletak di lantai. Seorang dokter memeriksa tekanan darahnya 220/130, ia segera digotong

pergi. Demikian cerita anak muda itu, suatu bahan yang dapat kugunakan untuk melindungi diri.

hari kemudian pada jam dua dini hari aku dijemput oleh dua orang algojo dengan badan kekar. Seperti sebelumnya Mayor Johan sudah menunggu. Aku duduk diapit dua orang tukang pukul itu yang nampaknya siap menelanku bulat-bulat. Aku berdoa, lalu bersiap dengan bayangan menginjak mulut sang mayor kuat-kuat. "Rasain, mulutmu kuinjak kuat dengan kedua kakiku!" Lagi aku tidak berpikir tentang logika dalam keadaan terdesak. Apa salahnya kalau hal itu membuatku berani tidak gemeteran.

"Sudah siap dengan keterangan dan analisisnya?" ia tersenyum. "Siap Pak", jawabku tenang dengan sikap kaki berubah sesuai dengan petunjuk. Ia berpaling ke tukang pukulnya. Tukang pukul itu segera mengambil pentungan gada yang sudah disiapkan sebagai salah satu peralatan standar interogasi. Interogasi beralih pada seorang pemuda yang dipanggil bersamaku. Mayor Johan setengah berteriak, "Siapa kau? Pemimpin pemuda pemberontak di Lubang Buaya kan?" Pemuda itu menjawab dengan tegas, "Bukan Pak, saya tidak pernah berada di Lubang Buaya". Langsung kedua algojo mengayunkan pentungannya bergantian ke tubuh pemuda itu. Bahu kanan, kiri, tengkuk, leher, kepala, bertubi-tubi, lalu dada, punggung, tanpa peduli dengan teriaknya yang mengaduh minta ampun. Darah meleleh ke mana-mana. Mukanya langsung membengkak, merah kehitaman, pukulan masih berlanjut. Pemuda itu sudah tidak bereaksi lagi, sementara itu Mayor Johan diam membisu seperti robot. Aku spontan berdiri berteriak dengan perasaan ngeri, "Jangan diteruskan Pak, stop Pak, dia bisa mati. Lihat mukanya sudah biru!" Ia memerintahkan, "Stop, seret kembali ke kandangnya!" Drama sebabak telah lewat, kini babak kedua giliranku. Seperti biasa aku menekankan ujung jari kakiku. Mayor Johan berteriak tetapi suaranya seperti menghilang, menjadi serak, lalu mulai bicara.

"Nyonya, sekarang Nyonya tahu nasib yang akan menimpa Anda". Tangannya nampak gemetar, mukanya merah padam. Aku menjawab tenang, tak lupa dengan perubahan kaki, "Maaf Pak Mayor, saya khawatir Bapak mengidap tekanan darah tinggi. Saya kira tekanan darah Bapak sudah lebih dari 230/130. Usahakan tenang Pak, jangan marah lagi, sangat berbahaya bagi Bapak sendiri".

"Bagaimana Ibu tahu?" sahutnya keras.

"Sebagai dokter saya dapat melihat pembuluh darah di pelipis Bapak", seraya aku berdiri meraba pelipis dan dahinya seolah dia pasienku. "Inilah tandanya, ini berbahaya dapat menyebabkan stroke", aku menambahkan dengan yakin sebagai seorang dokter berpengalaman dengan otoritas.

"Aduh Ibu benar, apa nasehat Ibu?" suaranya pelan merendah.

"Begini, Bapak harus tenang dan istirahat cukup. Ambil cuti paling sedikit seminggu dan kontrol ke dokter. Sebaiknya Bapak pulang, setelah membaik Bapak bisa memanggil saya lagi. Untuk sementara Bapak sebaiknya berpantang garam, daging berlemak, susu, mentega, dan banyak minum air putih. Semoga Bapak lekas baik kembali". Ia mengulurkan tangannya mengucapkan terima kasih. Maka drama babak kedua berlangsung sebagai anti klimaks. Bagiku sendiri seperti suatu keajaiban. Aku

prihatin dengan pemuda itu, hanya sekedar untuk menerorku ia dijadikan sasaran yang harus bersimbah darah. Kubayangkan andai pemuda itu anak pertamaku, sedang aku tidak mampu melindunginya, membuatku sulit tidur.

terhadapku sampai dengan interogasi yang kualami di tahanan Kalong sungguh berat, aku dituduh sebagai dokter Lubang Buaya yang pada 1 Oktober 1965 memberikan obat perangsang kepada anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat agar mereka bersemangat tinggi untuk menyiksa para jenderal yang diculik.<sup>1</sup> Beruntung aku baru tertangkap pada 1967 ketika kampanye hujatan fitnah kekejaman jorok Lubang Buaya tidak seganas sebelumnya. Hal-hal yang mengerikan tentang perlakuan terhadap tapol di tempat ini sudah kudengar. Di depan ruang tahanan Kalong terdapat dua pohon belimbing. Setahun sebelum itu seorang tapol laki dan perempuan digantung telanjang bulat di dua pohon tersebut. Sementara itu dua orang tentara baret merah melakukan latihan lempar pisau terhadap keduanya dengan mata ditutup. Hal itu berlangsung dari jam lima sore sampai jam dua dini hari. Peristiwa itu terjadi ketika Satgas dipimpin oleh Mayor Acep yang tersohor keanasannya di kalangan tapol. Lalu datang komandan baru Mayor Suroso, prestasinya dalam menyiksa tapol tidak lebih kecil meski kesadisannya agak berkurang. Seorang ibu pernah disiksa sampai pingsan, setelah dibawa ke rumah sakit ia meninggal. Suatu kali aku diperiksa oleh Mayor Suroso. Aku dipaksa mengaku bahwa aku dokter Lubang Buaya dan dokter CC PKI. Kubantah dengan mengatakan berani sumpah. Ketika itu aku mau disetrum, aku berteriak sambil memegang tangannya dan meninju perutnya. "Jangan Pak! Saya elektrofil!" Ia terdiam sejenak, melepas kabel listrik lalu bertanya, "Apa itu artinya?" Aku menjawab saja sekenanya, "Saya ini sangat sensitif terhadap setrum listrik, setrum sekecil apa pun dapat mematikan saya. Kalau saya mati nyawa saya akan mencekik Bapak dan asisten Bapak." Entah kenapa ia terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak sambil memerintahkan, "Kembalikan dokter kesurupan ini!" Aku pegang tangan mayor itu dan kusalami, "Terima kasih Pak, Tuhan akan memberkahi Bapak!" Ketika aku meninggalkan tempat interogasi terdengar ia berteriak, "Kurangajar...!" Aku beruntung dapat menciptakan dagelan pada saat kritis. Sebenarnya aku tidak tahu persis apakah dagelan itu yang mencegah siksaan terhadap diriku. (Bahan dari naskah belum terbit dr Hj Sumiyarsi Siwirini C, Plantungan Pembuangan Tapol Perempuan, penyunting Rasmadi AS & Harsutejo).

#### *Catatan Laluta:*

... "Di depan mata batin saya, saya melihat kawan-kawan itu berdiri tegak di tepi lobang menganga yang mereka gali sendiri... Di antara mereka terdapat Sukarno, Ketua Badan Penerangan DPP PESINDO, berumur 28 tahun, suamiku dan ayah anakku, Nilakandi Sri Luntowati, yang kini sudah almarhumah"...(PENILAIAN TERHADAP MASAKINI ATAS DASAR PENGALAMANKU MASALAMPAU, Oleh Francisca Fanggidaej; synopsis buku antologi 40 thn Tragedi 65)

... "Aku tak setuju kau berangkat ke Halim! Apalagi malam-malam begini! Aneh! Dan apa hak mereka memaksa kau ke sana!? ... "Aku sendiri tak mengerti"... "Darurat?! Darurat apa?? Apanya yang darurat??" Ucapan Tanti mendekatkan wajahnya ke wajah suaminya. Heran campur marah...(BENING KACA di BOLA MATA, Oleh: Ilham Aidit; synopsis buku antologi 40thn Tragedi '65)



Kisah nyata pengalaman Anak Bangsa dalam Misteri Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke II - 1948 dan Peristiwa Tragedi Berdarah teror putih ke III - 1965 telah terukir dalam catatan ingatan sejarah perjuangan Anak Semua Bangsa demi menjunjung tinggi pengharapan masadepan kemerdekaan R.I. untuk mencapai hak penegakkan keadilan sosial dan kebenaran sejarah. Namun kenyataan pengalaman ketegaran jiwa anak bangsa dari generasi ke generasi pun telah pula dilaluinya dengan mengalami rasa pahit, getir dan manisnya hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu kusajikan Ekspresi dan refleksi diri Pak S. Utomo dalam uraiannya berjudul "Fakta Kebenaran Korban Tragedi Peristiwa 65"

La Luta Continua!

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

40 Tahun Tragedi 1965 (2)

( tidak tercantum)

40 Tahun Tragedi 1965 (3)

## **Buku Harian Seorang Tapol**

Oleh: Harsutejo

Ia termasuk tapol yang mujur dalam arti memiliki kesempatan menulis buku harian selama beberapa tahun (1966-1971). Ketika itu ia bersama ratusan tapol lain dijadikan romusa modern melakukan kerja rodi di daerah Banten dalam proyek Angkatan Darat yang disebut 'Operasi Bhakti Siliwangi', antara lain memperbaiki jalan-jalan di daerah Banten sepanjang beberapa puluh kilometer, membangun kampus Universitas Maulana Yusuf (UNMA), antena radio persiapan RRI Serang, membersihkan pelabuhan Karangantu. Piringan hitam yang diputar di radio itu ternyata miliknya yang dibawanya dari Moskwa dan telah dirampas dari kamar asramanya di Cilegon. Kesempatan menulis buku harian merupakan barang langka, bahkan suatu kemewahan bagi seorang tapol G30S. Pena, kertas, buku, informasi dan perangkat peradaban lain merupakan musuh besar bagi rezim penindas jika jatuh di tangan mereka yang dianggap lawan politiknya.

Salah satu catatannya cukup menarik bahwa penangkapan di Banten dilakukan sejak dini. Minggu 3 Oktober 1965 Ir Soerjo Darsono diambil oleh Polisi dari mes di Serang dibawa ke Cilegon. Pada suatu hari pasti datang pula giliran kami yang lain, karena suasana menyudutkan PKI dan organisasi-organisasi massa yang dianggap ada kaitannya dengan PKI semakin gencar. Aparat di daerah terkesan lebih rajin mendahului Jakarta. Begitu cepatnya vonis dijatuhkan kepada PKI dan organisasi mantelnya, atau sesuatu yang memang sudah diatur demikian? Sebagai tapol, Ir DSM Sastrosudirdjo sadar buku harian yang ditulisnya mengandung risiko. Dengan demikian ia secara sadar pula menerapkan berbagai kiat berkelit. Sebagian catatan itu dibuatnya dalam bahasa Rusia dengan huruf Kiril, juga dengan huruf Jawa dalam bahasa Jawa. Selanjutnya secara berangsur dikirimkannya melalui saudara kandung yang menjenguknya untuk disimpan bersama buku-buku koleksi miliknya yang

sebagian masih dapat diselamatkan. Dengan masgul ia mencatat ketika melihat sebuah buku tebal kamus teknik yang dibawahnya dari Moskwa dijadikan ganjal kursi jaksa yang memeriksanya, “la seorang terpelajar bergelar sarjana hukum, tetapi belum berbudaya.”

Menjadi mahasiswa di ITB Bandung, ia memasuki CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia) yang digolongkan sebagai mantel PKI dengan pertimbangan sederhana, tidak ada perploncoan. Ketika ia memilih studi ke Moskwa dalam jurusan metalurgi, hal itu pun dilakukannya dengan pertimbangan lugas, pabrik baja pertama Indonesia di Cilegon dengan bantuan dan teknologi Uni Soviet. Tidak ada pertimbangan dan semangat politik atau ideologi yang menggebu sebagai yang menjadi kecenderungan umum masa itu sebagai respons terhadap retorika politik kebangsaan Presiden Sukarno. Dengan penuh idealisme ia menimba ilmu yang akan berguna bagi tanahair tercinta. Semangat semacam itulah yang terus-menerus dipeliharanya dalam bertahan hidup selama 12 tahun sebagai tapol di tahanan, kerja rodi dan pembuangan dalam solidaritas tinggi sebagai bagian watak pribadinya. Ia menjadi anggota SBBT (Sarekat Buruh Baja Trikora) beberapa bulan sebelum meletusnya G30S, ia bukan anggota resmi ataupun anggota ilegal PKI, bahkan ia pun bukan penganut Marxisme. Pernyataan ini tidak ada urusannya dengan pemaafan, pujian atau memandang rendah. Kenyataan itu merupakan salah satu petunjuk penindasan yang dilakukan rezim yang berkuasa dilakukan terhadap seluruh elemen yang dianggap membahayakan sang resim.

Banyak aktivis organisasi (kiri), dipenjarakan bukan merupakan kejutan besar tanpa disangka, meskipun pembunuhan besar-besaran tetap merupakan hal yang tidak diperhitungkan bahkan oleh para petinggi PKI pun. Bagi para aktivis hal itu merupakan risiko sikap politik yang dipilihnya. Sebaliknya bagi Ir DSM Sastrosudirdo sesuatu yang tak pernah terlintas di benaknya. Ia belajar, bekerja, belajar berorganisasi tanpa melakukan kalkulasi politik, tetapi lebih dibimbing oleh kata hati nurani tanpa pamrih apa pun kecuali ingin berbuat sebaiknya untuk negeri ini melalui kemampuan dan studinya. Di tengah kemelut tercemplung sebagai tapol pekerja rodi dengan nasib tidak menentu, ia masih sempat meneruskan hobinya untuk belajar bahasa Italia. Ia mengulang mimpi Italianya yang menjadi kenyataan ketika sedang studi di Moskwa, berkeliling ke berbagai pelosok Italia sebagai tamu kehormatan sejumlah keluarga pada suatu libur musim panas pada 1962. Perjalanan gratis itu diorganisasikan oleh koran penting Italia, L'Unita sebagai tanggapan terhadap surat pembaca yang ditulisnya dari Moskwa. Di samping sempat melempar tiga koin di Fontana di Trevi, Roma, ala film dan lagu romantis Three Coins in the Fountain, tempat ratusan turis tiap hari berduyun-duyun datang untuk melempar koin. Ia pun sempat didaftar sebagai anggota kehormatan Pemuda Anti Fasis. Dalam kunjungannya ke kota Grosseto, bagian dari agenda koran L'Unita, tempat partai komunis memenangkan pemilu lokal, dirinya disambut bak tamu agung. Dalam hatinya sempat malu karena merasa dirinya seorang pemuda yang bukan apa-apa. “Tuan rumah yang menyambutku tahu benar aku bukan tokoh, hanya seorang mahasiswa dari negeri jauh. Benar-benar sambutan luar biasa yang mengharukan. Aku dibawa ke Balai Kota diperkenalkan pada walikota yang tengah rapat, ada kepala polisi dan beberapa pejabat tingkat daerah. Semuanya menyambut dengan antusias dan bukan basa-basi, bahkan aku diantar salah seorang dari pejabat daerah untuk

meninjau sebuah proyek, Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Lardarello. Di kota ini aku tinggal bersama keluarga muda Barzanti Nedo, di via Porto Lorento 47. Rupanya ada pula orang Italia yang mengenakan semacam bakiak kayu di rumah, aku pun mengikuti cara mereka.” Mimpi pun berakhir, ia mendapati dirinya masih sebagai tapol... Ia tak pernah menyesal akan keputusan-keputusannya, akan nasib yang menimpanya.

Catatannya urusan korupsi sudah dihadapinya ketika dia baru saja bekerja di Proyek Pabrik Baja Trikora di Cilegon, bagian penerimaan barang-barang dari Uni Soviet. Ketika itu Ir Tunky Ariwibowo yang kelak menjadi orang penting Orde Baru juga bekerja di tempat yang sama. “Pengalaman baru juga kujumpai di Cilegon, korupsi dalam bentuknya yang begitu telanjang tanpa tedeng aling-aling, dibicarakan dengan santai tanpa rasa bersalah atau malu. Di awal 1965 sebagian pekerjaan pengangkutan barang eks Rusia dari Tanjung Priok ke Cilegon diborongkan pada kontraktor yang memiliki armada angkutan cukup besar, Direktorat Angkutan Angkatan Darat (DAAD), bagian dari Angkatan Darat. Proses negosiasi penentuan tarifnya tidaklah kuketahui, di atasku ada pimpinan lebih tinggi, Ir Lintang Toruan dan di atasnya Ir Tunky Ariwibowo. Sebagai tenaga pelaksana dan pengawas di lapangan aku tinggal menerima kiriman barang di Cilegon, menghitung kubikasi barang yang sebagian besar berbentuk peti kayu atau tonase yang dibongkar di lapangan, kemudian mengakurkan dengan tagihan kontraktor untuk periode yang sama. Suatu kali terjadi selisih begitu besar, kontraktor mengirim seorang petugas berpangkat letnan satu membawa tagihan Rp 121.000.000. Menurut perhitunganku dalam periode tagihan yang sama nilainya hanya Rp 96.000.000, selisih Rp 25.000.000. Utusan dari Jakarta bersikukuh jumlah tagihannya sebesar angka tersebut, sedang aku pun bersikeras dengan catatanku. Karena tidak tercapai kata sepakat, datang atasan sang letnan satu, seorang letnan kolonel. Beberapa kali tidak berhasil rupanya membuat Pak Letkol putus asa, dia datang ke asrama malam hari dan meminta berbicara empat mata. Malam itu dia berterus terang mengatakan sebenarnya dia pun tahu nilai tagihan sebenarnya 96 juta, tetapi sengaja dinaikkan menjadi 121 juta. Antara percaya dan tidak, dalam hati kubayangkan dinaikkan 25 juta, kenaikan lebih dari 25 prosen, untuk siapa saja? Pak Letkol berjanji memberiku sekian, lalu siapa lagi yang diberi janji? Kalau berita acara penerimaan barang kuteken, atasanku akan langsung memberi tanda ‘Acc’ dan kuitansi akan dibayar oleh Bagian Keuangan. Sebagai perbandingan gaji pokok sebagai Pegawai Negeri golongan F-2 saat itu Rp 17.200 ditambah tunjangan beras dan lain-lain bisa mencapai Rp. 40.000. Dengan tegas kukatakan kepada Pak Letkol aku tidak akan menekan Berita Acara yang keliru tersebut. Beberapa kali Pak Letkol mengirim utusan dari Jakarta mendesak, datang dengan memakai pakaian seragam militer dan sekian kali pakai pakaian sipil, tetap kutolak. Akhirnya dia pun menyerah mengubah Berita Acara sesuai data yang benar, saat disodorkan aku bilang, ‘Kalau angka ini yang Bapak sodorkan, dari dulu sudah saya teken’”. Itulah korupsi telanjang tersebut.

Studi dan pekerjaannya di bidang teknik, perhatiannya sangat luas pada bidang-bidang lain, ekonomi, politik, sosial, sejarah, sastra, musik, bahasa, ekologi, dengan demikian catatannya berwarna-warni penuh dengan aspek kemanusiaan. Bertahun-tahun ia berlatih menulis catatan harian, selalu memberikan deskripsi dengan teliti dan rinci, mudah bagi kita membayangkannya. Catatan yang dibuatnya akan dapat

dijadikan bahan dasar menarik bagi pembuat film yang berminat. Sebagai seorang tapol yang sedang bekerja rodi, ia masih sempat memikirkan soal sejarah Banten yang hilang karena penemuan benda-benda bersejarah ketika dilakukan pengerukan pelabuhan kuno Karangantu tidak didokumentasikan. Ia sempat membuat uraian tentang gagasan Propinsi Banten yang dewasa ini sudah menjadi kenyataan.

Membaca majalah luar negeri (Februari 1970) tentang kekayaan seorang pejabat Orba sebesar 38 juta dollar, ia langsung menghitung. Ongkos seorang tapol ketika itu Rp 35/hari, jika dijadikan Rp 100 maka tiap tapol akan makan kenyang bergizi. Dengan kurs Rp 378 masa itu maka sang koruptor dapat memelihara 500 budak tapol yang ada di Banten dengan kenyang bergizi selama 554 tahun.... Perhitungan sederhana yang pahit ini menggugah renungan kita. Selama lebih dari 30 tahun ini berapa miliar dollar kekayaan negeri ini telah dijarah oleh para penguasa dan pengusaha hitam. Berapa miliar dollar dana yang telah terakumulasi mereka kuasai dengan segala macam cara? Bukankah kini dengan dana tersebut mereka dapat memperbudak jutaan rakyat, 200 juta rakyat Indonesia? Karenanya money politics merupakan ancaman nyata yang telah dan akan terjadi, tidak aneh jika reformasi baru kulit belum isi. (Sebagian pengantar naskah belum terbit Ir DSM Sastrosudirdjo, Banten Seabad Setelah Max Havelaar, Catatan Seorang Tapol 12 Tahun Dalam Tahanan, Kerja Rodi & Pembuangan, penyunting dan pengantar oleh Harsutejo).

\*\*\*\*\*

40 Tahun Tragedi 1965 (4)

## Penjara Tapol

Pasar Hewan Nusakambangan

Selasa pagi 6 April 1971, ketika bangun kami baru sadar kereta sudah berada di stasiun Cilacap, Jawa Tengah. Kami rombongan tapol dari Banten segera berkemas, keluar dari gerbong berbaris di lapangan terbuka di depan stasiun. Kami disuruh berjongkok sambil meletakkan kedua tangan di atas kepala persis seperti penjahat yang tertangkap basah polisi. Sambutan meriah dengan sumpah-serapah yang jarang kami dengar selama di Banten. Di sini begitu entengnya kata-kata kasar dan jorok dari mulut para petugas berpakaian sipil. Rupanya mereka mau pamer kekuasaan di depan para militer, bahwa seragam dril khaki tidak kalah garang dari mereka yang berseragam hijau.

Sipil berseragam dril dengan atribut Departemen Kehakiman di lengan baju dan pundak merupakan petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP) alias penjara Nusakambangan. Selanjutnya kami diangkut dengan truk menuju pelabuhan Cilacap. Sampai ke pelabuhan kami turun dan kembali dibariskan, dilakukan pemeriksaan ulang. Selama di di Banten boleh dibilang aku pribadi merasa diperlakukan secara manusiawi dalam arti tidak ada sikap penguasa yang memandang hina atau merendahkan derajat, meski tetap saja sebagai pekerja rodi. Kami disuruh jongkok dengan kedua tangan ditaruh di atas kepala, sipil penjara menghitung tapol dengan cara mengetuk-ketukkan tongkat rotan ke atas kepala kami seperti menghitung kambing di pasar hewan. Untuk teman-teman yang selama di Banten bekerja rodi di

proyek Sawahluhur atau proyek Cisimeut, perlakuan yang mereka alami sama kasar dan tidak manusiawinya.

Petugas di Cilacap cukup berpengalaman dalam menangani tapol sejak 1965 sampai 1971 saat kami datang. Mereka memperlakukan tapol sebagai jenis makhluk antara hewan dan manusia. Disebut hewan tak berekor dan punya akal, disebut manusia, tak punya harkat manusia dengan makanan boleh disamakan dengan hewan. Di dermaga pelabuhan kami dibariskan lagi dan disuruh jongkok lagi, menunggu giliran diangkut berangsur-angsur dengan kapal kecil ke pulau yang tersohor di kalangan penjahat kakap. Sampai tiba giliranku bersama beberapa teman termasuk Ir Mamad Sumadiredja dan Ir Gondosumarmo, dua rekan dari proyek baja Cilegon. Kami mendarat di dermaga Sodong, Nusakambangan. Perjalanan berlangsung singkat seperti menyeberangi sungai lebar. Semua bangunan di Nusakambangan tampak begitu jelas dari Cilacap, begitu pula sebaliknya. Kembali kami dibariskan dengan cara jongkok, dihitung ulang kemudian diperintahkan jalan kaki menuju penjara Gliger. Sesampainya di Gliger yang tak jauh letaknya, para tapol dimasukkan ke beberapa kamar besar, pintu dikunci. Kamar lembab dan pengap, mungkin karena dijejali terlalu banyak orang. Sekitar jam 14.00, datang petugas dengan membawa daftar nama, kami dipanggil satu per satu. Rupanya kami dipisah antara yang sarjana dan tingkat akademis dengan yang lain. Kami yang dipanggil dikeluarkan dari ruangan dan diperintahkan naik truk sambil menerima pembagian makanan dalam besek. Ketika besek kubuka makanan sudah basi.

Meninggalkan Gliger menjelang matahari mulai condong ke barat, melaju di jalan berdebu, berkelok-kelok mengikuti kontur pantai, di beberapa tempat ditumbuhi pohon kelapa. Kami sampai ke suatu tempat yang agak tinggi, mendaki dari pantai menuju bangunan yang di depan kiri kanannya terdapat pohon peneduh. Jalanan diberi batu pembatas batu kapur. Kami telah sampai di tempat tujuan, penjara Karantengah. Prosedur masuk penjara pun kami lewati seperti yang pernah kami alami di Penjara Serang. Segala barang bawaan kami diperiksa, seluruh isi tas dikeluarkan dan dipilah-pilah, apa yang boleh dibawa masuk dan apa yang harus ditinggalkan di kantor. Barang-barang berharga, seperti cincin, jam tangan, uang harus ditiptkan di kantor, dicatat dalam sebuah buku besar. Barang-barang berbahaya yang bisa dipakai untuk menyerang orang atau bisa dipakai untuk bunuh diri, seperti tali sepatu, pisau lipat, ikat pinggang, botol obat juga harus ditiptkan di kantor.

Hari ketiga rombongan Banten dan Kebonwaru, Bandung dikumpulkan di los terbuka beratap seng untuk mendapat penjelasan Mimbap (Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan) alias Kepala Penjara, akronim “enak diucapkan dan didengar” tanpa memikirkan kaidah bahasa. Penjelasan yang disampaikan menyangkut peraturan dan tata tertib penjara, kami sudah bosan mendengarnya, tetapi toh harus mendengarkan dan mengangguk setiap kali Mimbap bertanya, “Saudara-saudara faham?” Yang kedua penjelasan tentang status kami, tapol yang dipersiapkan untuk dikirim ke Pulau Buru yang akan hidup sebagai petani. Mimbap yang bernama Paimo itu perawakannya kurus kerempeng, berbicara bak pembesar di hadapan rakyat kecil yang martabatnya jauh lebih rendah darinya. Kami sudah terlalu sering menghadapi kepongahan semacam itu, baik dari petugas militer maupun sipil. Dia ingin

menunjukkan kepada kami sebagai penguasa tertinggi di Karangtengah, nasib kami berada di tangannya.

Sebuah pulau kecil di seberang Cilacap dengan luas sekitar 124 km persegi atau kurang lebih lebar enam kilometer dengan panjang dua puluh satu kilometer. Pulau kecil ini begitu terkenal di kalangan narapidana kriminal, sebagai tempat paling ditakuti. Kalau di Amerika Serikat, mungkin penjara Alcatraz bandingannya, yang juga terletak di sebuah “pulau setan” di Teluk San Fransisco. Di tengah pulau berdiri bukit memanjang sebagai punggung, dengan pantai yang landai dan berpasir di bagian utara dan terjal di selatan menghadap ke Samudera Hindia. Tidak jauh dari penjara Karangtengah ke arah timur ada sebuah benteng kuno, konon peninggalan Portugis, walaupun tidak jelas kapan orang Portugis pernah mendarat dan bertahan di pulau ini.

Nusakambangan terpisah dari Pulau Jawa oleh selat selebar sekitar dua kilometer, tidak terlalu jauh bagi orang yang nekat melarikan diri dan mahir berenang. Kalau dibilang sekali masuk Nusakambangan orang tak bisa lagi lolos itu hanya mitos yang dibesar-besarkan. Di pulau ini terdapat sembilan penjara yang dibangun dalam kurun waktu berbeda, Permisan dibangun 1908, Nirbaya 1912, Karanganyar 1912, Batu 1925, Karangtengah 1928, Gliger 1929, Besi 1929, Limusbuntu 1935, Kembang-kuning 1950. Semuanya dibangun dimasa penjajahan Belanda kecuali Kembang-kuning.

Makan selama di Karangtengah sangat buruk, apalagi jika dibandingkan selama kerja rodi di Banten, bahkan dibanding jatah paling buruk yang kudengar di proyek Sawahluhur. Untuk para tapol dari DKI Jakarta jatah makanan di Nusakambangan sama buruknya atau lebih buruk dari kondisi penjara Salemba. Hal ini nampak dari penampilan fisik para tapol eks DKI Jakarta, secara umum lebih kurus bila dibandingkan dengan tapol asal Jawa Timur atau Jawa Barat yang sudah tergolong kurus. Pengalaman kami sendiri jatah makan di penjara selalu buruk, masih diperparah oleh budaya korupsi para petugasnya. Penjara Nusakambangan banyak memakan korban mati kelaparan di awal 1966. Apalah artinya nasi semangkuk kecil tidak padat, sepotong kecil telur rebus, tambah sayur berupa air asin tanpa isi. Pada suatu hari Minggu ada pembagian makanan berupa bubur kacang hijau yang terdiri dari air dengan sedikit gula, sedang butir kacang hijaunya hampir tidak ada. Seorang tapol dengan bercanda nyeletuk, “Butir kacang hijaunya pandai berenang, sulit ditangkap”. Canda ini berakibat buruk, ia diseret keluar dari antrian, dibawa ke kantor dan dihajar beberapa petugas. Inilah salah satu bentuk konkrit ucapan Mimbap, selama berada di Nusakambangan nasib kami ada di tangannya.

Dua macam penyebab meninggalnya tapol, karena siksaan atau karena kelaparan. Mati kelaparan pada hakekatnya sama artinya dengan mati disiksa karena kami dibuat lapar agar mati. Karena jatah makan yang begitu sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka para tapol harus punya inisiatif untuk mencari tambahan sendiri. Bagi mereka yang bekerja di ladang kadang bisa membawa pulang sekerat dua kerat singkong rebus lewat cara diam-diam. Untuk mencuri jagung agak sulit karena harus mematahkan jagung dari pokok tanaman, kalau terlalu banyak akan segera ketahuan. Paling mudah mencuri singkong, umbi singkong ada di bawah tanah, jika dari satu pohon tua diambil satu atau dua buah umbi kemudian segera

ditimbun kembali bekasnya tidak nampak. Petugas bisa saja melihat tanah sekitar pohon menunjukkan bekas tapak cangkul, tetapi justru itu tugas para tapol merawat dan menyangi tanaman. Efek yang ditinggalkan justru menunjukkan si tapol rajin merawat tanaman, padahal mencuri singkongnya. Masalah berikutnya bagaimana caranya membawa singkong yang sudah direbus di ladang tersebut bisa masuk ke dalam penjara untuk teman yang sakit atau yang tidak mendapat giliran bekerja di luar tembok. Tidak jarang saat pulang kerja digeledah di pintu masuk, jika ketahuan membawa makanan dari luar yang berarti mencuri, itu masalah besar. Tidak semua petugas galak, tak jarang mereka tutup mata. Kadang kami mencuri ayam atau kucing yang kami bawa ke ladang, dipotong dan dimasak, sisa-sisa tulangnya dikubur. Satu orang memasak, beberapa tapol disebar dengan jarak cukup untuk mengawasi daerah sekitarnya, memberi kode tertentu kalau ada petugas yang mendekat. Persiapan selalu diperhitungkan untuk hal-hal mendadak, karena asap api tidak mungkin disembunyikan. Di Banten aku sudah mencicipi daging ular yang lengket seperti lem sesudah dingin. Daging kucing berwarna keputihan dengan serat halus. Sutojo sudah berpengalaman menangani kucing ketika di penjara Surabaya.

Absen pagi rombongan dilepas petugas, kontrol biasanya dilakukan petugas menjelang istirahat jam 12.00 siang. Waktu kosong dari kontrol cukup panjang, cukup untuk membereskan seekor ayam sampai tinggal tulang belulang sekaligus menyemburkan bekas-bekasnya. Menu lain yang populer bekicot yang bisa kami temukan di banyak tempat terutama di ladang. Teman-teman mengolah bekicot begitu telaten dengan air kapur menghilangkan lendir, membersihkannya berulang kali baru merebusnya, lalu memberinya bumbu. Saat dihidangkan pertama aku sempat ragu, tetapi desakan perut lebih kuat. Beberapa teman meyakinkan bahwa bekicot termasuk makanan mewah di restoran di Paris. Soemartojo, tapol asal DKI yang pernah kuliah di Universitas Lomonosov, Moskwa, getol menganjurkan makan bekicot dengan menjelaskan kandungan gizinya (Petikan ringkas dari naskah belum terbit Ir DSM Sastrosudirdjo, Banten Seabad Setelah Max Havelaar, penyunting Harsutejo).

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

40 Tahun Tragedi 1965 (5)

**Jenderal Soeharto dan Golkar**

## **Di Pundak Tapol**

Pada suatu hari sebuah helikopter mendarat tak jauh dari penjara Karangtengah, Nusakambangan, membawa rombongan tamu dari Jakarta yang dipimpin Brigjen Soedjono Hoemardani, konon merupakan misi khusus Presiden Soeharto. Kedatangan mereka cukup merepotkan sejumlah tapol. Konon Jenderal Soedjono Hoemardani ini penasehat spiritual Presiden Soeharto dan menjadi orang kepercayaan. Ketika itu sang utusan istimewa mengenakan pakaian adat Jawa lengkap, berkain panjang atau bebed dengan blangkon, begitu pula dengan rombongan pengiringnya. Kedatangan para tamu agung ini erat hubungannya dengan Pemilu yang akan diadakan dalam bulan Juli 1971.

Menurut para tapol yang mengantarnya, Brigjen Soedjono Hoemardani mendapat tugas dari Presiden Soeharto untuk pergi ke sebuah pulau kecil di sebelah selatan Nusakambangan, konon tempat tumbuh pohon Wijayakusuma. Untuk mencapai pulau kecil itu orang harus menyeberang dengan perahu. Nah, di sinilah tugas para tapol dalam menyukseskan Golkar dalam Pemilu. Beberapa tapol memikul perahu dari penjara Karangtengah sampai ke pantai selatan melewati hutan menempuh jarak kira-kira 8 kilometer. Hal itu hanya dapat dilakukan secara bergantian.

Apakah kunjungan ini merupakan usulan Soedjono Hoemardani atau keinginan Soeharto sendiri, hanya mereka berdua yang tahu. Menurut cerita, sejak jaman dulu raja-raja Jawa percaya jika mereka mempunyai suatu keinginan penting diutuslah seseorang ke pulau kecil ini untuk bersemedi dan berdoa sambil menantikan mekarnya bunga Wijayakusuma. Jika bunga mekar, maka keinginan sang raja akan terkabul. Presiden Soeharto yang “Raja Jawa” konon percaya akan dongeng semacam itu. Menurut cerita dari mulut ke mulut, Brigjen Soedjono Hoemardani sukses melaksanakan misinya, melihat bunga Wijayakusuma mekar, ini pertanda keinginan Soeharto agar Golkar menang dalam Pemilu akan terlaksana. Kami tentu saja tidak tahu apakah benar bunga tersebut mekar karena tidak ada tapol yang ikut menyeberang. Kalau yang diseberangkan hanya seorang Soedjono Hoemardani tanpa pendamping, maka tak ada orang lain yang menjadi saksi mata. Alhasil semua harus percaya begitu saja sebagai yang dikatakan Pak Jenderal. Para tapol pengantar tidak boleh mendekati lokasi penyeberangan.

Soeharto yang seorang jenderal dan selalu mengandalkan logika dalam siasat perang dan pertempuran, dalam menghadapi Pemilu perlu juga rupanya mencari ketenangan dan kepastian pada “kesaktian” sekuntum bunga. Keesokan harinya para tamu kembali dengan helikopter ke Jakarta, perahu yang telah berjasa menyeberangkan utusan khusus presiden kembali ke Karangtengah naik pundak para tapol. Pikiran nakalku mengembang dalam benak, tak terbayang seandainya malam itu bunga Wijayakusuma tidak mengembang. Pemilu dibatalkan atau ditunda? Atau beranikah Soedjono Hoemardani melapor kepada Soeharto bunga tersebut tetap menguncup? Begitulah konon bunga mengembang artinya Pemilu akan dimenangkan Golkar. Tanpa harus mengutus Pak Brigjen, Golkar toh akan menang, berbagai cara telah ditempuh untuk itu termasuk menteror lawan-lawannya seperti sering dikeluhkan partai lain. Bentuknya bisa mencuri start kampanye, massa organisasi lain dibajak, kampanye organisasi lain dihambat dsb. Banyak hal sudah kami baca di koran, bagaimana Kokarmendagri melakukan intimidasi. Lalu pegawai negeri terkena ketentuan apa yang disebut “monoloyalitas”, hanya ada satu pilihan, mencoblos Golkar. (Petikan ringkas dari memoar seorang tapol belum terbit, Ir DSM Sastrosudirdjo, Banten Seabad Setelah Max Havelaar, penyunting Harsutejo).

\*\*\*\*\*

40 Tahun Tragedi 1965 (6)

## Catatan Bocah Blitar Selatan

(Ditulis kembali oleh Harsutejo dari transkrip yang dibuat oleh Dewi Ratnawulan berdasarkan kisah narasumber Mbak Santi).



hari-hari pengapku di balik terali besi  
mencengkam bersama kawan  
hari nanti yang cerah  
hidup seluruh kami berikan  
engan luka dalam derita

menunggu dan menanti lagi  
detik dan jam tanpa harapan  
jauh dari cinta rindumu  
dalam pembuangan hukuman mati  
'lah dipatok maut pasti

kehangatan berlimpah  
ibu hidup mengabdikan  
nanti lebih bercahaya  
hati dan pikiran  
luka dengan derita

bertahun kami dambakan  
kebebasan kemanusiaan murni  
semua di negeri ini  
hidup berlanjut  
luka derita terbalut

ayahmu  
cita hari nanti  
dalam sanubari  
bijak bestari  
kebebasan tanpa pengabdian  
(‘Surat Untuk Anakku’ oleh Pudji Aswati 1968).<sup>1</sup>

itu menyentuh perasaanku, ditulis oleh ibuku ketika berada dalam penjara. Puisi ini kubaca beberapa tahun sesudah kedua orangtuaku telah tiada. Puisi itu tercantum dalam buku harian bapak The Last Year of Gatot Lestario yang ditulisnya ketika mendekam di penjara Pamekasan, Madura. Ketika aku teringat orangtuaku, buku ini menjadi curahan hati. Begitu banyak kenangan indah tentang mereka, juga kenangan sedih, sering membuat air mata meleleh menangis dalam hati. Ketika kami masih berkumpul, hidup kami sangat bahagia. Hampir setiap minggu kami diajak rekreasi. Kami terkadang juga diajak ketika mereka bertugas ke daerah-daerah. Sampai tiba badai yang memporak porandakan keluarga dan kebahagiaan kami.

aktivis PKI, ibu salah seorang pengurus Gerwani Jawa Timur. Bapak berasal dari Malang, ayahnya, jadi kakekku, pernah menjabat sebagai walikota Malang. Bapak bersekolah di Taman Siswa, Yogyakarta, ia tinggal mondok di rumah Ki Hajar Dewantara. Sejak mahasiswa ia telah aktif dalam pergerakan. Ibu yang berasal dari Magelang, kakekku dari ibu pada masa penjajahan Jepang ditangkap dan meninggal di penjara. Oleh pemerintah RI kakek diangkat sebagai salah satu Perintis Kemerde-

kaan karena kegiatannya dalam pergerakan melawan penjajahan. Orangtua kami bertemu waktu sama-sama bersekolah di Yogyakarta dan saling diperkenalkan oleh Ki Suratman, sesepuh Taman Siswa.

suatu hari pada tahun 1965, segerombolan pemuda datang mengepung rumah kami sambil mengacungkan golok dan clurit. Gerombolan itu berteriak-teriak menyuruh kami keluar, mereka seperti orang kesurupan, menyeramkan. Umurku 5 tahun, gadis mungil yang gemuk dan lucu, dengan kulit bersih. Aku sangat ketakutan dan menangis, berada dalam gendongan Inem, pembantu kami. Bapak tidak ada di rumah. Tiba-tiba api sudah menyala di mana-mana. Kami berdua bersembunyi di belakang almari dekat dapur. Mas Hardika, kakakku yang berumur 10 tahun, berusaha melindungiku dengan berdiri di depanku. Aku menggigil ketakutan dan sudah tidak bisa menangis lagi. Kakak menyuruhku berdoa. Ibu berganti pakaian lusuh agar tidak dikenali, sebelum pergi menyelamatkan diri ia menitipkan kami kepada tetangga sebelah. Untunglah tetangga kami, seorang militer berpangkat Laksamana, berhasil menyelamatkan kami. Rumah itu akhirnya terbakar habis. Sejak itu sering terbayang akan gerombolan galak dan pembakaran rumah kami. Ketika terjadi kerusakan bulan Mei 1998 di Jakarta, kembali terbayang peristiwa itu, badanku menggigil, lemas, nafas sesak.

itu keluarga kami terpisah-pisah, aku dititipkan pada seorang bibi masih satu kota di Surabaya, sedang kakakku ikut seorang bibi, adik ibu di kota kecil K di Jawa Tengah. Setelah lewat hampir dua tahun aku diambil oleh nenek dari ibu untuk berkumpul kembali bersama ibu. Yang kuingat sejak itu kami berdua selalu pergi buru-buru dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota ke kota lainnya. Belakangan kutahu perjalanan itu untuk menghindari penangkapan. Dan akhirnya kami tinggal di Blitar Selatan pada permulaan 1967. Setelah berpisah hampir dua tahun, pada suatu hari kami bertemu bapak. Aku kaget, bapak muncul dengan pakaian kumal compang-camping. Ibu menanyakan hal-hal yang tidak kumengerti artinya, mereka berbicara berbisik-bisik dengan wajah serius. Selanjutnya bapak selalu datang pada waktu yang sama, jam satu malam. Pintu diketuk beberapa kali dengan kode tertentu, aku pun selalu bangun dan ikut bergabung. Aku selalu duduk di pangkuan bapak, senang sekali memegang dan mengusap kumis serta jenggotnya, lalu diciturnya pipi dan kepalaku serta diusapnya dengan penuh sayang. Suasana yang hangat itu selalu begitu singkat, ayah nampak buru-buru seperti takut ada orang yang mengintai. Lama-kelamaan aku jadi terbiasa dengan situasi tersebut. Ia selalu pergi lagi tepat pada jam 3 dini hari, sampai kami diberitahu untuk segera pindah. "Kita sudah terkepung, harus segera lari menghindari," begitu kata bapak. Sebagai anak kecil aku bertanya, "Kenapa mesti lari-lari?" Bapak hanya menjawab bahwa nanti kalau aku sudah dewasa akan tahu artinya.

itu oleh ibu aku dititipkan kepada seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Itulah pertemuanku terakhir dengan ibu sebelum ia ditangkap. Aku menangis terus di dalam mobil colt mini yang membawaku ke rumah adik ibu dan berkumpul kembali dengan kakakku, Mas Hardika. Aku dilahirkan pada tahun 1960, tetapi dalam akte kelahiraku yang kemudian dibuat oleh keluarga bibi dan paman, tahun kelahiranku diubah menjadi 1958. Mas Hardika lahir pada 1955, karena kami berdua diakui sebagai anak kandung mereka maka perlu dibuat akte kelahiran yang berturutan secara masuk akal dengan keempat anak bibi sendiri, sementara kedua sepupuku

anak sulung kembar sebaya dengan aku. Bibi dan paman kami keduanya kepala sekolah lanjutan atas, hidup di kota kecil secara memadai serta memperlakukan kami seperti anaknya sendiri. Kami pun beruntung dapat menikmati sekolah dengan baik.

Sekolah teman-teman sering bertanya diriku anak siapa, mereka melihat aku amat berbeda dengan anak-anak bibi yang lain. Akhirnya mereka tahu kalau aku bukan anak kandung bibi. Hal ini membuatku merasa minder dan menjadi anak pendiam. Aku jarang bergaul dengan teman-teman. Sebaliknya aku memiliki kemauan keras untuk membuktikan bahwa aku anak orang baik-baik dan bertekad hendak menjadi yang terbaik. Aku selalu menjadi juara kelas, hal ini terutama dorongan nenek. Ia selalu mendukung dan membombong, memberikan perhatian besar pada perkembangan kami. Sejak kecil ia selalu mendidik kami dalam segi agama, menekankan arti pentingnya berdoa, dengan doa kita bisa mengubah diri. Dengan kasih sayang setiap Hari Raya Lebaran beliau selalu mengajak kami berdua menjenguk ibu dan bapak di penjara. Ayah tertangkap di Jakarta pada tahun 1972. Untuk bisa menjenguk, sebelumnya nenek harus mencari informasi dari satu penjara ke penjara lain, dari satu kota ke kota lain. Kunjungan itu amat kami tunggu-tunggu, sampai kini pun aku merasakan makna yang mendalam bila Lebaran tiba. Setelah salat led, kami bertiga menjenguk ibu dan bapak. Sering kami mendapat hinaan dan perlakuan melecehkan dari petugas, "Hei, anak PKI!" Setiap kami menjenguk aku selalu memperhatikan kondisi fisik bapak. Pernah kudapatkan bapak berjalan dengan menyeret sebelah kakinya, itu bekas siksaan, kakinya ditindih dengan kaki meja, beberapa petugas duduk di atasnya sambil menekan. Ia juga distrum dengan alat listrik, "Biasa, mereka mencari informasi yang dibutuhkan". Aku dengar pernah bapak tidak diberi air minum. Untuk bertahan hidup, ia minum air kencingnya sendiri.

Penjara ibu menderita sakit kanker leher rahim, badannya sangat lemah, perutnya membuncit seperti orang hamil. Untunglah, hal itu dipergoki oleh kunjungan Palang Merah Internasional meskipun penguasa berusaha menyembunyikannya. Ibu dioperasi sampai empat kali. Aku dan kakak ketika itu tidak bisa mendekat ibu karena sebelumnya ia bilang kalau kami bukan anaknya, tetapi anak adiknya. Pada suatu saat dengan dukungan nenek kami sangat ingin mempertemukan ibu dan bapak. Dengan berbagai cara untuk memperoleh izin dari berbagai instansi dan berbagai meja kami mengorbankan banyak waktu, tenaga, uang dan siap dihina, tetapi gagal. Pada suatu-saat emosiku tak tertahankan karena kecewa dan marah, maka meluncurlah kata-kata spontan kepada seorang pejabat militer, "Apa Bapak tidak tahu perasaan kami yang lama ditinggal kedua orangtua? Kalau Bapak mengalami hal seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan?" Komandan itu rupanya kaget dengan kata-kata yang kulontarkan. Ketika ibu dibebaskan pada 1987, dia menyatakan salut dengan anak ibu yang berani berbicara terus terang kepada dirinya. Siksaan yang dialami ibu dalam penjara sangat kejam. Ketika bapak belum tertangkap ibu dihajar habis-habisan untuk mendapatkan informasi tentang keberadaannya. Setelah dibebaskan kesehatannya amat buruk, ia menderita gangguan saraf. Kami harus membawanya ke dokter ahli karena ibu tertawa tidak bisa dihentikan.

Dieksekusi pada tahun 1985. Waktu itu dia berada di penjara Pamekasan, Madura. Sampai kini kami tidak tahu di mana ayah dikubur, ketika ia dieksekusi kami pun

tidak diberitahu. Saat itu aku sedang menempuh ujian statistik, mata kuliah yang sangat aku kuasai karena memang menyukainya. Tetapi ketika waktu tinggal 15 menit lagi, kertas ujianku masih juga kosong. Dosen yang menunggu berhenti di samping bangkuku dan bertanya apa yang terjadi dengan diriku. Dia memintaku menemuinya di kantor setelah ujian selesai. Aku tidak bisa berkata apa pun kecuali menangis. Esoknya bapakku dieksekusi yang kuketahui dari siaran televisi dan koran. Kejadian sesudah itu sungguh tak tertahankan. Ketika itu aku sudah bekerja, setiap hari diantarjemput mobil karyawan. Yang terakhir dijemput adalah dua orang anggota Kopasus yang bertugas di perusahaan tempatku bekerja. Di dalam mobil, kedua tentara itu membicarakan berita televisi tentang pelaksanaan hukuman mati bapakku. Oh, sungguh siksaan luar biasa bagiku, begitu sulit menyembunyikan perasaan sedih. Hari-hari berikutnya begitu kelabu murung yang membuyarkan konsentrasiku. Aku tak bisa mengadu kepada siapa pun kecuali kepada-Nya. Menjadi anak tapol merupakan suatu penderitaan tersendiri. Suatu kali aku berpacaran dengan adik teman akrab kakak, anak seorang pejabat militer berpangkat Laksamana. Ketika hubungan kami mengarah serius, kakakku menceritakan siapa kami yang sebenarnya. Ibunya langsung mengirim surat agar kami putus hubungan karena hal itu akan sangat membahayakan keluarga dan masa depan anaknya.

Aktivis ibuku tahu betul risikonya, dia pun siap menerimanya. Waktu ia dibebaskan kondisinya sangat buruk. Setelah berobat dengan menghabiskan biaya ia tidak bisa pulih, tetapi semangat hidupnya tetap besar. Sejak keluar penjara ibu tinggal di Malang. Dalam kondisi kesehatan yang buruk, ibu mengumpulkan para istri penjual bakso dan orang miskin di lingkungan tempat tinggalnya diajari menyulam, ibu juga memberikan bantuan modal kerja. Saat itu penghasilanku cukup besar, seminggu sekali aku dapat menjenguknya ke Malang dengan pesawat. Ada satu harapan ibuku yang tidak kesampaian, melihat jatuhnya rezim yang berkuasa. Bagiku sendiri kejatuhan rezim Suharto terasa seperti menggelundungnya batu besar yang selama ini menindih bahu kami. Ada perasaan sesal akan apa yang terjadi pada keluarga kami, tapi kemudian ada juga rasa bangga pada orangtuaku, pada ayahku. Ya, rasa bangga.

\*\*\*\*\*

40 Tahun Tragedi 1965 (7)

## **Tapol Golongan A Selamat Dari Pembantaian**

Oleh:Harsutejo

Bulan Oktober 1965 isteriku sedang hamil tua anak kami pertama. Jam 3.00 pagi buta pintu rumah kami diketuk keras. Setelah bangun aku bersiap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Seperti telah terlatih beberapa minggu, isteriku yang membukakan pintu. Aku segera keluar kamar menemui mereka, seorang polisi dan tentara. Kami baru beberapa hari pindah ke Jl Kenanga dengan menempati sebuah kamar. Kekayaan kami terdiri dari sebuah tempat tidur, sebuah almari pakaian dan dua rak buku kecil. Banyak buku milikku disita, percobaanku untuk menjelaskan bahwa itu semua buku-buku sejarah dan pendidikan sesuai dengan studi dan pekerjaanku, mendapatkan jawaban klasik, "Hanya untuk diperiksa, nanti dikembali-

kan.” Bagaimana akan dikembalikan kalau tidak pernah dibuat berita acara penyitaan sementara.

Diluar rumah berkumpul segerombolan orang yang mengawasi dengan berbagai alat yang tajam maupun tumpul. Rupanya mereka menjadi kurang bernaafsu setelah menyaksikan sang pesakitan cumalah seorang berbadan keking yang sekali tepuk akan mampus. Buru-buru isteriku memberikan jaket untuk kukenakan beserta cucuran air mata. Mencinta itu saling mendidik. Ini bagian panjang dari proses percintaan kami dalam rumahtangga baru, ibarat pemahkotaan dan penyaliban sekaligus seperti yang digambarkan pujangga Khalil Gibran dalam skala mini saja.

Itu jalan-jalan kota Malang mulai menggeliat. Kami sampai ke Polresta Malang di pojok jalan Oro-oro Dowo dan Kayutangan. Setelah didata, aku diantar ke sebuah bangunan seperti los pasar. Di sana sudah ada barang 150 orang, ada yang tidur, duduk-duduk, rebahan, ada yang sedang salat. Beberapa orang telah kukenal, seorang dosen, pegawai penerangan, wartawan, mahasiswa. Ada juga seorang lurah yang telah kukenal ketika ikut acara turun ke desa, di suatu pelosok Malang Selatan. Ia menceritakan kisah pelariannya setelah seluruh perangkat desanya dibantai di depan keluarganya masing-masing. Hanya secara kebetulan saja ia bisa selamat dan lari ke kota Malang, kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi setelah menggelandang beberapa waktu. Tentunya cerita itu ulangan yang ke sekian kalinya meski masih dengan getar emosi.

Hari ke lima penahanananku, suatu malam beberapa puluh di antara kami disuruh bersiap untuk dipindahkan ke suatu tempat tanpa disebutkan. Pemindahan itu pun tak diberitahukan kepada para keluarga. Ini suatu metode teror yang dilakukan penguasa. Beberapa orang benar-benar panik karena teringat Pak Lurah beserta beberapa orang lain yang dijemput tentara beserta sejumlah pemuda, selanjutnya raib untuk selamanya. Seorang polisi tanpa maksud menakuti-nakuti menceritakan hal itu, mayat mereka dibuang ke Kali Brantas. Sementara itu isteriku termasuk sebarisan isteri para tapol yang kebingungan mencari suaminya. Teror mental telah mencapai sasarannya. Kemudian hari isteriku menceritakan, ia datang tiap hari selama seminggu ke kantor polisi dengan perut buncitnya. Ia tidak mendapat keterangan tentang keberadaanku, petugas tak mengizinkannya bertemu Kapolres. Isteriku pun pergi ke Kodim dan Korem, kedua instansi ini menyarakannya untuk ke kantor polisi. Akhirnya isteriku berhasil mengirimkan satu bungkus abon, satu bungkus sambal pecel, dan satu setel pakaian yang kusambut dengan sukacita di penjara Lowokwaru. Beberapa hari kemudian aku mendapatkan berita, sebenarnya isteriku mengirimkan lebih banyak lagi. Itu bukan cerita baru, jeruji besi dan tembok tebal tidak cuma menyekap dan memisahkan orang dari dunia ramai, ia juga menggerogoti dan menyunat milik pesakitan yang sekarat sekalipun. Pada suatu hari seorang polisi yang tak kukenal masuk blok kami dan mencariku. Dengan berpura-pura omong keras ia menyelipkan sepucuk surat. Isteriku telah melahirkan bayi laki-laki dan menunggu nama dariku. Aku menuliskan nama pada sepotong kertas yang disodorkannya.

Lowokwaru aku sempat bertemu Goei Poo An, pemimpin redaksi dan pemilik koran Trompet Masyarakat Surabaya yang berada di sel berseberangan. Koran itu dikenal sebagai pendukung Bung Karno, pembela rakyat kecil dan beredar luas di Jawa

Timur. Pada minggu ketiga kedatangan rombonganku, gelombang pemanggilan pada jam 2.00 – 3.00 pagi mulai lagi. Mereka semua tak ada kabar beritanya, lenyap bak ditelan bumi. Di kemudian hari kuketahui sebagian dari mereka dibantai di muara Kali Lesti, Gladakperak, pantai selatan Malang. Salah seorang tapol itu Drs Hadi-negoro, teman dekat yang selalu membawakan semangatnya yang tinggi dengan lembut dan santun, ketua jurusan Sejarah FKIP dan Ketua HSI Cabang Malang. Ia dicomot dari tahanan di belakang stasiun beserta sejumlah tapol lain.

Malam hari-hari berikutnya aku tidur nyenyak tanpa mendengar panggilan tersebut. Ketika pagi kulihat sel-sel yang berhadapan dengan sel kami telah hampir kosong termasuk Pak Goei. Dalam deretan itu terdapat 10 sel, masing-masing dengan penghuni 10 sampai 15 tapol. Mereka diikat kedua tangannya, kemudian dimasukkan ke truk-truk yang siaga di dekat gerbang bagian dalam, jauh dari sel kami. Kebusukan merebak ke hidung kami melalui narapidana, sipir, polisi, tentara. Mereka manusia biasa lengkap dengan emosi dan perasaannya, yang suatu kali tak bisa menahan untuk tidak bicara. Truk-truk itu dilarikan ke beberapa tujuan yang telah ditetapkan ke luar kota, di antaranya ke berbagai tempat di Batu, Dinoyo, perkebunan Margosuko, Dampit dsb yang kami ketahui di belakang hari. Lubang-lubang besar telah disiapkan beserta segerombolan pembantai dengan segala macam senjata tajamnya. Di penjara Lowokwaru tokoh Amir Syarifudin pernah disekap dan disiksa oleh penguasa Jepang dengan digantung. Pejuang kemerdekaan ini lolos dari hukuman mati berkat campurtangan Bung Karno. Yang dialami ribuan teman kami lebih ringkas. Orang-orang baru pun datang dan sel-sel itu penuh kembali. Tiap kali rombongan tapol baru datang, koleksi kisah-kisah seram pembantaian pun selalu bertambah.

Di Lowokwaru aku sempat merenungkan kembali tentang berbagai hal. Terngiang kembali kata-kata dokter Sudarsono, paman isteriku, tokoh PSI, bekas duta besar di India dan Beograd, ketika itu pegawai tinggi Deparlu. Selesai kongres HSI di Jakarta bulan Agustus 1965, aku pergi ke rumahnya. “Hati-hati kamu, PKI mau berontak lagi!” Aku menganggapnya sebagai bercanda seperti sering terjadi. Dengan perkembangan kejadian adakah ini berarti datangnya peristiwa tersebut bukan rahasia bagi mereka? Lalu retorika Aidit tentang revolusi dan merelakan cangkir piring pecah berantakan. Hal itu disampaikannya dalam pertemuannya dengan peserta kongres HSI. Perdebatan politik dan ideologi sejak permulaan abad lampau, sampai juga ke penjara Lowokwaru. Apa revolusi bisa dirancang dan dibikin?

itu bulan Januari 1966, aku menerima panggilan. Selama ini interogasi yang kami alami bersifat massal. Ketika menghadap, pejabat itu memperkenalkan diri sebagai Letkol Sutrasno SH, Komandan Korem 83, Malang. Sebagai ketua tim pemeriksa ia langsung menembakku dengan pernyataan, “Jadi saudara yang membacakan pernyataan HSI mendukung Dewan Revolusi di RRI Malang pada 1 Oktober?” Wah ini sungguh tuduhan berat. Pada malam hari tanggal tersebut aku berada di RRI Malang, Jl Buring untuk mengisi acara seperti telah dijadwalkan. Topiknya tentang revolusi berdasar ajaran Bung Karno. Naskah ketikan untuk RRI itu ada di tangannya. Di pojok berkasku tercantum tanda agak besar ‘A’, rupanya aku dimasukkan golongan ‘A’ yang akan dituntut di pengadilan, mungkin karena itu aku tidak ikut didor bersama Drs Hadinegoro. Nampaknya tidak ada keterangan apa pun dalam berkas yang dapat menggiringku. Lalu kami berbincang tentang keluarga,

pendidikan, pekerjaan. Dan yang tidak kusangka, ia bicara tentang ajaran Bung Karno, dalam topik itu kami bertemu.

Bulan ke empat beberapa orang di blok kami dipindah ke blok lain yang hanya terdiri dari dua sel kecil, masing-masing dengan lima penghuni. Aku berkumpul dengan Pak Jarwo, seorang pengusaha kota Malang yang cukup beken. Terdapat peralatan memadai seperti kompor kaleng susu yang dibarter dari blok lain. Terdapat pasokan makanan dengan tetap dari luar lewat jalur sang penguasaha kaya. Di jaman itu kami belum mengenal peralatan elektronik kecil dengan kapasitas besar. Kelak Pak Jarwo dan beberapa teman lain dicomot dan lenyap tanpa jejak. Maka kekayaannya yang berupa beberapa rumah tinggal, toko buku, percetakan, pabrik rokok, kendaraan, dan yang lain diambil alih oleh para penguasa baju hijau menjadi bancaan seperti warisan moyangnya. Kelak aku juga mengetahui sebenarnya namaku bersama Drs Amim tercantum dalam daftar mereka yang harus dienyapkan. Rezim berkuasa menggolongkan sarjana dan kaum cendekiawan kiri sebagai kelompok amat berbahaya pengusung ideologi.

Enam bulan ditahan, pagi itu aku dan Drs Amim lagi-lagi dipanggil untuk segera berkemas. Seorang sipir berbisik bahwa kami berdua dibebaskan. Meski kami sempat gembira tapi kami tak bisa mempercayainya. Kami pun membenahi barang kami lengkap termasuk bantal dan tikar sesuai dengan saran teman-teman. Pemindahan tahanan termasuk ke alam baka tak pernah diberitahukan dengan jelas. Berjam-jam kami berdua berada di sebuah ruangan tertutup Kodim Malang di Jl Kahuripan. Menjelang jam sembilan malam baru kami berdua dipanggil, kami dibebaskan dengan wajib lapor. Aku dijemput adik iparku, dengan becak kami menuju Jl Muria 6, rumah mertuaku, tempat isteri dan anakku tinggal setelah penangkapanku.

Berada di penjara aku dipecat sebagai dosen, tanpa surat pemecatan. Kelak aku mendengar sampai beberapa tahun kemudian namaku masih tercantum dalam daftar gaji. Tiap bulan seseorang telah menandatangani, sedang keluargaku tidak pernah menerimanya. Beberapa minggu setelah dibebaskan aku diizinkan oleh pejabat tempat aku wajib lapor untuk pindah ke Surabaya dengan alamat fiktif. Selanjutnya dengan bantuan saudara dan teman aku lari ke hutan rimba Jakarta dengan identitas baru. Dengan berdebar dapat diikuti berita ditangkapnya kembali bahkan dibunuhnya teman-teman yang telah dibebaskan yang tidak menyingkir. Aku sendiri masih dicari untuk ditangkap kembali. Kemudian aku juga mendengar samarsamar pencoretan nama kami dari daftar maut dan pembebasanku berkat campurtangan Letkol Sutrasno SH, seseorang yang hanya kukenal sebagai pemeriksa, tak lama setelah itu ia dipecat dari jabatannya dan meninggal beberapa tahun kemudian. Utang budi dibawa mati. [Dipetik dari naskah belum terbit: Harsutejo, Cerita Orang Pinggiran (memoar)]. <harsonos@cbn.net.id>

\*\*\*\*\*

40 Tahun Tragedi 1965 (8)

Pekan Seni Budaya

## “Menguak Tabir Merajut Masa Depan”

28 September – 5 Oktober 2005

Kaum Muda Akan Sanggup Membereskan Warisan Sejarah Kelam

Oleh: Harsutejo

pertama kalinya acara peringatan tragedi kemanusiaan ini diadakan di berbagai tempat di Jakarta dengan berbagai macam acara. Seluruh acara berjalan dengan lancar dan aman dengan mayoritas dihadiri kaum muda yang ingin tahu. Penggerak dan inisiatif peringatan itu pun dilakukan oleh para tokoh muda laki perempuan dari berbagai LSM seperti Garda Sembiring dkk, dari perguruan tinggi seperti Media Patra Ismar Rahady S.Sn yang biasa disapa dengan Mbak Dira dkk dari IKJ dengan kelompok Kipas dan Dr Gadis Arivia dkk dari Departemen Filsafat FIB, UI serta institusi lain maupun perorangan. Kesungguhan, keuletan, dedikasi dan keberanian mereka telah menepis segala keraguan dari beberapa tokoh tua korban 1965 yang sampai detik terakhir enggan bergabung dan tak mampu memberikan apresiasinya. Dukungan pun datang dari teman-teman di manca negara termasuk kelompok Sastra Pembebasan. Bagaimanapun mayoritas kaum tua korban 1965 telah ikut mendukung dan menghargai kegiatan yang dimotori kaum muda tersebut.

kita ketahui acara kali ini diadakan di Komunitas Utankayu (talk show radio 68H dengan topik ‘Suara Korban Membongkar Stigma 65’ dan peluncuran buku Murad Aidit, Aidit Sang Legenda); Kampus UI Depok (diskusi dengan tema ‘Menguak Sejarah Yang Digelapkan’, pemutaran dan diskusi film, festival mini film dokumenter); Goethe Haus (pameran artefak 65, diskusi dengan tema ‘Suara Lirih Perempuan Korban’dan malam seni budaya dengan musik, tari dan pembacaan puisi); Taman Ismail Marzuki [TIM] (peluncuran buku Tragedi Kemanusiaan 1965-2005, pameran artefak 1965 dan pemutaran film); Perpustakaan Nasional (peluncuran buku kedua dr Ribka Tjiptaning Proletariyati Anak PKI Masuk Parlemen); Pusat Kebudayaan Prancis (pemutaran film dan peluncuran buku Pramodya Ananta Toer Jalan Raya Pos); dan Diskusi Bulan Purnama JI Garuda (dialog generasi muda dengan korban tragedi 1965). Sebagian acara itu dilakukan oleh panitia yang berbeda, mereka saling melakukan koordinasi yang telah berjalan dengan baik. Seluruh acara berjalan dengan meriah, lancar, aman dan diikuti oleh hadirin yang memenuhi tempat.

hemat saya seluruh rangkaian peringatan ini setidaknya telah menggugah perhatian kaum muda terhadap masalah warisan masa lampau tragedi kemanusiaan 1965 sebagai yang tertuang dalam dua tema poster “AKUI NEGARA BERTANGGUNG JAWAB ATAS TRAGEDI 1965” dan “INDONESIA 1965 40 TAHUN DIBUNGKAM 40 TAHUN TANPA KEADILAN”. Kaum mudalah yang akan sanggup membereskan warisan sejarah kelam negeri ini.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*



## PROPOSAL

### “TEMU RINDU MENGGUGAT SENYAP”

#### **Pertemuan Perempuan Korban 1965-1966 Jawa Tengah dan DIY**

##### I. Latar Belakang

Tragedi Kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966 merupakan sebuah titik balik bagi perjuangan kaum perempuan Indonesia pada umumnya. Perjuangan perempuan Indonesia yang turut menyumbang besar bagi perjuangan kebangsaan dipatahkan setelah terjadi peristiwa yang kemudian dinamakan sebagai G 30 S. Karena dituduh sebagai pelaku yang telah melakukan pembunuhan terhadap para Jenderal di Lubang Buaya, para perempuan yang sebelumnya bergabung dengan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. Ribuan perempuan Indonesia baik yang berasal dari Gerwani atau yang bergabung dengan organisasi-organisasi massa yang oleh pemerintah dianggap dekat dengan PKI dibunuh, ditangkap dan ditahan tanpa proses pengadilan di penjara-penjara militer.

Peristiwa G 30 S telah membuat ribuan kaum perempuan Indonesia menderita. Bagaimana tidak, sebuah peristiwa yang jauh dari kesadaran maupun jarak dari para kaum perempuan ini telah merubah secara drastis kehidupan dan nasib mereka. Para perempuan ini tidak hanya menderita secara fisik karena proses penangkapan yang dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan Orde Baru tetapi juga mengalami penderitaan dan luka batin yang sangat dalam. Hal ini terjadi karena banyak di antara kaum perempuan ini ketika dalam pemeriksaan maupun dalam tahanan-tahanan militer mendapatkan perlakuan kasar bahkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pemeriksanya.

Trauma akan kekerasan masa lalu yang dialami oleh para perempuan korban 1965 ini begitu membekas dalam ruang kesadaran mereka. Bahkan dampak dari trauma ini secara meluas juga menghinggapi para perempuan Indonesia masa kini. Sebab, setelah terjadi peristiwa G 30 S, perempuan Indonesia dibatasi peranannya oleh negara dan hanya berkedudukan dalam wilayah domestik kerumahtanggaan. Pemerintahan Orde Baru telah secara sistematis menghancurkan gerakan perempuan Indonesia yang kritis dengan menciptakan citra yang seolah-olah bahwa perempuan tidak layak untuk berkiprah diluar domain kerumahtanggaannya. Dengan menciptakan narasi historiografi perempuannya, negara menggunakan masa lalu dari Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) menjadi “media pengingat” untuk membatasi peranan dan aktivitas kaum perempuan. Indonesia.

Di sisi lain, dalam kehidupan setelah keluar dari tahanan-tahanan Orde baru kaum perempuan korban Tragedi Kemanusiaan 1965-1966 ini mengalami penderitaan yang begitu berat, ini tidak hanya berkaitan dengan luka batin dan fisik yang dialami ketika dalam penahanan tetapi juga diakibatkan karena politik pencitraan dan stigmatisasi yang dilakukan oleh negara terhadap mereka. Para perempuan korban ini mendapatkan stigmatisasi berganda (multiple stigmatization). Mereka tidak hanya dituduh komunis (yang distigmatisasi oleh negara sebagai “pemberontak”, “kejam”, “ateis”), tetapi juga distigmatisasikan sebagai Gerwani yang dicitrakan negara

sebagai sosok “perempuan pembunuh”, “sadis”, “liar”, “amoral” dsb. Citra yang melekat pada perempuan korban ini demikian “lengkap”, sehingga secara otomatis membuat mereka banyak yang memilih untuk diam dan menganggap bagian dari masa lalu mereka bagaikan sebuah “aib” yang tidak perlu untuk diketahui oleh publik. Belum lagi politik diskriminasi yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap para tapol dan keluarganya yang membatasi akses mereka di wilayah ekonomi, sosial politik telah membuat mereka tidak hanya terpuruk secara mental tetapi juga dalam kehidupan sosial.

Dampak dari “kebisuan” para korban perempuan inilah yang membuat mereka cenderung tidak bersuara ketika pasca Orde Baru muncul berbagai wacana untuk membongkar kejahatan kemanusiaan Orde Baru secara umum ataupun tentang wacana pemulihan hak-hak korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Orde Baru. Padahal keterlibatan para perempuan korban 1965 mutlak untuk dilakukan, karena hal ini akan semakin mengungkap bagaimana kejahatan dan kekerasan masa lalu pada tahun 1965 yang dilakukan oleh Orde Baru itu begitu sistematis dan berdampak pada semua kelompok sosial yang ada di Indonesia, termasuk juga kaum perempuan Indonesia. Sebab, tanpa keterlibatan kelompok perempuan korban 1965 kita akan mereduksi arti dan posisi “korban” kejahatan Orde baru itu seolah-olah hanya mereka yang menjadi korban politik. Sementara dunia perpolitikan sudah diidentikkan dengan dunia kaum laki-laki. Yang artinya, bisa saja disimpulkan bahwa “korban kejahatan kemanusiaan dan kekerasan masa lalu Orde Baru hanya terdiri dari tahanan politik laki-laki”. Padahal seperti kita ketahui akibat dari kebijakan “anti komunis” yang dilakukan oleh Orde Baru dampaknya juga dirasakan oleh para perempuan yang dituduh komunis, istri-istri yang ditinggalkan oleh suaminya karena dibunuh atau dipenjara, dan juga anak dan keturunan para tahanan politik. Dengan memperluas dimensi korban maka setidaknya wacana tentang pengungkapan kebenaran, rehabilitasi ataupun rekonsiliasi akan lebih lengkap, sebab kita tidak terjebak dalam penunggalan entitas korban itu sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa korban dari kekuasaan Orde Baru itu terdiri dari banyak varian yang masing-masing mempunyai lapisan trauma yang berbeda-beda. Dan yang lebih penting adalah mengajak kelompok korban dari berbagai macam kelompok sosial untuk bersama-sama terlibat dalam wacana penuntasan kekerasan masa lalu yang dilakukan oleh Orde Baru. Untuk itulah kami dari Perempuan Korban Tragedi 1965-1966 yang berdomisili di Yogyakarta bersama dengan SYARIKAT INDONESIA membentuk kepanitiaan bersama untuk melaksanakan kegiatan yang kami namakan sebagai “TEMU RINDU MENGGUGAT SENYAP”. Pertemuan ini merupakan ikhtiar yang kami lakukan untuk mengumpulkan korban perempuan 1965-1966 terutama yang berada di Jawa.

## II. Tujuan

Secara umum tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempertemukan para perempuan korban 1965 se-Jawa. Kita berharap dengan pertemuan ini para perempuan korban 1965 bisa mengungkap “kebisuan” yang selama ini diderita oleh korban perempuan 1965 dan mencairkan “trauma” individu yang diderita oleh para perempuan korban 1965.

Sementara secara khusus pertemuan ini bertujuan untuk:

1. Mengajak para perempuan korban 1965 untuk terlibat dalam wacana yang mengemuka tentang pemulihan korban kekerasan Orde Baru maupun wacana tentang pengungkapan kebenaran.
2. Menyuarakan kepentingan, ide dan gagasan para perempuan korban 1965 yang kemungkinan tidak terakomodasi dalam kerja-kerja yang dilakukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di kelak kemudian hari.
3. Membentuk jaringan korban perempuan 1965 yang mempunyai kepentingan terutama untuk mengatasi keterpurukan mental ataupun sosial ekonomi para perempuan korban 1965.

### III. Bentuk Kegiatan

Kegiatan ini berbentuk semiloka yang dirancang sebagai media untuk mengartikulasikan diri bagi para ibu-ibu yang umumnya selama ini tidak mempunyai ruang untuk bercerita (storytelling) tentang masa lalu mereka. Dari ruang penceritaan ini diharapkan akan berfungsi juga sebagai trauma healing bagi ibu-ibu, sehingga mereka kemudian bisa kembali melakukan identifikasi diri sebagai bagian dari korban kekerasan masa lalu Orde Baru serta melakukan transformasi psikologis dari obyek menjadi subyek yang memperjuangkan kepentingan korban. Acara yang direncanakan berlangsung sehari penuh ini akan lebih memberikan ruang ekspresi dan artikulasi diri bagi para ibu-ibu dari penyampaian gagasan sampai kemudian ada agenda tindak lanjutnya. Sementara itu untuk memperkaya materi dan memberi perkembangan informasi tentang agenda-agenda yang telah dikerjakan oleh beberapa institusi berkaitan dengan agenda perempuan dalam penuntasan kekerasan masa lalu maka dihadirkan wakil-wakil institusi yang selama ini sudah melakukan agenda tersebut di antaranya adalah dari KOMNAS PEREMPUAN, ELSAM dan Perwakilan LPKP Jakarta.

### IV. Peserta

Peserta kegiatan ini terdiri dari para perempuan korban 1965 yang berasal dari beberapa wilayah se-Jawa yang berjumlah sekitar 200 orang, selain itu juga diundang para aktivis yang bergerak dengan isu-isu perempuan di Yogyakarta dan sekitarnya. Harapannya bahwa para aktivis perempuan ini akan belajar dari pengalaman perempuan korban 1965 dan bersama-sama memperjuangkan keterpurukan para korban perempuan 1965 melalui agenda kerja masing-masing. Walaupun secara khusus acara ini untuk para kaum perempuan korban 1965 tapi acara ini tidak menutup akan kehadiran bapak-bapak.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

“Menguak Tabir Merajut Masa Depan”

## Pekan Seni Budaya 40 Tahun 65

Oleh: Sumaun Utomo  
Ketua Umum LPRKROB

“Menguak Tabir Merajut Masa Depan” rangkaian kata yang tersusun indah ini adalah judul kegiatan Pekan Seni Budaya yang diselenggarakan oleh Panitia Peringatan 40

tahun Peristiwa September 1965 untuk kawula muda dan rakyat Indonesia agar memahami dan mengenang kembali apa sebenarnya yang terjadi pada akhir bulan September 1965.

Membantu mengenang peristiwa yang mempunyai arti besar dan menentukan dalam perubahan periodisasi sejarah kemerdekaan Indonesia, dan terutama arah perjuangan rakyat dan Republik Indonesia maka di depan sudah disajikan secara singkat deretan peristiwa dan uraian singkat perjalanan perjuangan rakyat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan peristiwa 1965. Dengan demikian kita semua mempunyai gambaran apa sebenarnya peristiwa 65 itu

Demikian kurang lengkap agaknya bila kita tidak tahu bagaimana perjuangan para korban peristiwa 1965 yang dinamakan korban orde baru, korban yang diajak untuk merajut masa depan itu. Untuk itu maka kita harus tahu lebih dahulu siapa korban orde baru itu. Korban orde baru atau korban peristiwa 65, rangkaian peristiwa kudetanya Jenderal Suharto terhadap Presiden RI pertama Ir. Soekarno ialah:

1. Soekarno dan keluarganya.
2. A. Yani dan teman-temannya, kekuatan pendukung Soekarno dalam AD.
3. dan orang-orang yang di-PKI-kan oleh orde baru Jenderal Suharto yaitu:
  - a. redaksi, wartawan mass media kecuali harian Berita Yudha dan Angkatan Bersenjata yang dilarang terbit 2 Oktober 1965.
  - b. kader dan anggota PKI.
  - c. Pimpinan dan anggota ormas yang di-PKI-kan yaitu SOBSI, SB-SB, Pemuda Rakyat, BTI, Gerwani, IPPI, CGMI, Lekra, HSI, Baperki, Pegawai Negeri, TNI (AD, AL, AU, Polri), Lurah, Bupati, Organisasi Pendidikan Universitas Rakyat Indonesia (URI), Universitas Rakyat (UNRA), dan lain-lain.
  - d. Menteri-menteri, gubernur, walikota, anggota DPRS, MPRS.
  - e. Buruh, tani, pemuda, pelajar, seniman bukan anggota ormas yang di-PKI-kan.
  - f. anggota PNI, NU, Perti dan lainnya.
  - g. Mereka yang terhalang pulang dari luar negeri.

Di antara mereka ada yang dibunuh atas perintah Jenderal Suharto + 3 juta orang, ditahan 1.800 orang tidak kurang dari 20 juta orang didiskriminasikan, distigmasikan sampai hari ini. Tidak kurang dari 30 UU, PP dan instruksi menteri yang mendiskriminasikan warga negara Indonesia sampai sekarang ini. Dalam UU, PP dan instruksi menteri itu masih terdapat kalimat: "Bekas anggota PKI, ormas PKI dan mereka yang

terlibat langsung atau tidak langsung” tidak boleh menjadi ini dan itu, menjabat ini dan itu, atau kalau sudah terlanjur menjabat harus dinonaktifkan dari jabatannya, atau kalau mau menikahkan anak gadisnya dengan anggota Polri/TNI musti ada surat yang menyatakan orang tuanya tidak terlibat G30S langsung atau tidak langsung, atau tidak bisa mendapatkan KTP seumur hidup walaupun sudah mencapai umur lebih dari 60 tahun. Mereka dulu dipecat dari pekerjaannya tanpa surat pemberitahuan resmi, tidak bisa mengurus pensiunnya walaupun sudah mencapai umur pensiun. Tanah, rumah, kendaraan, perusahaannya dirampas bahkan ada pula sampai istrinya juga.

Ini berarti juga merampas hak kewarganegaraan penuh. Karena ketiadaan hak kewarga-negaraan yang sama, maka tidaklah dapat dihindari tindak sewenang-wenang oleh pejabat negara tingkat bawah seperti terhadap mantan tahanan politik yang dijadikan korban Keluarga Berencana dengan dipaksa menjalani tubektomi di Cirebon, tidak bisa menjadi anggota Badan Pemerintah Desa atau Rukun Warga walaupun dipilih dengan suara mayoritas seperti di Jabar, Jateng dan Jatim. Di Sumatera Utara ada anggota Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbur) pada tahun 1965 menyelamatkan diri untuk ditangkap, disiksa, dibunuh, mereka lari ke hutan dan hidup disana sampai sekarang yang jumlahnya ratusan orang. Juga disana ada anak-anak yang lahir dari hasil perkosaan pejabat waktu itu terhadap keluarga korban 65 tidak berani hidup berbaur dengan masyarakat umum, dan terpaksa membentuk komunitas hidup sendiri yang jumlahnya tidak kurang dari 500 orang. Korban orde baru juga menjadi korban dirampas secara melawan hukum hak miliknya.

Tindakan represif selama 40 tahun hingga kini, mereka banyak sekali yang dihindangi penyakit kejiwaan, rasa traumatik, rendah diri, kurang percaya diri sehingga tidak berani melakukan pergaulan bebas seperti warga lain. Perasaan traumatik hingga sampai kini terutama mereka yang tinggal di desa-desa, walaupun yang di kota tidak sedikit jumlahnya. Diskriminasi dan stigmasi inilah yang menghambat mereka juga dalam pergaulan, mencari nafkah dan sampai tua. Ini belum lagi akibat siksaan yang mereka alami sewaktu ditahan yang hingga kini belum sembuh dan mengakibatkan cacat psikis dan rendah diri dalam pergaulan. Diskriminasi, pembatasan, stigma seperti ini sudah mulai sewaktu mereka ditangkap, ditahan dan keluarganya ter-utama sewaktu sudah “bebas” dari penjara pada tahun 1979. Sudah tentu di antara mereka juga sudah ada yang mulai mencari jalan bagaimana memperjuangkan agar lepas dari diskriminasi dan stigmasi tersebut.

Dan pengawasan yang ketat sewaktu pemerintahan Jenderal Suharto membuat mereka belum mungkin bisa berbuat banyak. Tingkat awal mereka baru bisa bergerak bagaimana mencari makan dan menghidupi keluarga yang sudah porak poranda kehidupannya. Seiring dengan perjalanan waktu, perkembangan dan perubahan membuat mereka juga berubah. Rasa takut berkurang, percaya diri berkembang. Sementara mereka ada yang sudah ada keberanian membangun organisasi seperti Organisasi Pembebasan Tapol/Napol yang dipimpin Sdr Gustaf Dupe dan Naipospos (mahasiswa Fisip UGM yang dipenjara 8,5 tahun karena mengorganisasi peredaran buku Pramudya Ananta Toer – Bumi Manusia). Juga keberanian dalam bidang politik berubah. Mereka juga mulai ikut serta mendukung melawan penyerbuan terhadap kantor PDIP yang terkenal dengan peristiwa Kudatuli.

Tahun 1998 tepatnya pada waktu gerakan menurunkan Jenderal Suharto para korban orde baru sudah banyak yang mulai lebih berani dan ikut serta bergabung dengan gerakan rakyat menggulingkan Suharto walaupun bentuk keikutsertaannya ber-variati. Para korban dan keluarganya di Jakarta ada yang menyediakan makan, minum bagi mahasiswa yang ambil bagian aktif menumbangkan Suharto. Di Jawa Tengah Semarang korban orba ikut serta gerakan mahasiswa, massa yang menurunkan papan nama Golkar sebagai pilar sosial politik orba Suharto. Lima hari setelah Suharto jatuh dari kursi kepresidenan yaitu tepat pada tanggal 26 Mei 1998 sekitar 50 orang berkumpul di kantor LBH Semarang Jl. Parangkembang, Tlogosari Semarang Timur, bangkit menuntut dikembalikan hak sipil dan politik serta membentuk embrio organisasi Forum Pemulihan Hak Sipil Politik. Demikian juga korban orba di Medan Sumatera Utara, pada tanggal 27 Mei 1998. Setelah itu lahirlah organisasi yang mengkhususkan diri melakukan penelitian korban peristiwa 65 – Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65-66 (YPKP) di Jakarta yang dipimpin mantan wakil Sekjen DPP Gerwani Sulami (almarhumah). Berturut-turut lahirlah organisasi Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri di Jakarta yang diketuai almarhum Geno Susanto. Pada bulan Juni 2000 Forum Pemulihan Hak Sipil dan Politik diundang Presiden Abdurrahman Wahid ke Jakarta untuk dimintai keterangan tentang tuntutannya. Sayang pada hari yang sama sewaktu delegasi Forum sampai di Jakarta Presiden Gus Dur harus berangkat ke Jepang dan Menko Polkan Letjen (purn) Suryadi Sudirdja diminta menerima delegasi. Delegasi diterima di kantor Menko Polkam tanggal 6 Juni 2000 jam 10.00 dan diminta menerangkan tuntutannya. Ketua delegasi, Sumaun Utomo menerangkan tuntutan Forum yaitu dipulihkan hak kewarganegaraan penuh, hak sipil dan politik dan dicabutnya semua UU, PP yang diskriminatif dan diadili Suharto. Suryadi juga meneteskan airmata sewaktu mendengar pengaduan seorang ibu anggota delegasi yang mengatakan suaminya disiksa sampai meninggal karena disuruh mengaku anggota PKI, sedangkan dia tahu benar bahwa suaminya bukan anggota organisasi apa pun. Juga siksaan yang dialami ibu tersebut termasuk diperkosa oleh petugas-petugas koramil. Suryadi berjanji akan meneruskan pengaduan delegasi pada presiden Abdurrahman Wahid. Delegasi Forum Pemulihan Hak Sipil dan Politik juga mengadakan kegiatan penyuluhan di kabupaten, kecamatan di Jateng dengan didampingi LBH Semarang dan sewaktu bertemu Menko Polkam di Jakarta juga didampingi LBH Jakarta dan Semarang.

Bulan Mei 2001, Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Pegawai Negeri dan Forum Pemulihan Hak Sipil dan Politik menyelenggarakan kongres di Jakarta dan sebagai hasilnya terbentuklah organisasi baru yaitu Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPRKROB) dan juga pernah mengadakan kongresnya ke II pada bulan Maret 2004.

#### Apa Yang Diperjuangkan LPRKROB

Sebagai organisasi massa korban Orba yang jumlahnya + 20 juta orang yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, sebagian terbesar adalah buruh, tani, guru, pegawai negeri, prajurit TNI dan Polri bukan anggota organisasi politik. Maka yang diperjuangkan tentu masalah pokok dan utama yang diderita anggotanya.

Pokok yang diderita massa korban disamping soal ekonomi, penghidupan adalah soal yang menyangkut sikap pemerintah orde baru dan sampai sekarang yaitu diskriminatif dan stigmasi. Wujud dari sikap ini ialah masih diberlakukan dan dipertahankannya lebih dari 30 UU, PP dan instruksi menteri yang ada kalimat dikecualikan “bekas anggota partai terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI” dan stigmasi PKI. Tidak boleh ini atau itu. Termasuk dalam ketentuan seperti ini juga ketentuan dari “almarhum Kopkamtib/Bakorstanas lembaga ins-konstitusional yang didirikan Jenderal Suharto tetapi sudah dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tentang klasifikasi tahanan a, b, c, yang menjadi rintangan pengurusan pensiun ex pegawai negeri

Itu masalah penghapusan diskriminasi dan stigmasi yaitu masalah pemulihan hak kewarga-negaraan sepenuhnya, atau perjuangan rehabilitasi umum adalah masalah pokok. Demokrasi dengan diskriminasi, pembatasan hak kewarganegaraan penuh adalah demokrasi palsu. Ini sama sekali bertentangan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi PBB dan UUD 1945 antara lain:

Pasal 27:

Warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28A:

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C:

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D:

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28G:

orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

28H:

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I:

untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.



pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J:

orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

itu perjuangan untuk rehabilitasi, pemulihan hak kewarganegaraan adalah bersifat nasional dan internasional, masalah Hak Asasi Manusia yang universal. Sangatlah disesalkan di antara sementara korban sendiri ada yang berpendirian bahwa korban tidak perlu memperjuangkan rehabilitasi dan karena itu ilusif. Pendirian dan sikap seperti ini sangat menguntungkan pemerintah yang masih berbau orba. Karena pemerintahan yang berbau orbalah yang menghendaki korban melupakan masa lalu, memaafkan pelaku dan membiarkan sejarah tetap ditutupi oleh pikiran orba yang jahat itu.

Masa Depan – haruslah berarti meluruskan persepsi sejarah masa lalu, dan menuntut pada pemerintah yang berkuasa mengakui bahwa peristiwa itu adalah kejahatan kemanusiaan besar dan pelaku besar, penanggungjawabnya harus dihukum seberat-beratnya. Tuntutan mengadili penanggung jawab utama kejahatan besar kemanusiaan ini sesuai dengan UU RI No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Bab VII Ketentuan Pidana Pasal 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ini tidak berarti korban bermaksud mau balas dendam tetapi sesuai dengan keadilan yang berdasar azas bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Bab I Pasal 1. Kejahatan itu dipraktikan dan dipertanggung-jawabkan oleh Panglima Kostrad, Pangab, Kopkamtib (badan non-konstitusional) dan Presiden RI waktu itu. Ini semua adalah lembaga negara, karena itu tindakan kejahatan besar kemanusiaan itu adalah kejahatan negara. Negara harus minta maaf, dan penanggungjawabnya harus dihukum berat, korbannya harus direhabilitasi (dipulihkan hak kewarganegaraannya secara penuh), dihapuskan diskriminasi dan diberi kompensasi oleh negara. Tuntutan rehabilitasi harus diberikan lebih dulu sebelum tindakan yang lain, karena peristiwa 65 adalah suatu peristiwa khusus yang secara khusus telah mencabut hak kewarganegaraan penuh yang tidak terjadi di negeri lain mana pun.

untuk ini telah pernah mengambil langkah menyampaikan tuntutan dengan surat pada Presiden Megawati Sukarnoputri, dengan disertai rekomendasi MA hasil permohonan korban oleh delegasi korban pada tanggal 12 Juni 2003 yang juga disepakati oleh DPR RI, Komnas HAM. LPRKROB juga telah memenangkan Permohonan Pengajuan Pasal 60 huruf (g) UU No.12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD pada Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno tanggal 24 Februari 2004 menyatakan Pasal 60 huruf (g) "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

tuntutan Rehabilitasi juga pernah disampaikan pada Presiden Yudoyono namun tidak juga diberi jawaban. Karena itu para korban yang diwakili 16 orang antara lain Pramudya Ananta Toer (satrawan) mengajukan gugatan Perdata kepada Presiden RI dan 4 mantan presiden berdasar Konvensi Ekosob PBB (ekonomi, sosial budaya) dengan kuasa hukum LBH Jakarta yang sidangnya dimulai tanggal 13 April 2005. Pada sidang ke 10, 14 September 2005 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara gugatan tersebut. Keputusan Hakim sangat disesalkan karena acuan pertimbangan yang dipakai hanya menggunakan eksepsi pengacara tergugat tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan replik kuasa hukum penggugat, sedangkan pengadilan sendiri pernah menerima gugatan serupa antara lain 6 kasus. Dari sini sekali lagi terbukti bahwa pengadilan tidak terlepas dari pengaruh kepentingan golongan yang berkuasa. Namun demikian para penggugat bersama kuasa hukumnya bertekat bulat membawa keputusan itu ke pengadilan banding – Pengadilan Tinggi Jakarta. Sekali lagi pengadilan akan diuji apakah ia bisa bersikap adil atau alat hukum membela kepentingan golongan yang berkuasa. Para korban akan tetap gigih dan tabah terus menuntut keadilan karena dirinya sudah tersiksa, dianiaya selama 40 tahun. Pengadilan dan keadilan juga sedang diuji oleh perkara ibu Nani – yaitu tidak diberi KTP seumur hidup, sedangkan ibu Nani kini berumur 63 tahun. Di tingkat pertama perkara ini dimenangkan ibu Nani, tetapi karena Camat Priuk naik banding dan dimenangkan Camat maka kini ibu Nani naik kasasi.

bagi korban agaknya masih sulit diperoleh selama kekuasaan masih berada ditangan yang berbau orba ini. Bahkan tampak jelas sikap orbanya dengan mengubah kurikulum sekolah tahun 2004 menjadi kurikulum 1994 tentang pelajaran sejarah yang menyatakan peristiwa 65 adalah kup PKI. Buku yang mengungkapkan sejarah 65 sudah banyak yang membuktikan peristiwa 65 adalah kup Suharto. Demikian juga kini pemerintah menjadikan tanggal 1 Oktober kembali menjadi hari Kesaktian Pancasila. Ini sepenuhnya pikiran orba Jenderal Suharto. Walau pun demikian para korban juga masih belum putus asa mencari jalan menyelesaikan persoalan yang sengaja dilimpahkan pada korban. UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang oleh penguasa negeri ini dianggap jalan penyelesaian soal korban orde baru. Sejak RUU diserahkan oleh presiden pada DPR untuk disyahkan menjadi UU sudah dapat diketahui dengan jelas bahwa RUU ini sama sekali menguntungkan/ melindungi pelaku dan tetap mengorbankan korban. Dilihat dari kalimat pendahuluan UU yang biasa disebut juga alasan filosofinya atau akademisnya tentu saja baik (ini sudah menjadi kebiasaan dalam penyusunan UU) tetapi kalau dibaca dan dipahami batang tubuhnya RUU KKR sama sekali hanya menguntungkan pelaku serta berlawanan dengan prinsip UUD 1945 pasal 27, 28 seluruhnya, berlawanan dengan UU HAM no.39 th 1999 dan UU Pengadilan HAM no.26 th 2000, berlawanan dengan Deklarasi HAM PBB 1948, Konvensi PBB tentang hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan lainnya. RUU itu mengabaikan bahwa korban orde baru itu terdiskriminasi dengan tidak kurang 30 UU, PP dan instruksi menteri yang masih berlaku sehingga posisi mereka tidak sama dengan pelaku sebagai seorang warga negara penuh dan menikmati hak itu. Karena itu sewaktu RUU itu dibicarakan di DPR untuk disyahkan menjadi UU, LPRKROB menolaknya. Fraksi TNI dan Polri juga menolak tapi dari segi kepentingan sendiri yang takut bila kejahatan masa lalunya terbongkar. Sewaktu RUU telah disyahkan menjadi UU, LPRKROB bersikap kritis,

yaitu mengkritisi UU tersebut. LPRKROB berencana mengajukan pasal 27 dan 44 UU tersebut ke MK – Judicial Review. Pemerintah Yudoyono juga tidak serius bersikap terhadap pelaksanaan UU tersebut. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pun sampai hari ini terkatung-katung. Memilih 21 orang dari 42 orang anggota komisi pun belum dilanjutkan mungkin karena terhalang oleh pasal 32 (i) UU KKR “tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia”. Demi untuk melindungi pelaku agak menjadi sulit karena 42 orang tersebut terdapat 5 orang purnawirawan jenderal yang mungkin akan dicalonkan masuk ke 21 orang komisi. LPRKROB juga mempertimbangkan akan membawa + 15 UU yang isinya diskriminatif ke MK dan +15 PP dan instruksi menteri yang diskriminatif ke MA.

Untuk mendapatkan keadilan terhadap pelanggaran HAM berat, UU, PP, dan instruksi menteri ke MK, MA dan pengadilan adalah jalan terhormat dan tepat menurut situasi dewasa ini, walau pun korban menyadari bahwa jalan ini sulit dan alot, tetapi harus dicoba, diperjuangkan. Perjuangan untuk ini semua bukan hanya untuk kepentingan korban orba dan keluarganya tetapi juga untuk menegakkan UUD 45, UU HAM dan Pengadilan HAM, tetapi Indonesia sebagai warga dunia juga wajib melaksanakan Deklarasi PBB tentang HAM, konvensi PBB tentang hak Sipil dan Politik dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Karena itu perjuangan mereka bersifat nasional dan internasional sekaligus, yang benar dan adil ini pasti menang, entah kapan waktunya dan pantas untuk mendapat dukungan bersama. Perjuangan inilah wujud “Menguak Tabir dan Merajut Masa Depan”, yang juga perjuangan untuk menegakkan demokrasi (bukan demoncracy) HAM, keadilan dan kesejahteraan. Janganlah ada pihak mana pun mau meninabobokan korban dengan kata-kata manis tetapi beracun atau membohongi korban untuk kepentingan sekelompok orang saja.

40 tahun peristiwa 65 dengan tema “Menguak Tabir dan Merajut Masa Depan”, orang harus berikrar bersama berjuang untuk berhasilnya tuntutan korban, dan berjuang untuk tidak terulangnya peristiwa pelanggaran kejahatan besar kemanusiaan. Inilah sebagian dari perjuangan rakyat Indonesia dewasa ini. Hanya persatuan, sekali lagi persatuan di antara rakyat yang berjuang yang dapat memenangkan perjuangan kita bersama. Inilah ujian dan tantangan kita bersama – “Merajut Masa Depan”.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Ketidakadilan Mengadili Perbedaan

Oleh . Haryo Sasongko

(di bidang apa pun) bukanlah lukisan atau potret jadi masa lalu seperti Monalisa. Ia dipuji atau dibenci, dikagumi atau dianggap biasa-biasa saja, yang jelas gambar Monalisa tetap digantung di tembok Museum Louvre di Paris.. Diam, tak berubah dan memang tak boleh diubah-ubah, baik letaknya apalagi lukisannya. lagi dengan pemikiran yang setiap saat bisa berubah dan berkembang, meluas, menjangkau siapa saja tanpa mengenal batas wilayah. pemikiran seseorang dalam waktu singkat

dapat merasuki ribuan, mungkin jutaan pikiran orang lain. Dan, seperti dikatakan Victor Hugo (1802-1885), seniman dan pemikir dari Perancis, "an invasion of can be resisted; invasion of ideas cannot be resisted". Invasi militer dapat dibendung, sementara invasi gagasan tidak dapat dibendung

Kalau boleh disambung, invasi militer selalu berbentuk kekerasan dengan dukungan persenjataan, sementara invasi gagasan bergerak diam-diam. Invasi tentara yang bersenjata, hanya bisa dihadapi dengan senjata. Tetapi bagaimana dengan invasi pemikiran yang berbentuk penafsiran agama, ideologi, keyakinan, sekte, aliran kepercayaan dan sebagainya? Bahkan ini tak bisa disebut invasi karena jauh beda dengan invasi tentara yang dilakukan dengan pemaksaan. Lebih tepat disebut pengembangan wawasan, restorasi, pencerahan, reinterpretasi atau liberalisasi pemikiran.

Dan kalau kebetulan beda dengan yang lain, maka tak seorang pun punya hak untuk menghakimi bahwa suatu ideologi, aliran atau pemikiran tertentu itu sesat dan perlu dibasmi dengan cara atau tindakan anarkhis seperti menghadapi invasi tentara. Kecuali kalau ideologi atau pemikiran keagamaan itu juga "disebarkan" dengan cara kekerasan dan pemaksaan, maka aparat keamanan atau hukum berkewajiban menindaknya. Bukan menindak ideologi atau pemikiran mereka, tetapi tindak kekerasannya kalau terbukti dapat menimbulkan gangguan umum. penindakan itupun tidak berupa kekerasan, karena kalau demikian yang terjadi adalah kekerasan versus kekerasan. Anarkhi lawan anarkhi. Memaksa orang atau kelompok untuk meninggalkan keyakinannya karena dianggap sesat, atau sebaliknya dipaksa untuk menerima keyakinan yang tidak dapat diyakininya, adalah awal dari kesesatan dan tirani. Dalam Surat Al Baqarah Ayat 256, dengan pendek menyebutkan: "tidak ada paksaan dalam beragama". Dan UUD 1945 Pasal 29 jelas mengungkap hal senada dengan ayat Alquran itu. Jadi, baik sebagai umat Islam atau bangsa Indonesia, menghalangi seseorang untuk masuk suatu agama, pindah agama, meninggalkan agama, jelas bertentangan dengan agama Islam dan konstitusi nasional kita. Stigmatisasi "murtad" (untuk pemeluk Islam yang pindah ke agama lain dan "mu'alaf" untuk kebalikannya (pemeluk agama lain masuk Islam) adalah stigmatisasi subyektif yang diskriminatif. Hanya dilihat dari sudut nilai Islam.

\*\*\*\*\*

Belakangan ini, tudingan sesat-menyesatkan yang dilandasi oleh superioritas merasa benar sendiri dan karena itu juga merasa menang sendiri (karena merasa pada posisi mainstream), justru marak ke permukaan, ketika seharusnya orang semakin kritis untuk menerima sekaligus mengembangkan (perbedaan) pemikiran. Ini terlihat terutama dalam kaitan dengan keagamaan. Kalau dalam muktamar NU ada salah satu "keputusan" yang "vonis" bahwa komunitas pemikiran kelompok orang dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) sebagai kegiatan "sesat", dalam Muktamar Muhammadiyah juga ada "vonis" bahwa komunitas pemikiran kelompok yang menyebut dirinya Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) juga "sesat". Sholat dengan dua bahasa dinyatakan "haram" dan tentu saja "sesat". Dan yang paling "meriah" belakangan ini sehingga terjadi "tawuran" gaya preman adalah penyerangan dan perusakan oleh suatu (atau beberapa) kelompok terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di berbagai tempat di seluruh Indonesia karena dianggap

"sesat" "tidak sesuai dengan ajaran Islam". Rumah-rumah pribadi yang dijadikan tempat peribadatan umat Kristiani disegel. Tidak jelas apakah rumah-rumah pribadi umat Islam yang dipakai untuk pengajian juga perlu disegel. Kalau ingin menegakkan demokrasi seharusnya demikian. Sesuai Pasal 29 UUD 1945, tidak ada agama unggulan, agama klas satu atau klas dua (pinggiran) di Indonesia.

Yang dipertanyakan, sejak kapan seseorang berhak mengklaim dirinya paling tahu Islam? Dan atas dasar itu berhak pula "mengadili" orang lain yang tidak sesuai dengan monopoli kebenaran yang dianutnya? Apakah mereka yang mengklaim telah memegang "hak monopoli kebenaran Islam" tidak pernah membaca Surah as-Sajdah Ayat 25 yang menegaskan bahwa manusia samasekali tidak memiliki otoritas untuk menilai keimanan seseorang, termasuk "sesat" atau "benar"? Agama diturunkan oleh Tuhan, bukan ciptaan manusia dan oleh sebab itu hanya Tuhan sebagai penciptanya yang berhak menjatuhkan "vonis" atas benar tidaknya keimanan atau pemikiran seseorang (dalam urusan keyakinan beragama). Dan vonis itu pun baru dijatuhkan oleh Tuhan setelah di akherat nanti. Bukan di dunia ini. dalam Surah as-Sajdah Ayat 25 demikian: *Inna rabbaka huwa yafshilu baynahum yawm al qoyamah fiyma kanu fihi yakhtalifun.* (Sesungguhnya Tuhanmu. Dialah yang memberikan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.)

Kalau boleh ditambah, Nabi Muhammad sendiri justru mengajarkan kepada umatnya untuk mengakui (tidak berarti harus membenarkan) kehadiran the others sebagai suatu realitas. Ini artinya, Nabi terakhir menurut pemeluk Islam bukan aliran Ahmadiyah (karena menurut Ahmadiyah masih ada lagi Nabi terakhir sesudah Muhammad yakni Mirza Ghulam Ahmad, dan dari nama ini lahir Ahmadiyah), telah menempatkan Islam untuk mengakui pluralisme, dan Nabi Muhammad merupakan pelopor yang memancangkan pluralisme dan pengakuan terhadap the others. Umat Islam disadarkan untuk sama-sama memiliki hak hidup dan hak memeluk agama serta keyakinan yang berbeda dengan umat lainnya. Siapa yang sesungguhnya benar, siapa yang telah "sesat" Tuhan yang akan menjatuhkan vonis

Sayang sekarang banyak orang atau kelompok telah mewisuda dirinya sebagai tuhan. Sebagai yang maha kuasa, maha benar, dan berhak mengadili siapa saja (termasuk dengan cara anarkhis). Padahal konsep pluralisme itu sudah dipancarkan pula dalam Surah al Kaafiruun: "Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah; Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah; dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah; Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku".

Meskipun Surah ini ditujukan kepada orang kafir, namun dari sisi kontekstual, mencerminkan ajaran yang mengakui adanya the others, sama lain tidak untuk saling memaksakan ajaran agama atau kepercayaannya untuk diikuti. Kalau bagi pengikut Muhammadiyah yang paling benar adalah Muhammadiyah, bagi pengikut NU yang paling benar adalah NU, maka juga pengikut Ahmadiyah untuk berkeyakinan bahwa Ahmadiyah yang paling benar.

Logikanya, tidak pernah ada orang yang secara sengaja mengajarkan "kesesatan" dan mengajak pengikutnya untuk sama-sama "tersesat". Tudingan "sesat" pasti berasal dari the others. Dari pihak-pihak lain yang memiliki klaim kebenaran tunggal.

"Yang tidak sama dengan (penafsiran) saya, itu salah dan harus dibubarkan". Kalau saja "penyelesaian" soal "ajaran sesat" ini dilakukan di meja diskusi, dialog secara intelektual untuk mencapai pencerahan, tentu itu bukan hanya tidak ada masalah, malah bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kalau dilakukan dengan tawuran gaya preman, bukan hanya tidak akan menyelesaikan masalahnya, bahkan menjadi bermasalah. Bukan pencerahan pemikiran tapi penggelapan pemikiran. Di sini bukan akal yang berbicara, melainkan okot (otot). Padahal Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah apa pun. Sorga dan neraka kepunyaan Tuhan, dan Tuhan pula yang menentukan siapa masuk ke mana.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

[http://www2.rnw.nl/rnw/id/spesial/40\\_thn\\_g30s\\_pki050928/pembunuhan\\_pasca30S\\_050928?view=Standard](http://www2.rnw.nl/rnw/id/spesial/40_thn_g30s_pki050928/pembunuhan_pasca30S_050928?view=Standard)

## Soal Pembunuhan Pasca G30S

NU Lebih Jujur dari Katolik

Wawancara Ranesi, September 2005

Dalam acara dialog interaktif Secangkir Kopi yang disiarkan TVRI tanggal 14 Maret tahun 2000, presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid menyatakan sejak menjabat ketua PBNU dirinya sudah meminta maaf kepada para korban pembunuhan pasca peristiwa G30S. "Saya sudah meminta maaf atas segala pembunuhan yang terjadi terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai komunis," kata Gus Dur waktu itu. Sejak ucapan itu tabir tabu yang meliputi PKI serta peristiwa G30S seperti terkoyak. Semua orang bisa berbicara bebas tentang peristiwa bersejarah 40 tahun silam yang mengubah perjalanan bangsa Indonesia, termasuk korban-korbannya. Ucapan ini adalah juga rintisan menuju rujuk nasional dengan NU sebagai pelopornya, walaupun organisasi massa Islam terbesar ini masih saja terbelah soal peran mereka waktu itu. Indonesianis senior Profesor Benedict Anderson yang seperempat abad lebih dilarang masuk Indonesia gara-gara pendapatnya soal G30S, menyambut baik upaya NU. Tapi pakar Indonesia dari Cornell University ini juga mendesak supaya organisasi-organisasi lain terbuka dan jujur dalam peran mereka pada pembunuhan massal pasca G30S. Berikut Profesor Ben Anderson kepada Radio Nederland.

Peubahan di kalangan NU

Benedict Anderson [BA]: "Yang paling menarik adalah perubahan justru di kalangan NU. Karena diketahui pada waktu tahun 1965, justru orang-orang Ansor menjadi pembantu yang sangat penting untuk tentara dalam hal menghancurkan PKI, khususnya di daerah pedalaman, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena di kalangan anak muda intelektual justru mereka ingin mengetahui apa yang terjadi. Mereka membantu usaha Ibu Sulami untuk menelusuri jumlah orang kiri yang terbunuh di beberapa daerah. Dan mereka mulai bikin rekonsiliasi atau hati ke hati antara orang Gerwani dan orang-orang dari ormas NU, khusus untuk wanita."

"Ini sangat bagus, walaupun mereka harus menghadapi fakta bahwa di antara keluarga mereka sendiri ada yang menjadi algojo. Dan rupanya mereka bersiap untuk itu. Jadi mereka tidak mati-matian membela apa yang terjadi sebelumnya. Ini berarti bahwa sebagian penting dalam masyarakat Indonesia, justru pihak yang di angkatan tuanya sangat aktif dalam masyarakat ini, berubah pikirannya. Kami belum lihat usaha yang sedemikian dari pihak Katolik, Protestan, Muhammadiyah. Tapi Insya Allah itu akan berlangsung pada tahun yang akan datang."

"Kita harus ingat bahwa orang-orang yang sudah ambil posisi, yang sudah lama menyokong Soeharto mati-matian, seperti Kompas, Jacob Oetama dan sebagainya, walaupun mungkin dalam hati kecilnya mereka mengaku bahwa apa yang terjadi tahun 1965 adalah satu manipulasi yang jahat, toh mereka tidak akan meninggalkan pendirian mereka di depan umum. Karena mereka sudah punya andil dalam proyek yang besar. Dalam proyek Orde Baru. Sampai sekarang."

"Ini sering terjadi dalam politik. Bahwa orang-orang yang sebenarnya dalam hati kecilnya enggak yakin, tapi demi temennya, demi anu, namanya, demi ini, demi itu, demi untungnya; masih ngotot dengan pendapat yang sebenarnya mereka sudah tahu bahwa ini tidak benar."

NU lebih jujur daripada Katolik

"Kita tahu bahwa sebagian penting dari dana keuangan untuk Soeharto pada masa-masa kritis yang pertama, sebagian datang dari, ini yang bagian dalam negeri, bukan bantuan dari luar negeri, tapi dari dalam negeri sebagian besar datang dari Pertamina dan sebagian besar lagi datang dari Menteri Perkebunan Agraria, tokoh Flores yang kita semua tahu, Frans Seda. Ini kan menteri pemerintahan Soekarno, yang diangkat oleh Soekarno dan dia harus setia kepada Soekarno. Tapi justru sebaliknya. Diam-diam dia colong duit dari departemennya untuk dikasih kepada orang yang mendongkel Bung Karno."

"Yang kedua itu sudah diketahui bahwa orang-orang yang sangat penting dalam mendirikan Opsus, CSIS dan sebagainya. Dua orang yang paling penting di situ, tidak semuanya orang-orang Katolik, tetapi sebagian ada. Itulah Liem Bian Kie dan adiknya dan juga Harry Tjan Silalahi. Ini semua juga mengambil peranan yang cukup jahat dalam masalah Timtim. Mereka menjadi penasehat dan operator agennya Ali Moertopo dalam berusaha mendongkel pemerintah Timtim merdeka pada tahun 1975."

"Nah ini, sampai sekarang Kompas tidak pernah mau terus terang tentang peranan yang penting dari orang-orang Katolik ini. Semua ditutup dengan kata-kata halus. Ya, stylenya Kompas, bisa diketahui dengan istilah yang kita semua sudah kenal. Seperti, "Ya, saya dari dulu memang anti. Saya memang dari dulu itu kritis. Saya memang dari dulu tidak setuju." Tapi ini semacam hipokrisi yang kalau mereka betul-betul kritis, betul-betul anti, ndak mungkin mereka bukan saja survive, tapi menjadi satu konglomerat yang maha besar, yang masih mencekik dunia penjualan buku."

"Jadi dalam hal ini, NU jauh lebih jujur dari Katolik. Ini tidak berarti bahwa tidak ada cukup banyak romo yang bagus, yang mengunjungi tapol dan berusaha untuk membantu mereka. Jadi, maksud saya bukan untuk mencaci maki kaum Katolik

pada umumnya. Tapi harus diakui bahwa kaum Katolik pada umumnya masih menjadi satu minoritas yang tidak berani mencuci celana kolornya di pekarangan depan. Dalam hal ini sikap mereka, dibandingkan dengan sikapnya NU, tidak bisa dipuji."

### **Semuanya terlibat**

Radio Nederland [RNJ]: "Kalau NU itu ada pemuda Ansor yang melakukan pembunuhan itu, membantu tentara. Apakah pelaku-pelaku itu juga ada dari kalangan Katolik, Protestan dan Muhammadiyah, menurut anda?"

BA: "Harus diakui bahwa sebagian besar pembunuhan terjadi di pedesaan. Bukan di kota. Jadi kalau waktu itu kamu jadi PKI kelas teri, kamu akan lebih aman, lebih mungkin survive, kalau di kota. Dan ini memang NU kuat di desa, sedangkan pada umumnya Muhammadiyah, paling sedikit di Jawa, lebih kuat di kota. Katolik juga belum, Protestan juga."

"Tapi sampai sekarang, umpamanya, tidak pernah ada penelitian terhadap apa yang terjadi di daerah yang jelas Katolik seperti Flores. Apa yang terjadi di sana? Saya belum pernah melihat laporan tentang ini. Jelas itu tidak dilakukan oleh Kompas cs."

"Kita tahu bahwa di Bali yang membunuh justru bukan orang Islam, tapi orang Hindu. Dan mungkin lebih sadis daripada yang terjadi di Jawa. Kita tahu bahwa pembunuhan yang paling komplis di mana dipastikan semua anggota komunis dibunuh, justru terjadi di Aceh, yang pada waktu itu secara politik berafiliasi dengan Muhammadiyah."

"Jadi boleh dikatakan tidak ada partai atau golongan yang tidak ada tanggung jawabnya. Kalau bukan di lapangan atau di desa, tapi sebagai otak. Di bagian intel, cukup banyak Protestan Batak di intel-intel pada waktu itu. Atau di kalangan intelektual yang menjual diri supaya bisa dapat posisi yang bagus di orde baru awal, mengharapkan kedudukan seperti itu. So, orang-orang yang tidak kena itu sedikit sekali."

"Maka dari itu saya merasa harus angkat topi kepada NU dalam hal ini. Karena mereka udah kasih contoh yang bagus. Insya Allah yang lain-lainnya akan mawas diri dan memikirkannya. Insya Allah, tapi saya memang tidak banyak harapan dalam hal ini."

Demikian percakapan bagian kedua dengan Profesor Benedict Anderson Indonesia senior dari Cornell University, Amerika Serikat.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

[http://www2.rnw.nl/rnw/id/spesial/40\\_thn\\_g30s\\_pki050928/40\\_thn\\_g30s050927?view=Standard](http://www2.rnw.nl/rnw/id/spesial/40_thn_g30s_pki050928/40_thn_g30s050927?view=Standard)

## **40 Tahun G30S, Kasusnya Masih Misteri**

Wawancara Ranesi, 27 September 2005

40 tahun sudah Peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965, tapi kasusnya sendiri masih belum terang. Banyak tokoh seputar itu, membawa rahasianya ke kubur,



seperti Ali Moertopo, Umar Wirahadikusumah, dan, mungkin juga, beberapa pimpinan CC-PKI. Yang pasti, di pagi 1 Oktober 1965 itu, pihak tentara sudah bisa menyimpulkan PKI berada di balik G30S. Mereka berkumpul di Kostrad, antara lain, untuk merebut RRI, demikian profesor Salim Said, waktu itu wartawan buletin tentara.

Sebaliknya, Sobron Aidit, waktu itu guru besar Bahasa Indonesia di Beijing, mengungkapkan bahwa kakaknya, Ketua CC-PKI, D.N. Aidit atau Bang Amat, sudah memperingatkan, bakal ada "keguncangan" di Jakarta, tapi tak satu pun pendukung PKI tahu apa-apa. Juga Ibu Sulastri, mantan pimpinan Gerwani Jawa Timur, tidak mengerti sedikitpun tentang G30S, tapi dia harus mendekam di penjara, tanpa diadili, tanpa udara segar, tanpa telur, dan tanpa daging, selama 11 tahun. Berikut ini berturut-turut penuturan profesor Salim Said, Sobron Aidit dan Ibu Sulastri.

#### Pengalaman Salim Said

Salim Said [SS]: "40 tahun lalu, waktu kejadian Gestapu, umur 22 tahun. Saya waktu itu wartawan muda, dan sudah mengikuti perkembangan ketegangan-ketegangan yang memuncak pada 30 September itu. Jadi siapa pun yang berada di Jakarta khususnya, Indonesia umumnya, pada waktu itu dengan perhatian kepada perkembangan politik yang makin lama makin tegang, sebenarnya tidak terkejut kalau pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi, ada berita mengenai apa yang disebut Gerakan 30 September."

"Pagi hari saya datang ke sekolah. Saya diberitahu oleh teman-teman bahwa bapaknya Ruli, itu diculik. Ruli itu adalah anak sulung Jenderal Yani, katanya CIA. Jadi, saya langsung menyimpulkan, ini PKI mesti terlibat di sini. Sebab beberapa hari sebelumnya sudah beredar isu macam-macam bahwa akan ada Dewan Jenderal yang melakukan kup."

Ya, kita ke Kostrad. Karena kita sudah tahu, setelah komunikasi kiri kanan, bahwa ini PKI. Nah saya termasuk wartawan pertama yang tiba di Kostrad hari itu. Kira-kira jam 11 siang. Wah, saya melihatlah usaha konsolidasi waktu itu. Hari itu sampai sore, di antara orang-orang, para jenderal dan para petinggi di situ, tidak ada yang tahu seluk beluk RRI itu."

"Saya katakan kepada seorang jenderal, saya ini pernah kerja di RRI, saya tahu itu RRI. Jadi saya memberi masukan kepada jenderal itu. Ada dua jenderal waktu itu yang mengurus penerangan, almarhum Jenderal Sugandhi dan almarhum Jenderal Soebroto. Saya sarankan agar kita mencari Darmo Sugondo, komentator/reporter televisi terkemuka waktu itu yang selalu menjadi komentator kalau Bung Karno muncul di publik."

"Saya bilang kalau ada Darmo Sugondo, asosiasi orang Bung Karno. Karena waktu itu tidak banyak yang tahu di mana Bung Karno. Pertanyaan orang di mana Bung Karno? Nah Bung Karno jadi rebutan waktu itu. Akhirnya bersama Darmo Sugondo kami dikawal oleh pasukan RPAD waktu itu, Kopassus namanya sekarang, merebut RRI."

RRI bisa dikuasai, dan tidak lama kemudian rekaman pidato Jenderal Soeharto disiarkan di RRI.

Demikian profesor Salim Said.

\*\*\*\*\*

## Pengalaman Sobron Aidit

Radio Nederland [RN]: "Pak Sobron, 30 September 1965 ada di mana?"

Sobron Aidit [SA]: "Saya ada di Peking. Kami ketika itu bang Amat saya selalu memanggil bang Amat, ya, ada briefing sebelum itu dia mengatakan kepada kami semua. Artinya kami di sini ialah orang-orang Indonesia yang ada di Peking, bahwa akan ada kejadian yang menggoncangkan tanah air. Tetapi dia tidak bilang kejadian apa."

RN: "*Kapan itu DN Aidit mengatakan itu?*"

SA: "Agustus, menjelang 17 Agustus. Jadi waktu dia terakhir ke Peking. Pesan dia itu mengatakan bahwa sekarang ini sedang panas-panasnya keadaan tanah air. Pertentangan antara tentara sama sayap-sayap Bung Karno, maksudnya orang-orang kiri terutama, itu akan ada hal-hal mungkin di luar dugaan, dia bilang. Tapi sama sekali dia tidak bilang apa-apa."

RN: "*Lalu pak Sobron, menanggapi itu bagaimana?*"

SA: "Kami betul-betul tidak tahu. Tetapi waktu itu kami sudah mendengar keadaan tanah air begitu panas. Begitu cepat berubah, apalagi pidato sana-sini itu saling mengganyang. Artinya ganyang ini, ganyang itu ya. Nah kami dianjurkan ketika itu mendengarkan radio baik-baik, artinya teliti-teliti. Radio yang dimaksud ialah radio dari Australia, Amerika dan Jepang."

RN: "*Jadi kira-kira pertengahan Agustus, pak Sobron sudah mendengar radio secara mental sedikit banyak siap begitu ya, ada sesuatu nih?*"

SA: "Ya, tapi ndak jelas apa begitu?"

RN: "*Ndak ada dugaan apa begitu?*"

SA: "Rasanya begini, ini mungkin ada apa-apa. Maksudnya ini entah pertempuran, entah huru-hara namanya waktu itu kan sudah ada jor-joran revolusi."

RN: "*Tapi tidak ada dugaan sedikitpun? tidak ada clue tidak ada indikasi dari bang Amat?*"

SA: "Tidak ada sama sekali."

RN: "*Tidak ada ya. Jadi mereka yang di luar, pak Sobron ini ya terpaksa menduga-duga gitu ya, berspekulasi ya?*"

SA: "Ada satu hal yang ingin saya catatkan. Waktu itu tentara, nama-nama ada yang kami dengar nama ini, nama itu. Tetapi satu nama yang ndak pernah saya dengar, yaitu Soeharto. Yang kami dengar Nasution, yang kami dengar Yani, tapi Soeharto ndak pernah."

RN: "*Tadi pesan bang Amat tadi juga tidak menyebutkan nama apa pun ya?*"

SA: "Tidak, tapi tentara dia bilang memang tentara."

Tak ada yang tahu

RN: "*Kemudian tiba 30 September, seperti apa reaksi pak Sobron?*"

SA: "Karena kami sudah di briefing akan apa-apa jadi kami kumpul dengan sendirinya. Saling mau tahu. Tapi yang paling lucu, saling mau tahu tapi tidak ada satu yang tahu."

RN: "*Tidak ada yang coba mencari narasumber di negeri lain atau di Indonesia?*"

SA: "Ada, tentu kami ada yang telepon dan ada yang tanya bagaimana ini, tapi tidak ada satupun berita yang ada kepastiannya. Sebab begini, mula-mula kami dengar ya, dewan revolusi, kemudian dewan jenderal, kemudian radio sudah direbut. Kemudian cepat sekali berubah, kemudian ada pertempuran sedikit, sporadis. Tapi tidak tahu kami di mana ini. Jadi kami betul-betul nggak ada pegangan."

PKI korbannya

RN: "Berapa lama itu kalian bertanya-tanya, berteka-teki ada apa sih di tanah air?"

SA: "Mingguan sampai bulanan. Di situ sudah ada pembunuhan-pembunuhan baru jelas, bahwa ini ndak ada hubungannya dengan PKI dalam soal memimpin keadaan. PKI ternyata waktu itu kami sudah rasakan dan sudah mengamati, PKI korban. Ya betul jadi tidak ada...."

RN: "*Mengapa begitu pak?*"

SA: "Kami tidak berpretensi bahwa ini PKI yang memimpin. Begini, kami akhirnya dapat tahu dari delegasi dari Havana, dari Kuba, yang mengatakan bahwa Aidit sudah meninggal. Itu kira-kira November, delegasi mengatakan pesannya dari Fidel, Fidel Castro, bahwa betul sudah meninggal. Waktu itu semua kami terdiam. Dan, yang paling aneh di antara begitu banyak teman, hanya saya sendiri yang percaya memang bahwa Aidit sudah meninggal. Itu perasaan saya, feeling saya."

"Kenapa? secara logika tidak mungkin bahwa mereka bisa melawan. Kenapa? PKI tidak punya tentara, PKI tidak punya senjata, PKI hanya mengandalkan orang-orang yang waktu pemilihan umum memilih PKI. Ya mana ada tentaranya? Jadi saya waktu itu sudah yakin PKI tidak mungkin menang, tidak mungkin bertempur. Karena apa? Apa yang dia punya? Nggak ada apa-apa."

RN: "*Dan tidak ada pula apa yang oleh tentara disebut angkatan kelima itu ya?*"

SA: "Ndak ada...."

Demikian Sobron Aidit.

RN: "*Ibu Sulastris, ibu dulu aktif dalam Gerwani, pada 30 September 1965 ibu ada di mana?*"

Di Surabaya. Saat peristiwa itu disiarkan memang hati kami sama sekali tidak mengerti, tidak tahu. Setelah peristiwa 65 itu memang beberapa hari kemudian lalu kami terpaksa harus meninggalkan rumah untuk menjaga keselamatan. Saya

bersama anak saya umur dua tahun gitu, sebab sudah ada beberapa teman yang diambil gitu, yang akhirnya saya terus harus ke Blitar Selatan. Akhirnya terjadi pengepungan mengerahkan 10.000 anggota hansip untuk daerah Blitar Selatan itu.

Demikian Ibu Sulastri, sebelumnya anda sudah mengikuti penuturan Sobron Aidit dan profesor Salim Said.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Republika, Kamis, 29 September 2005

## Kemanusiaan dan Keberagaman Mendorong Kita Rekonsiliasi

Oleh :

Solahuddin Wahid

Ketua PBNU

Sejarah bangsa kita penuh dengan tragedi kemanusiaan. Tragedi terbesar adalah yang terjadi pada akhir 1965 hingga awal 1966, yang konon menelan korban nyawa sekitar lima ratus ribu. Juga menimbulkan korban jutaan orang keluarga mantan tahanan politik (tapol) yang diperlakukan secara diskriminatif selama puluhan tahun. Tragedi itu terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Bali. Melibatkan aparat militer dan warga sipil antara lain Banser (NU) dan Kokam (Muhamadiyah). Saya tidak dapat memahami tindakan tidak berperikemanusiaan itu. Beruntung, saya langsung bisa menanyakan hal itu kepada beberapa anggota Banser saat bertemu pada peringatan Harlah NU ke-40 (Januari 1966).

### Suasana perang

Kawan-kawan itu menyatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Mereka seperti berada dalam suasana perang, memilih membunuh atau dibunuh. Itu terbangun sejak bertahun-tahun sebelumnya, akibat aksi sepihak PKI/BTI terhadap warga NU yang kaya. Aksi itu dilakukan dengan dalih untuk melaksanakan UUPA. Tindakan kekerasan oleh warga PKI dan underbouw-nya juga dilakukan terhadap pelatihan PII di Kanigoro, Kediri, dan terhadap warga Ansor di Cemethuk, Banyuwangi (Oktober 1965) dan memakan korban jiwa belasan orang.

Dalam suasana seperti itu, pihak TNI menangkap warga PKI dan underbouw-nya atau yang dianggap seperti itu. Orang yang ditangkap itu lalu diserahkan kepada pihak sipil seperti Banser atau Kokam untuk dihabisi. Tentu warga sipil yang mendapat tugas sambil diberi penjelasan tentang situasi yang dihadapi, berada pada posisi tidak bisa mengelak dari tugas tersebut. Sulit bagi saya untuk menentukan apakah tindakan terhadap para warga PKI itu merupakan kejahatan atau bukan. Sungguh beruntung kita yang tidak berada pada posisi seperti itu.

Setelah itu, para aktivis PKI yang tidak dibunuh lalu ditahan dan sebagian dibuang ke Pulau Buru. Keturunan mereka dikucilkan dan diperlakukan secara diskriminatif sehingga mereka kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Keturunan aktivis PKI dan underbouw-nya itu tidak bersalah, dan tidak harus menanggung akibat dari kesalahan atau dosa yang dilakukan orang tua mereka.

Tiga puluh tahun telah berlalu dan muncullah generasi baru di dalam masyarakat -- termasuk di lingkungan NU-- yang kritis dan punya kepekaan serta kepedulian terhadap nasib tragis para korban dan keluarganya. Mereka mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi pada 1965. Sumber informasi mereka adalah hasil kajian para ilmuwan luar negeri.

Keinginan itu dipicu setelah mereka melihat praktik kekerasan oleh aparat keamanan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, yang terjadi di banyak tempat di Tanah Air kita. Seperti di Aceh, Papua, Lampung, Madura, dan lain-lain, yang memakan banyak korban nyawa dan menjatuhkan martabat warga. Mereka juga tidak mungkin melupakan tindakan represif pemerintah terhadap (Partai) NU dan partai lain dalam Pemilu 1971 dan 1977.

Kalangan muda NU merasa punya kewajiban moral untuk menyantuni dan menumbuhkan rasa percaya diri di dalam kalangan keluarga mantan tapol. Mereka juga mencoba meyakinkan masyarakat --termasuk warga NU-- untuk menerima kembali keluarga mantan tapol yang sudah puluhan tahun dikucilkan dan dizalimi seperti kaum paria. Mereka tergabung dalam jaringan Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat (Syarikat), yang bertujuan untuk mewujudkan rekonsiliasi kultural.

Syarikat mencoba mempertemukan warga NU dengan keluarga mantan tapol, supaya mereka bisa berdialog dan selanjutnya bisa mencairkan kebekuan dan menghilangkan kecurigaan yang ada. Sebelum mereka sampai pada tahap seperti sekarang, para aktivis itu memulai langkah dengan bertandang dari pintu ke pintu untuk mendengarkan "pengalaman" dan "yang teringat" serta menunjukkan empati. Mereka menyelenggarakan dialog di mana para "pelaku" (walaupun tidak langsung) dan menceritakan apa yang dialami dan apa yang masih diingat.

Mereka ingin mendorong negara dan institusi sosial untuk menciptakan ruang rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk saling memaafkan masa lalu. Kemudian membangun janji bersama untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama pada masa mendatang. Mereka mengharapkan upaya saling memaafkan tersebut bisa diprakarsai dan difasilitasi oleh ormas seperti NU dan Muhammadiyah.

Mereka mencari dasar-dasar pemikiran dari ajaran Islam, yang mengacu kepada ketentuan Alquran dan Hadits. Di dalam sejarah Islam (tentu dalam konteks di zaman Rasulullah) ada perintah membunuh orang kafir (hanya pada kasus tertentu). Menurut Syarikat, perintah agama itu tidak tepat diterapkan pada Peristiwa 1965. Dalam Surah Alma'idah ayat (32) dinyatakan: "Siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang benar, seolah-olah dia membunuh semua orang di seluruh dunia".

Kedua ayat itu kurang tepat diterapkan dalam konteks Peristiwa 1965. Pembunuhan terhadap warga (yang dianggap) PKI, bukan karena mereka tidak percaya kepada Allah SWT, tetapi karena situasi perang memberi dua pilihan, membunuh dan dibunuh.

Keturunan (mantan) tapol harus memikul akibat dari perbuatan orang tua mereka. Selama puluhan tahun mereka terpaksa menderita perlakuan tidak manusiawi, kehilangan hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka tidak bisa menjadi pegawai negeri, polisi, atau tentara.

Perlakuan tersebut tidak sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Alnajm ayat (38-39) dan Alfathir ayat (18) yang berbunyi: "Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosa itu, tiadalah akan dipikulnya untuknya sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya".

#### Warisan dosa

Dalam pandangan Islam, setiap manusia yang lahir ke bumi pasti dalam keadaan fitrah atau suci seperti kertas putih. Ajaran Islam tidak mengenal warisan dosa.

Kita, bangsa Indonesia, telah lama memberi perlakuan tidak adil kepada banyak warga negara. Seperti warga di Aceh, Papua, termasuk juga warga keturunan aktivis PKI dan underbouw-nya. Padahal ajaran semua agama sangat menekankan keadilan. Surah Alma'idah ayat (8) menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.

Tentu kita paham bahwa tidak mudah melakukan upaya mendorong terwujudnya rekonsiliasi kultural. Penolakan dari pihak di luar korban cukup kuat. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang muncullah arus yang kuat untuk menyelesaikan persoalan bangsa dengan rekonsiliasi nasional, seperti yang dilakukan di Afrika Selatan. Undang-undang (UU) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) diundangkan pada September 2004, walaupun banyak kritik tajam terhadap UU itu. Kini sejumlah pihak mengajukan judicial review terhadap UU itu.

Panitia Seleksi Anggota KKR telah menyerahkan 42 calon untuk dipilih 21 orang oleh Presiden dan diajukan ke DPR untuk disetujui. Kita harap Presiden segera memilih 21 nama itu, karena kebutuhan terhadap adanya KKR sudah mendesak, walaupun masih banyak kekurangan di dalam UU-nya.

Tampaknya tidak mudah untuk membuka hati sebagian tokoh Islam supaya bersedia melakukan rekonsiliasi kultural dengan keluarga mantan tapol 1965. Padahal di dalam ajaran Islam banyak sekali perintah untuk melakukannya. Mereka masih belum lupa akan kekejaman warga PKI tahun 1948 dan 1965. Di dalam Alquran perintah untuk meminta maaf dan memaafkan banyak kita dapati. Meminta maaf oleh Alquran dipandang sebagai sikap terpuji. Tetapi tampaknya meminta maaf tidak mudah dilakukan. Diperlukan jiwa besar untuk bisa mengakui secara terbuka kesalahan yang diperbuat di masa lalu, oleh kedua pihak.

Di samping perintah untuk meminta maaf, Alquran juga memerintahkan agar kita mau memaafkan kesalahan orang lain terhadap kita. Tetapi, seperti meminta maaf, tindakan memberi maaf bukan perkara sepele yang dapat dikerjakan oleh setiap orang, terutama bagi mereka yang mengalami sendiri pahitnya ketidakadilan, penghinaan, dan penganiayaan. Bahkan mungkin memaafkan terasa lebih berat dari pada meminta maaf.

Karena itu, menurut Alquran, "memaafkan" adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Surah Ali Imron ayat (133-134) menyatakan: "Dan bersegeralah kamu kepada ampu-

nan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik yang di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain". Selain rasa kemanusiaan dan keberagaman, rasa kebangsaan kita juga harus mendorong upaya rekonsiliasi nasional termasuk dengan mantan tapol 1965 dan keluarganya. Kalau bangsa Indonesia ingin maju dan menjadi bangsa besar, semua komponen bangsa harus terlibat secara penuh untuk berjuang ke arah kemajuan.

Semua anak bangsa berhak memperoleh hak-hak dasar mereka tanpa melihat latar belakang mereka (agama, suku, dan sikap politik). Saat ini muncul diskriminasi baru yaitu perbedaan perlakuan terhadap orang miskin. Mereka tidak bisa bersekolah dan mendapat pelayanan kesehatan (hak dasar) karena tidak punya uang. Fakta ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Semua kekuatan bangsa harus melakukan rekonsiliasi dan bekerjasama menghadapi musuh. Musuh kita adalah kebodohan, kemiskinan, ketertinggalan, dan ketidakadilan. Dan juga pihak atau orang yang menyebabkan musuh kita itu tetap ada (eksis) di tengah kehidupan bangsa kita, yaitu para koruptor, penyelundup, penjarah kekayaan negeri ini, dan pendukungnya.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Meski Belum Bisa Dibuktikan

Jakarta (Bali Post) –

Tanda-tanda mantan Presiden Soeharto sebenarnya mengetahui akan terjadi peristiwa G30S/PKI tahun 1965 lalu, ternyata sangat kuat. Hanya, sampai saat ini dugaan keterlibatan jenderal besar itu belum bisa dibuktikan. Demikian dikatakan Robert E. Elson, guru besar Griffin University, Australia, dalam sebuah seminar di gedung CSIS Jakarta, Kamis (7/9) kemarin. Namun, menurut pengamat politik yang juga staf pengajar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Andi Alfian Malarangeng, dugaan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G-30-S/PKI perlu dijadikan wacana, untuk membuka dan mengupas kembali sejarah yang sebenarnya terjadi.

Menurut Robert Elson, pengakuan mantan Komandan Brigade Infanteri I Jakarta Kolonel Latif yang mengatakan sudah memberi tahu Soeharto pada malam sebelum kejadian, masih cukup sulit dibuktikan. Pada malam itu, konon, saat menjenguk putra Soeharto (Tommy-red) yang dirawat di RSPAD karena sakit, informasi Latif hanya dijawab dengan anggukan kepala oleh Soeharto. Itu pun sulit dibuktikan, karena tidak ada saksi yang mengaku melihatnya. Bahkan, menurut buku "Dua Jenderal Besar Bicara tentang Gestapu" karangan Anton Tabah dengan mengutip pernyataan Pak Harto, kedatangan Latif itu untuk membunuhnya.

Pada pagi hari 30 September 1965 pun, lanjut Robert Elson, Soeharto memang mengadakan inspeksi pasukan dalam rangka persiapan upacara Hari ABRI, termasuk pasukan dari Batalion 530 dan 454 yang menjadi tulang punggung PKI. "Tetapi itu pun bukan merupakan bukti kuat, kalau pasukan itu berada di bawah komando Soeharto pada malam kejadian," katanya.

Ketika ditanya kenapa Soeharto yang waktu itu menjadi Panglima Kostrad tidak menjadi sasaran PKI, Elson yang sedang mengadakan penelitian sejarah G-30-S/PKI di Australia, Indonesia, dan Amerika Serikat menjawab, mungkin karena waktu itu Soeharto bukan merupakan lingkaran dalam (inner circle) dari Kasad Jenderal Yani, sehingga tidak dianggap berbahaya, walaupun kelak terbukti ternyata perhitungan PKI ini salah. "Hanya, sampai saat ini memang sedang terus dilakukan penelitian lebih jauh dugaan keterlibatan Soeharto dalam G-30-S/PKI. Saya memang sedang terus melakukan penelitian khusus soal itu, termasuk berbicara langsung dengan Soeharto. Tetapi karena keburu sakit, belum sempat meminta penjelasan lebih jauh," ujarnya seraya , seminar yang digelarnya pun dalam rangka menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang G-30-S/PKI tersebut.

### **Jadikan Wacana**

Di tempat terpisah, pengamat politik yang juga staf pengajar Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Andi Alfian Malarangeng mengatakan, dugaan keterlibatan Soeharto dalam peristiwa G30S/PKI perlu dijadikan wacana. Ini diperlukan untuk membuka dan mengupas kembali sejarah yang sebenarnya terjadi. "Saya tidak tahu, apakah dia terlibat dengan gerakan itu. Tetapi paling tidak dia tahu, apa yang sebenarnya terjadi," jelasnya.

Kata Andi, pembukaan terhadap sejarah ini sangat diperlukan sekali, untuk menilai masing-masing versi, mana yang sebenarnya terjadi. Sebab, selama ini sebagian besar masyarakat masih meragukan PKI yang melakukan tindakan makar untuk menjatuhkan Presiden Soekarno di bulan September 1965 tersebut.

Paper atau pun naskah yang menceritakan masalah tersebut, lanjut Andi, telah banyak beredar di masyarakat. Ia menilai tabir G-30-S/PKI itu perlu kembali dibahas, sehingga mendapatkan gambaran jelas, siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang menelan banyak korban jiwa selama dalam sejarah terbentuknya negara ini. Ia juga berpendapat, peristiwa itu sebenarnya lebih mengarah kepada persoalan internal TNI-AD waktu itu. "Soal militer, bukan bidang saya," jelasnya.

Jika nanti dalam faktanya Soeharto jelas-jelas terlibat, ia masih meragukan, apakah mantan penguasa orde baru itu bisa dihukum. "Untuk kasus KKN saja sangat sulit, apalagi tentang peristiwa besar itu," tambah mantan anggota KPU ini.\*\*\*

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Sumber:

Didistribusikan tgl. 8 Sep 2000 jam 04:50:18 GMT+1

oleh: Indonesia Daily News Online <IndoNews@indo-news.com>

<http://www.Indo-News.com/>

Sent: Thursday, September 29, 2005 7:36 PM

Subject: Kisah Pak Ali di Media Indonesia Edisi 30 Sept 05

BERITA UTAMA Jum'at, 30 September 2005

**Mantan Dubes tanpa Tanah Air**



## Terbuang akibat G-30-S/PKI (1)

HARI ini, 40 tahun lalu, meletus peristiwa yang dalam sejarah dikenal sebagai Gerakan 30 September. Sejumlah jenderal dibunuh. Sejarah menuturkan dalang aksi itu adalah Partai Komunis Indonesia.

peristiwa itu meletus, sejumlah anak bangsa sedang berada di luar negeri. Entah sebagai duta besar atau mahasiswa yang sedang mendapat beasiswa. Banyak di antara mereka dikaitkan dengan peristiwa kelam tersebut kemudian tidak kembali ke Tanah Air.

berpindah dari negara yang satu ke negara lain. Ketika masa paspor mereka berakhir jadilah mereka tanpa kewarganegaraan (stateless). Kemudian mereka melamar menjadi warga negara asing, atau sekadar memegang kartu penduduk untuk pengungsi. Pada 15 Oktober mendarat 'orang-orang yang terhalang pulang' itu bertemu di Belanda memperingati 40 tahun peristiwa G-30-S/PKI. Mereka datang dari Jerman, Prancis, Swedia, dan negara-negara lain di Eropa.

Untuk mengetahui aktivitas 'orang-orang yang terhalang pulang' itu, wartawan Media Rustika Nur Istiqomah menemui sebagian di antara mereka di Swedia baru-baru ini. Inilah kisahnya.

MUHAMAD Ali Chanafiah kini berusia lebih dari 90 tahun. Dia tinggal di sebuah flat delapan lantai di Ragsved, 15 kilometer selatan Stockholm, Swedia.

Di rumah yang asri itu Ali tinggal bersama anak laki-laknya dan dua cucunya. Setiap pagi mantan duta besar Indonesia di Sri Lanka itu sendirian di rumah ditemani dua parkit kesayangannya, Tono dan Tina. Anak dan cucunya bekerja atau sekolah. Dua parkit itu menjerit-jerit dalam kandang yang mungil dan bersih jika ada tamu yang berkunjung.

sudah sepuh, Ali tetap bersemangat menceritakan masa lalunya. "Kesalahan kami karena tidak sejalan dengan politik Soeharto."

Tubuhnya masih sedikit tegap. Pikirannya masih jernih, cerdas, dan cantas. Selain karena udara Swedia yang bersih, jauh dari polusi, rajin jalan-jalan membuat Ali masih tampak gagah. Waktu luang digunakan untuk mengasah pikiran--menyusun sejarah Indonesia, khususnya tentang kronik pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di daerah Bengkulu. Selain menulis sejarah, bapak lima anak ini masih rajin berkebun, mengunjungi sesama orang Indonesia di Swedia dan sekitarnya, serta main bridge.

Wajahnya sumringah menyambut kedatangan kami. Apalagi, ketika Media memperkenalkan diri, pria yang banyak menghabiskan waktu bersama Bung Karno saat di Bengkulu itu tampak antusias. "Dulu saya juga wartawan, seangkatan Adam Malik," tuturnya.

Ali Chanafiah memang bukan sembarang orang. Sebelum diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka oleh Presiden Soekarno, dia aktif di Dewan Perwakilan Sumatra Selatan, Dewan Perwakilan Keresidenan Bengkulu, Badan Pekerja Konstituante hingga MPRS dan DPRGR.

Yah. Bung Karno. Nama ini begitu kerap disebutnya. Ia begitu dekat dengan presiden pertama ini sejak masa pembuangan di Bengkulu tahun 1936. Kedekatan itu ia tuliskan dalam buku yang telah selesai digarapnya, namun belum dipublikasikan, Bung Karno, Dalam Pembuangan di Bengkulu. Karena kedekatan inilah Ali kemudian menuai akibat.

Setelah terbit Supersemar dan menteri-menteri kabinet Bung Karno ditangkap, Ali Chanafiah merasa tidak nyaman lagi di KBRI Sri Lanka. Ia kemudian menuju Moskow, tempat anaknya melanjutkan kuliah atas beasiswa pemerintah Indonesia. Di tempat ini, pria yang mahir berbahasa Inggris dan Rusia itu bekerja di sebuah penerbitan sebagai penerjemah buku-buku berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.

Selama di Moskow, Ali melakukan lobi-lobi politik tingkat internasional untuk mengungkap peristiwa G30S/PKI. Selama bertahun-tahun di negeri komunis itu, Ali tidak memiliki kewarganegaraan apa pun. Ia hanya mendapatkan kartu penduduk dari pemerintah Soviet untuk pengungsi. Setelah pensiun, pria kelahiran Bengkulu itu berusaha kembali ke Indonesia. Dia pun menuju Singapura.

Namun aparat intelijen Orde Baru mencium kedatangannya. Imigrasi Singapura menolak meneruskan perjalanan Ali ke Jakarta. Gagallah usahanya kembali ke Indonesia. Adam Malik, sahabatnya, yang juga Wakil Presiden saat itu, tidak bisa berbuat apa-apa. Atas rekomendasi sahabatnya itulah, Ali 'terpaksa' mengambil kewarganegaraan Swedia. Alasannya, dengan kewarganegaraan itu dia bisa berkunjung ke Indonesia, meskipun hanya sebagai turis. Di kemudian hari dia memang berkunjung ke Indonesia sebagai turis dengan waktu yang dibatasi hanya 60 hari.

Di Swedia, Ali mencurahkan energinya untuk menulis. Ia berkonsentrasi menulis buku sejarah. Dia menilai masih banyak hal yang harus ditulis mengenai sejarah Indonesia selain masih banyak pula masalah yang harus diluruskan dari buku sejarah Indonesia. Dia pun mengikuti secara detail perkembangan di Indonesia mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak, virus flu burung, hingga isu percaloan di DPR.

"Saya selalu mengamati Indonesia melalui televisi, internet, radio, dan diskusi dengan teman-teman," tukas Ali yang menyebut diri keturunan orang buangan. Dia memang cucu Raden Mas Sumodilogo, pejuang dari Jawa yang dibuang Belanda ke Bengkulu hingga beranak pinak di sana.

Ali menikahi seorang gadis Tapanuli, Salmiah Pane, yang tidak lain adalah adik sastrawan Sanusi dan Armijn Pane. Mereka dikaruniai lima anak. Istrinya mengajar di Taman Siswa dan menjadi orang pertama yang menyalami Bung Karno ketika baru tiba di Bengkulu dari pembuangan di Ende, Flores.

usia senjanya, Ali berharap bisa pulang dan mendapatkan kembali haknya sebagai warga negara Indonesia. Revolusi memang telah membunuh anaknya sendiri. Di akhir wawancara, di tengah malam itu, Ali sempat menyanyikan lagu yang masih dikenangnya dengan baik;

*sana tempat lahir beta*

*dibesarkan bunda*

*berlindung di hari tua*

*akhir menutup mata*

Dia pun menarik napas panjang. Matanya menerawang. "Saya ingin mati di Indonesia, dikuburkan di sebelah makam istri saya." Suaranya mendesis. (X-6)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://www.mediaindo.co.id/cetak/berita.asp?id=2005100101044905>

Terbuang akibat G-30-S/PKI

## Anak Pilihan Menuai Badai

(2- Habis)

MANTAN Duta Besar Muhamad Ali Chanafiah bukan satu-satunya yang terbuang akibat G-30-S/PKI. Ratusan anak pilihan yang punya intelektualitas tinggi, yang sedang belajar di luar negeri ketika peristiwa itu terjadi, juga mengalami nasib serupa.

Yang paling merasakan adalah mahasiswa yang kala itu studi di negara-negara sosialis seperti China, Rusia, dan negara-negara Eropa Timur lainnya seperti Hongaria atau Cekoslovakia. Mereka dikaitkan dengan peristiwa itu padahal mereka tidak tahu apa-apa karena mereka meninggalkan Indonesia jauh sebelum peristiwa itu meletus.

diakui Tom Ilijas, lulusan Peking Institute of Agricultural Mechanization. "Saya mendapat tugas belajar ke China awal 1960-an dan lulus 1965. Setelah Dubes Jawoto meninggalkan KBRI dan kedutaan diambil over atase militer, tiba-tiba paspor saya ditahan pihak imigrasi. Saya tidak tahu alasannya. Saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di Indonesia. Dan tiba-tiba, saya terlempar dari Indonesia. Stateless selama 18 tahun," Tom menuturkan.

Tom masih banyak mahasiswa lain. Keinginan untuk pulang pupus sudah. Mahasiswa Indonesia yang dikirim belajar ke luar negeri umumnya mengambil bidang teknik dan kedokteran.

"Kami orang-orang nasionalis yang mencintai tanah air kami," tambah Warsito Darmosukarto, lulusan jurusan fisika Universitas Moskow, ketika ditemui di kediaman Tom Ilijas di Sodertälje, Stockholm, Swedia.

sudah 40 tahun berlalu, 'orang-orang yang terhalang pulang' itu masih menyimpan beragam kekhawatiran. Tidak mengherankan jika hanya empat di antara ratusan 'orang-orang yang terbuang' itu yang tersebar di seluruh Eropa mau bergabung dan berbagi cerita dengan Media. Lainnya memilih diam. Mengubur masa lalu yang menyakitkan. Mengubur kerinduan akan Tanah Air. Mengubur sanak, sahabat, dan kenalan.

Kekhawatiran itu beralasan. Sanak keluarga mereka di Tanah Air diasingkan hanya karena ada saudara mereka belajar di China, Rusia, Cekoslovakia, Hongaria, atau negara-negara Eropa Timur lainnya.

Pencabutan paspor membuat kebanggaan sebagai penerima beasiswa untuk belajar di luar negeri sirna sudah. Hal itu menjadi lengkap ketika suatu hari dipanggil ke KBRI. "Di sana kami disuruh menandatangani surat untuk mengutuk Soekarno. Tapi saya menolak," tukas Warsito. Akibatnya, paspornya ditarik KBRI tanpa melalui pengadilan. Itu mungkin 'lebih baik' daripada apa yang dialami Sumarman. "Saya tahu paspor saya ditarik justru lewat surat yang dikirim ke universitas," papar pria asal Palembang itu.

SEJAK saat itu perasaan menjadi tidak menentu. Hilang segala kontak dengan keluarga di Indonesia. "Saya sempat kirim surat kepada orang tua saya. Isinya pendek, Saya tidak bisa pulang," cerita pria yang kini berusia 63 tahun itu. "Tahu nggak apa yang terjadi? Adik saya diminta lapor setiap hari selama bertahun-tahun, hanya gara-gara ia menerima surat dari Moskow," sambungnya.

Keluarga mereka berantakan. Dijauhi tetangga karena dianggap PKI yang membahayakan. "Beberapa rekan kami bunuh diri karena tak tahan," cerita Warsito, pria kelahiran Cilacap, Jateng, 67 tahun silam itu.

"Ada juga yang jadi gila. Ada yang nekat pulang ke Indonesia, kemudian ditangkap dan dipenjara tanpa pengadilan," tambah Adrian Jamal, lulusan jurusan elektro Universitas di Cekoslovakia ini.

Paspor Adrian dicabut. Dia pun berpindah dari satu negara ke negara lain tanpa identitas. Tentu bukan hal mudah memulai hidup baru di negara lain. Bermula sebagai pekerja kasar, meski berijazah insinyur.

Seperti yang juga dialami Tom. "Saya ke Swedia dan bekerja sebagai montir di Scania." Meskipun ia lulusan jurusan Mekanisasi Pertanian dari RRC, bukan berarti lantas ia mendapatkan pekerjaan yang layak. Kendala bahasa membuatnya harus memulai dari nol. Namun karena tekun, atasannya memberi kesempatan, hingga ia dipercaya mengepalai sebuah departemen dengan 60 karyawan hingga pensiun tahun lalu.

Meski secara ekonomi sudah mapan, mereka tetaplah pengungsi. Bertahun-tahun stateless. Yang dimiliki aliens passport yakni paspor yang dikeluarkan PBB untuk para pengungsi. Paspor itu berlaku ke seluruh dunia, kecuali ke negara asal. Menyedihkan! Akhirnya mereka terpaksa memilih kewarganegaraan suatu negara agar bisa pulang ke Indonesia, meski hanya sebagai turis di negeri sendiri.

Meski sudah memiliki paspor negara tertentu, tidak mudah bagi mereka untuk pulang ke Indonesia, apalagi ke kampung halaman. Itu dialami Tom, misalnya. Pada pertengahan 80-an, dia balik ke Indonesia. Dia harus mengendap-endap pada pukul 02.00 WIB dini hari menemui ibunya di sebuah desa di Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Hanya dua jam Tom bertemu ibunya karena pada pukul 04.00 sudah harus kembali ke Padang.

Setelah reformasi baru agak nyaman, meski tetap waspada. Kini mereka bisa pulang ke kampung halaman sebagai turis dengan jatah 60 hari.

### **Paspor PBB**

Banyak cara untuk mengekspresikan rasa cinta terhadap Tanah Air meski mereka sudah memegang paspor Swedia. Salah satunya adalah tidak menggunakan hak politik sebagai warga negara Swedia. "Padahal peluang itu sangat besar. Banyak imigran seperti kami, kini duduk di parlemen, bahkan ada yang jadi menteri," tambah Warsito.

mereka sudah mulai bangkit lagi. Setidaknya ada setitik harapan ketika KBRI Stockholm mulai mengulurkan tangan. "Sebelum ini kami dijauhi KBRI. Rasanya KBRI itu angker. Tapi, kini tali silaturahmi dengan KBRI memberikan sepercik kedamaian. KBRI adalah sarana untuk tetap memelihara identitas kami sebagai orang Indonesia. Bahkan kini kami diikutkan dalam acara 17-an," tukas Tom yang diangkat sebagai Ketua Olahraga Bridge di KBRI Stockholm.

Soal 'orang-orang yang terbuang' itu muncul dan tenggelam. Di masa Presiden Gus Dur ada titik terang. Namun, kandas karena tekanan politik dalam negeri amat kuat, rehabilitasi pun sirna. Di era Megawati Soekarnoputri, waktu pun berlalu tanpa ada kejelasan soal rehabilitasi. Padahal usia tetap melaju tanpa bisa dibendung.

"Yang kami inginkan adalah pemerintah Indonesia merehabilitasi kami. Memulihkan hak kewarganegaraan kami yang telah dicabut secara semena-mena, hingga kami stateless selama puluhan tahun. Kini usia kami sudah lanjut, lebih dari 60 tahun. Ibarat tinggal menunggu dipanggil Tuhan. Tapi kami tetap berharap bisa kembali ke Indonesia sebagai warga negara Indonesia," tambah Tom lagi.

mereka sama seperti keinginan Muhamad Ali Chanafiah yang disampaikan kepada Media malam itu. "Saya ingin mati di Indonesia dan dikuburkan di sebelah makam istri saya," kata mantan Dubes RI di Sri Lanka itu.

Di usia yang lebih 90 tahun Chanafiah mencoba tegar. Dia melantunkan lagu yang masih dihafalnya dengan baik;

sana tempat lahir beta

dibesarkan bunda

berlindung di hari tua

akhir menutup mata

Sahabat Bung Karno itu pun menarik napas panjang. Matanya menerawang. Jauh. (Rustika Nur Istiqomah/X-6)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## MEDIA INDONESIA

Rabu, 31 Agustus 2005

Wawancara: 32 Tahun tanpa Warga Negara Membela Satu Nusa dari Jauh

WARUNO WAHDI lahir di Bogor, 1943. Kini ia bermukim di Berlin, Jerman. Setahun setelah Indonesia merdeka, Waruno kecil mengikuti orang tuanya ke Singapura, kemudian Bangkok, Beijing, dan Moskow. Ayahnya, Izak Mahdi, seorang diplomat.

Ia lulus insinyur kimia di Institut Teknologi Kimia Mendeleyev, Moskow, pertengahan 1965. Ketika terjadi pergolakan politik di Tanah Air pada 1965-1966, Waruno sedang menunggu promosi gelar doktor. Perubahan konstelasi politik di Tanah Air membawa petaka bagi Waruno muda. Apalagi, ia tidak bersedia menandatangani pernyataan kesetiaan kepada Presiden Soeharto. Konsekuensinya, pada 1967 paspor Indonesianya dicabut oleh KBRI.

Sejak 1967 itulah Waruno hidup tanpa kewarganegaraan. Penguasa Uni Soviet mengasingkannya ke kota kecil Voronezh. Dari sana ia mengungsi ke Berlin Barat pada 1977, tanpa paspor. Baru pada tahun 2000 ia menjadi warga negara Jerman. Berbekal paspor Jerman itulah Waruno kembali ke Indonesia pada tahun 2000, terakhir kali ia pulang tahun 1963.

Untuk menggali pengalamannya selama 'mengembara' tanpa bukti kewarganegaraan, Gaudensius Suhardi dari Media mewawancarai Waruno pekan lalu. Petikannya:

Ceritakan pengalaman Anda selama menjadi warga negara Indonesia, kemudian paspor dicabut untuk kemudian menjadi warga negara Jerman?

Terima kasih untuk perhatian Media kepada nasib kawan sebangsa yang dicabut paspornya di kejauhan dari Tanah Air. Paspor saya dicabut pada tahun 1967 karena saya tetap setia kepada Presiden (Sukarno) dan pemerintah yang menugaskan saya menuntut ilmu pengetahuan di luar negeri. Waktu itu saya berusia 24 tahun, berarti saat status saya sebagai WNI otomatis batal setahun sesudah itu, saya baru berumur 25.

Persis 32 tahun kemudian, ketika mantan Menkumdam Yusril Ihza Mahendra ditugaskan datang ke negeri Belanda awal tahun 2000 untuk mempersiapkan pemulihan status WNI bagi kami-kami ini, saya pribadi pun datang ke Belanda untuk hadir pada pertemuan dengan beliau. Baru kemudian, setelah menjadi jelas bahwa tidak ada maksud menindaklanjuti pertemuan tersebut, dan status WNI saya sudah batal 32 tahun lamanya, baru saya seumur 57 tahun menjadi warga negara Jerman, negeri yang telah memberi tumpangan kepada saya selama 23 tahun (kini 28).

Berkat memiliki paspor Jerman itu pun, maka dalam lima tahun yang silam sejak itu saya sempat dua kali berkunjung ke Indonesia (sebelum jadi WN Jerman itu tidak boleh).

Anda sempat diasingkan ke Voronezh, Uni Soviet. Bagaimana suka duka Anda berada di pengasingan, apalagi hanya Anda sendiri orang Indonesia di sana?

Tentu ruang ini sangat kurang untuk menceritakan segalanya. Yang pokok, waktu kami bersama teman-teman ditelantarkan di balik tirai besi oleh aparat Orde Baru, tidak berarti kami terus melepaskan rasa kebangsaan. Demi mempertahankan kepribadian nasional, kami menolak masuk wadah organisasi yang disediakan oleh Uni Soviet untuk orang Indonesia seperti kami. Akibatnya, kami dipencilkan di beberapa kota berjauhan. Saya terpaksa hidup sendirian di Voronezh. Saya mendekati mahasiswa Vietnam yang banyak membantu saya.

Lebih penting lagi, di tempat kerja saya berusaha telaten dan rajin sehingga mendapat simpati rekan sekerja Rusia, yang juga banyak membantu saya mengatasi pelbagai problem yang lumrah bagi seseorang dalam pengasingan. Kadang-kadang, beban kerja itu terasa berlebihan, misalnya waktu pernah bekerja kuli menurunkan semen dari gerbong Kereta api. Tapi kami selalu sadar, seberat apa pun rasanya yang kami alami, masih jauh dari penderitaan mereka yang jadi korban Orde Baru di Tanah Air. Pikiran itu memberi kami kekuatan untuk tetap tabah.

Apakah Anda pernah berkeinginan untuk kembali menjadi warga negara Indonesia dan menetap di Bogor, daerah kelahiran Anda?

Tadinya memang hanya itu yang saya harapkan. Baru setelah menderita penyakit borreliosis (semacam infeksi yang ada pengaruh terhadap urat saraf dan daya ingatan), saya sulit untuk gonta-ganti lingkungan hidup.

Selain itu, masalah warga negara itu bagi saya bukan soal sepele. Tidak kebetulan, selama 30 tahun status WNI saya batal, tetap juga tidak mengurus kewarganegaraan negeri lain. Tetapi setelah mendapat kewarganegaraan Jerman, berarti saya juga berikatan kepada negeri Jerman yang sedemikian lama menampung saya dan menyediakan ruangan untuk menyambung kehidupan yang layak. Itu tidak berarti bahwa saya sudah melepaskan keindonesiaan saya. Yang ideal sekiranya bisa berdwikewarganegaraan, tapi itu kelihatannya tidak bisa terkabulkan.

Apakah Anda masih mengikuti perkembangan di Tanah Air? Apa komentar Anda terhadap rencana pemerintah Indonesia untuk memberi amnesti terhadap anggota Gerakan Aceh Merdeka? Apakah Anda setuju jika pemerintah Indonesia juga memberi amnesti terhadap mereka yang sudah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia lantaran persoalan politik?

Berita tetap saya ikuti, sampai sekarang juga. Dalam hal amnesti, saya ambil patokan pada sikap bagaimana Bung Karno dulu. Bekas anggota separatis PRRI-Permesta itu dulu juga diberi amnesti. Yang didahulukan oleh Bung Karno itu konsiliasi demi kerukunan bersama Bhinneka Tunggal Ika yang mendasari kesatuan RI.

Di Aceh pun harus begitu. Dan penting lagi ialah melindungi rakyat Aceh jangan lagi sampai jadi korban dendam dari sementara oknum kambing hitam di kalangan aparat yang mungkin menyalahgunakan situasi. Perlu disadari bahwa kesewenang-wenangan terhadap penduduk itu lebih merusak kesatuan RI ketimbang segala subversi kelompok separatis.

Sedangkan mengenai kami, tidak perlu diampnesti karena memang tidak merasa bersalah. Kami tidak menanggalkan kewarganegaraan Indonesia kami. Melainkan Orde Baru yang secara sewenang-wenang melanggar kewajibannya terhadap WNI yang di rantau, menelantarkan kami sampai tidak berkewarganegaraan. Setelah terlanter begitu pun, kami tetap sadar membela kesatuan nusa dan bangsa dari jauh, dengan sekedar alat yang kami miliki. Dengan makin berhasilnya upaya mengembalikan negara Indonesia ke jalur negara hukum, maka saya yakin masalah status orang-orang yang seperti kami pun kelak mendapat penyelesaian tuntas.

Yang menurut saya lebih perlu didahului itu mantan tahanan politik serta sanak saudaranya yang sampai sekarang belum dipulihkan hak-haknya, dan dikembalikan segala milik yang pernah dirampas atau disita secara tidak sah. P-3

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Kompas,

24 September 2005

## Warisan Sebuah Rezim

Suatu hari di pelabuhan penyeberangan Lembar, Pulau Lombok, terjadi keributan kecil antara dua orang sopir. Keributan itu lantaran rebutan penumpang. Aksi baku hantam pun tidak dapat dicegah. Galib terjadi, sebelum aksi baku hantam, terlebih dahulu kedua pihak yang bertikai mengawali dengan saling mencaci dan mengumpat. Menyebut keburukan masing-masing. Dari mulut keluar nama-nama binatang dan kata-kata kotor. Di antara deretan kata-kata kotor yang keluar dari mulut penuh emosi itu adalah kata umpatan: PKI Tanpa disadari, berkali-kali kata PKI dilontarkan kedua belah pihak.

Di dalam kamus bahasa keseharian orang Sasak Lombok (dan mungkin di daerah lain) yang tidak tertulis dan tidak terbukukan, kata PKI disamaartikan dengan kafir. Kata kafir (Arab: kufr) dalam bingkai teologi Islam berarti ingkar, tidak beriman. Term ini menunjukkan akan keberadaan seseorang yang tidak memiliki keyakinan iman di dalam hati. Atau mengingkari adanya Tuhan. Persoalan kemudian, bagaimanakah sebuah peristilahan dalam hal ini kata PKI sebagai ungkapan caci maki itu tiba-tiba muncul dari ketidaksadaran dan menjadi suatu istilah yang diterima dengan sadar oleh orang banyak, sebagaimana yang diterima oleh orang Sasak, untuk menegaskan suatu keburukan? Proses apa yang berjalan dalam menentukan dan mempopulerkan istilah PKI sehingga menjadi sebuah kata buruk yang hanya pantas disandingkan dengan ungkapan kotor lainnya?

Jika bahasa, menurut sifat dan hakikatnya, adalah metaforis (Cassirer, 1987: 166), maka setidaknya kelahiran satu ungkapan atau istilah selalu merujuk kepada sebuah latar historis atau peristiwa tertentu. Kata hermeneutika yang berarti menafsirkan misalnya, diambil dari nama Hermes, orang yang ditugaskan menyampaikan pesan dewa Jupiter kepada manusia. Karena manusia kesulitan menangkap langsung pesan dewa Jupiter, Hermeslah yang ditugaskan menjemput pesan itu untuk disampaikan kepada manusia. Dari nama Hermes terlahir istilah hermeneutika, dengan merujuk kepada peristiwa Hermes yang menafsirkan pesan Jupiter (E



Sumaryono, 1999: 23-24). Lalu bagaimana dengan istilah PKI bagi masyarakat Sasak yang suka menggunakannya sebagai umpatan dalam setiap ercekcokan?

Proses perubahan makna kata PKI (Partai Komunis Indonesia) yang semula berupa singkatan nama dari salah satu partai kontestan pemilu sebelum dibubarkan tahun 1966, kemudian menjadi kalimat serapah yang digunakan orang Sasak hingga saat ini, tidak terlepas dari konteks sejarah sepanjang Orde Baru. Dengan kata lain, narasi panjang antara tahun-tahun kelam dan masa kejayaan pembangunan Orde Barulah yang turut serta melahirkan, membentuk, dan mentahbiskan kalimat serapah tersebut ke dalam kamus keseharian orang Sasak. Dengan ini ingin ditegaskan bahwa istilah „PKI“ sebagai ungkapan serapah orang Sasak yang semula diucapkan dari ketidaksadaran, tidak dengan begitu saja ada dari ruang kosong dengan mengabaikan konteks besar yang membidani kelahiran istilah tersebut. Berangkat dari asumsi bahwa sebuah kata lahir dari latar historis atau peristiwa tertentu, maka demikian halnya dengan kata umpatan PKI. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa kata PKI sebagai ungkapan serapah itu adalah produk dari sebuah tatanan rezim yang memiliki kepentingan memapankan kekuasaan melalui tindakan eksploitasi terhadap ingatan kolektif rakyatnya.

#### Latar historis

Peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru diantarai oleh sebuah peristiwa kekacauan politik tahun 1965. Peristiwa yang dipicu konflik di tubuh Angkatan Darat (AD) itu dengan serta merta menyeret nama Partai Komunis Indonesia sebagai dalang penculikan dan pembunuhan atas tujuh perwira AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

Peristiwa tragedi kemanusiaan di Lubang Buaya itu kemudian, dalam hitungan bulan, diikuti oleh tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar, yakni aksi balas dendam berupa penangkapan dan pembunuhan atas anggota, simpatisan Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia telah lama diidentikkan sebagai partai dengan ideologi komunisme yang anti-Tuhan (ateisme). Identitas ketidakbertuhanan orang-orang PKI ini kemudian menjadi alat pembenaran bagi kalangan kelompok beragama untuk membunuh, memusnahkan, dan mengucilkan orang-orang yang dituduh PKI.

Oleh kaum beragama, orang-orang PKI disamakan dengan orang kafir yang halal darahnya. Dalam kasus pembantaian orang PKI oleh kaum beragama ini, dapat dilihat bagaimana kekuasaan telah berhasil melakukan manipulasi. Kaum beragama dijadikan alat bagi kepentingan membasmi musuh ideologi penguasa. Di atas kesadaran kaum beragama yang melakukan pembunuhan atas nama keyakinan agama mereka, berjalan kepentingan penguasa (Orde Baru) untuk membasmi musuh ideologi sang penguasa dan usaha menegakkan pamor kekuasaan di atas kenistaan ideologi lawan.

Sudah menjadi hukum sejarah, ketika sebuah rezim berkuasa menggantikan rezim lama, terlebih jika pergantian itu terjadi dengan melalui peristiwa politik yang pelik dan kompleks, maka dengan serta-merta rezim baru akan membangun sebuah tatanan dengan paradigma tersendiri. Perubahan yang kemudian terjadi yang mengiringi pergantian rezim tersebut, tidak hanya menyangkut perubahan struktur politik, tatanan birokrasi, aturan-aturan undang-undang dan hukum, tetapi bahkan

menyangkut segenap perubahan dalam hal-hal yang tidak termasuk masalah-masalah fundamental tadi, seperti hal berubahnya makna sebuah kata PKI diidentikkan sebagai kekafiran. PKI adalah musuh ideologi Pancasila. Pancasila mengakui ketuhanan dalam sila pertama, sedangkan komunisme tidak. Ingatan akan orang-orang PKI sebagai kaum kafir ini bersemayam sekian tahun lamanya dalam kesadaran masyarakat, yang pada akhirnya kemandirian masyarakat pula yang mengubahnya jadi istilah tersendiri.

### **Latar sosial budaya**

Singkatan PKI yang berubah menjadi ungkapan serapah yang keji dan biasa diucapkan sebagian orang Sasak dalam setiap percakapan, dikarenakan makna sebutan itu selalu dikontraskan dengan yang bertuhan, yang beriman, yang suci, yang berkepercayaan. Memori tentang peristiwa historis dan keidentikan komunisme dengan ateisme turut membentuk kesadaran dan persepsi masyarakat, serta mengukuhkan kata PKI sebagai ungkapan keburukan. Kebetulan orang Sasak Lombok sangat terkenal dengan kehidupan religiusnya. Tak berlebihan jika seorang peneliti etnografis, Ecklund, mengatakan, Menjadi orang Sasak berarti menjadi Muslim (Bartolomeo, 2001:86). Ungkapan ini ingin menegaskan bahwa agama mayoritas orang Sasak adalah Islam. Orang Sasak sangat fanatik pada agamanya. Mereka akan sangat tersinggung jika dikatakan tak bertuhan misalnya. Tidak memercayai Tuhan adalah aib terbesar orang Sasak. Identitas kuatnya keyakinan agama orang Sasak ditunjukkan pula dengan pemberian simbol Pulau Seribu asjid bagi Lombok. Di dalam ruang lingkup masyarakat dengan latar sosial budaya yang sedemikian fanatik kehidupan religiusnya itu, kata serapah PKI mendapatkan tempat tersendiri sebagai ungkapan yang sama derajatnya dengan atau bahkan lebih ekstrem dari serapah; bawi (babi), acong (anjing), sundal, jadah, dan kata-kata kotor lainnya. Reaksi spontan dan emosional akan timbul jika seseorang diserapahi dan dicaci dengan kata PKI. karena sesungguhnya kata serapah PKI itu lebih menegaskan posisi kerendahan martabat, kehinaan, dan kenistaan seseorang.

Meskipun peristiwa 1965 telah jauh dari saat ini, dan meskipun rezim Orde Baru yang angkuh, yang berperan sebagai mesin pencipta stigma PKI, telah runtuh, namun bekas-bekasnya masih tersisa di mana-mana. Termasuk di dalam bahasa ungkapan serapah dengan kata PKI!, yang populer di masyarakat Sasak. Kata serapah warisan tatanan rezim Orde Baru itu hingga kini menjadi kamus keseharian yang hanya tertulis dan terbukukan dalam ingatan, dan sewaktu-waktu akan meluncur deras dari mulut orang yang sedang saling bertikai.

SAMSUL BAHRI, Warga Asal Lombok Tengah, Mahasiswa Magister Ilmu Religi Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Kompas,

24 September 2005

## Warisan Sebuah Rezim.

**\*\*** Peralihan dari era Orde Lama ke Orde Baru diantarai oleh sebuah peristiwa kekacauan politik tahun 1965.

Peristiwa yang dipicu konflik di tubuh Angkatan Darat (AD) itu dengan serta merta menyeret nama Partai Komunis Indonesia sebagai dalang penculikan dan pembunuhan atas tujuh perwira AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.

### *Komentar:*

A.H. : Sejauh ini, belum ada bukti kuat yang menyatakan PKI sebagai pelaku tunggal upaya kudeta melalui penculikan dan pembunuhan para jenderal Angkatan Darat tersebut. Peristiwa 1965 itu bersifat kompleks dan tidak bisa disederhanakan. Banyak pihak yang bermain dalam peristiwa kelabu tersebut. Saat ini terdapat beberapa versi tentang dalang di balik peristiwa itu. Ada yang mengatakan angkatan bersenjata, Soeharto, Soekarno, CIA dan tidak ada pelaku tunggal.

Keterlibatan Suharto dalam penculikan dan pembunuhan atas tujuh perwira AD pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, suatu puncak konflik berdarah di tubuh Angkatan Darat (AD), telah banyak dibahas oleh para ahli sejarah baik ditingkat nasional maupun internasional. Beberapa indikasi pokok ttg. keterlibatan Suharto yang telah dibahas antara lain sbb:

- a. Perintah radiogram Suharto mendatangkan pasukan militer dari daerah dengan peralatan siap tempur untuk siap siaga di Jakarta menjelang peristiwa meletusnya G30S.
- b. Kedekatan hubungan Suharto dengan para tokoh kunci G30S spt. Latief dan Untung serta laporan kolonel Latief kepada Suharto ttg. rencana penangkapan thd. para anggota "Dewan Jendral" pada malam menjelang penangkapannya, yang hal ini tidak dihalangi dan juga tidak dilaporkan kepada atasannya.
- c. Suharto berbohong ketika dia bilang ada "pasukan tak dikenal identitasnya" yang berada disekitar istana negara pada tanggal 1 Oktober 1965. Kesaksian seorang perwira yang bertugas pada pasukan tersebut menyatakan, bahwa anak buahnya (tentaranya) selama seharian banyak yang keluar masuk kegedung KOSTRAD - tempat Suharto berkantor - untuk buang air kecil (kencing), sehingga adalah suatu hal yang tidak mungkin bila Suharto tidak tahu atau tidak diberi tahu oleh petugasnya ttg. identitas pasukan tsb.

Banyak ahli sejarah yang menarik kesimpulan, bahwa keterlibatan Suharto dalam G30S dan kemudian menumpasnya dengan dalih untuk melindungi presiden Sukarno, sebenarnya adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan strategi "kudeta merangkak" untuk merebut kekuasaan negara dari Bung Karno, dengan terlebih dulu menyingkirkan dan kekuatan kiri lainnya yang dianggap sebagai

penghalang pokoknya. Negara Barat, terutama AS pada waktu itu juga berkepentingan menyingkirkan Bung Karno, karena peranan Bung Karno didunia ketiga (Asia, Afrika dan Amerika Latin) dianggap merugikan kepentingannya, terutama usaha Bung Karno dalam menggalang kekuatan NEFO (New Emerging Forces), yang terdiri dari kekuatan anti imperialis diseluruh dunia menghadapi penindasan dan ancaman dari pihak imperialis yang disebut OLDEFO, terutama imperialis AS.

CONEFO atau Conference of Emerging Forces, yang sedianya akan diadakan di Indonesia dan direncanakan akan diikuti oleh wakil-wakil negara Asia, Afrika dan Amerika Latin juga oleh wakil-wakil kekuatan anti imperialis sedunia, gagal dilaksanakan setelah meletusnya peristiwa G30S.

\*\* tragedi kemanusiaan di Lubang Buaya itu kemudian, dalam hitungan bulan, diikuti oleh tragedi kemanusiaan yang jauh lebih besar, yakni aksi .... berupa penangkapan dan pembunuhan atas anggota, simpatisan Partai Komunis Indonesia.

....Kaum beragama dijadikan alat bagi kepentingan membasmi musuh ideologi penguasa. Di atas kesadaran kaum beragama yang melakukan pembunuhan atas nama keyakinan agama mereka, berjalan kepentingan penguasa (Orde Baru) untuk membasmi musuh ideologi sang penguasa dan usaha menegakkan pamor kekuasaan....

#### **Komentar:**

A.H. : Operasi pembunuhan massal berencana yang dilakukan pasukan militer Angkatan Darat dibawah Komando Suharto, menurut pengakuan Komandan RPKAD Sarwo Edi telah mengakibatkan terbunuhnya 3 (tiga) juta korban jiwa. Sekitar 100.000 orang pernah dikucilkan untuk kerja paksa dipusat konsentrasi tahanan politik (Tapol) dipulau Buru. Jutaan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PKI atau simpatisan Ormas yang dekat PKI, juga element kiri pendukung Bung Karno, oleh penguasa militer setempat diperlakukan secara sewenang-wenang. Banyak diantaranya yang dirampas harta kekayaannya kemudian dipenjarakan dipusat-pusat konsentrasi Tapol selama belasan tahun tanpa pengadilan. Para tahanan politik (Tapol) tersebut dibagi-bagi dalam kategori A,B dan C untuk kemudian didiskriminasi dalam kehidupannya. Doktrin militer fasis tentang "bersih lingkungan" dalam masa kekuasaan Orba/Suharto telah melipatgandakan jumlah Korban '65, karena bukan hanya para Tapol, yang jumlahnya jutaan itu yang didiskriminasi oleh negara fasis, tetapi juga para anggota keluarga dan sanak-familinya ikut mendapat diskriminasi oleh aparat kekuasaan negara diktator militer fasis Orba/Suharto. Jumlah seluruh Korban '65, para Tapol bersama anak cucunya diperkirakan sekitar 20 (duapuluh) juta orang.

Genosida '65 di Indonesia tercatat dalam sejarah dunia sebagai Kejahatan besar terhadap Kemanusiaan pada abad ke-20, yang taraf kekejaman dan kebiadabannya hanya bisa dibandingkan dengan kebiadaban Fasisme Hitler di Jerman.

\*\* peristiwa 1965 telah jauh dari saat ini, dan meskipun rezim Orde Baru yang angkuh, yang berperan sebagai mesin pencipta stigma PKI, telah runtuh, namun bekas-bekasnya masih tersisa di mana-mana.....

A.H. : Tuntutan para Korban '65 untuk dipulihkan kembali hak-hak asasinya sebagai warga negara, sampai saat ini belum terlaksana. Perjuangan untuk menegakkan HAM, Demokrasi, keadilan Sosial dan Keselamatan Lingkungan terus berlanjut. Menanggulangi beban sejarah kelam masa lalu adalah tugas yang mesti dipikul oleh seluruh bangsa Indonesia, bila ingin menjadi bangsa yang beradab ditengah pergaulan masyarakat dunia.

Arif

\*\*\*\*\*

> *Arif Darmawan*: Sejarah memang harus diluruskan. Apa yang disebut "Gerakan 30 September/PKI" atau "Gerakan September Tugapuluh (Gestapu - ini bukan bahasa Indonesia, melainkan bahasa Inggris) atau yang selama lebih dari tiga dasawarsa telah meracuni otak warga bangsa Indonesia yang tidak sadar sejarah dan generasi muda yang menjadi korban upaya pembentukan pola pikir dan watak. Bandingkan dengan nama atau istilah yang digunakan oleh Bung Karno, yaitu "Gerakan Satu Oktober" (Gestok), karena sejak tanggal tersebut Suharto melakukan kudeta.

> *Legowo*: Tentang G30S sendiri sebenarnya sudah cukup jelas. Itu operasi militer yang dipimpin oleh orang-orang militer seperti Letkol Untung, Kol Latief, Brigjen Suparjo, dkk. Mereka menggerakkan beberapa batalion. Semula operasinya dijalankan secara rahasia. Tapi setelah bergerak mereka menyatakan diri secara terbuka. Siapa yang sudah bergerak, siapa yang memimpin, apa tujuannya, kenapa mereka bergerak, dst. Semua itu mereka katakan secara terbuka. Lalu semua gerakan itu mereka laporkan pada Panglima Tertinggi waktu itu, Bung Karno.

> Setelah mendengar laporan itu Bung Karno sendiri yang langsung memerintahkan G30S menghentikan gerakannya karena dia yang akan menyelesaikan persoalannya. Sementara pimpinan AD akan dipegang oleh BK dan dia akan menunjuk pimpinan AD yang baru. Pimpinan G30S taat pada perintah itu. Mereka membubarkan diri. Operasinya cuma 2 hari, semua operasi itu dilaporkan kepada panglima tertinggi dan kemudian operasinya dihentikan karena mereka mentaati perintah Panglima Tertinggi. Itulah G30S.

> Yang bagi saya masih kurang jelas adalah motivasi para perwira G30S. Kenapa mereka bergerak? Letkol Untung, Kolonel Latief dan Brigjen Suparjo itu perwira-perwira yang sangat menonjol di kalangan AD pada tahun 65. Mereka bukan militer kelas dua. Mengapa mereka bergerak? Mengapa berani menentang atasannya? Sebagai militer mereka tahu melawan atasan itu risikonya mati. Apakah karena mendengar isu Dewan Jenderal itu? Atau ada motivasi lain yang belum ditelusuri, belum dipelajari dengan teliti.

> Bagaimana latar belakang para prajurit, para kopral, sersan, letnan, kapten, mayor, dll yang bergabung dengan G30S? Itu buat banyak orang masih kurang jelas juga. Yang jelas mereka orang militer yang dilahirkan dalam revolusi kemerdekaan. Generasi Letkol Untung itu - waktu tahun '65 umurnya sekitar 30-an atau awal 40-an -- itu hampir tidak ada yang mendapat pendidikan militer versi kolonial (KNIL atau PETA). Mereka mulai bergabung dengan militer selama revolusi kemerdekaan 1945 s/d 1950 dan kemudian dibesarkan atau meniti karir militernya dalam beberapa

operasi militer paska revolusi seperti penumpasan PRRI/Permesta, DI/TII, operasi Trikora, dan Konfrontasi atau operasi Dwikora. Pengalaman itu membentuk alam pikiran mereka. Seberapa jauh pengalaman itu membentuk motivasi mereka untuk bergabung dalam G30S? Soal ini masih belum banyak dipelajari.

> Sampai sekarang mereka masih selalu dituduh "digerakkan oleh PKI." Padahal kita tahu betapa sukarnya orang sipil menggerakkan militer, di jaman apapun. Ketua Umum Golkar, partai yang sangat berkuasa selama Orba, itu tidak bisa menggerakkan satu batalion pun. Apalagi PKI, yang bukan partai yang berkuasa, pada tahun 65 itu.

> *Arif Darmawan*: Sudah banyak tulisan yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Yang memang benar-benar terjadi.

> *Legowo*: Tentang G30 memang sudah cukup banyak. Membaca laporan Mahmilub juga sudah cukup lengkap. Begitu juga kalau kita membaca Pleidoinya Kolonel Latief, wakil komandan G30S, yang tahu persis seluk beluk G30S. Yang masih sangat kurang adalah dokumentasi, studi dan analisa tentang Pembunuhan Massal 65. G30S dan pembunuhan Massal 65 itu dua hal yang sangat berbeda tetapi selama Orba keduanya disamakan. G30S diasosiasikan dengan Pembunuhan Massal. Padahal bukan G30S yang melakukan pembunuhan massal.

> Pembunuhan Massal itu operasi militer yang dipimpin langsung oleh Suharto tanpa sepengetahuan Panglima Tertinggi. Ketika Suharto bergerak memimpin pembunuhan massal di Jateng (Oktober), Jatim (Nopember) dan di Bali (Desember) Bung Karno tidak tahu. Tidak ada laporannya. BK harus membentuk Tim Pencari Fakta untuk tahu apa yang sedang terjadi. Sampai sekarang bagi masyarakat Indonesia pembunuhan massal itu juga masih simpang siur. Memang hampir semua orang pernah mendengar. Tapi di mana persisnya, bagaimana terjadinya, bagaimana itu mulai dan bagaimana bisa berhenti, berapa banyak korbannya, siapa yang berperan dalam pembunuhan, siapa aktor intelektualnya, siapa yang mengorganisir di lapangan, siapa yang mensuport logistik, siapa yang melatih, dst, itu semua masih belum jelas.

> *Arif Darmawan*: Menjadi tugas warga bangsa Indonesia yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap nasib bangsa dan negaranya untuk tidak kenal lelah "berteriak" guna meluruskan sejarah.

> *Legowo*: Tahun 2005 ini ada serangkaian acara untuk memperingati Peristiwa 65. Undangannya saya lampirkan di bawah ini. Yang menarik dari rangkaian acara ini adalah karena penyelenggaranya coba merangkul banyak ilmuwan, sastrawan, ahli perfilman, budayawan, musisi, aktifis muda keagamaan (Syarikat-Indonesia), pembimbing rohani, dll dari beberapa generasi dan bukan hanya dari kalangan korban. Saya kira mereka merintis tradisi baru, mencoba mengungkapkan masalah 65 sebagai masalah bangsa. Bukan masalah para 'korban' saja. Ini tradisi yang bagus untuk dikembangkan terus.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

\*Kolom IBRAHIM ISA

-----

4 Agustus 2005.

## SUHARTO BUKAN "PETRUK" TAPI "PETRUS"!

<"Petrus" acronym dari "Penembak Misterius">

Kira-kira 5 tahun yang lalu, Ben Anderson menulis sebuah artikel penting berjudul 'PETRUS DADI RATU' (New Left Revue May-June 2000). (Baca halaman 775)

Di situ beliau membeberkan fakta-fakta dan data-data: bahwa apa yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 <terkenal dengan nama "Gerakan 30 September">, adalah suatu operasi intelejen tentara, yang diregisir sedemikian rupa, dengan maksud supaya gagal. Kemudian peristiwa yang gagal itu digunakan sebagai alasan untuk mengambil tindakan drastis, melakukan pengejaran dan pembantaian terhadap kaum komunis (PKI) dan golongan kiri, dengan sasaran merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno. Tulisan Ben itu, meski ditulis 5 tahun yang lalu tetapi masih relevan. Bahkan merupakan suatu bahan analitis yang beralasan dan argumentatif, juga meyakinkan mengenai kesimpulan yang diambilnya.

Pada bagian akhir tulisannya itu Ben Anderson, dengan serius menulis:

Sebagian besar dari para pelaku pada peristiwa tsb dan yang terjadi sesudahnya, para saksi kunci mengenai krisis 1965, -- atau sudah mati atau dibunuh. Mereka yang masih hidup menutup mulut mereka rapat-rapat, atas dasar berbagai motif: umpamanya Umar Wirahadikusuma, Omar Dani, Sudharsono, Rewang, M. Yusuf, Benny Murdani, Ny. Hartini, Mursyid, Yoga Sugama, Andi Yusuf dan Kemal Idris. <Sejak tulisan Ben itu, sudah banyak pula yang sudah meninggal>. Kini, 35 tahun kemudian sejak 1965, apakah tidak baik demi haridepan bangsa Indonesia bila orang-orang ini diharuskan untuk memberikan kesaksian yang paling rinci mengenai apa yang mereka lakukan dan saksikan, sebelum mereka menemui Sang Pencipta? Demikian Ben.

Menurut pepatah kuno, tulis Ben Anderson lagi, --- mesin giling Tuhan bekerja lamban tetapi hasil gilingannya halus sekali. Makna dari peribahasa ini ialah, akhirnya beras-kebenaran akan dipisahkan dari dedak-kerincuan dan kedustaan. Di setiap bagian dunia ini, betapapun, -- pada suatu hari kelak, dokumen-dokumen yang dalam waktu lama dirahasiakan, manuskrip dan memoir yang tersimpan dalam laci-laci terkunci, dan catatan-harian penuh abu di loténg para cucu, akhirnya akan dimasukkan ke mesin giling—NYA, dan isinya akan terbuka bagi generasi mendatang.

Demikianlah keyakinan Ben Anderson, bahwa bagaimanapun kerahasiaan dan kebohongan menutupi peristiwa 1965, ditutupi, pada suatu hari kelak semuanya itu akan terbongkar, dan kebenaran akan terungkap.

Ben memulai tulisannya dengan menganalisis tentang pembelaan Kolonel Latief di muka sidang Mahmilub, sesudah 13 tahun lamanya ia disekap dalam tahanan

khusus, disekat dari setiap hubungan luar. Ben Anderson menyamakan pembelaan Kolonel Latief tsb, dengan pidato pembelaan Bung Karno dimuka pengadilan kolonial Bandung, yang pada hakikatnya adalah pidato gugatan terhadap kolonialisme: INDONESIA MENGGUGAT (1930). Juga Kolonel Latief menggugat Jendral Suharto, menggugat Orba, teristimewa kekejamannya, mengenai kelicikan dan despotisme penciptanya.

Sayang sekali bahwa dokumen bersejarah ini harus menunggu 22 tahun sampai ia bisa dibaca oleh rakyat Indonesia, yang dicintainya, kata Ben.

Semula aku merasa pasti betul bahwa Ben Anderson, Indonesianis terkenal berbangsa Amerika, yang bersama Indonesianis Amerika lainnya, Ruth McVey, pada periode awal Jendral Suharto (lewat cara kup merangkak) merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno, --- menulis sebuah analisis (preliminary) sekitar "G30S", -- yang kemudian terkenal dengan nama "CORNELL PAPERS",--- bahwa ia (Ben Anderson) telah membuat kekeliruan dalam memilih judul tulisannya, --- tentang pembantaian 1965 yang terjadi di Indonesia. 'PETRUS DADI RATU', begitulah judul tulisan Benedict Anderson. Seingatku salah satu cerita wayang yang populer di kalangan penggemar ceritera wayang di Jawa dan Indonesia, ialah cerita 'PETRUK DADI RATU'. Artinya 'Petrus jadi ratu'. Jelas tokoh itu bernama 'Petrus', dengan huruf terakhir (k), bukan 'Petrus' yang huruf akhirnya adalah (s). Kutanyakan pada istriku, Murti, yang orang Jawa itu, -- bukankah tokoh 'Petrus' itu dari ceritera wayang? 'PETRUK', kata Murti, adalah salah satu tokoh 'badut' bersama 'GARENG' dan BAGONG. Tokoh lainnya adalah bapaknya, bernama 'SEMAR', yang sesungguhnya adalah dewa. Dalam ceritera wayang itu, tokoh-tokoh itu adalah tokoh positif. Ke-empat-empatnya adalah tokoh yang amat populer dalam ceritera wayang. Amat disukai rakyat. Karena mereka-mereka itu lucu, cerdik. Kuingat pada zaman tahun-tahun Republik Indonesia diproklamasikan, Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta menyiarkan acara tetap seminggu sekali, suatu 'talkshow' yang dibintangi oleh Mang CEPOT dan Mang UDÉL. Dua tokoh ini adalah dari ceritera wayang-golék Sunda (Jawa Barat), yang juga populer, lucu dan cerdik. Menggunakan tokoh-tokoh ceritera wayang untuk menyoroti 'kekinian' adalah suatu tradisi dalam kebudayaan rakyat kita.

Kufikir, mengapa pula Ben Anderson mengambil tokoh 'PETRUK' dalam menjuluki Suharto. Ini, kalau benar yang dimaksud Ben Anderson memang 'Petrus' tetapi Ben salah tulis, lalu 'PETRUK' menjadi 'PETRUS'. Kufikir lagi, bukankah PETRUK itu adalah seorang tokoh positif dalam ceritera wayang. Sedangkan Ben Anderson adalah salah seorang pakar asing PENGERTIK Suharto yang paling vokal, argumentatif atas dasar data-data dan kesaksian-kesaksian, dan amat beralasan. Maka jadilah soal mengapa mengumpamakan Suharto dengan PETRUS?

Sesudah membaca sampai selesai artikel Ben Anderson tsb, jelas bahwa Ben Anderson t i d a k s a l a h tulis. Memang, yang beliau maksudkan adalah 'P E T R U S DADI RATU'. Dan yang dimaksudkan dengan "Petrus" itu, seperti kita tahu semua, adalah "Penembak Misterius". Jelas pula bahwa Ben Anderson menyamakan SUHARTO dengan 'PENEMBAK MISTERIUS' aparat negara, yang



tanpa proses peradilan apapun, merajalela main tembak-mati siapa saja yang tubuhnya 'bertattoo'; kemudian mayatnya sengaja dibuang ditengah jalan atau dipinggir sungai, supaya bisa dilihat publik <katanya supaya menjadi peringatan bagi kriminil selanjutnya>. Dengan dalih 'membasmi kriminalitas' secara tuntas menggunakan cara "teror" yang berdarah dingin, untuk mencapai tujuannya. Ini diakui Suharto sendiri dalam buku biografinya.

Menurut Ben Anderson, Amnesty International memperhitungkan, bahwa kira-kira 7.000 yang dibunuh secara ekstra-judisial dalam peristiwa "Petrus", pada tahun 1983. Suatu pembunuhan terorganisasi terhadap kriminil-kiminil teri. Sedangkan mereka-mereka itu sering tadinya adalah agen-agen penguasa. Olok-olokan mengerikan menyebut penembak-penembak misterius itu sebagai serdadu-serdadu berjubah yang mereka sebut --'Petrus'-- <singkatan dari Penembak Misterius>, maksudnya St Peter.

Begitulah, tokoh-tokoh wayang, baik yang Jawa maupun yang Sunda, sering digunakan untuk mecerciterakan dan mengomentari, memuji ataupun mengeritik keadaan kini.

Dalam analisisnya atas dasar fakta-fakta dan data-data yang ada, termasuk data-data dari dokumentasi CIA, dokumen-dokumen Mahmilub, dan 'sak-dabrek' dokumentasi mengenai Indonesia yang paling banyak di luar negeri mengenai peristiwa 30 September, Ben Anderson, banyak menyoroti pelaku-pelaku pimpinan G30S seperti Letkol Untung, Letkol Latief, Lettu Dul Arief (yang melakukan penculikan terhadap para jendral yang kemudian di bunuh. Dul Arief "hilang" tak tahu dimana rimbanya. AD dan Orba bungkam mengenai "meng-hilangnya" Dul Arief), Brigjen Supardjo, Syam Kamaruzzaman --- terutama mengenai tokoh Letkol Latief.

Ben menunjukkan bahwa tokoh-tokoh G30S tsb kebanyakan berasal dari Divisi Diponegoro, anak-buah terdekat Jendral Suharto.

Dibeberkan bahwa Suharto berbohong mengenai kunjungan Letkol Latief ke rumah sakit untuk menemui Suharto, pada tanggal 30 September malam, beberapa jam sebelum meletusnya peristiwa "30 Septmber". Ketika itu Suharto sedang menjenguk putranya, Tommy, yang diopname karena musibah kesiram sup panas.

Kepada wartawan Amerika Arnold Brackman, Suharto mengatakan bahwa Latief menemuinya untuk "ngecek" tentang keberadaan Suharto di rumah sakit. Ben Anderson juga tidak jelas "apanya" yang mau "dicek", karena Suharto juga tidak menjelaskan apa yang hendak "dicek" Latief mengenai keberadaan Suharto di rumah sakit itu. Pada kesempatan lain Suharto menjelaskan kepada majalah Jerman "Der Spiegel" bahwa kedatangan Abdul Latief menemuinya di rumah sakit malam itu, adalah untuk "membunuhnya". Tidak dilakukan Latief, karena, kata Suharto, ketika itu banyak orang di rumah sakit. Seolah-olah seorang militer seperti Latief itu, tidak mengetahui sebelumnya, bahwa di rumah sakit akan selalu banyak orang. Jadi, ceritera Suharto kepada "Der Spiegel" itu, tidak cocok dengan ceritera Suharto sendiri kepada Arnold Brackman. Mana yang betul. Latief

kemudian menyatakan bahwa ia menemui Suharto malam itu, justru untuk menginformasikan tentang apa yang akan terjadi beberapa jam lagi.

Ben Anderson menunjukkan bahwa fakta-fakta yang bisa dipelajari memperkuat tuduhan Latief (kepada Suharto). Hampir semua pelaku kunci militer G30S, pada saat itu atau sebelumnya, adalah bawahan dekat Suharto, yaitu: Letkol Untung, Kolonel Latief, dan Brigjen Supardjo di Jakarta, dan Kolonel Suherman, Mayor Usman, dan sobat-sobatnya di markas Divisi Dipenegoro di Semarang.

## KETERLIBATAN SUHARTO

Berikut ini adalah lanjutan tentang tulisan Ben Anderson tsb:

Tingkat keterlibatan Suharto dengan kebenaran dapat diukur dari fakta-fakta berikut ini. Pada tanggal 4 Oktober 1965, sebuah tim dokter forensik menyampaikan langsung kepadanya (Suharto) utopsis rinci yang mereka buat mengenai jenazah para jendral yang dibunuh. Utopsi tsb menunjukkan bahwa semua korban ditembak mati dengan senjata tentara. Tetapi d u a h a r i, diluncurkan suatu kampanye di media pers, yang ketika itu sudah sepenuhnya dikuasai oleh KOSTRAD, bahwa mata para jendral telah dicungkil, dan kemaluan mereka dipotong-potong, oleh anggota-anggota Gerwani <organisasi wanita yang berafiliasi dengan PKI>. Kebohongan-kebohongan yang keterlaluan ini dirancang untuk menciptakan suatu histeria anti-komunis di segenap lapisan masyarakat Indonesia. Tulis Ben.

Pada saat-saat itu, permulaan Oktober sampai akhir Oktober 1965, pas penulis (Ibrahim Isa) sedang ada di Jakarta. Baru datang dari Cairo, pangkalan kerja di Sekretariat Tetap Setiakawan Rakyat-Rakyat Asia-Afrika. Kedatanganku di Jakarta adalah untuk ambil bagian dalam pekerjaan Konferensi Internasional Anti Pangkalan-Pangkalan Militer Asing (KIAPPMA) yang dirancang dan dilangsungkan di Jakarta pada bulan Oktober 1965. Keberadaanku di Jakarta memberikan kesempatan untuk menyaksikan dengan mata-kepala sendiri bagaimana kampanye histeria anti-komunis itu dilancarkan secara besar-besaran oleh fihak militer. Suatu kampanye kebohongan dan fitnah yang dilancarkan amat berencana dan meliputi seluruh negeri. Semua media massa, seperti radio, TV dan pers digerakkan. Semua mass media lainnya, yang Nasionalis, yang Komunis dan Kiri lainnya, yang Islam maupun Kristen, dan yang 'independen'; semuanya telah dibungkam dan diberangus sebelumnya. Para wartawan dan pemimpin redaksinya ditangkap, dipenjarakan dan banyak yang "hilang" tak tahu dimana rimbanya.

Dengan demikian Suharto sebagai penguasa baru dengan seluas-luasnya melakukan kampanye kebohongan itu, tanpa ada satu media massa pun yang dapat menyanggah, ataupun memberitakan yang lain.

Mengenai betapa dekatnya para pelaku G30S dengan Suharto, Ben Anderson menulis, sbb: Ketika Untung menikah di Semarang (1963), Suharto khusus pergi ke sebuah desa kecil di Jawa Tengah untuk menghadiri upacara pernikahan itu. Ketika putra Suharto, Sigit, disunat, Latief diundang untuk hadir, dan ketika putra Latief pada waktunya disunat, keluarga Suharto hadir sebagai tamu kehormatan.

Jelas sekali bahwa para perwira ini, yang bukan 'anak kemarin dulu', sepenuhnya percaya bahwa Suharto ada di pihak mereka dalam usaha mereka untuk menyelamatkan Sukarno dari konspirasi Dewan Jendral. Kepercayaan sedemikian rupa itu tidak mungkin terjadi, kecuali Suharto, langsung atau tidak langsung, memberikan persetujuannya pada rencana mereka. Oleh karena itu samasekali tidak mengherankan bahwa jawaban Latief terhadap pertanyaan saya (Ben Anderson), "Apa perasaan Anda pada malam 1 Oktober?" <sure itu ibukota sudah berada dibawah kekuasaan penuh Suharto>, adalah "Saya merasa bahwa saya telah dikhianati".

#### MENJELASKAN MISTERI YANG MELIPUTI G30S:

Selanjutnya, tulis Ben, kesaksian Latief menerangkan dengan jelas salah satu dari misteri yang meliputi Gerakan 30 September. Mengapa dua jendral yang secara langsung mengkomandoi pasukan-pasukan di Jakarta, kecuali pasukan Pengawal Presiden - yaitu Komandan Kostrad Suharto dan Komandan Wilayah Militer Jakarta - tidak "diamankan" oleh Gerakan 30 September. Ini bila para anggota (G30S) itu benar-benar bermaksud melakukan kup untuk menggulingkan pemerintah, sebagaimana dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Militer? Alasannya ialah, tulis Ben, kedua tokoh itu (Suharto dan Umar) dianggap sebagai sahabat.

Point lainnya, ialah ini, tulis Ben: Kita mengetahui bahwa beberapa bulan sebelum 1 Oktober, Ali Murtopo, ketika itu menjabat kepala intelejen Kostrad, sedang melaksanakan suatu politik luar negeri yang dirahasiakan terhadap Sukarno dan Yani. Dengan menggunakan kontak-kontak mereka dengan para mantan pemberontak <catatan Ben: Dari perang dalam negeri 1957-1958, ketika orang-orang ini punya hubungan dekat dengan CIA juga dengan Special Branch di Singapura dan Malaya>, hubungan klandestin <gelap> diadakan dengan pimpinan dari negeri-negeri yang bermusuhan (dengan Indonesia), Malaysia dan Singapura, juga dengan Amerika Serikat. Ketika itu Benny Murdani <Catatan Ben: Benny Mudani adalah kepala intelejen militer Indonesia yang legendaris pada tahun-tahun 1970-an dan 1980-an> melanjutkan hubungan-hubungan ini dari Bangkok, di mana ia menyamar sebagai pegawai kantor Garuda setempat. Maka, tampaknya Latief benar ketika ia menyatakan bahwa Suharto bermuka-dua, atau mungkin lebih baik dikatakan, bertinju-dua. Pada tinju pertama ia memegang Latief-Untung-Supardjo, dan pada tinju lainnya Murtopo-Yoga Sugama-Murdani <Catatan Ben Anderson: Yoga Sugama adalah pejabat tinggi intelejen yang dilatih oleh Jepang>. Demikian Ben Anderson.

#### JUSTRU SUHARTO PERANCANG & PELAKU PENGGULINGAN SUKARNO

Ben Anderson melanjutkan analisisnya: Gugatan kedua membalikkan tuduhan-tuduhan Jaksa Militer bahwa Gerakan 30 September bermaksud untuk menggulingkan pemerintah dan bahwa Dewan Jendral adalah serentetan dusta belaka. Kesimpulan Latief ialah bahwa justru adalah Suharto yang merencanakan dan melaksanakan penggulingan Sukarno; dan bahwa Dewan Jendral itu memang ada - bukan terdiri dari Nasution, Yani dll, tetapi terdiri dari orang-orang kepercayaan Suharto, yang menciptakan kediktaturan berlandaskan Tentara yang berlangsung puluhan tahun. Disini, tulis Ben Anderson, sekali lagi fakta-fakta ada di pihak Latief.

Jendral Pranoto Reksosamudro, yang ditunjuk oleh Presiden/Panglima Tertinggi Sukarno, dihadapkan pada kenyataan pengangkatannya itu (oleh Sukarno) ditentang oleh Suharto, dan kemudian segera ia (Pranoto) ditahan. Aidit, Lukman dan Nyoto, tiga pemimpin tertinggi Partai Komunis Indonesia, ketika itu menjabat kedudukan menteri dalam pemerintah Sukarno, telah dibunuh habis. Dan meskipun Presiden Sukarno melakukan apa yang ia bisa lakukan untuk mencegahnya, Suharto dan konco-konsonya merencanakan dan melaksanakan pembunuhan massal dalam bulan-bulan Oktober, November dan Desember 1965. Sebagaimana ditegaskan oleh Latief, tulis Ben, dalam bulan Maret 1966 suatu 'kup diam-diam' terjadi: kesatuan-kesatuan militer mengepung gedung dimana suatu sidang pleno kabinet sedang berlangsung, dan beberapa jam kemudian Presiden dipaksa, boleh dibilang di bawah todongan senjata, untuk menandatangani Supersemar yang super-gelap itu. <Catatan Ben Anderson: Supersemar adalah singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, Dekrit 11 Maret, yang melimpahkan kebanyakan dari fungsi eksekutif ad interim kepada Suharto; singkatan tsb sengaja mengeksplotir nama Semar, suatu tokoh kuat yang magis dalam teater wayang Jawa>. Suharto segera memecat kabinet dan membenarkan limabelas orang menteri.

Tulis Ben Anderson selanjutnya, kesimpulan sederhana Latief ialah bahwa, bukanlah Gerakan 30 September yang bersalah melakukan pembangkangan berencana terhadap Presiden, yang berakhir dengan penggulingannya, tetapi adalah orang, yang oleh pergunjungan akhir-akhir ini, menyebutnya sebagai Mr TEK. <Catatan Ben Anderson: 'TEK' = 'Thug Escaped from Kemusu', 'Bajingan yang Lolos dari Kemusu': Rezim Suharto biasa menamakan yang dikatakannya musuh subversif sebagai GPK, Gerakan Pengacau Keamanan. Pergunjungan kemudian mengubahnya menjadi Gali Pelarian Kemusu - Suharto dilahirkan di desa Kemusu>

## KEKEJAMAN LUAR BIASA

Lanjut Ben Anderson: Gugatan Ketiga Latief adalah lebih luas dari gugatan-gugatan lainnya dan sama gawatnya. Ia menggugat penguasa Orde Baru melakukan kekejaman luar biasa dan sepenuhnya ekstra-ilegal. Bahwa si penggugat sampai saat ini masih hidup, dengan kecerdasan yang utuh, dan semangatnya berapi-api, menunjukkan bahwa ia (Latief) adalah manusia yang ketabahnya hampir-hampir merupakan suatu keajaiban. Ketika ia ditahan pada tanggal 11 Oktober, 1965, banyak syaraf utama di paha kanannya terputus oleh tusukan bayonet, sedangkan lutut kirinya hancur sepenuhnya oleh peluru (sebenarnya, ia samasekali tidak berlawanan). Di Rumah Sakit Tentara seluruh tubuhnya di-gips, sehingga ia hanya bisa menggerakkan kepalanya saja. Namun dalam keadaan begini, ia masih diinterogasi sebelum dijabarkan ke dalam sel sempit, berbau busuk dan kotor dimana ia dipenjarakan selama tigabelas tahun berikutnya. Luka-lukanya membusuk dan mengeluarkan bau busuk bangkai. Ketika pada suatu ketika gipsnya dibuka untuk pemeriksaan, ratusan belatung merayap keluar. Melihat itu, salah seorang dari yang ditahan di penjara itu, harus berlari untuk muntah. Untuk dua setengah tahun lamanya Latief tergeletak di situ di dalam gipsnya sebelum ia dioperasi. Ia dipaksa disuntik penisilin, meskipun ia sudah menyampaikan kepada penjaganya bahwa ia amat alergis terhadap

penisilin. Sehingga akhirnya ia jatuh pingsan dan hampir saja mati. Bertahun-tahun lamanya ia menderita penyakit bawazir (ambeien), hernia, kencing batu, dan pengapuran tulang belakang. Perawatan yang diterima oleh para tahanan lainnya, teristimwa banyak orang-orang tentara diantaranya, tidak banyak berbeda, dan makanan mereka miskin sekali dan sering-sering sudah basi. Tidaklah mengherankan, maka banyak yang mati di Penjara Salemba, banyak yang jadi lumpuh disebabkan oleh siksaan, dan lainnya lagi jadi gila. Berhadapan dengan kekejaman seperti itu, barangkali bahkan akan terkejut.<Catatan Ben Anderson: Kempetai, terkenal dengan kekejamannya semasa perang>

Dan ini, tulis Ben Anderson, Penjara Salemba - salah satu dari begitu banyak penjara di Jakarta dan di seluruh Nusantara, dimana ratusan ribu manusia ditahan untuk bertahun-tahun lamanya tanpa pengadilan. Siapa yang bertanggung-jawab dibangunnya Gulag tropis ini? Buku sejarah untuk murid-murid sekolah-sekolah Indonesia bicara tentang monster (buto) bernama Kapten 'Turk' Westerling. biasanya menyebut jumlah korban yang ditimbulkannya di Sulawesi Selatan dalam tahun 1946, berjumlah empatpuluh ribu. Pasti lebih banyak lagi yang luka-luka, banyak rumah dibakar habis, banyak harta-benda dirampok dan, di sana-sini, perempuan-perempuan diperkosa. Pidato pembelaan Gus Dul (Latief) minta pembaca untuk merefleksikan suatu monster "bumiputera", yang kekejamannya jauh melebihi kekejaman Kapten Westerling. Dalam masaker tahun 1965-66, sesedikitnya enam ratus ribu orang telah dibunuh. Andaikata apa yang dilaporkan mengenai pernyataan Sarwo Edhi di tempat tidur menjelang akhir hidupnya kepada Mas Permadi itu betul, maka jumlah itu mungkin mencapai lebih dari dua juta. Antara 1977 dan 1979, paling tidak dua ratus ribu orang di Timor Timur mati sebelum masanya, dibunuh langsung atau musnah karena mati kelaparan sistimatis dan karena penyakit-penyakit akibat kelaparan. Amnesty International berkesimpulan bahwa tujuh ribu orang dibunuh secara ekstra-judisial dalam Peristiwa Petrus 1983. Terhadap para korban ini, kita harus tambahkan yang terjadi di Aceh, Irian, Lampung, Tanjung Priok dan dimana lagi. Suatu perkiraan yang paling konservatif: sebanyak 800.000 jiwa, atau duapuluh kali 'angka' Westerling. Dan semua korban ini, pada waktu mereka dihabisi nyawanya, resminya dianggap sebagai sewarganegara dengan sang monster. Demikian Ben Andrson.

IBRAHIM ISA dari BIJLMER

-----  
5 Agustus 2005 - <3-Selesai>

**SUHARTO BUKAN "PETRUK" TAPI "PETRUS"!**

<"Petrus" acronym dari "Penembak Misterius">

Tulisan ini adalah bagian 3, bagian terakhir, dari tulisan pakar Indonesianis berbangsa Amerika, Prof. Dr. Ben Anderson, yang berjudul: "PETRUS DADI RATU" (New Left Review 3, May-June 2000). Bagian pertama dari tulisan ini disiarkan pada tanggal 29 Juli, 2005; bagian ke-2 pada tanggal 4 Agustus kemarin.

Dalam kata pengantarnya pada artikel Ben Anderson tsb, Redaksi 'New Left Review' menulis: "What lay behind the greatest counter-revolutionary massacre of the 20th century, the extermination of the Indonesian Left in 1965? How did the Suharto dictatorship come to power? The extraordinary testimony of a survivor on the bloody mystery at the source of its tyranny." Terjemahan bebas: "Apa latar belakang pembantaian kontra-revolusioner terbesar pada abad ke-20, dimusnahkannya kekuatan Kiri Indonesia dalam tahun 1965? Bagaimana kediktatoran Suharto mencapai kekuasaan? Suatu kesaksian dari seorang survivor (orang yang masih hidup) tentang misteri berdarah pada sumber kekuasaan tiraninya".

Ben Anderson menulisnya lima tahun yang lalu. Bacalah lagi tulisannya sekarang. Di saat menjelang ulang-tahun ke-40 terjadinya peristiwa yang paling menggemparkan, paling kejam dan paling besar dalam hal pelanggaran terhadap Hak-Hak Azasi Manusia, terasa sekali tulisan Ben Anderson masih amat relevan. Jusstru karena Ben Anderson, diakui oleh kalangan ilmuwan internasional, adalah pakar yang paling tekun dan teliti menstudi masalah Indonesia.

Bukankah sampai sekarang peristiwa Gerakan 30 September itu masih misterius? Namun, yang tidak misterius, yang masih amat jelas dan masih terlihat langsung bukti-bukti dan kesaksiannya terpampang di hadapan mata kita, ialah peristiwa pembantaian masal terhadap warganegara yang tidak bersalah, yang jumlahnya melebihi satu juta orang. Suatu pelanggaran terhadap HAM yang paling kolosal yang pernah dilakukan oleh penguasa Indonesia. Dalam hal ini oleh rezim kediktatoran Jendral Suharto. Yang dengan sombong menamakan dirinya sebagai Orde Baru!

Marilah kita ikuti lanjutan tulisan Ben Anderson:

Latief bicara tentang bagian-bagian lainnya dari tragedi nasional yang juga merupakan bahan pemikiran. Umpamanya, ratusan ribu wargabegara yang meringkuk dipenjara bertahun-tahun lamanya, tanpa tuduhan jelas terhadap mereka itu, dan tanpa proses pengadilan apapun, selain menderita, juga secara rutin mengalami penyiksaan yang mengerikan. Belum lagi bicara tentang hilangnya harta-benda yang tak terhitung jumlah dan nilainya sebagai akibat dari pencurian dan perampokan, yang terkadang terjadi, pemerkosaan setiap hari, dan ostracism (pengasingan/pemboikotan/atigmatisasi) yang bertahun-tahun lamanya, tidak hanya bagi eks-tapol sendiri, tetapi bagi istri-istri dan janda-janda, bagi anak-anak, dan sanak-keluarga mereka dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Lanjut Ben Anderson: 'Aku menggugat' Latief ditulis duapuluh dua tahun yang lalu (Catatan penulis I.Isa - ingat tulisan Ben ini pada tahun 2000, ketika itu buku Latief baru terbit). Ben Anderson: Dalam pada itu banyak hal telah terjadi di negeri ini. Tetapi barulah sekarang ini barangkali bahwa (buku Latief itu) dapat memperoleh arti terpenting, bila ia berfungsi untuk menyentuh hati nurani rakyat Indonesia, terutama generasi mudanya. Untuk ribut-ribut tentang korupsi Suharto dan keluarganya, seakan-akan kriminalitasnya itu sama beratnya dengan yang dilakukan Eddy Tanzil, sama halnya dengan ribu-ribut tentang gundik-gundiknya Idi Amin, penggelapan yang dilakukan Slobodan Milosevic, atau tentang selera

Adolf Hitler terhadap karya-karya seni picisan. Bahwa klas menengah, dan sebagian cukup besar dari kaum cendekiawan Jakarta, masih menyibukkan dirinya dengan uang-kontan yang dicuri oleh 'Pak Harto' (mungkin dalam impian mereka mereka berfikir bahwa jumlah itu sebagai 'uang kontan kita') dengan jelas menunjukkan bahwa, mereka itu masih belum siap untuk berhadapan dengan totalitas sejarah modern Indonesia. Sikap ini, kata Ben, adalah suatu sikap burung onta yang membenamkan kepalanya ke dalam pasir gurun-pasir, --- adalah amat berbahaya. Seorang bijaksana sekali tempo dulu mengatakan: Mereka yang lupa/menganggap sepi masa lampau terkutuk akan mengulangnya lagi. Menakutkan, ia kan?

Lanjut Ben Anderson lagi:

Begitu pentingnya pembelaan Latief, dibuat di bawah syarat-syarat luar biasa (sulitnya), tak dapat mengungkap kerudung yang masih menutupi banyak aspek mengenai Gerakan 30 September dan dampak-nya. Diantara sedemikian banyak pertanyaan, orang paling-tidak bisa mengajukan pertanyaan ini: Mengapa Latief tidak dieksekusi (ditembak mati), sedangkan Untung, Supardjo, Mayor AURI Suyono, dan lain-lainnya hukuman matinya dilaksanakan? Mengapa Yani dan jendral-jendral lainnya itu dibunuh, sedangkan rencana semula ialah mengajukan mereka, sebagai satu kelompok, dihadapkan pada Sukarno? Mengapa Lettu Dul Arief dari Pasukan Pengawal Presiden (Cakrabirawa, I.I.), kemudian menghilang tanpa jejak?

Bagaimana dan mengapa seluruh Jawa Tengah jatuh ke tangan para pendukung Gerakan 30 September untuk satu setengah hari lamanya, sedangkan hal yang serupa tidak terjadi di provinsi-lain manapun? Mengapa Kol. Suherman, Mayor Usman dan teman-temannya di Semarang juga menghilang tanpa jejak? Siapa sebenarnya Syam alias Kamaruzzaman itu?(Catatan Ben Anderson: Katanya ia adalah kepala Biro Khusus PKI, dan perancang Gerakan 30 September). Siapa sesungguhnya Syam alias Kamaruzzaman - mantan pejabat Recomba dari Negara Federal Pasundan ( Catatan Ben: Dari perang dalam negeri 1957-58, ketika orang-orang ini terikat erat dengan CIA juga dengan Special Branch di Singapura dan Malaya), mantan anggota Partai Sosialis Indonesia yang anti-Komunis, bekas agen intel untuk Kodam Jakarta pada periode peristiwa penyelundupan besar-besaran oleh Jendral Nasution dan Jendral Ibnu Sutowo dari Tanjung Priok, juga mantan teman terdekat D.N. Aidit? Apakah dia itu mata-mata Angkatan Darat di kalangan kaum Komunis? Atau mata-mata dari fihak ketiga? Atau sekaligus mata-mata untuk ketiga-tiga fihak itu? Apakah ia benar dieksekusi, ataukah ia bermukim dengan senang diluar-negeri dengan nama baru dan dompet tebal?

Latief juga tidak bisa memberikan jawaban tentang aspek-aspek kunci mengenai kegiatan Gerakan 30 September, di atas segala-gelanya mengenai kebodohan politik yang dilakukannya. Pengumuman Letkol Untung lewat radio bahwa mulai tanggal 1 Oktober, pangkat tertinggi militer adalah seperti yang disandangnya sendiri, dengan demikian secara otomatis menjadikan dirinya musuh semua jendral dan kolonel di Indonesia, banyak dari mereka itu menjabat pos-pos penting kesatuan-kesatuan tempur.

Pasti ini gila, tulis Ben. Mengapa daftar yang diumumkan mengenai Dewan Revolusi begitu kacaunya dan begitu tak terbayangkan, tak mungkin terjadi? (Catatan Ben: Gerakan memproklamasikan Dewan ini sebagai kekuasaan sementara di Indonesia, tetapi para anggotanya termasuk jenderal-jenderal Kanan, orang-orang Kiri yang kurang penting, dari sejumlah politisi yang terkenal oportunistis, bersamaan dengan itu menyisihkan semua tokoh yang punya reputasi nasional dan organisasi-organisasi massa di belakang mereka). Mengapa Gerakan tidak mengumumkan bahwa mereka bertindak atas perintah Presiden Sukarno (meskipun ini tidak benar), tetapi malah membubarkan kabinet Sukarno sendiri. Mengapa tidak berseru kepada massa untuk turun di jalan-jalan untuk melindungi pemimpin nasional? Sungguh tidak bisa dipercaya, bahwa para pemimpin yang begitu berpengalaman dan cerdas seperti Aidit, Nyoto dan Sudisman (Catatan Ben: Sekertaris Jenderal PKI) membuat serentetan kesalahan-kesalahan politik yang fatal seperti itu?

Maka dengan sendirinya timbullah kecurigaan, kata Ben, bahwa jerat ini sengaja diatur untuk menjamin kegagalan Gerakan itu. Pengumuman-pengumuman seperti yang disebut diatas hanyalah mengacaukan umum, melumpuhkan massa, dan memberikan dalih mudah untuk menghancurkan Gerakan 30 September itu sendiri. Dalam peristiwa ini, siapa yang sesungguhnya membikin pengumuman-pengumuman yang ganjil dan mengatur diumumkannya lewat radio nasional.

Ben Anderson: Kebanyakan dari para pelaku, dan juga para saksi-kunci krisis 1965, sudah pada mati atau dibunuh. Mereka yang masih hidup menutup mulut mereka rapat-rapat, atas pelbagai pertimbangan sendiri: umpamanya, Umar Wirahadikusuma, Omar Dhani, Sudharmono, Rewang, . Pangabean, Benny Murdani, Ny. Hartini, Mursyid, Yoga Sugama, Andi Yusuf dan Kemal Idris. (Catatan Ben Anderson: Omar Dhani: Panglima AURI pada tahun 1965, dihukum mati, kemudian hukumannya dijadikan hukuman seumur hidup, dan kemudian baru-baru ini dibebaskan. Sudharmono: puluhan tahun lamanya orang terdekat Suharto. Rewang: mantan calon anggota Politbiro PKI. Pangabean: Jendral tertinggi klik Suharto dan menggantikan Suharto sebagai panglima Kostrad (Catatan I. Isa: Mungkin yang dimaksudkan Ben adalah Panglima Kopkamtib). Hartini: Istri kedua Sukarno dalam tahun 1965. Mursyid: Jendral Sukarno is mengepalai operasi militer untuk Staf AD pada tahun 1965, kemudian ditahan. Yusuf dan Idris: dua-dua jendral ini memainkan peranan sentral dalam penggulingan Sukarno). Sekarang sudah 35 tahun berlalu, apakah tidak baik guna kepentingan haridepan nasional Indonesia bila orang-orang ini diharuskan untuk memberikan keterangan yang paling rinci tentang apa yang mereka kerjakan dan saksikan, sebelum mereka pergi menjumpai Sang Pencipta?

Menurut pepatah kuno, tulis Ben Anderson lagi, --- Mesin giling Tuhan bekerja lambat tetapi hasil gilingannya halus sekali. Makna dari peribahasa ini ialah, akhirnya beras-kebenaran akan dipisahkan dari dedak-kerincuan dan kedustaan. Di setiap bagian dunia ini, betapun, -- pada suatu hari kelak, dokumen-dokumen yang dalam waktu lama dirahasiakan, manuskrip dan memoir yang tersimpan dalam laci-laci terkunci, dan catatan-harian penuh abu di loténg para cucu, akhirnya akan dimasukkan ke mesin giling-NYA, dan isinya akan terbuka bagi generasi mendatang



Dengan bukunya ini, 'yang dibungkam' selama duapuluhsatu tahun dengan penderitaan yang luar biasa, Abdul Latief, dengan kekuatannya yang mengagumkan, telah memberikan contoh yang mengesankan sehubungan dengan pepatah kuno tadi. Siapa tahu, pada suatu ketika gugatan-gugatannya itu dapat memberikan bahan berharga bagi suatu skrip dari drama dalam repertoar Teater Wayang Sejarah Nasional dengan judul . . . yah, apalagi ya? Kalau bukan: --- PETRUS JADI RAJA.

Dalam ceritera wayang Jawa, 'Petruk Dadi Ratu' adalah adalah suatu ceritera lelucon, dimana Petruk, tokoh badut terkenal yang dicintai, singkat jadi Raja, dengan segala akibatnya yang meriah. Bagi PETRUS, baca Si Pembantai - lihat catatan saya terdahulu tentang Petrus; Suharto menganggap dirinya yang terkenal kejamnya itu, sebagai semacam raja Jawa model baru, yang secara transparan menyamar sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikianlah akhir tulisan Ben Anderson.

Dengan tulisan-tulisannya, Ben Anderson menunjukkan perhatian, kepedulian dan keprihatinnya terhadap sikap para cendekiawan Indonesia yang dikatakannya, sbb:

"Bahwa klas menengah, dan sebagian cukup besar dari kaum cendekiawan Jakarta, masih menyibukkan dirinya dengan uang-kontan yang dicuri oleh 'Pak Harto' (mungkin dalam impian mereka mereka berfikir bahwa jumlah itu sebagai 'uang kontan kita') dengan jelas menunjukkan bahwa, mereka itu masih belum siap untuk berhadapan dengan totalitas sejarah modern Indonesia. Sikap ini, kata Ben, adalah suatu sikap burung onta yang membenamkan kepalanya ke dalam pasir gurun-pasir, --- adalah amat berbahaya. Seorang bijaksana sekali tempo mengatakan: Mereka yang lupa/menganggap sepi masa lampau terkutuk akan mengulangnya lagi. Menakutkan, ia kan?".

Apa yang kita saksikan sekarang ini, canang Ben Andeson ini masih relevan. Patut diperhatikan, khususnya oleh para cendekiawan generasi muda kita. Agar tidak terulang lagi sikap munafik "burung onta yang menenggelamkan kepalanya ke dalam gurun pasir". Suatu sikap yang amat berbahaya.

Mari camkan dan endapkan bersama canang sahabat Indonesia, pakar Amerika Prof. Dr Ben Anderson:"Mereka yang lupa/menganggap sepi masa lampau terkutuk akan mengulangnya lagi". Terima kasih Pak Ben!!

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

\*Kolom IBRAHIM ISA

-----  
29 September 2005.

'Untuk kasus KKN saja sangat sulit, apalagi tentang peristiwa besar itu'\*

Judul Kolom yang Penulis pakai seperti yang tertera diatas, adalah kata-kata yang dinyatakan oleh salah seorang peneliti senior Indonesia, ketika memper-soalkan sekitar keterlibatan Suharto dalam peristiwa G30S. Maksudnya, kira-kira

begini: Untuk kasus KKN-nya Suharto, yang begitu gamblang dan nyatapun, adalah sulit untuk menyeret mantan Presiden Suharto ke pengadilan. Apalagi mengenai kasus keterlibatan Suharto dalam peristiwa G30S. Yang bisa disaksikan begitu diberitakan Suharto akan dibawa ke pengadilan, kontan para dokter perawatnya menyatakan bahwa kesehatan Suharto tidak memungkinkan itu. Sampai sekarang begitulah seadanya. Padahal baru saja tampak pada layar TV Indonesia bahwa Suharto segar-bugar, bisa jalan sendiri pada suatu kunjungan.

Apa yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta, meletusnya Gerakan 30 September 1965; terbunuhnya enam jendral plus seorang perwira menengah TNI, yang kemudian membawa dampak pelanggaran HAM terbesar oleh penguasa di sepanjang sejarah Indonesia,--- yaitu dibantainya sampai kurang lebih 3 juta warganegara Indonesia tidak bersalah --- (menurut pengakuan Jendral RPKAD Sarwo Edhi menjelang akhir umurnya), besok ini memasuki tahun ke-40.

Namun, hingga hari ini, kecuali oleh jendral Suharto dan penjelasan versi Orba, peristiwa itu dinyatakan dan dianggap tetap merupakan m i s t e r i. Kabut tebal menutupinya. Seakan-akan tidak ada satu makhlukpun yang mampu mengungkapkannya. Dikatakan 'misteri', karena tidak satupun bukti yang dianggap bisa dipercaya, yang mampu mengungkap misteri tsb. Benedict Anderson, seorang Indonesianis dari Cornell University, pernah menulis duapuluh tahun yang lalu, sebab-musababnya G30S disebut misteri. Menurut beliau, antara lain karena mereka-mereka yang sangat mungkin mengetahuinya, kebanyakan sudah mati.

Sedangkan mereka yang masih hidup dan mengetahuinya, masih tutup mulut.

Yang sedikit banyak mengetahui: Ada yang mati dalam status tahanan Jendral Suharto, seperti mantan Presiden Sukarno. Menurut sumber-sumber yang boleh dipercaya, Presiden Sukarno menantang untuk diadili. Maksudnya -- kira-kira, melalui penjelasan dan seruannya beliau hendak menyelamatkan bangsa ini dari malapetaka perang saudara, dari pertumpahan darah besar-besaran. Karena, ketika itu beliau sudah memperoleh laporan mengenai pembunuhan besar-besaran yang telah terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali. Presiden Sukarno bermaksud bisa menggunakan forum pengadilan terhadap dirinya, untuk menggugat jendral Suharto yang menyalahgunakan SUPERSEMAR dan telah merebut kekuasaan politik atas pemerintahan dan negara. Mengapa Presiden Sukarno tidak diadili? Seandainya tuduhan bahwa beliau tahu, mendukung bahkan dikatakan menjadi dalang dibelakang G30S, -- bahwa semua itu benar adanya? Mengapa penguasa Suharto tidak berani mengadili Bung Karno?

Selain itu, di antara yang dituduh dalang atau terlibat, banyak yang sudah mati dibunuh, seperti DN Aidit, ketua CC PKI dan Menko; MH Lukman, wakil ketua 1 CC PKI, Menko wakil ketua DPRGR; Nyoto, wakil ketua II CC PKI dan menteri negara Republik Indonesia. Dikatakan paling tidak DN Aidit mengetahui informasi sekitar peristiwa G30S, yang itu semuanya dibawanya keliang kubur. Pelaku dari pembunuhan terhadap mereka-mereka itu, adalah yang riil berkuasa ketika itu: jendral Suharto c.s yang nyatanya telah merebut kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Mengapa para tertuduh itu tidak diadili? Mereka serta merta ditembak mati. Logis, muncullah sbb: Bila benar, seperti tuduhan fihak militer yang kuasa

ketika itu, bahwa adalah PKI yang jadi biangkeladi G30S, mengapa tokoh-tokohnya yang dikatakan dalam itu tidak diadili secara terbuka?

Dari dua argumentasi tsb diatas, sudah bisa diambil kesimpulan bahwa yang membikin misterius kasus sekitar G30S, adalah penguasa sendiri. Tampaknya bagi penguasa ketika itu, G30S samasekali tidak misterius. Suharto, seperti dikatakan oleh Kol. Latif, salah seorang pimpinan G30S, paling tidak telah diberi laporan tentang apa yang akan terjadi. Mengapa Suharto tidak menyampaikan informasi ini kepada atasannya, Jendral Yani?

Untuk membikin jernih kejadian 1 Oktober 1965, yang dengan tepat dinyatakan Presiden Sukarno ketika itu, sebagai Gerakan 1 Oktober, GESTOK, akan memerlukan waktu lama. Sebabnya a. l. seperti apa yang diungkapkan dalam judul kolom ini.

G30S adalah seperti kilat pada hujan berlalu, sebentar saja tercetus di cakrawala --- sudah ditumpas. Namun, menurut Dewi Sukarnoputri dalam surat terbukanya, yang menghentikan G30S adalah Bung Karno.

Apa yang terjadi kemudian bukanlah kilat pada hujan gerimis, tetapi adalah halilintar dan gelédek. Adalah hujan lebat, adalah topan dan gemlombang banjir darah puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia-manusia Indonesia yang tidak bersalah. oleh penangkapan besar-besaran, penculikan besar-besaran, pembuangan besar-besaran ke pulau Buru. Semua itu dengan dalih: Diamankan! Tapi, para korban akhirnya meringkuk dalam tahanan militer bertahun-tahun lamanya, sampai 12 bahkan 14 tahun tanpa proses pengadilan apapun. Beberapa orang saja yang diajukan penguasa ke pengadilan rekayasa yang diperlukan penguasa untuk mengécoh opini umum.

Macam-macam versi bermunculan sekitar kasus pembantaian masal 1965, '66 dst. Ada percobaan untuk mempresentasikannya sebagai suatu 'konflik horizontal', sebagai pertentangan di kalangan rakyat sendiri. Namun, pelbagai bukti serta kesaksian pelaku dan korban mengungkapkan bahwa apa yang terjadi adalah suatu konflik fertikal. Penguasa di satu segi dan rakyat tak bersalah di difihak yang menjadi korban. Satu hal jelas, penangkapan besar-besaran, pengejaran dan pembunuhan masal itu terjadi s e s u d a h jendral Suharto mengambil alih kekuasaan aktual di Indonesia. Peristiwa pelanggaran hak-hak azasi manusia itu terjadi sesudah kesatuan-kesatuan RPKAD dikirimkan oleh jendral Suharto ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, dst.

Memperingati ulangtahun ke-40 tragedi nasional yang terjadi pada tahun 1965, dst itu, punya arti khusus yang bersifat fundamental bagi pembangunan dan pengkonsolidasian nasyon ini. Orang bisa saja mempertanyakan: untuk maksud apa tragedi nasional itu "diungkit-ungkit" kembali. Bukankah hal itu sudah 'belong to the past'? Sudah menjadi sejarah!

Tetapi, beruntunglah kita, bahwa nyatanya semakin bertambah banyak orang-orang yang suka berfikir dan menganalisa serta mendambakan kebenaran dan keadilan mengenai apa yang terjadi dengan bangsa ini. Baik itu di kalangan generasi muda maupun di kalangan pers dan kaum cendekiawan. Semakin

santer suara yang menuntut 'pelurusan' sejarah, agar bangsa ini bisa maju dengan hati nurani yang jernih.

Mereka ini tidak menutup mata, bahwa, betapapun, demi keadilan dan kebenaran, demi penegakkan negara hukum Indonesia, adalah suatu keharusan kita semua, setiap warganegara Indonesia, menuntut pertanggungjawaban dari para pencetus dan pelaku pembantaian masal, pengejaran, pemenjaraan dan pembuangan, yang kesemuanya itu dilakukan tanpa proses pengadilan yang demokratis, yang independen dari penguasa dan yang transparan.

Lebih-lebih lagi sampai saat inipun, empat puluh tahun sesudah terjadinya tragedi nasional, masih ratusan ribu, bahkan hampir meliputi duapuluh juta, warganegara yang tidak bersalah, masih menderita diskriminasi dan stigmatisasi karena pernah atau ditudun berafiliasi dengan PKI atau organisasi-organisasi yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Sebagian besar para korban diskriminasi dan stigmatisasi penguasa itu, diperlakukan demikian karena mereka punya hubungan kekeluargaan dengan para tertuduh. Padahal ketika itu baik PKI maupun organisasi-organisasi tsb keberadaan mereka sepenuhnya legal, sesuai hukum yang berlaku, menerima Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia, tambahan lagi dengan kuat menyokong politik Presiden Sukarno.

Menjadilah tugas mendesak pemerintah dewasa ini, --- sudahlah tiba saatnya, untuk mengkoreksi pelanggaran besar HAM yang telah berlangsung begitu lama terhadap warganegara sendiri. Untuk mengkoreksi kesalahan ini, untuk melakukan rehabilitasi terhadap para korban tsb, tidak perlu menantikan penjerihnan serta pengungkapan misteri yang enutupi kejadian mengenai dan sekitar G30S. Para korban perlakuan tidak adil pemerintah, para korban diskriminasi dan stigmatisasi ada di hadapan mata kita. Gugatan LBH Jakarta terhadap para mantan presiden yang a.l. dianggap melalaikan pemulihan hak-hak azasi warganegara yang menjadi korban diskriminasi dan stigmatisasi setelah terjadinya G30S, mengungkapkan bahwa untuk pemulihan dan rehabilitasi para korban peristiwa 65, tidak memerlukan syarat lain, kecuali 'political will' dari pihak pemerintah. Hal mana tidak dilakukan oleh pemerintah-pemerintah setelah tergulingnya kekuasaan otoriter presiden Suharto, sampai pemerintah Presiden SBY sekarang ini. \*\*\*

\*Kolom IBRAHIM ISA

-----  
Jum'at, 14 Oktober 2005.

ADILI GENOSIDA 1965 !!--- BARU NEGARA HUKUM INDONESIA BISA  
TEGAK!!\*

Besok, Sabtu 15 Oktober, sejumlah manusia-manusia Indonesia yang dewasa ini kebetulan ada di Eropah: Belanda, Jerman, Perancis, Swedia, dan mungkin dari tempat lainnya lagi, akan mengadakan pertemuan bertempat di Burg. Bieckerstraat 46 A, Diemen, Nederland, di gedung Sekolah "Schake!". Tempat yang biasa dipakai untuk pelbagai pertemuan masyarakat Indonesia di Belanda.

Mereka berkumpul untuk memperingati '40 TH TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 65', dengan tema: 'Tragedi Nasional 1965 dan dampaknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara'. Penyelenggara pertemuan adalah PANITYA PERINGATAN 40 TH TRAGEDI NASIONAL PERISTIWA 65, dengan Sri Isni S sebagai ketuanya. Dalam undangan Panitya dinyatakan: "Kami masyarakat Indonesia di negeri Belanda, baik yang merupakan korban maupun bukan korban peristiwa 1965 tidak bisa melupakan masa lampau yang penuh kekerasan dan tidak bisa membiarkan sejarah Indonesia dipulas dengan kebohongan dan rekayasa Suharto. Kebenaran dan keadilan harus kita ungkapkan dan tegakkan demi masa depan Indonesia yang demokratis, menjunjung HAM dan keadilan sosial. Inilah maksud dan tujuan kami menyelenggarakan peringatan tsb diatas'.

A.S. Munandar, sebagai pembicara utama, akan memberikan uraian tentang "Peranan Nekolim dalam Tragedi Nasional 1965'. Kemudian Francisca Fanguidaej, mantan anggota DPRGR periode pemerintahan Presiden Sukarno, akan bicara tentang "Korban dan Perubahan". Hadirin akan berpartisipasi dalam acara diskusi berikutnya. Juga akan ada pameran buku-buku, foto-foto dan karikatur-karikatur yang berhubungan dengan peristiwa 65.

Bagi banyak korban, termasuk penulis, arti penting pertemuan besok itu, ialah: bahwa peristiwa itu, sebagaimana hari-hari bulan Oktober ini banyak diperingati di Indonesia, adalah suatu menifestasi keprihatinan dan kemarahan terhadap pelanggaran HAM terbesar di sepanjang sejarah Indonesia. Dan yang lebih penting lagi ialah bahwa, ia menyuarakan tuntutan keadilan bagi para korban, yang tidak diketahui dimana kuburannya, demi keadilan bagi para ekstopol dan keluarga mereka yang sampai dewasa ini oleh penguasa masih di-stigmatisir dan didiskriminasi alam waktu begitu lama dan paling kejam. Suatu tindak ketidak-adilan dan kekejaman sepeprti itu, tak ada taranya warganegara sendiri yang tidak bersalah.

Adakah ketidak-adilan terhadap lebih dari duapuluh juta manusia Indonesia yang masih berlaku hingga saat ini, pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah kita? Apakah pelanggaran hukum begitu besar dan menyeluruh dalam kehidupan bangsa ini, pun begitu lama periodenya, sejak 1966 sampai 2005, yang berlangsung 30 tahun lebih dan entah masih berapa tahun lagi, masih diabaikan berlangsung tiada akhirnya? Sampai kapankah suatu keadaan yang amat mengkisruhkan dan memalukan, --- dimana sebagian terbesar para pemimpin elitnya, para anggota badan-badan legeslatif, eksekutif dan judisial yang mengaku reformis dan demokrat, menganggap dirinya mewakili kepentingan rakyat, -- mengaku dirinya mendukung HAM dan Panca-Silais pula, --- sebagian besar pers dan cendekiawannya, ---- bungkam saja, seperti orang-orang yang bisu-tuli saja layaknya? Bisakah atas dasar situasi dan keadaan mental penguasa seperti itu akan dapat tegak NEGARA HUKUM INDONESIA?

Adalah pada periode tsb pada hari-hari, minggu-minggu dan bulan-bulan sesudah terjadinya peristiwa 'Gerakan 30 September 1965' --- dimana telah jatuh korban 6 jendral dan seorang perwira menengah TNI --- telah berlangsung pembantaian biadab atas ratusan ribu, bahkan sampai sejuta lebih <menurut pernyataan

kalangan ORBA sendiri>, warganegara Indonesia, yang tidak bersalah, yang mematuhi hukum. Bahkan diantara para korban pembantaian tsb banyak yang pada periode perjuangan kemerdekaan selama penjajahan Belanda, dan selama Revolusi Kemerdekaan, adalah partisipan dan pelaku aktif dalam perjuangan. Banyak pula diantara mereka yang sehari-hari adalah aktivis parpol, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga dalam perjuangan bangsa untuk memperkokoh Republik Indonesia Merdeka, untuk perbaikan nasib dan keadilan bagi rakyat yang luas.

Ada alasan kuat mengapa penulis mengajukan tuntutan ADILI GENOSIDA 1965, BARU NEGARA HUKUM INDONESIA BISA TEGAK!!

Soalnya, ---- pada setiap saat-saat mendekati 30 September, pelbagai tulisan, dan ucapan serta pernyataan, dikeluarkan yang bisa didengar dan dibaca. Pada masa jayanya Orba, setiap tahun diputar film rekayasa tentang peristiwa G30S, tanpa menyebut-nyebut, apalagi mengungkap apa yang terjadi sesudah itu, --- berbisu-kata mengenai pembunuhan besar-besarn yang didalangi oleh fihak militer di bawah Jendral Suharto.

Mereka memamah biak. Mengulang-ulang kebohongan dan rekayasa Orba.

Ketika itu, -- setelah terlebih dahulu semua pers yang bersuara lain dari suara fihak militer, fihak militer dan persnya memulai penyebaran berita dusta. Mereka berpropaganda bohong secara besar-besaran bahwa, enam jendral dan seorang perwira menengah TNI yang dibunuh itu, sebelumnya amat menderita penganiayaan biadab oleh para anggota Gerwani dan Pemuda Rakyat, organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Kemudian disimpulkan secara sefihak, bahwa semua ini dalangnya adalah PKI. Meluncurlah pengejaran, penangkapan, pemenjaraan, pembuangan dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang PKI, yang dianggap PKI, atau yang dianggap ada di bawah pengaruh PKI, dan penghancuran secara politik dan fisik semua kekuatan politik yang menyokong presiden Sukarno, yang ketika itu formalnya masih Presiden RI. "Pembersihan" besar-besaran dilakukan di kalangan aparat, tentara, polisi, lembaga legeslatif, eksekutif, judisial dan birokrasi pemerintahan termasuk aparat di bidang diplomasi.

Dilancarkanlah kampanye genosida. Bukan genosida terhadap suatu kelompok penduduk atau etnik, tetapi terhadap suatu golongan kekuatan politik tertentu, yaitu kekuatan politik PKI dan semua yang dianggap Kiri dan pendukung Presiden Sukarno. Mengenai adanya genosida politik ini, kiranya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena bukti-buktinya sudah terungkap, saksi-saksinya sudah bermunculan. Diantara para pelaku ada juga sudah mengakuinya sendiri, seperti a.l. oleh almarhum mantan Penglima RPKAD Jendral Sarwo Edhie, mertua dari Presiden Republik Indonesia dewasa ini. Mereka mengaku sendiri. Juga mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pemimpin besar NU, dalam kata-katanya sendiri, mengakui tentang keterlibatan para pemuda Ansor dan unsur-unsur NU dalam pembunuhan tsb. Bagusnya dan keteladanan yang diberikan oleh Dur, ialah, bahwa kecuali mengakui tentang pembunuhan masal tsb dan keterlibatan sebagian dari barisan NU, juga telah dengan terbuka minta maaf.

Dikongkritkannya lagi dengan tuntutan beliau agar TAP MPRS No. XXV Th 1966 dibatalkan, karena TAP tsb merupakan legitimasi dan legalisasi Orba yang melakukan pengejaran dan pembunuhan masal terhadap rakyat yang tidak bersalah yang dilakukan oleh Jendral Suharto dan klik militernya.

Sejalan dengan politik propaganda Orba, pada waktu memperingati 40 th peristiwa tragedi nasional 1965, ada sementara pendapat memusatkan perhatiannya pada G30S yang dikatakannya sebagai suatu usaha perebutan kekuasaan negara dari tangan Presiden Sukarno. Mereka bilang bangsa ini supaya menarik pelajaran dari percobaan kup yang dinyatakan didalangi oleh PKI.

Tetapi, mereka menutup mata serta membisu. Tidak peduli untuk menarik pelajaran dari fakta sejarah yang lebih gamblang dan krusial. Yaitu, bahwa Presiden Sukarno yang mereka katakan di-kup oleh G30S, kenyataannya ialah, - - - adalah Jendral Suharto dan klik militernya, yang memenjarakan Presiden Sukarno, sesudah merebut kekuasaan negara pada hari-hari sesudah terjadinya G30S. Jendral Suharto menuduh G30S dengan PKI di belakangnya hendak merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno, --- tetapi kenyataannya ialah bahwa adalah Jendral Suharto sendiri yang merebut kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Lalu Suharto tahanan rumah, memperlakukan Presiden RI sebagai tahanan politik sampai akhir hidup beliau. Ini semua adalah fakta-fakta yang terdokumentasi, dan terjadi tanpa peroses pengadilan apapun. UUD negara Republik Indonesia, dan semua prinsip-prinsip demokrasi dan HAM telah dilanggar dan diinjak-injak. Mereka-mereka yang menonjolkan tindakan G30S untuk merebut kekuasaan negara itu, ternyata bungkam seribu bahasa, bahwa sesungguhnya Orba sudah "selesai mengadili" perkara G30S dan pelaku-pelakunya, melalui suatu militer Mahmilub <yang direkayasa menjadi-jadinya>. Yang divonis oleh Mahmilub sudah dieksekusi atau dibebaskan sesudah jatuhnya Suharto. Semua pengadilan Mahmilub itu tidak ada bau-baunya keadilan. Karena dilakukan di bawah suasana teror. Tambahan pula Mahmilub adalah suatu pengadilan militer yang samasekali tidak independen.

Nyatanya sekarang ini, meskipun 32 tahun lamanya rezim Orba terus menerus memprogandakan versinya sendiri mengenai G30S dan siapa dalangnya, --- sesudah jatuhnya Suharto ---, semakin banyak bermunculan pelbagai analisis dan versi kesimpulan mengenai G30S dan siapa dalangnya. Tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa sesungguhnya perebutan kekuasaan yang terjadi dalam tahun 1965 itu, adalah perebutan kekuasaan oleh kekuatan militer Jendral Suharto dengan bantuan Barat, CIA dan intelejen Inggris. Masih ada versi lainnya lagi. Mana yang benar dan sesuai dengan kenyataan masih merupakan perdebatan di kalangan masyarakat, masih merupakan bahan penelitian dan studi para sejarawan dan para pakar, dalam dan luar negeri. Kapan bisa diungkap kebenaran yang sesungguhnya mengenai G30S dan siapa dalangnya, masih sulit untuk diprediksi sekarang. Tapi satu hal yang ada di depan mata bangsa dan kita semua, yang dihadapi, ialah, kasus ratusan ribu korban yang sudah jatuh akibat kampanye pembunuhan besar-besaran sesudah G30S.

Mengenai kenyataan sejarah ini siapapun tidak akan mampu membantahnya. Sudah jelas jemelas. Korban-korbannya, termasuk para keluarga mereka,

sampai saat ini masih terus menderita diskriminasi dan stigmatisasi. Keadilan dan rehabilitasi hak-hak kewarganegaraan bagi para korban tragedi 1965, terutama adalah tanggungjawab pemerintah. Tetapi itu juga adalah urusan kita semua sebagai bangsa yang hendak menegakkan negara hukum Republik Indonesia. Para korban tragedi 1965 ini samasekali tidak bersalah. Mereka adalah korban suatu genosida politik, korban pelanggaran HAM yang terbesar di Indonesia.

Dalam rangka memperingati 40th tragedi 1965, dalam usaha ikut memberikan iuran pada usaha menegakkan HAM di Indonesia, Dr. LAMBERT J. GIEBELS (lahir 1935), telah menulis dan menerbitkan sebuah buku dalam bahasa Belanda ber di Jakarta berjudul "Pembantaian Yang Ditutup-tutupi". Dr Lambert J.Giebels adalah seorang politicoloog, juris dan mantan anggota Parlemen Belanda <1973-1977> dari Partai Buruh Belanda. Ia terkenal sebagai historikus dan penulis, yang telah menerbitkan dua jilid buku biografi Bung Karno. Pada tanggal 1 Oktober 2005 y.l. beliau menulis sebuah artikel di 'de Volkskrant', berjudul INDONESIA HARUS MENGAKUI PEMBUNUHAN. Ditulisnya a.l. sbb: "Meskipun desakan para keluarga korban, sampai dewasa ini tidak ada dilakukan penyelidikan resmi terhadap tragedi yang paling besar dalam sejarah Indonesia. Selama rezim Suharto yang panjang itu penelitian serupa itu tidak bisa dibayangkan bisa terjadi, karena dia sendiri (Suharto) adalah penanggungjawab utama pertumpahan darah itu". Penulis bisa dengan lega mengatakan bahwa Lambert J.Giebels adalah seorang sahabat Indonesia.

Seorang sarjana Indonesianis berbangsa Australia, Dr Robert Crib, dalam tulisannya THE INDONESIAN MASSACRE, mengajukan pertanyaan:

Siapakah yang melakukan genosida di Indonesia? Pertanyaan itu dijawabnya sendiri. Pembunuhan tsb dilakukan oleh kesatuan-kesatuan tentara dan para hansip yang anti-komunis. Ini cocok dengan keterangan Jendral TNI Sarwo Edhi alamrhum.

Apakah masih perlu dipertanyakan lagi, bahwa sudah tiba waktunya bagi pemerintah dan setiap putera Indonesia yang merasa berdiri difihak keadilan, yang selama ini berbungkam-kata mengenai genosida 1965 itu, untuk mengambil langkah nyata mengungkap kebenaran, menegakkan keadilan terutama bagi para korban dan keluarga mereka. Jangan lupakan ini:

Selama keadilan belum ditegakkan oleh pemerintah, selama korban-korban tragedi 1965 dan keluarganya yang berjumlah lebih duapuluh juta itu, belum direhabilitasi hak-hak politiknya, selama itu pula usaha untuk menegakkan NEGARA HUKUM INDONESIA, akan selalu kandas. Adili genosida 1965, baru negara hukum Indonesia bisa tegak! \*\*\*

Kolom ISA

-----  
Jum'at, 21 Oktober 2005.

"TRAGEDI 1965" adalah "TRAGEDI NASION" adalah "TRAGEDI KEMANUSIAAN" \*



Mengikuti kegiatan politik bulan Oktober ini, <di Indonesia dan di luar negeri>, sehubungan dengan peringatan "40th Tragedi 1965", <-- harap catat: peristiwa ini oleh sejarawan Belanda, Prof Dr Lambert Giebels, dalam bukunya yang sudah terbit di Belanda untuk memperingati '40th Tragedi 1965' dan segera terbit di Jakarta, disebutnya sebagai suatu "Stille Genocide", dalam edisi Indonesia "Pembunuhan Yang Disembunyikan">

Menelaah keadaan mental dan kesadaran bangsa kita dewasa ini, tampak adanya defek serius dalam 'mengartikan', atau memberikan 'analisis', mengenai apa yang terjadi pada hari-hari bulan Oktober tahun 1965. Dalam menelaah, mempersoalkan dan menganalisis peristiwa tsb, terdapat kekacauan, karena mencampur-adukkan dua hal yang berkaitan, akan tetapi, secara hakiki kedua kejadian itu samasekali berbeda.

Apa yang terjadi pas pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965, yaitu aksi-militer G30S, dengan saat sesudah G30S digagalkan, kemudian sesudah itu dalam - panjang s e s u d a h tsb, yaitu masa pasca-G30S, satu sama lain mengandung isi dan makna yang berbeda. Perbedaan hakiki terletak dalam hal sbb: Yang satu adalah suatu kekerasan militer yang dilakukan oleh kalangan militer tertentu yang melakukan konspirasi (G30S); dan yang satunya yang terjadi berikutnya, yaitu suatu "kontra-kup", yang dilakukan oleh sekelompok militer (Jendral Suharto c.s.) yang memegang kekuasaan riil di Jakarta, berjajaran, atau bahkan mengungguli kekuasaan pemerintahan Presiden Sukarno.

Secara amat berat-sebelah dan dengan tujuan tertentu, rezim Orba memfokuskan pada apa yang terjadi pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 beberapa jam ketika Gerakan 30 September sedang unggul.

Yang pertama adalah suatu konspirasi sekelompok militer (G30S) yang gagal, yang satunya adalah suatu kontrakup kelompok militer Jendral Suharto (Kostrad cs.) yang berhasil merebut kekuasaan dari tangan Presiden Sukarno. Lalu meluncurkan suatu kampanye pembunuhan masal terhadap PKI dan golongan Kiri lainnya.

Kekuasaan Orba secara terencana mempersentasikan kasus dan masalah tsb, melakukan penulisan 'fakta sejarah', mempropagandakan peristiwa 1965 sebagai suatu usaha kup oleh Gerakan 30 September, dengan PKI sebagai dalangnya. Rezim Orba dengan sengaja menyebarluaskan kebohongan yang paling besar dan paling kasar mengenai apa yang dinamakan 'kekejaman' dan 'kebiadaban' anggota-anggota Gerwani, yang katanya ada di Lubang Buaya waktu itu. Anggota-anggota Gerwani itu dituduh dan difitnah melakukan penyiksaan biadab terhadap para jendral sebelum dibunuh. Kampanye kebohongan dan fitnah tsb kemudian menjadi jelas tujuannya.

Dimaksudkan sebagai legitimitas, sebagai pembenaran atas kampanye pembunuhan masal yang mereka lancarkan sejak itu. menurut laporan tim dokter forensik resmi dari pemerintah, bahwa pada jenazah-jenazah yang dibunuh di Lubang Buaya itu samasekali tidak terdapat sedikitpun tanda-tanda penganiayaan, namun, Orba sengaja bungkam, samasekali tidak meralat kebohongan

yang mereka sebarkan mengenai apa yang mereka bilang sebagai 'penganiayaan dan kebiadaban' anggota-anggota Gerwani terhadap para jendral.

Rezim Orde Baru Presiden Suharto, dan seluruh pendukungnya, terutama elitnya, politisi, cendekiawan, peneliti, pakar dan persnya, SEPENUNYA TUTUP MULUT RAPAT-RAPAT dan TIDAK MENYEBUT-NYEBUT APAPUN, tentang ratusan ribu korban yang telah jatuh sebagai akibat dari kampanye pembunuhan massal yang mereka rencanakan dan lakukan sendiri dengan bekordinasi dengan kekuatan konservatif dalam negeri. Untuk memulas opini umum mancanegara yang kemudian tahu tentang adanya pembantaian tsb, rezim Orba menyatakan bahwa pembantaian masal itu, adalah suatu "konflik horizontal", suatu kekerasan yang terjadi di kalangan kekuatan politik di didalam masyarakat. Mereka menutupi fakta bahwa yang terjadi itu adalah suatu konflik vertikal. Juga mereka tidak bicara bahwa kulminasi dari kampanye teror ini adalah terlikwidasinya secara fisik dan politik semua kekuatan pendukung Presiden Sukarno, khususnya PKI dan semua kekuatan politik lainnya yang dianggap sekutu, bersekutu atau bekerja sama dengan PKI ketika itu. Yang terjadi adalah suatu GENOSIDA POLITIK.

Suatu ironi adalah, bahwa: Hampir seluruh elite, para politisi, pakar peneliti, komentator dan media umumnya, ketika belakangan ini, --- lebih-lebih setelah Suharto tumbang --, akhirnya tokh m e n y i n g u n g , bicara juga, mengenai 'pembunuhan masal' yang meliputi lebih dari sejuta manusia Indonesia yang tak bersalah, penyiksaan, penghilangan', pemenjaraan, pembuangan serta perlakuan diskriminasi dan stigmatisasi terhadap para eks tapol beserta keluarganya <meliputi kira-kira 20 juta warganegara tak bersalah> yang berlangsung terus sampai detik ini -- namun, menyebutnya sebagai suatu 'm u s i b a h'.

Dengan demikian sekaligus memburengkan, mengkisruhkan SIAPA PELAKU dan SIAPA KORBAN kejahatan genosida itu. Peristiwa mengerikan dan berdarah itu, disesalkan sebagai suatu 'noda' dalam kehidupan bangsa kita, diungkapkan dengan nada menyayangkan sampai terjadinya 'musibah' tsb. Tetapi tidak lupa lalu menimpakan kesalahan dan tanggungjawabnya pada para korban, termasuk pada mantan Presiden Sukarno yang mereka gulingkan. Yang lebih gawat lagi ialah, selain mengkaburkan antara pelaku dan korban, para pelaku dan pendukungnya, TIDAK MENYADARI BAHWA SOAL TSB ADALAH SUATU PELANGGARAN BERSKALA TERBESAR TERHADAP H.A.M. Suatu tindakan sewenang-wenang di luar hukum dan peradilan, dilakukan oleh penguasa ketika itu, yaitu fihak militer dan selanjutnya oleh rezim Orba yang ditegakkan diatas kekerasan senjata. Mereka tidak melihatnya sebagai suatu tindakan penguasa ketika itu, yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan pengadilan bangsa, terhadap tata-krama kehidupan masyarakat internasional.

\* \* \*

Peringatan 40th tragedi nasional yang diadakan di Diemen, adalah dalam situasi seperti itu. Yaitu dalam situasi dimana bangsa kita secara keseluruhan masih belum sampai kepada kesadaran, bahwa tragedi 1965 itu adalah suatu tragedi bangsa, tragedi nasion, suatu tragedi kemanusiaan yang terjadi di tanah air sendiri.

Pada hari itu -- siapa yang menjadi dalang S -- tidak menjadi fokus diskusi, karena semua sadar bahwa mengenai hal itu terdapat pelbagai varian kesimpulan dan analisis. Yang semuanya itu untuk diterima sebagai kenyataan yang benar, masih memerlukan data-data otentik, bukti dan kesaksian. Masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

Seorang sahabat asing pernah memberikan saran. Katanya: Kalau hendak menemukan dan meneliti data, dokumen dan lain-lain bahan yang bersangkutan dengan peristiwa 1965, pergilah a.l. ke Cilangkap, Mabes TNI. Di situ ada dokumentasi otentik mengenai keadaan sekitar G30S dan kelanjutannya. Sesudah 25 tahun berlalu, mestinya tak ada rintangan untuk mengaksesnya, katanya. Mengakses dokumentasi CIA yang classified, itupun bisa, kalau kejadiannya sudah berlalu puluhan tahun. Kalau ulet dan lihay, punya hubungan sana-sini dan ke atas tentunya, akan bisa mengakses ke dokumentasi AD-TNI tsb. Teman tsb tidak sekadar ngomong, tetapi memang pernah mengakses dokumentasi Cilangkap tsb.

Tokh, pada diskusi peringatan Sabtu 15 Oktober di Diemen itu, tak bisa disangkal bahwa terdapat pemahaman dan penilaian umum, bahwa, pembantaian massal 1965-66 dst adalah hasil kerjanya suatu komplotan reaksioner dalam negeri bantuan dan kordinasi dengan nekolim, CIA, intelejen Inggris, dll, -- Tujuan terakhir adalah menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno. Yang, untuk itu terlebih dulu harus menghancurkan kekuatan militer dan politik pendukung Presiden Sukarno. politik yang terbesar dan kuat tsb adalah , kekuatan Kiri dan patriot lainnya. Tujuan ultim mereka adalah:

Menegakkan suatu rezim militer fasis, yang berorientasi patuh kepada Barat sesuai dengan kepentingan mereka dalam era perang dingin waktu itu. Strategi global Perang Dingin kubu Kapitalisme versus kubu Sosialisme ini tidak saja ditrapkan di Indonesia, tetapi juga di negeri-negeri lainnya di dunia ini. Seperti yang terjadi kemudian di Chilli, dsb.

Ada seorang sahabat bertanya, mengapa kali ini sesudah 40 tahun terjadinya pembantaian masal di Indonesia, -- - suatu peristiwa yang sudah berlalu begitu lama--- , kok masih diperingati, bahkan diperingati secara lebih besar dan lebih meluas terbanding tahun-tahun yang lalu. Untuk diketahui, memang, tahun ini peringatan tragedi 1965 berlangsung cukup meluas di Eropah, kecuali yang diadakan di Indonesia tentunya.

Di Eropah misalnya, kecuali yang dilangsungkan di Diemen, juga berlangsung di Achen, Jerman (Minggu 16 Okt.); lalu akan diadakan - Internationaal Instituut voor Sociaal Geschiedenis , di Amsterdam (28 Oktober 2005); kemudian akan diadakan juga di Universitas Leiden, 5 Nov 2005; di Amsterdam lagi pada tanggal 18 Des 2005, oleh sebuah panitia internasional termasuk organisasi-organisasi Indonesia seperti Lembaga Pembela Korban 1965, Nederland.

Kiranya tidaklah sulit untuk menyaksikan sendiri. satu segi dalam waktu panjang mengenai tragedi 1965, tidak sedikit dari korban dan yang bukan korban, diliputi oleh suasana 'trauma', was-was dan khawatir. Berhubung, selama periode Orba, seperti dikatakan oleh Hilmar Farid, dalam uraiannya pada pertemuan tsb, tidak

bisa dibayangkan orang bisa bicara terbuka mengenai versi lain tentang G30S selain versi yang direkayasa oleh Orba. Versi propaganda Orba mengenai peristiwa 65, semata-mata difokuskan pada pembunuhan 6 jendral dan seorang perwira menengah TNI, kebohongan mengenai kekejaman para anggota Gerwani yang dikatakan melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap para jendral sebelum mereka dibunuh.

Sekarang ini, sebagai hasil dari perjuangan yang berkolmunasi dalam gerakan reformasi, dan Suharto teguling (Mei 1998), --- hak-hak demokratis seperti kebebasan bicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi dan mengadakan aksi telah menjadi kenyataan, maka orang mulai berani bicara, berani menulis dan mengungkapkan hal-hal sekitar G30S dan apa yang terjadi setelah itu -- pembantaian masal, penghancuran PKI secara fisik dan politik, mengenai digulingkannya Presiden Sukarno dan naiknya Jendral Suharto menjadi presiden.

Namun, mengenai masalah isi dan hakikat pembantaian masal yang terjadi dalam tahun-tahun 1965-66-67, suatu pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah Indonesia pasca G30S; mengenai hal itu, masih belum ada pemahaman yang sama dan menyeluruh di kalangan bangsa kita. Nasion ini masih belum mencapai kesadaran bahwa hal itu bukan semata-mata merupakan 'cacad' atau 'musibah' bangsa yang disesalkan. Masih banyak yang berfikir, agar peristiwa tsb jangan diungkit-ungkit lagi, bahkan katanya harus dimaafkan dan dilupakan, dalam semangat rekonsiliasi.

Dengan sendirinya ketiadaan pengertian bahwa tragedi nasional itu adalah suatu genosida politik, suatu pelanggaran HAM terbesar yang harus diurus dan diungkap kebenaran serta keadilan mengenai hal tsb, itu adalah mutlak perlu untuk terciptanya syarat terpenting, bagi dibangunnya kesadaran bernegara hukum. Kesadaran menghormati HAM, berani mencari dan membela kebenaran dan keadilan. Tak diragukan, kesadaran itu merupakan syarat untuk suksesnya rencana bangsa untuk menegakkan kebenaran dalam sejarah bangsa ini, dan mencapai rekonsiliasi persatuan nasional yang bukan semu, yang sesungguhnya, yang meliputi seluruh lapisan masyarakat, meliputi seluruh bangsa, apapun keyakinan religi dan politiknya.

Masih banyak yang harus dikerjakan oleh kaum demokrat, pencinta bangsa, untuk tercapainya suatu pengertian pada bangsa ini, bahwa kebenaran dan keadilan itu harus diusahakan dengan bersusah-payah harus diperjuangkan dalam waktu yang panjang. \* \* \*

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

From: Lin Hsin Hui

To: HKSIS

Sent: Tuesday, October 25, 2005 1:12 PM

Subject: Re: Kolom IBRAHIM ISA -- "TRAGEDI 1965" adalah "TRAGEDI NASION" adalah "TRAGEDI KEMANUSIAAN"

## Tragedi Nasional 1965 - Kolom IBRAHIM ISA - HKSIS 10-24-05

Selagi korban Tragedi 1965 - yaitu tapol yang lolos dari penbantaian dan sanak sekeluarga mereka yang ikut menderita masih hidup, apakah sudah ada usaha untuk mengumpulkan pengalaman mereka ditangan Orba Suharto, apakah sudah ada usaha untuk menyusun data sensus berapa banyak jumlah korban yang jatuh ditangan orba - sampai sekarang, saya rasa, belum ada record yang mencatat jumlah korban yang sebenarnya, setidaknya jumlah yang mendekati . Data sensus jumlah korban jiwa dan pengalaman para tawanan tapol dan sanak keluarga mereka penting dikumpulkan, walaupun dalam bentuk essays, dibukukan dan didokumentasikan. Bahan yang terdokumentasikan ini akan menjadi warisan nasional yang bernilai sekali bagi generasi sekarang dan yang akan datang, - berharga dalam penyelidikan dan memahami rezime Orba Suharto dan teror masal mereka yang dimulai dengan Tragedi 1965. Bahan2 ter-dokumentasikan ini akan juga sangat berguna sekali bagi pengungkapan peranan negara2 barat dan dinas rahasia mereka. Apa yang ter-dokumentasikan adalah bagian dari sejarah Indonesia modern yang tidak boleh dihilangkan.

Di Chili, Amerika Selatan, rakyat dan para partai politik mendonkel masa rezime Pinochet dan kini walaupun dalam keadaan sakit dan sangat lemah secara physik, Pinochet tidak terlepas dari tuntutan atas suppressi berdarah zaman nya dan ia juga diminta pertanggung jawaban terhadap puluhan ribu warga Chili yang hilang tanpa bekas dizaman kekuasaan Pinochet. Suharto mujur sekali, ia tidak usah ditarik kedepan pengadilan.

Di Kampucha, didirikan museum nasional untuk meng-ingatkan penbantaian masal ( killing field ) zamam rezim Pol Pot dan ini adalah sangat educative bagi generasi muda, juga bagi dunia international. Para pimpinan rezime Pol Pot tidak terloloskan dari tanggung jawab atas peranan mereka dalam melakukan pembantaian masal - killing fields - dan kini harus menghadap pengadilan international dengan tuduhan melakukan "Kejahatan Terhadap Umat Manusia".

Suatu kenyataan Tragedi 1965 Indonesia tidaklah menarik banyak perhatian dunia international seperti killing field di kampucha. Kenapa?

Negara2 barat tertentu mendukung penuh rezim Suharto dan hingga sekarang masih menutupi adanya killing fields di Indonesia oleh rezim Suharto. Kenapa?

Di Kampucha yang melakukan pembunuhan masal adalah rezim komunis, karenanya Amerika dan negera2 barat tertentu dengan achli2 sejarah mereka berboyong menyoroti dan menonjolkan Killing Fields Pol Pot demi "Pelindungan Umat Kemanusiaan dan Hak2 Kemanusiaan terhadap Genocide Umat Manusia".

Demikian juga pimpinan negara2 Balkan, Rwanda dan beberapa negara Africa yang tersangkut dengan pembunuhan masal telah ditarik kedepan pengadilan Internasional di Den Haag, Holland.

Kenapa Indonesia sengaja tidak banyak di soroti oleh Amerika, Inggris dan negara2 Barat walaupun di Indonesia ratusan ribu atau jutaan telah dibabat, dikubur hidup2 tanpa diadili, dan ratusan ribu dijebloskan dalam kamp konsentrasi dan kehilangan

hak2ny sebagai warga Indonesia, sebagai manusia, - dan selalu di ditindas, dihina, di-persekusi walaupun sudah dikeluarkan dari kamp konsentrasi Suharto dan sampai hari ini tidak ada rehabilitasi terhadap mereka.

Bagi negara2 barat tersebut diatas yang terpenting bagi mereka ialah: - tercapainya pembasmian golongan nasionalist Sukarno dan golongan kiri, apakah PKI atau organisasi lain yang berhaluan nasionalist atau progresif - dan digagalkannya proses Domino di Asia Tenggara. Dalam soal Indonesia tidak ada masalah " kejahatan terhadap umat manusia! "

Pengumpulan data dan penyusunan catatan pengalaman harus dimulai selagi para korban tapol dan sanak keluarganya masih ada - ini adalah pangalaman benar, nyata yang mereka lihat dan alami - kalau tidak dimulai , maka semua bahan ini akan hanya jadi cerita yang akan hilang dengan berlalunya waktu dan generasi yang mendatang tidak tahu atau memahami apa itu Tragedi 1965 dan siapa Suharto dan orba-nya dan tentang adanya Killing Fields Indonesia dizaman rezime Suharto.

Masalah siapa yang memulai dan sebab2nya ( sebab - akibat ) terjadi Tragedi 1965, in adalah masalah akademis yang akan makan waktu panjang untuk dipelajari, diselidiki dan di perbincangan secara mendalam sebelum bisa sampai kesepakatan secara nasional - tetapi bahan data dan pengalaman para korban tapol dan keluarganya ada dan nyata - inilah yang sekarang harus di-keduk, dikumpulkan, di bukukan dalam bentuk essays atau di- dokumentasikan - jangan tunggu sampai hilang, sudah menjadi kabur, hilang termakan waktu dan dengan ini hanjutlah suatu periode yang penting dalam sejarah nasional.

Lin

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

IBRAHIM ISA dari BIJLMER:

-----

Rabu, 26 Oktober 2005.

I.I.S.G. - "1965: The Forgotten Holocaust of Indonesia"

<"1965: Holokos Indonesia yang Dilupakan">

Seperti penamaan yang digunakan oleh IISG - Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, 1019 AT Amsterdam -- dalam kesempatan penulisan ini, juga hendak digunakan kata "masaker", sebagai penamaan atas peristiwa pembunuhan besar-besaran yang terjadi terhadap lebih dari setengah juta rakyat Indonesia yang tak bersalah, yang terjadi pada periode pasca G30S, di saat AD yang dikepalai oleh Jendral Suharto praktis sudah memegang kekuasaan di pusat. Sedangkan posisi Presiden Sukarno semata-mata formal sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Dr Lambert Giebels yang dalam kesempatan ultah ke-40 terjadinya PERISTIWA 1965 menulis dalam bukunya "DE STILLE GÉNOCIDE", menggunakan kata GENOSIDA. Memang dalam Genosida di Indonesia ketika itu, terjadi masaker, atau pembunuhan-pembunuhan masal.

Dalam lampiran yang dikirimkan menyertai undangan IISG, terdapat bahan berjudul "1965: THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA", terjemahan bebasnya, "1965: Holokos Indonesia Yang Terlupakan". Apa arti "holokos"? Barangkali tidak banyak orang yang tahu persis apa artinya. Penulis sendiri baru kali ini menjadi lebih jelas tentang arti kata 'holokos' itu. Untuk menyatukan pengertian, baik juga kiranya membuka The New Encyclopaedia Britannica, Volume 6, Micropedia, 15th edition, 1987. Memang benar, asal kata HOLOCAUST - itu berasal dari kata Hebrew, yaitu kata "Sho'ah" atau "Hurban" (artinya persekusi), at least begitu menurut Britannica. Menurut "Google Dotcom", kata - "holocaust" -, itu menyangkut peristiwa yang terjadi selama 12 tahun (1933-45) persekusi Nazi terhadap orang-orang Yahudi. "Google" mengutip kata-kata Heinrich Himmler, salah seorang tokoh pimpinan Nazi, yang mengatakan sbb: "Bangsa Yahudi dimusnahkan, jelas sekali, hal itu merupakan bagian dari rencana kami, kami sedang memusnahkan orang-orang Yahudi, menghancurkan mereka, itu soal kecil".

Kiranya begitulah fikiran para pemimpin Orba ketika mereka mengadakan pembunuhan-pembunuhan masal pada tahun-tahun 1965-66-67 dst.: Menghancurkan mereka, itu soal kecil". Fikiran Himmler seperti itu adalah bagaimana memusnahkan bangsa Yahudi, --- sedangkan fikiran dan tujuan Orba bagaimana dalam tahun 1965 dst ialah menghancurkan dan memusnahkan PKI, yang dianggap PKI, golongan Kiri dan patriotik lainnya pendukung Presiden Sukarno.

Bisa juga kata "holokos" berasal dari kata Junani, "HOL", yang berarti "keseluruhan". Tulisan ini bukan dimaksudkan mau bertele-tele atau ngelantur di sekitaran kata "holokus". Sekadar mengusahakan adanya s a t u pengertian mengenai kata "holokus" yang ditulis oleh IISG itu. Kiranya yang dimaksudkan dengan kata "HOLOCAUST" itu adalah "pemusnahan suatu bangsa", atau "suatu golongan keyakinan tertentu". Dalam hal peristiwa 1965, jelas yang dimusnahkan adalah golongan politik PKI, dianggap PKI atau golongan Kiri patriotik lainnya yang semuanya itu adalah pendukung Presiden Sukarno.

Pantas kiranya digaris-bawahi apa yang dikemukakan dalam bahan IISG "1965: THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA", a.l. :

"In the official history of the Suharto regime, the killings and severe repression of millions of Indonesian citizens, were non-events. No mention was made of the central role of the Indonesian military in orchestrating the killings. In fact in several places like Bali, the killings might have not happened, if the military had not sent the special troops to the island to carry out the anti-communist campaign. The evidences are abundant that the military not only carried out the killings themselves, but also mobilized anti-communist youth groups to participate". Diterjemahkan bebas, kira-kira sbb:

"Dalam sejarah resmi rezim Suharto, peristiwa pembunuhan-pembunuhan dan represi luar biasa terhadap jutaan warganegara Indonesia, tidak punya tempat. Samasekali tidak disebut tentang peranan sentral militer Indonesia dalam mengatur pembunuhan-pembunuhan tsb. Sesungguhnya di pelbagai tempat seperti Bali, pembunuhan-pembunuhan tak akan terjadi, bila fihak militer tidak mengirimkan pasukan-pasukan istimewa ke pulau tsb untuk melaksanakan kampanye anti-komunis. Bukti-bukti banyak sekali bahwa fihak militer tidak saja mereka sendiri

melakukan pembunuhan-pembunuhan tsb, tetapi juga memobilisasi grup-grup pemuda anti-komunis untuk ambil bagian (dalam pembunuhan-pembunuhan tsb)".

Tulisan ini punya tujuan untuk menyampaikan berita dari IISG, bahwa: Lusa, yaitu pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2005, bertempat di kantornya, IISG akan menyelenggarakan PERINGATAN MASAKER 1965. Peringatan dimulai jam 09.00 pagi dan berakhir pada jam -17.00. Antara lain dipertunjukkan film "Kuburan masal" dan "Penjara Perempuan Plantungan". Juga tampil kesaksian anak korban dan salah seorang survivor. Sedangkan dalam seminar, dibicarakan hubungan antara masaker 1965 di Indonesia dengan keterlibatan Belanda. Dibicarakan juga tema "Empatpuluh tahun sesudah 1965: Mencari Keadilan dan bagaimana selanjutnya". Mengenai keterlibatan pemerintah dan kalangan yang berkuasa Belanda dengan masaker 1965, tentu akan menjadi perhatian khusus. Apalagi salah seorang pembicara mengenai tema ini, lusa itu, adalah Ny. Martha Meijer, mantan Ketua Amnesty International Afd. Nederland, mantan Ketua INDOC dan sekarang ini sebagai salah seorang tokoh Humanistisch Overleg Mensenrechten - Amsterdam. Dr. Lambert Giebels dalam bukunya baru-baru ini: "DE STILLE GÉNOCIDE", juga menulis tentang keterlibatan dan sikap para pemimpin Katolik Indonesia asal Belanda, dan sikap Mgr M. Müskens di Belanda, yang membela sikap para pendeta Katolik di Indonesia terhadap peristiwa 1965, dukungan mereka terhadap Orba dan sikap mereka yang berbalik terhadap Presiden Sukarno.

Seminar lusa itu akan bicara mengenai keterlibatan pemerintah Belanda. Yaitu sikap mereka dalam menyokong Jendral Suharto dan Orbanya, dengan bantuan finansial, ekonomi dan lain-ainnya. Masih segar dalam ingatan bahwa konsorsium internasional yang bertahun-tahun lamanya memberikan bantuan bermilyar-milyar dolar AS kepada rezim Orba, yaitu IGGI, diketuai oleh Belanda. IGGI biasa mengadakan sidang-sidangnya di negeri Belanda. Jelas keterlibatan dan tanggung-jawab kalangan yang berkuasa Belanda dengan didirikannya dan terkonsolidasinya rezim Orba.

Kita mengharapkan kelancaran dan SUKSES bagi pertemuan peringatan 1965 lusa tanggal 28 Desember 2005, yang menampilkan tema: "1965 HOLOKOS INDONESIA yang DILUPAKAN". Lusa itu akan mendiskusikan a.l. -- gerakan setiakawan di Belanda yang mempersoalkan dan memprotes sokongan pemerintahnya terhadap rezim Suharto bertahun-tahun lamanya. Pertemuan/seminar ini juga menyatukan diri pada seruan agar para pelaku kejahatan biadab tsb diadili.

Kepada IISG, kepada para sahabat Indonesia yang aktif di lembaga ilmu Belanda itu, mari kita sampaikan: Banyak terima kasih atas sumbangannya dalam usaha mendokumentasikan serta mensosialisasikan kegiatan dan perjuangan di Indonesia dan di mancanegara untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di sekitar MASAKER 1965 di Indonesia.

\* \* \* \* \*



\*IBRAHIM ISA dari BIJLMER

-----  
27 Oktober 2005.

Masih Tentang SEMINAR '65 di I.I.S.G, --

Besok Hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2005\*

Ya, "Peringatan Masaker 1965", dengan tema: "THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA", itu akan dilangsungkan besok pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 2005, di gedung IISG, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, 1019 AT, Amsterdam. Dimulai jam 09.00 pagi dan berakhir jam 17.00

Dalam kolom "IBRAHIM ISA dari BIJLMER" kemarin, 26 Okt 05, terdapat kesalahan mengenai tanggal berlangsungnya hari peringatan tsb. Kemarin itu ditulis tanggal 28 Desember 2005, sebagai tanggal dilangsungkannya hari peringatan. Itu salah dalam menuliskan bulan dan tahun. Seorang teman baik penulis khusus menilpun tadi malam untuk memberitahukan kekeliruan tsb. Terima kasih kepada teman baik itu. Dengan ini kesalahan kemarin itu telah dikoreksi adanya.

Selanjutnya, -- perlu dikemukakan juga bahwa yang hadir besok itu, adalah yang dikirim undangan oleh IISG. Ini semata-mata karena keterbatasan ruangan pertemuan, demikian keterangan Panitya. Makanya disampaikan di dalam undangan tsb bahwa yang ingin hadir sesuai undangan, diminta untuk memberitahunya kepada panitya. Juga baik diketahui bahwa bahasa pengantar dalam seminar besok itu, adalah bahasa Inggris. ang teknis-teknis seperti itu perlu diketahui.

Yang masih ingin dikemukakan di sini ialah arti penting sub-tema yang dikemukakan di dalam bahan seminar, yaitu subtema berjudul-- "40 Years after 1965: In Search of Justice and How To Move On". Ini masalah penting, yaitu MENCARI KEADILAN DAN BAGAIMANA SELANJUTNYA. Bagaimana selanjutnya perjuangan untuk keadilan di Indonesia dan solidaritasnya negeri-negeri lainnya.

Mencari keadilan, sesudah 40 tahun terjadinya pelanggaran HAM terbesar di Indonesia adalah suatu usaha dan kegiatan yang mulia. Lebih-lebih rezim Orba yang menjadi pelaku pelanggaran tsb, meskipun sudah tumbang, tetapi pengaruhnya di kalangan birokrasi, aparat kekerasan negara dan lembaga pengadilan, serta di bidang-bidang lainnya, masih besar. Ada yang mengatakan bahkan masih utuh. Celaknya mereka itu berselubung semboyan reformasi, demokrasi dan bahkan HAM.

Untuk menegakkan kebenaran dan keadilan adalah suatu perjuangan besar. Maka perjuangan itu tidak mudah dan ternyata masih meminta pengorbanan dari para penggiat dan pejuangnya. Antara lain dibunuhnya aktivis HAM terkenal Munir. Pembunuhan terhadap Munir, adalah suatu peristiwa yang mencanangkan semua aktivis, penggiat dan pejuang HAM dan demokrasi, bahwa perjuangan mencari keadilan, kebenaran dan menegakkan hukum di Indonesia, itu penuh kendala dan sabotase, ancaman dan intimidasi dari fihak-fihak yang tidak menghendaki keadilan dan hukum ditegakkan di Indonesia.

Dalam hal ini teristimewa penting untuk waspada jangan sampai terkecoh, teralihkan atau terperdaya oleh kegiatan-kegiatan yang selalu berusaha merintangi dan menggagalkan usaha mencari keadilan dan kebenaran sekitar Masaker 1965, dengan menampilkan apa yang dikatakan "BAHAYA HIDUPNYA KEMBALI PKI, atau BAHAYA LATEN KOMUNIS". Semua itu tidak lain adalah taktik belaka, adalah manuver yang selalu digunakan oleh rezim Orba, untuk menakut-nakuti siapa saja yang hendak mencari kebenaran dan keadilan. Dengan menggunakan "senjata klasik", yaitu dengan menampilkan "MOMOK KOMUNIS", mereka punya sedikitnya dua tujuan.

Satu tujuan ialah, mencap, memfitnah dan menuduh kegiatan dan gerakan untuk mencari keadilan di- sekitar peristiwa MASAKER 1965, untuk menegakkan hukum, untuk memberlakukan HAM, sebagai suatu usaha dan kegiatan golongan Kiri, sebagai selubung gerakan komunis yang baru. Maksudnya ialah untuk mengisolasi gerakan dan kegiatan mencari kebenaran dan keadilan. Dengan demikian hendak mempertahankan Indonesia dalam suasana bebas hukum, hidup di bawah kultur "impunity", seperti yang berlaku selama periode rezim Orba. Jelas kiranya bahwa itu adalah politik Orba.

Tujuan lainnya ialah, untuk memecah belah, menimbulkan suasana saling mencurigai di kalangan penggiat dan pejuang demokrasi dan HAM. Dengan demikian membuyarkan gerakan untuk demokrasi dan HAM.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa, untuk a.l. menjawab masalah, bagaimana selanjutnya, --- perlu pertama-tama mengatasi cara-cara yang dipakai oleh rezim Orba, untuk mematahkan perjuangan HAM dengan menampilkan "MOMOK KIRI, MOMOK KOMUNIS". Ini berarti bahwa bila benar-benar hendak memperjuangkan kebenaran dan keadilan di sekitar peristiwa Masaker 1965, bila benar-benar hendak memperjuangkan HAM dan tegaknya demokrasi dan hukum di Indonesia, maka harus membebaskan diri dari fikiran KIRI PHOBI, KOMUNISTO PHOBI. Suatu fikiran yang absurd, karena sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa yang menjadi korban Masaker 1965, kebanyakan justru adalah orang-orang Komunis, orang-orang Kiri, atau yang dianggap begitu.

Bahwa dalam perjuangan untuk mencari keadilan, menegakkan hukum, memberlakukan HAM dan mengakhiri kultur "bebas hukum" di Indonesia, semua kekuatan sosial masyarakat yang berkepedulian dengan demokrasi dan HAM, dengan tegaknya demokrasi di negeri ini, harus berjuang bersama-sama, bergandengan tangan dalam perjuangan, bahu-membahu, saling bantu dan menghidupkan semangat solidaritas yang kuat. Kekuatan itu meliputi kekuatan sosial-politik baik yang beraliran atau berkecenderungan Tengah, Kiri maupun Kanan.

Asal saja berkepedulian untuk tegaknya HAM di Indonesia, asal saja hendak mencapai hasil yang diharapkan mencari kebenaran sekitar peristiwa MASAKER 1965, maka kiranya jalannya adalah melakukan kegiatan dengan prinsip saling-bantu dan saling- solider. \*\*\*

\*\*\*\*\*

\*IBRAHIM ISA dari BIJLMER\*

\*-----\*

\*31 Oktober 2005.\*

\*"1965-The Forgotten Holocaust of Indonesia" -\*

\*<Seminar Sehari, 28 Okt'05 di Gedung IISG, >\*

\*< 2 >\*

\*Tanggapan Djoko Sri Moeljono sekitar penggunaan nama "HOLOKOS", atau . . .\*

Dalam diskusi di IISG pada tanggal 28 Oktober itu: Paling tidak ada \*tiga masalah\* yang menjadi perhatian peserta seminar:

Pertama: Apa sebabnya sampai saat ini mantan Presiden SUHARTO MASIH BELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN?

Kedua: Ternyata ada keterlibatan sementara psikolog Belanda dalam Tragedi 1965, yaitu mengadakan kerjasama dengan KOPKAMTIB.

Ketiga, bagaimana selanjutnya dengan masalah "1965, HOLOKOS INDONESIA yang DILUPAKAN. Apa yang harus dikerjakan? Kita akan bicarakan sedikit kemudian.

\* \* \*

Pagi ini, penulis membaca tanggapan dari Djoko Sri Moeljono, <-- seorang korban peristiwa 1965. Ia ditangkap sejak 1965, lalu dibuang ke pulau Buru sampai tahun 1978. Djoko Sri Moeljono adalah insinjur tamatan Institut Baja dan Alloy, Moskow --->, terhadap diskusi yang terjadi pada Seminar Sehari di IISG pada tanggal 28 Oktober y.l. Yang diperdebatkan adalah mengenai kata apa yang paling sesuai dipakai, untuk menggambarkan pembantaian masal, pelanggaran HAM terbesar di Indonesia dalam tahun-tahun 1965-66-67.

Tanggapan Djoko Sri Moeljono, penting, karena muncul dari seorang eks-tapol, seorang eks tahanan Pulau Buru. Penuturkan dari pengalaman sendiri yang langsung, selama bertahun-tahun, punya kesan yang lain. Juga penting untuk mendengar kritik eks-tapol terhadap pemerintah dewasa ini, yang masih saja bungkam mengenai HOLOKOS 1965 di Indonesia.

Berikut ini uraian yang diberikan oleh Djoko Sri Moeljono, sbb:

\*DJOKO SRI MOELJONO: \*

\*PEMBANTAIAN 1965\*

Bagiku tidak penting, apakah akan disebut "holokos"- "masaker" atau "genosida" - intinya sama, penghilangan nyawa orang secara besar-besaran. Bagi kami yang jadi korban G-30-S tentunya mengharapakan pada suatu saat ada pengakuan dari pemerintah bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam skala raksasa, sangat berat dan sedikitpun belum tampak adanya niat pemerintah maupun pihak luar untuk menelusuri hal ini, kecuali dari pihak yang bersimpati dan mungkin tidak punya

kekuatan untuk menekan. Seorang PM Rafik Hariri dibunuh dengan ledakan bom seluruh dunia terhenyak dan dibentuklah Komisi Penyelidik PBB. Dan seka rang Suriah jadi korban tuduhan sepihak demi kepuasan seorang Bush. Pada tahun 1965 terjadi pembantaian bukan satu orang PM, tetapi ratusan ribu orang dari tingkat menteri sampai rakyat jelata, saat itu tidak seorangpun dari negeri "jagonya HAM dan demokrasi" Amerika Serikat tersentuh hatinya untuk menyuarkan penyelidikan? Mungkin mereka disono sedikit banyak menyesal, mengapa harus begitu banyak korban jatuh? Aku yakin, pada tahu=tahun itu di Amerika sono ada juga seorang "Bush lain" yang menginginkan lenyapnya Soekarno plus PKI, seperti Saddam Hussein di Irak sekarang.

Diciptakanlah "jurnalisme ala Soeharto" yang sangat efektif, dengan ceritera Gerwani menyilet wajah dan memotong kemaluan jendral-jendral diiri tarian Harum Bunga dengan lagu genjer-genjer.

Walaupun hanya sehari, dan semua koran lain dibrangus (kecuali Harian Rakjat, yang terbit dengan isi disesuaikan dengan keinginan Soeharto cs?) namun efeknya masih terasa sampai kini. Berita yang ditulis dalam satu hari dan diikuti film dan propaganda non-stop selama 32 tahun, terbukti sangat efektif dan jejaknya masih terasa sampai sekarang. Kalau di bulan September 2005, atau setelah lewat 45 tahun, ada seorang mahasiswa UI bertanya dalam acara Diskusi Sejarah : apakah benar Gerwani menyilet wajah dan memotong kemaluan? - bisa dibayangkan bahwa propaganda tsb sukses besar, seperti dokumen Gilchrist yang mengecoh para petinggi pemerintah dan partai di tahun 1965!

Dan sedihnya, seorang Wapres (yang bergelar Doktor, atau gelarnya beli?) berkomentar : "apa boleh buat Komisi Konstitusi terlanjur memutuskan, yang penting mereka tidak mengulangi perbuatannya!" (perbuatan apa pak kiai?) Komentar ini terlontar sesudah Komisi Konstitusi memutuskan bahwa mantan tapol G-30-S (tanpa embel-embel PKI) boleh dipilih dalam pemilihan umum. Kalau Soeharto melakukan propaganda selama 32 tahun dan sebagian pejabat negara sampai sekarang masih "membutakan dan menulikan diri" terhadap sejarah, mungkin diperlukan 32 tahun lagi untuk bangsa Indonesia menemukan jati dirinya. Total akan diperlukan : 1998 (Soeharto jatuh) + 32 tahun = 2030 atau dari 1965 berarti 65 tahun!

Bangsa Jerman bisa berdamai dengan masa lalu para pendahulunya, yang membantai warga Yahudi dalam jumlah jutaan lebih 60 tahun lalu. Apakah karena kita bangsa Indonesia kurang memakai rasio dan hanya menggunakan perasaan? Bekas-bekas kamp konsentrasi masih bisa dilihat sampai sekarang tapi diisi lain bangsa Jerman bisa menerima seorang Angela Merkel menjadi kanselier, padahal kalau di Indonesia - orang semacam Angela Merkel tidak bakal lolos "litsus" a la rezim Soeharto.

Seorang wartawan senior majalah mingguan Tempo, sdr. Amarzan Ismail Hamid Lubis belum ini berkunjung ke pulau Buru (mendekam bersama aku di unit yang sama selama 7 tahun) dan menceriterakan bahwa semua bekas banguna Mako (Markas Komando) tempat para petugas militer berkantor, sudah lenyap rata dengan tanah. Penghilangan jejak?

Tugas generasi tua untuk meneruskan kepada yang muda tentang apa yang terjadi sebelum, saat 30 September dan sesudahnya, agar mereka tidak kehilangan jejak. Dari 50 orang yang bersama diriku tinggal dalam satu barak bambu di Unit XVI Indrakarya Buru, tidak kurang 12 orang telah meninggal karena usia. Kami sendiri yang masih bertahan hidup saat inipun merangkak menuju pada titik akhir kehidupan. Ekses G-30-S yang berupa pembantaian jelas tidak boleh dilupakan.

Kalau keinginan menyaksikan Soeharto tumbang sudah kami saksikan, masih adakah kesempatan bagi kami untuk menyaksikan "rehabilitasi" para korban G-30-S?

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi belum juga terbentuk, sedangkan bila toh akhirnya terbentuk : bisakah mereka diharapkan? Dalam daftar nama calon anggota sebanyak 42 orang, terdapat nama-nama mantan pejabat militer. Apa yang bisa diharapkan dari mereka?

Djoko Sri Moeljono juga menuliskan pendapatnya dalam bahasa Inggris, sbb:

#### \*KILLING FIELD\*

Reading the email from Ibrahim Isa yesterday, I would like to write a comment on the subject. Let us not argue with terminology, whether we will use holocaust, massacre or genocide? The fact was that hundred of thousands people were slaughtered in the end of 1965 and beginning of 1966 in Java and Bali. And I am very glad that there is activity in Holland to remind all of us about this tragedy, which by the government of our beloved republic was so far neglected.

It is just ridiculous if you hear a student in September 2005 or 45 years after the September affair, asked a question like : was it true that the Gerwani women tortured and mutilated the organ of the generals?

Imagine, this question was asked by a student 45 years after the tragedy? How effective was the "Soeharto one day journalism" - when all newspapers were banned and only the army "Angkatan Bersenjata" (Armed Forces) and "Berita Yudha" were published on the first day of October 1965 and followed by endless propaganda in 32 years. It was, yes, it was very very effective in brain washing the whole people, from the man on the street to the ministers around Soeharto. Do we need another 32 years to convince people that the history written by Soeharto was a genuine "his story"? Anyway, I am glad to hear that you all in Holland organized a seminar or what soever, to remind us, to remind the world, that in our country a killing field was taken place 45 years ago.

<Victim of G-30-S arrested since 1965 and detained to Buru Island, released in 1978. Arrested and jailed in 1965, released from Buru in 1978 -- graduate engineer from Moscow Steel & Alloy Institute 1964

-----  
Betul, tanggapan Djoko Sri Moeljono, bukan diajukan pada Seminar Sehari di IISG tsb.

Namun, ia mengajukan tanggapannya terhadap apa yang didiskusikan pada Seminar Sehari tsb.

Oleh karena itu, penulis menganggap ada gunanya tanggapan Djoko Sri Moeljono itu, diketahui dan dipertimbangkan oleh pembaca.

Dalam tulisan selanjutnya, (bagian 3), akan diteruskan pembicaraan dan tukar fikiran mengenai SEMINAR SEHARI di IISG pada tanggal 28 Oktober y.l., yang bertemakan "1965 THE FORGOTTEN HOLOCAUST OF INDONESIA".

\*\*\*

\*IBRAHIM ISA dari BIJLMER\*

\*-----\*

\*3 November 2005.\*

\*"1965-The Forgotten Holocaust of Indonesia" -\*

\*<Seminar Sehari, 28 Okt'05 di Gedung IISG>\*

\*<Bagian-3, terakhir>\*

Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri! Terimalah ucapan: SELAMAT HARI RAYA 1 SYAWAL 1426 H. Semoga perjuangan kita untuk suatu negara hukum Indonesia, yang demokratis, adil dan makmur mencapai kemajuan adanya. Amien ya, Rabbul Alamien.

Tulisan berikut adalah bagian (3) terakhir sekitar SEMINAR SEHARI di IISG, yang berlangsung pada tanggal 28 Oktober 2005 y.l. Dari situ masih ada yang hendak disoroti, yaitu yang bersangkutan dengan \*tiga masalah,\* yang a.l. menjadi perhatian peserta seminar, sbb:

\*Pertama:\* Apa sebabnya sampai saat ini mantan Presiden SUHARTO MASIH BELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN?

\*Kedua:\* Ternyata ada keterlibatan sementara psikolog Belanda dalam Tragedi 1965, yaitu mengadakan kerjasama dengan KOPKAMTIB.

\*Ketiga:\* \*bagaimana selanjutnya dengan masalah "1965, HOLOKOS INDONESIA yang DILUPAKAN". Apa yang harus dikerjakan?

\*MENGAPA SAMPAI SEKARANG SUHARTO TIDAK DIADILI.\*

Difahami bersama mengenai sebab-musababnya mengapa Suharto sampai sekarang masih bebas,-- meskipun jelas bahwa ia telah melakukan dan bertanggung-jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia. Penyebab utamanya adalah, --- karena kekuasaan legeslatif, eksekutif dan judisial di Indonesia sampai saat ini, masih didominasi oleh Orba. Imbangan kekuatan politik menunjukkan bahwa pengaruh kekuasaan rezim Orba masih lebih kuat terbanding kekuatan politik reformasi dan demokrasi. Meskipun formalnya Orba sudah tiada lagi dan semboyan penguasa dewasa ini adalah reformasi dan demokrasi.

Yang a.l. secara kongkrit mengajukan agar \*SUHARTO diseret ke PENGADILAN\*, adalah Ketua lembaga TAPOL di London, Carmel Budiardjo. Carmel juga mempertanyakan mengapa di Indonesia tidak ada tuntutan untuk mengadili Suharto.

Menjawab pertanyaan ini Indonesianis dari Australia, Prof Dr. Robert Cribb menjelaskan, bahwa di Indonesia sesungguhnya ada tuntutan dan gerakan untuk mengadili Suharto, tetapi gerakan itu belum cukup kuat.

Selain itu masih belum terlupakan banyaknya semboyan dan slogan politik yang berkumandang disekitar bulan Mei 1998, yang, bukan saja menuntut turunnya Suharto, tetapi juga supaya ia diadili. Begitu banyak dan santer berkumandang tuntutan massa yang berdemo ketika itu, supaya SUHARTO DIGANTUNG. Hal mana menunjukkan bahwa tuntutan untuk mengadili Suharto bukan tidak ada di Indonesia. Tetapi memang, belakangan tuntutan adil ini mengendor, sebagaimana halnya gerakan reformasi itu sendiri.

Dalam kesempatan intervensi dalam diskusi tsb, Penulis minta perhatian hadirin, terhadap satu soal penting, sbb: Bahwa di negeri kita Terdapat kendala mental terbesar untuk ditingkatkannya "awareness" atau kesadaran di sekitar penegakkan hukum, masalah mengakhiri situasi "impunity", atau "tanpa hukum". Kendala mental itu adalah fikiran-salah (denkfout) yang sudah sejak berdirinya Orba terus menerus dipompakan kedalam kesadaran masyarakat, -- bahwa berbuat sewenang-wenang, yang melanggar hukum, melakukan pelanggaran HAM, bahkan sampai membantai orang-orang Komunis, orang-orang PKI atau yang diduga PKI, terhadap golongan Kiri lainnya yang umumnya mendukung politik Presiden Sukarno, --- tindakan tsb --- BUKANLAH SUATU KEJAHATAN. IT IS NO CRIME TO KILL COMMUNISTS.

Jelas kiranya, bahwa fikiran-salah itu perlu terlebih dulu dikikis, diatasi. Agar dengan demikian menciptakan syarat dan situasi yang kondusif untuk ditegakkannya, fikiran-benar, yaitu kesadaran mengenai HAK-HAK Azasi Manusia, yang adalah hak setiap manusia, setiap warganegara, tidak peduli apa keyakinan agama ataupun aliran politiknya.

Selain Carmel Bidiardjo, yang juga mendesak diajukan tuntutan untuk mengadili Suharto, adalah seorang pembicara --- yang meskipun sudah m a n u l a (81 th), tetapi semangat juangnya masih menyala-nyala, ---- SITOR SITUMORANG. Dengan setengah berkelakar Sitor mengatakan, bahwa kita harus "adil terhadap Suharto". Makanya kita tidak sekadar bicara dan menulis tentang kejahatan Suharto, tetapi juga harus menuntutnya di pengadilan. Agar di situ, jelas apa gugatan kita terhadap Suharto, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Di muka pengadilan itu Suharto silakan membela diri.

Bicara mengenai pelanggaran Orba terhadap HAM, Sitor Situmorang, salah seorang sastrawan Indonesia yang secara sadar mengatakan diri turut berpolitik, mengungkapkan --- bahwa belum lama melalui anaknya ia memperoleh sebuah berkas resmi, mengenai penangkapan terhadap dirinya. Meskipun di atas setiap kertas-berkas itu tertulis kata-kata PRO JUSTIA, namun keseluruhan isi berkas resmi itu mengungkapkan betapa kesewenang-wenangan hukum telah diperlakukan Orba terhadap dirinya. Sitor telah menyampaikan kopi berkas PRO JUSTIA ORBA itu, kepada Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, bahkan kepada Presiden tetapi samasekali tidak ada reaksi, alias bungkam. Hanya LBH yang menyatakan akan mempelajarinya.

**\*PENGADILAN DI SPANYOL BISA MENGADILI SUHARTO.\***

Sebelum Seminar IISG penulis mendapat saran dari seorang sahabat lama yang juga pernah menderita sebagai tapol dan eks-tapol dan sekarang bermukim di Belanda, berkenaan dengan masalah MENGADILI SUHARTO. Menurut kawan ini sebuah lembaga pengadilan di Spanyol dewasa ini, menyatakan dirinya punya wewenang untuk mengadili siapa saja, bangsa manapun, yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dari sini bisa difikirkan oleh para eks-tapol, para korban pelanggaran HAM oleh Suharto, untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan di Spanyol itu, agar mengadili Suharto. Saran ini kiranya baik dipertimbangkan nanti pada pertemuan yang menurut rencana akan diadakan di Universitas Leiden, pada tanggal 5 November, sehubungan dengan 40 th pelanggaran HAM terbesar di Indonesia.

**\*KERJASAMA PSIKOLOG-PSIKOLOG BELANDA DENGAN KOPKAMTIB:\***

Dalam bahan yang dikemukakan pada Seminar Sehari di IISG, diungkapkan bahwa Kopkamtib pada tahun 1970-an mengajak sejumlah ahli psikologi dari Universitas Nijmegen, Belanda, dan rekan-rekannya dari Indonesia, untuk menguji "orientasi komunis" para tapol Pulau Buru. Ujicoba itu berpengaruh pada peluang bebas dan nasib mereka kemudian.

Marék Ave dari Yayasan Sapulidi menjelaskan bahwa: Yang pertama mengeluarkan pernyataan mengenai keterlibatan para psycholog Inggris, Belanda dan Amerika ialah Laksamana Soedomo, Panglima Kopkamtib, dalam wawancara di New York Times tgl 12 April 1978. Berita itu dimuat di Volkskrant pada tgl 13 dan 14 April 1978, anehnya atas permintaan NY Times. Kemudian pada tgl 28 April ada lagi wawancara dengan Soedomo dan brigjen. Soemitro, yang menerangkan ttg kerjasama antara psycholog2 Belanda dan Indonesia, antara lain Fuad Hassan dan Saparinah Sadeli disebut namanya.

Menjelaskan lebih lanjut tentang bahan tsb, Hilmar Farid dari Jaringan Kerja Budaya, Jakarta, dalam satu wawancara dengan Radio Hilversum, a.l. Menjelaskan sbb:

"Kasusnya sebenarnya dimulai sejak tahun 1978. "Ketika itu ada rencana untuk melepas tahanan-tahanan politik itu. Dari pulau Buru terutama. Nah ada banyak pertanyaan yang diajukan wartawan saat pelepasan itu dan salah satunya adalah bagaimana kira-kira sikap masyarakat ketika menerima kembali orang-orang yang pernah ditahan di pulau Buru. Dan Kopkamtib saat itu menjawab, enggak perlu kuatir karena kami sudah memeriksa mereka secara psikologis. Dan dalam satu wawancara Laksamana Sudomo dari psikologi angkatan darat mengatakan bahwa para tahanan politik ini sudah pernah melalui sebuah test psikologi yang antara lain dibantu oleh ilmuwan-ilmuwan dari Belanda, Inggris dan Amerika."

"Nah pernyataan Laksamana Sudomo ini yang pertama kali memicu kontroversi karena pers Belanda dengan cepat menangkap itu. Jadi sekitar bulan April 1978 mulai ada kontroversi di dalam pers Belanda mengenai persoalan ini. Dan setelah diselidiki ternyata kerjasama antara Kopkamtib dengan ilmuwan psikolog terutama di Indonesia itu mulainya sebetulnya awal 1970an. Jadi tahun 1970 sudah ada proyek seperti itu. Dan dalam prosesnya mereka sering kali dibantu oleh ilmuwan-ilmuwan



Belanda. Nah kami mulai mengadakan reset ini berkaitan dengan peringatan 40 tahun tragedi 1965 dan mengapa fokus ini yang dipilih antara lain karena kami coba melihat hubungan tragedi itu dengan pihak-pihak lain. Dalam hal ini Belanda."

"Keterlibatan ini, jelas Hilmar Farid, selama ini tidak diketahui, itu satu. Dan yang paling penting menurut saya karena upaya ini kemudian memberi semacam legitimasi ilmiah ya kepada pemerintah Indonesia, Orde Baru khususnya saat itu untuk menjalankan represi. Termasuk seleksi terhadap para tapol. Karena test yang dilakukan terhadap tahanan itu sebetulnya untuk membuktikan seberapa jauh para tahanan ini masih komunis atau tidak. Dan itu akan berkaitan dengan pelepasan dan perlakuan juga di dalam tahanan. Beberapa tahanan politik bilang, memang kami pernah didatangi, dites dan tidak tahu persis hasilnya apa. Tapi yang jelas kemudian kepulauan orang dan perlakuan mereka setelah ditahan sangat bergantung pada jawaban-jawaban yang mereka berikan."

Lanjut Farid: "1978 Orde Baru sedang pada puncak-puncak kekuasaannya. Jadi di lingkungan universitas, sekalipun ada banyak protes tidak banyak orang yang memperhatikan itu. Kedua, karena mungkin, dibandingkan dengan represi yang sifatnya langsung persoalan ini kan enggak begitu terlihat ya. Bahwa ada dukungan ilmiah terhadap upaya represi gitu. Ini dugaan sementara saja. Saya sebetulnya berniat untuk kembali ke Indonesia nanti melakukan wawancara dengan mereka-mereka yang terlibat dalam proses ini." Demikian Hilmar Farid kpd Radio Hilversum.

Menjadi jelas bagi kita semua, bahwa keterlibatan pihak Belanda dalam pelanggaran HAM terbesar di Indonesia, bukan saja pada hal-hal yang dapat dilihat, seperti bantuan politik (kunjungan Ratu Juliana dan Pangeran Bernhard semasa rezim Orba, ke Indonesia), ekonomi, finansial (mengetuai IGGI, suatu konsorsium internasional yang mendukung rezim Orba) dan militer kepada rezim Orba. Tetapi juga keterlibatan terselubung di bidang lainnya yang tidak begitu dikenal sebelumnya, yaitu kerjasama sementara psikolog Belanda dengan KOPKAMTIB.

Di sini kita saksikan bahwa, meskipun sudah lebih dari 25 tahun berlalu keterlibatan Belanda dengan HOLOCAUST 1965 di Indonesia, tokoh akhirnya terbongkar juga.

Seminar Sehari di IISG telah membantu mengingatkan masyarakat Belanda, internasional dan Indonesia mengenai masalah pelanggaran HAM ini.

#### **\*BAGAIMANA SELANJUTNYA\***

Para peserta Seminar Sehari di IISG punya kesatuan kesefahaman. Bahwa gerakan, perjuangan untuk mencari keadilan dan kebenaran sekitar HOLOKOS INDONESIA 1965 yang dilupakan, pertama-tama dan terpenting dilakukan oleh orang-orang Indonesia sendiri, oleh para pencinta dan pejuang reformasi dan demokrasi di Indonesia, di dalam negeri.

Untuk itu yang penting a.l. adalah terus-menerus, tanpa jemu-jemunya melakukan kampanye pencerahan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai perjuangan untuk menegakkan HAM, demokrasi dan keadilan.

Di lain pihak perhatian dan solidaritas para pemeduli HAM dan Demokrasi di mancanegara, termasuk di Belanda, punya arti dan peranan penting sekali. Seperti kegiatan yang dilakukan kali ini oleh IISG.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://kompas.com/kompas-cetak/0509/30/opini/2081632.htm>

Jumat, 30 September 2005

## Setelah 40 Tahun Peristiwa G30S Berlalu

### Bagaimana Kita Melihatnya?

Oleh: Solahuddin Wahid

40 tahun peristiwa G30S berlalu. Namun, hal itu tidak dilewatkan begitu saja oleh lawan-lawan Partai Komunis Indonesia. Peluncuran buku tentang G30S dilakukan di Jakarta dan mungkin di kota-kota lain.

Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948 diluncurkan di Jakarta pada 7 September 2005 dan buku G30S/PKI 1965, Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia, diluncurkan di Jakarta, 29 September 2005.

Peluncuran buku itu disertai diskusi. Diskusi khusus "mengenang" peristiwa G30S juga dilakukan di beberapa tempat, antara lain di Lemhannas (21 September 2005). Dalam diskusi itu ahli sejarah Prof Amiruddin Kasdi mengemukakan fakta keterlibatan PKI dalam G30S, dan Letjen (Purn) Himawan Sutanto menguraikan peran PKI dalam Peristiwa Madiun. Salah satu pembicara menyatakan, kini membicarakan G30S dan Peristiwa Madiun bukan sesuatu yang populer.

Sepakat dengan pernyataan itu. Peluncuran buku Kesaksian Korban Kekejaman PKI 1948 hanya diliput oleh satu koran. Bahkan, diskusi di Lemhannas tidak diliput satu koran pun.

Generasi muda tidak suka Orde Baru. Mereka simpati kepada PKI, "musuh" Orde Baru, sehingga upaya mengingatkan kekejaman PKI tidak mereka perhatikan. Sedangkan generasi tua yang pernah merasakan kekejaman PKI mengingatkan agar hal itu tidak terulang lagi. Mereka tidak ingin ada penghapusan sejarah dengan menghilangkan Peristiwa G30S/PKI dari sejarah Indonesia.

Mantan tapol juga tidak melewatkan saat tepat ini. Tanggal 29 September 2005 mereka melakukan peluncuran buku, diskusi, dan pembacaan puisi untuk mengenang tragedi kemanusiaan yang menimpa ratusan ribu manusia dan perlakuan diskriminatif terhadap jutaan warganya yang telah berjalan selama puluhan tahun. Pihak ini berjuang untuk memperoleh kembali hak-haknya yang telah dirampas.

### Sikap kita?

Kita menyikapi peristiwa 40 tahun lalu itu, dalam pengertian menentukan siapa di belakang G30S? Paling awal kita berangkat dari fakta sejarah. Untuk G30S, Mahmilub telah memeriksa sejumlah terdakwa.

Tokoh PKI memberi kesaksian, mereka terlibat G30S, tetapi PKI tidak. Fakta ini diyakini puluhan juta bahkan mungkin seratus juta orang.

Banyak yang tidak yakin PKI di balik G30S, termasuk para ahli sejarah. Mereka menuduh TNI AD dengan tokohnya, Soeharto, adalah dalang G30S. Mereka mendasarkan teori pada fakta laporan Kolonel Latief kepada Soeharto (29/9/1965 malam) tentang rencana penjemputan paksa para jenderal. Lalu dianalisis dan disimpulkan, amat kuat dugaan Soeharto ada di balik G30S. Teori ini didukung analisis situasi perang dingin dunia internasional.

Akhli-akhli sejarah pimpinan Prof Dr Taufik Abdullah yang ditugasi menulis kembali Sejarah Indonesia tampaknya mengalami kesulitan untuk menentukan pihak-pihak yang dinyatakan harus bertanggung jawab atas G30S. Pengalaman hidup dan keyakinan seseorang amat menentukan sikapnya terhadap dua pilihan itu.

Pendapat saya, fakta persidangan Mahmilub lebih kuat dan meyakinkan, PKI ada di belakang G30S. Tetapi pihak yang percaya bahwa itu adalah urusan internal AD tentu punya pengalaman dan keyakinan berbeda.

Prof Taufik Abdullah dan tim sepakat tentang versi mana yang dipilih untuk menentukan siapa di balik G30S, tentu akan lebih baik. Tetapi jika tidak bisa, apa jalan keluarnya? Bagaimana tim itu harus menjawab pertanyaan jutaan siswa yang menunggu kejelasan sejarah melalui kurikulum sejarah. Salah satu pilihan, menyajikan dua versi itu disertai fakta lengkap dan siswa dipersilakan menentukan sendiri versi mana yang benar.

#### **40 tahun**

Kita melihat G30S setelah 40 tahun berlalu? Kita mengalami perubahan amat mendasar dalam sikap politik. UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen yang memungkinkan masuknya pasal-pasal HAM. Mahkamah Konstitusi telah memulihkan hak-hak politik mantan tapol. UU KKR telah berlaku meski tidak sepenuhnya diterima mantan tapol/PKI dan oleh lawan mereka.

Anti-PKI masih melekat pada sebagian warga, yang masih khawatir terhadap bahaya komunisme. Sementara ada pihak yang mengatakan, sikap semacam itu seperti melihat hantu di siang bolong. Saya melihat komunisme sebagai tantangan, bukan ancaman. Dalam arti tantangan untuk menghilangkan lahan yang subur bagi tumbuhnya komunisme, yaitu masyarakat yang penuh ketidakadilan, masyarakat yang sebagian cukup besar warganya masih mengalami kemiskinan dan kebodohan serta ketertinggalan.

Perlu memisah Peristiwa G30S menjadi beberapa aspek, yaitu aspek kemanusiaan, ajaran, dan politik, agar bisa diselesaikan satu per satu. Yang paling penting dan mendesak ialah masalah kemanusiaan, yaitu mewujudkan rekonsiliasi antara mantan tapol 1965 plus keluarga dengan masyarakat luas, baik bersifat yuridis maupun kultural.

Anak-anak muda NU dalam Syarikat telah lama merintis dan menggalakkan rekonsiliasi kultural. Pembentukan KKR, meski tidak ideal, memberi peluang untuk rekonsiliasi yuridis. Aspek ajaran berkait penyebaran marxisme masih di-

larang oleh Tap MPRS No XXV/1966. Tetapi kita mengetahui, UUD 1945 Pasal 28 menjamin hak kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pikiran yang dapat dianggap sebagai izin. Secara realitas pelarangan penyebaran marxisme kurang efektif. Penulisan buku yang bermutu untuk melawan marxisme akan lebih efektif.

Ketiga menyangkut politik kepartaian. Realitas politik saat ini tidak mendukung upaya menghidupkan kembali PKI karena terlibat dalam Peristiwa Madiun dan G30S. Pembentukan partai beraliran marxisme tidak menjanjikan dukungan kuat dari masyarakat. Dengan memilah dan memisahkan ketiga aspek itu, diharapkan penyelesaian masalah kemanusiaan akan lebih mudah dilakukan.

G30S diperingati bukan untuk menumbuhkan kembali saling curiga, saling benci, atau saling menyalahkan, tetapi untuk mengingatkan kita semua bahwa kita pernah melakukan kesalahan besar agar tidak mengulangnya di masa depan. Kita harus menyadari, jika Indonesia ingin maju dan menjadi bangsa besar, rekonsiliasi nasional adalah syarat utama yang harus dipenuhi.

Wahid Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## PEMBARUAN DAILY

### **MENYIKAPI G30S**

Wahid

Terjadi Peristiwa G30S, mayoritas masyarakat luas secara terbuka dan mantap meyakini bahwa PKI adalah dalang dari G30S. Januari 1966, Benedict Anderson dan Ruth McVey menulis Cornell Paper yang mengemukakan suatu hipotesa yang intinya menyatakan bahwa G30S adalah masalah internal Angkatan Darat dan tidak ada kaitannya dengan PKI.

Pamen dari Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas dan frustrasi terhadap kepemimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan di Jakarta. Keterlibatan PKI hanyalah suatu kecelakaan.

Sekitar sepuluh teori tentang siapa dalang G30S. Secara garis besar, ada beberapa interpretasi yang dikemukakan. Pertama, seperti yang dikemukakan oleh Anderson dan MacVey. Kedua, suatu gerakan yang dilakukan kelompok didalam TNI yang keseluruhannya diotaki PKI. Ketiga, suatu gerakan yang diinterpretasikan sebagai suatu komplotan antara perwira pembelot dengan pemimpin-pemimpin PKI. Tentu tidak dapat diabaikan peran CIA dan Bung Karno.

Setelah Orde Baru tumbang, kebebasan untuk menyatakan pendapat dibuka lebar. Muncul dorongan kuat untuk mengugat keabsahan versi resmi G30S.

Kebanyakan generasi muda punya rumus tentang Peristiwa G30S: karena kami musuh Orde Baru, maka musuh Orde Baru adalah kawan kami.

Gugatan terhadap teori keterlibatan PKI dalam G30S diajukan dengan usulan untuk membatalkan materi dari kurikulum 1994 dibidang sejarah yang secara tegas mencantumkan kata G30S/ PKI dan bahwa PKI ialah dalang. Dibentuklah Tim untuk menulis kembali sejarah Indonesia yang terdiri dari para ahli sejarah tua dan muda, yang dipimpin oleh Prof Dr Taufik Abdullah.

### **G30S**

Adalah dalang G30S. Itulah yang ingin dikemukakan Prof Aminuddin Kasdi dalam bukunya G30S/PKI, Bedah Ceasar Dewan Revolusi Indonesia. Judul itu menunjukkan bahwa G30S dan PKI adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan bahwa G30S/PKI merupakan operasi untuk melahirkan Dewan Revolusi pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi yang merupakan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Bung Karno.

Fakta dikemukakan untuk mendukung kesimpulannya, yang diambil dari berbagai sumber termasuk dari berkas pengadilan (Mahmillub) untuk perkara Nyono, Untung dan lain-lain.

Saya juga mengutip paper Harold Crouch Another Look At Indonesian Coup (jurnal Indonesia No 15/1973) yang juga mengambil hasil persidangan Mahmillub (proceeding pengadilan) dan sebagian dari rekaman proses lengkap persidangan Mahmillub serta pendapat pakar lain.

Bukti-bukti pengadilan yang diberikan tokoh-tokoh penting komunis, bisa ditarik kesimpulan ada tiga interpretasi pokok.

Nyono dalam persidangan mengakui bahwa ia mendukung perwira pemberon-tak secara pribadi dan menyusun daftar sejumlah anggota organisasi di bawah PKI untuk dilatih sebagai kekuatan pasukan cadangan, tetapi ia menolak bahwa PKI sendiri terlibat.

Menurut Sudisman dan Pardede, pemimpin PKI telah mengambil keputusan untuk mendukung usaha coup tetapi mereka mengelak dengan mengatakan bahwa inisiatif gerakan justru datang dari "perwira" progresif, bukan dari PKI.

Ketua Biro Khusus, Syam, memberikan bukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa PKI telah merencanakan sejak awal gerakan coup dan bahwa perwira yang terlibat digerakkan PKI.

Nyono, Politburo PKI telah mengadakan 3 pertemuan pada bulan Agustus 1965 setelah Aidit kembali lawatan ke luar negeri. Ada tiga masalah yang dilontarkan Aidit.

Berkaitan dengan sakitnya Presiden Soekarno yang dianggap sebagai hal serius. Kedua, informasi mengenai "Dewan Jenderal" yang berencana melakukan coup. Ketiga, prakarsa "perwira progresif" yang bermaksud mengambil tindakan preventif terhadap aksi "Dewan Jenderal".

Nyono, dalam pertemuan itu Aidit melontarkan soal apakah PKI lebih baik menyokong "perwira progresif" yang akan melakukan aksi pencegahan atau melaporkan kepada presiden dan menunggu sikap presiden. Pada akhir pertemuan (28 Agustus 1965) itu, Aidit mengaskan bahwa pilihan kedualah (melapor kepada presiden) yang diambil. Tetapi Nyono mengakui bahwa Aidit telah memutuskan untuk melakukan kontak dengan para perwira pembelot itu.

Juga mengakui, sebagai anggota Politbiro telah bekerja sama dengan para perwira pemberontak itu untuk merekrut sukarelawan dari organisasi massa PKI untuk pasukan cadangan yang dilatih disekitar Halim dengan koordinasi Angkatan Udara pada bulan Juli-September 1965.

### **Tokoh PKI**

Pardede, anggota Politbiro PKI, dalam kesaksian pada pengadilan Nyono menyatakan bahwa dalam rapat tanggal 28 Agustus 1965 ketika akan mengambil sikap terhadap aksi perwira progresif, Aidit melontarkan usul agar masalah itu untuk sementara diserahkan pada Standing Committee Politbiro.

Menyetujui usul itu. Kira-kira sepuluh hari kemudian, Pardede menanyakan kepada Sudisman mengenai keputusan itu. Jawab Sudisman, mereka memutuskan untuk mendukung sikap mengambil tindakan preventif yang akan dilakukan oleh para "perwira progresif".

Sidang pengadilannya (1967), Sudisman membenarkan kesaksian Pardede itu. Mengikuti keputusan itu, menurut Sudisman, Aidit lalu meminta Nyono untuk merekrut 2000 anggota ormas dibawah PKI untuk menjadi pasukan cadangan yang akan dimanfaatkan untuk melancarkan aksi "perwira progresif" itu.

September 1965 Sudisman mengirim utusan ke Medan, Palembang, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menginformasikan kemungkinan aksi "Dewan Jenderal" kepada cabang-cabang PKI. Semua pengurus PKI diwilayah diharuskan memantau terus menerus perkembangan di Jakarta lewat radio dan juga "membantu Dewan Revolusi".

Demikian Sudisman mengakui bahwa pemimpin PKI secara sadar menyokong usaha-usaha coup. Namun dia menyatakan bahwa PKI hanyalah membantu gerakan yang secara nyata dilakukan "perwira-perwira progresif". Dia menyatakan bahwa keterlibatan para pemimpin PKI dalam gerakan coup itu tidak berarti bahwa partai secara keseluruhan terlibat.

(Kamaruzzaman) menjadi saksi dalam persidangan Sudisman dan dirinya sendiri. Dia adalah Kepala Biro Khusus Politbiro PKI yang dibentuk tahun 1964, yang bertanggungjawab secara langsung kepada Aidit. Banyak langkah yang dibuat Syam yang tidak diketahui pimpinan partai selain Aidit. Dia dicurigai sebagai double agent.

Syam berbeda. Menurutnya, Aiditlah yang mengambil prakarsa dengan mengintruksikan kepada Syam untuk menggalang perwira pemberontak yang bisa diajak untuk menjalankan rencana yang disusun oleh PKI. Jadi menurut Syam,

"perwira progresif" tidak memainkan peran independen, mereka hanyalah alat yang siap digunakan apa saja oleh PKI.

Dari uraian singkat di atas tampaknya bisa disimpulkan bahwa banyak pemimpin PKI terlibat dalam usaha coup, namun derajat keterlibatannya masih mengundang interpretasi yang beragam. Yang mengundang pertanyaan adalah pendapat para pemimpin PKI yang menyatakan bahwa keterlibatan mereka itu secara pribadi dan tidak melibatkan partai. Pernyataan itu sulit untuk diterima.

### **Terlibat?**

Pihak yang mempunyai pendapat bertentangan juga mengajukan argumentasi dan "bukti" untuk mendukung pendapat mereka. Sebuah tulisan di Kompas (27-10-2004) berjudul "G30S, Terlibatkah Soeharto ?" oleh James Luhulima, mengemukakan pendapat bahwa tidak tertutup kemungkinan keterlibatan Pak Harto dalam G30S, bahkan posisinya amat strategis.

Yang dikemukakan adalah adanya kunjungan Kolonel Latief ke RSPAD menemui Pak Harto yang sedang menunggu Tommy yang sedang dirawat di sana, (29 dan 30 September 1965).

Kesempatan itu, menurut Kolonel Latief, dia menyampaikan kepada Pak Harto bahwa dalam waktu yang amat dekat akan terjadi penjemputan paksa terhadap beberapa jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal yang diyakini akan melakukan kudeta terhadap Bung Karno. Para jenderal itu akan dibawa ke hadapan Bung Karno untuk diinterogasi.

Penulis itu Pak Harto adalah satu-satunya perwira tinggi TNI yang mengetahui informasi tentang adanya operasi penjemputan paksa beberapa jenderal itu. Seharusnya Pak Harto tanggap dan melaporkannya pada Jenderal Ahmad Yani.

Laporan itu, menurut Kolonel Latief, Pak Harto hanya menjawab telah mengetahui hal itu dari seorang bekas anak buahnya bernama Subagiyo. Oey Tjoe Tat, seorang menteri di era Bung Karno, dalam memoirnya menyatakan bahwa dia bertemu Subagiyo di dalam tahanan yang mengatakan bahwa dia memang bertemu Pak Harto dan menyampaikan informasi seperti di atas.

Itu juga menyatakan bahwa hampir semua pelaku inti G30S punya hubungan dekat dengan Pak Harto. Brigjen Soepardjo, Kolonel Untung, Syam Kamaruzaman dan pimpinan batalyon yang bertugas di lapangan Monas. Selain itu juga ada informasi dari Wadanyon 530/ Para Brigade/ Brawijaya Kapten Soekarbi (Detak 29-9-1998) bahwa dalam Radiogram Pangkostrad No 220 dan No 239 tanggal 21-9-1965 yang ditandatangani Mayjen Soeharto, diperintahkan agar batalyon tersebut yang dipersiapkan dalam rangka HUT ke-20 ABRI, datang dengan "perlengkapan tempur garis pertama".

Heran, pada saat G30S berlangsung, Pak Harto hanya melihat perkembangan untuk menunggu saat yang tepat dan dengan cepat melakukan langkah yang diperlukan, di saat pihak lain di dalam maupun di luar TNI masih tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi.

Memiliki seluruh informasi, Pak Harto dengan leluasa dapat mengendalikan keadaan termasuk mengambil alih kendali TNI AD. Apalagi kemudian juga mengendalikan pers nasional sehingga seluruh informasi kepada masyarakat dapat sepenuhnya dikendalikan.

Itu, menurut James Luhulima amat patut diduga bahwa Pak Harto terlibat dalam G30S, bahkan memegang posisi paling strategis. Tentu Pak Harto membantah keterangan Kolonel Latief itu. Memang Kolonel Latief datang ke RSPAD untuk membunuh Pak Harto tetapi gagal karena banyak orang. Tuduhan terhadap Pak Harto juga dibantah oleh Jenderal Nasution.

### **Yang Dipakai**

Uraian singkat di atas, kita bisa melihat bahwa ternyata memang tidak mudah untuk bisa menentukan dengan pasti siapa dibalik G30S. Setiap kesimpulan yang dibuat akan dibantah oleh yang lain sehingga tidak akan ada kesimpulan yang diterima oleh semua pihak. Setiap orang mempunyai kesimpulan sesuai pengalaman dan keyakinan masing-masing yang sifatnya individual.

Yakin dan berpendapat bahwa PKI berada di belakang G30S, dengan dasar argumentasi di atas yang didukung fakta yang cukup kuat. Tetapi keyakinan dan pendapat saya itu akan dibantah oleh pihak yang punya keyakinan dan pendapat bahwa TNI atau Mayjen Soehartolah yang berada di belakang G30S, dengan dasar argumentasi yang juga didukung fakta, walaupun fakta itu belum diuji didalam pengadilan.

Pertanyaan, bagaimana cara Tim Penulisan Kembali Sejarah itu membuat kesimpulan "siapa di belakang G30S?" Para ahli sejarah yang tergabung dalam Tim itu tampaknya terbelah dalam pendapat yang bertentangan dalam menjawab pertanyaan di atas. Apakah harus dilakukan pemungutan suara untuk menentukan jawaban terhadap pertanyaan di atas ? Hal itu tidak lazim dan tidak tepat. Kebenaran sejarah tidak bisa ditentukan dengan pemungutan suara.

Berlebihan kalau saya mengatakan bahwa tampaknya para ahli sejarah kita tidak mampu membuka misteri Peristiwa G30S. Bagaimana harus menjelaskan kepada puluhan juta siswa melalui kurikulum tentang suatu episode paling menentukan dalam sejarah Indonesia? Kurikulum 2004 tidak menjelaskan siapa di belakang G30S. Kurikulum itu memicu protes oleh kelompok lawan PKI ke Mendiknas yang mengakibatkan dicabutnya kurikulum 2004 itu.

Kalau Tim Penulisan Kembali Sejarah memang betul-betul tidak bisa menentukan siapa di belakang G30S, apa yang harus ditulis di dalam kurikulum bidang sejarah khususnya tentang Peristiwa G30S? Apakah sama sekali tidak ditulis seperti yang tercantum dalam Kurikulum 2004 yang diperbaiki setelah ada protes dari yang anti-PKI? Apa masih mungkin kembali ke Kurikulum 1994?

Usul, supaya dikemukakan apa yang dapat digali dalam persidangan seperti yang saya kemukakan di atas, sebagai suatu pendapat dan juga pendapat lain yang berbeda tetapi harus didukung dengan data dan fakta yang cukup kuat, yang dikumpulkan dan dianalisis secara cermat oleh timnya Pak Taufik Abdullah.



Biarkan masyarakat menilai dan menentukan sendiri versi mana yang mereka percaya.

### **Aspek**

Harus bisa memilah kasus G30S ke dalam tiga aspek, yaitu aspek kemanusiaan, ajaran, dan politik, supaya bisa diselesaikan satu persatu. Yang paling mendesak ialah masalah kemanusiaan, yaitu mencari jalan guna mewujudkan rekonsiliasi antara mantan tapol 1965 beserta keluarga dengan masyarakat luas, yang bersifat kultural dan juga yuridis.

Rekonsiliasi diharapkan perlakuan diskriminatif terhadap mantan aktivis PKI dan onder bouw-nya beserta keluarga mereka dapat betul-betul diakhiri. Kalangan muda NU dalam Syarikat telah cukup lama merintis dan mendorong terwujudnya rekonsiliasi kultural. Rekonsiliasi yuridis dimungkinkan dengan terbentuknya KKR, entah bagaimana dalam kenyataannya nanti.

Ajaran yaitu penyebaran Marxisme yang masih dilarang oleh Tap MPR No XXV Tahun 1966. UU No 27/1999 mengandung ancaman pidana terhadap penyebaran marxisme/komunisme. Sebaliknya, UUD 1945 Pasal 28 menjamin hak kemerdekaan pikiran dan hak menyatakan pikiran sebagai aturan yang memperbolehkan penyebaran marxisme. Nyatanya, upaya pelarangan penyebaran marxisme kurang efektif. Penulisan buku yang bermutu untuk melawan marxisme akan lebih efektif.

Terakhir adalah aspek politik kepartaian. Realitas politik saat ini tampaknya tidak mendukung upaya menghidupkan kembali PKI karena keterlibatan dalam peristiwa Madiun dan Peristiwa G30S.

Pembentukan partai baru beraliran marxisme juga tidak menjanjikan dukungan yang kuat dari masyarakat. Dengan memilah dan memisahkan ketiga aspek seperti di atas, diharapkan penyelesaian masalah kemanusiaan akan dapat lebih mudah dilakukan.

Berpuluh tahun G30S seyogyanya kita pergunakan tidak untuk menumbuhkan kembali saling curiga, saling benci dan saling menyalahkan. Tetapi untuk menyadarkan diri kita masing-masing bahwa kita pernah bermusuhan dan saling menyakiti, dan kita semua menderita. Juga untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kita harus melakukan rekonsiliasi nasional kalau kita ingin bangsa Indonesia menjadi besar. \*

Penulis adalah Ketua Majelis Pengurus Pusat (MPP) Ikatan Cendekiawan Muslim se- Indonesia (ICMI)

\*\*\*\*\*

[http://www.indonesia-house.org/focus/terror/2003/11/110603PKI\\_dan\\_Rekonsiliasi.htm](http://www.indonesia-house.org/focus/terror/2003/11/110603PKI_dan_Rekonsiliasi.htm)

### **PKI dan Rekonsiliasi**

*Source: Republika, Kamis, 06 Nopember 2003*

Oleh : Salahuddin Wahid

Dalam peringatan 30 September 2003 saya diminta bicara di depan para mantan tapol G 30 S dan keluarga. Pada 23 Oktober 2003 saya diminta bicara bersama Asvi Warman Adam dan Ester I Yusuf di Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dalam acara bedah tiga buah buku sekitar G 30 S.

Salah satunya berjudul "G 30 S Sejarah yang Digelapkan". Medio September 2003 di kantor Komnas HAM saya menerima pengaduan tentang tindak kekerasan oleh PKI di Madiun (1948). Para pengadu itu menyerahkan daftar nama korban. Saya mengikuti serangkaian wawancara Metro TV terhadap beberapa tokoh yang berseberangan dalam rangka memperingati 30 September. Wawancara tersebut memberi informasi kepada masyarakat luas yang tidak tahu persis apa yang terjadi, khususnya generasi muda. Memang generasi muda menjadi bingung akibat perubahan drastis yang timbul sebagai hasil keterbukaan yang kita alami saat ini.

Kita harus memberi informasi yang benar dan tepat serta berimbang terhadap apa yang sebenarnya terjadi, walaupun tidak mudah untuk melakukan hal itu. Pasti akan ada pertentangan yang tajam dalam melihat peristiwa G 30 S dan Peristiwa Madiun. Akan ada dua versi yang sulit untuk mengklarifikasi mana yang benar. Kedua pihak merasa benar. Sementara itu pemerintah telah menugasi Dr Taufik Abdullah dkk untuk menulis kembali sejarah Indonesia.

### **Tiga pokok soal**

Dalam diskusi di ISAI saya sampaikan pandangan tentang tiga hal: (1) peristiwa G 30 S, (2) komunisme dan PKI, dan (3) perlakuan terhadap korban dan keluarganya. Ketiga hal itu harus kita jelaskan kepada generasi muda yang amat membutuhkan kejelasan sikap kita. Menurut saya hal itu amat penting sehingga membuat tulisan ini tanpa harus menunggu 30 September tahun depan. Di ISAI, di depan sekitar 100 orang yang saya duga kebanyakan adalah simpatisan korban kekerasan tahun 1965 dan pendukung PKI, saya sampaikan pengalaman saya pada tahun 1965 dan 1966. Selesai mendengar pengumuman Dewan Revolusi (1 Oktober 1965) bersama ibu, kakak, dan adik, kami langsung berkesimpulan bahwa yang telah melakukan makar adalah PKI. Reaksi spontan itu adalah sesuatu yang wajar kalau kita hidup di Indonesia pada tahun 1962-1965 dan berada pada pihak yang tidak pro-PKI. Hal itu adalah hasil dari pemahaman terhadap proses politik yang berlangsung di negara kita.

Selama 1962-1965 kami mendengar langsung dari kawan dan saudara di Jawa Timur bagaimana PKI dan organisasi di bawahnya melakukan aksi sepihak dan provokasi yang menimbulkan konflik dengan kalangan Islam, kalangan agama lain, dan pihak TNI. Beberapa peristiwa masih teringat di luar kepala seperti insiden di Kanigoro dengan PIL, di Muncar (Banyuwangi) dengan Ansor, dan Bandar Betsy (Sumut) yang menewaskan Pelda Sujono.

Rumah ibu saya selama Oktober 1965 menjadi semacam Posko bagi kalangan NU karena letaknya sentral dan berada di samping rumah perwira TNI yang mendapat penjagaan. Di situ saya terlibat dalam penggodokan sikap NU

terhadap G 30 S, membantu para senior saya seperti Pak Ud, Mahbub Junaedi, Said Budairi, dll. Sikap NU tegas yaitu meminta pembubaran PKI karena keterlibatannya dalam G 30 S.

Di rumah Sudisman (tokoh CC PKI) yang ada di dekat rumah ibu saya, terdapat daftar tokoh-tokoh yang anti-PKI. Nama ibu saya terdapat di dalam daftar itu. Kesimpulan yang wajar (pada saat itu) terhadap daftar itu ialah bahwa nama-nama tersebut akan ditangkap atau bahkan dihabisi oleh PKI. Kita sekarang bisa mengatakan bahwa daftar itu dibuat oleh pihak TNI untuk memojokkan PKI. Tetapi kita harus memahami situasi dan kondisi saat itu. Tidak bisa kita menilai apa yang terjadi 38 tahun lalu dengan perspektif dan setting sosial-politik masa kini.

Beberapa pekan setelah itu mulai terdengar informasi tentang terjadinya pembunuhan terhadap mereka yang diduga menjadi anggota PKI atau organisasi mantelnya. Jumlah korban kabarnya mencapai ratusan ribu orang. Disiarkan bahwa para anggota Banser di Jawa Timur terlibat di dalam kegiatan itu. Saya, adik, kakak, dan ibu sering membahas hal itu. Kami menyesal hal itu terjadi dan sulit untuk bisa menerimanya.

Januari 1966 di Jakarta berlangsung peringatan Harlah ke-40 NU. Dalam kegiatan itu banyak anggota Banser dari berbagai tempat datang ke Jakarta. Kami sempat diskusi dengan beberapa dari mereka. Kami sampaikan pikiran kami tentang pembunuhan terhadap orang yang diduga anggota PKI di Jawa Timur. Mereka menjawab situasi amat mencekam dan menghendaki mereka untuk melakukan tindakan itu. Tidak ada pilihan lain, membunuh atau dibunuh. Kami hanya bisa bersyukur bahwa kami tidak berada pada posisi seperti para anggota Banser itu.

Kita sekarang menghadapi suatu teka-teki tentang siapa yang sesungguhnya berada di belakang G-30 S, apakah PKI atau TNI AD, atau permainan CIA? Jenderal Mursyid pernah menyatakan tuduhan: Pak Harto ada di belakang G 30 S. Pendapat serupa juga disampaikan oleh banyak pihak. Pihak TNI AD sejauh saya ketahui tidak banyak menanggapi tuduhan itu. Dalam status TNI AD sedang berada pada posisi yang terpojok memang tidak terlalu mudah untuk bisa membendung upaya menghapuskan keterlibatan PKI dalam G 30 S, khususnya di kalangan generasi muda.

Tidak mudah untuk menemukan jawaban terhadap teka-teki itu. Jangankan untuk peristiwa tahun 1965, untuk kasus Mei 1998 saja kita sulit untuk menemukan jawaban pihak mana sebenarnya yang bermain sehingga mengakibatkan korban ratusan jiwa melayang. Kita memang harus terus berupaya untuk membuka kabut sejarah itu dan sejarah yang akan menjawab pertanyaan itu.

Dalam diskusi di ISAI, seorang pemuda menanyakan kebenaran informasi yang dia terima dari salah seorang kawannya bahwa keluarga si kawan itu menjadi korban pembunuhan oleh PKI di masa lalu. Saya menjawab bahwa PKI terlibat dalam pemberontakan Madiun (1948). Pada usia 10 tahun saya melihat foto menggambarkan seorang lelaki bercelana pendek tanpa baju berdiri dengan mata tertutup dan dihadapannya berjajar beberapa orang yang memegang

senapan dan menunjukan senapan itu kepada orang yang ditutup matanya itu. Saya bertanya kepada ayah saya siapa orang itu. Beliau menjawab bahwa orang itu adalah anggota PKI yang dihukum mati karena terlibat dalam pembunuhan terhadap kalangan ulama yang kebetulan adalah famili dari ayah saya.

### **Pelarangan ajaran komunisme**

Pertanyaan kedua ialah bagaimana sikap kita terhadap komunisme, apakah isme itu tetap harus dilarang? Seperti kita tahu, upaya pencabutan TAP MPRS No XXV/1966 tidak berhasil. Pelarangan terhadap komunisme juga dimasukkan dalam RUU KUHP. Kita melihat bahwa terdapat pro-kontra terhadap pelarangan itu. Ada yang menyetujui pelarangan itu dan membandingkannya dengan pelarangan yang dilakukan bangsa Jerman terhadap ajaran NAZI. Tetapi ada yang menolak larangan itu dengan argumentasi bahwa kita tidak berhak melarang karena bertentangan dengan HAM yang dijamin oleh UUD kita.

Banyak anak muda, termasuk juga di kalangan NU, tertarik untuk mempelajari ajaran Karl Marx. Alasannya sederhana, ajaran itu menunjukkan pemihakan yang jelas terhadap nasib rakyat kecil. Mereka melihat masyarakat yang penuh dengan penindasan terhadap rakyat kecil, banyak pengangguran, banyak rakyat yang menderita kelaparan. Mereka juga menyaksikan penggusuran yang dilakukan secara besar-besaran dengan menggunakan aparat pemerintah dalam jumlah besar seperti hendak memerangi musuh. Di tengah suasana seperti itu mereka melihat banyak pejabat yang hidup mewah (yang mereka duga dari hasil KKN). Mereka juga membaca berita tentang kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat kecil.

Tidak heran kalau mereka amat tertarik dengan gagasan yang terdengar indah itu yang menjanjikan jalan keluar dari keadaan yang amat menyedihkan bagi rakyat banyak, termasuk kemungkinan melakukan revolusi. Mereka tidak ingin mengkaji lebih jauh bagaimana sebenarnya komunisme dalam praktiknya. Mereka tentu tahu bahwa komunisme telah ditinggalkan oleh sebagian besar pendukungnya yang telah gagal mewujudkan paham itu dalam kehidupan nyata. Tetapi bagi mereka komunisme/marxisme tetap menawarkan pesona indah.

Kalangan muda NU mungkin banyak yang kecewa dengan perilaku para tokoh Islam yang menurut mereka tidak banyak yang menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat banyak yang tetap menderita setelah Indonesia merdeka lebih dari 50 tahun. Bagi mereka masyarakat Islam lebih sibuk dengan ibadah ritual dan mengabaikan ibadah sosial yang sebenarnya harus lebih kita utamakan. Bagi mereka Islam historis tidak sebaik Islam normatif yang telah mereka pelajari sekian lama. Pendapat itu benar, tetapi mereka tampaknya lupa bahwa komunisme historis juga tidak lebih baik daripada Islam historis kalau tidak mau kita katakan lebih buruk.

terjadi antara tanggal 30 September malam dan 1 Oktober 1965 sebenarnya merupakan sesuatu yang amat kompleks dan menyimpan banyak misteri. Namun, secara singkat dapat dikatakan, pada intinya yang berlangsung adalah suatu operasi militer yang dipimpin Letkol Untung, didukung sejumlah personel

militer lain, seperti Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo. Mereka menamakan diri "Gerakan 30 September" (G30S).

banyak versi menyangkut motif dan dalang sesungguhnya dari operasi militer itu. Ada yang menduga, dalangnya adalah Bung Karno, PKI, CIA, Letkol Untung sendiri, bahkan Mayjen Soeharto (Kompas, 27/10/2004). Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai hal ini.

Yang jelas, akibat operasi militer itu enam jenderal, seorang kapten, dan seorang warga sipil tewas. Dari kediaman masing-masing, para perwira tinggi militer itu dibawa ke Halim Perdanakusumah. Ada yang masih dalam keadaan hidup, ada yang sudah tewas. Secara bersama-sama tubuh mereka dimasukkan ke sebuah sumur tua di Lubang Buaya. Siapa pun pelakunya dan apa pun motif operasi militer ini, tindakan itu adalah kejam dan tak bisa dilupakan.

Hal lain yang jelas adalah dalam waktu singkat operasi militer pimpinan Letkol Untung terbongkar. Tanggal 2 Oktober kelompok G30S gagal dan bubar. Letkol Untung melarikan diri dari Jakarta.

### **Pembunuhan massal**

itu tak terjadi pergolakan sosial berarti di masyarakat, meski suasana menjadi tegang akibat pembunuhan para jenderal di Jakarta. Pergolakan sosial baru terjadi sekitar tanggal 20-21 Oktober, ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Dengan kata lain, pembunuhan massal itu baru dimulai sekitar tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer Letkol Untung beserta G30S-nya. Itu pun terjadi secara bergelombang. Pada bulan Oktober, pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya bulan November di Jawa Timur, dan baru bulan Desember di Bali.

itu berlangsung secara keji dan massal. Pada dini hari tanggal 23 Oktober 1965, misalnya, di Boyolali ada sekitar 250 orang dibunuh beramai-ramai, termasuk seorang guru SD dan istrinya yang dilempar ke sumur dalam keadaan hidup-hidup (Dommen: 1966, 8).

kejam serupa terjadi di berbagai tempat lain di Jawa, Bali, dan sejumlah pulau lain. Jumlah pasti dari korban yang tewas sulit ditentukan, tetapi umumnya berkisar setengah juta sampai satu juta jiwa (Cribb 1990:8).

### **Produksi ingatan**

keji dan massal itu terutama dipicu berbagai pemberitaan resmi yang intinya menuduh PKI sebagai dalang operasi militer Letkol Untung dan berlaku kejam terhadap para korban. Dua pekan pertama bulan Oktober hampir semua koran disensor. Hanya koran-koran tertentu yang oleh kalangan militer diperbolehkan terbit.

Melalui koran-koran ini dikabarkan berbagai kekejaman PKI di Halim Perdanakusumah, seperti kisah "pesta harum bunga", kisah pemotongan alat-alat vital serta pencungkilan mata para korban. [Brigjen TNI dr Rubiono Kertapati yang mengetuai tim dokter yang melakukan otopsi atas para korban menyatakan

dalam laporan visum et repertum-nya, tak ada penyiksaan atas tubuh para korban].

dalang pembunuhan para jenderal itu belum jelas, tetap saja digunakan istilah G30S/PKI. Hal itu dimaksudkan untuk menimbulkan amarah terhadap PKI. Akibatnya, emosi rakyat mudah tersulut dan pembunuhan massal pun terjadi. Bagai dalam Perang Baratayudha, bangsa Indonesia mandi darah saudara sendiri.

Ingatan akan apa yang terjadi tahun 1965 terus diproduksi dan dikemas sedemikian rupa hingga menguntungkan penguasa. Pembuatan film Pengkhianatan G30S/PKI hanya sebuah contoh. Produksi (dan reproduksi) ingatan itu penting karena dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikontrol. Ia menjadi semacam menara panoptik-nya Foucault yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang dominan, tetapi tak terduga.

## Oktober

ingatan itu memiliki konsekuensi amat jauh. Salah satunya ialah ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menjadi kabur. Masyarakat sulit membedakan antara (a) operasi militer yang dilakukan Letkol Untung dan kawan-kawan dan (b) pembunuhan massal terhadap rakyat Indonesia, serta (c) berbagai upaya produksi ingatan yang manipulatif tentang Tragedi 1965.

memusatkan peringatan Tragedi 1965 pada bulan September adalah contoh. Orang mengira, i"puncak;" tragedi itu pada bulan September. Seakan-akan pada bulan itulah tragedi berlangsung. Padahal, tragedi pembunuhan para jenderal dan ratusan ribu rakyat Indonesia justru terjadi pada bulan Oktober dan bulan-bulan setelahnya. [Kiranya sudah saatnya peringatan Tragedi 1965 digeser ke bulan Oktober atau setelahnya]

40 tahun Tragedi 1965 adalah momentum yang amat berharga. Kita diundang untuk belajar dari tragedi itu, yang kekejamannya nyaris tak tertandingi dan yang dampaknya masih tetap terasa sampai sekarang. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari sejarahnya sendiri.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Tentang Tragedi 1965

Tahun 2005 merupakan tahun peringatan 40 tahun salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah Indonesia, yakni Tragedi 1965. Dalam tragedi itu ada tujuh orang perwira tinggi Angkatan Darat ditangkap dan dibunuh sebagai akibat operasi militer yang diadakan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan. Selanjutnya ada ratusan ribu rakyat Indonesia yang kemudian dalam tempo beberapa bulan tewas dibantai oleh sesama warga negara. Lebih lanjut, selama beberapa dekade berikut, ingatan akan Tragedi '65 terus diproduksi dan dikemas sedemikian rupa hingga menjadi alat efektif untuk melayani berbagai macam kepentingan kelompok.

Oleh karena itu dalam berbicara mengenai Tragedi '65 kita perlu memerinci dan menyoroti tiga unsur penting yang tampaknya tak terpisahkan namun sebenarnya berbeda. Ketiganya adalah: (a) operasi militer Letkol Untung dkk; (b) pembunuhan massal; (c) produksi ingatan atas tragedi tersebut.

### **1. Operasi militer Letkol Untung dkk**

Ketika orang berbicara mengenai peristiwa G30S tahun 1965 biasanya narasi yang berlaku adalah sebagai berikut. Pada tanggal 30 September 1965 melalui Pasukan Cakrabirawa, PKI telah melancarkan kudeta dengan jalan membunuh tokoh-tokoh tertinggi militer Indonesia di Jakarta. Begitu kejamnya orang-orang PKI itu sehingga enam orang Jendral plus seorang Kapten telah menjadi korban. [Dalam salah satu operasi penangkapan, seorang Jenderal berhasil lolos dari upaya itu, namun putrinya tewas secara mengenaskan di tangan PKI.] Kejadian PKI berlanjut di Lubang Buaya, dengan jalan menyayat-nyayat tubuh para Jendral. Sekelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi Gerwani bahkan memotong alat-alat vital para Jendral itu sambil menari-nari di tengah orgi yang disebut “pesta harum bunga”. Mata dari sebagian korban juga dicungkil dengan alat khusus.

Karena PKI dipandang sebagai satu-satunya “dalang” dari peristiwa keji tersebut, maka sudah selayaknya bahwa ratusan ribu anggota PKI di manapun mereka berada dibunuh secara beramai-ramai. Pantas pula peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 itu disebut “G30S/PKI” dengan tekanan pada “PKI”-nya karena PKI merupakan pelaku utama. Juga, pantas kalau istilah yang dipakai adalah istilah “Gestapu” (Gerakan September Tigapuluh). PKI juga layak ditumpas karena sebelumnya mereka telah dua kali memberontak (tahun 1926/27 dan 1948), dan ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis yang ateis.

Selanjutnya, siapapun yang telah berhasil “menyelamatkan” negara dan bangsa ini dari kaum komunis dengan jalan memimpin operasi pembantaian dan pemenjaraan massal atas mereka “berhak” menjadi pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Tanpa kepemimpinannya (dan orang-orang dekatnya) negeri ini akan terus-menerus berada di bawah rong-rongan kaum komunis yang licik.

Lepas dari apakah setuju atau tidak dengan narasi tersebut, kalau diteliti lebih lanjut akan muncul sejumlah “misteri” yang belum terjawab. Misalnya saja, PKI adalah organisasi sipil, tetapi mengapa tokoh-tokoh kunci dalam Gerakan Tigapuluh September (G30S) itu, yakni Letkol Untung, Kolonel Abdul Latief dan Brigjen Soepardjo, justru adalah para personil militer, khususnya TNI-Angkatan Darat? Perlu diingat, Angkatan Darat sendiri sejak Pemilu 1955 telah sengit berlawanan dengan PKI antara lain karena kemenangan PKI dan kekalahan IPKI dalam pemilu tersebut. [IPKI /Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai politik yang dipelopori oleh Angkatan Darat].

Dalam pledoinya, Kolonel Abdul Latief mengatakan bahwa sebelum dilaksanakannya operasi militer itu ia telah melapor ke Pangkostrad Mayor Jendral Soeharto (Latief: 2000, 157-158; 277-282). Pertanyaanya, mengapa Mayjen Soeharto tidak melaporkan rencana operasi militer itu ke atasannya, yakni

Jendral Ahmad Yani sebagai Panglima Angkatan Darat, atau ke Presiden Sukarno sebagai Panglima Tertinggi? Padahal ia tahu bahwa operasi militer itu adalah operasi besar dan akan segera berlangsung di Ibukota negara.

Sejauh mana sebenarnya keterlibatan pihak-pihak asing dalam peristiwa itu? Dalam konteks Perang Dingin tentu ada banyak negara yang senang atau khawatir dengan perkembangan politik di Indonesia waktu itu, terutama berkaitan dengan kecenderungan politik Presiden Sukarno, perkembangan PKI, serta dinamika militer (khususnya Angkatan Darat). Sangat mungkin bahwa sejumlah negara, entah itu dari blok kapitalis pimpinan AS atau dari blok komunis pimpinan Uni Soviet dan Cina, ikut berkepentingan atas terjadinya perubahan drastis dalam perpolitikan di Indonesia.

Satu-satunya *link* yang menghubungkan Gerakan 30 September dengan PKI adalah Ketua Biro Khusus PKI, yakni Sjam Kamaruzzaman alias Sjamsul Qamar Mubaidah. Oleh PKI ia ditugasi untuk "membina" sejumlah anggota TNI-AD agar mendukung PKI. Akan tetapi bagaimana dengan dugaan bahwa sebenarnya ia adalah sekaligus bertindak sebagai agen ganda yang juga bertugas memata-matai gerak PKI demi kepentingan militer? Kalau dugaan itu benar, bagaimana mungkin posisi Sjam yang masih meragukan itu bisa dijadikan bukti bahwa PKI merupakan satu-satunya "dalang" dari operasi militer G30S?

Selanjutnya, benarkah dalang dari operasi militer itu tunggal? Tidakkah mungkin bahwa dalang dari peristiwa itu bukan satu melainkan beberapa? Bisa jadi, operasi militer yang dilakukan oleh kelompok G30S itu merupakan muara dari berbagai kelompok kepentingan yang mengharapkan ada perubahan fundamental dalam perpolitikan Indonesia saat itu. Kelompok kepentingan itu bisa datang dari dalam maupun dari luar negeri.

Benarkah apa yang terjadi pada malam 30 September -1 Oktober 1965 itu merupakan "pemberontakan" sebagaimana selama ini dipahami? Penggunaan istilah ini perlu dicermati, karena secara etimologis istilah tersebut memiliki makna yang berbeda. Istilah pemberontakan dalam bahasa Inggris adalah *rebellion*, yang berarti "*open defiance of or resistance to an established government*" atau suatu tindakan menentang/resistensi secara terbuka terhadap pemerintah yang ada. Istilah itu perlu dibedakan dengan istilah *coup d'état* (kudeta), yang berarti perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara bersama sipil; dengan istilah *pronunciamento* yang berarti perebutan kekuasaan yang semua pelakunya adalah tentara; dan dengan istilah *putsch* yang pengertiannya adalah perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh sekelompok tentara (Asvi: 2005). Dari definisi-definisi itu kelihatan bahwa operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan itu lebih dekat dengan pengertian *putsch* daripada pemberontakan, karena tidak dimaksudkan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan hanya dilakukan oleh sekelompok tentara. Tetapi mengapa istilah yang dipakai selalu saja istilah "pemberontakan" dan bukan *putsch*? Itupun selalu dikaitkan dengan "pemberontakan-pemberontakan PKI" yang terjadi pada tahun 1926/27 dan 1948.



## 2. Pembunuhan Massal

Apapun jawab atas pertanyaan-pertanyaan di atas, telah diketahui bahwa dalam beberapa hari operasi militer yang diprakarsai oleh Letkol Untung dan kawan-kawan itu menjadi publik dan dalam waktu singkat, yakni tanggal 2 Oktober, dinyatakan *abortive* atau gagal. Koran PKI *Harian Rakjat* menyatakan dukungan kepada operasi militer Untung, tetapi siapa sebenarnya yang membuat pernyataan itu kini banyak diragukan. Letkol Untungpun melarikan diri ke luar Jakarta. Sejak itu berlangsung masa tenang, dalam arti tak terjadi pergolakan sosial yang berarti di masyarakat, meskipun suasana tegang muncul akibat pembunuhan para Jendral di Jakarta.

Pergolakan sosial baru terjadi sekitar tanggal 20-21 Oktober ditandai dengan pembunuhan massal yang berlangsung di Jawa Tengah, khususnya di daerah Klaten dan Boyolali. Dengan kata lain, pembunuhan massal itu baru terjadi sekitar tiga minggu setelah berlangsungnya operasi militer yang dilakukan oleh Letkol Untung beserta G30S-nya. Dan pembunuhan massal itupun terjadi secara bergelombang. Pada bulan Oktober pembunuhan terjadi di Jawa Tengah, selanjutnya pada bulan November di Jawa Timur, dan baru pada bulan Desember terjadi di Pulau Bali.

Pembunuhan itu sendiri berlangsung secara sungguh keji dan sungguh massal. Pada dinihari tanggal 23 Oktober 1965, misalnya, di Boyolali ada sekitar 250 orang yang dibunuh secara beramai-ramai, termasuk seorang guru SD dan istrinya yang dilempar ke sumur dalam keadaan hidup-hidup (Dommen: 1966, 8). Dalam keadaan kaotik, banyak warga keturunan Cina di Semarang, Yogyakarta dan Surakarta juga menjadi korban amuk massa. Tindakan kejam serupa terjadi di berbagai tempat lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan sejumlah lokasi di luar Jawa. Jumlah pasti tentang berapa korban yang tewas sulit ditentukan, tetapi umumnya berkisar antara setengah juta sampai satu juta jiwa (Crib 1990:8; Fein 1993:8). Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa dari segi skala kekejaman dan jumlahnya, pembantaian massal 1965 di Indonesia merupakan salah satu kekejian kemanusiaan di luar perang yang paling mengerikan.

Di sinilah terletak aspek tragedi dari apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Yakni bahwa tujuh perwira tinggi telah tewas dan dikorbankan oleh sesama warga negaranya, dan pembunuhan atas para perwira itu disusul oleh pembantaian ratusan ribu (kalau tak mau dikatakan jutaan) warga bangsa ini, juga oleh sesama warga bangsanya. Tak hanya berhenti di situ, pembantaian warga sipil dan militer itu dilanjutkan dengan pemenjaraan massal tanpa proses pengadilan. Hak-hak mereka sebagai warga negara dicabut oleh rekan-rekan sebangsa mereka. Hak-hak asasi mereka sebagai manusia terus dilanggar.

Berkaitan dengan pembunuhan massal itu tentu ada banyak hal yang bisa dipertanyakan. Antara lain adalah, mengapa pembunuhan massal itu tidak berlangsung secara serempak, melainkan bergelombang atau bergiliran? Adakah faktor-faktor tertentu yang menjadi pemicu bagi mulainya pembunuhan massal itu di masing-masing daerah? Bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan UUBH (Undang-undang Bagi Hasil) pada tahun 1964 terjadi ketegangan antara PKI dan para tuan tanah memang betul; tetapi mengapa

pembantaian di masing-masing daerah itu baru mulai terjadi pada tahun 1965 dan itupun pada bulan-bulan terakhir tahun tersebut?

### 3. Produksi dan Reproduksi Ingatan

Guna menjawab pertanyaan di atas, tak dapat dipungkiri bahwa tampaknya memang terdapat kesengajaan untuk mengarahkan atau bahkan memproduksi ingatan (*memory*) akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu menurut versi tertentu, untuk tujuan-tujuan tertentu pula. Misalnya saja penggunaan istilah "G30S/PKI". Meskipun sebenarnya dalang yang sebenarnya dari pembunuhan para Jendral itu belum jelas — bahkan ketika diketahui bahwa tokoh-tokoh kunci dari operasi militer itu adalah anggota militer — tetap saja digunakan istilah tersebut dengan maksud untuk memojokkan PKI. Bahkan penggunaan istilah "Gestapu" tampak sekali disengaja untuk mengasosiasikan operasi militer yang konon didalangi oleh PKI itu dengan tentara rahasia Jerman Gestapo yang terkenal kejamnya.

Produksi ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu sudah dimulai ketika pada dua pekan pertama bulan Oktober hampir semua koran disensor, dan hanya koran-koran tertentu yang boleh terbit, khususnya harian *Angkatan Bersenjata* dan *Berita Yudha*. Melalui koran-koran ini, dan melalui berbagai cerita yang beredar di masyarakat, dikisahkan mengenai berbagai kekejaman PKI di Halim Perdana Kusuma, seperti kisah "pesta harum bunga", kisah pemotongan alat-alat vital, serta kisah pencungkilan mata yang sampai sekarang belum terbukti itu. [Brigjen TNI dr Rubiono Kertapati yang mengetuai tim dokter yang melakukan autopsi atas para korban menyatakan dalam laporan *visum et repertum*-nya bahwa tak ada penyiksaan atas tubuh para korban].

Lepas dari apakah orang setuju dengan PKI atau tidak, faktanya adalah bahwa hanya kisah-kisah versi militer yang memojokkannya yang boleh beredar pada waktu itu. Akibatnya, rakyat menjadi mudah disulut dalam tindakan massal untuk menghabis para anggota PKI. Slogan yang beredar di masyarakat adalah "membunuh atau dibunuh"— persis slogan militer dalam perang. Pembunuhan massalpun terjadi, dan bagaikan Perang Baratayudha, bangsa Indonesia mandi darah saudara sendiri. Kemudian pembunuhan itu diikuti dengan pemenjaraan massal di Jawa maupun di luar Jawa, dan hampir semua tanpa didahului oleh proses pengadilan yang memadai.

Selanjutnya, ingatan akan apa yang terjadi pada tahun 1965 menurut versi tertentu itu tidak hanya diproduksi melainkan juga terus direproduksi, karena produksi dan reproduksi macam itu menguntungkan sejumlah pihak, baik dari kalangan militer maupun sipil. Pembuatan, pemutaran dan pemaksaan untuk menonton film yang berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI* pada tahun 1980-an hingga 1990-an hanyalah salah satu contoh. Dalam film yang berat sebelah dan bernada propaganda itu ditunjukkan kekejaman yang terjadi pada dinihari 1 Oktober 1965 yang menurut film itu dilakukan oleh PKI. Bahkan ketika pada tahun 1998 pemutaran film itu dihentikan, penggantinya adalah film *Bukan Sekedar Kenangan*, yang isinya juga tetap secara berat sebelah mengingatkan orang akan kekejaman PKI di masa lalu, dan akan hadirnya "bahaya laten" PKI dalam kehidupan sehari-hari (Schreiner: 2002).

Oleh kelompok kepentingan tertentu produksi dan reproduksi ingatan menurut versi tertentu atas tragedi '65 itu penting, karena hal itu dapat digunakan untuk menakut-nakuti masyarakat sehingga mudah dikontrol. Ia menjadi semacam menara panoptik-nya Foucault yang berfungsi sebagai sistem pengawasan yang dominan tapi tak mudah diduga. Pembubuhan kode "ET" (Eks Tapol) pada KTP milik orang-orang yang melawan kebijakan penguasa, misalnya, membuat orang-orang itu ketakutan dan berpikir dua kali kalau tak mau tunduk pada pemerintah.

#### 4. Konsekuensi lebih jauh

Lebih daripada sekedar membuat takutnya orang-orang yang KTP-nya dicap "ET", produksi dan reproduksi ingatan oleh penguasa yang bersifat sepihak juga memiliki konsekuensi lebih jauh bagi kehidupan bersama sebagai bangsa. Salah satunya ialah bahwa ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu menjadi kabur dan campur aduk. Masyarakat bahkan sulit membedakan antara (a) *operasi militer* yang dilakukan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan dengan (b) *pembunuhan massal* terhadap rakyat Indonesia oleh rakyat Indonesia, serta (c) berbagai upaya *produksi dan reproduksi ingatan* akan tahun 1965 yang dimanipulasi.

Kebiasaan memusatkan peringatan Tragedi '65 pada bulan September adalah contoh bagaimana masyarakat mengira bahwa "puncak" tragedi itu ada pada bulan September. Seakan-akan pada bulan tersebutlah tragedi itu terjadi. Padahal pembunuhan para Jendral itu terjadi pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober pula mulai terjadi pembantaian massal di Jawa Tengah, yang kemudian terus berlangsung pada bulan November, Desember, dst. [Sudah saatnya peringatan Tragedi '65 digeser ke bulan Oktober atau setelahnya, supaya kita bisa belajar untuk tidak saling membunuh].

Tidak lengkapnya ingatan masyarakat akan apa yang terjadi pada tahun 1965 itu juga membuat tidak adanya upaya hukum untuk secara serius mengadili para pemberi komando maupun para pelaku lapangan pembantaian massal itu. Mahmilub yang diadakan pada waktu itu terkesan lebih dimaksudkan untuk memosisikan tokoh-tokoh PKI dan para pelaku G30S sedemikian rupa agar mudah dijatuhi hukuman (mati). Selain itu juga dimaksudkan untuk menciptakan ketakutan terhadap mereka yang punya afiliasi dengan komunisme atau terhadap setiap gerakan kiri di negeri ini.

Konsekuensi praktisnya ialah, kalau membunuh ratusan ribu orang saja dibiarkan, orang akan merasa tidak apa-apa ketika melakukan tindakan-tindakan lain yang sebenarnya jahat, tetapi ia pandang "lebih ringan" daripada apa yang terjadi pada tahun 1965 itu. Misalnya tindakan melakukan penculikan dan pembunuhan atas beberapa mahasiswa, mencuri beberapa milyar rupiah uang negara, menjual sumber-sumber daya alam ke negara lain, atau memprovokasi konflik-konflik horizontal yang korbannya "hanya" beberapa ribu orang, dsb. Akibat selanjutnya adalah begitu banyaknya kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) berat yang tak pernah diselesaikan secara tuntas di pengadilan, entah itu berkaitan dengan masalah Maluku, Aceh, Poso, Tanjung Priok, Timor Leste, atau yang lain. Situasi demikian tentu tak dapat dibiarkan terus berlangsung. Untuk itu perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Jika tidak, keadaan akan

terus memburuk dan masa depan Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang adil dan demokratis akan semakin dipertanyakan.

## 5. Belajar dari Sejarah

Peringatan 40 tahun Tragedi '65 adalah momentum yang amat berharga. Peringatan ini bisa menjadi kesempatan bagi semua pihak, baik para sejarawan maupun masyarakat pada umumnya, untuk secara kritis meninjau kembali apa yang terjadi pada pertengahan 1960-an dengan segala kompleksitasnya. Lebih dari itu, kita diundang untuk belajar dari tragedi yang terjadi pada tahun 1965 itu, yang kekejamannya nyaris tak tertandingi dalam sejarah Indonesia dan yang dampaknya masih tetap mengganggu kehidupan bersama kita sebagai bangsa sampai sekarang.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk belajar dari sejarahnya sendiri.

**Baskara T. Wardaya SJ**, dosen Sejarah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://kompas.com/kompas-cetak/0509/30/opini/2083135.htm>

Jumat, 30 September 2005

## Kapan Peristiwa G30S Diungkap?

: Fajrimei A Gofar

Tepat 40 tahun lalu, peristiwa pembunuhan enam jenderal dan satu perwira militer terjadi. Peristiwa itu amat memengaruhi kehidupan bernegara.

Kini, sejarah itu tetap gelap. Siapa perencana aksi, tak diketahui pasti. Masing-masing pihak bertahan dengan versinya.

Menganggap Partai Komunis Indonesia (PKI) dalang tragedi itu. Akibatnya, terjadi pembunuhan dan penganiayaan ratusan ribu pengikut PKI dan mereka yang dianggap pengikut PKI.

Orang ditangkap tanpa prosedur hukum yang sah, memenuhi penjara-penjara dan tempat pengasingan. Keluarga yang diindikasikan sebagai pengikut PKI dibatasi hak-hak sosial dan politiknya. Mereka dituduh komunis, ateis dan tidak Pancasila.

## Pembenar

Dari benar-tidaknya PKI dalang pembunuhan para jenderal, yang patut ditanyakan adalah apa alasan pembenar melakukan pembantaian? Pembantaian terhadap pengikut PKI tidak beda dengan pembantaian Nazi terhadap Yahudi. Ia juga sebiadab pembunuhan terhadap Muslim Bosnia, pembantaian oleh Pol Pot, pembasmian suku Tutsi oleh suku Hutu di Rwanda, dan sebiadab aksi pengeboman di Indonesia. Karena itu, peristiwa ini amat melukai rasa kemanusiaan bagi manusia beradab.

Perspektif hak asasi manusia, pembunuhan dan pembantaian semacam itu merupakan kejahatan luar biasa. Pembunuhan berdasar etnis, agama, suku, maupun aliran politik tertentu digolongkan gross violation of human right tiap negara beradab wajib menghukum pelakunya.

Soeharto, sudah empat presiden memerintah, tetapi upaya mengungkap kebenaran peristiwa itu belum menunjukkan kemajuan, apalagi menyelidiki rangkaian pembunuhan dan pembantaian saat itu.

## **Pengungkapan**

Indonesia komunis dianggap bahaya laten sehingga segala upaya dilakukan untuk membasminya, mulai dari pendirian partai, penyebaran aliran, sampai mempelajari ajaran Marxisme/ Komunisme/Leninisme dianggap kejahatan, yaitu membahayakan ideologi negara. Komunisme dipahami sebagai aliran yang ateis sehingga harus dimusnahkan. Karena itu, komunisme dimaknai sebagai representasi semua jenis kejahatan yang paling jahat (Budiawan, 2004), tidak boleh dibiarkan tumbuh. Komunis dianggap pelanggar hak asasi manusia dan sudah selayaknya dihukum dan dibunuh.

Anggapan dan pemahaman seperti itu menjadi penghambat upaya pengungkapan Peristiwa G30S. Ketika di awal pemerintahannya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid pernah melontarkan ide untuk menarasi ulang Peristiwa G30S demi rekonsiliasi nasional.

Satu idenya adalah mencabut Tap MPRS No XXV/1965. Usulan itu ditanggapi berbagai tentangan karena akan membangkitkan trauma masa lalu. PKI yang dianggap pelanggar hak asasi manusia tidak boleh dimaafkan, bahkan diharamkan. Padahal, kebenaran dalam peristiwa itu belum terungkap gamblang.

Upaya pelarangan dan pengharaman ajaran komunis dan partai-partainya telah mengubur upaya pengungkapan rangkaian pembunuhan dan pembantaian ratusan ribu jiwa manusia. Padahal, rangkaian pembunuhan, pembantaian, dan penangkapan di luar prosedur hukum menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang kejam dan tidak beradab. Apakah hal ini akan dibiarkan terus?

Dan pengharaman faham Marxisme/Komunisme/ Leninisme adalah hal lain. Tidak sepatasnya pelarangan faham mengharamkan pengungkapan pelanggaran hak asasi manusia dalam Peristiwa G30S.

Negara yang mencita-citakan demokrasi, pengungkapan kebenaran sejarah dan pemulihan hak-hak korban Peristiwa G30S adalah suatu keharusan. Kapan peristiwa itu diungkap? Menunggu sampai semua saksi hidup meninggal dunia?

ini kita telah memiliki UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) meski komisi ini belum terbentuk dan berjalan efektif. Jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan negara sebagai negara yang demokratis dan beradab, pengungkapan kebenaran Peristiwa G30S harus menjadi agenda utama KKR. Tanpa itu, KKR akan kurang berarti sebagai mekanisme pengungkap kebenaran. Maka, selamanya bangsa ini akan dihantui masa lalu yang kejam.

A Gofar Peneliti di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jakarta

[http://jawapos.com/index.php?act=detail\\_c&id=191397](http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=191397)

Jumat, 30 Sept 2005,

## Selalu Teringat Kekejaman PKI

JAKARTA - Mengenang pemberontakan G 30 S/PKI 40 tahun silam, penyair kondang Taufiq Ismail langsung terbayang pada kekejaman mereka. Aktivis mahasiswa itu pernah dikejar-kejar kader PKI. Dia pun hidup berpindah-pindah dari satu rumah teman ke rumah sahabat lainnya.

"Ngeri membayangkan kejadian saat itu. Bagi PKI, membunuh lawan politik merupakan hal yang lumrah," aku Taufiq saat ditemui di sela-sela bedah buku Bedah Caesar Dewan Revolusi Indonesia G 30 S/PKI di Jakarta kemarin.

Untuk menghindari kejaran kader PKI, Taufiq yang saat itu tinggal di Bogor tak pernah tidur di rumah. Saat hidup nomaden itu, saku celana kanan diisi uang secukupnya, sebelah kiri diisi sarung bugis yang bisa dilipat kecil. Saku bajunya diisi sikat gigi. "Cukup lama saya berpindah-pindah tempat sampai situasi benar-benar aman," kata penyair Angkatan 66 kelahiran Bukittinggi, Sumbar itu.

Taufiq pantas menjadi incaran kader PKI. Alumnus FKHP-UI Bogor 1963 itu pernah menjadi ketua Senat FKHP-UI Bogor. Pada 1966, dia aktif dalam pergerakan melawan PKI. Dia juga ikut menandatangani Manifes Kebudayaan. Gara-gara itu, Taufiq dipecat sebagai dosen IPB dan gagal melanjutkan studi manajemen peternakan di Florida, USA, 1964.

"Makanya, saya prihatin terhadap orang yang mulai melupakan kekejaman PKI," tegas penyair yang melahirkan puisi berjudul Malu (aku) Jadi Orang Indonesia itu.

Saksi mata G 30 S/PKI tersebut menengarai, sampai saat ini, PKI terus melakukan penyusupan, infiltrasi ke semua bidang kehidupan. Salah satunya, penghapusan sejarah G 30 S/PKI di kurikulum SMU. "Saya kira kasus penghilangan sejarah PKI dari kurikulum bukan suatu kealpaan. Tapi, sebagai wujud adanya penyusupan meski sulit dilacak. Untung DPR bertindak cepat," terangnya.

Seorang bekas pentolan PKI pernah berucap kepada Taufiq, di permukaan, aktivitas bekas PKI dan simpatisan bisa dibaca. Tapi, di bawah tanah, mereka sendiri tidak tahu. "Bayangkan, mereka (pentolan PKI) saja tidak tahu, apalagi kita," tuturnya.

Karena itu, Taufiq mengingatkan agar bangsa ini terus belajar dan tidak melupakan sejarah. Sebab, pemberontakan G 30 S PKI merupakan sejarah yang tak bisa dilupakan. Namun, Taufiq tidak setuju mengenang kekejaman PKI lewat cara-cara bombastis seperti zaman Orba. "Ya lewat kajian ilmiah dan diskusi seperti ini," ungkapnyanya.

Dia minta agar masyarakat lebih waspada. "Kekacauan yang banyak timbul sekarang ini, mudah-mudahan bukanlah potongan skenario PKI yang ingin mengambil keuntungan."

Melihat pengalaman, lanjut Taufiq, PKI adalah kelompok dengan ideologi yang sangat berbahaya. PKI selalu ingin merebut kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. "Kondisi sekarang hampir mirip suasana menjelang Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu) tahun 1964-1965 yang didalangi PKI," tegasnya.

Sekarang, katanya, PKI berusaha mengubah persepsi bahwa merekalah yang menjadi korban pada 1965. Tapi, mereka tidak sadar bahwa itu hanyalah akibat aksi yang mereka perbuat pada 1948 di Madiun dan 1965 saat berusaha merebut kekuasaan pemerintah Indonesia.

Dua kejadian itu menimbulkan rantai dendam yang sangat panjang pada dua kelompok, yakni korban PKI dan eks PKI. "Namun, kita tidak perlu mempermasalahkannya. Daripada terus-menerus bertengkar, kita sebaiknya berdamai. Namun, damai bukan berarti kita tidak waspada," ingatnya.

Mayjen TNI (pur) Syamsudin dari Komnas HAM menambahkan, TNI selalu melakukan pengawasan kepada gerakan PKI. Malah, setiap anggota TNI dibekali sebuah buku saku yang menceritakan kekejaman PKI sehingga anggota TNI tidak lengah.

Salahuddin Wahid yang juga hadir dalam acara tersebut mengakui, tidak mudah menentukan dengan pasti siapa di balik G 30 S. Pada pengantarnya dalam buku tersebut, dia malah mengungkapkan adanya teka-teki. Sebab, dia memperoleh paper yang tidak dipublikasikan pada 1971 dengan hipotesis yang berbeda.

Benedict R. Anderson dan Ruth T. McVey dari Universitas Cornell yang menulis buku tersebut mengemukakan, G 30 S adalah masalah internal Angkatan Darat dan tidak ada kaitannya dengan PKI. Kolonel-kolonel dari Divisi AD Diponegoro Jawa Tengah merasa tidak puas dan frustrasi terhadap kepemimpinan tentara yang rusak oleh kemewahan di Jakarta. Keterlibatan PKI adalah suatu kecelakaan.

Meski demikian, adik Gus Dur itu sepakat perlunya rekonsiliasi antara mantan tahanan politik 1965 dan keluarganya dengan masyarakat. Gus Sholah - panggilan Salahuddin wahid- membagi dua rekonsiliasi, yakni, rekonsiliasi kultural dan rekonsiliasi yuridis. Rekonsiliasi kultural berarti, harus ada interaksi antara keluarga mantan tapol dan masyarakat. "Jangan kita kucilkan mereka sebagai orang lain," pintanya.

Rekonsiliasi yuridis berarti, penegakan hukum bagi korban stigmatisasi (cap) PKI melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). "Kalau sudah dibentuk KKR, silakan mengadu," ujarnya. (bah/die/yog)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## **KKP-HAM 65 Sumut menuntut pertanggungjawaban dan pengakuan negara atas peristiwa pembantaian massal.**

Hari ini korban 65 Sumut yang tergabung dalam Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut (KKP-HAM 65) melakukan aksinya di Gedung DPRD

Sumut. Sekitar 700 an orang dari berbagai wilayah kabupaten memadati gedung DPRD Sumut, diantaranya berasal dari kabupaten Toba Samosir, Tanah Karo, Sidikalang, Langkat, Binjai, Simalungun, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Kodya Medan. Dalam beberapa orasinya yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan daerah menuntut agar Suharto diadili hidup atau mati karena kekejaman rezim otoriter fasisme militeristik orde baru telah lama menyengsarakan korban dan berpuluh-puluh tahun telah menjalani masa-masa pahit dalam hidupnya.

Berikut pernyataan sikap KKP HAM 65 Sumut.

#### PERNYATAAN SIKAP

##### KOMITE AKSI KORBAN PELANGGARAN HAM PERISTIWA 1965 SUMUT (KKP-HAM '65)

Kepada Yth

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua MPR Republik Indonesia di Jakarta
3. DPR Republik Indonesia di Jakarta
4. Mahkamah Konstitusi di Jakarta
5. Komnas HAM di Jakarta
6. DPRD Sumut di Medan
7. Sumut di Medan

Di,-  
Tempat

Pada hari ini tanggal 30 September 2005, genap sudah 40 tahun kita mengenang kembali tragedy 1965 sebagai tragedy kemanusiaan terbesar di Indonesia. Peringatan ini tidak bermaksud untuk mengungkit-ungkit dendam, membuka luka-luka lama, melampiaskan kemarahan, mengumbar hujatan, menyebar kebencian atau mengipasi permusuhan melainkan untuk mengajak bangsa kita untuk menjunjung tinggi-tinggi perikemanusiaan, memupuk rasa persaudaraan, menghormati perasaan keadilan, menghormati hukum dan hak asasi manusia demi kebaikan bersama seluruh bangsa

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi setelah Suharto melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah dibawah Presiden Sukarno. Selama 32 tahun rezim Soeharto berkuasa, masyarakat telah dikelabui dengan informasi dan sejarah yang melegitimasi tindakan kebiadaban rezim orde baru terutama atas terjadinya pembantaian sebagaimana pengakuan Sarwo Edhie Wibowo “sebanyak tiga juta orang terbunuh dalam peristiwa 1965”. Terjadinya penangkapan, penahanan dan wajib lapor terhadap puluhan ribu orang selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tanpa pernah menjalani proses hukum dan peradilan



dengan tuduhan “terlibat PKI”. Jutaan rakyat kehilangan harta benda karena dirampas, anak istri diperkosa, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah (PNS), TNI, BUMN, perkebunan tanpa pernah diberikan pesangon, pemberangusan hak untuk berkarya, tidak dapat melanjutkan sekolah karena tidak bersih lingkungan dan diskriminasi yang terus terjadi hingga kini.

Stigma PKI yang diberikan oleh rezim orde baru dengan memberi label pada KTP sebagai OT/ET dan anak keturunan dinyatakan tidak bersih lingkungan membuat anak - keturunan korban sulit mendapatkan pekerjaan dan kehilangan hak untuk menjadi Pegawai Negeri, TNI dan Polri dan membuat korban peristiwa 1965 menjadi warga kelas dua (marginalisasi). Kehidupan para korban sejak tahun 1965 seperti mati suri, karena walaupun kami hidup tapi negara tidak memberikan kami ruang untuk hidup layak dan selalu didiskriminasi lewat berbagai kebijakan yang dibuat oleh negara. Hak-hak sipil & politik serta hak-hak ekonomi dan sosial budaya yang dilindungi oleh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan UUD '45 tidak dapat kami nikmati karena tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh Negara. Ironisnya, malah Negara mengeluarkan berbagai peraturan yang mencabut hak-hak dasar kami sebagai warga Negara dengan alasan “terlibat langsung atau tidak langsung dalam peristiwa 1965” tanpa pernah secara terbuka lewat hukum membuktikan keterlibatan para korban 1965.

Walaupun peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah berlalu empat puluh tahun yang lalu dan dikenal sebagai tragedi terbesar di Indonesia pasca kemerdekaan namun upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan ini masih sangat minim, padahal akibat peristiwa ini puluhan juta rakyat mengalami diskriminasi dan dianggap sebagai penghianat bangsa karena tuduhan terlibat Partai Komunis Indonesia oleh rezim otoriter Soeharto.

Pergantian rejim yang berkuasa di era transisi demokrasi belum memiliki kemauan politik untuk melakukan pelurusan sejarah atas tragedi ini sehingga pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap jutaan rakyat korban tragedi '65 hingga kini masih terabaikan. Bahkan pemerintah Indonesia mempolitisir tuntutan para korban tragedi politik 1965, dengan menggunakan UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang isi dan hakekatnya melegitimasi stigma yang dibangun oleh rejim otoriter Soeharto selama 32 tahun berkuasa.

Politik Indonesia masih condong kepada kepentingan elit politik dan belum bergerak kepada kepentingan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dari UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang menjadikan hak-hak korban “barter” dengan pemberian maaf kepada pelaku. Pemberian amnesti oleh negara menjadi penentu terhadap pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban, dan ini memperlihatkan negara lebih melindungi kepentingan para pelaku pelanggaran HAM bukan kepentingan korban yang sudah lama menderita.

Peristiwa 1965 hendaknya memberikan pelajaran berharga bagi bangsa kita untuk membangun relasi yang lebih baik antara warga bangsa yang saat ini tersekat-sekat dengan prasangka dan kebencian. Fragmentasi sosial yang saat ini kita rasakan adalah buah dari kebencian dan prasangka yang terus menerus direproduksi. Amnesia massal akibat versi tunggal sejarah yang terus menerus

dipelihara sudah saatnya dihentikan agar bangsa kita kembali bangkit menjadi bangsa yang beradab dimana kekerasan tidak lagi mendapatkan tempat yang penting dalam budaya bangsa. Marilah kita bangun kembali bangsa ini menjadi bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi dan keadilan sebagai tonggak nilai budaya bangsa dimasa mendatang.

Dengan alasan-alasan diatas maka kami KOMITE AKSI KORBAN PELANGGARAN HAM PERISTIWA 1965 (KKP-HAM '65) dengan ini menyatakan sikap :

1. Menuntut pertanggungjawaban dan pengakuan Negara atas terjadinya peristiwa pembantaian massal peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan meminta maaf kepada korban maupun keluarganya ;
2. Adili Suharto selaku pihak yang sangat bertanggung jawab atas pembantaian jutaan rakyat Indonesia tahun 1965-1968 ;
3. Lakukan pelurusan sejarah yang sudah diputar balikkan selama 40 tahun dan menarik seluruh dokumen, arsip, buku, film, dll yang melakukan pembodohan terhadap rakyat;
4. Memberikan rehabilitasi umum kepada seluruh korban pelanggaran HAM berat masa lalu ;
5. Mencabut semua produk undang-undang yang bersifat diskriminatif dan mengebiri hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial dan budaya para korban persitwa 1965 ;

Medan, 30 September 2005

KOMITE AKSI KORBAN PELANGGARAN HAM PERISTIWA 1965 (KKP-HAM '65)

Koordinator,

BELMAN SIBORO GINTING \* FARID HISYAM \* YUSUF GINTING

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

Kompas, Jumat 30 September 2005

## Pengalaman Etis?

: GADIS ARIVIA

Hidup beretika tidaklah sulit dipahami. Keputusan etis berkait erat dengan konsep-konsep seperti "keadilan", "hak", "kewajiban", "kebaikan", dan "kebenaran". Namun, manusia lalu mempersulit konsep-konsep ini dengan berbagai argumentasi yang "tidak adil", "tidak berhak", "tidak baik", dan "tidak benar".

Manusia dapat melakukan keputusan etis yang membutuhkan kepekaan akan bahasa? Kepekaan menangkap getaran, ekspresi, dan bahasa "lain" yang muncul. Bahasa "lain" yang diutarakan dari mereka yang tertekan, tertipu, tersakiti membutuhkan perangkat ekstra untuk mendengarkan. Apa itu?

Heidegger dalam *Letter on Humanism* (1946) menggarisbawahi keterbukaan (atau responsiveness). Tiap bahasa yang digunakan membentuk, memberi, memasok cara berpikir, melihat, menjadi diri yang terus dihadapkan berbagai bahasa yang mempunyai masing-masing "kekuasaan" di belakangnya.

Dengan keterbukaan, segala bentuk kekuasaan dapat diperiksa ulang, dipertanyakan ulang, direnegosiasi hingga akhirnya pengalaman etis tercapai. Hal inilah yang saya lakukan dengan membuka hati guna mendengarkan kisah-kisah pilu para ibu yang pernah dipenjara tanpa sebab. Simak film dokumenter *Kado untuk Ibu* (Syarikat Indonesia, 2005).

### **Yang dibisukan**

Tahun 1965, Ibu Sumilah baru berusia 14 tahun, saat diambil dari keluarganya, ia diangkat dengan truk berisi 48 orang ke penjara Wirogunan. Ia lalu dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Plantungan di pegunungan Dieng, Jawa Tengah, dan tinggal di sana hingga tahun 1971.

Dibebaskan karena ada kekeliruan. Tanpa pernyataan maaf, tanpa ada rehabilitasi nama, stigma eks tapol menghantui dirinya seumur hidup. Ibu Sumilah tidak sendirian. Juga ada ibu Fatmiati yang disiksa karena tidak mengaku sebagai anggota Gerwani. Ia menolak untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan. Ia pun dijebloskan ke LP Plantungan, tempat yang pernah dipakai untuk kamp isolasi penyakit lepra di tahun 1957.

Dengan ibu Putmainah. Ia ditangkap karena anggota Gerwani. Dikatakan, organisasi ini bertujuan memberdayakan perempuan Indonesia dengan menyelenggarakan aneka kegiatan pendidikan tentang cara mengasuh anak, pengetahuan gizi, dan hak-hak perempuan. Hak-hak perempuan yang dibela adalah yang telah diabaikan para suami yang meninggalkan mereka. Memberi penguatan sesama perempuan dan mencari peluang usaha untuk menyambung ekonomi keluarga.

Organisasi ini tidak beda dengan PKK, yang memerhatikan kesejahteraan keluarga. Entah mengapa, mereka dituduh melakukan Operasi Harum Bunga terlibat pembunuhan para jenderal. Bahkan, di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya anggota Gerwani digambarkan menari-nari di atas penyiksaan para jenderal. Akhirnya, anggota Gerwani diburu, dipenjara, dan dibunuh.

### **Kekerasan negara**

Dan pemerkosaan adalah bentuk paling populer kekerasan negara terhadap perempuan. Kekerasan negara didefinisikan sebagai bentuk agresivitas aparat atau pengelola negara atas masyarakat sipil. Mengapa terhadap perempuan pelecehan dan pemerkosaan merupakan praktik ampuh? Pelecehan dan pemerkosaan dianggap sulit untuk dituntut apalagi bila digunakan saat negara dalam keadaan darurat.

Keadaan seperti itu, pelecehan dan pemerkosaan dianggap eksekusi sehingga dinilai wajar. Masalah lain, sulitnya mengungkap kasus-kasus itu karena korban risih membicarakannya secara publik. Bagi militer, situasi ini amat menguntungkan-

kan. Bila masyarakat menganggapnya sebagai wilayah privat, berarti paling jauh dihubungkan dengan penyimpangan tingkah laku individu, cukup dihukum secara personal.

Special Rapporteur menegaskan, kekerasan terhadap perempuan dipakai sebagai alat represi politik seperti layaknya senjata perang. Target pelecehan dan pemerkosaan ditujukan kepada aktivis perempuan, anggota kelompok oposisi, atau keluarga yang tergolong kelompok yang dianggap radikal dan membahayakan stabilitas negara.

Yang terjadi pada Sumarmiyati di Plantungan. Ia digunduli, ditelanjangi, di-"gerayang", dan dipaksa mencium kelamin para aparat.

### **Bangsa yang terluka**

Terjadi pada para korban di Plantungan pada tahun 1965- 1966 merupakan tragedi yang menimpa suatu bangsa. Ingatan kolektif ini tidak mudah dilupakan, meninggalkan kepedihan mendalam baik bagi generasi masa lalu maupun generasi ke depan.

Ricoeur (2000) menegaskan, mengingat menjadi tugas yang harus dipenuhi. Menghidupkan ingatan sosial bukan untuk menaruh dendam dan benci pada kebrutalan kelompok tertentu di masa lalu, tetapi lebih membangun proyek perdamaian dan berusaha tidak mengulangi kekeliruan di masa lalu.

Bangsa hanya dapat dipulihkan bila terjadi keterbukaan untuk menerima bahasa-bahasa "lain" yang telah lama dibungkam. Keterbukaan menghasilkan kehidupan lebih jujur dan adil guna membentuk pengalaman etis bersama.

Arivia Dosen filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya-UI; Pendiri Jurnal Perempuan

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

[http://jawapos.com/index.php?act=detail\\_c&id=191528](http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=191528)

Sabtu, 01 Okt 2005,

### **Ceko Bongkar Konspirasi di Balik Kudeta PKI 1965**

#### **Minta Habisi dengan Sekali Pukul**

447 halaman Kudeta 1 Oktober 1965 yang ditulis ilmuwan Ceko, Victor Miroslav Vic, mengungkap detail teori konspirasi di balik kudeta berdarah PKI 40 tahun lalu. Terutama tentang peran Ketua Partai Komunis China Mao Zedong.

Jakarta

Pesawat kepresidenan Jetstar yang membawa Presiden Soekarno dan 80 anggota rombongan, termasuk Ketua CC (Committee Central) PKI Dipo Nusantara (D.N.) Aidit, meninggalkan tanah air menuju Aljazair guna menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) II. Pesawat transit di Kairo, Mesir, 26 Juni 1965.

Ada kabar bahwa Presiden Aljazair Ben Bella dikudeta. KAA pun ditunda hingga 5 November 1965. Bung Karno kemudian memutuskan pulang ke tanah air. Sedangkan rombongan kecil yang dipimpin Aidit melawat ke Peking (Beijing), China. Salah satu di antara mereka adalah Nyono.

Di tanah air, penyakit ginjal Bung Karno kambuh lagi. Tim dokter China yang merawat Bung Karno sejak 1960 mendiagnosis bahwa kali ini penyakitnya makin gawat. Bahkan, tim dokter China itu memperkirakan, sewaktu-waktu jika penyakit Bung Karno kambuh lagi nyawanya tak tertolong. Keadaan ini makin mematangkan rencana PKI mengambil alih kekuasaan dari tangan Bung Karno. Yakni, dengan menyingkirkan rival utamanya lebih dahulu: para jenderal TNI AD.

Kesehatan Bung Karno itu terlihat dari perintah pemanggilan mendadak Aidit dan Nyono oleh sang pemimpin besar revolusi itu lewat Menlu Soebandrio. Keduanya diminta segera pulang ke tanah air. Lewat kawat, Aidit menjawab akan pulang pada 3 Agustus 1965.

4 Agustus 1965, kesehatan Bung Karno terus memburuk. Dia tiba-tiba muntah-muntah sebanyak 11 kali, ditambah hilang kesadaran empat kali. Dokter kepresidenan, Dr Mahar Mardjono, pun mendadak dipanggil ke kamar Bung Karno di Istana Negara. Saat itu sudah ada tim dokter China.

Diduga keras ternyata diagnosis dokter China tadi berkaitan erat dengan rencana PKI mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Rencana ini muncul setelah Aidit bertemu Mao Tze Tung (Mao Zedong) di China. Sebab, posisi Bung Karno sebagai presiden sekaligus panglima tertinggi Angkatan Bersenjata sangat menentukan arah politik Indonesia.

Sampai Bung Karno mangkat, sudah bisa ditebak akan terjadi perebutan kekuasaan antara PKI dan TNI-AD. Saling mendahului dan saling jegal antara kekuatan saat itu sangat mewarnai politik Indonesia 1965. "Ternyata diagnosis tim dokter China terbukti keliru. Sebab, Bung Karno baru meninggal tujuh tahun kemudian," ungkap Ketua LIPI Taufik Abdulah dalam bedah buku di Yayasan Obor yang menerbitkan buku karya Miroslav kemarin.

Lain yang menguatkan bahwa PKI akan mengambil alih kekuasaan di Indonesia terekam dalam pembicaraan Ketua Partai Komunis China Mao Tze Tung dan Ketua CC PKI DP Aidit yang menemuinya Zhongnanghai, sebuah perkampungan dalam dinding-dinding kota terlarang di China.

*"Kamu harus mengambil tindakan cepat,"* kata Mao kepada Aidit.

*"Saya khawatir AD akan menjadi penghalang,"* keluh Aidit ragu-ragu.

*"Baiklah, lakukan apa yang saya nasihatkan kepadamu; habisi semua jenderal dan perwira reaksioner itu dalam sekali pukul. Angkatan Darat akan menjadi seekor naga yang tidak berkepala dan akan mengikutimu,"* ungkap Mao berapi-api.

*"Itu berarti membunuh beratus-ratus perwira,"* tanya Aidit lagi.

*"Di Shensi Utara, saya membunuh lebih dari 20 ribu orang kader dalam sekali pukul saja," tukas Mao.*

Menemui Mao, Aidit disertai dua dokter China, Dr Wang Hsing Te dan Dr Tan Min Hsuen (salah satu di antaranya diyakini Miroslav sebagai perwira intelijen China) terbang ke Jakarta guna mendeteksi kesehatan Bung Karno. Pada 7 Agustus 1965, mereka menghadap Bung Karno di Istana Merdeka.

8 Agustus 1965, Aidit kembali menemui Bung Karno di Istana Bogor untuk berbicara empat mata. Menurut Miroslav, saat bertemu secara pribadi dengan Bung Karno itulah, Aidit melaporkan hasil pembicaraannya dengan Mao Tze Tung. Misalnya, advis untuk menyingkirkan jenderal AD yang tidak loyal kepada presiden (baca dewan jenderal sebutan PKI bagi jenderal AD).

Sadar benar tidak mudah menyingkirkan para jenderal AD tanpa payung kekuasaan Soekarno. Kedua, membentuk Kabinet Gotong Royong dengan PKI sebagai pemegang kendali (dengan memasukkan para kadernya). Ketiga, setelah semua misi itu sukses, diam-diam PKI menyiapkan strategi untuk menyingkirkan Bung Karno secara halus. Caranya, China menawari Bung Karno untuk istirahat panjang di sebuah vila dekat Danau Angsa, China, guna mengobati penyakitnya.

*"Itu sebenarnya cara licik Aidit dan Mao untuk menyingkirkan Bung Karno dari kekuasaannya setelah melapangkan jalan PKI mengambil alih kekuasaan,"* unkap Miroslav.

Itu pernah diterapkan Mao kepada Raja Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk. Setelah China berhasil mengomuniskan Kamboja lewat Pol Pot. Giliran Jenderal Lon Nol mengudeta Sihanouk saat berkunjung ke Moskow. Saat Kremlin (baca Uni Sovyet) menolak memberikan suaka kepada Sihanouk, China dengan senang hati menawarkan tempat tinggal dan perawatan yang wah bagi Sihanouk. "Istrinya, Princess Monica, sangat menikmati pemberian China tadi," tambah Miroslav.

Hasil rekonstruksi kejadian yang dibuat Miroslav, Bung Karno tampaknya sejalan dengan rencana Mao. Terbukti, lanjut Miroslav, Bung Karno memanggil Brigjen Subur, Komandan Resimen Tjkrabhirawa, dan Letkol Untung ke kamar tidurnya untuk bertanya pada mereka.

*"Apakah dia (Untung) cukup berani menangkap para jenderal yang tidak loyal kepada presiden dan menentang kebijakannya?"* tanya Bung Karno.

*"Saya akan melakukan kalau diperintahkan,"* jawab Untung saat itu.

Ketua LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Taufik Abdullah mengatakan, kevalidan sejarah seperti itu memang perlu diuji. Tapi, boleh jadi dugaan keras Miroslav tersebut ada benarnya.

Membuat tamsil, ada sepasang pengantin masuk rumah. Saat keluar wajahnya terlihat lusuh. Orang bisa menduga, pasangan pengantin itu baru melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri. Tapi, tidak ada yang tahu persis. "Bisa juga

wajah yang tampak loyo itu disebabkan mereka habis membersihkan rumah," ujar Taufik.

"Miroslav pantas menduga kuat bahwa pembicaraan Aidit dan Bung Karno di kamar tidurnya adalah soal isi pertemuan Aidit dengan Mao," tambah Taufik.

Tze Tung, lanjut Miroslav, semula ingin menggandeng Bung Karno untuk menancapkan kekuasaan PKI di Indonesia. Tapi, dalam perkembangan selanjutnya, Bung Karno dinilai bukan sosok pemimpin yang cocok. Dia dianggap terlalu sembrono dan pembawaannya meledak-ledak. Tapi, Mao tetap membutuhkan Bung Karno untuk mengantarkan PKI berkuasa di Indonesia.

Pembawaan yang meledak-ledak tersebut pernah dilaporkan Menlu China Marsekal Chen Yi saat menemui Bung Karno, 3 Desember 1964. Ketika itu, Bung Karno menuntut China agar membagi teknologi nuklirnya dengan Indonesia. Bung Karno juga mendesak uji nuklir dilakukan di wilayah Indonesia. Tujuannya, memberi dampak psikologis kepada kawan dan lawan Indonesia. Tapi, Chen Yi menolak karena itu terlalu berbahaya. Bung Karno kontan naik pitam. "Sambil menggebrak meja, Bung Karno berdiri menudingkan telunjuknya ke arah Chen Yi," ungkap Miroslav.

Keragu-raguan Mao Tze Tung tersebut, akhirnya China menunda pengiriman 100 ribu pucuk senjata untuk angkatan kelima (baca buruh dan tani) seperti dijanjikan sebelumnya. Sebagai gantinya, Mao hanya mengirimkan 30 ribu pucuk senjata lewat beberapa kapal guna menghadapi jenderal AD yang reaksioner. Tapi, itu tidak gratis. Sebagai imbalannya, Mao minta presiden melapangkan jalan PKI menguasai Indonesia. "Soal perjanjian rahasia itu terungkap dalam surat Aidit 10 November 1965 yang dikirim ke Bung Karno," terang Miroslav.

Intelijen yang dibangun PKI terus mengintesifkan pembicaraan dengan penguasa komunis China guna mempersiapkan pengambilalihan kekuasaan di Indonesia. Kontak Aidit-Mao maupun Soebandrio-Chen Yi makin intensif menjelang pengambilalihan yang ternyata gagal itu.

Sejarah pun mencatat: pada 30 September 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI-AD oleh pasukan Cakrabirawa. Mereka lalu dibawa ke Lubang Buaya untuk dimakamkan.

Itu sekaligus pukulan balik bagi PKI. Pangkostrad Mayjen Soeharto berhasil mengorganisasikan berbagai kekuatan anti-PKI untuk memukul balik lawannya. Soeharto akhirnya menjadi penguasa Orba selama 30 tahun lebih. (\*)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://kompas.com/kompas-cetak/0510/01/daerah/2093045.htm>

Sabtu, 01 Oktober 2005

## Korban Pelanggaran HAM 1965 Tuntut Pencabutan UU KKR

Kompas - Ratusan korban pelanggaran hak asasi manusia pasca-peristiwa G30S/ PKI tahun 1965 se-Sumatera Utara menuntut pencabutan Undang-

Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Korban yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPRD Sumut, Jumat (30/9), itu juga menuntut pencabutan semua produk hukum yang diskriminatif terhadap hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia.

Bekas tahanan politik dari berbagai daerah di Sumut, seperti Simalungun, Dairi, Asahan hingga Medan, ini meminta pertanggungjawaban negara atas terjadinya peristiwa pembantaian massal setelah peristiwa G30S 1965. „Kami hadir di sini bukan untuk menghidupkan komunisme, apalagi membangkitkan Partai Komunis Indonesia. Kami hanya ingin hak-hak kami sebagai warga negara dikembalikan,“ ujar salah seorang demonstran.

Menilai UU KKR tidak berpihak kepada korban. Mereka menuntut UU tersebut dicabut dan diganti dengan UU yang lebih memihak kepada korban. „Isi UU tersebut hakikatnya melegitimasi stigma yang dibangun rezim otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. UU tersebut menjadikan hak-hak korban dibarter dengan pemberian maaf kepada para pelaku. Negara lebih melindungi kepentingan para pelaku pelanggaran, bukan kepentingan korban yang sudah lama menderita,“ ujar Saurma, aktivis Bakumsu, yang mendampingi korban.

Pengunjuk rasa satu per satu juga menuturkan pengalamannya selama menjadi tahanan politik tanpa sekali pun diadili di pengadilan resmi. „Saya ditangkap dan dibawa ke penjara di Pematang Siantar. Tiga bulan saya mendekam di sana dan diperlakukan sangat tidak manusiawi. Kami harus makan nasi dicampur pasir. Tidak sekali pun saya dibawa ke pengadilan,“ ujar Galiam Sitohang (67), bekas anggota Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB).

Menuturkan, beberapa hari setelah meletus peristiwa G30S di Jakarta, dia yang bekerja di Pematang Siantar ditangkap tentara karena keanggotaannya di SBKB. Galiam bahkan tidak tahu jika SBKB tersebut berafiliasi dengan PKI. „Mana kami tahu kalau SBKB itu bagian dari PKI. Saat itu kami bekerja saja dan tidak tahu politik,“ ujar dia.

Berbulan-bulan ditahan tanpa pengadilan, membuat dia harus tercerai-berai dengan keluarganya di kampung, Mariah Bahjambi, Kabupaten Simalungun. „Saat ditahan keluarga saya tinggal di desa. Setelah tiga bulan keluar dari penjara, penderitaan kami juga tidak berakhir. Karena tidak mungkin bekerja lagi, kami terpaksa ikut kerja paksa di daerah Kisaran, hanya untuk bisa bertahan hidup“ tutur Galiam.

40 tahun setelah peristiwa tragis tersebut, dia bersama rekan-rekannya kembali memperjuangkan hak-haknya. Mereka yang tergabung dalam Komite Aksi Korban Pelanggaran HAM Peristiwa 1965 Sumut ini belum diperlakukan layak. (BIL)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*



[http://jawapos.com/index.php?act=detail\\_c&id=191521](http://jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=191521)

Sabtu, 01 Okt 2005,

## Ajak Memaafkan, Bukan Melupakan

Amelia Yani tentang Gerakan 30 September

JAKARTA - Amelia Yani, putri sulung Jenderal Ahmad Yani yang menjadi korban Gerakan 30 September (G30S), kembali menyerukan agar masyarakat memaafkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Tuhan saja bisa memaafkan. Mengapa kita tidak bisa?" ujarnya dalam diskusi Komunisme dan Masyarakat Beragama di Indonesia yang diadakan MUI di Masjid Istiqlal kemarin.

Calon bupati Purworejo yang gagal dalam pilkada lalu itu mengajak agar masyarakat yang menjadi korban kekejaman PKI pada masa lalu menghapus dendam politiknya terhadap mantan anggota PKI. Hanya, dia mengaku usaha itu memang tidak gampang.

"Untuk bisa hidup normal dengan mantan anggota PKI, memang butuh waktu lama. Begitu juga dengan sebagian saudara saya," ungkap Amelia yang ayahnya dibunuh pasukan elite Cakrabirawa itu.

Dia mengingatkan, keluarga anggota PKI pada masa lalu mengalami nasib yang sama. Bahkan, kondisi keluarga para anak-cucu eks PKI jauh lebih menderita. "Kita bukan pelaku (sejarah langsung peristiwa itu), sehingga jangan larut dalam dendam ini," tegasnya.

Menurut dia, anak-anak mantan anggota PKI meminta kesetaraan dan dihormati hak asasinya. Sebab, selama ini mereka selalu dikucilkan. "Saya dekat dan bisa memaafkan mereka sejak kecil. Bahkan, ibu saya sering memperlihatkan rasa kasihan kepada mereka. Contohnya, memberi makan para tahanan politik," ungkapnya.

Amelia juga menyatakan sering mengunjungi anak-anak mantan tokoh PKI seperti Ilham Aidit (anak D.N. Aidit). Namun, yang dilakukan terhadap teman-teman yang berbeda ideologi tersebut hanya memaafkan, bukan melupakan sejarah dan peristiwa itu. Makanya, dia bersama keluarga Pahlawan Revolusi membuat buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam.

Buku tersebut mengungkapkan kenangan dan perasaan anak-anak korban kekejaman PKI saat melihat kejadian tersebut di depan matanya.

Selain Amelia, Mohammad Qodari dan Fadli Zon turut menjadi pembicara. Kedua tokoh muda tersebut mengungkapkan pandangannya terhadap G 30 S. Menurut Qodari, kejadian itu sudah seharusnya menjadi pelajaran. "Tapi, jangan menyisakan dendam," katanya.

Fadli Zon lebih menyoroti upaya keluarga mantan anggota PKI untuk mengaburkan sejarah tersebut. Lewat propagandanya, kata dia, mereka ingin mengesan-

kan bahwa yang menjadi korban G 30 S tersebut adalah PKI. Padahal, yang terjadi waktu itu adalah upaya PKI untuk merebut kekuasaan. (die)

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

<http://kompas.com/kompas-cetak/0510/01/opini/2092230.htm>

Sabtu, 01 Oktober 2005

## G30S dalam Pelajaran Sekolah

Oleh: Susanto Zuhdi

2004 yang diujicobakan di Jawa Timur menuai reaksi keras. Pasalnya, pada pelajaran sejarah tidak dicantumkan kata PKI pada “Gerakan 30 September 1965”.

Para guru dan sejumlah tokoh di Jawa Timur pun dibawa ke DPR. Masalah itu dibahas dalam rapat para menteri di bawah Menko Kesra pada Juni 2005. Akhirnya Depdiknas menyatakan, dalam masa transisi mata pelajaran sejarah di sekolah menggunakan Kurikulum 1994.

### Soal fakta

Boleh berseloroh, mengapa tidak ditambah saja kata “PKI” sehingga tak perlu revisi selama enam bulan. Persoalannya tidak semudah itu, pun bukan soal fakta “G30S 1965” dengan “PKI” saja, tetapi ada dua hal lain yang diangkat.

Siswa kelas II dan III SLTA jurusan IPA dan SMK tidak diberi lagi pelajaran sejarah. Kedua, soal tuntutan agar mata pelajaran sejarah diberikan secara mandiri (terpisah) baik untuk SD maupun SLTP. Seperti diketahui, dalam Kurikulum 2004 mata pelajaran sejarah di SD digabung bersama Geografi dan Ekonomi. Adapun untuk SLTP, pelajaran Sejarah diberikan dalam kelompok IPS.

Seperti pelajaran lain, Sejarah tidak hanya memiliki ranah (ilmu) pengetahuan, tetapi juga makna subyektif berbangsa. Tentu tidak ada „Matematika Indonesia“ atau „Biologi Indonesia“. Namun, ada „Sejarah Indonesia“, seperti adanya „Sejarah Amerika“ atau „Sejarah Jepang“. Artinya, selain sebagai ilmu yang bekerja secara kritis, sejarah juga bermuatan makna yang dipegang dan nilai yang dianut suatu masyarakat pemilik sejarah itu.

(kehidupan) adalah arti yang diberikan terhadap proses dan tujuan yang hendak dicapai suatu masyarakat atau bangsa. Bangsa Indonesia dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hendak mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara dengan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai-nilai Pancasila itulah yang menjadi landasan tujuan pendidikan nasional. Jadi, tidak tercantumnya „PKI“ dilihat dari penolak Kurikulum 2004 adalah upaya sistematis bagi hidupnya kembali partai yang berlawanan dengan ideologi Pancasila.

## Kata „PKI“

Kompetensi dasar Kurikulum 2004, pelajaran Sejarah untuk SMP kelas IX (kelas III dalam pengertian lama) disebutkan "kemampuan menjelaskan peristiwa G30S dan perkembangan sosial, ekonomi, politik masa Orde Baru"

indikator, siswa dituntut dapat „menjelaskan peristiwa sekitar Gerakan 30 September 1965“. Adapun materi pokok tentang „Peristiwa G30S dan perkembangan sosial, ekonomi, politik masa Orde Baru“.

Dalam kurikulum untuk SMA dan madrasah aliyah kelas XII (kelas III pengertian lama) yang terkait kompetensi dasar adalah „kemampuan menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia di tengah usaha mengisi kemerdekaan“. Adapun materi pokoknya mengenai „Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan peralihan kekuasaan politik“.

Jelas kata „PKI“ tidak tercantum (lagi) dalam Kurikulum 2004. Dari sinilah persoalan berawal. Bukankah keterlibatan PKI dalam „Gerakan 30 September 1965“ adalah fakta. Tetapi soal keterlibatan, bukankah juga ada pihak lain? Jadi, yang terlibat bukan hanya PKI. Oleh karena itu, seharusnya ada berbagai versi atau pendapat tentang keterlibatan pihak-pihak lain dengan „G30S 1965“.

Yang tidak setuju dihilangkannya „PKI“ dalam kurikulum baru melihat ada latar belakang dan motivasi perjuangan politik dan ideologi dari kelompok tertentu. Untuk memperkuat argumentasinya, mereka menunjukkan indikator keberhasilan pembelajaran. Disebutkan, siswa (diharapkan) mampu "membandingkan beberapa pendapat tentang peristiwa Gerakan 30 September". Bagi mereka, ini adalah upaya mengaburkan fakta „keterlibatan PKI“ dalam G30S 1965.

## Akademis

Akademis berbagai pendapat tentang suatu topik, bukan hanya perlu tetapi harus dibahas. Kemampuan kritis dituntut bagi pembelajar sejarah. Sebab tidak ada sejarah tanpa pertanyaan atau permasalahan. Analisis terhadap persamaan dan perbedaan fakta dalam rekonstruksi dan memahami sejarah suatu keharusan akademis. Salah satu pertanyaan itu adalah "di mana letak perbedaan pendapat yang satu dibanding yang lain".

Prasyarat untuk melakukan perbandingan perlu dipenuhi. Guru harus memahami peta perbedaan pendapat, tersedianya buku atau bahan ajar memadai.

Lebih lanjut dikemukakan, alih-alih siswa, mahasiswa sejarah saja belum tentu mampu "membandingkan" berbagai pendapat tentang "G30S 1965". Memang ada beberapa pendapat tentang siapa pelaku atau yang terlibat gerakan. Beberapa pendapat/teori mengatakan, selain PKI pelaku "G30S 1965" peristiwa itu juga dilatarbelakangi masalah internal TNI Angkatan Darat, ada yang mengatakan peran Mayjen Soeharto, peran CIA, intelijen Inggris, dan keterlibatan KGB/Rusia, atau boleh jadi teori konspirasi.

Bukan "fakta" yang ditegaskan, tetapi "pendapat". Padahal, istilah "pendapat" adalah sesuatu yang lebih dekat dengan opini. Mungkin istilah interpretasi jauh lebih akademis jika mau digunakan. Jadi, jika sebuah perbandingan hendak

dilakukan adalah dengan menyandingkan fakta-fakta dari berbagai pendapat. Seperti diketahui dalam sejarah ada fakta kuat (hard-fact) contoh “Proklamasi 17 Agustus 1945” dan fakta lembek (soft-fact) contoh “Tan Malaka ter(di)bunuh suatu pasukan bersenjata di Jawa Timur tahun 1948”.

Sejarah adalah soal sudut pandang. Topik yang dibicarakan sebenarnya adalah masalah saat sejarah sebagai persoalan akademis dipindah ke materi pelajaran untuk pendidikan dalam arti subyektif bangsa. Akan tetapi, faktanya harus benar dalam lingkup kerja akademis.

Tujuan pendidikan, materi sejarah adalah yang disepakati (accepted history). Tidak semua fakta harus dan pantas disampaikan pada anak didik. Karena sejarah juga soal seleksi bagi tujuan yang hendak dicapai, misalnya untuk tujuan berbangsa dan bernegara. Maka, apa perlunya terlalu menekankan fakta perang antarkerajaan. Tidakkah yang perlu dicari fakta sejarah yang merekatkan hubungan antarmasyarakat di kepulauan Indonesia.

Interpretasi tetap perlu dan penting guna melihat keragaman sejarah. Apalagi bangsa ini dibangun dari keragaman suku bangsa dan kebudayaan. Meski demikian, bagi perluasan wawasan, diperlukan sejumlah acuan beragam termasuk yang kontroversial di luar buku teks yang kelak ditetapkan (accepted history).

Kurikulum 2004 dirancang dalam suasana reformasi, digulirkan sejak tahun 1998. Kurikulum 1994 perlu diganti karena bersifat sentralistik, muatan berlebih, pemberian materi yang mengulang, tidak tampak penjejaran apakah perluasan atau pendalaman. Kurikulum 2004 umumnya lebih memenuhi persyaratan pembelajaran yang disebut berbasis kompetensi.

Yang diberi tugas Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk merevisi Kurikulum 2004 menghadapi pilihan guna menetapkan fakta yang accepted, tentang „G30S 1965“. Kita tunggu.

Zuhdi Direktur Geografi Sejarah Depbudpar; Dosen FIB Universitas Indonesia

\*\*\*\*\* 0 0 0 0 0 \*\*\*\*\*

## Upaya Penghancuran Keturunan Yang Tersisa

Tingkap : Sekitar Tembok Berlin (22)

Oleh : A. Kohar Ibrahim

Jikalau dalam aksi penghancur-binasakan itu jumlah orang dewasa atau orang-tua sampai beratus-ratus ribu bahkan sejuta dua juta yang dibantai maupun dipenjarakan atau dibuang ke kamp konsentrasi seperti Pulau Buru, maka berapa banyakkah anak keturunan yang terpaksa tertinggal ? Anak-anak dari yang masih balita sampai yang muda remaja pula ?

Ketika dalam kesempatan bertukar pikiran beberapa kali dengan para pemuda mahasiswa di bagian barat kota Berlin itu, perihal anak-anak tawanan yang menderita juga jadi perhatian adanya. Maka pembicaraan semakin hangat ketika

Elke Herold memperlihatkan sebuah fotokopy foto-foto dokumentasi kejahatan kaum fasis Nazi. Di antara berjuta-juta orang yang dijadikan sasaran aksi kejahatan kaum Nazi itu memang termasuk anak-anak pula. Selain tak terbilang banyaknya anak-anak para tawanan yang terpaksa hidup dalam persembunyian, disembunyikan orang, jadi pelarian dan juga yang hidupnya terlunta-lunta atau jadi anak gelandangan.

Sedangkan anak-anak yang masih ada ibu kandung yang mengurusnya atau diurus oleh anggota keluarga lainnya dan atau jadi angkat-angkat, kehidupannya pun tak lepas dari beragam penderitaan. Semata-mata karena mereka adalah anak-anak keturunan kaum yang mendapat cap yang kejam dan keji. Sebagai anak-anak yang dianggap « tidak bersih dari lingkungan ». Jelasnya : sebagai anak-anak keturunan dari mereka yang dituduh « langsung maupun tak langsung terlibat G30S/PKI ».

Maka dari itu mereka tidak mendapat perlakuan seperti anak-anak lainnya, baik di dalam lingkungan pendidikan atau di luar itu; baik ketika masih bocah maupun setelah jadi remaja bahkan dewasa. Mereka tercatat dengan cap «tidak bersih dari lingkungan». Konsekwensinya tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah negeri, pun kemudian tidak bisa diterima sebagai pegawai negeri atau menjalani profesi yang dianggap strategis yang bisa membahayakan kekuasaan negara.

Tidak terbilang banyaknya anak-anak yang menderita karena tertinggal orang tuanya yang ditangkap atau dibunuh atau menyaksikan sendiri tragedi yang terjadi setelah Peristiwa 30 September 1965. Dari beribu-ribu naka-anak yang di-tapol-kan dan yang mengalami ragam macam penderitaan, adalah sejumlah diantaranya yang berhasil survive. Survive baik yang terus tumbuh membesar serta jadi dewasa di Indonesia, survive juga ada yang entah karena keberuntungan bisa hidup di manca-negara.

Salah seorang diantaranya, ada suaranya yang di kemudian hari kami siarkan di majalah Arena nomor 26. Berjudul: «Renungan Anak Seorang Tapol Tentang Gerakan 30 September». Dalam mana sang Anak Tapol itu secara jujur mengaku telah terpaksa dalam hal hal tertentu memakai topeng «ketidak-jujuran». Harus berdusta, demi keselamatan dirinya. Semata-mata karena mendapat cap seorang anak «tapol». Suatu keadaan yang menyakitkan. Karena tidak bisa menyatakan jati dirinya dalam suasana tercengkam ketakutan yang berkepanjangan. Hanya setelah dia berada di luar negeri, bermukim di suatu negeri yang menghargai hak-hak azasi manusialah dia merasa terbebaskan dari rasa ketakutan yang mencengkam dan selalu mebayang-bayangnya.

«Pada bulan-bulan September dan Oktober seperti sekarang ini aku sering teringat ketika masih duduk dibangku SMP» kenang sang Anak Tapol dalam renungannya itu. Selanjutnya menegaskan, «Suatu pagi ketika aku hendak siap-siap pergi ke sekolah, tiba-tiba ada berita dari salah seorang teman bila sekolahan ditutup untuk sementara.»

«Sekolahan ditutup berhubungan dengan semakin ramainya pertikaian politik. Beberapa guru pengajar tidak masuk dan terakhir aku dengar mereka ditangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara, karena mereka adalah anggota PGRI yang beraliansi dengan PKI. PKI sendiri dituduh sebagai ‘dalang’ pembunuhan para

Jendral di Ibukota. Karena tidak pergi ke sekolah, maka seperti biasa aku ingin menghabiskan waktuku main-main di Sungai Brantas yang lokasinya tidak seberapa jauh dari rumah. Namun keputusan itu ternyata keliru besar buat perkembangan jiwaku. Karena di Sungai Brantas aku melihat suatu pemandangan yang membuat aku susah menelan makanan untuk beberapa waktu lamanya. Bahkan aku percaya, jika bukan saja manusia yang punya perasaan sensitif seperti aku yang akan terganggu dengan pemandangan itu. Setiap orang yang memiliki rasa kemanusiaan pasti akan terganggu.»

«Betapa tidak,» lanjut sang Anak Tapol dalam renungannya itu. «Hari itu aku menyaksikan dengan mataku berderet-deret tubuh manusia mengapung di atas sungai tanpa kepala dan tangan masih terikat di belakang. Begitu banyak mayat manusia terbawa arus sungai dan ada pula yang parkir di tebing sungai dengan keroyokan alat untuk kembali hanyut ke mulut sungai. Pemandangan semacam itu tidak pernah aku lupakan sampai saat ini... Bulan-bulan akhir tahun 1965 adalah merupakan periode benar-benar mengusik jiwaku. Ruang gerakku sebagai anak kecil yang punya begitu banyak energi dan inisiatif benar-benar dibatasi. Aku sering dilarang pergi di luar rumah. Karena di luar rumah kedengaran sangat menyeramkan. Dan memang begitulah keadaannya.»

«Suatu pagi ketika aku pergi berbelanja ke pasar bersama seorang pembantu rumah tanggaku, aku melihat kumpulan orang nampak sangat tegang. Ada yang menangis terisak-isak, ada yang menutupi hidung dengan sarung dan banyak lagi diantara mereka yang bilang «innalillahi wa'innillilahi...» Ketika aku sendiri sampai di tempat kerubunan itu, aku melihat tubuh perempuan dengan kepalanya terpisah dari tubuhnya dengan tulisan 'GERWANI'».

Selanjutnya sang Anak Tapol mengutarakan rasa ketakutan, gelisah dan duka yang mencengkam seluruh keluarga. Terutama sekali setelah selain ayah, juga abang sulungnya ditangkap dan abang lainnya mati terbunuh. Beberapa waktu kemudian, ibunya pun meninggal lantaran menanggung derita sedih yang menyakitkan. Begitu pun dia masih merasa lebih beruntung dibanding yang dialami oleh orang banyak lainnya.

«Terutama buat mereka yang keluarganya termasuk dalam deretan nama-nama orang yang dibinasakan dengan peluru maupun pedang,» jelasnya. «Aku masih ingat seorang teman sekolah SD-ku yang bernama Saluki. Ketika ayah ibunya dibunuh dan mayatnya dibuang ke Sungai Brantas, ia harus hidup sebagai pengamen jalanan. Bila dibandingkan dengan nasib Saluki, aku masih jauh beruntung. Berapa lagi bocah seperti Saluki ? Aku tahu masih ada beberapa lagi. Tapi di Indonesia mungkin sebanyak mayat-mayat yang lalu lalang di sungai-sungai, yang bertumpukan di jurang-jurang, yang berjejal-jejal di dalam liang-liang dangkal galian mereka sendiri.»

Pertanyaan sang Anak Tapol, berapa banyak bocah-bocah semacam Saluki? Mengingat banyaknya jumlah korban keganasan teror yang dilancarkan kaum militeris Orba, jumlah anak-anak tapol yang tertelantarkan pastilah berpuluh-puluh ribu orang ! Selain kisah-kisah tukang ngamen di jalanan seperti Saluki, ada juga yang untuk survive terpaksa harus mengais tempat-tempat sampah. Malah pernah terjadi, ketika seorang ibu tapol sedang membuang sampah dari rumah tahananannya,

dia menjumpai bocah yang sedang mengais tempat pembuangan sampah. Dan bocah itu ternyata anaknya sendiri ! Yang dikenalnya berkat seutas kain yang dikenakan sang bocah yang ditinggalkannya hingga hidupnya terlunta-lunta selama beberapa tahun !

Apa yang dialami dan dilakukan oleh sang Anak Tapol dan yang seperti Saluki itu memang juga dialami dan dilakukan oleh banyak anak-anak tapol lainnya. Untuk survive. Untuk terus mengayomi hidup dan kehidupan sekalipun dalam suasana teror dan kesengsaraan luar biasa.

Kemudian, baru sekian puluh tahun kemudian, ketika mantan eks-tapol dan juga sanak-beranak keturunan mereka mulai menghirup kembali segarnya angin kebebasan setelah berkobarnya Gerakan Reformasi 1998. Maka sedikit demi sedikit umum dapat mengetahui wajah-wajah sekalian suara mereka yang sebenarnya. Sekalipun masih amat terbatas lantaran masih dibatasi dengan berbagai cara. Seperti salah satunya adalah anak mantan-tapol yang selain giat sebagai aktivis juga dengan berani menulis buku berjudul : «Aku Bangga Jadi Anak PKI».

Penulis buku yang selain menunjukkan keberaniannya, juga mengajukan judul karya tulisnya itu benar benar seperti cahaya kilat berdenyar teriring halilintar. Lebih menakjubkan lagi, penulis yang bernama Ribka Tjiptaning Proletariati itu ternyata adalah putri RM Soeripto Tjondrosaputro, anggota PKI dari kalangan ningrat Yogyakarta. Sang ayah sempat dijebloskan ke dalam penjara rezim Orde Baru. Sedangkan ibunya menjadi tahanan kota. «Karena itu,» tulis Penerbit.net. «Ribka yang ketika peristiwa Gerakan 30 September 1965 meletus berusia tujuh tahun, mesti menjalani masa kecil serba kekurangan.»

Daya upaya dengan segala cara dari kaum anti-komunis internasional dan nasional yang diwakili rezim Orde Baru untuk menghancurkan-habiskan yang jadi sasaran sampai ke sisa-sisa keturunannya, rupanya mengungkapkan pula sisi lain. Sisi yang berbeda : dari yang nampaknya keputus-asaan berubah menjadi kesinambungan asa selayaknya. \*\*\*

(seri Tingkap: Sekitar Tembok Berlin ini bersambung sampai25)

- A. KOHAR IBRAHIM lahir di Jakarta, 1942. Bermukim di Brussel, Belgia. Jurnalis, Penulis, Pelukis. Anggota dewan redaksi "Zaman Baru", yang Dewan Redaksinya dipimpin oleh Rivai Apin dan pemimpin umumnya S. Anantaguna. Sejak tahun 1950-an sampai sekarang karya tulisan dimuat diberbagai media massa cetakelektronika a.l.Seri karya tulisan DARI EROPA
- (<http://www.harianbatampos.com/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=67>),
- Kolom BUNG KOHAR
- ([http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat\\_id=1&rubrik\\_id=23&id=3808](http://kolom.depokmetro.com/v2/view.php?kat_id=1&rubrik_id=23&id=3808)